RESIST BOOK

Anton E. Lucas

One Soul One Struggle

Peristiwa Tiga Daerah

Pengantar:
Sartono Kartodirdjo
Dadang Juliantara

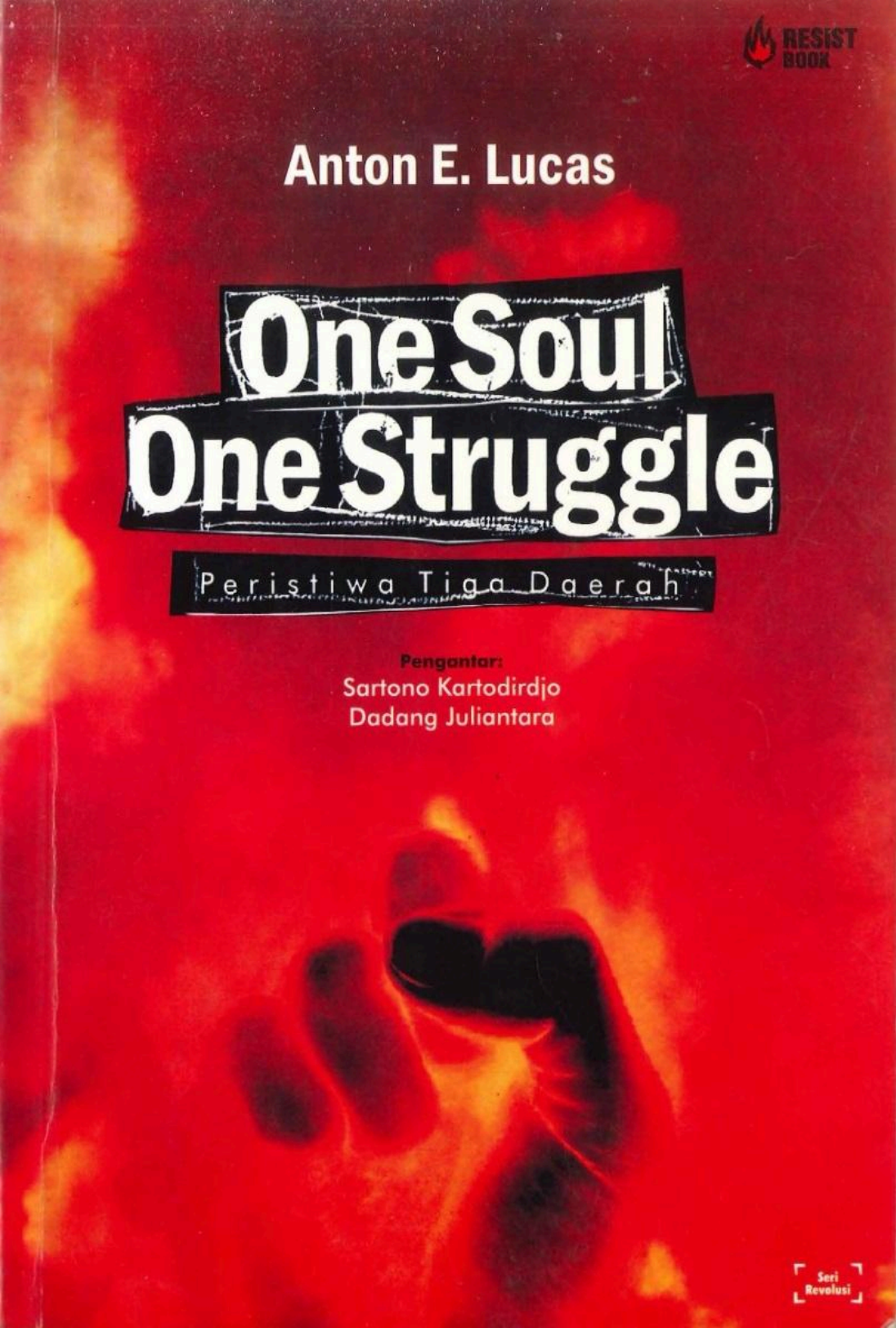

Seri Revolusi

Flinders
UNIVERSITY
ADELAIDE • AUSTRALIA

ANTON LUCAS

ONE SOUL ONE STRUGGLE:
PERISTIWA TIGA DAERAH DALAM REVOLUSI INDONESIA

Pengantar: Sartono Kartodirdjo

RESIST BOOK

Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Lucas, Anton E.
ONE SOUL ONE STRUGGLE: Peristiwa Tiga Daerah Dalam Revolusi Indonesia — Anton E. Lucas/Kata Pengantar Edisi Pertama: Sartono Kartodirdjo/Kata Pengantar Edisi Revisi: Dadang Juliantara, Yogyakarta: Resist Book, Agustus 2004

400 halaman, i - xxxiv, 14,5 X 21,5 cm
ISBN 979-3723-07-6

1.ONE SOUL ONE STRUGGLE 2. Revolusi Sosial 3. Gerakan Sosial
I. Judul

Cetakan Pertama, diterbitkan oleh Grafiti Pers, 1989
Cetakan Kedua, Agustus 2004

Penyelaras Bahasa: mmx dan R. Hidayat
Setting dan Rancang Sampul: Resist Book Design

Diterbitkan oleh:
Resist Book
Jl. Magelang km 5 Gg. Bima No. 39 RT 02/28 Kutu Dukuh
Sinduadi Sleman Yogyakarta 55284
Telp. 0274-7422 761
E-mail: resistbook@gmail.com

Didistribusikan oleh:
Ippi
Jl. Magelang km 5 Gg. Bima No. 39 RT 02/28 Kutu Dukuh
Siduadi Sleman Yogyakarta 55284
Telp. 0274 7422 761 Faks. 0274-580439 (*hunting*)
E-mail: ippibook@yahoo.com

Pencetak:
Nalil Printika
Telp. 0274 7422 761

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR EDISI PERTAMA

SARTONO KARTODIRJDO

DALAM suasana penuh perhatian kepada perjuangan sewaktu bangsa Indonesia melancarkan Revolusi Fisik untuk melawan kekuatan-kekuatan Belanda yang berusaha menegakkan lagi kekuasaan kolonialnya, adalah sangat tepat menerbitkan karangan Saudara Anton Lucas ini. Sebagai episode dari Revolusi Fisik itu, Peristiwa Tiga Daerah merupakan gejala yang cukup unik serta sangat bermakna dalam konteks jalannya revolusi secara keseluruhannya. Kalau kehidupan sehari-hari di Yogyakarta pada tahun 1945-1947 tidak banyak mengalami pergolakan dan kegoncangan, di beberapa daerah timbul pergolakan dan kekerasan yang menciptakan suasana revolusioner sesuai dengan penggambaran situasi revolusioner di negeri-negeri lain.

Pergolakan yang meletus di Sumatera Utara, Surakarta, Pekalongan, Tegal, dan Salatiga, dapat disebut sebagai pergolakan sosial atau revolusi sosial, tidak lain karena terjadinya banyak konflik sosial, perebutan kekuasaan, penumpasan lawan dengan kekerasan. Pendeknya masyarakat betul-betul mengalami krisis dan kekacauan. Golongan-golongan saling bertentangan, rakyat mengambil kekuasan di tangan sendiri, bahkan pemerintah sementara telah mengangkat penguasa sendiri.

Suasana yang penuh ketegangan, karena pertentangan dan konflik antara golongan-golongan dirasakan sebagai krisis politik, suatu situasai yang mengandung bahaya akan munculnya kekacauan serta rusaknya orde sosial. Lazimnya situasi krisis itu menyertai adanya semacam vakum kekuasaan yang didukung oleh kekuasaan pusat. "Hukum Rimba" dalam skenario itu mulai berlaku, dimana yang paling kuat akan menang. Kekuatan fisik hanya dijamin oleh adanya organisasi atau badan bersenjata, yang kemudian terkenal sebagai badan perjuangan.

Yang sangat menarik dalam skenario revolusi sosial itu adalah, antara lain: 1) Kristalisasi kekuatan sosial dalam badan perjuangan; 2) Penggolongan kekuatan sosial itu berdasarkan ideologi yang terdiri atas tiga kategori, yaitu kanan, tengah, dan kiri; 3) Polarisasi yang terjadi antara golongan itu;

4) Dominasi golongan radikal dalam episode awal Revolusi Fisik.

Kompleksitas situasi dapat dipahami dengan diadakan analisa berdasarkan empat pokok itu, ditambah oleh tahap-tahap perkembangan politik, yang menunjukkan periode meluasnya dominasi suatu golongan, periode memuncaknya, dan akhirnya masa surutnya.

Sudah barang tentu penjelasan (eksplanasi) baru lengkap kalau ditambah keterangan kausal mengenai mengapa sejarahnya perkembangan historis terjadi secara demikian. Suatu deskripsi yang jelas serta ketelitian mengupas detail dari peristiwa akan dapat mengungkapkan pertanyaan itu kesemuanya.

Dalam keterangannya Saudara Anton Lucas memaparkan kejadian-kejadian secara mendetail serta kaya akan fakta-fakta, sehingga secara keseluruhan tersusunlah gambaran yang komprehensif mengenai Peristiwa Tiga Daerah itu.

Yang sangat berharga dalam karya ini ialah bahwa fakta-fakta yang dimuat kesemuanya harus dikumpulkan dari wawancara dalam kerja lapangan yang lama dan penuh persoalan. Masalahnya ialah bahwa praktis tidak tersedia dokumen-dokumen yang mencatat peristiwa itu. Metode "Oral History" atau "sejarah lisan" dalam penelitian ini betul-betul dihayati dan cukup menunjukkan keberhasilan.

Suatu keuntungan dari karya yang tidak terlalu diarahkan oleh kerangka analisa yang ketat ialah bahwa si penulis tidak terlalu terpaksa memasukkan fakta dalam "kotak-kotak konseptual," tetapi tetap terbuka terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam perkembangan sejarah.

Meskipun demikian dari deskripsi muncullah dengan jelas peranan pemimpin, baik di kota maupun di pedesaan; cara memobilisasi pengikut, ideologi yang menjiwai gerakan golongan-golongan protes yang melampiaskan keresahannya kepada para pejabat, golongan-golongan "di bawah tanah" yang dipimpin oleh "*counter-elite*," tokoh-tokoh bandit pedesaan. Ideal tipe skenario revolusi sosial memang mewujudkan situasi di mana terjadi *umwertung aller werte* (perombakan semua nilai). Elite yang menjadi *establishment* merupakan sasaran agresi penuh kekerasan golongan-golongan rendah yang berperan sebagai *underdog*, pihak yang senantiasa ada di bawah dan menderita. Di dalam keadaan vakum kekuasaan seperti yang mudah timbul dalam masa awal revolusi, massa mudah digerakkan oleh pemimpin alamiahnya dan keresahan memberi angin untuk menggerakkan massa melakukan serangan terhadap golongan yang berkuasa dan yang berada. Dalam teori sejarawan Yunani, Polybus, telah disebut adanya *mob rule* atau pemerintahan "rakyat kebanyakan." Keganasannya meminta banyak korban, teruta-

ma dari kalangan elite. Sering kali kebuasan timbul sebagai ekspresi rasa dendam atau kemasygulan rakyat yang menjadi obyek eksploitasi pada masa sebelumnya, seperti dalam kasus Tiga Daerah, yaitu penindasan pada zaman Jepang.

Proses formasi kekuatan sosial sedang berjalan, maka belum ada pelembagaan yang mantap, sehingga situasi menjadi mengambang serta sangat labil, maka situasi sangat eksplosif karena ketegangan antargolongan setiap saat dapat meledak. Setiap provokasi dapat menimbulkan pecahnya bentrokan.

Gejala-gejala seperti penculikan (menyerobot), dan penurunan penguasa (pendaulatan) menandai percaturan kekuasaan sehari-hari. Cukup banyak keleluasaan bagi tindakan kekerasan, seperti pembalasan dendam, penahanan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Diukur menurut model di atas, Peristiwa Tiga Daerah benar-benar mencakup pelbagai gejala seperti yang teruraikan itu. ciri-ciri revolusi sosial tercakup di dalamnya, suatu perbandingan dengan kasus Sumatera Utara, Surakarta, dan Salatiga akan menemukan banyak sedikitnya karakteristik-karakteristik yang sama. Sudah barang tentu yang menarik bagi studi sejarah ialah keunikan peristiwa-peristiwa itu yang memberikan warna lokal yang tak ada persamaan atau bandingannya.

Dipandang dengan perspektif itu, maka studi Peristiwa Tiga Daerah ini adalah studi sejarah murni yang penuh dengan detailnya, sehingga "bagaimana terjadinya" peristiwa itu sepenuhnya dapat diungkapkan. Penggambaran deskriptif-naratif ini membuka kesempatan leluasa untuk kemudian melangkah ke analisa struktural, sehingga dapat dilakukan eksplanasi sepenuhnya.

Untuk studi sejarah revolusi Indonesia tidak berlebih-lebihan perlu ditegaskan, bahwa uraian deskriptif sangatlah tepat dan diusahakan sebagai metodologi juga paling memadai metode *oral history* atau sejarah lisan.

Bagi semua yang akan melakukan penelitian dalam bidang itu, maka karya ini dapat dipakai sebagai model dari metodologi itu. Di samping itu dengan penuh menyadari bahwa bahan dokumen tersebut sangat langka, karya ini merupakan juga suatu perintisan yang sangat berharga bagi sumbangan kepada penulisan sejarah perjuangan bangsa.[]

Yogyakarta, 7 Oktober 1986
Sartono Kartodirjdo

KATA PENGANTAR EDISI REVISI

"DAERAH" TIGA PERISTIWA*

DADANG JULIANTARA

APAKAH yang akan terjadi ketika suatu "kekuasaan" ditinggalkan oleh pemegangnya tanpa kejelasan siapa yang akan memegang kendali kekuasaan berikutnya? Pertanyaan ini sesungguhnya akan menjadi jelas dan mudah dijawab apabila penguasa (pemegang "kekuasaan" aktual), meninggalkan arena karena sebuah penyingkiran yang terencana dan sistematis. Atau dengan kata lain, pemegang kekuasaan baru adalah mereka yang sejak awal ingin merebutnya dan telah mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan tersebut.

Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika yang "mengusir" penguasa adalah kekuatan yang plural—bukan saja "dari dalam" tapi juga "dari luar"—dan terjadi secara spontan dan tidak terencana? Bisa dipastikan, masalah besar akan segera menyergap. Terlebih lagi, apabila proses peralihan model itu terjadi pada sebuah "kekuasaan" dengan struktur hierarki yang ketat dan menyimpan "dendam politik" yang mendalam, sebagai akibat dari penindasan yang tiada banding. Dalam situasi yang demikian, berbagai kekuatan politik yang ada, akan berusaha ambil bagian, ambil peran, dan jika mungkin merebut "kekuasaan" yang ada dengan semua cara yang tersedia. Fenomena tersebut laksana tanah kosong yang ditinggalkan pemiliknya, dan kemudian diperebutkan oleh mereka yang datang. Siapakah yang akhirnya menjadi pemenang?

Masa lalu Indonesia, khususnya pada kurun awal pembentukan negara—sebagai organisasi "kekuasaan" pada tahun 1945—menyimpan kisah

*Terima kasih pada R. Yando Zakaria atas komentarnya pada naskah awal pengantar ini.

kelam tentang peristiwa tersebut. Kita bisa menemukan kasus serupa (tapi tidak sama) pada peristiwa tahun 1998, dalam sebuah kurun ketika gerakan massa menguat, tekanan internasional meninggi dan faksionalisme menajam, dan penguasa pergi tanpa terduga. Barangkali semua pihak percaya bahwa perubahan akan datang, namun (dapat dikatakan) tidak ada yang mengira bahwa momentum peralihan terjadi pada 21 Mei 1998. Untuk menggambarkan ketidakterdugaan datangnya momentum peralihan ini, mungkin kita bisa meminjam ungkapan Sarimin (Bupati Brebes, 1965): "...kami mengira bahwa kemerdekaan itu hal yang masuk akal, tetapi *proklamasi*[1] *adalah hal yang tak pernah muncul dalam benak kami* (cetak miring Penulis). Kita tidak tahu bahwa suatu negara dapat dengan mudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya..." (hlm. 90).[2]

Kurun dimana "kekuasaan" ditinggalkan oleh pemegang (awalnya), dan kemudian diambil alih pihak lain, tentu saja merupakan masa yang penuh dengan pergolakan dan ketidakpastian. Peralihan kekuasaan telah terjadi. Namun, pertanyaannya adalah apakah peralihan tersebut menjadi momentum bagi perombakan semua nilai (*umwertung aller werte*) untuk mencapai transformasi sosial atau hanya sekedar pergantian penguasa (pemegang kekuasaan!) belaka. Jawabannya, tentu saja akan sangat bergantung pada proses ditinggalkannya "kekuasaan" tersebut, konstelasi kekuatan politik yang ada dan sejarah—atau endapan peristiwa-peristiwa yang mampu membangkitkan perlawanan (fisik). Pemahaman yang utuh akan ketiga segi tersebut, akan membuat kita dapat mengenali dengan jelas apa yang sebetulnya sedang berlangsung, dan juga akan mempermudah kita dalam memprediksi apa yang akan berlangsung, atau akhir dari keseluruhan peristiwa.

---

[1]Yang tidak terduga sebelumnya adalah momentum (persis) proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945, adalah momentum yang tidak direncanakan sebelumnya. Semua pihak barangkali telah mempersiapkan kemerdekaan, namun kapan hari H tersebut, belum ada satu pun pihak yang secara persis merencanakannya.

[2]Sebagai bahan perbandingan, dapat disimak ulasan Hans Antlov: "...peristiwa ini mengejutkan bahwa presiden Indonesia dapat diganti secara tiba-tiba adalah sesuatu yang benar-benar baru. Di Indonesia selama tiga dekade terakhir mustahil bagi rakyat untuk mengganti kepala desa yang tidak disukai warganya..." (lihat Hans Antlov, *Negara Dalam Desa, Patronase Kepemimpinan Lokal*, Yogyakarta: LPU—pada bagian epilog). Pandangan yang senada datang dari Olle Tornquist, yang menyatakan: "...itu kesalahan besar yang pernah saya lakukan. Saya tidak menduga Soeharto jatuh secepat itu...." *Kompas*, 04 Februari 2004.

Buku Anton E. Lucas ini, yang merupakan karya disertasi (*The Bamboo Spear Pierces the Payung: The Revolution Against the Bureucratic Elite in North Central Java in 1945*), kiranya dapat dilihat sebagai suatu lukisan tentang dinamika yang berlangsung dalam suatu kurun waktu penuh kegentingan tersebut. Lukisan detail Anton E. Lucas, yang bila dilihat dengan pertanyaan di atas, kiranya akan dapat menyajikan suatu pemahaman yang lebih tajam mengenai suatu peristiwa dalam kurun "peralihan kekuasaan." Segi apa yang penting untuk dilihat dan menjadi suatu bahan pelajaran bagi para penggerak perubahan di masa kini? Apakah benar bahwa peristiwa di tiga daerah tersebut, merupakan interpretasi lokal tentang Revolusi Indonesia, sebagaimana yang ditulis oleh Abdurachman Surjomihardjo (*Prisma* 8, Agustus 1981), atau ketidaksiapan "elite nasional" atau bahkan bentuk represi dan restriksi "elite nasional", atas tuntutan revolusi sosial yang dilancarkan akar rumput, sebagai kelanjutan dari revolusi nasional (pembebasan nasional).

Kekosongan Kekuasaan

Kemerdekaan merupakan hal yang sudah sangat diyakini oleh para aktivis pejuang kemerdekaan. Kapan waktu kemerdekaan? Barangkali masalah ini (waktu), bukanlah soal teknis (mengenai kapan proklamasi harus dibacakan), melainkan masalah yang sangat politis (bahkan militer). Pengumuman resmi Dai Nippon tentang penyerahannya pada Sekutu baru diterima Jakarta tanggal 15 Agustus 1945 sore hari. Berita ini tidak terduga. Banyak dari mereka—baik penguasa Jepang di Indonesia, khususnya Jakarta ataupun para aktivis kemerdekaan—tidak mengira bahwa bala tentara Jepang dapat menyerah dengan mudah dan cepat.[3] Kekosongan kekuasaan terjadi, persis setelah Jepang (dipaksa) menyerah.

Apa yang terjadi pada (kurun) kosongan kekuasaan tersebut? Krisis politik! Yakni suatu kondisi dimana legitimitasi, legalitas dan kekuatan riil, dari penguasa *de facto* dan *de jure*, mencapai masa transisi di titik nol. Muncul ketidakjelasan mengenai sumber otoritas utama yang mampu menggerakkan kekuasaan. Kelemahan pihak lawan (penguasa Jepang) telah menjadi pendorong prakarsa pengambilalihan (secara cepat).[4] Dalam situasi yang

[3]Sekedar gambaran mengenai masalah ini, lihat Suhartono W. Pranoto, 2001, *Revolusi Agustus, Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*, Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama.

[4]Teks proklamasi menyebutkan: "...hal-hal mengenai pemindahan ke-

demikian, kekuatan anti-Jepang (anti penguasa asing), dengan mudah menyatu, menjadi kekuatan baru, yang siap mengambilalih kekuasaan. Namun, tepat disebelahnya, bayangan akan keberhasilan, sukses, atau kemenangan, dengan cepat memicu kalkulasi perolehan (baca: porsi kekuasaan), dan karenanya potensi polarisasi telah tersedia. Krisis politik yang membawa perasaan tidak aman dan kegelisahan timbul karena kontrol penguasa militer Jepang mengundurkan diri bersamaan dengan datangnya ancaman kembalinya kekuasaan kolonial Belanda.[5]

Sebagaimana diketahui bahwa di tingkat elite, krisis politik dalam arti legalitas (formal), tidak berlangsung lama. Pada 17 Agustus 1945, telah diumumkan kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, yang dengan demikian, kekuasaan formal, telah (sedang) diambil alih. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kekuasaan legal (formal) tersebut, dapat menjadi efektif? Pengalaman reformasi di zaman sekarang (1998), memperlihatkan dengan sangat jelas, bahwa peralihan formal, tidak dengan sendirinya mengalihkan seluruh sumber daya kekuasaan. Datanglah pada berbagai peristiwa menjelang dan pasca kejatuhan Soeharto, seperti: kerusuhan di Jakarta, Solo, Surabaya, Ujung Pandang, dan Medan, perisitiwa pembunuhan terhadap "dukun santet" di Banyuwangi (dan sekitarnya), kerusuhan SARA di Kebumen (dan menjalar ke Gombong, Karanganyar, Prembun, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purworejo), Ketapang, kerusuhan SARA di Kupang, sampai dengan kejadian-kejadian tragis di Ambon, dan daerah-daerah lainnya.[6] Selain peristiwa yang menurut wacana umum disebut sebagai kerusuhan, terdapat pula kasus-kasus pergolakan politik lokal, seperti penggulingan kepala desa di beberapa daerah dan juga kasus-kasus perusakan simbol-simbol negara, terutama menjelang kejatuhan Soeharto. Konflik vertikal dan horisontal, menjadi bagian dari peralihan kekuasaan legal (formal). Dapat dikatakan bahwa meskipun peralihan kekuasaan sudah berlangsung, namun yang sedang terjadi pada dasarnya adalah kekosongan kekuasaan. Dalam kekosongan kekuasaan seperti yang mudah timbul dalam masa awal revolusi, massa mudah digerakkan oleh pemimpin alamiahnya dan keresahan

---

kuasaan, dll. diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya..."

[5]Lihat Sartono Kartodirdjo, 1981, "Wajah Revolusi Indonesia di Pandang dari Perspektivisme Struktural," *Prisma* No. 8, LP3ES.

[6]Lebih jauh mengenai masalah ini, lihat: Laporan Akhir Penelitian tentang "Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan Pemicu". Kerja sama P3PK UGM dan Departemen Agama, 1998.

memberi angin untuk menggerakan massa melakukan serangan terhadap golongan yang berkuasa dan yang berada.[7]

Kekosongan kekuasaan sebagai sebuah peristiwa, tidak lain dari sebuah kondisi yang memungkinkan terjadinya pergolakan. Kekosongan kekuasaan adalah arena yang terbuka, yang memberikan ruang bagi berbagai kekuatan politik untuk ambil bagian dalam penataan ulang struktur kekuasaan. Lukisan Anton E. Lucas, cukup jelas memberikan gambar tentang bagaimana *regrouping* politik terjadi, bahkan sampai pada kristalisasi kekuatan dalam bentuk badan-badan perjuangan,[8] yang berbasis pada polarisasi ideologis. Secara politik, dapat dibedakan adanya tiga kekuatan utama, yakni kekuatan konservatif (yang merupakan elemen-elemen pendukung penguasa kolonial atau fasis Jepang), kekuatan moderat, dan kekuatan radikal (yang umumnya merupakan sayap kiri, komunis). Sebagian ciri dari kekosongan kekuasaan tersebut adalah sikap (saling) menunggu, terutama dari kalangan elite birokrat (lokal), pangreh praja" dan sikap menghalangi suatu prakarsa dari bawah. Saling menunggu, dapat dipahami bukan saja sebagai akibat dari ketidakjelasan atas apa yang sedang berlangsung, akan tetapi dapat pula sebagai refleksi dari pertarungan siasat antar berbagai kekuatan yang ada.

---

[7]Lihat Sartono Kartodirdjo, Kata Pengantar buku Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah*, 1989.

[8]Sebagai bahan perbandingan—di masa reformasi suatu gejala liberalisasi politik dan kristalisasi kekuatan politik terjadi, dalam bentuk partai politik. Persis setelah Soeharto turun dan peluang pemilu terbuka, berbagai partai politik didirikan. Tercatat pada bulan Mei berdiri 33 parpol, bulan Juni 25 parpol dan bulan Juli 18 parpol. Pendirian parpol terus berlangsung, bak jamur di musim hujan, sampai dengan tahun 1999. Berdirinya berbagai parpol ini tentu dengan alasan dan landasan yang sangat beragam. Namun, dapat dikatakan bahwa pada umumnya, pendirian ini belum terencana sepenuhnya. Bahkan bila dilihat sejarah berdirinya Partai Keadilan (kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), yang merupakan partai kader yang dikenal solid, tidak ada suatu rencana matang sebelumnya. Keputusan diambil melalui polling dan musyawarah, dan memang sebagian besar "basis" (sekitar 68%) menghendaki pendirian partai politik. Lebih jauh mengenai ini, lihat Ali Said Damanik, 2002, *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Bandung: Teraju.

"Tanggapan mula-mula kaum elite tradisional terhadap pengibaran pertama Sang Merah-Putih di keresidenan itu adalah serupa: "turunkan itu!" katanya kepada kaum perjuangan, "karena kita tidak mendapat perintah resmi dari Dai Nippon." Sikap demikian di masa Kemerdekaan jelas menandai keraguan akan makna Proklamasi (hlm. 93).

Pergolakan: Perebutan Kekuasaan

Suatu kekosongan kekuasaan tidak lain mencerminkan pudarnya legitimitasi penguasa atau pulihnya keberdayaan rakyat. Hal yang segera menjadi masalah adalah siapakah yang layak untuk mengambil alih kekuasaan, manakala sambungan atas (vertikal) telah putus. Apakah elite lama (elite birokrat) yang berhak untuk melanjutkan kekuasaan, ataukah perlu suatu kekuatan baru? Kalau elite birokrat lokal bersikap menunggu, maka hal tersebut tidak perlu dibaca (hanya) sebagai sikap tidak tahu, melainkan suatu strategi untuk mempertahankan *status quo*. Pada titik inilah tabrakan awal mulai terjadi, yakni antara pihak yang tidak menghendaki perubahan, yang masih ingin menunggu kejelasan dari pihak Jepang dan pihak yang menghendaki perubahan, terutama untuk mengakhiri segala bentuk (dan jenis) penindasan. Mereka yang ingin mempertahankan *status quo*, tentu sudah sangat jelas, namun siapakah yang hendak mengambil-alih, merebut, atau menggantikan kedudukan yang lama? Apakah pihak yang terakhir ini memiliki cukup legitimitasi dan legalitas? Atas dasar apa kekuasaan baru akan (dapat) didirikan? Masalah-masalah ini, patut diduga menjadi faktor yang ingin membangun suasana ketidakpastian dan sikap saling menunggu.

Peralihan kekuasaan yang berlangsung pasca proklamasi di tingkat daerah, sudah barang tentu tidak dibekali atau tidak berdasarkan perangkat legal-formal. Justu peralihan tersebut membawa implikasi yang sangat jauh, yakni terjadinya destruksi atas simbol-simbol kekuasaan lama, termasuk hukum, etika, atau nilai. Oleh karena itu, sangat mustahil bila pembentukan kekuasaan baru mengandalkan proses formal, melalui legalitas yang sudah ada—meminjam Anton E. Lucas: perubahan itu bukanlah sesuatu yang akan begitu saja mereka serahkan.[10] Perebutan kekuasaan tidak berjalan dalam mekanisme demokratis, karena perangkat hukumnya tidak ada dan perubahan itu sendiri sedang dalam maksud membentuk prosedur. Suatu perebutan kekuasaan berjalan melalui mekanisme alamiah, berdasarkan pada kekuatan yang tersedia. Kekerasan menjadi (salah satu) sarana utama[11] di antara cara politik yang tersedia.

---

[10]Lihat Anton E. Lucas, "Perisriwa Tiga Daerah: Revolusi Sosial atau Pemberontakan," dalam Audrey R. Kahin, 1990, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Grafiti.

[11]Maka menjadi sangat bisa dipahami mengapa lenggaong memiliki peran yang sangat besar. Keterlibatan dan posisi strategis lenggaong, bukan saja karena kekuatan fisik yang mereka miliki, akan tetapi karena sejak awal, mereka terlibat dalam proses politik (baca: politik keamanan). Sebagai sebuah contoh, seorang camat sebelum

Proses (perebutan kekuasaan) yang berlangsung, dapat dilihat sebagai tiga tahap penting, yakni: pertama, suatu proses dimana upaya menghancurkan simbol-simbol kekuasaan formal dilakukan, terutama melalui aksi pelucutan pejabat lokal (setempat). Massa yang sudah siap, dengan mudah diarahkan geraknya sesuai dengan keinginan pemegang otoritas. Penurunan pejabat secara paksa, menjadi pertanda bahwa kekuasaan telah lumpuh dan sekaligus telah diambil alih.[12] Kedua, suatu proses dimana sumber-sumber ekonomi diambil alih, terutama dari kalangan pengusaha, tuan tanah, atau orang kaya, yang telah diidentifikasi oleh massa sebagai bagian dari penguasa. Ketiga, suatu proses konsolidasi dalam hal ini dilakukan dua arah sekaligus, yakni: (1) upaya mengisi kekosongan jabatan, yang dalam masalah ini terjadi pula dinamika, karena siapa yang duduk menjadi sangat penting; dan (2) upaya untuk melakukan konsolidasi legalitas, terutama melalui jalan mencari dukungan dari apa yang diakui sebagai pusat kekuasaan (Jakarta!).

Aksi yang pertama, yakni penurunan pejabat setempat memang tidak terlalu sukar. Sebagaimana diketahui bahwa menjelang akhir pendudukan, hubungan antara pangreh praja dan rakyat telah rusak tanpa bisa diperbaiki

---

perang mengungkapkan kembali pengalamannya yang menarik: "....saya membuat grafik statistik selama sepuluh tahun lebih. Saya tahu, manakala seroan pajak menurun, uangnya pasti telah digunakan oleh lurah. Bila seorang lurah tidak bisa menyetor pajak desanya ke kantor kecamatan, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa ia akan merampok desa lain dengan menggunakan gerombolan bayaran serengah bandit (lenggaong) agar segera mendapatkan uang itu..." (hlm. 16). Kesaksian lain, seorang nasionalis dari Kewedanaan Comal, tempat terdapat banyak lenggaong, melukiskannya sebagai berikut: "..kalau pencuri hampir setiap desa ada orang kerjanya mencuri; tetapi lenggaong tidak mesti. Lenggaong adalah orang yang kuat fisik dan punya ilmu-ilmu kesaktian (*ngelmu*), untuk menjadi lenggaong memerlukan waktu lama belajar silat dan ilmu-ilmu dalam. Dan kalau sudah mendapat sebutan lenggaong nafkah hidupnya bukan dari mencuri, tetapi dari orang lain yang memerlukan perlindungan keamanannya. Pada jaman penjajahan, para lenggaong umumnya disegani oleh rakyat, sebab tindakannya tidak mengganggu rakyat, dan yang diganggu adalah aparat Belanda atau kalau rakyat yang diganggu dikategorikan tuan tanah..." (hlm. 33).

[12]Proses yang dapat dilihat sebagai penghancuran legalitas (formal), melalui penghancuran semua simbol (formal) kekuasaan yang ada. Proses ini dimaksudkan sebagai langkah untuk menghilangkan sumber legalitas bagi pemegang kekuasaan, sehingga (ia) tidak lagi dapat menggerakkan sumber daya kekuasaan, seperti tidak lagi dapat menggerakkan aparat kekerasan. Proses ini juga bermakna sebagai momen pembebasan rakyat atas hegemoni penguasa, sehingga rakyat (massa) tidak lagi memiliki rasa takut, dan menyadari sepenuhnya bahwa penguasa telah lumpuh. Rakyat juga menyadari, pada saat itu, bahwa apa pun tindakan yang mereka lakukan, tidak akan membawa risiko politik (ataupun hukum).

lagi. Pangreh praja juga kehilangan dukungan dari kelompok pergerakan. Mengutip lagi dr. Muryawan bahwa ketidakjujuran para pangreh praja dalam sistem distribusi sandang dan pangan di masa pendudukan Jepang, memunculkan benih-benih dendam yang amat kuat di kalangan rakyat.[13] Elite birokrat di hadapan rakyat tidak lain dari kepanjangan tangan penguasa kolonial, yang telah melakukan penindasan lebih dari majikannya. Melalui kasus-kasus pemicu, seperti kelambanan membagi beras, pakaian, atau ketidakjelasan dalam mengambil sikap, dapat dengan mudah memicu kemarahan massa, dan pada saat itulah "pengusiran" dilakukan, bahkan tidak jarang menggunakan model yang sangat populer, yakni "mendombreng." Pengambilalihan sumber daya politik dan kemudian diikuti penjarahan ekonomi, menjadi inti dari proses perebutan kekuasaan.

Stabilisasi, Integrasi, dan Marjinalisasi

Suatu revolusi sosial tidak hanya ditentukan oleh proses perebutan kekuasaan, melainkan juga pada proses setelahnya. Perebutan kekuasaan yang paksa, cepat, dan tidak menggunakan prosedur formal yang berlaku, tidak dapat serta merta dipandang sebagai sebuah revolusi, akan tetapi baru pada tahap awal sebuah proses menuju revolusi sosial. Meminjam Wertheim, "...suatu revolusi selalu bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan masyarakat atau susunan kekuasaan yang bercokol; sedangkan semua jenis gangguan ketertiban, apa pun namanya, tidaklah memiliki kemauan akan perubahan fundamental ini dan hanya bertujuan untuk memberikan suatu pukulan terhadap para pemegang kekuasaan atau bahkan mencopot mereka dari kekuasaan itu atau secara fisik menyingkirkan mereka..."[14] Apa yang terjadi

[13]Ia masih ingat benar suatu percakapannya dengan seorang pasien, seorang sais dokar mengenai ketidakadilan itu: Perasaan pembalasan dendam, boleh saja gambarkan dengan pembitjaraannja toekang dokar, ketika saja masih mendjalankan koewadjiban sebagai dokter, bahwa mereka sebagai orang ketjil merasa dimakan oleh jang atasan, dan kemoedian hari menoeroet kejakinan mereka akan ada pembalsannja." (hlm. 71). Kasus lain yang menunjukan kebencian rakyat pada pejabat adalah kasus pembunuhan atas diri camat. Pembunuhan terhadap Camat Comal adalah akibat dari intimidasi kejam yang dilakukan camat dan para pembantunya, lurah, carik dan polisi terhadap kaum tani. Seperti tindakan Camat Raden Bambang Basirun, yang memasuki dan naik ke langit-langit rumah petani untuk mencari padi yang disembunyikan. Lebih-lebih lagi dia mempunyai nama buruk sebagai pejabat Jepang yang biasa menggunakan kekerasan fisik terhadap rakyat dengan seenaknya menampar muka orang..." (hlm. 68).

[14]Lebih jauh lihat, WF Wertheim, *Gelombang Pasang Emansipasi*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

kemudian setelah pelucutan kekuasaan dilakukan?

Masalah awal yang segera muncul ketika kekuasaan baru terbentuk adalah masalah legitimitasi dan legalitasnya. Manakala kalkulasi politik mulai dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ambil bagian dalam proses perebutan kekuasaan tersebut, dari sanalah masalah mulai menyeruak. Ketidakpuasan segera mewarnai gerak kekuasaan yang baru, terutama apabila penguasa baru terindikasi lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya, dan hendak menyingkirkan yang lain. Namun, dalam logika yang sangat wajar, penguasa baru tentu akan segera melakukan stabilitasi, dengan maksud hendak mulai mengisi kekuasaan yang baru dengan praktik "pembangunan," agar massa rakyat dapat segera merasakan makna dari peralihan kekuasaan. Untuk dapat melakukan "pembangunan" dengan baik, maka tidak terelakkan bila yang berkuasa melakukan konsolidasi, dan dengan demikian, rekrutmen politik lebih mengarah pada kelompok dalam, atau jarang melibatkan kelompok luar.[15] Proses inilah yang kerap menjadi picu masalah, dengan berbagai isu yang menjadi dalihnya.

Pengalaman revolusi yang terjadi di "Tiga Daerah" (Tegal, Brebes, dan Pemalang—*Peny.*) memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana pergolakan terjadi. Prakarsa "front rakyat yang radikal"[16] yang terlihat sangat aktif, militan dan kuat, pada akhirnya membuat mereka mengambil posisi penting pada arena kekuasaan yang baru (terbentuk). Berkuasanya golongan kiri menimbulkan reaksi keras dari golongan Islam dan golongan lain yang merasa dirugikan. Kahin menggambarkan, "...suatu ketegangan antara Front Rakyat yang radikal dengan kelompok Islam mengenai tujuan revolusi, ditambah dengan soal kegiatan para bandit, terutama di Tegal, membantu terwujudnya aliansi anti-radikal antara kaum Islam dan TKR (Tentara Kea-

[15]Realisasi proses konsolidasi kekuasaan setelah perebutan kekuasaan, tentu saja harus dapat dipahami dengan dingin. Sayangnya, wacana umum masih kurang dapat menyelami kenyataan ini, sehingga sering muncul kritik yang seberulnya kurang dapat diterima dengan suatu akal sehat, meski mungkin harapannya bisa diterima. Kasus turunnya Gus Dur, sebagai contohnya. Di masa konsolidasi, Gus Dur, mulai menyingkirkan "orang luar" dan bergerak memperkuat konsolidasi ke dalam, dengan merekrut "orang dalam." Akibatnya, "kawan koalisasinya" merasa ditinggalkan, dan kemudian mengadakan kalkulasi ulang. Akhirnya Gus Dur jatuh.

[16]Abdurrachman Surjomihardjo, menyatakan, "...salah satu kekuatan politik yang penting selama peristiwa Tiga Daerah itu, walaupun tidak dapat diukur secara numerik, ialah gerakan bawah tanah PKI..." Lebih jauh lihat Abdurrachman Surjomihardjo, "Peristiwa Tiga Daerah, Suatu Interpretasi Sejarah: Revolusi Sosial Menyambut Proklamasi Kemerdekaan," *Prisma* No.8 tahun 1981–LP3ES, Jakarta.

manan Rakyat), yang kemudian menghancurkan Front Rakyat dan menawan para pemimpinnya sebelum pemerintah pusat ikut campur tangan secara langsung ..."[17] Mengapa TKR terlibat dalam upaya perebutan kekuasaan, melalui proses penyingkiran golongan radikal. Lukisan Anton E. Lucas sebenarnya telah menjelaskan. Surjomihardjo, dengan lugas menyatakan, "...pada umumnya TKR merupakan kekuatan konservatif dalam kehidupan politik Indonesia di tahun 1945 .... empat hari setelah kaum radikal berkuasa, golongan militer untuk pertama kali menunjukan peranannya mempertahankan 'ketertiban' dan *status quo*. Korps perwiranya dengan kesetiaannya yang mendalam kepada golongan priyayi yang telah ditumbangkan selama revolusi sosial, juga merasa terancam oleh PKI dan golongan Muslim radikal di Tiga Daerah...."

Mereka yang disebut sebagai "elite nasional" pada dasarnya tidak memiliki suatu sikap yang tegas, terhadap pergolakan yang sudah berlangsung. Akan tetapi, bila dilihat dengan hati-hati, sebenarnya "elite nasional," telah membangun logika tersendiri mengenai apa yang disebut dengan proses stabilisasi, yang menjadi bagian dari proses integrasi nasional. "Jakarta", tentu saja menghendaki ketenangan di daerah-daerah, agar proses politik dan diplomasi yang sedang dibangun, dapat berjalan lancar, tanpa meninggalkan kesan, citra yang negatif terhadap Republik yang baru berdiri. Sjahrir, sebagai contoh, hanya bisa diam. Bahkan menurut Johan Syahruzah, Sjahrir bukan pendukung feodalisme, tetapi tidak pula dapat menerima revolusi sosial yang tidak mematuhi hukum. Di bagian lain, Hatta, menganggap rakyat terlalu banyak mempunyai kedaulatan dan pangreh praja hanya dapat diganti oleh pemerintah. Apa yang dapat dikatakan bahwa sebetulnya, "elite nasional," tidak sepakat dengan apa yang sudah berlangsung di daerah (Tiga Daerah), dan kemudian membenarkan proses stabilitas bagi kepentingan integrasi nasional, kendati proses tersebut pada dasarnya adalah gerakan marjinalisasi terhadap kelompok-kelompok radikal, yang secara kongkret terlibat aktif dalam upaya-upaya dekolonisasi.

Cap sebagai pengacau keamanan, penjara dan hukuman mati, menjadi imbalan yang dibayar tunai pada gerakan radikal. Tokoh gerakan radikal, seperti Kutil, menunjukkan dengan sangat jelas watak revolusionernya: tidak memberi ruang kompromi. Kutil tidak meninggalkan pesan dan memilih menghadapi butiran peluru yang hendak membunuhnya dengan mata ter-

[17]Lihat Audrey R. Kahin, 1990, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Grafiti, hlm, 272.

buka—pada 5 Mei 1951. Anton E. Lucas memberi gambaran yang sangat dramatik dan sopan: "...ternyata revolusi nasional Indonesia tidak sanggup mengambil keputusan tentang makna Peristiwa Tiga daerah. Satu-satunya yang disetujui ialah mengambil seorang *lenggaong* sebagai kambinghitam, seorang wakil dari tradisi protes sosial petani di Jawa." Apakah ini berarti bahwa elite nasional telah menghentikan gerak sejarah, dengan jalan menghentikan proses revolusi nasional (pembebasan nasional) agar tidak berlanjut menjadi revolusi sosial.

Makna dan Konteks Kekinian

Tiga Peristiwa penting di Tiga Daerah, yakni kekosongan kekuasaan, perebutan kekuasaan dan stabilisasi kekuasaan melalui proses marjinalisasi kelompok radikal, kiranya penting untuk menjadi bahan kajian dan refleksi dari para penggerak pembaruan. Penelusuran Anton E. Lucas, yang sangat rinci (kaya), sebetulnya telah sangat membantu untuk memberi penjelasan mengenai apa yang sedang berlangsung, dan dari sana kita dapat memberikan makna yang mendalam mengenai keseluruhannya. Gambaran yang rinci tentu sangat diburuhkan, agar dapat diberikan konteks yang tepat pada setiap peristiwa. Tindakan mendombreng pangreh praja, atau tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa, tentu saja akan mudah dianggap sebagai "kekerasan yang tidak patuh hukum" atau sebagai sebuah "tindakan kriminal," apabila tidak diberikan konteks yang tepat. Cara pajabat "pusat" yang menilai apa yang terjadi di Tiga Daerah sebagai "kriminal," merupakan contoh dari apa yang dapat dipandang sebagai ketidakmampuan (elite) memahami apa yang sudah berlangsung di kalangan massa rakyat, karena mengabaikan konteks.

Dalam situasi dimana hukum (legalitas), telah kehilangan legitimitasinya, sebenarnya yang terjadi adalah kekosongan hukum. Di hadapan rakyat, hukum adalah alat penindas yang nyata. Pengalaman rakyat memperlihatkan bagaimana penguasa merampas milik rakyat dengan menggunakan hukum, dan mengirim siapa saja yang mempertahankan haknya ke penjara. Di Tiga Daerah, yang kehilangan legitimitasi bukan saja hukum, tetapi lebih dari itu, nilai itu sendiri. Para penguasa, elite, atau mereka yang dianggap terpandang, yang menjadi pemilik "kebenaran" dalam pengalaman hidup rakyat, justru dianggap sebagai mereka yang mudah merampas milik rakyat. Mereka tidak melindungi rakyat, bahkan ikut memeras atau menindas rakyat. Mereka menjadi kaki tangan penguasa kolonial, dan malah bertindak lebih kejam, sehingga rakyat mencatat dengan sangat jelas dalam memori

mereka. Oleh sebab itu, dalam kurun peralihan kekuasaan, sesungguhnya tidak ada yang dapat dijadikan rujukan nilai, karena destruksi sedang berlangsung. Apa yang dinyatakan sebagai "elite nasional," pada dasarnya tengah berproses untuk menjadikan dirinya sebagai "elite nasional." Dapat dikatakan bahwa mereka adalah para pemimpin yang mendudukkan diri mereka sendiri di atas kursi tersebut. Tindakan siapa sebetulnya yang paling benar menurut hukum dan moral?

Sangat sulit memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kesulitan ini sebetulnya dapat memberikan makna bahwa apa yang terjadi pada akhir tahun 1945, dan proses selanjutnya adalah suatu proses yang sangat politis, yakni upaya menyingkirkan salah satu pihak yang ikut ambil bagian dalam proses pergolakan, dengan menggunakan jargon hukum dan moral. Penyingkiran dengan menggunakan modus kriminalisasi menjadi sangat unik. Mengapa mereka yang semula dianggap berjasa, terlibat aktif, dengan sangat mudah dituding sebagai "penjahat"; mengapa aktivitas politik dengan mudah dikriminalisasi? Dengan melihat proses ini, sebetulnya terdapat beberapa pertanyaan lain, yang rasanya belum dapat dijawab oleh riset Anton E. Lucas, yakni apakah tindakan-tindakan akar rumput, terutama pelucutan kekuasaan lokal dan tindakan kekerasan yang mengikutinya, merupakan tindakan spontan murni dari bawah, ataukah suatu hasil dari provokasi elite, dalam rangka untuk mengukur reaksi balik dari penguasa Jepang ataupun dari kekuatan kolonial Belanda. Bila dilihat dari para penggeraknya, yang memiliki kaitan dengan jaringan politik (nasional), terutama para eks-Tapol Digul, maka sangat besar kemungkinan bahwa prakarsa yang berkembang di lapis bawah, sangat dipengaruhi oleh dinamika yang berkembang di kalangan aktivis pergerakan di Jakarta. Terlebih lagi, para eks-Tapol, memiliki akses informasi yang kuat, selain mobilitas mereka juga sangat tinggi. Pertanyaan ini memang mengandung nada "teori konspirasi," namun pertanyaan ini layak diajukan, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh dan benar mengenai apa yang sudah berlangsung di Tiga Daerah, bila dikaitkan dengan proses pembentukan Negara Republik Indonesia.

Tanpa kejelasan masalah-masalah itu semua, maka membaca karya Anton E. Lucas, akan mudah menimbulkan kengerian, pada apa yang disebut sebagai revolusi sosial. Masa-masa kacau (penuh kekacauan), kekerasan dan kehadiran bandit, telah menjadi "simbol" dari revolusi sosial atau malah menjadi semacam indikator suatu revolusi sosial. Suatu kekacauan karena ketidakmampuan pemerintah dan suatu kekacauan karena pemerintah telah terdekonstruksi dan proses rekonstruksi tengah berjalan, tentu punya makna

lain. Aksi yang dilakukan oleh para bandit, dengan motif ekonomi, tentu sangat berbeda dengan "kekerasan" yang muncul sebagai akibat dari benturan kepentingan yang sulit didamaikan.

Memberikan kejelasan konteks menjadi sangat penting, karena data suatu revolusi sosial akan dengan mudah dibiaskan oleh elite konservatif atau golongan mapan, *status-quois*, dengan maksud untuk memanipulasi "simbol" dan mencitrakan revolusi sosial sebagai tindakan kriminal, melawan hukum dan hanya menghasilkan ketidaktertiban. Kejadian yang serupa dapat dilihat pada kasus reformasi saat ini (pasca 1998), di mana gerakan reformasi mulai dicitrakan oleh golongan konservatif sebagai proses yang menyengsarakan rakyat. Elite masa lalu (elite Orde Baru), dengan terang-terangan mengatakan bahwa dulu (di masa Orde Baru) lebih baik, karena lebih aman (stabilitas politik) lebih mudah mencari duit, sedangkan di era reformasi hanya menghasilkan ketidakamanan dan penderitaan. Sasaran dari citra buruk ini sudah sangat jelas, yakni semua elemen yang menyimbolisasi "rakyat." Massa yang tidak memiliki akses dan kendali pada sarana propaganda, tentu saja akan dengan mudah dimanipulasi, dan dengan sendirinya, setiap upaya perubahan dari bawah, akan mudah dikriminalisasi, sebagaimana yang juga dilakukan Orde Baru, terhadap gerakan rakyat.

Keberhasilan kriminalisasi, memberikan refleksi yang sangat baik bagi setiap gerakan rakyat, agar tidak menjadi (hanya sekedar) tumbal, atau pembuka jalan bagi golongan elite, yang setelah itu disingkirkan. Setiap gerakan kerakyatan patut menjadikan pengalaman "Tiga Daerah" sebagai cermin, agar "Tiga Peristiwa" yang terjadi di sana dapat dikenali dengan baik. Dari sana sangat jelas digambarkan bahwa gerakan rakyat (kerakyatan) tidak mungkin hanya mengandalkan massa. Tanpa jaringan politik yang kuat, sampai ke tingkat "elite," logistik yang memadai, penguasaan sarana propaganda, dan akses pada kekuatan militer, sangat sulit bagi gerakan rakyat mencapai suatu tujuannya. Tanpa kesemuanya itu, gerakan rakyat hanya memberikan sedikit gangguan pada struktur kekuasaan, atau malah memberikan alasan bagi "penyegaran struktur" kekuasaan, tanpa pernah dapat mengubah struktur ketidakadilan. Akhir kisah Kutil, sebagai tokoh arus bawah yang terlibat dalam proses mobilisasi dalam pelucutan kekuasaan, barangkali memberikan pesan bagi pentingnya mempertahankan idealisme. Namun berakhirnya Kutil (dan kawan-kawan) juga menjadi akhir dari langkah realisasi idealisme.

Penutup

Riset Anton E. Lucas, sejarah lisan, kiranya memberikan sumbangan yang sangat besar untuk melihat apa yang tersembunyi, atau apa yang tidak terekam dalam dokumen resmi,[18] khususnya berkait dengan prakarsa arus bawah ataupun keterlibatan massa rakyat dalam proses perubahan (pembaruan). Hal ini tentu saja penting bagi para aktivis pembaruan dan juga ilmuan kritis yang terlibat dalam gerakan pembaruan, agar tidak lagi menganggap remeh (atau malah meremehkan), makna dokumen dan dokumentasi prakarsa pembaruan. Suatu dokumen dan pendokumentasian, pada dasarnya menjadi bagian penting dari proses pembaruan itu sendiri, sebab arena bagi sebuah refleksi untuk kepentingan perbaikan langkah-langkah pembaruan, hanya dapat dihadirkan oleh proses pendokumentasian yang baik.

"Tiga Daerah" dengan "Tiga Peristiwa" di dalamnya, memuat pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi setiap prakarsa pembaruan. Pengalaman melakukan pengorganisasian, memobilisasi, menghimpun logistik, melakukan pelucutan kekuasaan, konsolidasi kekuasaan dan pergolakan-pergolakan dalam kurun nir-hukum, pada dasarnya adalah pengalaman yang sangat berharga. Para penggerak pembaruan mungkin tidak terlalu perlu menggali ilmu bongkar dan ilmu pasang dari pengalaman di luar seperti kasus revolusi di Filipina ataupun kasus Amerika Latin, cukuplah membuka kitab lama yang ada di negeri sendiri. Pengalaman negara lain, layak dijadikan bahan perbandingan, dan bukan satu-satunya sumber. Malahan kemauan untuk belajar dari masa lalu, akan menjadi bagian yang penting dari proses memberikan harga pada pengalaman yang ada, termasuk mulai belajar membuat dokumentasi yang baik dan memberikan harga pada dokumen politik.

Tiga Daerah meninggalkan pesan yang sangat penting, bahwa upaya pembaruan di tingkat paling bawah, tidak mungkin hanya mengandalkan

[18]Kuntowijoyo menyatakan, selain sebagai metode dan sebagai penyediaan sumber, sejarah lisan mempunyai sumbangan yang besar dalam mengembangkan substansi penulisan sejarah. Pertama, dengan sifatnya yang kontempor, sejarah lisan memberikan kemungkinan yang hampir-hampir tidak terbatas untuk menggali sejarah dari pelaku-pelakunya. Kedua, sejarah lisan dapat mencapai pelaku-pelaku sejarah, yang tidak disebutkan dalam dokumen-dokumen, dengan kata lain, dapat mengubah citra sejarah yang elitis kepada citra sejarah yang egalitarian. Ketiga, sejarah lisan memungkinkan perluasan masalah sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis. Lihat, Kuntowijoyo, 2003, *Metodelogi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 29-30.

spontanitas, dan *regrouping* politik yang melulu taktis. Suatu kekuatan politik riil perlu dibangun. Dalam konteks ini pula kritik Olle Tornquist pada elemen gerakan prodemokrasi, yang dianggapnya menjadi demokrat yang mengambang, yang tidak lagi terlibat dalam "urusan politik" sehingga proses reformasi akhirnya diambil alih oleh elite, menjadi sangat relevan. Reformasi bisa berbelok arah, meski mungkin beberapa segi prinsip diadopsi. Upaya pembaruan tidak mungkin hanya berbekal prakarsa awal, tanpa suatu keinginan untuk melanjutkannya sampai pada taraf realisasi tujuan. Untuk maksud itu, tidak terhindarkan suatu "bangunan kekuatan" harus ditumbuhkan. Oleh sebab itu, membangun ikatan yang kuat dengan basis, atau "memiliki" basis politik yang jelas dan membangun keterampilan politik bagi basis, menjadi sangat penting, selain tentu saja, daya dukung basis, berupa jaringan politik yang luas dan juga logistik yang dihasilkan dari bawah.

Pada sisi yang lain, riset Anton E. Lucas, juga memberikan perspektif dalam melihat masa lalu, agar tidak melulu digunakan perspektif Orde Baru. Sejarah juga perlu didemokratisasi, sehingga semua kekuatan politik turut dilihat dengan jujur dan dingin, tanpa perlu terideologisasi, sebagaimana cara Orde Baru menjadikan sejarah sebagai alat legitimasi kekuasaan. Demokrasi dalam sejarah, melalui pengungkapan secara jelas apa yang sudah terjadi, dengan memberian ruang pada para aktornya untuk mengungkapkan, akan menjadi sumbangan yang baik dalam menyusun bata merah masa depan. Demokratisasi sejarah adalah prasyarat utama jika bangsa ini hendak menyelesaikan persoalan masa lalunya, agar dapat melangkah di masa depan dengan lebih baik. Dengan berbagai sudut pandang dan sudut kepentingan inilah, kita menyambut baik penerbitan kembali naskah buku Anton E. Lucas, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengalaman bagi para penggerak pembaruan di tingkat akar rumput, dan juga para pihak lainnya.[]

Yogyakarta, 5 April 2004

Dadang Juliantara
Pernah aktif di Lappera Indonesia, sejak tahun 1993 telah mengundurkan diri sepenuhnya; kini bekerja sebagai penulis lepas.

DAFTAR ISI

Kata Pengantara Edisi Pertama *v*
Kata Pengantara Edisi Kedua *ix*
Pendahuluan *1*

BAB SATU

Kaum Nasionalis Dan Elite Birokrat Di Pekalongan Sebelum Perang

Peranan Pangreh Praja *12* ■ Beban Pajak *14* ■ Pengaruh Sosial-Ekonomi Pabrik Gula *18* ■ Keresahan Politik *26* ■ Para Lenggaong *34*

BAB DUA

Pengalaman Masa Jepang: Swasembada Penunjang Perang, Beban Ekonomi yang Berat

Wajib Setor Padi *44* ■ Penjatahan Beras *50* ■ Penjatahan Bahan Sandang *57* ■ Kerja Paksa (Romusha) *61* Usaha Koperasi *70* ■ Usaha Penghindaran *71* ■ Perlawanan dengan Kekerasan *73* ■ Politik Jepang *75*

BAB TIGA

Oposisi dan Perlawanan

Organisasi *81* ■ Dana *83* ■ Kode dan Penyamaran *84* ■ Kegiatan *85* ■ Kelompok Oposisi Lokal Lain *86*

BAB EMPAT

Proklamasi Kemerdekaan dan Berakhirnya Kekuasaan Jepang

Tanggapan Kalangan Perjuangan *97* ■ Reaksi Elite Birokrat *100* ■ Awal Mula Revolusi Kemerdekaan *108* ■ KNI: Komite Nasional Indonesia *124* ■ Nasib Orang-orang Jepang *128*

BAB LIMA

Revolusi Sosial dan Ciri-cirinya

Peranan Lenggaong dalam Revolusi Sosial *149* ■ Kutil *151* ■ Hilangnya Pemerintah Pro-Kolonial *157* ■ Brebes *161* ■ Pergantian Pangreh Praja di

Tingkat Kewedanan dan Kecamatan *162* ■ Perubahan Kepemimpinan Desa *166* ■ Pola-pola Pergolakan *173*

BAB ENAM

Masa-masa Kacau

Nasib Polisi *177* ■ Golongan Indo Eropa *181*

BAB TUJUH

Kesadaran Revolusioner: Bayangan Bagi Kenyataan

Tradisi Pangreh Praja *191* ■ Tradisi Protes *193* ■ Sandiwara Perjuangan dalam Revolusi *200* ■ Demokrasi dalam Bahasa *201* ■ Gejala Dombreng *204* ■ Sama Rata Sama Rasa *205* ■ Janur Kuning *206* ■ Segi-segi Lain dari Revolusi *207* ■ Pandangan Elite Birokrat *211*

BAB DELAPAN

Revolusi Di Kota-kota Kabupaten

Pemalang *216* ■ Tegal *221* ■ Brebes *234*

BAB SEMBILAN

Front Persatuan di Tiga Daerah

Badan Pekerja di Tegal dan Brebes *248* ■ Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah-GBP3D *257* ■ Konferensi Pemalang *262* ■ Pemerintah Baru *264*

BAB SEPULUH

Peranan Militer dalam Revolusi Lokal

Latar Belakang TKR di Pekalongan *273* ■ Tingkat Kehidupan yang Berbeda di Peta *274* ■ Badan Keamanan Rakyat (BKR)*276* ■ Tentara Keamanan Rakyat (TKR)*277* ■ Unsur-unsur Militer yang Lain di Tiga Daerah *280* ■ Front TKR di Semarang *281* ■ Campur Tangan Militer *283*

BAB SEBELAS

Pengadilan Peristiwa Tiga Daerah

Sikap Pemerintah Pusat *291* ■ Perjuangan Hukum dan Politik *298* ■ Masalah-masalah Politik *303* ■ Kutil *309*

KESIMPULAN

Makna Sebuah Revolusi *311* ■ Poscript *319*

Lampiran *325*

kepustakaan *373*

Indeks *387*

DAFTAR PETA DAN ILUSTRASI

PETA

Keresidenan Pekalongan xxviii
Kabupaten Brebes xxix
Kabupaten Tegal .....
Kabupaten Pemalang xxx
Peta Kotapraja Pekalongan dan Sekitarnya xxxi
Peta Kotapraja Tegal xxxii

ILUSTRASI

Gedung Societet, Tempat Penyimpanan senjata Jepang di Pekalongan 135
Kediaman Residen Pekalongan (1945) 136
Bekas "Hotel Merdeka", Markas Tiga Daerah
di Pekalongan (Desember 1945) 136
Balai Kota Tegal (1945) 137
Peresmian Monumen Tugu Pahlawan 3 Oktober 1945
di Pekalongan, pada hari Kebangkitan Nasional 20 mei 1964 138
Markas Kutil di Bank Rakyat, Talang, Tegal, waktu Tiga Daerah 138
Markas Tentara Jepang di Tegal, bekas Kantor
Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) 139
Rumah Walikota Tegal 139
Alun-Alun Tegal 140
Masjid Randudongkal Pemalang Selatan 140
Gedung Chung Hwa, Chung Hwee di Pemalang 141
Kabupaten Pemalang (1975) 142
Pengadilan Pekalongan (1975) 142
Makam maling Aguna di Pemalang Selatan 143
Sarimin Reksodiharjo, Bupati Brebes (1945) 144
Tokoh-tokoh Revolusioner Tiga Daerah Di Penjara Wirogunan,
Yogyakarta, Sekitar Desember 1946 145-146

KERESIDENAN PEKALONGAN

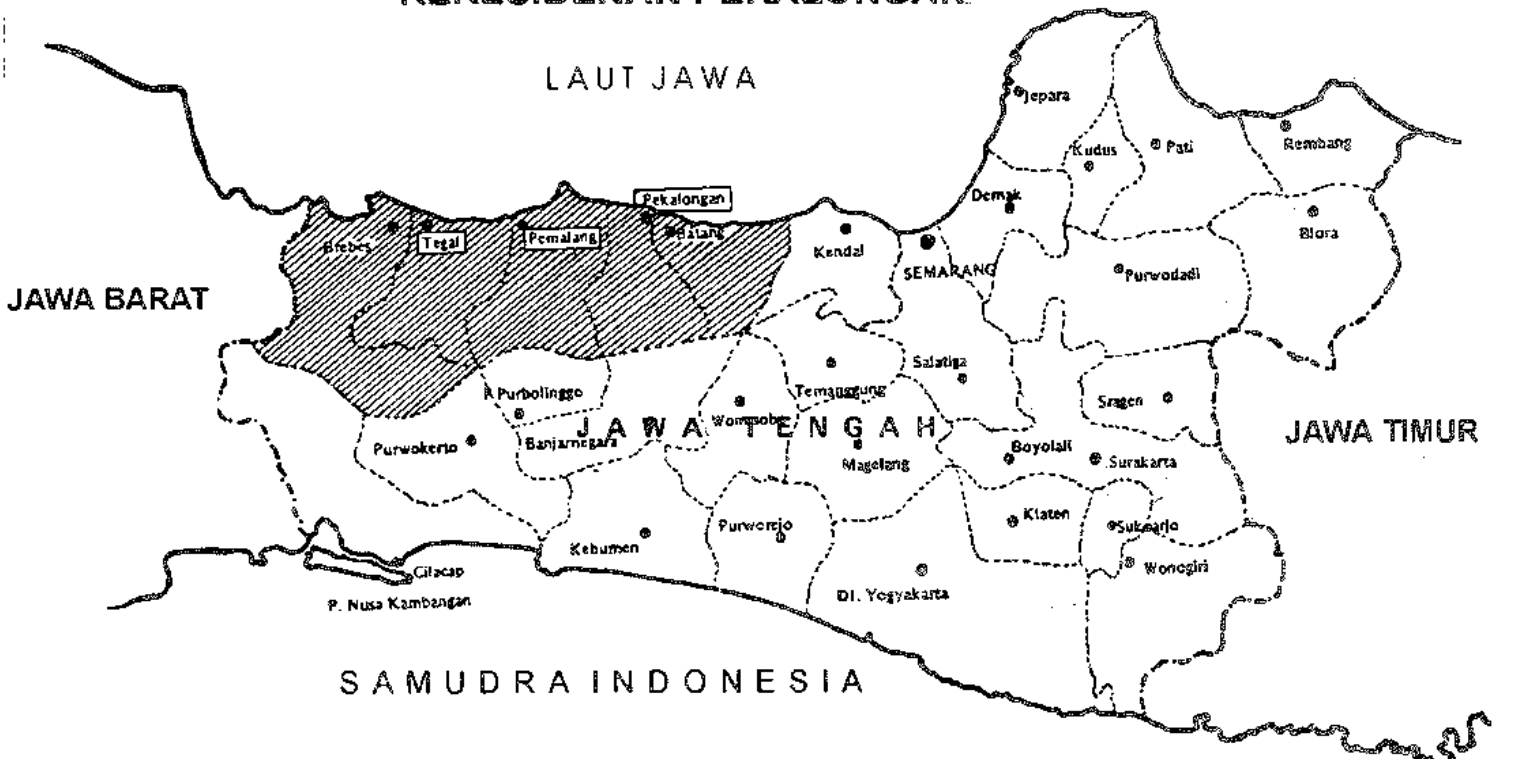

Keresidenan Pekalongan

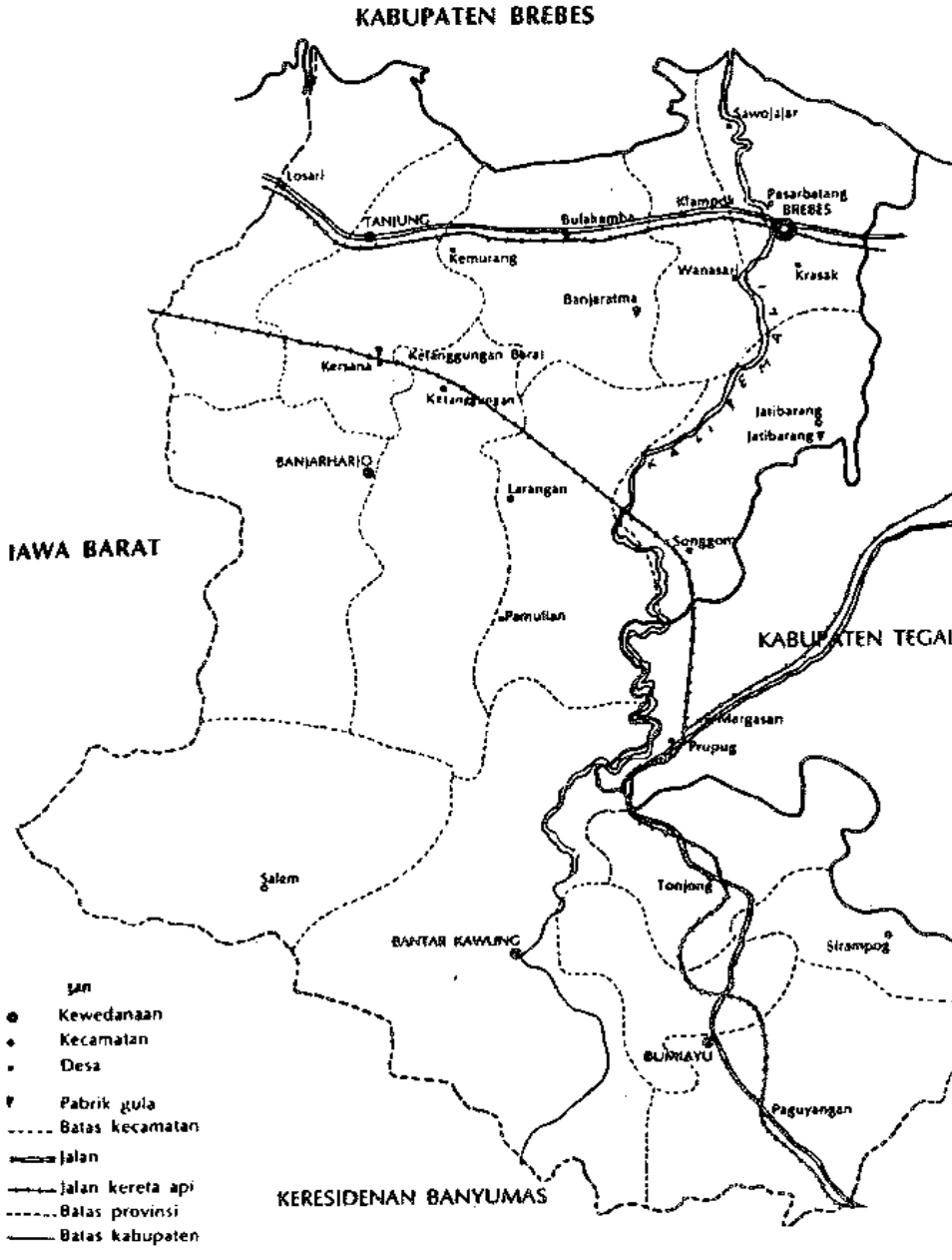
KABUPATEN BREBES
Sawojajar
Losari
Pasarbatang
BREBES
Klampok
TANJUNG
Bulakamba
Kemurang
Wanasari
Krasak
Banjaratma
Kersana
Ketanggungan Barat
Ketanggungan
Jatibarang
Jatibarang
BANJARHARJO
Larangan
IAWA BARAT
Songgom
Pamulihan
KABUPATEN TEGAL
Margasan
Prupug
Salem
Tonjong
BANTAR KAWUNG
Srampog
BUMIAYU
Paguyangan
KERESIDENAN BANYUMAS
Kewedanaan
Kecamatan
Desa
Pabrik gula
Batas kecamatan
Jalan
Jalan kereta api
Batas provinsi
Batas kabupaten

KABUPATEN TEGAL

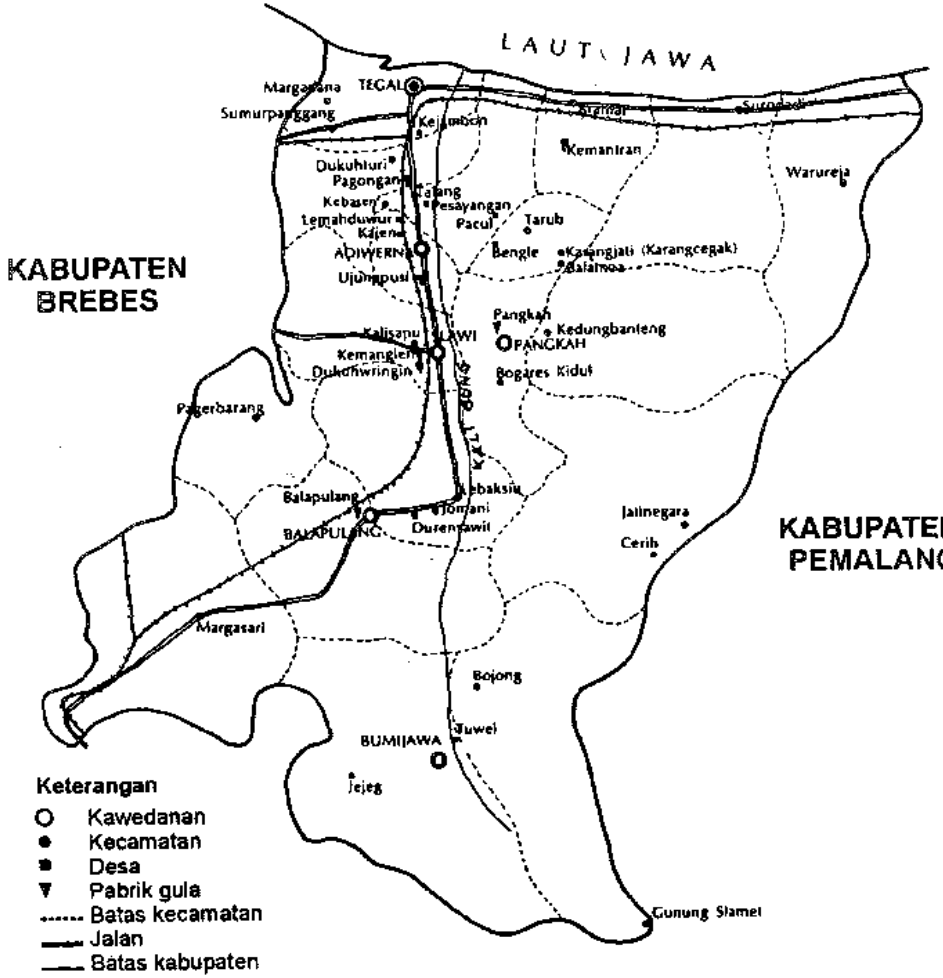

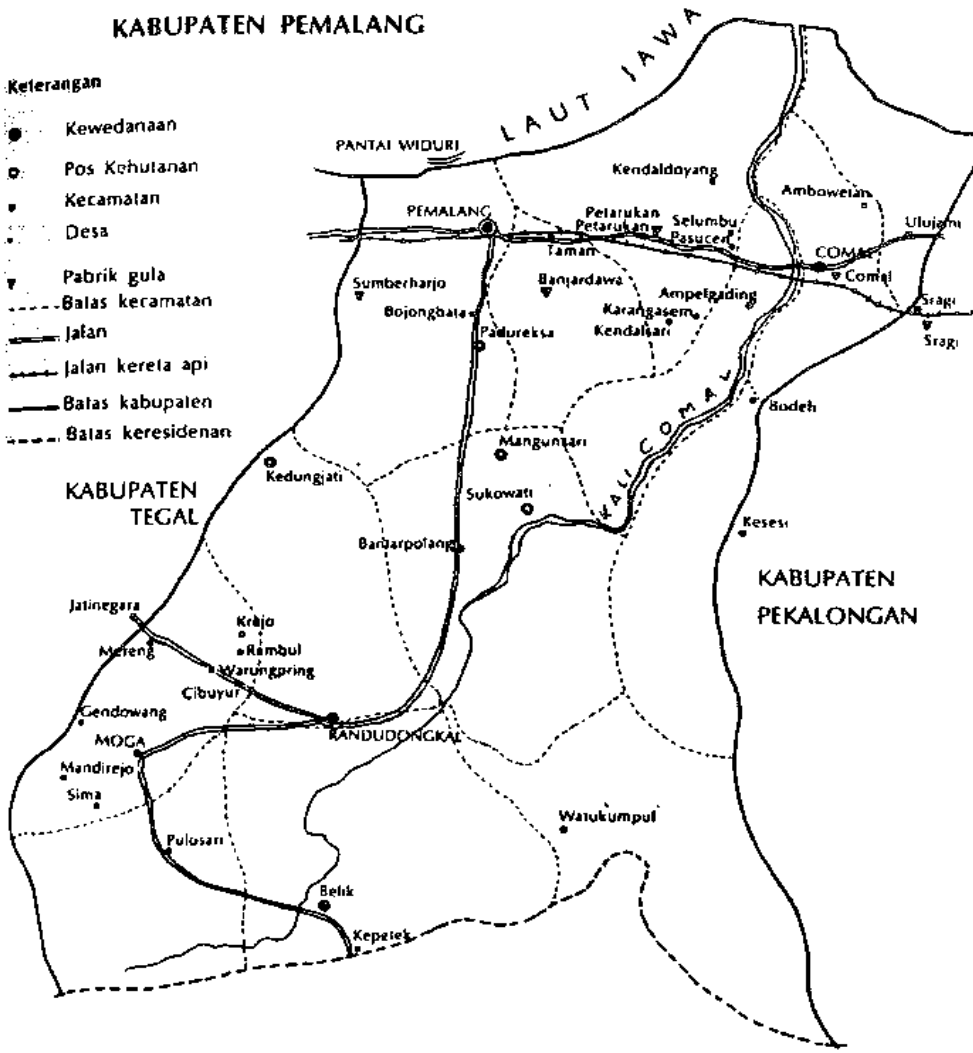
KABUPATEN PEMALANG
Keterangan
Kewedanaan
Pos Kehutanan
Kecamatan
Desa
Pabrik gula
Batas kecamatan
Jalan
Jalan kereta api
Batas kabupaten
Batas keresidenan
LAUT JAWA
PANTAI WIDURI
PEMALANG
Kendaldoyong
Ambowetan
Petarukan
Petarukan
Selumbu
Pasucen
Ulujami
Taman
COMAL
Comal
Sumbercharjo
Banjardawa
Ampelgading
Bojongbata
Karangasem
Kendalsari
Padureksa
Sragi
Sragi
Bodeh
KALI COMAL
Mangunsari
Kedungjati
KABUPATEN TEGAL
Sukowati
Kesesi
Bantarpolang
KABUPATEN PEKALONGAN
Jatinegara
Krajo
Rambul
Mereng
Warungpring
Cibuyur
Gendowang
MOGA
RANDUDONGKAL
Mandirejo
Sima
Watukumpul
Pulosari
Belik
Kepetek
KARESIDENAN BANYUMAS

Peta Kotapraja Pekalongan dan Sekitarnya

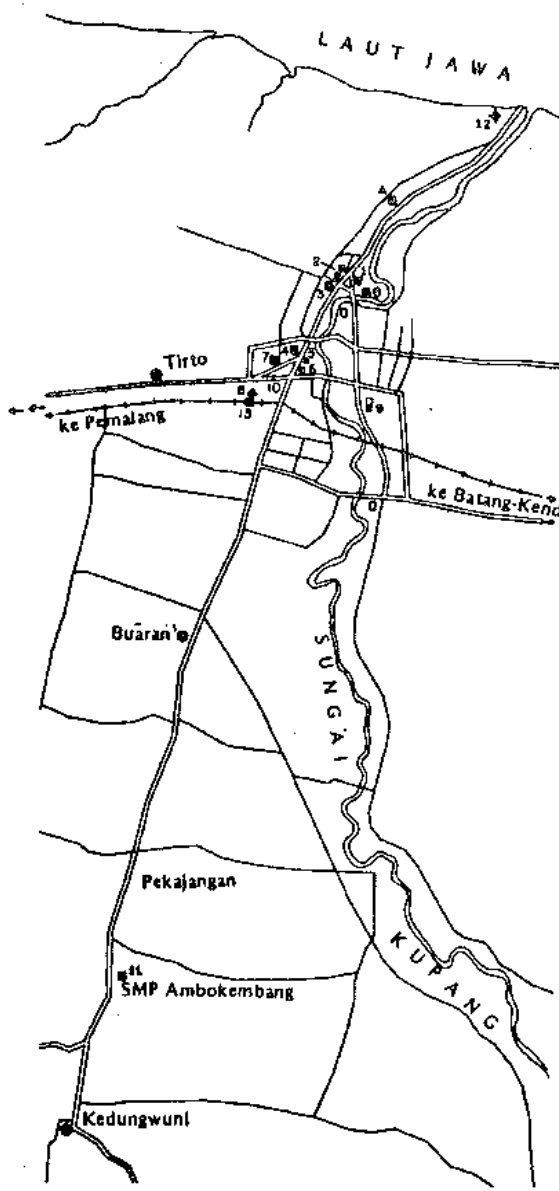

Jalan
Jalan Kereta Api
Gedung

A. penjara Cikalsari
B. penjara Loji
1. balaikota
2. kantor pos dan telegraf
3. gedung kediaman Residen Pekalongan
4. Hotel Merdeka
5 Kantor Keresidenan Pekalongan
6. asrama kenpeitai
7. Kantor Kewedanan Pekalongan
8. menara yang didirikan pemuda kereta api
9. alun-alun Pekalongan
10. Taman Ratu
11. tempat penembakan rombongan Residen Sarjio pada tanggal 14 Desember 1945
12. tempat Kutil ditembak mati pada tanggal 5 Mei 1951
13. stasiun kereta api Pekalongan

KOTAPRAJA TEGAL
SEPTEMBER-DESEMBER 1945
(Rute yang harus ditempuh para demonstran memasuki kota pada 4 November)

1. Markas AMRI Slawi.
2. Tempat kediaman dan kantor wedana Slawi.
3. Trek yang memuat orang-orang Jepang dihentikan.
4. AMRI Adiwerna.
5. Pemuda Istimewa, Ujungrusi.
6. Tempat kediaman dan kantor wedana Adiwerna.
7. Tempat pemakaman korban 4 November. Wakil Ketua KNI Marjono dan lain-lainnya.
8. Rumah Kutil di Pesayangan.
9. AMRI Talang (Gedung Bank Rakyat).
10. Tempat kediaman dan Kantor camat Talang.
11. AMRI Pagongan.
12. Kecamatan Dukuhturi.
13. AMRI Dukuhturi.
14. Markas API di Bekas Pemerahan Susu Trubes.
15. Rumah Sakit Kardinah.
16. Asrama Polisi Kejambon (diserang pada 20 Oktober).
17. Dua orang Jepang terbunuh.
18. Orang-orang sipil Jepang lainnya yang terbunuh.
19. Dua anggota keluarga Bouman (Indo Eropa) terbunuh.
20. Markas kedua Barisan Pelopor.
21. Tempat kediaman dan kantor bupati Tegal.
22. Markas ketiga Barisan Pelopor.
23. Alun-alun (lapangan tengah kota) Tegal.
24. Markas AMRI kota Tegal.
25. Anggota keluarga Coster dan orang-orang Indo lainnya terbunuh.
26. Kantor KNI Kotapraja Tegal.
27. Aula Gereja Katolik Roma, dalam suatu pertemuan di sinilah terjadi Wolkota dilawan dan dihina oleh kaum perjuangan Tegal, 11 September 1945.
28. Balai Kota Tegal.
29. Kantor Badan Pekerja Tegal (bekas kantor asisten-residen).
30. Markas Polisi/PKN.
31. Asrama TKR (bekas kempetai/Hotel Stork).
32. Asrama TKR.
33. Kantor Barisan Pelopor yang pertama kali.
34. Penjara.
35. Halaman Galangan Kapal Kayu Jepang (zosenjo).
36. Stasiun kereta api Tegal.
37. Markas dadan PETA Tegal.
38. Lapangan Slerok.
39. Pabrik Tekstil Jawa.

— Rute massa memasuki Tegal pada 4 November

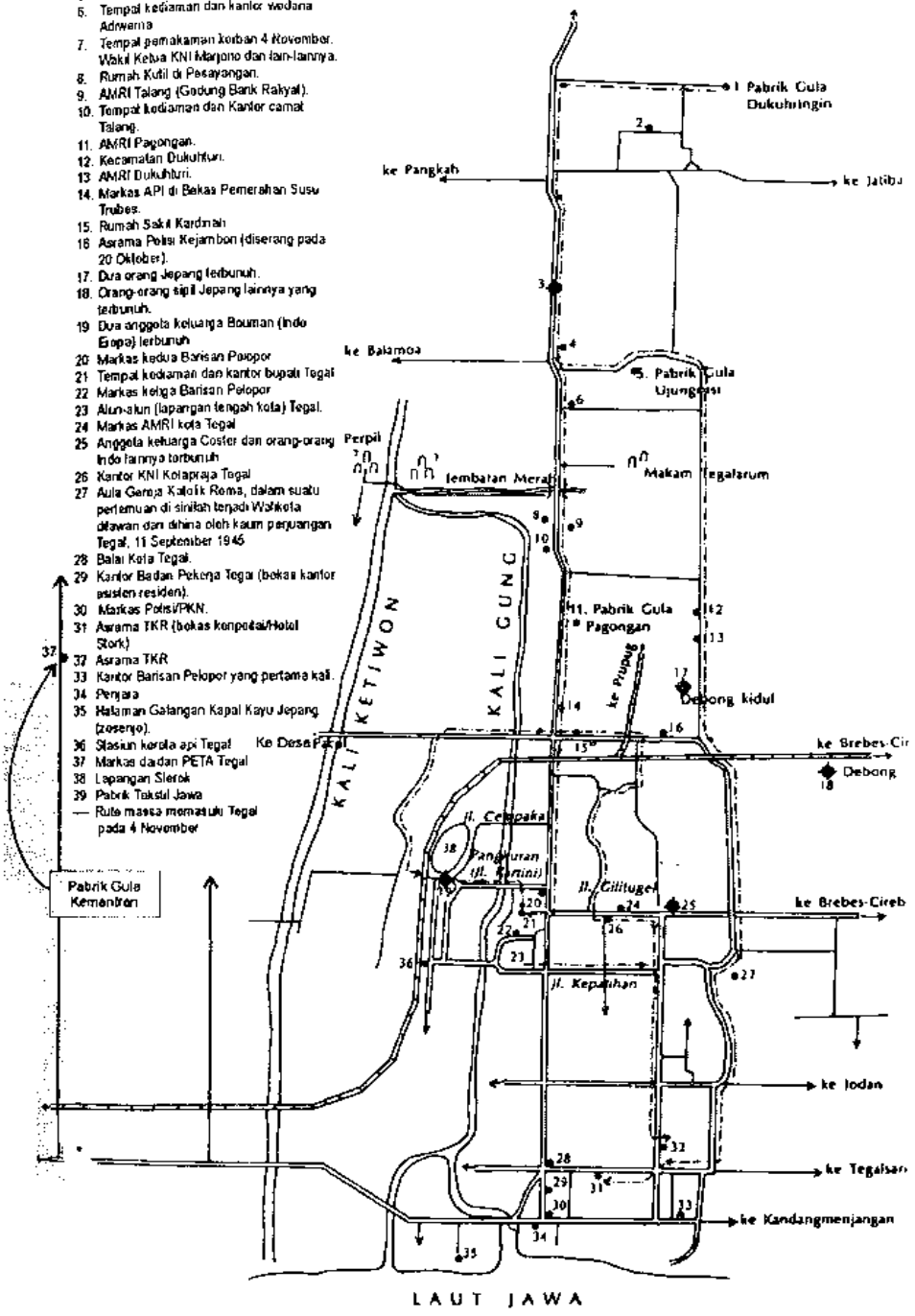

PENDAHULUAN

PERISTIWA Tiga Daerah adalah suatu peristiwa dalam sejarah revolusi Indonesia yang terjadi antara Oktober sampai Desembar 1945 di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, di Keresidenan Pekalongan (Jawa Tengah), di mana seluruh elite birokrat, pangreh praja (residen, bupati, wedana, dan camat), dan sebagian besar kepala desa, "didaulat" dan diganti oleh aparat pemerintahan baru, yang terdiri dari aliran-aliran Islam, Sosialis, dan Komunis.

Peristiwa ini sering disebut, tetapi pengertiannya masih kabur. Kata-kata perampokan, penyelewengan, dan pemberontakan masih sering dipakai di samping kata-kata pergerakan, perjuangan, atau peristiwa untuk Tiga Daerah.[1] Contohnya seperti apa yang pernah ditulis oleh majalah *Tempo*:

> Waktu itu sekitar tahun 1950, Belanda baru saja pergi, dan Peristiwa Tiga Daerah (Brebes-Tegal-Pemalang), di sana-sini diiringi perampokan toko-toko dan penyunatan Cina.[2]

Padahal perampokan toko-toko Cina di Tiga Daerah terjadi pada waktu kekosongan kekuasaan pada bulan Maret tahun 1942 (bukan 1950!) sebelum Jepang menguasai Keresidenan Pekalongan. Walaupun ada redistribusi kekayaan Cina dengan kekerasan pada tahun 1945, Peristiwa Tiga Daerah jelas bukan semata-mata gerakan anti-Cina; justru ada beberapa orang Cina yang menjadi pemimpin perjuangan di Pemalang. Di sini terlihat bahwa pengertian tentang Tiga Daerah memang masih simpang siur walaupun peristiwa itu telah terjadi lebih dari empat puluh tahun yang lalu.

---

[1]Lihat Anton Lucas, "My Story and Other Source: An Oral Approach to the Indonesian Revolution," Masyarakat Indonesia Vol 1, No. 2, Desember 1974.

[2]Syu'bah Asa, "Cina Saleh", *Tempo* 1 November 1986.

Sejarah Tiga Daerah penting sebagai peristiwa lokal revolusi Indonesia, karena merupakan sebuah revolusi sosial dengan ciri khas tersendiri. Di sini revolusi sosial diartikan sebagai suatu revolusi untuk mengubah struktur masyarakat kolonial/feodal menjadi suatu susunan masyarakat yang lebih demokratis. Cita-cita ini mulai diperjuangkan oleh Sarekat Islam di Pekalongan pada tahun 1918, diteruskan oleh gerakan PKI dan Sarekat Rakyat sampai dengan tahun 1926, tetapi baru tercapai pada bulan Oktober-November 1945. Salah satu tema pokok dalam studi ini adalah kemerosotan kehidupan ekonomi rakyat pedesaan pada zaman kolonial, yang disusul dengan kemelaratan hebat pada zaman Jepang, dan menyebabkan amarah rakyat berkobar melawan elite birokrat dalam aksi-aksi politik sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Untuk mendukung hipotesa ini, dilakukan pencarian dan penelusuran sumber arsip di Negeri Belanda, misalnya masalah beban pajak, pemilikan tanah, pendapatan dan pengeluaran rakyat serta utangnya di Tiga Daerah sebelum perang. Dalam hal ini keberadaan 17 pabrik gula di Keresidenan Pekalongan sebelum perang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi pedesaan, khususnya berkaitan dengan kemerosotan ekonomi pedesaan. Bab I menggambarkan dampak ekonomi kapitalis Belanda pada kehidupan ekonomi pedesaan dan peranan elite birokrat dalam pemerintah kolonial.

Untuk memahami mengapa terjadi Peristiwa Tiga Daerah pada tahun 1945, kita perlu juga mengetahui sejarah politik daerah tersebut. Pada abad sembilan belas terjadi aksi protes terhadap tanam paksa (gula) dan beban wajib kerja *(corvee)* yang menjadi inti dari sistem tanam paksa Belanda. "Brandal Mas Cilik" di Tegal merupakan pemberontakan petani pada tahun 1864, dipimpin oleh seorang dukun bernama Mas Cilik, yang menyerang pabrik gula dan membunuh pegawai Belanda.[3] Aksi protes muncul lagi pada tahun 1926, dengan pemberontakan di Dukuh Karangcegak, selatan Tegal. Kali ini petani melawan *corvee* dengan senjata ideologi modern, yaitu komunis. Pe-

[3]Tine Ruiter, "The Tegal Revolt in 1864" dalam Dick Kooiman, Otto van den Muizenberg, dan Peter van der Veer, 1984, *Conversion, Competition and Conflict: Essays on the Role of Religion in Asia*, Amsterdam, Free University Press.

ristiwa pemberontakan tahun 1926 ini mengakibatkan banyak pemimpin dari Tegal dibuang ke tempat pembuangan Boven Digul di Irian Jaya. Golongan inilah yang muncul kembali memimpin badan-badan perjuangan dan menyusun strategi politik untuk mengubah struktur pemerintahan di Tiga Daerah pada tahun 1945 itu.

Peristiwa Tiga Daerah lebih daripada sekadar protes sosial terhadap eksploitasi Belanda. Selain latar belakang politik dan ekonomi, revolusi sosial di Tiga Daerah pada tahun 1945 juga harus disoroti faktor kepemimpinan, ideologi, dan konteks kebudayaannya—apa artinya revolusi bagi pelakunya sendiri.

Sumber sejarah lisan membantu sekali mengkaji lebih mendalam segi kebudayaan sebuah revolusi. Misalnya, apa makna "merdeka" bagi rakyat pada waktu itu? Dari bahasa simbol di dalam sandiwara-sandiwara revolusioner pada tahun 1945, kita bisa menghayati makna revolusi sosial dari persepsi para pelakunya sendiri, yang pada waktu itu disebut "pemuda," walaupun umumnya sudah tidak muda lagi.

Pendekatan kebudayaan memperlihatkan pentingnya persepsi tentang kedaerahan yang ada di dalam beberapa ungkapan orang Tegal. Misalnya, *Pekalongan*, ibukota keresidenan yang kaya raya, telah lama menjadi pusat batik yang berkembang dengan sifat-sifat *merak ngigel sinonderan*, artinya seekor merak menari-nari memamerkan hiasannya, tetapi tidak berani berkelahi.

Brebes, yang berbatasan dengan Jawa Barat yang berbahasa Sunda dan daerah pedalaman Banyumas ke selatan, bukan saja secara geografis terpecah belah, melainkan adat istiadat dan bahasanya pun ditarik ke dua arah. Ia diibaratkan sebuah *kenong* (alat gamelan) yang bebas tergantung. Kalau retak, sukar di-"tambal", atau *kenong sigar ing gantungan*. Memang Brebes, terletak antara Jawa Barat yang berbahasa Sunda dan Jawa Tengah yang berbahasa Jawa.

Tegal, sebuah kota yang jauh lebih miskin dibanding dengan kota-kota tetangganya, namun mempunyai kebanggaan yang diibaratkan sebagai seekor kerbau liar yang hanya dapat ditunggangi dan dikuasai oleh seseorang (biasanya dilambangkan dengan seorang anak laki-laki) yang mengerti betul perwatakannya, *banteng loreng boncengan*. Tokoh legenda dalam dongeng rakyat setempat ialah seorang anak

penggembala yang menjaga kerbaunya dengan penuh kasih sayang, sehingga ketika harimau datang hendak menerkam si penggembala, kerbau itu melindungi dan menyelamatkan tuannya meski menderita luka parah di sekujur tubuhnya sendiri.

Pemalang, sebuah kawasan kaya yang membentang di daratan pantainya, diibaratkan dengan sebuah perahu yang mulus, bila dayung pengemudinya yang panjang itu mendadak patah, dengan mudah akan diombang-ambingkan gelombang ke sana-sini, *watang putung ing ayunan*. Orang Pemalang berucap bahwa mereka itu kadang kala suka dipengaruhi oleh yang satu (Tegal) atau oleh yang lainnya (Pekalongan). Bilamana dayung panjang perahu Pemalang dikemudikan oleh tangan yang kokoh seperti yang terjadi di dalam peristiwa nasional di tahun 1930-an, demikian juga halnya pergolakan Peristiwa Tiga Daerah yang membuktikan bahwa Pemalang dapat menjadi petunjuk jalan bagi daerah lain. Dengan demikian timbullah ungkapan kedua yaitu, *bende munggeng tawang*, artinya "sebuah gong kecil suaranya menggema di langit", suara Pemalang yang kecil itu terdengar di mana pun juga.

***

Sebelum terbitnya buku *Regional Dynamics of The Indonesian Revolution*, penulisan sejarah lokal zaman revolusi di Indonesia belum memadai. Perhatian, tenaga maupun biaya banyak dicurahkan kepada penulisan sejarah nasional. Walaupun proyek sejarah lisan Arsip Nasional RI sejak tahun 1973 menghasilkan arsip sejarah lisan di pusat, sumber sejarah lisan untuk zaman revolusi di daerah sampai saat ini masih sangat kurang.

Salah satu alasan mengapa Peristiwa Tiga Daerah baru terungkapkan dalam kumpulan karangan tentang revolusi lokal di Indonesia yang disebut tadi[4] ialah masalah sulitnya menemukan sumber sejarah lokal. Penulisan sejarah lokal zaman revolusi seharusnya merupakan perpaduan antara sumber lisan dan tertulis. Padahal sumber tertulis

[4]Lihat Audrey R. Kahin (ed) *Regional Dynamics of The Indonesian Revolution from Diversity*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985) membahas sejarah delapan daerah pada waktu revolusi, yaitu Tiga Daerah, Banten, Banda Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Ambon.

sangat langka, koleksi koran daerah maupun tulisan tokoh-tokoh sejarah lokal sendiri jarang ditemukan, sehingga mencari sumber sejarah lokal bagi penulisan sejarah Indonesia sulit. Di Arsip Nasional belum tentu ada, sedang di arsip pemerintah tidak selalu lengkap, kalau ada (tentu ada pengecualian, misalnya Sulawesi Selatan).

Jadi memasukkan perspektif sejarah lokal dalam buku sejarah revolusi kemerdekaan memerlukan pelaku sejarah lokal sebagai sumber. Bagaimana sebaiknya menggarap sumber-sumber tersebut? Untuk mencari tokoh-tokoh sejarah lokal, di mana sekarang mereka tinggal, memerlukan waktu yang panjang. Agar informan bersedia memberikan data, maka diperlukan suasana yang erat dengan informan. Dalam jangka waktu yang panjang hasilnya akan memuaskan. Banyak pelaku sejarah lokal yang bersedia memberikan data tentang revolusi lokal dan senang apabila didatangi untuk dimintai data. Paling sedikit diperlukan beberapa pertemuan untuk mendapat data yang lengkap.

Sumber lisan, seperti halnya sumber tertulis, harus diuji kebenarannya dan kecocokannya dengan sumber lain. Dalam menilai keterangan harus diteliti latar belakang sosial, pendidikan, politik, dan langsung atau tidaknya terlibat dengan kejadian yang diteliti.

Sebagai studi sejarah lokal yang banyak bersandar pada sumber lisan, ingatan manusia menjadi penting dalam studi Peristiwa Tiga Daerah ini. Semua wawancara (baik yang direkam maupun yang dicatat) di belakang 20-30 tahun sesudah kejadiannya. Seorang peneliti harus bisa cepat menilai kualitas ingatan seorang informan, apakah masih baik atau tidak, dan apakah cenderung menonjolkan diri.

Sebagai peneliti sejarah lokal revolusi dalam hal ini saya beruntung, karena sesudah banyak mewawancarai banyak informan, saya dapat memperoleh *proces verbaal* (hasil catatan tanya-jawab Kejaksaan) dan tulisan lain tentang Peristiwa Tiga Daerah yang diambil oleh Belanda dari pengadilan RI Pekalongan tahun 1947.[5] Sesudah saya membandingkan *proces verbaal* dengan wawancara saya ternyata

[5]Inventaris No. 201, berjudul "Omwentelingzaak te Pekalongan" (Pergolakan di Pekalongan) dalam arsip Procureur-General bij het Hoorgrrechtsh of van Indonesia, Algemeen Rijhsarchief (ARA) den Hague, Netherland, selanjutnya dikutip Proc, Gen.

tidak banyak perbedaan. *Proces verbaal* yang lebih dekat waktunya itu tentunya memberi data yang lebih kronologis dan terperinci, walaupun tidak bertentangan dengan sumber lisan hasil wawancara.

Dalam daftar pustaka pembaca akan menemukan hasil wawancara dengan 324 informan. Di antaranya ada 40 informan yang direkam wawancaranya. Bagaimana membedakan seorang informan harus direkam atau tidak? Ini tergantung apakah informan bisa memberi data dengan lancar atau tidak. Selain itu, hasil rekaman sangat tergantung dengan peneliti, apakah dia bisa menahan diri dan memberikan kesempatan kepada informan untuk mendongeng sepuas-puasnya tanpa banyak pertanyaan. Perlu diperhatikan bahwa mengambil data melalui kaset lebih sukar daripada melalui catatan. Walaupun mewawancarai tokoh sejarah lokal dengan kaset bukan pekerjaan yang mudah, tetapi untuk masa depan penulisan sejarah revolusi, hal ini menjadi sangat penting.[6] Untuk menjaga keaslian sumber sejarah lisan, hasil wawancara pelaku sejarah (baik yang direkam maupun yang dicatat) dikutip sesuai dengan bahasa aslinya tanpa diubah.

***

Studi tentang Revolusi Tiga Daerah ini adalah perpaduan antara sumber berbeda (arsip maupun lisan), yang menunjukkan suatu rentetan kejadian yang sangat kompleks sifatnya. Untuk menjelaskan apa yang terjadi bulan-bulan pertama sesudah proklamasi kemerdekaan di Tiga Daerah, banyak dimensi harus diungkapkan antara lain sejarah ekonomi-eksploitasi dan penindasan kaum penjajah (Belanda dan Jepang)—sifat kepemimpinan di Tiga Daerah dan Pekalongan yang masing-masing mendukung dan menentukan strategi politik golongan nasional radikal, adanya kekerasan pada revolusi sosial, dan lain sebagainya. Karena begitu banyak tempat tokoh dan peristiwa dalam waktu yang relatif singkat, pendekatan kronologis untuk studi ini ditolak karena pasti membingungkan pembaca (lihat lampiran *Time Chart* atau kronologis sejarah Peristiwa Tiga Daerah).

---

[6]Tentang masalah metodologi sejarah lisan lihat Anto Lucas "Wawancara Dengan Informan Pelaku Sejarah" dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson, (ed) 1982, *Aspek manusia dalam Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

Penulisan sejarah Tiga Daerah ini lebih berdasarkan tema-tema yang muncul waktu riset sedang berjalan. Misalnya bagaimana hubungan antara strategi menyusun kekuatan kaum radikal di Tiga Daerah dengan gerakan bawah tanah komunis sewaktu Jepang? Mengapa kaum "bandit" atau *lenggaong* menonjol di desa-desa tertentu pada pada waktu revolusi sosial berkobar antara bulan Oktober-November 1945? Bagaimana sampai lebih dari seratus orang Indo terbunuh? Selain itu juga diungkapkan mengapa militer dan Islam Pekalongan sampai melawan Gerakan Tiga Daerah, dengan analisa kepemimpinan Pembela Tanah Air (Peta) dan hubungan dengan Resimen XVII di Pekalongan. Dimensi yang paling menarik barangkali adalah persepsi revolusi sosial dari pelaku sejarah sendiri. Dimensi ini mampu membawa pembaca kembali ke konteks kebudayaan alam revolusi lokal di Jawa, masa yang penuh kekacauan tetapi juga penuh semangat dan harapan akan adanya perubahan yang mendasar dan mendalam pada waktu itu.

***

Dalam studi sejarah yang banyak menggunakan sumber lisan seperti yang dilakukan dalam studi ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya harus diberikan kepada semua informan di Indonesia yang selama 5 tahun telah bersedia membantu peneliti baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun tulisan dalam bentuk memoar, dokumen-dokumen yang telah dapat dipergunakan oleh penulis. Di antara informan-informan tadi ada beberapa nama yang perlu disebutkan, yaitu Sumarno dan Kadarisman Surodiwiryo di Tegal, Samhuri di Pemalang, Keluarga A. Junaid di Pekalongan, Wadyono dan Mayjen Sudharmo Jayadiwangsa dari Resimen XVII, Sarino Mangunpranoto, Susmono, Suwignyo, Maksum Hr, Mr. Besar, dan Sarimin Reksodiharjo. Terima kasih juga kepada sejumlah pejabat penting Pemerintah RI yang memberi bantuan penulisan studi ini, dari Bapeda Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, Asisten I Kodam VII Diponegoro, Semarang, sampai kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.

Tak lupa, saya juga harus mengucapkan banyak terima kasih kepada sejarawan Indonesia yang banyak membantu saya.[]

BAB SATU

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT DI PEKALONGAN SEBELUM PERANG

MENDENGAR nama Pekalongan, terbayanglah warna-warni cerah dengan motif-motif menarik dari batiknya yang khas, produk ibukota keresidenan. Juga warna yang kontras jika dibandingkan dengan warna agak gelap dari batik yang bermotif tradisional dari kota-kota pedalaman Yogyakarta dan Solo. Kontras dalam gaya dan corak rupanya diikuti pula oleh perbedaan dalam bidang geografis, sosial, dan politik antara Keresidenan Pekalongan yang memangku pantai utara dengan bagian-bagian Jawa yang lain.

Keresidenan ini terdiri dari Kabupaten Pekalongan, dengan kota Pekalongan sebagai ibukotanya, menyusur ke barat dengan kabupaten-kabupaten Pemalang, Tegal, dan Brebes.[1] Antara tahun 1928 sampai tahun 1931, Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Brebes merupakan suatu keresidenan tersendiri dengan Tegal sebagai ibukotanya. Pada tahun 1945, kabupaten-kabupaten inilah yang dikenal sebagai "Tiga Daerah."

Dari sensus terakhir sebelum perang, yaitu pada tahun 1930, penduduk Keresidenan Pekalongan berjumlah sedikit melebihi dua setengah juta jiwa yang secara geografis tersebar ke dalam tiga wilayah. Wilayah pertama ialah Batang, daerah termakmur dalam keresidenan ini yang pernah merupakan kabupaten tersendiri sampai awal ta-

[1]Tiap kabupaten secara administratif terbagi dalam kewedanan yang dikepalai oleh wedana; di bawahnya terdapat kecamatan yang dikepalai camat. Bersama-sama lurah (kepala desa) pejabat-pejabat Jawa yang berpendidikan Belanda ini disebut pangreh praja, merupakan elite birokrasi Pekalongan. Lihat peta di depan.

hun tiga puluhan. Karena adanya penghematan ekonomi dan jumlah penduduk yang rendah, daerah ini terpaksa harus digabungkan dengan Pekalongan. Wilayah berbukit rendah ini pada tahun 1920-an menjadi penghasil utama tanaman niaga keresidenan, seperti gula, teh, kopi, kina, karet, dan 30 persen dari seluruh produksi kokoa (cokelat) di Jawa. Daerah ini juga merupakan satu-satunya tempat bagi petani kecil yang menjadi penghasil komoditi ekspor.

Wilayah kedua membentang dari Batang sampai ke Losari di perbatasan Jawa Barat, daerah sepanjang pantai yang menghasilkan sebagian tanaman niaga utama keresidenan, yaitu padi dan tebu. Perpaduan antara musim hujan yang teratur, tanah yang subur, dan jaringan irigasi Sungai Comal dan Pemali yang dibangun dan dipelihara oleh perkebunan-perkebunan tebu milik orang Eropa, menyebabkan irigasi daerah ini menjadi yang terbaik dan merupakan salah satu daerah yang tersubur di Jawa Tengah yang berswasembada beras. Sebelum Perang Dunia II, pertumbuhan penduduk di Pemalang tertinggi di Jawa, sedangkan Kewedanan Adiwerna di Tegal pada tahun 1930 menunjukkan kepadatan penduduk 1.764 per kilometer persegi, suatu angka tertinggi di Jawa. Sampai Depresi Ekonomi Dunia di daerah ini terdapat 17 pabrik gula.[2]

Wilayah ketiga adalah daerah pedalaman selatan. Tanahnya tandus dan cocok untuk hutan jati yang luas. Kepadatan penduduk di bagian selatan Brebes dan Pemalang tergolong rendah, yaitu sekitar 390 per kilometer persegi.[3] Banyaknya pesantren di wilayah ini mencerminkan kuatnya pengaruh Islam ortodoks.

Peranan penting dari kegiatan perdagangan yang menjadi sumber pendapatan berada terutama di tangan minoritas asing Cina dan Arab di ibukota-ibukota kabupaten dan kawedanan. Di Tanjung (da-

---

[2]Mengenai produksi gula, lihat *Landbouwatlas van Java en Madora* (Weltevreden, 1926). Bagian 1 tabel VI; untuk irigasi dan kesuburan tanah lihat Volksteling, 1930, jilid II *Inheemsche Bevolking van Midden-Java en Vorstenlanden*, hlm. 10 (selanjutnya dikutip Volksteling), untuk demografi itu lihat *Indisch Verslag*, 1939, hlm. 377. Mengenai kepadatan penduduk di Adiwerna lihat *volkstelling*, 1930, hlm. 11; Gambaran ini dikutip Karl J. Pelzer, 1948, *Pioneer Settlement in the Asiatic tropics*, New York, hlm. 167, Charles Fischer, 1966, *South East Java: A Social Economic and Political Geography*, London, hlm.. 291, tabel 22, juga menyebut hlm. ini.

[3]*Volkstelling*, tabel 9, hlm. 167.

taran pantai Brebes) terdapat industri rokok kretek yang maju, beberapa di antaranya milik pribumi. Di bagian selatan, yaitu di Banjarharjo, terdapat penanaman kapas dan pemintalan, sedangkan tekstil ditenun di Tegal, Pemalang, dan di Kampung Pekajangan (selatan kota Pekalongan). Hanya di Pekajangan orang-orang Cina dan Arab tidak pernah berhasil memegang kendali kegiatan ekonomi.[4] Industri tenun Pekajangan dan rokok kretek Tanjung sesungguhnya merupakan dua pusat kegiatan perdagangan pribumi yang berhasil di Keresidenan Pekalongan. Selain itu pengaruh perkebunan yang dominan, secara ekonomis memberi ciri tertentu pada keresidenan ini.

Gambaran kontras dalam bidang ekonomi dan geografis ini dibarengi dengan adanya pembagian sosial. Di lapisan atas terdapat kelas kaya yang terdiri dari pangreh praja, lurah (kepala desa), dan pedagang kaya. Pada umumnya mereka pernah mengenyam pendidikan Belanda dan sedikit mempunyai kebiasaan Barat. Di Pemalang kelompok ini cenderung menjadi anggota Muhammadyah. Di desa yang setaraf dengan golongan ini adalah haji, sebutan yang diperoleh seseorang setelah melakukan perjalanan haji ke Mekah, dan sering pula menjadi tuan tanah yang memperoleh sawahnya dari hasil peminjaman uang. Sarino Mangunpranoto, seorang tokoh PNI yang pernah menjadi ketua Perguruan Taman Siswa di Pemalang dari tahun 1929 sampai 1943, menuturkan bahwa ayah mertuanya menjadi tuan atas tanah seluas 12 hektar sawah yang diperoleh dari petani yang meminjam uangnya dan kemudian tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Mereka juga menguasai pembagian air dengan menyuap ulu-ulu.[5] Golongan kaya inilah yang memiliki tiga penggilingan padi dan keresidenan itu, sedangkan para lurah memperoleh kekayaannya dengan jalan menyewakan tanah milik desa dan bengkoknya kepada pabrik-pabrik gula. Kalangan Cina, Arab, dan Indo-Eropa, juga termasuk dalam lapisan tersebut. Orang Arab terkenal sebagai tukang riba, dan dapat memiliki tanah luas melalui cara pembelian tanah atas nama wanita-wanita Jawa yang menjadi istri-

[4]Lihat Suzannah Price, "Religion, Social Organization and Textile Production in a Javanese Village", (Tesis MA, Australian National University, 1978).

[5]Ulu-ulu adalah pamong desa yang mengurus pengairan.

nya.[6] Dengan demikian sentimen ras memperkuat terpecah belahnya ekonomi.

Kalangan Islam yang merupakan golongan elite lain di keresidenan ini terbagi dalam tiga unsur. Pertama, Islam kiri, terdiri dari mereka yang pernah terbuang ke Digul setelah pemberontakan 1962. Kedua, golongan ortodoks yang berjumlah besar, termasuk guru-guru agama di desa (kiai) dan murid-muridnya (santri) yang pada umumnya anggota NU (Nahdlatul Ulama). Ketiga, di Bumiayu dan Pekajangan, kaum Islam modernis (Muhammadyah) yang kuat pengaruhnya.

Terakhir, yaitu pemisahan antara kota dan desa. Beberapa kota kawedanan seperti Comal terletak di jalan raya timur-barat, tempat pabrik-pabrik gula dibangun sejak abad yang lalu dan mempunyai perkampungan Cina (Pecinan). Kebanyakan "orang asing" bermukim di kawasan kota. Di sinilah tinggal bagian terbesar orang-orang yang berpendidikan Barat dalam keresidenan itu. Di ibukota kabupaten terdapat air ledeng, jalan beraspal, dan penerangan lampu listrik untuk pemukiman golongan priayi dan rumah sakit serta sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda.

Pemisahan sosio-ekonomis dan rasial di Tiga Daerah merupakan dasar dalam perkembangan sosio-ekonomis dan pemerintahan kolonial. Pada abad ke-18 VOC (maskapai dagang Belanda) telah berhasil mengumpulkan uang dengan mempergunakan kekuasaan politik dan sosial elite Jawa. Selama bupati yang disebut *Regent* menunjukkan kesetiannya kepada Belanda, VOC menjamin akan mengakúi kekuasaannya.

Peranan Pangreh Praja

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) Belanda yang dimulai tahun 1830 untuk memenuhi permintaan pasaran Eropa yang memberi banyak keuntungan, ditangani oleh golongan elite Jawa dengan nama Belanda yang nantinya berakibat serius di Tiga Daerah.[7]

---

[6]Berdasarkan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) tahun 1870 hanya "pribumi" yang dapat memiliki tanah.

[7]Penanaman nila di tanah yang dahulunya sawah sangat menghancurkan tanah, sehingga menimbulkan banyak kesulitan bagi petani. Lihat laporan L.Vitalis,

Berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa pada waktu itu, Bupati Tegal yang memiliki tanah luas mempunyai dua peranan sebagai penguasa dan pengusaha. Bupati Tegal memiliki 8.179 hektar tanah dan kurang dari separuhnya tanah itu tidak digarap karena kelangkaan tenaga kerja. Dia memberikan pinjaman, dan menghapuskan utang-utang untuk mencegah agar petani tidak berpindah ke tempat lain. Kekayaan bupati Brebes, ditambah lagi oleh Rafles yang menghadiahkan tanah turun-temurun (*Particuliere Landerijen*) seluas 2.440 hektar yang sebagian ditanami tebu yang pada tahun 1856 memberi keuntungan 38.000 gulden bagi sang Bupati. Untuk menjaga kedudukannya, ia memerlukan 2.000 pikul atau 200 ton beras setiap tahun untuk pesta menyambut kunjungan para pejabat yang jumlahnya besar dan membuatnya mengeluh.[8]

Politik Etis tahun 1901 tidak membawa keringanan bagi para petani, malahan menyebabkan makin merosotnya hubungan antara petani dan pangreh praja. Sumber penghasilan tani tak bertambah dikurangi sesudah tanah milik desa (*bengkok*) lambat laun menjadi hak milik kepala desa dan para pangreh praja sebagai gaji untuk tugas-tugasnya. Di Keresidenan Pekalongan terpisahnya rakyat dari tanah desa ini merupakan beban yang lebih berat di banding dengan di keresidenan lain. Jumlah tanah yang disisihkan untuk tanah bengkok lebih luas daripada di tempat-tempat lain dan tenaga desa pun terserap untuk menggarapnya. Di mana kepala desa jabatannya lama, di situlah beban semakin berat. Kepala desa itu menyewakan tanah milik desa yang diperolehnya dengan cara tidak sah kepada pabrik gula, sehingga tanah desa tidak lagi menjadi sumber penghasilan bagi petani tak bertanah, melainkan menjadi alat yang mempertajam pembagian yang kaya dan yang miskin di dalam kehidupan pedesaan.[9]

---

bekas inspektur Tanam Paksa di Keresidenan Tegal tahun 1834, dalam Chr. L.M. Pendels, Indonesia: *Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942* (Brisbane, 1977), hlm. 27. Selanjutnya Document.

[8]Lihat Onghoklam, "The Residency of Madiun: Priayi and Peasant in the Nineteenth Century" (Tesis Ph.D., Yale University, 1975), hlm. 139, catatan 69, selanjutnya "Madiun."

[9]Hiroyoshi Kano, *Land Tenure System and the "Desa" community in Nineteenth Century Java* (Tokyo, 1977), hlm. 8. Kano melihat perkembangan hubungan kelas di daerah-daerah tertentu di Jawa tidak berasal dari hubungan resmi antara kepala desa, pamong desanya, dan rakyat. Lahat juga *Onderzoek naar de Mindere Welvaart*

Walaupun di bawah kebijaksanaan rasionalisasi ekonomi (baca: penghematan) jumlah desa di Keresidenan Pekalongan berkurang 20 persen antara tahun 1907 dan 1927, areal bengkok hanya berkurang 5 persen. Dengan kata lain, pada tahun 1925, terdapat 1,6 persen penduduk yang terdiri dari kepala desa dan pamong desa yang menguasai 25 persen tanah sawah milik desa. Penghasilan pokok 40 persen dari kepala desa di Keresidenan itu sekitar 600-1.200 gulden setiap tahun dibandingkan dengan pendapatan rata-rata per kapita penduduk yang hanya 25,79 gulden setiap tahun.[10] Ketimpangan pendapatan semacam ini membuat semakin tersisihnya kepala desa dari rakyatnya dan menjadikan mereka lebih bersifat alat para pedagang Belanda dan pemerintah kolonial.

Dibanding lurah dan pamong desa, para wedana dan camat segan memupuk kekayaan di dalam bentuk rumah maupun tanah. Bekas camat di Kabupaten Brebes menuturkan kenangannya:

> Ayah saya sendiri seorang wedana tidak mempunyai sebuah rumah ketika memulai pensiun. Saya dibesarkan dalam tata susila bahwa akan memalukan, apabila seorang pangreh praja selama karirnya memperkaya diri dengan memiliki tanah dan rumah. Tentu saja waktu kami hidup jauh di atas standar kehidupan dari kebanyakan rakyat biasa.[11]

Ini disebabkan karena gaji sangat tinggi. Seorang wedana memperoleh gaji 500 gulden setiap bulan. Dengan harga beras 5 sen per kilogram, maka nilai gaji itu sama dengan 10 ton beras. Ketika pensiun ia memperoleh tunjangan 237 gulden, yang senilai 5 ton beras. Gaji seorang bupati adalah 1.250 gulden setiap bulan, dua setengah kali gaji wedana.

Beban Pajak

Di dalam pemerintahan kolonial menurut James C. Scott, tidak ada yang lebih menjengkelkan petani miskin daripada pemungutan

---

der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Jilid Ixc, "Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzockingen naar de Ekonomi van de desa", Jilid III, hlm. 132.

[10]J.W. Meijer, *Onderzoek naar den Belastingdruk op de Inlandsche Bevolking* (Weltevreden, 1926), hlm. 122, 124, 128. Selanjutnya "Onderzoek." Lihat juga Penders, Document, hlm. 101-106.

[11]Komunikasi tertulis dengan bekas Camat Tonjong, 21 Juni 1979.

pajak.[12] Di Jawa, kepala desa dan pamong desa bertugas sebagai pengumpul pajak. Dalam abad ke-20 penghapusan pajak di Jawa dijadikan tujuan anarkisme rakyat gerakan orang Samin di daerah Blora, tarekat-tarekat di Banten, dan Sarekat Rakyat, yaitu organisasi massa PKI di pedesaan pada tahun 1920-an. Wajib kerja paksa di desa yang sangat berat merupakan penyebab utama timbulnya pemberontakan di Dukuh Karangcegak, selatan Tegal, pada bulan Maret 1926.

Sering besarnya pajak yang dipungut tidak memadai ketimbang hebatnya akibat penderitaan. Bagi petani miskin, sisa penghasilan setelah dipotong pajak adalah hal yang sangat penting buat mempertahankan hidup. Pajak pendapatan tanah (*Landrente*) dipandang sebagai pajak yang paling tidak disukai, karena dijadikan pungutan tetap berdasarkan hasil rata-rata dari kelas bawah, tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar atau kebutuhan hidup. Pajak dan pungutan pajak ditentukan dan diatur oleh kepala desa. Bagaimana beban pajak itu dirasakan oleh rakyat? Para petani Pekalongan harus membayar pajak irigasi yang sangat tinggi, sedangkan pajak desa lebih banyak ditanggung oleh petani miskin (*arme grondbezitters*). Para petani ini membayar pajak per kepala dan per keluarga dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan para petani di tempat-tempat lain di Jawa. Sedangkan petani-petani kaya membayar pajak dalam persentase yang sama dengan yang miskin, padahal pendapatan mereka jauh lebih tinggi. Persentase penghasilan bersih yang dibayarkan untuk pajak tanah, pajak setempat, dan pajak desa oleh berbagai golongan masyarakat di keresidenan itu adalah sebagai berikut:

Kelompok Masyarakat	Pajak yang dibayarkan (Persentase penghasilan bersih)
Pamong desa	5,4
Petani kaya	12,5
Petani sedang	10,7
Petani miskin	12,5
Buruh lepas	1,2

Sumber: J.W. Meyer Ranneft, *Onderzoek naar den Belastingdruk op de Inlandsche Bevolking*, hlm. 21, 14.

[12]James C. Scott, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven, 1979), hlm. 191.

Beban pajak yang paling berat di Keresidenan Pekalongan rupanya di Adiwerna. Di sini, pajak dipungut sebanyak 17 persen dari sewa tanah yang dibayarkan oleh pabrik-pabrik gula kepada petani, padahal sewa tanah rata-rata per tahun panen gula adalah terendah.[13] Di Kecamatan Pemalang terdapat persentase pajak yang tinggi dari pajak keseluruhan. Di Tegal, seorang petani, setelah membayar pajak dan biaya penggarapan dari setiap *bau* (0,7 hektar) tanah mendapat 45,80 gulden, tetapi ini masih harus dikurangi dengan pajak pekarangan.[14]

Di mana-mana terjadi kecurangan dalam pemungutan pajak desa dan pajak pendapatan tanah, yang menjadi tanggung jawab lurah. Tentang pajak di pertengahan tahun 1920-an seorang nasionalis menulis "pajak yang dipungut selalu jauh melebihi tingkat yang ditetapkan, karena sikap mementingkan diri para pamong desa yang memperoleh premi 8 persen dari hasil pengumpulan pajak di desanya masing-masing."[15] Pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh kepala desa itu disetor ke Kantor Kecamatan. Seorang camat sebelum perang mengungkapkan kembali pengalamannya yang menarik:

> Saya membuat grafik statistik selama sepuluh tahun lebih. Saya tahu, manakala setoran pajak menurun, uangnya pasti telah digunakan oleh lurah. Bila seorang lurah tidak bisa menyetor pajak desanya ke Kantor Kecamatan, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa ia akan merampok desa lain dengan menggunakan gerombolan bayaran setengah bandit (*lenggaong*) agar segera mendapat uang itu.[16]

Kenaikan pangkat dalam pangreh praja tergantung pada laporan dan penilaian atas kemampuannya mengumpulkan pajak. "Ayah saya mencapai kedudukan tinggi (sebagai camat) karena pandai mengumpulkan pajak," ujar seorang guru di Pemalang.[17]

Menurut kenyataan jumlah pendapatan bersih petani yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya lebih kecil

---

[13]Ranneft, *Onderzoek*, hlm. 39.

[14]"Tani dan Sawah", *Neratja*, 23 November 1918.

[15]S. Dingley [Iwa Kusumasumantri?], *The Peasants' Movement in Indonesia* (Moscow International Agrarian Institute, 1926) hlm. 20.

[16]Camat Tonjong, Wawancara, 15.10.76.

[17]Guru sekolah dasar di Pemalang, Transkripsi Wawancara, II/16 (angka romawi adalah bagian), 3.5.75.

daripada jumlah yang dibayarkan untuk pajak. Pada tahun 1928 seorang petani dengan satu *bau* harus membayar 30 persen dari penghasilan bersihnya untuk enam macam pajak.[18] Agar mendapatkan cukup pangan dan cukup uang tunai buat bayar pajak, para petani pun tenggelam dalam utang. Mereka terpaksa menyewakan tanahnya dengan sangat murah dan bekerja sebagai buruh musiman di pabrik gula atau masuk dalam lingkaran 'setan ijon' dengan menggadaikan tanaman sebelum panen. Utang-utang dan hilangnya milik tanah di desa ini mendorong tumbuhnya tukang riba yang terutama dikuasai oleh Arab dan Cina. Hal ini memperbesar kesempatan tumbuhnya tuan tanah dan tukang riba. Selain Arab dan Cina, para haji pun menjadi tukang riba dan sangat kaya raya karena dapat memiliki banyak rumah dan sawah yang diperolehnya dari sistem ijon karena sering kali si peminjam tidak mampu mengembalikan utangnya. Kekayaan ini membuat mereka sangat terpandang dan ditunjuk menjadi anggota *Landroad* (Pengadilan Negeri setempat untuk rakyat biasa) oleh pemerintah kolonial. Tukang-tukang riba sering menyita barang-barang berharga dari rumah pengutang. Malahan dengan tidak segan menarik pakaian pengutang untuk memperoleh uangnya kembali.[19]

Keadaan sosio-ekonomi rakyat yang sangat lemah terlihat juga dari kenyataan bahwa jumlah peminjam yang tidak bisa dikembalikan ke Bank Rakyat (*Volkscredietbank*) di Tiga Daerah lebih besar dari daerah lain di Jawa, kecuali Kediri sebelum tahun 1930. Semasa Depresi bank-bank menolak memberi pinjaman, sehingga ketergantungan pada peminjam lain semakin meningkat. Para petani terpaksa menggadaikan barang-barang miliknya yang tersisa ke rumah gadai negeri. Di Keresidenan Pekalongan jumlah barang gadai yang tidak tertebus meningkat dan rata-rata nilai uang yang dibayarkan untuk barang-barang gadaian ternyata terendah di Jawa.[20] Menggadaikan barang-barang emas milik mereka meningkat pada tahun 30-an di Jawa. Hal ini terbukti dari jumlah emas yang bernilai 158 juta gulden yang

[18] "Tani dan Sawah", *Neratja*, 23 November 1923.

[19] "Over den Woekerhandel in de Regentschappen Tegal, Brebes en Pemalang", *Blaadje Voor het Volkscredietwezen* No. 8, 15 Agustus 1925, hlm. 139, 144.

[20] *Indisch Verslag* 1938, tabel 128.

diangkat dari Indonesia lewat penggadaian pemerintah kolonial waktu itu.[21]

Pengaruh Sosial-Ekonomi Pabrik Gula

Di atas kemiskinan yang terjadi dengan berkurangnya milik dan beban pajak, berdirilah industri gula kolonial. Jawa adalah wilayah pengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Gula merupakan ekspor paling penting sampai pertengahan tahun 1920-an, dan baru berakhir ketika kedudukannya digantikan oleh karet. Pabrik gula tidak di izinkan memiliki tanah untuk ditanami tebu melainkan harus menyewa tanah rakyat. Terjadilah perusakan berat industri gula terhadap kesuburan tanah milik para petani, karena sepanjang tahun ditanami tebu dan irigasi menyerap air, menyebabkan petani sawah kekurangan air.

Faktor penyebab keuntungan industri gula yang melimpah ialah bahwa rakyat dipaksa menyewakan sawah beserta tenaga kerjanya secara murah. Sewa tanah berdasarkan pendapatan bersih dari panen padi dan palawija, bukan berdasarkan nilai tanah yang disesuaikan dengan harga gula di pasaran internasional. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh karena sewa yang murah itu jatuh pada orang-orang Eropa.[22]

Untuk menjaga agar pabrik mendapat sawah sesuai dengan kebutuhannya, maka di setiap desa ditetapkan berapa luas tanah yang harus disewakan. Agar sistem ini berjalan dengan baik, pemaksaan penyewaan tanah terhadap kaum tani dilakukan oleh elite birokrasi setempat, yaitu kepala desa atau pangreh praja.

Menjelang pertengahan tahun 1920-an di Keresidenan Pekalongan sejumlah 17 pabrik gula telah menjepit petani padi, sehingga mereka kurang atau sama sekali tidak dapat menanami sawahnya dengan padi. Di samping itu penanaman tebu secara kecil-kecilan oleh rakyat di luar perkebunan milik Eropa seperti yang dilakukan petani

---

[21]Emas bernilai 158 juta gulden diangkat dari NI, lewat penggadaian pemerintah kolonial.W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition* (Bandung, 1956), hlm. 94. Selanjutnya "Indonesian Society."

[22]T. van Geideren. "The Economics of the Tropical Colony", dalam *Indonesian Economics* (The Hague, 1961), hlm. 154.

Jawa Timur tidak dibenarkan di Keresidenan Pekalongan. Seperti apa yang dialami lurah Pangkah yang menanam tebu dan menggilingnya sendiri. Asisten Residen Tegal memerintahkan untuk menghentikan usaha itu, tetapi tidak diindahkan oleh kepala desa tersebut. Dia pun diancam, dan polisi datang untuk menghentikannya. Kepala desa itu terpaksa menghentikan usahanya, karena kalau tidak ia akan diseret ke meja hijau.[23]

Di Kewedanan Slawi, 31 persen dari sawah ditanami tebu[24] dan di Kewedanan Adiwerna terdapat tiga pabrik gula. Inilah kenyataan mengenai apa yang terjadi pada kaum tani di tahun 1930-an. Dengan kepadatan penduduk Adiwerna tertinggi di Jawa, hanya 21,8 persen dari angkatan kerjanya, dengan beban pajak yang bekerja dalam pertanian, sedangkan 25,3 persen terpaksa lari ke bidang industri dan 28,9 persen lainnya merupakan tenaga kerja tidak terampil yang harus mencari pekerjaan sebagai buruh lepas.[25] Sampai pada waktu Depresi kebanyakan mereka bekerja di perkebunan tebu orang Eropa.

Kepala desa yang menyewakan tanah desa kepada pabrik gula memperoleh premi, yaitu sebagian dari panen tebu sebagai perangsang untuk mengambil tanah petani.[26] Penduduk desa tidak dapat menolak perintah kepala desa, lebih-lebih perintah camat. Pabrik-pabrik gula tersebut juga melakukan penyuapan kepada guru-guru atau kiai-kiai setempat, dengan jalan mendirikan Masjid atau Surau di sekitar pabrik yang memerlukan tanah untuk disewa.

Sering terjadi protes sosial terhadap pabrik gula dengan membakar ladang tebu. Pembakaran ladang sering terjadi di Pekalongan menjelang tahun 1910.[27] Alasan dilakukannya pembakaran itu ialah pen-

---

[23]Tokoh Nasionalis Pangkah, Transkripsi Wawancara, I/5-7, 22.11.75.

[24]*Landbouw Atlas van Java en Madoera*, bagian ke II, tabel IV.

[25]Karel J. Pelzer, *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics* (New York, 1948), hlm. 167.

[26]Tokoh Nasionalis Pangkah, Wawancara, 27.11.75. Ia dibesarkan di seputar pabrik gula yang tertua di Tegal.

[27]Antara Juni 1910 dan September 1911, 205 kasus pembakaran sengaja dilaporkan dalam Keresidenan Pekalongan. M. van Geuns, "Het Rietbrandenvraagstuk in Pekalongan" cetak ulang *Soerabajasch Handelsblad*, 1911, hlm. 4-5. Di Madiun dalam tahun 1913 antara 3-8 persen ladang tebu menjadi sasaran pembakaran, Onghokham, Madiun, hlm. 15-17.

duduk harus menunggu tebu berkadar gula yang tinggi, sehingga panen tebu harus ditunda. Sebagai akibat pabrik gula terlambat mengembalikan tanah pada saat musim tanam padi sudah harus dimulai. Pembakaran-pembakaran ladang tebu menyebabkan Residen Pekalongan meminta pabrik untuk menggaji opas-opas tebu (penjaga ladang). Karena tidak dikontrol siapa yang ditunjuk untuk menjadi opas, jagoan-jagoan desa ditunjuk untuk tugas tersebut, sehingga sering mencemaskan masyarakat desa.[28] Di samping itu penduduk desa mendapat tugas tambahan, yaitu mengawal kebun tebu (*tuinbewaking dienst*) tanpa dibayar. Wajarlah bila kewajiban kerja tambahan ini ditentang penduduk desa, termasuk yang tidak menyewakan tanahnya kepada pabrik, yang harus ikut memadamkan kebakaran itu. Rakyat telah diubah menjadi "pengawal pemilik pabrik" demikian kata H. Agus Salim, tokoh Sarekat Islam.[29] Pabrik gula juga mempunyai polisi yang serupa dengan polisi umum, berwenang untuk menangkap dan menahan seseorang. Kenyataannya polisi desa lebih banyak membela kepentingan pabrik daripada kepentingan desanya.

Penduduk yang tanahnya telah digunakan oleh pabrik untuk dipakai sebagai jalan lori (kereta api kecil pengangkut tebu) tidak diberi ganti rugi. Apabila pabrik meminta tanah selebar delapan meter untuk jalan lori, dalam kenyataannya para mandor tebu menggunakan separoh dari tanah tadi untuk ditanami padi bagi kepentingannya sendiri. Lebih parah lagi, saluran irigasi tidak boleh dibangun di bawah jalur lori tersebut.[30]

Paling tidak sejak tahun 1918 para pemimpin sarekat Islam sudah mulai memperjuangkan kepentingan petani terhadap pabrik. Sarekat Islam berhasil menekan pabrik agar menaikkan upah bagi buruh lepas dan sewa tanah di beberapa tempat, meski pernah juga administrator pabrik gula memindahkan pemimpin Sarekat Islam karena selalu membela kepentingan petani dan merugikan pabrik.[31] Tidak banyak terjadi pangreh praja membela kepentingan rakyat. Seorang wedana

[28]Van Geuns, op.cit., hlm. 15-17.
[29]*Neratja*, 23 Desember 1918.
[30]Tokoh nasionalis Comal, Wawancara, 15.12.75.
[31]Nasionalis Pangkah, Transkripsi Wawancara, I/3, 27.11.75; *Neratja*, 12 April 1919.

dan seorang kontrolir Belanda di Pekalongan memberi saran kepada administratur pabrik supaya sewa tanah dari pabrik gula disamakan dengan pembayaran antara petani sendiri. Administratur menjawab bahwa ketetapan besarnya sewa tanah sudah disetujui oleh residen.[32] Rakyat menyadari betapa berkuasanya seorang administratur pabrik, sehingga mereka beri dia julukan "besar pabrik."[33]

Kalau pembayaran sewa rendah hanya dikenakan pada mereka yang tanahnya disewa pabrik, maka pembagian air antara ladang tebu dan sawah dikenakan pula pada semua petani. Tebu sangat membutuhkan air, yaitu sebanyak hampir tiga kali kebutuhan padi. Petani mengeluh dengan semakin sulitnya irigasi bagi sawah, yang hanya dapat diperolehnya pada malam hari di musim tanam tebu. Irigasi, yang dikendalikan oleh orang Eropa, mengatur pembagian air. Pabrik memperoleh banyak air untuk memenuhi kebutuhannya. "Persaingan untuk mendapatkan air bagi tebu dan sawah padi menimbulkan pertengkaran dan penipuan yang tidak habis-habisnya."[34] Di daerah yang tidak terdapat tanaman tebu, sistem irigasi diatur oleh kepala desa melalui pamong desa yang disebut "ulu-ulu." Dalam tahun 1921 petani sering mengeluh, karena ulu-ulu sering lebih banyak menggunakan waktunya untuk menyalurkan air bagi kepentingannya, yakni kepala desa, daripada untuk kepentingan penduduk. Sengketa mengenai air demikian hangatnya dan sering menimbulkan bentrokan, sehingga sawah harus dijaga agar tidak ada pencurian air. Ketergantungan petani pada tuan tanah kaya untuk mendapatkan pinjaman uang dan padi, terutama di musim paceklik, menyurutkan mereka untuk menuntut pembagian air yang lebih adil. "Tuan tanah kaya dapat membuat mereka menderita dengan menolak memberi pinjaman uang dan padi."[35]

---

[32]Sarimin Reksodihardjo, "Kenang-kenangan dari masa silam", memoir teranggal 1 Januari 1965 (selanjutnya "Kenang-kenangan"), hlm. 85-85 (belum diterbitkan).

[33]Sebutan "besar pabrik" bagi administratur pabrik masih umum di desa-desa. Rumah kediamannya yang lebih besar dari rumah kediaman bupati, disebut "besaran."

[34]J.J van Klaveren, *The Dutch Colonial System in the East Indies* (The Hague, 1953), hlm. 172.

[35]Hoengoedia, "Verslag omtrent de oeloe-oeloe regeling in het Pemali-Tjomal," *Indisch Bouwkundig Tijdschrift*, 1921, hlm. 225.

Kemerosotan yang menyolok bagi industri gula semasa depresi ekonomi merupakan krisis utama bagi Keresidenan Pekalongan. Investasi bagi pemeliharaan dan pembuatan irigasi baru terhenti, upah merosot, kerja musiman di pabrik juga terhenti. Jalan kembali ke ekonomi subsistensi bukanlah menuju penyederhanaan kehidupan masyarakat pedesaan, tetapi pemiskinan dan kesengsaraan.[36]

Ternyata depresi ekonomi memberi beban lebih berat di Indonesia dibandingkan dengan di negeri lain. Beban kaum tani bertambah dengan melihat menyusutnya penghasilan mereka. Pendapatan dari penjualan hasil perekebunan pun merosot, bahkan pernah sampai 70 persen.[37] Di pihak lain kebutuhan sehari-hari tidak berkurang, sedangkan bunga pinjaman dan pajak harus tetap dibayar. Harga padi turun lebih dari separuh di Pemalang Selatan antara tahun 1928 dan 1931, sedangkan pajak tanah naik hampir dua kali lipat.[38]

Pulihnya industri gula di Pekalongan dan dibukanya kembali penggilingan-penggilingan tebu pada tahun 1937 tidaklah mempengaruhi upah di Tegal, yang terendah di Jawa. Pemulihan penanaman tebu di Pekalongan yang lebih cepat dibandingkan dengan tempat-tempat lain disebabkan karena rendahnya upah, yang merupakan daya tarik bagi pabrik-pabrik. Selain itu hanya diperlukan sedikit investasi tambahan untuk irigasi yang sudah ada.

Proses pemiskinan yang terjadi dalam tiga atau empat generasi kurang berarti dalam ingatan rakyat bila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami pada tahun 1930-an. Selama dasawarsa itu, para pemimpin revolusi merasa kehilangan kesempatan buat hidup layak. Hal itu terjadi karena adanya pajak-pajak kolonial dan pabrik gula, yang didukung oleh birokrat. Peranan pangreh praja memang sangat menentukan. Sebagai pengamat keamanan dan hasil panen bagi Belanda, peranannya diutamakan sehubungan dengan pentingnya gula dalam ekonomi. Beban pajak, kepadatan penduduk, khususnya di Tegal, dan meningkatnya utang rakyat di satu pihak menjadikan pang-

[36]Wertheim, *Indonesian Society*, hlm. 92.

[37]*Ibid.*, hlm. 92. Wertheim mengutip Liga Bangsa-Bangsa, *World Economic Surveys*, tahun 1932-3, 1933-4 dan 1934-5 sebagai sumber analisisnya.

[38]Soekasno, "Grondwocker als gevolg van Crediettransacties in het Pemalangsche," *Volkscredietwezen* No. 24, 1936, hlm. 191.

reh praja berkedudukan sulit sebagai wakil rakyat terhadap pemerintah ataupun untuk dapat menolong petani. Di pihak lain mereka pun berperan sebagai pemungut dan pengumpul pajak yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengawasan terhadap pemimpin-pemimpin nasionalis yang sering mereka buru dengan galaknya, lebih daripada yang dilakukan oleh orang-orang Belanda sendiri. Bagi Belanda, pangreh praja adalah pusat anti-nasionalis yang mengendalikan keamanan dan ketertiban melalui jaringan mata-mata dan informan. Kenaikan pangkat pangreh praja berdasarkan tiga hal: kemahirannya dalam mengelola administrasi, mengawasi kriminalitas, dan memungut pajak. Dalam mengawasi kriminalitas, seorang camat memperoleh Dana Polisi Rahasia (*Geheime Politie Fonds*) sebesar 15 gulden per bulan buat menggaji mata-mata. Karena penggunaan uang ini tidak harus dipertanggungjawabkan dalam pembukuan terhadap para penguasa kolonial, beberapa camat yang menunjukkan kemampuannya dalam "menangkap orang bersalah" dan mencegah "kriminalitas serta pembangkangan" dalam wilayahnya, sering menggunakan gajinya sendiri buat menggaji mata-mata.[39]

Kegiatan pangreh praja tidak terbatas pada pengawasan politik dan pengumpulan pajak saja. Untuk menghadapi Sarekat Islam, kaum priayi pekalongan mendirikan organisasi dengan nama Pirukunan.[40] Beberapa organisasi pangreh praja anti-nasionalis serupa muncul di tempat-tempat lain di Jawa. Pada akhir tahun 1930-an misalnya, cabang-cabang Mardi Utama dibentuk di tengah-tengah rakyat desa yang miskin seperti yang terjadi di Pemalang Selatan. Ini merupakan gerakan pangreh praja dari tingkat camat ke bawah. Anggotanya kebanyakan para pemimpin dan pada umumnya menyandang sebutan Raden Mas dan menjabat sebagai juru tulis atau pembantu juru tulis.[41] Dengan ketuanya Camat Pulosari dan pengurusnya para pangreh praja yang kebanyakan beranggotakan kepala desa, Mardi Utomo aktif di bidang kesehatan, olah raga, kerajinan tangan, dan kesenian.

---

[39]Camat Tonjong (Wadyono), Wawancara, 7.10.76.

[40]*Neratja*, 29 Agustus 1918.

[41]Heather Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite: the Colonial Transformation of the Javanes Priayi* (Singapore, 1979) hlm. 75, 123 (selanjutnya *The Making*).

Programnya meliputi penanaman bambu dan teh untuk mencegah erosi, pembasmian tikus, pembangunan jamban di desa-desa, dan pembagian obat-obatan pemerintah guna melawan disentri, penyakit pes, dan mengurus pembagian beras merah, dan kacang bagi penderita penyakit busung lapar pada tahun 1939.[42] Dengan dana tambahan dari pemerintah, pangreh praja memperkokoh kekuasaan dan pengaruhnya untuk menghadapi elite nasional dengan meringankan beban penderitaan rakyat. Tetapi dana ini sama sekali tidak mencukupi usaha penanggulangan bencana yang sudah semakin parah di Pemalang Selatan pada pertengahan tahun 1939. pada bulan Juni tahun itu dilaporkan bahwa ada 1.436 orang terkena busung lapar, sedangkan rumah sakit hanya dapat menampung sebanyak 200 pasien, termasuk 53 anak-anak. Dengan dimuatnya berita tentang bencana tersebut, pemerintah memberi tambahan dana, yang kemudian disusul dengan penelitian tentang adanya kelaparan di Pulosari dan Belik.[43]

Keresidenan terbagi dalam beberapa daerah berdasarkan kesetiaan kepada pemerintahan kolonial, bahkan dalam kalangan priayi itu sendiri terjadi pula pembagian demikian. Pada masa kekuasaan VOC pada abad ke-17 dan 18, kaum priayi harus bekerja sama dengan VOC demi kestabilan ekonomi dan kepentingan finansial Belanda. Di Tegal, sebagai hadiah, Belanda memberi janji kepada keluarga Reksonegoro untuk memerintah di Jawa sejak 1678, yang menganggap keturunan langsung dari Sultan Demak. Oleh karena itu priayi Tegal menghindari adanya perkawinan dengan priayi Pekalongan, karena mereka dianggap sebagai keturunan kolabor pertama dengan Belanda di Semarang. Pernah terjadi perkawinan yang menghebohkan, mengguncangkan keluarga ini pada tahun 1936, dengan akibat merosotnya kekuasaan Reksonegoro di Tegal.

[42]Tokoh Pulosari, Wawancara, 29.11.74.

[43]*Algemeen Landbouwweekblad voor Ned. Indie*, No. 14 30 September 1939, hlm. 186; De Indischman, 17 Mei 1939; Surabajash Handelsblad, 15 dan 16 Mei 1939.

Bupati Reksonegoro X, mengawini Kardinah,[44] saudara perempuan Kartini. Kardinah mendirikan sebuah rumah sakit, sekolah untuk anak-anak perempuan, dan rumah yatim piatu anak-anak perempuan Tegal. Karena tidak mempunyai anak, maka ketiga anak suaminya dari istri kedua (selir) diambil dan dijadikan anak sendiri. Salah seorang dari ketiga anak itu ialah Susmono yang menjadi Reksonegoro XI. Pada tahun 1936 ia akan dipecat oleh pemerintah Belanda, karena hubungan asmaranya dengan seorang wanita Belanda (istri administratur pabrik gula Pangkah) yang akhirnya ia kawini. Belanda menuduh Reksonegoro "telah melakukan penghinaan pada norma-norma kolonial Eropa,"[45] sedangkan istrinya, yaitu putri bupati Batang, menuntut perceraian.[46] Reksonegoro tidak mengindahkan ancaman itu dan mengira bahwa Belanda akan tetap memegang teguh janjinya kepada leluhurnya, bahkan rakyat Tegal mengirim petisi kepada pemerintahan Belanda dan memihaknya.[47]

Sejak awal Belanda menganggap penguasa pribumi penting sebagai pejabat yang mempertahankan hak-hak istimewanya, terutama kedudukan dalam adat kebiasaannya di mata rakyat. Karena itu bupati seharusnya tidak dikenai tindakan administratif secara terbuka atau direndahkan derajatnya, karena memiliki peranan adat sebagai alat untuk memperkokoh kekuasaan Belanda dengan cara-cara pribumi. Sudah bertahun-tahun kebutuhan perdagangan Belanda dan birokrasi administrasi mengurangi kekuasaan bupati, sementara bupati masih tetap mempertahankan status resminya. Biaya yang berlebihan, korupsi dan tingkah laku yang aneh tidak dihiraukan oleh Belanda demi mempertahankan fungsi bupati.

Namun pada tahun 1920-an terjadi perubahan-perubahan sosial di kalangan penduduk pribumi dan pada pemikiran penguasa

---

[44]Kardinah menjadi korban revolusi sosial pada Peristiwa Tiga Daerah. Lihat Bab VI. Untuk bacaan lebih lanjut mengenai keluarga bupati-bupati Jawa, lihat Heather Sutherland, "Notes on Java's Regent Families." Bagian I dan II, *Indonesia*, 16 Oktober 1973 dan 17 April 1974.

[45]Sutherland, *The Making*, hlm. 163.

[46]Ia kemudian menunjuk Mr. Besar sebagai pengacaranya, yang menjadi asisten residen Pekalongan di bawah Jepang, jabatan tertinggi yang terbuka untuk orang Indonesia di masa pendudukan itu. Wawancara, 24.7.75.

[47]Sutherland, *The Making*, hlm. 136, sumber asal analisis berikut ini.

kolonial Belanda. Para bupati itu semakin terasing dari kalangan cendekiawan rakyatnya, sedang pemerintah Belanda lebih mementingkan kejujuran dan kesopanan dalam jabatannya. Perubahan dalam masalah-masalah sosial dan hubungan antara bupati dan penguasa kolonial menjadi kaku dan kurang demokratis.

Walaupun para bupati masih mempertahankan hak-hak istimewanya, basis kekuasaanya yang tradisional mengurang, sehingga menjelang tahun 1930-an kedudukan mereka semakin lemah. Lalu Reksonegoro XI dapat dipaksa mengundurkan diri, karena Belanda menganggapnya telah melanggar tradisi sosial dan politik kolonial. Ia digantikan oleh seorang yang tidak menonjol, sehingga dengan menyolok merosotlah kekuasaan Bupati Tegal. Kabupaten Tegal telah diselamatkan dari rongrongan wanita Belanda, walaupun belum tentu bisa lolos dari rongrongan rakyat yang revolusioner.

Keresahan Politik

Sebelum pemberontakan komunis tahu 1926, telah banyak terdengar keluhan yang menyangkut ketidakpuasan rakyat mengenai gaji dan keadaan kerja di perkebunan Eropa dan kecilnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Pada tahun 1920-an keluhan-keluhan itu dikipasi oleh pemimpin Sarekat Islam yang aktif menyerang diskriminasi antara priayi dan rakyat.

Anggota gerakan nasional, yaitu kaum pergerakan, merasakan tajamnya diskriminasi ini di bidang pendidikan, karena hanya menguntungkan anak-anak priayi, terutama karena terbatasnya tempat bagi pribumi untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dasar berbahasa Belanda (HIS). Di pedesaan hanya mereka yang dipandang baik oleh camatlah yang mendapat kesempatan untuk dapat diterima di HIS.[48] Keluhan-keluhan lain tentang tingginya pajak pasar dan tidak demokratisnya pemilihan *gemeenteraad* (Dewan Kota) pun timbul. Priayilah yang mengusai Dewan, di samping itu mereka tidak memahami situasai di kampung dan jarang bergaul dengan rakyat.[49]

---

[48]Guru sekolah dasar Comal, Wawancara, 16.12.75.
[49]*Neratja*, 14 Desember 1918; 26 Mei 1919.

Sesudah gagalnya panen di Jawa tahun 1918 terjadilah pergerakan massa tani oleh sayap kiri Sarekat Islam Keresidenan Pekalongan, khususnya di daerah pantai. Timbul kerusuhan-kerusuhan di perkebunan karet dan pemogokan-pemogokan di bidang industri, ditumpangi dengan memburuknya hubungan orang-orang Eropa dan pribumi seperti yang terjadi di Dinas Kehutanan Pemalang.[50] Pemogokan meningkat dalam jumlah dan jenisnya. Pemimpin Sarekat Buruh Gula menyampaikan keluhan kepada Gubernur Jenderal sehubungan dengan adanya intimidasi polisi dan laporan-laporan palsu yang diedarkan oleh para pejabat Belanda dan pangreh praja.[51] Setelah Sarekat Islam pecah tahun 1923, banyak cabang Sarekat Islam menjelma jadi Sarekat Rakyat, suatu organisasi yang didirikan PKI untuk para petani yang sealiran dan berada di luar pusat-pusat kota. Menjelang Januari 1926 jumlah anggota Sarekat Rakyat cabang Tegal sekitar 3.500 orang, dan cabang Pekalongan 3.230 orang (termasuk 160 orang Cina).[52] Pada tahun 1923 pemogokan buruh kereta api yang digerakkan oleh VSTP (Perserikatan Buruh Kereta Api dan Trem) merupakan awal dari pertumbuhan yang pesat dari Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan banyaknya anggota Sarekat Islam dan VSTP yang masuk bergabung.[53] Setelah pemogokan hak-hak VSTP Pekalongan untuk berkumpul di muka umum dibatasi oleh penguasa kolonial.[54]

Pada akhir Februari 1926 situasi politik di Tegal dan Pekalongan memantapkan golongan komunis untuk memberontak terhadap penguasa, terutama dengan adanya ranting-ranting partai di sepanjang

---

[50]*Neratja*, 14 Desember 1918; 26 Mei 1919.

[51]*Neratja*, 5 Agustus 1920; 18,22 dan 25 September 1920. Dalam tuntutan-tuntutan ini termasuk juga jam-jam bebas kerja bagi sembahyang Jumat.

[52]"De Communistische Beweging in de Residentie Pekalongan Voor dan na de Beperking van het Vergaderrecht" lampiran dalam laporan Jasper (Residen Pekalongan) kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda (GG v NI) 26 Januari 1926, Mailrapport (Mailr) 151/26 (dua angka terakhir menunjukkan tahunnya).

[53]Residen Pekalongan (Schilling) kepada GG v NI, 28.2. 1927; Mailr. 354x/27. ("x" rahasia).

[54]Ruth T. Mc Vey, *The Rise of Indonesian Communism* (Ithaca, 1965) hlm. 151 (selanjutnya cummunism). Lain-lain daerah dalam cakupan verggaderverbad (larangan berapat) yang dikenakan pada VSTP adalah Semarang. Kediri, Madiun, Priangan, dan Surabaya.

pantai antara Cirebon dan Pekalongan.[55] Sarekat Buruh Kereta Api berperan sebagai penghubung utama antara kota dan pedalaman.

Meningkatnya kegiatan kaum kiri mendorong Belanda untuk meningkatkan pula kewaspadaan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat oleh Belanda, maka golongan kiri membentuk jaring-jaring bawah tanah di samping memelihara organisasi partai yang ada.[56] Organisasi kaum komunis ternyata masih lemah, sehingga pemberontakan yang meletus di beberapa tempat gagal. Dengan adanya pemberontakan-pemberontakan tersebut, diadakanlah penangkapan-penangkapan oleh polisi Belanda yang justru menambah ketidakpuasan rakyat karena adanya pajak yang bersumber dari pemungutan pajak, pemaksaan kewajiban jaga dan ronda malam (*ronde-diensten*), serta bersumber pula dari larangan-larangan untuk menyelenggarakan rapat.

Kejadian yang meletus di Dukuh Karangcegak, Kecamatan Tarub, merupakan salah satu akibat dari ketidakpuasan rakyat, di samping pajak yang dipungut, keharusan untuk bekerja di kecamatan pun dirasakan oleh rakyat sangat berat. Mulai tanggal 24 Februari 1926, menjadi penjaga dan peronda desa merupakan tugas kewajiban. Kewajiban ini ditentang oleh suatu kelompok yang disebut "Persaoedaraan Setia Hati" yang dipimpin oleh Suleiman, seorang tokoh Sarekat Rakyat. Walaupun Suleiman dan kawan-kawannya telah ditangkap, rakyat tetap melanjutkan tindakan menentang tugas kewajiban itu. Karena itu Wedana Adiwerna dan Camat Tarub datang ke Dukuh Karangcegak untuk menyaksikan keadaan sebenarnya. Adapun yang dianggap sebagai "perlawanan" itu hanyalah wajah para petani yang menantang sewaktu mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerjanya. Karena keadaan itu dianggap serius, keesokan harinya enam orang polisi didatangkan untuk mengatasi "huru-hara" tersebut. Polisi itulah yang sebenarnya menciptakan huru-hara, karena mendobrak pintu rumah para pemimpin Sarekat Rakyat yang dituduh memimpin penentangan terhadap wajib jaga

[55] Mc Vey, *Communism*, hlm. 331.

[56] *Ibid.* Juga lihat Mailr. 354x/27 untuk "Organisasi di Bawah Tanah" di Tegal tahun 1926.

tersebut, sehingga membangkitkan kemarahan rakyat yang segera mengepung wedana. Keesokan harinya wedana meminta bala bantuan dari polisi. Rakyat yang marah meningkat jumlahnya, lebih dari 200 orang; dengan bersenjatakan pentung, bambu runcing, dan parang pemotong tebu, mereka bersiap siaga. Sambil meneriakkan "Sabilillah" mereka menyerbu rumah seorang haji setempat, karena terdapat beberapa polisi dan agen PID yang sedang bersembunyi di tempat itu. Insiden ini menbawa kerusakan perabot rumah dan luka ringan di kalangan yang bersembunyi di rumah haji. Residen Pekalongan panik dan mengirim kawat kilat kepada Gubernur Jenderal di Bogor. Kemudian datanglah bala bantuan polisi dari Sukabumi, Semarang, dan Kudus ke Karangcegak untuk menumpas "pemberontakan" itu. Sejumlah 5.326 anggota Sarekat Rakyat diinteograsi atau ditahan di sembilan kecamatan, dan sebanyak 3.510 kartu keanggotaan disita polisi.[57] Dalam tahun 1926 dari Karangcegak sedikitnya 8 orang telah dibuang di Boven Digul dan lebih dari 60 orang dipenjarakan di beberapa tempat di Jawa.[58]

Pada bulan September 1926 di Desa Bangle, Kawedanan Adiwerna, pabrik gula Pagongan menolak mengembalikan tanah yang disewa, padahal sesuai kontrak, tanah itu harus dikembalikan kepada rakyat pada waktu dimulainya penanaman padi. Pabrik menolak penebangan tebu, karena kadar gula masih rendah, sehingga menimbulkan pertengkaran. Mandor tebu lalu melaporkan kejadian itu kepada Wedana. Enam orang yang berdiri membawa pisau penyabit rumput ditembak di tempat sebagai tindakan balas dendam Asisten Residen.[59]

Di antara daerah-daerah revolusioner yang penting yaitu Ujungrusi, kota pabrik gula, di Kawedanan Adiwerna yang berpenduduk padat itu. Tokoh Ujungrusi dan pemimpin Sarekat Buruh Sugono Reksoputro yang selalu menekankan kemiripan ajaran suci Al-Qur'an dengan Marxisme meninggal di dalam penjara, dan menurut Belanda

[57] *Overzicht van de Inlandsche-Maleisch-Chineesche Pers*, 16,17 April 1926, berjudul "De Ongeregelheden in Tegal." Laporan Bupati Pekalongan, 28 Maret 1926; Mailr. 397x/26.

[58] Nama rakyat Karangcegak yang ditahan dan dipenjarakan tercatat di dalam "Buku Keanggotaan Perintis Kemerdekaan Cabang Tegal."

[59] Mailr. 354x/27; *Overzicht* 36, 4 September 1926.

ia bunuh diri. Alasan yang diberikan Belanda membangkitkan kemarahan teman-teman dan keluarganya, sehingga Belanda terpaksa menjaga makamnya selama 40 hari. Pahlawan Ujungrusi ini akan tetap mengilhami perjuangan mereka.[60]

Perlawanan PKI yang meletus bulan Agustus dan September 1926 menunjukkan adanya semangat tinggi tanpa organisasi partai yang kuat. Perlawanan yang meletus sebelum matang ini membuat Belanda dapat membersihkan gerakan revolusioner dengan bantuan mata-mata dan informannya. Belanda dapat menangkap seluruh pimpinan partai di Tegal dan Pekalongan sebelum 12 November 1926, yaitu tanggal yang direncanakan untuk memulai revolusi.[61] Dengan adanya penangkapan itu, banyak tempat-tempat yang telah mempersiapkan diri untuk memberontak, menjadi tidak berdaya.

Arus revolusi PKI yang terlalu cepat dan pecah sebelum waktunya di tahun 1926 bukanlah tidak ada kelanjutannya. Di samping kegagalan-kegagalan dan penangkapan-penangkapan yang dialami, kejadian itu telah menjadikan PKI sebagai pelopor revolusioner di Tegal, yang dengan gigih telah melawan pajak-pajak, kerja paksa (*corvee*) yang berat, dan pabrik gula.

Meskipun Pekalongan tetap dianggap Belanda sebagai satu dari dua keresidenan yang aktif dalam bidang politik di Jawa Tengah pada tahun 1930,[62] namun sayangnya kegiatan mereka terpecah belah dan terbatas pada kelompok-kelompok kecil di ibukota kabupaten. Mereka sangat tergantung pada kejelian PID (Polisi Intel Belanda) dan pemimpin-pemimpin mereka yang tidak berada di penjara, yaitu beberapa pengikut Soekarno, PNI-baru dan kaum Nasionalis Islam. Adapun kegiatan PNI di kota Pekalongan pada enam bulan terakhir tahun 1929 berada di bawah komando Kromo Lawi, (lihat lampiran biografi) yaitu seorang bekas anggota Angkatan Laut Belanda yang dipecat karena "condong ke komunis." Sampai dengan Desember 1929, PNI mempunyai lebih dari 500 anggota. Mereka berhasil mele-

---

[60] Lihat McVey, *Communism*, hlm. 340,478, catatan 7; Mailr. 354x/27.

[61] McVey, *Cummunism*, hlm. 341-44.

[62] *Memorie van Overgave* (M.v.O.) P.J. van Gulik, Gubernur Jawa Tengah 1930. Mailr. 126/30. Lain daerah adalah Semarang.

takkan program-programnya secara teratur dengan dana keuangan yang cukup banyak. Penggeledahan rumah-rumah anggota dan penangkapan Kromo Lawi pada akhir Desember 1929 diikuti dengan penahanannya selama lima bulan, mengakibatkan banyaknya pedagang Minangkabau yang menjadi pendukung PNI, kembali ke Padang.[63] Gerakan itu lalu surut, walaupun para pedagang itu tetap mendukungnya sampai tahun 1930. Dalam bulan Mei 1930, Kromo Lawi dibebaskan dari tahanan, tetapi PNI kemudian dibubarkan pada bulan April 1931.

Pada masa itu Tegal tidak mempunyai tokoh pengikut Sukarno yang kuat seperti Kromo Lawi, yang dapat membangkitkan kembali sisa-sisa pergerakan setelah adanya malapetaka 1926. Budi Utomo, yang dipimpin oleh seorang ahli hukum "sayap kiri" Mr. Sastromulyono, dan Muhammadiyah merupakan satu-satunya tanda kehidupan politik di Tegal pada akhir tahun dua puluhan.[64] Selain PNI terdapat pula dua partai nasionalis lainnya yaitu Partindo (Partai Indonesia) dan Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Lemahnya pergerakan di Tegal karena lebih banyaknya gangguan, baik dari PID maupun dari polisi, menyebabkan kondisinya lebih parah daripada Pemalang, oleh karena pemberontakan pada tahun 1926. Kelompok aktif, Indonesia Muda, yang didirikan dan dipimpin oleh Supeno, seorang mahasiswa dari Tegal, dibekukan ketika polisi meminta semua anggotanya menandatangani pernyataan bahwa mereka telah meninggalkan organisasi itu. Beberapa dari mereka kemudian mendirikan Islam Studie Club, sebagian lainnya bergabung dengan Muhammadiyah, dan Supeno masih mengadakan hubungan erat dengan kelompok Indonesia Muda, baik di tahun 1930-an maupun semasa pendudukan Jepang.

Kelompok Islam Modernis kedua, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), walau tidak mengalami gangguan, juga ditimpa kemerosotan seperti setelah keberhasilannya yang singkat di Pekalongan ta-

[63]M.v.O., J.J.M.A. Propelier, residen Pekalongan, Oktober 1929– Januari 1932. Mailr. 339/32, *Bijlage: Politiek Toestand.*

[64]Residen Tegal mencatat bahwa keadaan politik "sangat memuaskan" dan penggeledahan rumah dalam Desember 1929 terhadap PNI di Pekalongan sebenarnya tidak perlu dilaksanakan di Tegal, karena tidak ada cabangnya di Residensi Tegal, J.C. Brinks, M.v.O.

hun 1929. Baru setelah tahun 1931, ketika kantor PSII cabang keresidenan pindah ke Batang, organisasi itu menjadi lebih efektif kembali.[65] PSII, partai besar tertua sebelum perang berasaskan Nasionalisme dan paham non-koperasi yang merupakan kelanjutan perkembangan Sarekat Islam pada tahun 1920-an, dan mempunyai pembinaan kader yang efektif di Tegal di bawah kepemimpinan Wondoamiseno.[66] Di wilayah pedesaan, orang-orang sengaja menggunakan alasan agama menentang pengambilan contoh darah oleh petugas kesehatan dalam program pemberantasan penyakit pes. Para pemimpin gerakan rakyat ini menjelang tahun 1932 dipenjarakan setelah adanya bentrokan-bentrokan dengan petugas Dinas Kesehatan. Selain para pendukungnya di ibukota-ibukota kabupaten, Muhammadiyah juga mempunyai dua banteng yang kuat di Keresidenan Pekalongan, yaitu pertama, kota perdagangan makmur Bumiayu (di bagian Kabupaten Brebes) dan kedua, Pekajang, pusat tekstil tenun tepat di selatan Pekalongan. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan HIS Muhammadiyah untuk menberi pendidikan kepada yang tidak berhasil memasuki HIS pemerintah. Selain adanya perbedaan dalam aliran keagamaan, tokoh PSII K.H. Abu Suja'i, yang menentang pengambilan darah dari tubuh jenazah, tidak bersedia bekerja sama dengan Muhammadiyah karena mereka dianggap sangat moderat dan pro-pemerintah kolonial.[67]

Di Kabupaten Brebes, sebelum perang pergerakan menghadapi masalah-masalah yang berbeda-beda, yaitu terbaginya secara fisik antara Brebes dan Ketanggungan sebagai pusat yang lebih aktif, dan terletak di jalur penting kereta api di daerah selatan. Di Ketanggungan, Taman Siswa dipimpin oleh orang-orang pergerakan, sedangkan di Brebes tidak demikian halnya. Ketanggungan juga menjadi pusat, baik gerakan Islam modern maupun NU (Nahdlatul Ulama), serta mempunyai satu dari dua sekolah menengah pertama (MULO) swas-

[65]Mailr. 339/32.

[66]Ia kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri dalam kabinet pertama Amir Sjarifuddin tahun 1947, lalu Wakil Perdana Menteri kedua dalam kabinet kedua Amir, mewakili PSII.

[67]Wakil Ketua KNI Kota Tegal, Jawaban tertulis atas pertanyaan penulis (selanjutnya "Jawaban") 6 November 1972 .

ta yang terdapat di Tiga Daerah tersebut.

Pemalang agak berbeda dari lain-lain kabupaten, hal ini disebabkan oleh adanya tokoh Sarino Mangunpranoto, ketua Perguruan Taman Siswa, seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh di Pemalang dalam tahun 1930-an. Ia juga memimpin koperasi dengan dukungan kepala-kepala desa sampai tahun 1943. Sarino mengajak Partindo dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menggunakan gedung Taman Siswa bagi rapat-rapatnya, walaupun ia sendiri bukan anggota suatu partai. Selain itu, ia juga pemimpin organisasi kepanduan. Karena hubungan pribadinya yang dekat dengan pejabat Belanda dan polisi, maka tokoh nasionalis moderat Pemalang ini tidak mengalami gangguan polisi dan pangreh praja seperti di daerah lainnya.[68] Taman Siswa tidak pernah ditegur karena mengizinkan Partindo atau Indonesia Muda menggunakan gedung-gedungnya untuk rapat-rapat politik, atau karena dengan sengaja tidak mengibarkan bendera Belanda pada hari ulang tahun kelahiran Ratu Wilhelmina, ataupun karena tidak memecat seorang pengajarnya berdasarkan peraturan Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonantie*) pada tahun 1933.[69]

Kaum nasionalis radikal di keresidenan ini sesudah November 1926 kekurangan pemimpin karena banyak pemimpinnya dibuang ke Boven Digul atau dipenjarakan.[70] Kaum radikal yang tinggal disalurkan ke Persi (Persatuan Sopir Indonesia) cabang Cirebon yang berada di bawah pimpinan Mr. Mohammad Yusuf.[71]

---

[68]Sarino, Wawancara, 9.7.76. Lihat juga Anton Lucas, "The Bamboo Spear Pierces the Payung: the Revolution Against the Bureaucratic Elite in North Central Java in 1945" (Ph.D. The Australian National University,1980) selanjutnya *Bamboo Spear*, hlm. 33 catatan 102-4.

[69]Untuk "Sekolah Liar" lihat Bernard H.M Vlekke, *Nusantara: History of Indonesia*, (Den Haag dan Bandung, 1959), hlm. 384, "Sekolah Liar" dianggap oleh Belanda sebagai sekolah yang tidak terurus baik karena guru-gurunya "tidak bermutu."

[70]Mereka yang paling awal kembali dari Digul karena bersedia menandatangani pernyataan janji untuk tidak berperan serta lagi dalam kegiatan politik apa pun.

[71]Kemudian memimpin PKI yang didirikan kembali di Cirebon pada November 1945.

Para Lenggaong

Salah satu kelompok sosial yang berperan dalam perkembangan politik dan memainkan peranan penting sebelum Oktober 1945, adalah para "bandit" atau lenggaong. Mereka mempunyai kedudukan yang istimewa di mata masyarakat baik karena kebaikannya maupun kejahatannya, suatu campuran antara pemenuhan kewajiban kesejahteraan sosial dan religio-mistisnya dengan perampokan dan pemerasan yang mereka lakukan. Sedang kelompok lain yaitu pokrol bambu yang bekerja untuk membantu orang-orang lemah yang hak-haknya dilanggar menjadi membantu di pengadilan demi kepentingan kaum miskin.

Arti lenggaong dipergunakan dalam istilah yang berbeda-beda. Mereka dianggap mempunyai "derajat" tertentu di mata penduduk setempat karena tingkat pengetahuan (*ngelmu*) yang hanya dikuasai oleh orang-orang terbatas saja atau "*kanuragan*" dan kekuatan magis (*kesakten*) yang diberikan oleh *ngelmu* itu melalui inilah para lenggaong bisa mencapai berbagai tingkat kekebalan dan semacam kesucian.[72]

Pada ujung terbawah dari skala ini terdapat bajingan dan pencuri, sedangkan kawasan kota menghasilkan pencoleng yang berkualitas lebih tinggi. Beberapa kelompok dikenal karena keahliannya berkelahi dan beberapa lainnya lagi menghimpun pencuri-pencuri lebih rendah. Jago-jago berkelahi dan pemimpin pencuri (pentolan ini dianggap memiliki kekebalan lebih tinggi yang mereka peroleh dari azimat yang lebih kuat dan bersifat melindungi. Mereka mempunyai keberanian lebih besar dan kontak-kontak lebih rapi.

Masyarakat petani setempat memandang lenggaong dengan rasa segan, takut, dan takjub. Priayi dan penguasa kolonial pura-pura bersikap lebih unggul, menyebutnya sebagai kecu, garong, dan begal walaupun ada ketergantungan tertentu pada lenggaong. Belanda di Comal menjulukinya "anggaok," artinya burung gagak (pemakan

[72] *Onghokham*, "Madiun," hlm. 64: lihat juga A.J. Stockwell, *British Policy and Malay Politics during the Malayan Union Experiment*, 1942-1948 (Kuala Lumpur, 1978), Bab 8, mengenai kekuasaan politik dan sifat magis-spiritual dari kultus di dalam kehidupan pedesaan di Malaysia sesudah Perang Dunia II.

Bangkai). Bagi penduduk pribumi, mereka dipandang sebagai jago, pendekar, atau sang juara, sebutan yang menunjukkan tingginya status mereka di dalam kehidupan pedesaan.

Seorang nasionalis dari Kawedanan Comal tempat terdapat banyak lenggaong, melukiskannya sebagai berikut:

> Kalau pencuri hampir setiap desa ada orang yang kerjanya mencuri; tetapi lenggaong tidak mesti. Lenggaong adalah orang yang kuat secara fisik dan punya ilmu-ilmu *(ngelmu)* dalam, untuk menjadi lenggaong memerlukan waktu lama belajar sifat dan ilmu-ilmu dalam. Dan kalau sudah mendapat sebutan lenggaong nafkah hidupnya bukan dari mencuri, tetapi dari orang lain yang memerlukan perlindungannya. Pada zaman penjajahan umumnya disegani oleh rakyat sebab tindakannya tidak mengganggu rakyat, dan yang diganggu adalah aparat Belanda atau kalau yang rakyat yang diganggu yang dikaregorikan *tuan tanah*.[73]

Kadang-kadang seorang lenggaong mempelajari silat di pesantren, dan kembali ke desanya dengan sedikit pengetahuan tentang kata-kata Arab. Di mata rakyat ia memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi dan ilmu *kanuragan*, sehingga badannya kebal terhadap senjata, berilmu siluman, yaitu kepandaian seseorang untuk bisa memasuki dan meninggalkan rumah tanpa diketahui orang lain.[74] Adanya unsur-unsur magis religius yang kuat di daerah pedesaan Islam menyebabkan tidak sedikit kiai-kiai di desa-desa Keresidenan Pekalongan yang dipuja-puja karena ilmunya itu.

Di Pemalang Selatan makam seorang lenggaong terkenal hingga kini masih diziarahi karena sewaktu hidup di masa paceklik, ia mencuri makanan dari orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada mereka yang merintih kelaparan.[75] Pada akhir abad ke-19, Gentoloyo Nayo Genggong dari Pacul (Tegal) adalah satu dari tiga lenggaong terkenal pesisir barat yang suka mencuri kerbau, mengubah bentuk tanduknya sehingga tidak dapat dikenali lagi oleh pemiliknya, lalu disem-

---

[73]Tokoh nasionalis Comal, Jawaban, 15.6.76.

[74]Lihat Geirge Quinn, "The Javanese Science of Bulgary," *Review of Indonesia and Malaysian Affairs*, Jilid 9, No. 1 Januari-Juni 1975, hlm. 33-34.

[75]Lurah Kreyo (Pemalang Selatan), Wawancara, 8.2.75. Orang ini disebut "maling pandung aguna."

belih, dan dagingnya dibagi-bagikan kepada si miskin.[76] Tahun 1919, yaitu tahun panen terburuk, perampokan merajalela di Pekalongan, rakyatnya berada diambang kelaparan dan makanannya bercampur dedak (serbuk halus dari kulit padi untuk makanan ayam—*Peny.*) dan beras. Gerombolan perampok mempergunakan senapan patah yang disebut "blosdrong" untuk merampok emas dan pakaian orang-orang kaya.[77] Di zaman kolonial, tokoh-tokoh lenggaong ini berperan sebagai kuasa penengah antara desa dan dunia luarnya, maupun antara lurah dan rakyat di dalam desanya sendiri.[78] Mereka sering kali mempunyai hubungan timbal balik dengan kepala desa dalam menjamin keamanan desa, bertindak sebagai pengawal pribadi pada perayaan-perayaan desa seperti di dalam tayuban (berjoget bersama ronggeng diiringi gamelan). Tayuban yang populer di pedesaan digunakan oleh para lenggaong untuk tempat pertemuan dan mempertebal kesetiakawanan, sehingga hampir di setiap kecamatan terdapat tempat pertemuan semacam itu. Penguasa kolonial memang tidak membersihkan lenggaong secara tuntas, walaupun diakui bahwa mereka itu kasar namun masih diperlakukan sebagai alat mengontrol rakyat oleh golongan elite birokrat.

Desa-desa yang didiami lenggaong memang masih sulit dikontrol oleh penguasa, karena tanah yang dapat disewa dengan murah tidak dapat diperoleh dengan mudah, dan tanah tersebut harus dikembalikan pada batas waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu Belanda menganggap perlu pangreh praja yang akan ditempatkan di kecamatan-kecamatan daerah pabrik harus diberi percobaan dulu. Ekonomi moneter telah memasuki kehidupan daerah pabrik, sehingga pelacuran, judi, minuman "ciu" (minuman keras terbuat dari ampas tebu) dan perampokan menjadi sebagian dari kehidupan rakyat di daerah tersebut.

Keadaan sosial ini menjadi strategi PKI dalam menarik unsur-unsur "di luar hukum" itu ke dalam partai selama tahun 1920-an.

---

[76]Tokoh nasionalis Tegal, Wawancara, 20.11.75. Gentolo Nayo Genggong adalah kakek K.H. Abu Suja'i, tokoh PSII Tegal. "Gento" menurut logat Tegal berarti "pencuri yang mahir atau berguna."

[77]*Neratja*, 3 September 1918, 11 Januari 1919.

[78]Lihatlah pembahasan tentang jago dalam Onghokham, Madiun, hlm. 63-69.

Mereka tertarik kepada PKI "...sebagian karena ketidakpatuhannya kepada penguasa dan bukan karena kepentingan kelas atau doktrin."[79] Dalam bulan Maret 1925, Alimin mendesak pimpinan partai setempat untuk mencari kampung-kampung sasaran bagi penjahat yang akan memimpin teman-temannya dalam perampokan, dan dua pertiga hasil perampokan akan dibagikan kepada PKI.[80] Tidak sedikit tokoh Sarekat Rakyat yang menjadi kerja sama dengan lenggaong di desanya selama periode ini.

Sementara itu pokrol bambu merupakan sebuah barometer penting yang menunjuk sejauh mana rasa sakit hati atau keresahan rakyat terhadap elite birokrat di Tiga Daerah. Bila lenggaong sebagai calo kekuasaan bertindak atas nama rakyat pedesaan yang jumlahnya semakin membesar, maka pokrol bambu adalah calo hukum pembela di dalam maupun di luar gedung pengadilan dari ketamakan tukang-tukang riba yang sebagian besar adalah orang-orang Arab dan pejabat yang kelewat bersemangat. Meski terdapat banyak macam pokrol bambu di seluruh Jawa, namun semuanya mempunyai pengetahuan tentang bagaimana sistem hukum yang sebenarnya berlaku tanpa menyandang gelar resmi di bidang pendidikan hukum.[81]

Di Tiga Daerah hampir setiap desa mempunyai seorang pokrol bambu. Pokrol bambu menjadi sumber nafkah hidupnya, karena sering didapatnya sejumlah uang dengan melakukan pembelaan atau upaya hukum dalam kasus-kasus pinjam-meminjam, penggadaian sawah, harta warisan, dan gugatan-gugatan terhadap kepala desa maupun pejabat yang lebih tinggi. Bila si pemerkara tidak punya uang, paling tidak dia biasa mengajak pokrol bambu makan sate di kota. Para pokrol bambu ini dibenci hampir oleh semua pangreh praja, karena mungkin dianggap terlalu lincah, pandai menulis surat, pandai berbicara dan mahir berdebat, terutama sejak mereka memiliki kebi-

[79]McVey, *Communism*, hlm. 229.

[80]Harry T. Benda and Ruth T. McVey (editors) *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Document* (Cornell University Modern Indonesia Project, 1960 hlm. 3,10.

[81]Daniel S. Lev, "Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia" dan Claire Holt (ed.) *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca, Cornell University Press, 1972), hlm 259.

asaan suka menulis surat kepada wedana dan menyingkap korupsi para kepala desa dan camat. Perannya diduga mengandung arti lebih penting di dalam adat kebiasaan, yaitu bahwa menentang penguasa berarti mengundang semacam *tulah* (petaka—*Peny.*) atau ketidakberuntungan untuk dirinya. Selama tahun-tahun 1930-an, banyak pokrol bambu menjadi anggota Partindo di ranting-ranting pedesaan, dan mereka itu membantu membela si lemah terhadap penindasan pangreh praja.[82] Yang menarik lagi ialah bahwa seorang pokrol bambu yang tersohor ternyata seorang Indo-Belanda yang mengirim surat dalam bahasa Belanda kepada bupati tentang para wedana yang melakukan paksaan, bahkan dia mampu menghidupkan proses sidang pengadilan dengan sengatannya yang jenaka.[83][]

[82]Sarino Mangunpranoto, Wawancara, 2.1.76.
[83]Camat Tonjong (Wadyono), Wawancara, 21.1.76.

BAB DUA

PENGALAMAN MASA JEPANG: SWASEMBADA PENUNJANG PERANG, BEBAN EKONOMI YANG BERAT

MASA kolonial Belanda yang panjang telah mengakibatkan berbagai bentuk penderitaan bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya lapisan terbawah. Kenyataan-kenyataan ekonomi yang buruk semasa pendudukan Jepang mengembangkan adanya korupsi dan penindasan elite tradisional terhadap rakyat kecil. Dari sebab itu rakyat belajar melawan tuntutan-tuntutan yang keterlaluan dari penguasa. Tidak sedikit reaksi mereka timbul dengan lenyapnya harapan para Jepang sebagai juru selamat yang akan membebaskannya dari kekuasaan kolonial.

Bagi rakyat, beban ekonomi semasa Jepang meningkat beratnya dibanding dengan zaman kolonial. Jepang mempergunakan kaum elite birokrat dan tokoh-tokoh rakyat untuk politik penjajahannya yang memberatkan lapisan bawah. Politik Jepang inilah yang memperlebar jurang perbedaan antara rakyat dan para pemimpinnya, dan menimbulkan rasa dendam yang meledak sejak Agustus 1945.

Setelah Belanda menyerahkan Hindianya kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, maka pada tanggal 17 Maret, penguasa baru itu tiba di Keresidenan Pekalongan, di saat wilayah ini belum pulih dari pergolakan sosial dan huru-hara dengan jatuhnya pemerintahan kolonial. Tatkala terjadi pendaratan Jepang di Jawa, penguasa kolonial berusaha melaksanakan rencana sabotase yang dipersiapkan secara tergesa-gesa atas gudang, jembatan, instalasi pelabuhan di sekitar Tegal, termasuk tangki penyulingan minyak BPM *(Bataafsche Petroleum*

Maatschappij) juga dihancurkan. Di Pekalongan, Belanda memerintahkan agar semua mesin pabrik gula, pemintalan, dan tenun dipreteli. Sampai rantai sepeda harus dibuang dari sepedanya ke sungai agar tidak dapat digunakan musuh.[1] Wedana Wiradesa yang wilayahnya berpantai itu diperintahkan mengawasi langsung penenggelaman perahu-perahu kecil penangkap ikan, tetapi dia memerintahkan menyembunyikan perahu itu dengan menariknya ke hulu sungai mengingat perahu adalah alat vital bagi kehidupan nelayan.[2]

Pabrik-pabrik gula karena sulit diberi penyamaran diperkirakan akan menjadi sasaran utama pemboman Jepang, ternyata tidak kunjung terjadi. Rakyat menyadari bahwa penguasa kolonial tidak mengetahui situasi peperangan yang sebenarnya, sehingga tidak mempunyai suatu rencana apa yang harus dilakukan. Atas perintah sebuah badan baru yang bernama Dinas Perlindungan Serangan Udara *(Luchtbescherming Dienst)* rakyat menggali lubang perlindungan yang cukup luas bagi setiap keluarga yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. Sampai-sampai orang sering bercanda, "Bila bom jatuh tidak perlu lagi digali lubang kubur, karena sudah tersedia."[3]

Dengan jatuhnya kekuasaan Belanda, pangreh praja di keresidenan itu bagaikan kehilangan tulang punggung kekuasaannya. Berbagai milisi ciptaan Belanda membubarkan diri. Pangreh praja hanya bisa menunggu tanpa daya sambil menyaksikan adanya perampokan yang menyebar cepat dari kecamatan yang satu ke kecamatan lainnya. Toko-toko milik Cina, rumah-rumah gadai, dan penggilingan padi di kebanyakan daerah menjadi sasaran utama. Pangreh praja sendiri kadang kala hampir tidak menghindari serangan dan sering kali menjadi obyek intimidasi massa yang bangkit kemarahannya.[4] Polisi Belanda dan para administratur tampak bingung untuk memaksakan kewenangannya.

---

[1]Sujono, Transkripsi I/4, 29.7.73. Sujono waktu itu adalah Sekwilda Kabupaten Pekalongan. Pada awal revolusi menjadi sekretaris keresidenan, dan residen pada periode gerilya. Lihat fotonya di *Republik Indonesia Propinsi Jawa Tengah* (Djakarta, 1953-1954), hlm. 76.

[2]Sarimin Reksodiharjo, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 87.

[3]Tokoh nasionalis Pangkah, Transkripsi I/11, 27.11.75.

[4]Sarimin, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 88.

Terlihat suasana yang luar biasa di mana-mana. Waktunya bertepatan dengan waktu panen padi pertama. Serombongan petani wanita berduyun membawa ikatan padi hasil bagi upah menuai (*bawon*), sewaktu mereka menyaksikan sekelompok orang menjarah sebuah toko, lantas melemparkan padinya begitu saja dan mengikuti tindakan mereka tanpa canggung. Penduduk Cina kabur mencari perlindungan di kantor-kantor pemerintah mendengar desas-desus bahwa barang-barang tergadaikan dikembalikan tanpa tebusan, maka ratusan petani dengan kartu gadainya melimpahi halaman rumah gadai Pemalang. Karena rumah gadai itu masih dijaga ketat oleh sekelompok milisi yang setia, maka segerombolan massa itu pun mulai berteriak "beras dibagi", dan tiga penggilingan padi milik Cina pun di rampok sedangkan mesin-mesinnya dirampas. Lima belas orang dinyatakan tewas ketika bangunan besar penimbunan padi roboh, lalu masa itu pun menyerbu sekitar 100 toko milik Cina, menjarah isinya dan mengangkutnya ke desa masing-masing. Wedana Pemalang melepas tembakan peringatan ke udara, namun sia-sia belaka.[5] Kosongnya pengawalan Belanda memungkinkan para narapidana menjebol dua buah rumah penjara di Pekalongan, lalu kabur menggabungkan diri ke dalam arus pemberontakan umum itu. Hubungan rakyat dengan pangreh praja tercermin dari apa yang tengah terjadi di Kabupaten Pekalongan. Setelah Satuan Penjaga Kota *(Stadswacht)* dan polisi membubarkan diri, muncullah serombongan orang menyerbu memasuki halaman Kabupaten dan mengambil pedang-pedang polisi yang tergantung di rumah jaga. Selagi istri Bupati terdengar menjerit meminta bantuan, Bupati Raden Ario Suryo terkejut dan jatuh pingsan. Sekretaris Bupati segera menelepon residen Belanda, melaporkan apa yang sedang terjadi.[6] Belanda sudah tidak berdaya menghadapi "pemberontakan-pemberontakan" itu. Keamanan dan ketertiban Orde Lama telah lenyap untuk selama-lamanya.

[5]Penjahit di pasar Pemalang, Wawancara, 4.12.74.
[6]Sujono, Transkripsi I/3, 29.7.73.

I. Politik Ekonomi Jepang

Divisi ke-16 tentara Jepang adalah yang pertama mendarat di bumi Indonesia. Merekalah pelaksana semua tugas penting Tokyo untuk membangun apa yang mereka sebut "Asia Timur Raya yang makmur sejahtera di bawah pimpinan Dai Nippon" dengan jalan secepatnya memperoleh dan menguasai sumber alam dan manusia, khususnya bahan pangan dari Jawa, guna memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Jawa semakin menjadi penting sebagai basis suplai Jepang, sebagai sumber beras dan garam bagi Malaya. Sebaliknya Malaya merupakan satu-satunya sumber bagi gula dan biji-bijian. Rokok, kina, dan bahan pokok logam juga merupakan ekspor penting dari Jawa.[7]

Pada akhir masa perang, Jepang melaksanakan kebijaksanaan politik ekonomi "mencukupi kebutuhan sendiri" *(genchi jikatsu)* di wilayah pendudukannya. Pada akhir tahun 1943, angkutan khususnya kapal, antara Jepang dan daerah pendudukannya di Asia Tenggara menjadi sukar atau bahkan tidak mungkin. Banyak bagian wilayah itu masih menggantungkan diri pada suplai dari Jepang atau surplus dari wilayah lain. Ketika posisi Jepang dalam peperangan melemah, penguasa Jepang memerintahkan semua pasukan di wilayah pendudukannnya agar mampu berswasembada. Kebijaksanaan inilah yang mendasari kewajiban paksa mengumpulkan semua hasil perkebunan oleh pemerintah Jepang, pembagian dan penjatahan surplus produksi pertanian rakyat, khususnya padi dan lain-lain bahan kebutuhan hidup yang semakin langka serta perekrutan paksa tenaga kerja untuk berbagai proyek di wilayah masing-masing maupun di luar Jawa. Ketakutan akan serangan dari selatan mendorong Jepang melakukan pengumpulan cadangan logistik, mesiu, dan bahan pangan di tempat-tempat terpilih di Jawa.[8] Tertutupnya pasaran ekspor, membuat industri gula di Jawa gulung tikar, jumlah pabrik yang beroperasi menu-

[7]Miyamoto, Shizua, 'Economic and Military Mobilisation of Java, 1944-1945' dalam Anthony Reid dan Oki, Akira (eds.), *The Javanese Experience in Indonesia: Selected Memoirs of 1942-1945* (Ohio, 1986). Tabel 3 dan 4, hlm. 283-239.

[8]*Ibid.*

run dari 85 di tahun 1942 menjadi 13 di tahun 1945.[9] Dua dari yang 13 ini, yakni Pangkah dan Banjaratma, berada di wilayah Keresidenan Pekalongan.

Setibanya di Keresidenan Pekalongan, yang kemudian namanya diganti menjadi Pekalongan-shu, asisten residen baru Jepang yang bernama Toshio Ota, menyatakan:

> Saya merasakan terbelahnya secara tajam masyarakat ini antara si kaya dan si miskin. Hanya segelintir pejabat tinggi berpendidikan Barat versus sebagian besar rakyat Indonesia yang miskin. Selain itu ekonomi di tangan orang-orang Cina penduduk mempunyai kesempatan kecil sekali untuk memperoleh uang tunai, kecuali bagi pekerja kasar yang hanya diberi makanan harian... Perkebunan-perkebunan Belanda menguasai tanah yang terlalu luas atas kerugian kaum tani, sehingga banyak penduduk meninggalkan desa-desanya buat mencari kerja. Tampak di sini banyak petani miskin... Saya merasa berkewajiban mengurangi perbedaan kesejahteraan ini sejauh mungkin.[10]

Betapapun prakarsa semacam ini nampaknya tidak tersebar luas di Keresidenan Pekalongan, pelaksanaan politik swasembada ini diandalkan sepenuhnya kepada pangreh praja, yang jaman kolonial Belanda mempunyai peran ekonomi penting sebagai pengumpul pajak. Sedangkan kini peran itu ditambah dengan pengaturan pembagian bahan sandang dan bahan-bahan baku lainnya dari tingkat kecamatan ke bawah. Mereka pun bertanggung jawab atas penambahan *romusha* yang dikirim ke berbagai proyek di dalam wilayah keresidenan masing-masing. "Senantiasa orang-orang Jepang itu menengok kami, kami adalah pengawas ekonominya," ujar seorang camat.

Kemauan baik semula terhadap Jepang dengan segera berubah menjadi guncangan batin dan rasa muak setelah berkenalan dengan cara-caranya yang kasar itu. Tak ada kelompok masyarakat di Pekalong-

---

[9]Produksi gula secara mencolok jatuh dari 1.326.000 ton dalam tahun 1942 menjadi 84.000 ton dalam th. 1945. B.R.O.G. Anderson, 'Japan: "The Light of Asia"', dalam J. Silverstein (ed.), *Southeast Asia in World War II: Four Essay*, (New Haven, Yale University SEA studies No. 7), hlm. 40.

[10]Toshio Ota, Jawaban tertulis atas pertanyaan penulis 10.2.78. (Saya berterima kasih kepada Akira Oki untuk semua terjemahan korespodensi dengan Ota). Selanjutnya dikutip "Jawaban."

an, bahkan pangreh praja pun tak tahan atas penghinaan dan tindak kekerasan Jepang. Mereka itu khususnya pejabat, merasa sakit hati bila dipanggil *kowe* (kamu dalam bahasa Jawa *ngoko*) atau *bakero* (tolol dalam bahasa Jepang) atau kena tempeleng gara-gara tidak menundukkan kepala lebih rendah sewaktu melewati depan pos jaga tentara Jepang.[11] Seluruh masyarakat Jawa menderita dan hubungan antara pangreh praja dan petani menjadi lebih buruk dibanding dengan pada zaman Belanda.

Wajib Setor Padi

Kewajiban paksa menyetorkan padi kepada penguasa Jepang merupakan kewajiban terberat bagi mayoritas di antara sekian banyak kebijaksanaan politik Jepang di masa perang itu. Petani diwajibkan menyetorkan pajaknya kepada negara. Mengapa demikian? Terlihat di table 1 betapa luas kebutuhan beras bagi pemerintah militer Jepang dalam keadaan perang. Setelah kebutuhan tentara dan sipil Jepang terpenuhi, beras dibagikan kepada petani berbagai kelompok pendukung perang yang dianggap penting, yang disebut "semi militer", yaitu Peta (Pembela Tanah Air), Heiho (pasukan bantuan), *romusha*, pangreh praja, kerja bakti *(kinrohoshi)*, dan "tenaga ahli."

Dengan adanya politik menyediakan cadangan beras yang dimulai pada tahun 1943 guna menghadapi kemungkinan bahaya serangan dari selatan, Miyamoto menulis, "Nampaknya para tentara dan sipil mengumpulkan bahan pangan dalam jumlah yang melebihi batas... menafsirkan perintah itu secara berlebih-lebihan."[12] Harga belinya pun menjadi amat rendah, hampir seperti penyitaan. Menurut perhitungan kasar, jumlah permintaan padi seluruhnya mencapai 38 persen dari produksi padi se-Jawa pada tahun 1944 (lihat tabel 1).

---

[11]Ota, asisten residen, menulis bahwa, "Kami berusaha melarang orang-orang Jepang menyentuh bagian badan di atas leher, yang merupakan pantangan umum [di antara orang-orang Jawa]" Ota, Jawaban.

[12]Miyamoto dalam Reid dan Oki (ed.) *The Japanese Experience*, tabel 11 hlm. 247

Tabel 1
Kebutuhan Beras untuk Penguasa Jepang dan Pendukungnya di Jawa

Golongan	Jumlah Ton Beras
Orang Jepang yang tinggal di Jawa	17.000[1]
Angkatan Darat Jepang Divisi ke-16	380.000[2]
Kebutuhan-kebutuhan semi-militer (Romusha)	239.440[3]
	636.440[4]

Catatan:

1. Miyamoto menghitung konsumsi beras untuk 74.000 orang Jepang di jawa pada akhir pendudukan sebagai 640 gram per kapita per hari (Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) *The Japanese Experience*, p.246.
2. *Ibid.*,p. tabel 9
3. Miyamoto menyebutkan jumlah seluruh semi-militer (Peta, Heiho, romusha, pangreh praja, kerja bakti, tenaga achli) yang menerima jatah beras di Jawa dan Sumatra sebanyak 2.623.691 orang. (*ibid.*, tabel 11, hal 257). Dengan perkiraan 250 gram sehari per kepala (yang mungkin terlalu rendah) jumlah beras yang harus disediakan adalah angka itu.
4. Angka ini adalah 14 persen dari produksi beras se-Jawa pada tahun 1944, yaitu 4.630.000 ton (*ibid.*, tabel 9, hal 244).

Di tingkat keresidenan ke bawah keadaan yang sebenarnya lebih buruk lagi. Secara pukul rata di Keresidenan Pekalongan terjadi penambahan jumlah setoran untuk menutup yang menguap karena korupsi. Menjelang tahun 1945, korupsi dalam sistem penyetoran padi sedemikian luasnya sehingga harus ditambah 18 persen di atas jumlah setoran yang ditetapkan pemerintah pusat, berarti dari jumlah 80.000 menjadi 94.000 ton.[13] Jumlah setoran di tingkat kabupaten ditetapkan oleh pejabat setempat.

[13]"Problem of Rice" (terjemahan dari bahasa Jepang dengan pengantar oleh Ben Anderson), *Indonesia, II* (Oktober 1966), hlm. 99. (selanjutnya dikutip "Problem of Rice").

Dari tabel 2 bisa dilihat bahwa jumlah wajib setor padi berbeda-beda antara kabupaten, dan bahkan antara kecamatan dan desa di dalam sistem pemasaran baru ditetapkan bahwa di tingkat pedesaan, para petani tidak lagi diizinkan membawa hasil panen padinya ke rumah, dan langsung menggilingnya sendiri. Mereka hanya diizinkan untuk membawa pulang padinya yang kira-kira cukup untuk benih dan makan saja. Selebihnya harus disetorkan ke kelurahan atau ke panitera kelurahan (*carik*), dengan begitu pejabat setempat langsung terlibat dalam paksaan. Seperti daerah-daerah lain, jumlah setoran padi didasarkan atas tingkat atau kelas sawah yang berdasarkan pada klasifikasi yang dipakai oleh Belanda dalam menetapkan besarnya pajak.[14] Petani hanya menerima "separuh dari harga pasaran" untuk padi mereka. Sedangkan harga resmi di Pekalongan awal Januari 1944 Rp 4 per kilogram, karena berbagai "penyusutan" yang terjadi di pusat-pusat pengumpulan, petani hanya menerima harga Rp 1,88. Mencari untung dengan jual beli beras di pasar gelap menjadi luas karena harga semula Rp 6 per kilogram melompat menjadi Rp 40 pada masa akhir pendudukan.[15]

Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak wajib setor padi dari daerah yang satu dengan daerah yang lainnya adalah kualitas tanah, sikap para camat dan kepala desa sebagai pejabat setempat, dan juga sikap pejabat Jepang sendiri. Cara menentukan setoran paksa dan pelaksanaannya juga berbeda dari satu daerah ke daerah lain.

Misalnya di Brebes, kejamnya sistem setoran padi paksa agaknya melunak dengan adanya suatu perjanjian antara Bupati Sarimin dan penguasa Jepang, bahwa bagian kuota setoran kabupaten dapat disetorkan dalam bentuk beras. Sebelumnya seperti di daerah-daerah lain dalam keresidenan ini, semua setoran harus dalam bentuk padi dan harus diserahkan kepada penggilingan swasta milik Cina. Setelah diambil untuk kebutuhan Jepang (militer dan sipil), barulah sisanya didistribusikan melalui koperasi pertanian (*nogyo kumiai*). Dengan adanya penggilingan padi setoran oleh pabrik-pabrik Cina ini berarti bahwa hasil sampingan seperti meniran, dedak, dan sekam yang ber-

[14] *Ibid.*, hlm. 87.
[15] *Ibid.*, hlm. 94.

Tabel 2
Setoran Paksa Padi di Berbagai Wilayah di Tiga Daerah Semasa Pendudukan Jepang

Lokasi	Hasil rata-rata (ton/Ha)	Jumlah rata-rata yang di minta (ton/Ha)	Persen tase hasil panen	Sumber Wawancara
Kabupaten Brebes				
Kecamatan Brebes	2.0-2,5	1,0	50	Camat
Kecamatan Losari	2,5	1,0	50	Camat
Desa Kelanggungan	2,0-3,0	0,4-0,6[1]	14-25	Panitera Desa (Carik)
Seluruh kabupaten	Padi bulu[2]		50	Bupati
	Padi cere		50	
Kabupaten Tegal				
Kecamatan Bumijawa	2,1	0,3	14	Noji padi[3]
Kecamatan Talang	2,0-4,0	1,0	25-50	Cama
Kabupaten Pemalang				
Kewedanan Belik	1,4	1,5	105[4]	Wedana
Desa Cibuyur	2,1-2,8	0,5	14-16	Lurah
Kecamatan Taman	2,1-3,5	0,8-1,8	40-50	Camat
Desa Ambowetan	2,8-4,2	2,6-3,9	95[5]	*noji padi*
Kecamatan Ampelgading	2,8	1,4[6]	50	Pemimpin Seinendan

Sumber: Data Hasil wawancara

Catatan:

(1) 0,6 ton dari sawah "bagus", 0,4 ton dari sawah "rata-rata."
(2) Padi bulu menghasilakan beras kualitas tinggi: padi cere memang hasil kuantitasnya lebih tinggi daripada padi bulu, tetapi apabila dimasak terasa agak keras dan tidak secnak beras padi bulu.
(3) Noji padi adalah orang yang ditugaskan Jepang mengumpulkan padi di pedesaan untuk koperasi Jepang (*kumiai*).
(4) Lihat halaman 35 yang membahas bagaimana hal ini terjadi.
(5) Menurut peraturan petani di desa ini hanya diizinkan memakai lima persen saja dari hasil panen "rata-rata" untuk diri sendiri.
(6) Dalam praktik, 50 persen hasil panenan disetor kepada *kumiai*.

harga bagi petani (yang merupakan 33 persen dari hasil panennya), lenyap sehingga petani terpaksa harus membeli kembali dari pabrik penggilingan guna memberi makan unggas dan ternaknya. Di dalam peraturan baru di Brebes, penumbukan padi diizinkan untuk dilakukan di tiap desa. Para penumbuk bekerja dengan "upah" berupa

beras, meniran, sekam. Para pedagang lalu mengumpulkan beras itu guna disetorkan ke pusat-pusat pengumpulan yang ditentukan.[16]

Lain lagi sistem setoran paksa di beberapa daerah dalam Kabupaten Pemalang di mana jatah berdasarkan jumlah pembayaran pajak, suatu cara yang tidak mempertimbangkan adanya perbedaan kualitas tanah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya di Kawedanan Belik (Pemalang Selatan) yang berbukit dan bertanah gersang itu hanya menghasilkan rata-rata 1,4 ton beras per hektar. Di daerah ini sebelum perang, setiap penduduk wajib membayar pajak satu rupiah untuk setiap sepersepuluh hektar tanah yang dimiliki. Waktu Jepang datang, setiap pembayar pajak satu rupiah diwajibkan menyetor 150 kilogram beras, artinya 1,5 ton per hektar atau 105 persen dari hasil rata-rata pada musim baik di Belik. Wedana lapor kepada Jepang bahwa tidak mungkin menyediakan padi melebihi produksi yang ada (lihat tabel 2).[17]

Melintasi perbatasan Kabupaten Pemalang-Tegal di Kawedanan Bumijawa, menurut ingatan bekas seorang *noji padi,* jatah setoran tidaklah begitu tinggi dibandingkan dengan beberapa kawasan berpantai. Bagaimanapun juga, karena hasil padi di sini tergantung pada hujan, maka ketiadaan irigasi dan kekurangsuburan tanah mengakibatkan beban rakyat di sini semakin berat. Luas areal sawah sangat kecil dan hanya mereka yang menyetorkan padi saja yang mempunyai hak untuk membeli sepotong bahan sandang, satu dua meter lembar *blacu* untuk satu kuintal padi. Untuk menggalakkan penyetoran padi, *noji padi* mempunyai sebuah tim yang terdiri dari 6 orang pembantu, yang masing-masing bertanggung jawab untuk 3 desa.[18]

Beberapa aspek dari korupsi dalam sistem wajib setor beras perlu dibahas lebih lanjut. Karena kekacauan ekonomi masa perang, korupsi beras dilakukan dalam jumlah besar. Laporan kepada Chuo Sangi-in (Dewan Penasehat Pusat) pada bulan Januari 1945 melaporkan bahwa di seluruh Keresidenan Pekalongan dalam setahunnya sejumlah 1.200 ton menguap.[19]

---

[16]Sarimin, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 99.

[17]Wedana Belik, Transkripsi I/10, 22.5.73. Bandingkan *Problem of Rice,* hlm. 87, catatan kaki 29, dengan ketidakadilan yang besar di Belik.

[18]Noji padi Bumijawa, Wawancara, 16.2.73. Lihat tabel 2.

[19]Di Pemalang jumlah padi yang dijual ke pabrik penggilingan oleh pangreh

Sudah terlihat bahwa tindak kejahatan menyalahgunakan jabatan memang telah meluas. Jepang mengganti peranan Cina pemilik penggilingan dengan lurah sebagai perantara dalam sistem setoran padi; seperti dilihat di Keresidenan Pekalongan kelurahan menjadi kunci dalam pengumpulan padi hasil panenan. Dengan begitu lurah menjadi kunci dalam pengumpulan padi oleh Jepang dengan peluang baru buat mengecoh dan menipu petani. Korupsi demikian meluasnya di semua tingkat, sehingga sebuah kata lama "tanggem" kini digunakan secara popular untuk menyebut korupsi.

Bahwa kepala desa memainkan peranan penting, terlihat dari desa Ambowetan di perbatasan timur laut Pemalang. Di sana sistem penyerahan beras paling memberatkan. Petani hanya diizinkan menyimpan 5 persen dari hasil rata-rata panenan buat makan dan benih. Itu berarti 95 persen harus diserahkan ke kelurahan (lihat tabel 2). Di sinilah empat cara baru tindak korupsi oleh kepala desa bermula, berlaku dalam penyerahan padi oleh masing-masing petani kepada petugas penerima. Cara-cara itu: 1) lurah menaksir setoran kurang dari berat sebenarnya dengan dalih padi terlalu basah, sehingga mengurangi rata-rata 3 persen per kuintal dari berat sebenarnya; 2) banyak gabah jatuh ke tanah sewaktu ditimbang di halaman kelurahan, sehingga sekitar 1 kilogram dari setiap kuintal gabah jatuh ke tangan lurah; 3) dengan menilai sangat rendah panenan lurah sendiri dari tanah bengkoknya, dan menutup jatah setorannya dengan padi penduduk, sedangkan padinya sendiri dilempar ke pasar gelap; 4) dengan menggunakan *dacin* (timbangan) yang hanya berkapasitas maksimum 60 kg, sehingga harus menimbang dua kali untuk setiap 1 kuintal. Kecurangan gampang terjadi karena lurah bisa "mencuri" 1-2 kilogram padi setiap kali timbang.

Bila petani memprotesnya, lurah dengan mudah mengatakan bahwa kekurangan timbangan itu untuk mengganti kerugian padi yang hilang dalam pengangkutan dari keluruhan ke noji padi atau ke penggilingan. Ini tidak seluruhnya benar, karena sebagian besar

praja sebesar 1.064 ton, tetapi menurut angka-angka pemerintahan sendiri hanyalah 786 ton dibeli sah oleh pabrik. Pihak pabrik sendiri mengakui bahwa di pemalang 140 ton "hilang." *Problem of Rice*, hlm. 95 dan 99.

mengalir ke rumah lurah pada tahap awal proses pengangkutannya.

Noji padi yang bertanggung jawab atas pengumpulan setoran paksa, juga memiliki peluang yang besar untuk menipu petani, yaitu mendapat padi untuk dirinya sendiri dengan mengurangi jumlah beras yang diperoleh dari penggilingan. Dengan demikian menciptakan sendiri kondisi yang bagus untuk menipu jumlah setoran padi. Ia dapat pula mengatakan bahwa padinya *gabug* (kosong) disebabkan karena penyakit atau disimpan terlalu lama. Namun peluang ini ada batasnya. Seorang noji padi yang jujur mengakui walaupun ia "*tanggem* kecil-kecilan" tidak mungkin menjual beras kepada perantara, sebab bakal ketahuan para pembantunya, apa yang ia perbuat hanya tergantung "tahu sama tahu" dengan para pembantunya.[20]

Selain itu, beberapa penguasa mengambil tindakan untuk mengawasi korupsi. Misalnya di Tonjong (Brebes) tidak ada distribusi dari *kumiai* (koperasi yang dibuat Jepang) melalui kepala rukun kampung dan rukun tetangga sehingga akan memudahkan pengawasan. Di sini, camat menggilir mereka yang ditunjuk untuk melakukan distribusi, sehingga tidak selalu harus lurah. Bila terjadi korupsi di salah sebuah desa dalam kecamatannya, camat mengganti semua pegawai di desa tersebut. "Anda bisa menyebutnya sebagai sistem penyelewengan bergantian," katanya. Setidaknya mereka tidak dapat berbuat curang untuk jangka waktu yang lama.[21]

Penjatahan Beras

Seperti yang telah diuraikan di atas, pemerintahan Jepang mengutamakan distribusi beras antara lain untuk kepentingan "semi militer" yaitu pendukung-pendukung pentingnya antara lain pegawai pangreh praja. Sebagian besar elite yang berpendidikan Barat ini memang berdiam di kota-kota dan merekalah yang mendukung Jepang dan dianggap penting, sedangkan arti *genyumin* (pribumi, *inlander*) yang diberikan oleh Jepang terhadap penduduk pedesaan sebagai golongan rakyat dianggap tidak berarti. Walaupun pada akhir masa pendudukan pedesaan sebagai golongan rakyat dianggap tidak berarti.

[20]Noji padi Ambowetan, Wawancara, 19.10.76.
[21]Camat Tonjong, Wawancara, 19.10.76.

Walaupun pada akhir masa pendudukan pembagian beras kepada penduduk kota mengalami penurunan dalam jumlah dan kekerapannya, tetapi bagaimanapun juga mereka masih mempunyai listrik, sekolah, dan kendaraan umum, sedangkan untuk pergi ke pasar tergantung pada sepeda dengan ban mati.

Dalam pembahasan mengenai kebijaksanaan beras Jepang di Jawa pada bulan Januari 1945, laporan kepada Chuo Sangi-in tadi menunjukkan bahwa di luar ibukota keresidenan dan kota kabupaten di Jawa, distribusi beras secara teratur hanya terbatas pada pegawai negeri, sedangkan distribusi untuk rakyat biasa "selain tidak teratur juga jauh dari mencukupi." Tabel 3 menunjukkan jatah beras di Keresidenan Pekalongan, walau sangat bervariasi dari daerah satu ke daerah lainnya namun, tidak pernah sampai 230 gram per orang per hari, angka yang tercantum dalam laporan kepada Chuo Sangi-in.

Di kota, Jepang membagi setiap kelurahan menjadi beberapa kampung. Kepala kampung bertugas menyelenggarakan pembagian beras dan barang-barang lainnya. Mereka juga memutuskan siapa yang berhak menerima jatah beras yang sering kali dilakukan dengan cara sewenang-wenang seperti dituturkan kembali oleh seorang bekas pegawai pangreh praja di Pemalang:

> Ya, orang kota itu dikasih pembagian beras, tetapi rakyat luar tidak. Sebab itu' kan di sana produksi berasnya 'kan di desa-desa, jadi pemerintah Jepang itu menganggap orang desa tidak perlu mendapat pembagian beras. Tapi, itu orang kota. Wong itu ada yang lucu... umpamanya, kampung ini, itu dianggap orang di luar kota, padahal masih satu kampung... Saya umpamanya yang menjadi korban, sebab saya itu rumahnya melangkah persis di luar kota, persis di depan rumah saya itu mendapat pembagian, saya tidak dapat... Itu saya dapat cerita itu karena saya mengalami sendiri, tetapi karena saya seorang pejabat jadi saya dapat hubungan dengan pabrik-pabrik.[22]

Kenyataan bahwa banyak pejabat mendapat beras langsung dari pabrik penggilingan menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan besar dalam laporan pangreh praja dan laporan pabrik tentang jumlahnya setoran beras. Terlepas dari penentuan kualitas beras dan penerimaannya dalam sistem penjatahan, maka soal kualitas sendiri men-

[22]Transkripsi I/14, 3.5.75.

Tabel 3
Jatah Beras di Beberapa Tempat di Keresidenan Pekalongan

Daerah	Jatah (gram/orang/hari)	Sumber
Konsumsi beras rata-rata yang Dijadikan dasar oleh militer Jepang	640[1]	Miyamoto, Jawa
Pekalongan[2]	230	"Problem of Rice," hlm. 91.
Pengumpulan paksa beras		
Kota Pekalongan	100	pangreh praja
Kota Pemalang	30-50	pemimpin pergerakan
Bojongbata (Pemalang)	10	azacho (kepala rukun Kampung)
Kota Tegal	100	pemimpin pergerakan
Slawi	200	pemimpin pergerakan
Adiwerna	200[3]	guru sekolah
Talang	30	pegawai rumah gadai
Kecamatan Brebes	100	camat
Romusha di Brebes	300	pemimpin romusha
Romusha di Sukowati	200[4]	kurir bawah tanah
Romusha rata-rata	50[5]	
Romusha di tambang batubara Di Bayah, Banten Selatan	250[6]	
Margasari	5	istri camat
Tawanan perang Inggris dan interniran lainnya di Bandung	500[7]	
Romusha di Pangkah	500	pemimpin pergerakan

Catatan dan Sumber:

1. Miyamoto in Reid and Oki (1986), hal. 246
2. *The Problem of Rice* tidak menjelaskan apakah Pekalongan berarti keresidenan seluruhnya, kabupaten atau kota, mungkin saja maksudnya kota.
3. Angka ini untuk seluruh keluarga.
4. Ini jatah resmi, kemudian menjadi dua kali lipat (400 gram).
5. Sidik Kertapati, *Sekitar,* hlm. 18.
6. Angka ini dikurangi menjadi 200 pada tahun 1945. Lihat Tan Malaka, *Dari Pendjara ke Pendjara,* Part II, hlm. 157 dan 159.
7. Laurence van der Post. *The Night of the New Moon,* hlm. 38.

jadi masalah. Sering pembagian beras dicampur dengan kerikil dan pasir agar menjadi lebih berat. "Dalam 100 kilogram beras," kenang seorang dokter yang pernah bekerja di Pekalongan, "terdapat sekitar 25 kilogram kerikil. Gigi-gigi menjadi cepat rusak."[23]

Besarnya setoran padi dan jumlah sisanya yang dibagikan sebagai jatah terlihat dalam tabel 4 yang menyajikan suatu gambaran penderitaan yang nyata di Keresidenan Pekalongan. Dengan asumsi bahwa petani berhasil menyembunyikan 30.000 ton padi dari jatah penyetoran paksa, sulit menyembunyikan padi sebanyak itu, apalagi mengingat berat hukumannya apabila ketahuan. Sejumlah 73.886 ton beras disediakan bagi lebih 3 juta rakyat atau *63 gram per orang sehari* secara pukul rata. Besarnya ketidakcukupan yang menyolok merupakan hal tersendiri yang cukup gawat, ditambah masalah terhalangnya suplai dan distribusi menyebabkan kekurangan makanan dan kelaparan. Masalah ini berasal dari politik swasembadanya Jepang yang melarang perdagangan beras antarkeresidenan guna menambah suplai.[24] Situasi tahun 1944 bahkan semakin diperburuk dengan musim kemarau yang sangat panas, terlambat tibanya musim hujan dan kelanjutannya, yaitu panenan buruk dengan hasil yang jauh di bawah harapan.

Pada umumnya banyak penduduk desa dalam Keresidenan Pekalongan keadaannya lebih buruk ketimbang penduduk kota, paling tidak sampai tahun akhir masa pendudukan. Hal ini tampaknya saling bertentangan. Kiranya sistem padi sawah tetap merupakan penyangga bagi mereka yang menguasai tanah dan panen serta yang biasa menyembunyikan beras dari setoran. Sekalipun hal itu mungkin benar demikian bagi segelintir kecil petani kaya, tetapi bagi petani menegah yang memiliki sawah satu *bau* atau *kutan*, jumlah beras yang disembunyikan tidak akan tahan lebih dari beberapa bulan setelah panen.[25]

---

[23]Dr. Sumario, Wawancara, 8.9.71. Informan-informan lainnya yang menyebutkan praktik ini, memberi taksiran lebih rendah, yakni bahwa 10 persen dari setiap jatah diturunkan mutunya dengan cara ini.

[24]Tidak mengherankan bila penduduk berpikir larangan ini "penindasan" yang berat. Miyamoto, Jawaban.

[25]Mengenai situasi Jawa pada awal 1944, Van der Plas mengatakan "Jepang sedang membeli beras hasil panenan dan hanya meninggalkan sisa makanan untuk tiga bulan bagi petani", di luar sistem penjatahan "tidak ada beras lain yang tersedia."

Kondisi di desa-desa selama masa-masa pendudukan sedemikian buruknya, sehingga rakyat berpaling kepada pengganti beras yang secara tradisional hanya dimakan pada masa kelaparan, antara lain singkong yang dijadikan bubur bolit.[26] Selain itu banyak orang terpaksa makan umbi badur yang mula-mula harus dipotong tipis-tipis dan direndam dalam garam buat menghilangkan getahnya yang beracun.[27] Bonggol pisang juga dimasak untuk dimakan, demikian pula daun kelapa yang disebut "bulung."

Organisasi wanita yang disponsori Jepang, Fujinkai, sering kali menyelenggarakan demonstrasi untuk merancang resep-resep makanan baru, dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak pernah dimakan sebelumnya, tetapi dianggap oleh Jepang mempunyai nilai gizi tertentu. Mereka mendemonstrasikan bagaimana memasak bekicot dan "roti Asia" yang merupakan adukan hitam terdiri dari gula merah dan bekatul, dan "bubur perjuangan" yang terbikin dari ubi jalar, singkong dan bekatul. "seperti makan makanan ayam rasanya," tutur seorang tokoh nasionalis Pemalang," saya mau muntah." "Pendeknya orang takjub kalau melihat beras," ujar seorang bekas pemimpin Seinendan, "busung lapar dan kutu terdapat di mana-mana." Busung lapar sedemikian hebatnya di Kecamatan Margasari, sehingga istri camat menuturkan bahwa "lalat hinggap ditulang-tulang orang yang tidak tertutup lagi oleh daging."[28] Kekurangan gizi kronis di daerah pedesaan juga mengakibatkan *trachoma* dan koreng, sedangkan penyakit pes (yang berhasil ditumpas oleh Belanda) muncul lagi di wilayah Pangkah.

Menurut tokoh seorang Seinendan Kecamatan Ampelgading sejak kira-kira pertengahan masa pendudukan, rakyat di wilayah Ampelgading banyak yang mati kelaparan ketika sedang mengais-ngais sisa makanan, dan mereka dikuburkan tanpa identifikasi di desa terde-

---

Situasi di Hindia Belanda," tertanggal 19 Februari 1944, Pemerintah Australia, Departemen Luar Negeri, Netherland Indies Information and Intelligence, 1944-46 (Australian Commonwealth Archives Item P1/46/2/7/I selanjutnya dikutip *NI Intelligence*).

[26]***Bolit, bodin, dan pu'***ung (puhung) adalah nama setempat untuk singkong.

[27]Di sedikitnya satu kawasan, Kecamatan Moga, terdapat seorang pejabat yang diangkat Jepang untuk mengawasi penanaman badur (walur atau walui).

[28]Nyonya Sulaiman, Wawancara, 22.2.73.

kat di tempat mereka meninggal. Seorang pemimpin Barisan Pelopor Tegal yang menulis mengenai kondisi yang sama di tahun 1945, menuturkan pengalamannya kemudian:

> Setiap hari berkeliaran mayat-mayat hidup. Mayat-mayat hidup penuh *rumo* (kutu) menghias pakaiaannya yang compang-camping terbuat dari bahan karung goni-waring atau kulit pulutan. Bangkai-bangkai manusia terdapat di mana-mana, lobang-lobang perlindungan, di bawah kolong-kolong jembatan, di kuburan-kuburan Cina, bahkan ada yang menggeletak di tempat-tempat pembuangan sampah.[29]

Politik Swasembadanya Jepang juga memaksa penanaman pohon jarak di seluruh keresidenan. Penanamannya diawasi oleh seorang mantri jarak di setiap kecamatan, yang ditunjuk oleh pangreh praja setempat. Di Kewedanan Banjarharjo (Brebes) penanamannya dilakukan di atas tanah petani, di samping sawah, di sepanjang tanggul sungai, dan di halaman rumah di bawah pengawasan lurah. Apabila petani jarak tidak mau menanam pohon jarak, menurut penuturan seorang bekas mantri jarak maka,

> Orang-orang Jepang akan marah kepada lurah, kemudian lurah yang takut kepada orang-orang Jepang menjadi marah kepada petani.[30]

Setelah kegagalan penanaman pohon jarak atas tanah seluas 100 hektar lebih di satu desa di dataran Pantai Pemalang, lurahnya bunuh diri dengan melompat dari puncak pohon kelapa. Di daerah pedesaan dalam keresidenan itu, penguasa Jepang mengaitkan setoran biji jarak dengan jatah minyak tanah. Seorang petani yang menyetor biji jarak dapat membeli minyak tanah dengan "harga rendah" di kecamatan. Penguasa Jepang juga mewajibkan beberapa hal, yang tampaknya sepele, untuk bermacam-macam kepentingan. Sejenis tumbuh-tumbuhan yang bernama iles-iles juga dikumpulkan, konon untuk keperluan obat-obatan atau bahkan untuk bahan mesiu. Bunga matahari juga dikumpulkan, mungkin karena kandungan minyaknya,

[29]Marsum Hr, "Ceritaku: Percikan Peristiwa Bersejarah di Sekitar Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Daerah Tegal dan sekitarnya," naskah ketikan, November 1974 (selanjutnya dikutip "Ceritaku").

[30]Mantri jarak, Transkripsi I/4, 13.4.73.

Tabel 4
Perkiraan Produksi, Penyetoran, dan Konsumsi Beras di Keresidenan Pekalongan, tahun 1944

Perkiraan Produksi (ton)	Perkiraan jumlah penduduk	Jumlah yang harus disetorkan (ton)	Sisa beras (ton)	Konsumsi per kepala
143.884[1]	3.180.557[2]	88.000 dari pemerintah Pusat, dinaikkan menjadi 100.000 ton oleh Keresidenan	43.884, ditambah kira-kira 30.00 ton yang tidak disetor jumlah semua 73.884 ton.	63 gram/hari

Catatan :

(1) Angka produksi ini diperkirakan dengan asumsi bahwa produksi beras di keresidenan ini antara 1939-1944 telah naik dengan angka-angka yang rata-rata di seluruh Jawa pada periode itu sebesar 6,8 persen, dari 3.933.050 ton *Statistical Pocket Book of Indonesia, 1941*. Tabel 55 hlm. 37) menjadi 4.630.000 ton (Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) The *Japanese Experience*, tabel 9 hal 244. Menurut Sato, "The Japanese Military Administration" hal 144 (mengutip *Indisch Verslag* 1941. Tabel 193). Produksi padi di karesidenan Pekalongan pada tahun 1940 adalah 534.400 ton padi (atau 283.762 ton beras). Apabila memakai angka ini jumlah padi yang wajib disetor kepada pemerintah adalah 16 persen dari total produksi beras karesidenan Pekalongan menjadi 19 persen setelah dinaikan oleh karesidenan menjadi 100.000 ton padi.)

(2) Angka penduduk Pekalongan didasarkan atas sensus tahun 1930, yang diadakan terakhir kali sebelum pecah Perang Dunia II tahun 1939. Angka tersebut mengandaikan pertumbuhan yang secara kasar rata-rata antara tahun 1930 dan 1961 di Jawa sebesar 1,33 persen dapat dikenankan di Pekalongan antara 1930-1944, periode di mana tidak pernah ada sensus.

dan sejenis ubur-ubur, yang diingat orang apabila tersentuh tangan menjadikan gatal. Sekalipun dampak kewajiban ini tidak seberat setoran beras dan biji jarak, semuanya ini telah menambah perasaan antilurah, karena lurahlah yang memaksa petani untuk tugas paksa itu.

Penjatahan Bahan Sandang

Sebagai bagian dari politik swasembada Jepang, juga dilembagakan penjatahan bahan sandang dan bahan keperluan pokok lainnya. Seperti halnya pengumpulan beras dan pengerahan tenaga kerja, pangreh prajalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem penjatahan, namun begitu, bila para camat tidak mendapat keuntungan yang tidak sah langsung dari sistem paksa setor tadi (kecuali mengambil dari apa yang diperolehnya dalam penggeledahan rumah-rumah di desa). Maka mereka terlibat langsung dalam sistem penjatahan bahan sandang. Dampak dari penjatahan ini berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya dalam keresidenan ini. Dr. Muryawan, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, mengatakan mengenai sistem penjatahan, yang ditulisnya pada awal 1946:

> ...pembagian, penjerahan tenaga, pengesahan bahan-2 makanan, jang semua dirasakan sedalam-2nja oleh pendoedoek. Perasaan dendam ini ditoejoekan pada Pangreh Pradja jang seharusnja menindakkan perintah dari atas. Teroetama di dalam soal pembagian, pendoedoek merasa bahwa ini hal didjadikan ta' begitoe dari semestinja. Tentang kesoekaran-2 tentang pembagiannja barang jang hanja sedikit, pendoedoek mungkin tak memikir lagi. Jang didengarkan dan dilihat oleh oemoem jaitoe hal-hal perdjalanan pembagian tadi, kecoerangan-2 si pembagi-2 tadi hingga djadi *publiek geheim* [rahasia umum] di kalangan pendoedoek. Soeasana ini jang ta' memoeaskan jang hingga mengandoeng *gespannenheid* [ketegangan], meroepakan satoe *vruchtbare bodem* [tanah yang subur] oentoek menerima penerangan-2 jang sangat memoeaskan mereka.[31]

Pada awal masa pendudukan, pemerintah Balatentara Jepang mengambil alih pabrik-pabrik tekstil di Jawa, termasuk perusahaan Belanda terbesar di Tegal yang setiap tahunnya memintal bahan baku kapas seharga 15 juta rupiah dan mempekerjakan 12.000 pribumi.[32] Setelah tidak mungkin lagi mendatangkan suplai dari Jepang, cadangan sebesar 50 juta yard (dalam tahun 1944) berangsur-angsur di kelu-

[31]Dr. Muryawan, "Ikhtisar," (1946), Proc. Gen.

[32]J.H. Boeke, *The Evolution of the Netherlands Indies Economy*, New York, 1947, hlm. 119, 122.

arkan untuk kebutuhan tentara dan "didistribusikan kepada orang sipil hanya bila ada kelebihan setelah kebutuhan tentara terpenuhi."[33] Pihak tentara selanjutnya berusaha menambah produksi lokal dan penanaman kapas sebagai monopoli negara, sedang pemintal lokal tidak diperbolehkan menggunakan kapasnya sendiri. Ketentuan ini dengan sendirinya telah menghancurkan industri tekstil lokal seperti di Banjarharjo di sebelah barat daya Brebes, yang sebagai gantinya terpaksa ditenun semacam kain tipis dari kapuk yang tidak dapat dipakai setelah beberapa bulan saja. Dengan begitu Banjarharjo kehilangan sebuah sumber penghidupan penting maupun perannya sebagai pemberi suplai bahan sandang.[34]

Di Keresidenan Pekalongan, penjatahan bahan sandang disesuaikan dengan setoran beras. Tadinya penjatahan sangat dibatasi bagi mereka yang tidak dapat menjual padi, pada akhir pendudukan penjatahan ini dihentikan sama sekali karena kekurangan persediaan. Wedana Belik, yang membawahi 3 kecamatan, menuturkan mengenai kebijaksanaan tersebut:

> Lalu, ini, apa, pembagian ini, pembagian itu yang sukar, saya rasa inilah salah satunya sebab yang menimbulkan huru-hara di tiga daerah itu, sebab cuma suratnya yang dari Pekalongan itu cuma menyebutkan, "Ini adalah pakaian untuk orang yang sangat membutuhkan." Itu 'kan relatif sekali. Saya dapat banyak bahan, itu permintaan sana untuk dijadikan celana, dikatakan... saya bikin aturannya "11/4 yard." Ya sudah, sejadinya 11/4 yard. Saya punya istri. Saya tidak bisa, ya, orang mbok itu lho, kawan-kawan kita pelayan-pelayan kita itu, itu mbok diberi, saya tidak, ya, yang untuk rakyat yang sangat membutuhkan, itu saya pegang teguh, lalu, ya, bisa.[35]

Selain pembagian yang adil (setiap orang mendapat 11/4 yard) wedana ini juga berusaha mengambil langkah-langkah untuk menghalau tersebar luasnya kecurigaan bahwa para pejabat memperkaya dirinya sendiri, dengan jalan menggunakan pendopo Kawedanan sebagai gudang. Rakyat dengan mudah dapat melihatnya dan tahu pasti,

[33]Miyamoto, Jawa.
[34]Tokoh Muslim Banjarharjo, Wawancara, 12.12.75.
[35]Wedana Belik, Transkripsi I/6, 22.5.73.

kapan tibanya jatah bahan sandang dan minyak tanah datang, dan berapa jumlah yang tersedia. Pembagian bahan sandang tidak lagi dikaitkan dengan setoran beras di Belik, yang merupakan tanggung jawab lansung tiga camat, sedangkan istri camatlah yang mengatur pembagian bahan sandang. Walaupun Wedana telah mengingatkan bahaya dari cara-cara ini dan menyarankan para camat agar membentuk panitia distribusi, dan disetujuinya, namun dalam praktiknya tidak pernah dilakukan. Rakyat telanjang, tiada pakaian untuk menutupi tubuhnya, sementara "lurah dan keluarganya memperoleh bahan pakaian."[36] Menimbun barang sudah lazim di kalangan para pejabat, dan rakyat di Belik dan kawasan-kawasan lainnya sudah mengenakan karung goni atau pakaian bikinan sendiri dari serabut pohon kina.

Camat Taman dikenal baik karena upaya-upaya untuk meringankan beban rakyat dari politik penindasan Jepang, ia menunjuk panitia yang terdiri dari lima orang yang bertanggung jawab terhadap distribusi bahan sandang pemberian *kumiai*. Sudah merupakan pengetahuan umum waktu itu bahwa pengurus koperasi mengambil 20 persen dari bahan sandang itu, demikian pula camat dan istrinya. Untuk mencegahnya, Camat Taman mengharuskan bahan sandang dari *kumiai* itu dibuat jadi pasangan kemeja dan sarung, lalu didistribusikan kepada mereka yang sama sekali tidak menerima bahan sandang apa pun, yakni mereka yang sama sekali tidak mempunyai padi untuk disetorkan. Sisa-sisa potongan, dikenal sebagai "potongan gotong-royong" dibikin untuk baju anak-anak yang tidak lagi pergi ke sekolah karena tidak punya baju apa pun, juga untuk anggota-anggota Seinendan (Barisan Pemuda) dan kesebelasan sepak bola setempat.[37] Sisa-sisa yang sudah tidak dapat digunakan dikirim ke Rumah Sakit Pemalang untuk dijadikan pembalut.

Camat Taman merupakan suatu pengecualian. Seorang pejabat yang ditunjuk Jepang untuk mengawasi sistem jatah dan setoran padi di tingkat Kabupaten Pemalang pada tahun 1944, menuturkan pengalamannya di beberapa daerah sebagai berikut:

[36]Wedana Belik, Transkripsi I/7, 22.5.73
[37]Camat Taman, Wawancara, 9.11.71.

> Saya melihat bahan sandang penuh di pendopo Kawedanan Pemalang, Taman, dan Petarukan, juga di Comal dan Randudongkal. Kapan dibagikan dan siapa yang menerima, saya belum sempat mengumpulkan data-datanya. Di Randudongkal di mana kakak ipar saya menjadi camat, saya melihat kasurnya diisi dengan bahan pakaian dan bukannya kapuk. Begitu pula gulingnya.[38]

Benang tenun amat berharga, sehingga hampir setiap orang yang tinggal di sekitar pabrik tekstil Tegal dapat hidup dengan mencurinya. Pada malam hari benang tenun dilemparkannya lewat tembok pabrik dan dijual di pasar gelap.[39]

Di kota-kota kecamatan, rakyat memperoleh jatah bahan sandang, juga bahan pokok lainnya, melalui badan baru yang dibentuk Jepang, yakni Kepala Rukun Kampung *(azacho)* dan Kepala Rukun Tetangga *(kumicho)*. Mereka ini diangkat oleh lurah, karena ini merupakan bagian tak terpisahkan dari aparat penindasan Jepang. Fungsi utamanya adalah mengatur penyelenggaraan distribusi jatah bahan kebutuhan pokok, seperti minyak tanah, sabun, gula, rokok, dan kadang-kadang bahan sandang. Selain itu mengorganisasikan kerja bakti dan latihan pemuda.

Di kota pun sukar sekali diperoleh kain pada bulan-bulan terakhir masa pendudukan. Kain sedemikian langkanya sehingga ikat penutup kepala pun dijadikan celana pendek, dan kain seprei dijadikan kain sarung wanita, bahkan juga kain kafan cocok untuk pakaian. Kemudian goni penuh dengan kutu dan sarung karet yang kasar yang dicat menyerupai kain palekat, melekat di badan bila hari panas dan mudah sobek. Ketika bahan-bahan ini habis, rakyat membuat sendiri pengganti "kain"-nya dari sejenis serat (*waring*) yang diambil dari sejenis daun berserat, dari kulit kayu pulutan yang kecil, ataupun dari *klotokan* (kulit kayu yang dikelupas—*Peny.*) kayu serat.

Langkanya minyak tanah diperburuk pula oleh kualitas bahan bakar yang terlalu kental untuk dapat dinyalakan. Sebagai gantinya orang menggunakan sumbu yang dicelupkan ke dalam semangkuk minyak tanah, suatu proses yang menyebabkan rumah penuh jelaga

---

[38]Pegawai Kabupaten Pemalang, Transkripsi, I/10, 3.5.75.
[39]Pemimpin KNI Tegal, Wawancara, 19.10.75.

dan membuat hidung hitam oleh asap, kata orang yang mengingat masa itu. Tidak ada *gregetan* atau korek api, sebagai gantinya digunakan sabut kelapa (*sepet*) yang hanya dapat dinyalakan selama beberapa jam saja.

Kerja Paksa (Romusha)

Penguasa Jepang dengan proyek-proyek romushanya yang banyak jumlahnya telah menbuat Keresidenan Pekalongan sebagai proyek kerja paksa raksasa. Kalau alasan bagi romusha di Jawa "untuk pelaksanaan kebijaksanaan mencukupi kebutuhan sendiri di daerah-daerah yang bersangkutan," maka tentara Jepang menugaskan sejumlah 228.000 orang untuk bekerja di luar Jawa. Tetapi karena kesukaran transportasi, yakni kelangkaan kapal, pelaksanaan program itu sepenuhnya terhambat.[40] Karena kurangnya gizi dan perlakuan-perlakuan yang di luar batas perikemanusiaan terhadap romusha yang dikirim keluar Jawa, maka pelaksanaan proyek-proyek di dalam Keresidenan Pekalongan, dan sikap para pemimpin pergerakan yang terlibat, membuat situasi lebih rumit. Seperti halnya penyetoran paksa padi dan penjatahan, dampaknya memang berbeda-beda menurut sikap pangreh praja setempat. Sistem romusha berbeda dengan sistem setor paksa dan penjatahan, karena pengerahan romusha melibatkan para pemimpin pergerakan setempat. Mereka bersama pangreh praja dimanipulasi oleh pemerintah Jepang menjadi pelaksana kerja paksa. Tetapi para pemimpin pergerakan ini berusaha memanipulasikan sistem romusha untuk melindungi rakyat dan mengurangi akibat-akibatnya yang kejam seperti akan terlihat.

Dalam teori Jepang mempunyai dua macam pengerahan tenaga yaitu Kinrohoshi, "kerja bakti" yang diselenggarakan di tingkat kabupaten ke bawah; dan romusha, buruh kasar yang diorganisasikan langsung oleh penguasa militer pusat. Perekrutan dan transportasi romusha menjadi tanggung jawab Romu Kyokai, atau semacam Jawatan Tenaga Kerja setempat. Perekrutan dipimpin oleh seorang anggota

[40]Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) *The Japanese Experience*. Wertheim menunjukkan 300.000 orang dikirim ke luar Jawa dan hanya 70.000 orang yang selamat kembali. *Indonesian Society*, hlm. 262.

pangreh praja yang juga menjadi ketua BP3 (Badan Pembantu Prajurit Pekerja) setempat. Jawatan Tenaga Kerja tadi berkewajiban menentukan jatah romusha di tingkat kabupaten dan kewedanan. Kinrohoshi mengerjakan proyek-proyek pertahanan militer, yang dalam kenyataan juga merupakan kerja paksa. Karena itu, kata romusha umumnya digunakan untuk semua bentuk kerja paksa, sedangkan mereka yang dikirim ke luar wilayah keresidenan disebut kerjantara. Di Pemalang orang-orang Cina dapat terbebas dari Kinrohoshi, sedangkan orang-orang Arab setempat dipaksa membangun proyek pertahanan pantai. Mereka juga sekali atau dua kali sebulan dikirim ke hutan di sebelah selatan Pemalang untuk menyusun kayu jati gelondongan menjadi tumpukan-tumpukan. Sekalipun mereka mendapat jatah makanan (nasi *pongol*) jumlahnya tidaklah mencukupi dan harus ditambah oleh pekerja-pekerja Arab itu sendiri.

Perbedaan keterlibatan pangreh praja dan pergerakan pertama-tama terletak dalam tanggung jawabnya yang menentukan golongan tenaga kerja yang direkrut. Pangreh praja berkewajiban mencarikan romusha yang akan diperkerjakan di dalam dan di luar wilayah keresidenan (lihat tabel 5), sedangkan kaum pergerakan diberi tugas propaganda untuk "Asia Timur Raya" dan jadi pembangkit semangat bagi pelaksanaan program-program Jepang. Barangkali karena peran semacam inilah maka pergerakan tidak menghimpun kebencian rakyat seperti pangreh praja yang sering hanya memberi janji-janji kosong demi jatah setoran padi, bahkan mengirimkan mereka yang tak kuasa menentangnya untuk kerja paksa. Para pemimpin pergerakan berusaha menggunakan proyek-proyek romusha sebagai pembagian makanan bagi si miskin, walaupun tidak mungkin mengawasi jatah makanan harian mereka yang dikirim ke luar wilayah keresidenan. Berikut ini pengalaman 2 pengerah tenaga romusha bekerja yang kebetulan adalah tokoh nasionalis penganut Sukarno di keresidenan itu. Kartohargo, tokoh Brebes, membawa 300 orang romusha jatuh sakit dan mati di wilayah Bayah (Banten Selatan), dan seorang lagi mati di kereta api". Jepang memberi cukup makan selama mereka berada di sana.[41]

[41]Kartohargo, Wawancara, 16.12.72.

Tabel 5
Pengerahan Romusha dari Beberapa Daerah di Keresidenan Pekalongan

Lokasi	Jumlah orang per desa atau per minggu	Sumber
A. Dikirim ke proyek di luar keresidenan		
Kewedanan Pangkah	21-42 per desa per minggu	Pemimpin nasionalis Pangkah
Kewedanan Pangkah	30 per desa per dua minggu	Pemimpin nasionalis Pangkah
Kecamatan Brebes	100 per minggu[1]	Camat Brebes
Kecamatan Losari	25-50 per desa[2]	Camat
Kabupaten Tegal	100 per minggu[3]	Bupati
B. Untuk proyek di lingkungan keresidenan		
Kecamatan Brebes dan Wanasari	860 dari 43 desa per hari[4]	Pemimpin proyek
Kecamatan Ampelgading	300 dari 15 desa[5]	Pemimpin proyek

Sumber: Data dari wawancara.

Catatan:

1. Angka untuk keseluruhan kecamatan.
2. Naik menjadi 250 pada menjelang akhir pendudukan.
3. Angka untuk keseluruhan kabupaten.
4. 20 orang per desa untuk proyek saluran Sungai Pemali.
5. 20 orang per desa untuk proyek butanol Comal Baru.

Kromo Lawi, seorang Sukarnois dari Pekalongan angkatan lama, selaku ketua Putera (Pusat Tenaga Rakyat) Keresidenan Pekalongan, terlibat dengan urusan pengiriman romusha ke luar wilayah keresidenan sejak awal masa pendudukan. Ia selalu pergi mengunjungi romusha dari Pekalongan di tambang batu bara Bayah karena sebagai kepala Putera merasa cukup berwibawa untuk memastikan bahwa para romushanya memperoleh perlakuan layak, dan memperoleh giliran penggantian setiap dua minggu. Dengan demikian tidak ada orang-orang yang harus tinggal lama di sana dan dapat kembali ke

Pekalongan dengan selamat.[42] Barangkali tokoh-tokoh ini merasa puas dengan proyek-proyek romushanya setelah kemudian diketahui bahwa di daerah-daerah Jawa lainnya banyak romusha yang tidak dapat kembali dengan selamat.

Tan Malaka, dalam kesaksiannya *Dari Pendjara Ke Pendjara* memberikan keterangan yang sangat berbeda mengenai kesejahteraan romusha di tambang batu bara Banten Selatan. Ia mengatakan bahwa, "sukarelawan romusha" dari Pekalongan dan Kedu adalah anggota-anggota Seinendan. Lebih dari 15.000 romusha bekerja di tambang itu, dan antara 400 sampai 500 setiap bulannya meninggal karena penyakit dan kurang gizi.[43]

Tentu saja bagi para pemimpin pergerakan setempat terdapat perbedaan yang nyata antara proyek romusha yang mereka pimpin di Banten dan proyek-proyek romusha seperti di dalam Keresidenan Pekalongan. Mengapa terjadi demikian? Akan lebih jelas kalau dilihat pelaksanaan beberapa proyek pada waktu itu seperti misalnya penebangan pohon hutan jati di Pemalang Selatan untuk menyediakan kayu untuk bahan pabrik Comal, tiang pancang proyek pertanian Pantai Pemalang, dan proyek pembuatan kapal Jepang di Tegal, Pekalongan dan tempat-tempat lain di pantai utara.

Prioritas Jepang setelah penyetoran padi ialah pembuatan kapal kayu, yang akan dipergunakan untuk mengirim suplai untuk tentara Jepang antara lain di Papua New Guinea. Di Jawa 44.000 pekerja Indonesia di bawah pengawasan 215 insinyur Jepang bekerja di 150 proyek galangan kapal yang bertenaga diesel. Dalam tahun 1943, 127 kapal telah diluncurkan, dan tahun 1944 target yang begitu muluk yakni 700 yang kemudian diturunkan menjadi 343 kapal. "Untuk tujuan inilah telah dilakukan penebangan kayu secara besar-besaran," kata Miyamoto. Di sinilah pentingnya proyek romusha di hutan jati Pemalang sebagai penyedia bahan baku bagi pembuatan kapal.[44] Se-

[42]Kromo Lawi, Transkripsi, I/7-8, 29.5.73.

[43]Tan Malaka, *Dari Pendjara ke Pendjara*, Bagian II, Yogyakarta, tiada tanggal, hlm. 157, 159-60.

[44]Miyamoto menyebut lain-lain tempat, seperti Cirebon, Semarang, Juana, dan Lasem, di mana kapal-kapal dibikin. (dalam Reid dan Oki (eds) *The Japanese Experience*, hlm. 242, 243-244.

orang mantri kehutanan kelahiran Ambon, bernama Holle, menerangkan:

> ...Saya menerangkan kepada camat bahwa daripada dikirim ke Banten sebagai romusha dan mati di sana, lebih baik dikirim ke Sukowati dimana nanti saya mengatur pemotongan kayu. Saya memberikan jaminan sungguh bahwa setiap hari mereka dapat makan sekuat-kuatnya ini adalah prinsipnya, dari Kenpeitai itu.[45]

Karena Holle dari Ambon, Jepang semula waspada dan curiga bila dia akan memihak kepada Belanda. Namun karena terkenal di kalangan masyarakat setempat dan semangatnya yang mencolok dalam mengatur proyek-proyek besar romusha, kecurigaan Jepang itu berubah dan proyek itu mendapat pujian secara luas. Holle diberi tambahan persediaan kain, beras, dan ikan asin bagi romushanya di Sukowati oleh Kenpeitai. Berbeda dengan biasanya, didapatnya pula seperangkat gamelan untuk hiburan para romusha. Dengan memanfaatkan sepenuhnya kepercayaan Kenpetai itu, Holle ini cukup aman selama Kenpetai percaya bahwa ia lebih berhasil dibanding dengan pengatur proyek-proyek lain di keresidenan itu dalam mengorganisasi proyek dan menggunakan tenaga kerja penduduk Pantai Pemalang.

Di lain tempat di Keresidenan Pekalongan terdapat pemimpin-pemimpin pergerakan yang memanipulasi sistem ini guna mendapatkan perlakuan yang lebih baik bagi romusha. Di samping pengacau desa dan pencuri kecil, sebagian besar desa mengirim orang-orang miskin yang kelaparan ke proyek itu agar mereka mendapatkan makanan.[46] Kepala Jawatan Penerangan Pangkah berhasil mendapatkan jatah pembagian harian sebanyak 500 gram beras dari Kumiai bagi setiap romusha. Separoh jatah ini boleh dibawa pulang untuk keluarganya di rumah. Residen Jepang meninjau tempat ini dan mengeluh bahwa di Indonesia tak seorang pun akan menghabiskan 500 gram dalam sehari, sehingga dianggapnya jatah itu terlalu banyak. Tetapi dengan bantuan Bupati Tegal (Mr. Besar), jatah itu dapat

[45]Holle Transkripsi I/3, 24.6.76. Lihat juga di bawah bab 3.
[46]Tokoh nasionalis Pangkah, Wawancara, 10.10.72.

dipertahankan.[47]

Permainan jatah beras telah membantu memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Seorang pemimpin proyek di Brebes menuturkan:

> Dari jumlah 860 orang yang seharusnya dikerahkan, hanya sekitar 25 persen yang bisa bekerja sepanjang hari. Kebanyakan mereka berada dalam kondisi fisik sedemikian buruknya sehingga tidak sanggup bekerja untuk waktu lama. Setiap orang romusha memperoleh jatah 3 ons [300 gram] per hari, dan untuk itu mereka harus membayar 3 sen. Upah setiap harinya berkisar antara 5 sampai 25 sen. Setiap pagi saya menulis di papan tulis berapa banyak romusha datang dari masing-masing desa. Beberapa orang menginap di tempat proyek karena datang dari desa yang jauh (misalnya 20 km). Jaranglah desa yang mengirim kuota penuh 20 orang, beberapa desa mengirim separuhnya yang lain kurang lebih 5 atau bahkan 3 orang. Krasak (desa saya) sering kali tidak mengirim seorang pun! Pemimpin kelompok *(hancho)* selalu pamong desa, yang datang mengambil jatah beras untuk kuota penuh 20 orang romusha (yang dibagikan di antara mereka yang datang). Mereka yang terpilih biasanya adalah orang-orang tua. Kami dapat memberikan kepada setiap kelompok jatah berasnya secara penuh setiap hari, tidak peduli berapa pun yang sebenarnya datang, sebab pengawas kami, inspektur irigasi, selalu mengatakan kepada pejabat Jepang bahwa jumlah romusha adalah betul... Maka ia selamat selama revolusi dan dijaga pemuda.[48]

Di daerah lain, berkat sebagian tekanan Bupati Brebes Sarimin, didirikanlah dapur umum yang dianggap lebih efisien karena jatah romusha tidak dikurangi oleh orang-orang yang memasaknya. Namun, lurah yang mengawasi pemasakan itu sering kali tidak jujur dan hanya meberikan separuh jatah kepada romusha, sehingga pada masa revolusi sosial ia menjadi sasaran serangan para bekas romusha, demikian menurut ingatan seorang bekas pemimpin romusha.

---

[47]Pemimpin Jawatan Penerangan (Senden In) Pangkah, Transkripsi II/22, 27.11.75. Tokoh ini kemudian menjadi ketua KNI dan Wedana Revolusioner Pangkah sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

[48]Pekerja proyek romusha, Wawancara, 26,11,75.

Kondisi di pabrik-pabrik gula (yang diubah fungsinya) di masa romusha bekerja benar-benar menggambarkan kekejamannya. Di salah satu pabrik di Tegal para romusha mengenakan pakaian dari karung goni, dan tidak mendapat upah sepeser pun. Mereka bekerja sejak pukul 7 pagi sampai sore, di antaranya membuat kecap, pelembungan makan yang tahan air dan juga kapal selam mini. Mereka harus mengangkut barang-barang yang berat, seperti misalnya untuk membalik sebuah kapal selam sepanjang 10 meter memerlukan 40 sampai 50 orang agar dapat dilakukan pengelasan dengan tepat. Salah satu kapal selam yang mempunyai delapan silinder dan torpedo bergaris tengah 72 cm yang dibuat keresidenan, dipasang di pabrik di Slawi.

Romusha tidak menerima tambahan jatah untuk jenis pekerjaan semacam ini jatah hariannya hanya nasi, singkong, dan jagung yang dibungkus dengan daun pisang. Sebaliknya, para ahli yang datang dari seluruh Jawa mendapatkan hak-hak istimewa. Pernah Jepang mengadakan perlombaan untuk melihat siapa yang berhasil membuat kapal selam yang tercepat. Setiap regu yang terdiri dari 14 orang, apabila dapat menyelesaikan pembuatan sebuah kapal selam dalam 7 hari, mereka mendapat hadiah berupa kaleng udang kering, 1 kg daging kering, dan 3 kg kacang tanah, kata bekas pemimpin regu tersebut. Pada umumnya setiap regu dapat menyelesaikannya dalam tempo 10 hari.[49]

Pabrik gula Comal baru seperti pabrik Slawi telah ditutup dan diubah menjadi pabrik pembuat alkohol yang disebut butanol. Menurut orang-orang Jepang butanol itu akan digunakan sebagai minyak pesawat terbang.[50] Di Kecamatan Ampelgading, nama pabrik gula tertua, para lurahnya mengancam rakyatnya akan dikirim ke proyek romusha di luar daerah, apabila menolak bekerja pada proyek-proyek di keresidenannya sendiri. Pada awal masa pendudukan, romusha ini diupah 31 sen sehari dan kadang-kadang diberi sebungkus rokok pu-

[49]Tenaga ahli romusha, Wawancara, 26.11.75.

[50]Ota mengatakan kapal yang sedang mengangkat mesin-mesin yang diperlukan untuk produksi butanol di pabrik Comal tenggelam dalam perjalanan ke Jawa, "mengakibatkan produksi butanol tidak dapat dikerjakan." Jawaban.

tih Kooa yang harganya 12,5 sen. Sedangkan menjelang akhir pendudukan rokok putih merupakan barang mewah yang hanya tersedia bagi Jepang. Para penguasa Indonesia pun tidak dapat memperolehnya, apalagi para romusha, tentu tidak memperolehnya.[51] Apabila seorang lurah gagal memenuhi kuota harian romusha, menurut salah seorang dari mereka:

> Beberapa hari kemudian camat akan memanggil lurah dan akan memarahinya: "Kalau kamu besok pagi tidak memenuhi jatahmu lagi, awas! Saya akan melaporkan kepada Kenpetai."[52]

Biasanya lurah mengirim orang-orang miskin dan sangat melarat. Noji padi Ambowetan mengatakan bahwa para pejabat mengirim orang-orang yang sangat melarat dari desanya dengan bujukan manis seperti "Kamu segera diberi pekerjaan dengan upah lebih tinggi dari kehidupan di sini sekarang." Mereka kemudian ditangani oleh para penguasa Jawatan Tenaga Kerja di Pekalongan dan diberi 10 sampai 20 rupiah sebagai uang saku selama perjalanan.[53] Camat Brebes tinggal di pinggir jalan kereta api Semarang-Cirebon. Dia memenuhi kuotanya dengan cara lain:

> Jatah romusha untuk setiap kecamatan berbeda-beda, ada yang 50 atau 100 atau 150 atau 200 per minggu. Saya mendapat kuota 100. Sembilan puluh di antaranya berasal dari pelarian. Kereta api berhenti di depan rumah saya, dan membawa romusha dari Semarang. Pengawal-pengawal Jepang tertidur dan mereka lari. Saya mendaftar kembali mereka sebagai romusha saya, dan dengan begitu memenuhi kuota saya.[54]

Bupati Tegal Mr. Besar harus menyediakan 100 romusha setiap minggu. Ia sengaja mengajukan orang-orang tua, dan 80 persen di antaranya biasanya ditolak.

Berlawanan dengan itu yang terkenal paling jahat sebagai pengumpul romusha ialah Wedana Tanjung, menurut rekannya:

> ...Lha itu Pak Slamet itu carinya romusha cuma *ngadang* (menghadang) romusha yang datang, pulang dari Banten itu; lalu ditang-

[51] *Weekly Intelligence Summary* No. 75, 16 Juni 1944. *NI Intelligence.*
[52] Pemimpin Seinendan Ampelgading, Transkripsi II/17, 8.11.75.
[53] Noji padi Ambowetan, Wawancara, 6.11.75.
[54] Camat Brebes, Wawancara, 1.12.72.

kap lagi, dimasukkan gudang. Dari itu Banten dapatnya romusha lebih banyak daripada teman-teman. Lha itu salah satu kesusahan yang kita hadapi, cari romusha itu. Tapi Daerah Tanjung baik. Sebab itu ada romusha yang pulang dari Banten itu dihadang di jalan." Dari mana...?" Masukkan lagi. Jadi itu Pak Slamet itu dari Jepang namanya baik sekali, ya tho? Karena romusha banyak, lha itu serentak ada pergolakan ya terpaksa dia lari tho? Sebab mata rakyat tidak bisa dikelabui, bukan?[55]

Seperti diuraikan di atas, kondisi romusha berbeda-beda dari satu proyek ke proyek yang lain, dalam wilayah keresidenan sendiri berbeda. Meskipun kadang-kadang jatah beras dapat dimanipulasi oleh para pemimpin setempat untuk kepentingan sebagian romusha, tetapi semua proyek romusha secara potensial telah merusak rakyat, mengingat kondisi kesehatan penduduk yang buruk dan jarak yang ditempuh mereka ke dan dari tempat proyek. Pada umumnya desa mengirimkan mereka yang buruk kondisinya, lapar, atau menganggur, karena proyek romusha dianggap merupakan salah satu tempat di mana rakyat miskin dapat memperoleh nasi pada akhir masa pendudukan.

Biasanya pangreh praja tidaklah dibenci rakyat karena peranannya sebagai pengumpul romusha, tetapi justru peranannya sebagai pengumpul beras dan usaha memperkaya diri sendiri lewat korupsi, khususnya jatah bahan sandanglah yang dibenci oleh rakyat dan masih dikenang hingga sekarang.

Memburuknya hubungan rakyat dan pangreh praja dapat dilihat dari keluhan yang diterima oleh Seksi Kesejahteraan Umum Putera, seperti apa yang Hatta sarankan dalam laporan pertamanya "...dapat dipakai sebagai barometer untuk mengukur kondisi dan keadaan umum rakyat." Termasuk juga keluhan-keluhan terhadap peraturan-peraturan atas penjualan dan panenan padi, dan pungutan pajak yang kejam. Keluhan yang mencolok adalah mengenai "...sikap pangreh praja terhadap rakyat yang sama buruknya atau kadang lebih buruk daripada waktu penjajahan Belanda." Dalam laporan kedua bulan Maret 1944, Hatta menunjukkan bahwa hubungan antara rakyat de-

[55]Transkripsi I/12, 22.5.73.

ngan pangreh praja dan polisi sudah memburuk. Masalahnya yaitu, antara lain, tentang makin sukarnya transportasi dan pemasaran beras, permintaan akan air irigasi yang tidak diperhatikan dan masalah-masalah penahanan, perampasan, penangkapan dan pemukulan oleh polisi dan pangreh praja. Di dalam laporan tersebut juga disebut-sebut tentang penarikan pungutan dan sumbangan desa oleh pangreh praja di beberapa tempat, juga dimuat "dan... permintaan perlindungan atas gangguan yang terus-menerus oleh pangreh praja."[56]

II. Tanggapan Terhadap Kebijaksanaan Jepang

Bagaimanakah rakyat dan kaum pergerakan memberikan tanggapan terhadap kebijaksanaan Jepang? Pertama, ada pemimpin pergerakan yang berusaha meringankan beban rakyat dengan membentuk koperasi. Kedua, rakyat berusaha menghindari setoran paksa; ketiga, rakyat melawan penguasa Indonesia dan Jepang dengan kekerasan.

1. Usaha Koperasi

Di Pemalang seperti di tempat lain, ditempuh beberapa usaha untuk meringankan beban kebijaksanaan Jepang di daerah pedesaan, dibentuklah koperasi. Yang pertama yaitu Kopi (Koperasi Indonesia) yang didirikan oleh Sarino Mangunpranoto, yang mencakup para pejabat tertinggi pangreh praja di kota, dengan bupati sebagai pelindung, jaksa sebagai ketua kehormatan, dan Abdul Mutolib, ketua Muhammadiyah sebagai pelaksananya. Dengan menggunakan kekuasaan Bupati Pemalang, Sarino dapat menghimpun cukup modal dari hasil penjualan saham Kopi kepada para lurah untuk membeli sabun, gula, kain, dan minyak goreng.

Koperasi ini mendistribusikan barang-barang kepada masing-masing lurah menurut kebutuhan setempat. Kopi berjalan lancar sampai tahun 1943, ketika Sarino pindah ke Pati. Setelah itu Kopi mero-

[56]Mohammad Hatta, *The Putera Reports: Problem in Indonesian-Japan Wartime Coorperation*, diterjemahkan oleh W.H. Frederick (Cornell University Modern Indonesia Project, 1971), hlm. 55, 56,102, 104.

sor, kerena Abdul Mutolib dengan cepat mendapatkan julukan sebagai penipu terbesar di Pemalang.

Lain dengan pesaing utama Kopi, yaitu Pekope (Penolong Korban Perang), sebuah badan koperasi yang didirikan oleh beberapa orang dari pergerakan, dipimpin oleh Supangat mantri juru rawat senior Pemalang dan beberapa tokoh Islam. Restoran Fuji yang enak makanannya, terutama satenya, menjadi tempat pertemuan anggota Pekope, tokoh-tokoh Islam nasionalis. Selain itu juga menjadi tempat pertemuan orang-orang gerakan bawah tanah yang akan dibahas kemudian, serta tempat istirahat bagi para kadernya yang lolos dari kejaran Kenpeitai di Jakarta, Solo, dan Jawa Timur.

2. Usaha Penghindaran

Karena keadaan yang berat, lebih separuh dari jumlah petani terpaksa "mencuri" padinya sendiri, biasanya dengan memaneni secara diam-diam di malam hari, lalu menyembunyikan di dalam tanah atau di atas langit-langit rumah. Dengan berbuat begitu mereka menempuh risiko besar kalau sampai ketahuan polisi desa dan dilaporkan ke lurah, atau lebih mengerikan lagi kepada Kenpeitai. Penggeledahan oleh pejabat setempat dan Kenpeitai terjadi sekali dalam beberapa bulan, sampai-sampai rakyat percaya bahwa Kenpeitai mempunyai telepon rahasia dan kompas khusus yang bisa menunjukkan di mana padi itu disembunyikan.

Di beberapa tempat tindakan menghindari pengumpulan paksa itu dapat berhasil, tergantung kepada kemurahan hati para penguasanya. Kadang-kadang sebanyak 30 persen dari setoran dapat ditahan. Dalam keadaan demikian para pejabat itu sama rawannya dengan para petani terhadap retribusi Jepang.

Kejadian di Ambowetan melukiskan kerawanan bagi siapa saja yang kedapatan menyembunyikan padi oleh Jepang di desa itu. Di rumah seorang lenggaong setempat didapati empat ikat padi dan dikatakan sebagai milik seorang janda miskin. Padi dibawa ke kelurahan sebagai barang bukti pencurian, tetapi celakanya Jepang lalu menggeledah tempat itu dan menuduh lurah menggelapkan padi tersebut serta menempelengnya, sehingga mengakibatkan lurah jatuh sakit de-

lapan hari lamanya.[57] Pejabat-pejabat yang jujur mengalami perlakuan serupa. Di tempat lain, carik desa berusaha mencegah mantri polisi menyita bedeng padi yang akan digunakan untuk hajatan (selamatan) oleh petani miskin pemiliknya. Akibatnya pertama, rumah carik itu segera digeledah dan 90 persen padinya disita, walaupun ia teleh memenuhi jatah setorannya; lalu terjadi pertengkaran dan perkelahian, mantri polisi itu kalah dan akhirnya terpaksa masuk rumah sakit. Sorenya Kenpeitai datang, menahan carik itu dan membawa ke markasnya untuk disiksa selama tujuh hari. Dua bulan kemudian carik desa yang malang itu diajukan ke depan pengadilan Pemalang dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena menghalang-halangi penggeledahan padi.[58]

Harga kejujuran begitu mahalnya, dan bila penguasa desa saja sudah memperoleh perlakuan semacam itu dari atasannya sendiri dan pihak Jepang, apalagi petani yang tidak akan memperoleh belas kasihan dari siapa pun, baik dari Kenpeitai maupun pamong desanya sendiri. Seorang nasional dari Tegal menuturkan:

> Tidak hanya kekejaman Jepang yang membuat rakyat takut, tetapi kita sendiri yang harus dipersalahkan. Misalnya, ketika para petani dari (Kecamatan) Brebes pergi ke Keranggungan untuk ikut membantu panen, mereka mendapat upah mungkin seperlima atau seperenam dari hasil kerjanya. Mereka pulang sekali seminggu dengan membawa padinya, mereka lebih suka menyimpan padi daripada uang. Para petani itu diperintahkan oleh anggota Seinendan untuk menjual padinya kepada pemerintah, untuk memenuhi jatah lurah.[59]

Bagi anggota-anggota Seinendan agaknya tidak hanya sekedar menyadari pentingnya pengumpulan padi, tetapi lebih merupakan pengalaman baru yang menarik untuk dapat menggunakan kekuasaannya itu. Dan bagi kaum tani yang telah sarat dengan beban, hal tersebut dirasakan sebagai tambahan penghinaan saja.

Korupsi semakin meluas karena jatah setoran padi harus ditambah. Di Karesidenan Pekalongan inilah satu-satunya daerah di mana

---

[57]Noji padi Ambowetan, Wawancara, 28.10.75.
[58]Panitera Desa (carik) Pamutih (Kecamatan Ulujami), Wawancara, 4.11.75.
[59]Wawancara, 20.10.75.

praktik ini masuk dalam laporan resmi kepada pemerintah. Akibatnya pangreh praja menerima ekstra beras, yang berarti jatahnya adalah yang tertinggi di Jawa. Bila residen dan asisten residen Jepang itu adalah orang-orang yang berpendidikan dan masih jujur, maka kepala bagian ekonominya adalah seorang Jepang yang lalim kejam yang dengan keras melaksanakan politik pelarangan perdagangan beras dan bahan sandang antarkecamatan dan daerah, yang menimbulkan kesukaran-kesukaran besar. Kelebihan beras dari Brebes yang biasanya mengalir ke Tegal dihentikan dan Kabupaten Tegal yang hanya dua dari sembilan kecamatannya mempunyai surplus beras tidak dapat mendatangkan beras dan jatahnya pun sangat sedikit.

Tenggang rasa para petani memang besar, namun ada batasnya, dan kini telah mencapai titik kritisnya.

3. Perlawanan dengan Kekerasan

Ditempuh perlawanan pasif oleh petani dengan cara menghindar dari kewajiban setor paksa padi. Disusul dengan tindak perlawanan lebih keras melawan tindak korupsi oleh pangreh praja. Sementara itu pendudukan Jepang masih tetap berlanjut. Kebencian kepada pangreh praja lebih daripada kepada "tuan besar" Jepang, karena elite tradisional ini tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai patron petani. Sebaliknya di mata petani, pangreh praja dianggap bertanggung jawab atas krisis Jepang yang mengancam kehidupan subsistensi ekonominya.

Insiden Comal merupakan sebuah contoh perlawanan jelas. Pembunuhan terhadap Camat Comal adalah akibat dari intimidasi kejam yang dilakukan Camat dan para pembantunya, lurah, carik, dan polisi terhadap kaum tani. Seperti tindakan Camat Raden Bambang Basirun, yang memasuki dan naik ke langit-langit rumah petani untuk mencari padi yang disembunyikan. Lebih-lebih lagi dia mempunyai nama buruk sebagai pejabat Jepang yang biasa menggunakan kekerasan fisik terhadap rakyat dengan seenaknya menampar muka orang. Kira-kira tengah hari pada suatu Jumat Kliwon menjelang pertengahan 1943, seorang petani yang belum menyetorkan padinya sewaktu pulang dari sawahnya mendapati Camat dan tiga orang pembantunya sedang menggeledah rumahnya. Perselisihan timbul, se-

orang pembantu Camat memukul petani itu, yang kemudian lari dan meminta bantuan. Sejumlah besar orang datang dan berteriak dalam bahasa Jepang "*Atsumare!*" (Kumpul-kumpul!). Tidak lama kemudian Raden Bambang Basirun dikeroyok dan terbunuh dengan bambu runcing, sedang ketiga pembantunya berhasil lolos dari kejaran orang banyak.

Berita kerusuhan ini sampai ke Wedana, yang segera tiba untuk menenangkan suasana dengan membagi-bagi rokok putih Kooa, sambil berkata, "Jangan takut, saya akan mengurus sebagaimana mestinya!" Setengah jam kemudian beberapa truk tentara penuh serdadu Jepang tiba dan mulailah menangkapi rakyat dan membawanya ke Pekalongan. Ratusan lebih yang ditangkap dan ditahan selama dua minggu, tetapi ternyata Jepang tidak dapat menemukan "pemimpin" kerusuhan itu; setiap orang "mengaku" telah membunuh Camat, bahkan juga mereka yang sama sekali tidak bersangkut-paut dengan dengan kejadian itu.[60]

Kira-kira satu setengah bulan kemudian, di kecamatan sebelahnya, yaitu Petarukan, seorang pemuka agama, Haji Dulgani, mulai memprotes setoran padi paksa, dengan menolak menyetorkan padinya ke Kelurahan Kendaldoyang. Ia menganjurkan rakyat agar membawa pulang padi hasil panennya dan bukannya dibawa ke tempat pengumpulan. Ketika mendengar Haji Dulgani dan sekelompok orang desa menuai padinya tanpa melapor lebih dulu, lurah yang bernama Tarjo segera memerintahkan seorang polisi untuk pergi ke sawah dan menghentikan panen itu. Tidak seorang pun menghiraukannya, sehingga polisi desa itu kembali melapor ke kelurahan. Lurah Tarjo bergegas pergi ke sawah, mendapati sebagian padi telah dipaneni dan diangkut pulang. Haji Dulgani menentang perintah Lurah Tarjo untuk membawa padi ke Balai Desa dan timbullah pertengkaran yang berakhir dengan perkelahian. Lurah Tarjo dipukuli dan dilemparkan ke sawah. Dia kemudian pulang dengan basah kuyup dan tubuh pe-

[60]Wawancara dengan Mokhtar, jabatan terakhir Gubernur Jawa Tengah (1959-1965), diangkat Jepang menjadi Wedana Comal setelah "pergolakan" ini; Sijono, sekretaris Kabupaten Pekalongan dan Suparjo, pemimpin Seinendan Ampelgading.

nuh lumpur. Penggeledahan yang dilakukan Kenpeitai tidak berhasil menemukan Haji Dulgani, tokoh Islam pembela rakyat, berbulan-bulan lamanya sampai berakhirnya masa pendudukan.[61]

Perselisihan dengan pangreh praja semakin hebat, disebabkan meluasnya sistem wajib setor padi dan adanya korupsi. Pangreh praja dianggap sebagai penggerak utama sistem wajib setor padi dan korupsi. Kelompok pengimbang elite yang berkuasa, yaitu kaum nasionalis dan pemuka Islam, tidak terlibat dalam politik kejam ini dan terbebas dari noda korupsi. Inilah yang membedakan mereka di mata rakyat. Kenyataan bahwa mereka terlibat bekerja sama dengan Jepang bagi proyek-proyek romusha tampaknya tidak menjadikan rakyat merasa dikhianati seperti halnya penindasan dan korupsi oleh para pangreh praja yang telah mengundang perlawanan terhadap diri mereka. Lebih jauh lagi, ternyata bahwa penindasan di masa pendudukan di Tiga Daerah itu lebih kejam dibanding dengan daerah-daerah lainnya di Jawa.

Politik Jepang

Toshio Ota wakil Residen Pekalongan, menyadari perlunya "menghapuskan pengaruh dan kedudukan kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan Belanda semasa kolonialisasi dan mendukung kekuatan-kekuatan baru sebagai tandingan elite lama yakni golongan nasionalis dan Islam."[62] Dalam upayanya untuk menciptakan kepemimpinan "resmi," Jepang mendirikan Dewan Penasihat Keresidenan (*Shu Sangi Kai*) yang beranggotakan dua belas orang, enam di antaranya ditunjuk oleh Jepang. Tiga orang pejabat tertinggi pangreh praja, tiga orang kaum nasionalis dan lima orang dari kelompok Islam dan satu orang dari golongan lain (lihat lampiran). Walaupun cara ini tidaklah menghapuskan secara keseluruhan kekuasaan elite birokrat lama, Islam diberi kesempatan baru sebagai penasihat pemerintah.

Di Kota Pekalongan, tokoh nasionalis Kromo Lawi, dengan menggunakan front resmi Putera, yang diketuainya, dan dalam ke-

[61]Ia bersembunyi di makam yang dianggap keramat, yang menjadi tempat pertemuan lenggaong setempat.

[62]Ota, Jawaban.

dudukannya sebagai anggota Shu Sangi Kai keresidenan, menyelenggarakan kursus-kursus politik dan mengadakan pertemuan-pertemuan. Di daerah pedesaan, kegiatan ini diseleggarakan camat setempat, yang oleh Kromo Lawi adalah dijuluki sebagai "bidak (pion) pemerintah kolonial." Menurut seorang nasionalis Pekalongan yang menyertai Kromo Lawi dalam rapat-rapat, "para camat setempat itu takut... mereka memperlalukan kami sebagai orang Jepang." Ini tidaklah mengherankan, mengingat Kromo Lawi adalah seorang ketua. Bagaimanapun juga Kromo Lawi dan rekan-rekan nasionalis lainnya telah mendorong rakyat agar menghadiri pertemuan-pertemuan semacam itu guna mengecam Jepang sebagaimana halnya pangreh praja.[63]

Sekalipun secara resmi dipimpin oleh pangreh praja, kegiatan sehari-hari Badan Pembantu Prajurit Pekerja (BP3) Badan Pembantu Prajurit (BP2) juga berada di tangan kaum nasionalis. BP2 yang mengatur jatah dan hiburan bagi Peta dan Heiho dipimpin oleh Subagio Mangunharjo, yaitu seorang pemimpin PNI-baru, kelahiran Tegal, teman akrab Mohammad Hatta, dan tokoh gerakan nasionalis masa perang. Walaupun bekerja sama dengan Jepang, kelompok nasionalis dan Islam yang merupakan pengimbang elite penguasa Indonesia, di mata rakyat tidaklah menempuh jalan kompromi.

Menjelang akhir pendudukan, hubungan antara pangreh praja dan rakyat telah rusak tanpa bisa diperbaiki lagi. Pangreh praja juga kehilangan dukungan dari pergerakan. Mengutip lagi dr. Muryawan bahwa ketidakjujuran para pangreh praja dalam sistem distribusi merupakan "rahasia umum" pada waktu itu, dan bahwa rakyat mempunyai rasa dendam yang amat kuat terhadap pangreh praja. Ia masih ingat benar suatu percakapannya dengan seorang pasien, seorang sais dokar mengenai ketidakadilan itu:

> Perasaan pembalasan dendam, boleh saja gambarkan dengan pembitjaraannja toekang dokar, ketika saja masih mendjalankan koewadjiban sebagai dokter, bahwa mereka sebagai orang ketjil merasa dimakan oleh jang atasan, dan kemoedian hari menoeroet kejakinan mereka akan ada pembalasannja.[64] []

[63]Sarli, Wawancara, 16.10.76.
[64]dr. Muryawan, "Ikhtisar" (1946), Proc. Gen.

BAB TIGA

OPOSISI DAN PERLAWANAN

MENJELANG tahun 1944 dukungan semakin bertambah bagi setiap aksi kecil melawan penguasa Jepang, dan kaum elite birokrat di mata rakyat semakin menjadi alat penindasan Jepang. Politik oposisi dan perlawanan di tingkat lokal yang dilakukan dengan hati-hati dan susah payah di zaman pendudukan itu juga mencakup gagasan-gagasan tertentu yang hendak dilaksanakan manakala kelak Jepang dikalahkan.

Perlawanan politik yang terorganisasi dan menonjol di Tiga Daerah sepanjang menyangkut pembentukan kekuatan politik baru pada tahun 1945 adalah jaringan terselubung komunis yang telah melakukan kegiatannya semasa pendudukan Jepang.[1] Munculnya kepemimpinan revolusioner komunis di Tiga Daerah ini berasal dari berbagai kelompok yang terlibat dalam kegiatan bawah tanah dan mempunyai kaitan langsung dengan apa yang menganggap dirinya sebagai "PKI ilegal" yang didirikan atas dorongan Muso, seorang veteran pergerakan nasional dan pemimpin PKI lama yang mengunjungi Surabaya pada akhir 1935 hingga awal 1936. Muso yang berhu-

[1] Lihat Anton Lucas (penyunting), *Local Opposition and Underground Resistance to The Japanese in Java, 1942-1945*, Monash University, Centre of Southeast Asian Studies, Papers on Southeast Asia No. 13, 1986. Selanjutnya dikutip *Local Opposition*. Berbagai penafsiran terhadap kegiatan komunis semasa pendudukan Jepang dapat dijumpai dalam literatur antara lain Jacques Leclerc, "La Condition du Parti: Revolutionares Indonesiens a la Recherche d'un Identite (1928-1948)", *Cultures et Development* jilid X-I, 1978; Sidik Kertapati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Edisi ketiga, Djakarta, 1964; dan Dokumentasi Pemuda Sekitar Proklamasi Indonesia Merdeka*, Yogyakarta Pusat SBPI, 1948.

bungan erat dengan Gerakan Komunis Internasional datang membawa Garis Dimitrov mengenai pembentukan Front Demokrasi Melawan Fasisme. Pada saat itu juga, para aktivis tua dari periode 1926-an mengedarkan bacaan-bacaan yang berisi kutukan terhadap imperialisme dan seruan agar rakyat lebih berani melawannya. Bacaan-bacaan itu disampaikan pada kulit muka yang menarik menyerupai iklan-iklan perdagangan.[2] Kegiatan-kegiatan sedemikian menjadi lebih nyata dengan terbentuknya Gerindo cabang Surabaya pada tahun 1938 sebagai organisasi front legal dari kegiatan bawah tanah. Tahun 1939 sewaktu Pamuji aktif di Gerindo, terbitlah *Menara Merah* dengan ukuran saku sebagai sarana ilegal yang beredar terbatas di kalangan kader dan anggota-anggota gerakan bawah tanah. Waktu itu *Menara Merah* berisi artikel-artikel tentang Marxisme dan situasi internasional yang diselingi dengan resep-resep masakan dan petunjuk pemakaian mesin jahit dan iklan-iklan seperti dalam kulit mukanya.[3] Dibentuklah kelompok-kelompok bawah tanah di beberapa kota di Jawa Timur seperti Madiun, Nganjuk, Blitar, Pasuruan, Jember, dan Banyuwangi, juga di Semarang, Bandung, dan Jakarta, sedangkan kegiatan kaderisasi dilakukan di antara pekerja-pekerja BPM Cepu dan kereta api. Sebuah artikel *Menara Merah* yang ditulis pada akhir tahun 1941 oleh Pamuji (lulusan Sekolah Guru Purwokerto, *Kweechool*) memberikan analisis tentang situasi internasional yang gawat dan mendesak pemerintahan kolonial Belanda untuk mempersenjatai rakyat melawan fasisme Jepang. Sebelum bala tentara Jepang mendarat di Jawa, dikeluarkan seruan untuk memboikot perdagangan dengan Jepang. Gerakan bawah tanah menyiapkan dan menghasut rakyat melawan fasisme Jepang. Pernyataan-pernyataan itulah yang mengakibatkan terjadinya perpecahan antara kelompok Semarang, yang antara lain beranggotakan Sayuti Melik dan istrinya, S.K.

---

[2]Sumber tentang iklan ini adalah gubernur Jawa Tengah.M.v.O. dari J.C. de Vos, November 1933 – 1937, Mailr.1007/37; Wawancara dengan bekas aktivis/pemimpin bawah tanah, 4.7.78; Sarli. Wawancara 28.8.76; Penulis-penulis lain mengatakan bahwa bacaan ini beredar sampai tahun 1938. Lihat juga *Local Opposition*, hlm 5.

[3]*Local Opposition*, hlm. 7-8; Kertapati. Sekitar, hlm 5 menekankan pentingnya *Menara Merah* pada periode itu dalam memperkokoh front persatuan anti fasis di kota-kota Jawa Timur.

Trimurti. Sayuti Melik sendiri menjelaskan bahwa ia tidak menyetujui propaganda komunis bawah tanah yang menyerukan agar rakyat "membunuh orang-orang Jepang."[4] Buruh pabrik gula di Jawa Timur telah menyabotase laboratorium pabrik, bahan-bahan kimia, dan bahan-bahan makanan, sehingga barang-barang tersebut hampir tidak dapat dipakai waktu Jepang datang.

Pemerintah Belanda memberikan uang dalam bentuk cek kepada Mr. Amir Syarifuddin sebagai anggota gerakan bawah tanah yang kemudian diketahui oleh Jepang melalui jaringan mata-mata dan informasinya yang telah meluas dengan cepat.[5] Pada bulan April 1942, Jepang mulai menangkapi tokoh-tokoh Gerindo dan komunis bawah tanah di Solo, Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur, termasuk di antaranya Pamuji, pemimpin "PKI ilegal," yang meninggal di penjara Surabaya pada bulan Desember 1942 akibat siksaan yang dialaminya.[6] Beberapa tokoh lainnya telah dihukum gantung pada awal 1944 kecuali Amir Syarifuddin yang hukuman matinya diubah menjadi seumur hidup.[7]

Gerakan bawah tanah dalam situasi gawat ini dalam tulisan tahun 1948 digambarkan sebagai berikut:

> ...Hampir semoea sel partai araoe PKI di Djawa Timur telah dihantjoerkan, kader-kadernja ditangkap dan kekedjaman jakni siksaan berlanjoet dan mendjalar sampai ke Djawa Tengah dan Djawa Barat. Kaoem revoloesioner hampir kehilangan semoea kadernja. Sekalipoen demikian, dengan kerdja efisien, generasi kedoea dengan tjepat menggantikan kedoedoekan mereka jang telah tertangkap. Pergerakan kader dari satoe tempat ke tempat lainnja dimoelai... sedemikian tjepatnja sehingga gerakan bawah tanah, dapat membangoen kembali kekoeatannja lagi.[8]

---

[4]Sayuti Melik, dalam sebuah wawancara, di *Berita Buana*, 13 Januari 1977.

[5]Lihat kesaksian van der Plas dalam Enquete-commissie, *Regerings beleid 1940-1945. Verslag houndende de Uitkomsten van het onderzoek, deel 8, A dan B, Militair Beleid 1940-1945 terugkeer naar Nederlandsch Indie* (The Hague, 1956) hlm. 1353.

[6]*Penghela Rakjat*, 8 Februari 1946.

[7]Kertapati, *Sekitar*, hlm. 29 dan *Dokumentasi Pemuda*, hlm. 45 menyebut siapa yang ditangkap, disiksa dan dihukum mati.

[8]*Dokumentasi Pemuda*, hlm. 45.

Pembangunan kembali organisasi bawah tanah dibebankan kepada "angkatan kedua." Salah seorang tokohnya adalah Widarta yang mendapat kepercayaan memegang tampuk pimpinan partai dari Pamuji sesaat sebelum tertangkap. Widarta lahir di Jawa Timur sekitar tahun 1913. Sesudah Muso mengunjungi Surabaya, ia terpilih sebagai kader yang bekerja di gerakan buruh di luar Jawa yaitu di Sumatera. Tahun 1936 ia bekerja pada penyulingan minyak BPM Plaju dekat Palembang, mendirikan serikat buruh dan mengorganisasi pemogokan menuntut perbaikan kondisi kerja. Akibatnya ia harus menjalani tahanan rumah tetapi melarikan diri ke Pulau Sambu. Belanda mengetahuinya dan ia diperintahkan agar meninggalkan pulau itu dalam waktu 12 jam. Ia kembali ke Jawa dan menulis untuk *Pesat,* sebuah harian di Semarang yang dipimpin Sayuti Melik, sampai ia menjadi pimpinan partai kemudian menyusul penangkapan Pamuji dan tokoh-tokoh tertinggi PKI ilegal.[9] Widarta adalah seorang yang berpengalaman dalam tantangan liku-likunya perjuangan.

Dalam mengorganisasi kembali gerakan bawah tanah pada awal 1943, pemimpin baru melanjutkan strategi front persatuan melalui *Menara Merah.* Sabotase kecil-kecilan kadang-kadang dilakukan, seperti di Jawatan Kereta Api, lapangan terbang, penyulingan minyak, galangan kapal dan sebagainya, tetapi kegiatan utamanya adalah melindungi kader dalam penyebaran propaganda anti-Jepang. Kader yang beruntung lolos dari sergapan Kenpeitai semasa pendudukan, pada tahun 1970-an menuturkan kembali pengalamannya tentang bagaimana rumitnya kode-kode cara penyampaian informasi, penyamaran kader yang dikejar, sabotase, dan pencurian perlengkapan Jepang untuk membiayai kegiatan partai. Di beberapa daerah, dana partai didapat orang-orang tertentu yang memberi sumbangan dan diambil oleh kurir secara teratur.[10]

Menjelang pertengahan 1944, Kenpeitai melakukan razia di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan menghancurkan sel-sel bawah tanah. Tetapi basis bawah tanah Keresidenan Pekalongan tetap utuh, yakni daerah hutan jati di Sukowati di Pemalang Selatan di bawah

[9]Wawancara,7.6.78; Kader Jawa Barat, Wawancara, 5.7.78.
[10]Lihat Lucas, *Local Opposition,* hlm. 51-62.

bimbingan Holle, seorang mantri kehutanan asal Suku Ambon.[11] Holle dilahirkan tahun 1914 di Pulau Nusa Laut, Kepulauan Maluku, anak seorang pendeta yang menginginkan putranya itu mengikuti jejaknya. Ia gagal karena kurang kuat dalam pelajaran Bahasa Belanda, dan akhirnya melalui Sekolah Kehutanan di Bogor, ia memulai kariernya di hutan jati Sukowati ketika Jepang tiba. Baru dalam masa pendudukan itu ia memasuki gerakan bawah tanah, dan membantu menyembunyikan tokoh-tokoh pelarian pada keluarga bawahannya.

Selain karena daerah hutan Sukowati merupakan tempat Holle melakukan kegiatan, ada beberapa faktor lainnya yang memungkinkan Pemalang menjadi tempat penampungan sementara para buronan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Salah satunya ialah jumlah penguasa Jepang di kabupaten ini sedikit, yaitu hanya kepala polisi, kepala penjara, dan perwira-perwira pelatih yang diperbantukan kepada kompi Peta. Dengan penempatan pasukan Kenpeitai di ibukota keresidenan di sebelah timur dan kota industri Tegal itu di sebelah barat, ditambah satu garnisun di Pekalongan, maka Jepang tidak merasa khawatir akan keamanan Pemalang.

Faktor penting lainnya ialah adanya kelompok bawah tanah yang aktif di Pemalang, di bawah pimpinan seorang yang cakap dan berpengalaman yang bernama Amir, veteran PKI lama (lihat lampiran biografi). Setelah pemberontakkan 1926, ia sempat mendekam di penjara 6 tahun lamanya, lalu bekerja sebagai tukang emas selepas dari penjara. Ia juga merupakan aktivis penting dalam kelompok kecil kaum pergerakan yang radikal. Tahun 1941 ia kembali ditangkap oleh Belanda karena kegiatan-kegiatan "ilegal"-nya, dan Jepanglah yang kemudian membebaskannya.

Organisasi

Dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat senior kehutanan di Sukowati, Holle dapat menempatkan delapan pelarian dari Kenpeitai berikut keluarganya untuk tinggal bersama pejabat bawahannya. Mereka itu dijadikan mandor pengawas penebangan pohon jati yang dikerjakan oleh para romusha dan membantu pem-

[11] *Ibid*, hlm. 27-50.

bagian jatah makanan dan pakaian. Dituturkan oleh kurir dari Lasem:

> Orang-orang dikirim untuk menebang pohon... Setiap hari dapur di dekat rumah Holle menerima pemberitahuan berapa banyak romusha yang harus diberi makan, kalau ada 30 orang, kami membuat kupon untuk 60 orang. Jatah beras secara "resmi" adalah 200 gram per hari, tetapi kami melipatduakannya. Kenpeitai tidak pernah datang. Kalau bukannya Holle yang bertugas, tak seorang pun berani melipatduakan jatah. Ia menguasai segalanya.[12]

Orang-orang bawah tanah mempunyai suatu sistem yang dengan cermat dilaksanakan untuk membawa mereka yang datang dengan kereta api ke selatan ke Sukowati:

> Apabila keluarga-keluarga itu datang dari Jawa Timur, mereka turun dari kereta api di Comal Baru, di mana kepala stasiunnya, Tamjid, seorang anggota pergerakan sejak tahun 1926 dan kawan kami akan menemuinya. Ia akan menerima mereka menginap semalam, sebelum mengirimkannya ke selatan dengan sepeda ke pos kehutanan.[13]

Seorang kader lainnya, memelihara hubungan antara para pelarian di daerah kehutanan itu dengan tempat pertemuan kelompok Pemalang di Restoran Fuji. Ia mengendarai sepeda hampir setiap hari menghubungkan dua tempat yang berjarak sekitar 20 km.

Di kalangan pemimpin bawah tanah pada waktu itu memang terdapat hubungan kepartaian yang agak longgar, menurut kesan Holle. Sebuah kelompok inti, yang antara lain, terdiri dari Widarta, Bung kecil dan K. Mijaya, biasa datang ke Sukowati secara teratur untuk menghadiri sidang-sidang. Kegiatan-kegiatan bawah tanah di pantai utara dikoordinasi oleh K. Mijaya yang pada tahun 1942 melarikan diri dari Solo karena dalam razia kenpeitai kedapatan tulisan yang dianggap anti-Jepang, sehingga diuber-uber oleh penguasa Jepang. Setibanya di Keresidenan Pekalongan ia mulai memperbaharui kontak-kontak dengan anggota-anggota lama gerakan buruh. K. Mijaya adalah seseorang yang memainkan peranan penting dalam Gerakan Tiga Daerah, seperti terurai dalam bab sembilan (lihat juga lampiran biografis).

---

[12]Kurir Lasem, Wawancara, 27.7.76.
[13]Ibu Pri, Wawancara, 2.4.75.

Dana

Pengumpulan dana bagi kelompok Pemalang merupakan urusan yang berbahaya, terutama bila bersangkutan dengan penarikan langsung dari para simpatisan, dibutuhkan kurir-kurir pilihan. Namun kelompok ini beruntung karena mendapatkan dua sumber dana.

Sumber pertama secara tidak langsung dari Jepang sendiri. Jepang mengirim sejumlah besar uang dan bahan pakaian ke Sukowati untuk para romusha. Para romusha ini dibayar oleh Jawatan Kehutanan berdasarkan jumlah batang yang berhasil dipotong setiap harinya. Di samping "upah" ini, setiap tiga bulan sekali kenpeitai mengirimkan hadiah yang terdiri dari upah tambahan sebesar satu bulan gaji dan juga bahan pakaian. Kubota, seorang anggota kenpeitai Pekalongan, biasa datang sendiri membawa gulungan kain tambahan. Hadiah-hadiah inilah yang langsung diambil oleh gerakan bawah tanah lewat pejabat-pejabat kehutanan bawahan Holle, dan tidak dibagikan kepada romusha. Gerakan bawah tanah mengajukan alasan bahwa para romusha telah mendapatkan cukup jatah pangan dan pelayanan yang baik.

Terlepas dari apa yang menjadi motivasinya, menjelang akhir masa pendudukan, kelompok Pemalang menerima sejumlah besar dana dari pengusaha Swiss bernama Victor Stober dalam bentuk mata uang Belanda yang kemudian ditukarkan dengan mata uang Jepang. Menurut Holle, Stober telah menyimpan uangnya di dalam tanah bersamaan dengan kalahnya Belanda. Pada waktu itu, Stober merasa terancam oleh kemarahan penduduk desa yang menyerbu perkebunan teh dan karetnya, suatu jelmaan kebencian terhadap lambang kemakmuran orang-orang Eropa. Entah karena rasa terima kasih atas campur tangan dan perlindungan Holle, atau entah karena dipaksa, Stober juga memberikan kepada Holle senapan berlaras ganda yang kemudian digunakan untuk berburu babi hutan, dan sebuah radio yang sangat bermanfaat bagi kelompok Pemalang. Tidak ada bukti bahwa Stober juga membantu Jepang, kecuali masalah produksi perkebunannya yang seluas 200 hektar itu.

Kode dan Penyamaran

Ketelitian dan kewaspadaan yang tinggi haruslah dilakukan oleh kelompok Pemalang sebagaimana pula oleh kelompok-kelompok lain dalam pergerakan dan perlindungan terhadap para kurir dan kader. Mereka mengikuti pola penyamaran dan kode-kode rutin yang umum dan sama seperti lazim dilakukan oleh kelompok bawah tanah mana pun juga. Menyamar sebagai penjaja barang misalnya, bukanlah suatu hal yang lucu, karena bila kedapatan dan tertangkap kenpeitai, pilihan yang tergampang ialah kematian.

Sebagai contoh, setelah sebuah kelompok di Jawa Tengah terbongkar dan pemimpinnya disiksa kemudian dibunuh, seorang kurir yang berhasil selamat bersama istrinya dikirim ke Pemalang, dan setibanya di sana keduanya dikirim ke tempat yang berlainan dan tidak saling bertemu lagi selama sebulan. Kurir itu tidak boleh bertanya sesuatu apa pun yang dapat menimbulkan kecurigaan, yang mungkin mendatangkan akibat yang lebih buruk lagi.[14] Para kurir harus melarikan diri, lalu memperkenalkan dirinya setibanya di tempat pengungsian, dan secepatnya pula harus mendapatkan penyamaran bagi kegiatannya lebih lanjut. Seorang di antaranya menuturkan kenangannya betapa suasana di rumah saudara perempuannya di Comal yang menjadi "markas" gerakan bawah tanah sebelum dipindahkan ke pos kehutanan:

> ...rumah itu selalu penuh orang... Selama masa pendudukan Jepang mereka datang membawa contoh-contoh kancing baju, logam, pelat nomor yang banyak dicari untuk dijual kepada tamu-tamu lainnya yang mungkin sudah berada di situ. Apabila ada permainan kartu, mereka ikut serta sampai semuanya terlibat dalam permainan itu, kemudian menyelinap ke belakang. Sebaliknya apabila ada tamu datang ketika mereka (para pelarian itu) masih di situ, maka masing-masing dari mereka itu lalu mulai bekerja apa saja, ada yang mengambil ember lalu menimba air dari sumur, ada yang memegang sapu dan membersihkan lantai... sangat berbahaya menyembunyikan orang, banyak orang yang ketangkap mati demikian seterusnya...[15]

---

[14]Kurir Lasem, Wawancara, 20.7.76.

[15]Ibu Pri, Wawancara, 2.9.75. Ibu Pri menyebutkan S. Mustapha dari Pe-

Kegiatan

Kelompok Pemalang sepanjang masa pendudukan dapat mengikuti perkembangan peperangan lewat radio ilegal milik pengusaha perkebunan Swiss yang tadi itu. Semua pesawat penerima radio telah disegel oleh Jepang setelah terlebih dulu diubah sehingga hanya bisa menerima gelombang dalam negeri. Segel-segel itu diperiksa secara berkala. Namun demikian, Holle berhasil menemukan cara untuk menggeser segel ini untuk sementara waktu, dengan membuka penutup belakang dan menyesuaikan kembali penerima radio, sehingga pesawat dapat menangkap siaran dari luar Jawa,[16] dan orang-orang Jepang tidak pernah mengetahui bahwa segalanya telah dirusak. Melalui para kurir *Menara Merah,* berita-berita perkembangan peperangan dan kekalahan Jepang diteruskan kepada kelompok-kelompok dan para simpatisan di daerah-daerah lain di pulau Jawa:

> Selama [tinggal] di pos kehutanan, saya jadi kurir... kadang-kadang saya disuruh ke Semarang, Solo, dan Lasem. Di Solo saya ke tempat Pardi, dua malam kita bicarakan persiapan kemerdekaan, sehingga rakyat akan mengerti bila saat itu tiba. Bila tidak ada persiapan, kemerdekaan tidak akan disambut dengan baik oleh rakyat. Mengenai caranya, kita percayakan kepada para pemimpin setempat, kita cuma memberikan garis-garis besar saja. Setelah Hiroshima jatuh, saya pergi ke Semarang untuk membicarakan bagaimana kami dapat menduduki jabatan-jabatan penting seperti RK, RT dan lurah, dan kepemimpinan atas pemuda. Kami harus ada di barisan depan, kami harus dapat merebut pengaruh.[17]

Berbeda dengan kelompok-kelompok lain di Jawa pada awal masa pendudukan, kelompok Pemalang tidak secara aktif terlibat da-

---

malang, (sekretaris Pekope sebelum ditangkap oleh Jepang) dan Bungkuk (pemimpin bawah tanah dari Jawa Tengah bagian selatan) sebagai pengunjung di rumah Comal itu.

[16]Holle, Wawancara, 24.6.76. Penggunaan radio dan teknik menggeser segel tidaklah khusus Pemalang. Pada waktu itu tiga radio ilegal terdapat di Tegal dan Pekalongan.

[17]Kurir Lasem, Wawancara, 27.7.76. RK (Rukun Kampung) dan RT (Rukun Tetangga) yang disebut Tonarigumi dibentuk oleh Jepang untuk memudahkan distribusi bahan kebutuhan pokok sehari-hari, pengerahan paksa romusha dan sebagainya.

lam pekerjaan menyabot instalasi-instalasi. Namun tugas mereka mencakup bagaimana membangun dukungan moral lewat hubungan tetap oleh kurir, dan menyebarkan propaganda anti-Jepang dan berita-berita peperangan melalui *Menara Merah* dan dari mulut ke mulut. Isi *Menara Merah* mencakup ringkasan berita setempat dan informasi mengenai penindasan Jepang di daerah-daerah lain Pulau Jawa yang disampaikan oleh para kurir ke Sukowati. *Menara Merah* juga memuat artikel-artikel mengenai ciri atau sifat imperialisme.

Kelompok Oposisi Lokal Lain

Gerakan komunis di bawah tanah bukanlah satu-satunya kelompok yang mengorganisir perlawanan terhadap Jepang dan berusaha keras untuk selalu di barisan depan dan merebut pengaruh. Di antara kelompok-kelompok oposisi lokal terdapat juga kelompok yang menamakan dirinya Negen Broeders (sembilan bersaudara).

Sekitar pertengahan Maret 1945, kelompok sembilan orang yang semuanya berumur sekitar tiga puluh tahun, mengadakan pertemuan rahasia di sebuah rumah di jalan Kejambon 16, Tegal. Seorang dari mereka menyampaikan ikhtisar umum dari diskusi yang baru-baru saja dilakukan dengan Subagio Mangunraharjo, pemimpin PNI-Baru yang tinggal di Tegal sejak 1938 sebagai pengasingan sukarela dari Bandung. Di Bandung ia telah mendirikan Universitas Rakyat yang kemudian ditutup oleh Belanda. Ia seorang cendekiawan, yang nafkah hidupnya berasal dari perusahaan perikanan darat yang dipimpinnya, namun yang menggunakan waktu senggangnya untuk berdiskusi tentang filsafat politik dengan rekan-rekan seperjuangan.[18]

Analisis Subagio mengenai situasi politik ialah bahwa Jepang tidak lama lagi akan menyerah kepada Sekutu. Persiapan harus dilakukan untuk itu. Sebagian besar dari kelompok, yang pada malam itu memutuskan untuk menamakan diri sebagai Negen Broeders, sebenarnya sudah saling berhubungan erat sejak awal tahun tiga puluhan. Sebagai anak keluarga pegawai rendahan Pemerintah Hindia Belanda, semuanya telah tamat HIS bahkan beberapa di antaranya mengecap pendidikan MULO (sekolah lanjutan Belanda) beberapa ta-

[18]Wawancara, 16.10.75.

hun. Mereka berperan serta dalam usaha mendirikan Indonesia Muda cabang Tegal. Mereka pun kenal baik dengan pendirinya, Supeno, karena mereka bersekolah bersama-sama di Tegal atau Pekalongan.[19]

Setelah Indonesia Muda diobrak-abrik sampai tidak bisa berkutik oleh PID, satu kelompok yang menamakan diri Islam Studie Club terbentuk. Penggunaan nama ini dimaksudkan untuk menghindari pengawasan polisi daripada tanggung jawabnya terhadap Islam. Setelah menyelesaikan kursus pertolongan pertama di Pekalongan, beberapa orang di antaranya masuk ke Seksi Palang Merah tentara Belanda dan dikirim ke Cilacap untuk membantu pengungsian tahap terakhir dengan pesawat terbang ke Australia. Mereka diinternir (ditawan) selama beberapa bulan, dan setelah dibebaskan mereka kembali ke Tegal.

Kelompok ini tetap mengadakan kontak-kontak secara tak teratur, kadang-kadang bertemu secara tidak resmi dalam kursus-kursus yang diselenggarakan Regu Penolong Medis (*Iryo Kyujo Dan*) yang dibentuk Jepang setara dengan Palang Merah. Mereka memutuskan bahwa jalan terbaik menentang kekuasaan Jepang ialah dengan melakukan "infiltrasi" ke dalam berbagai organisasi seperti Seinendan, Barisan Pelopor, BP2, dan BP3, serta mempengaruhi anggota-anggotanya. Dua orang dari anggota kelompok ini bahkan menempuh pekerjaan berbahaya dengan menjadi agen ganda untuk kenpeitai di galangan kapal Jepang di Tegal (*zosenjo*). Seorang di antaranya menuturkan pengalamannya:

> Saya memasuki kenpeitai sebagai agen ganda. Beberapa orang di antara kami terlibat. Kami bisa banyak melakukan perjalanan, mendengarkan dan berbicara secara tidak resmi di kereta api, pasar dan di gedung bioskop. Kami biasanya memberi tahu orang-orang bahwa pihak Jepang merusak moral gadis-gadis, mengangkut semua padi dan romusha... kami tidak meledakkan jembatan, tetapi mempengaruhi pikiran orang...[20]

Perlu ditegaskan bahwa orang yang tidak terlibat dalam peran "agen ganda" di sini tidak menyatakan diri sebagai anggota organisasi

[19]Supeno menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tahun 1945, dan Menteri Pemuda dan Pembangunan pada Kabinet Hatta yang pertama.

[20]Wawancara, 2.8.76.

perlawanan dengan tujuan perjuangan yang jelas seperti halnya komunis bawah tanah. Terdapat perbedaan jelas antara mereka yang memiliki motivasi tinggi dengan yang motivasinya tidak begitu jelas seperti kasus di atas.

Terdorong oleh perkiraan Subagio Mangunraharjo bahwa Jepang pasti kalah, kelompok ini menyusun rencana kegiatan pada pertemuan rahasia di jalan Kejambon tadi. Empat di antaranya akan melakukan kontak-kontak dengan batalyon Peta dan Heiho di Tegal.[21] Menurut salah seorang, Peta dan Heiho tidak banyak mengetahui masalah-masalah militer dan "kita mengatakan kepada mereka agar tidak menginjak rakyat dan berlaku sabar."[22]

Dua anggota kelompok lain memilih tugas untuk mencari tahu pangreh praja mana yang tidak disukai Jepang sesuai dengan kebijaksanaan ekonomi Jepang. Seorang lagi akan menghubungi para pejuang lama yang terkenal dari tahun 1920-an dan para tokoh pemuda Tegal. Kelompok ini juga menyampaikan analisis sendiri mengenai situasi peperangan dan mempersiapkan dasar untuk bertindak setelah kini ternyata bahwa Jepang pasti akan kalah. Rapat rahasia itu berakhir dengan janji para anggota Negen Broeders bahwa mereka akan tetap merupakan teman-teman setia, apa pun yang bakal terjadi.[23]

Hampir pada waktu yang bersamaan, maka suatu kelompok lain yang komposisinya agak luas mengadakan pertemuan rahasia di kalangan barisan Pelopor di Tegal. Kelompok ini mencakup tiga veteran eks-Digul (yang dipulangkan ke Jawa pertengahan tahun1930-an), dua di antaranya seorang aktivis pemuda. Yang dianggap sebagai pemimpin ialah Muhammad Nuh yang berhaluan Marxis. Menilik memoar yang kemudian ditulis oleh anggota dari kalangan pemuda,[24] kelompok itu tidak bulat dalam analisisnya mengenai situasi peperangan, sikap terhadap kepemimpinan nasional, dan bahkan strategi

[21]Negen Broeders, Wawancara, 11.10.72.

[22]Slamet Soenarjio, "Catatan Singkat Slamet Soenarjio dalam Perjuangan Kemerdekaan Pemuda Tegal dalam enam bulan sebelum dan sesudah Hari Proklamasi R.I.", Naskah ketikan (tanpa tanggal).

[23]Wakil Ketua KNI Kota Tegal, Jawaban tertulis 1972.

[24]Mengenai sumber ini lebih jauh lihat tulisan penulis, "My Story' and other sources: An Oral Approach to the Indonesian Revolution," *Masyarakat Indonesia*, Tahun ke-1, No. 2, Desember 1974.

yan ; harus diambil terhadap Jepang. Orang-orang Marxis dalam kelompok mengecam kepemimpinan tingkat nasional. Banyak di antara mereka yang beranggapan kepemimpinan nasional "feodal" dan "alat fasisme militer Jepang." Adalah sangat penting untuk menetapkan prioritas-prioritas apa di daerah setempat dalam perjuangan mendatang. Oleh karena situasi ekonomi telah mencapai titik rawan, rakyat dengan mudah dapat dimobilisasi melawan Jepang. Sedangkan pandangan lain tidak mempedulikan kecaman kepemimpinan nasional sebagai kolaborator, tetapi memprioritaskan perjuangan-perjuangan untuk merebut kekuasaan dari asing dan tidak pada revolusi sosial. Kelompok ini menolak perbandingan yang dilakukan Muhammad Nuh dan orang-orang Marxis lainnya antara revolusi mereka dengan revolusi-revolusi Rusia dan Perancis sebagai negara-negara merdeka dan tak dijajah. Mereka tidak harus menumbangkan kekuasaan asing sebelum revolusi-revolusi mereka dapat dimulai.

Sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan, tercapai juga kesepakatan bahwa pembentukan kader dapat dimulai segera, sehingga rakyat siap melawan kekuasaan Jepang dan "memukul musuh dari belakang" secepatnya di saat kesempatan terbuka. Diputuskan pula untuk memulai kampanye propaganda di kalangan buruh galangan kapal Jepang yang kebanyakan telah menjadi anggota Suisintai atau Barisan Pelopor.

Kelompok bawah tanah lain yang bergerak di Kabupaten Brebes mendapat pengaruh lebih langsung daripada dari Negen Broedoers. Sunarto, yang menjadi pemimpinnya sebelum perang pecah, mengajar di sekolah yang didirikan oleh Sugra di dekat Cirebon, dan membantu membangun KRI (Koperasi Rakyat Indonesia) bersama dengan Sugra. Sugra adalah Ketua PNI-baru cabang Cirebon.[25] Setelah kembali ke Brebes ia mendirikan cabang-cabang KRI di seluruh kabupaten. Di bawah kepemimpinan Sunarto, koperasi yang sangat dibatasi kegiatannya oleh Jepang, berubah fungsinya menjadi suatu jaringan rapat yang longgar dari kelompok-kelompok tak resmi yang

[25]Mengenai biografinya, lihat B.R.O.'G Anderson, *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946* (Ithaca, Cornell University Press), hlm. 445. Selanjutnya *Java*.

bertemu secara tak teratur untuk memperbincangkan apa yang diketahuinya mengenai perkembangan peperangan, dan prakarsa-prakarsa setempat, apa yang bisa dilakukan manakala kekalahan Jepang yang tak terhindarkan itu menjadi kenyataan.[26] Anggota-anggota KRI Brebes terdiri antara lain dari tiga orang guru desa, penjual ketupat, seorang tukang kayu, dan seorang Cina. Sekalipun sebagian besar anggota koperasi terdiri dari pekerja pertanian, terdapat juga beberapa orang lenggaong. Seorang penasihat KRI dapat bepergian bebas di seluruh kabupaten yang luas itu (sampai ke Salam yang jauh di selatan) untuk mengadakan kontak-kontak dan pertemuan-pertemuan. Ada sekitar delapan cabang koperasi. Kalau para pejabat setempat ingin mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan, jawabannya adalah "urusan koperasi." Tak terelakkan lagi bahwa Jepang, yang mengawasi dengan teliti semua organisasi yang ada, mulai mencurigai kegiatan itu punya tujuan-tujuan lain. Seorang petani bernama Karta ditahan setelah dilaporkan polisi desa bahwa ia membuat semacam azimat pelindung yang akan digunakan untuk melawan Jepang. Bersama dengan dua orang petani lain, Karta dipukuli setengah mati dan dijebloskan ke Penjara Brebes. Penasihat KRI, menuturkan kembali kejadian itu:

> Tiga orang anggota KRI ditahan, dan dipukuli di Penjara Brebes. Mereka, orang-orang Jepang itu mendapati bahwa saya anti-Jepang... ketika saya sedang diinterogasi, mereka dipanggil masuk. Mereka semua sudah seperti mayat. Tak seorang pun yang mengaku telah mengenal saya. Orang-orang Jepang berkata, "Kalau begitu pulang Saudara!" Kalau saya mengingat keberanian mereka, saya tanya jasa saya apa? Mereka yang berjasa... orang tani, orang buruh, tetapi mereka konsekuen dalam tindakannya.[27]

Dalam masa perang, kelompok-kelompok oposisi selalu diancam dan ditakuti. Sudah tentu orang-orang Jepang berusaha keras untuk membongkarnya, terutama gerakan komunis bawah tanah. Rupanya gerakan komunis lebih berhasil dengan propaganda anti-fasis-

[26]Mengenai KRI, lihat juga Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca, Cornell University Press, 1952), hlm. 112. Selanjutnya Nationalism.

[27]Sunarto, Wawancara, 29.7.76.

menya daripada usaha-usaha melakukan sabotase. Jepang sangat khawatir bahwa apabila Sekutu berhasil menyerbu Jawa dari selatan, seperti yang diperkirakan, peranan gerakan bawah tanah akan menjadi sangat penting.

Kondisi buruk yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi perang Jepang sangat mengurangi kemampuan pangreh praja untuk memimpin rakyat. Pada akhir masa pendudukan, dengan beberapa perkecualian, kebanyakan pangreh praja tidak mendapat kepercayaan rakyat lagi. Sebaliknya, segelintir komunis bawah tanah, Negen Broedoers, kelompok barisan pelopor, dan Koperasi Rakyat Indonesia di Brebes muncul di permukaan sebagai pemimpin rakyat yang bebas dari noda-noda korupsi pada waktu kejatuhan Jepang. Kecuali kelompok bawah tanah komunis, kelompok-kelompok perlawanan yang lain tidak pernah melakukan kegiatan melawan fasisme Jepang seperti halnya komunis. Komentar Anderson mengenai situasi di Jakarta dapat juga diterapkan pada kelompok-kelompok lokal ini: pentingnya kelompok-kelompok ini"... ialah bahwa mereka itu merupakan kuncup-kuncup dari golongan dan kelompok politik yang hanya mekar pada musim semi yaitu masa kemerdekaan, dan bukan pada perlawanan mereka yang gigih terhadap pemerintah militer (Jepang)."[28] Negen Broeders (berpendidikan Barat dan berhubungan dengan kepriayiannya) mengingatkan orang kepada kelompok oposisi pro-Sjahrir di Jakarta. Namun demikian, kepemimpinan barisan Pelopor menonjol karena satu masalah penting, yakni tiga pemimpin tua kaum nasionalis kiri semuanya eks-Digulis, veteran (dan korban) dari pemberontakan tahun 1926. Dalam pandangan rakyat, mereka juga—sebagaimana kelompok Negen Broeders dan komunis bawah tanah—tidak tersangkut dalam perampasan beras yang dilakukan oleh Jepang dan korupsi bahan sandang oleh pangreh praja. Selain itu, mereka juga siap bertindak pada bulan Agustus 1945. Marilah kita lihat dalam bab-bab berikut ini, bagaimana kelompok-kelompok ini membentuk kekuasaan baru setelah proklamasi di Tiga Daerah.[]

[28]B.R.O.'G.Anderson, "The Pemuda Revolution, Indonesian Politics, 1945-1946" (Tesis Ph.D. Cornell University, 1967), hlm 37.

BAB EMPAT

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN BERAKHIRNYA KEKUASAAN JEPANG

TANGGAL 14 Agustus 1945 kira-kira lewat pukul 9.00 malam, seorang anggota kelompok rahasia di dalam Barisan Pelopor yang sejak bulan sebelummya ikut serta dalam rapat-rapat gelap, bergegas menyelinap memasuki pintu belakang sebuah rumah di jalan Gilitugel, Tegal. Pandangannya yang menembus kaca jendela menangkap seorang kawannya sedang memutar tombol radio ilegal gelombang pendek (*short wave*), yang selama ini menjadi sumber berita jalannya peperangan bagi Barisan Pelopor. Guna memberi pelajaran kepada kawannya yang ceroboh ini, ia surut ke belakang rumah, meniru ucapan gaya logat bahasa Jepang dengan keras: "Moshi, moshi (artinya halo). Apa yang punya rumah ada?" Mendengar ini, orang itu dengan gugup melompat ke pintu belakang, yang ditemui bukan kenpeitai tetapi kawannya sendiri yang bernama Marsum Hr. Keduanya lalu duduk, `melanjutkan mendengarkan berita-berita terbaru dari medan peperangan.

> ...dan "nger" terdengar suara orang bicara, lalu aku bertanya: "Sender (pemancar) mana itu, Bung?" "Sender Saigon entah Hanoi," sahut kawanku. "Bahasa Inggrisnya logat Cina, ganti saja ke Australia." Knop radio diputar-putar lagi kiri-kanan, kiri-kanan, dan "nger" seseorang sedang bicara dalam bahasa Inggris pelan-pelan, sender itu lebih jelas suaranya. Tanyaku kemudian: "...Sender mana lagi ini Bung?" "Sender Australia, kira-kira Melbourne," sahutnya. Aku menggerutu "sayang mengapa aku tidak berbahasa Inggris, salahku sendiri..." Sekonyong-konyong muka kawanku terangkat, dadanya *wungal*

> (membusung), duduknya mengeser-geser maju mendekat radio—mendengarkan secara sungguh-sungguh, kulit muka dahinya berkerut-kerut, suatu tanda sedang sungguh-sungguh memperhatikan suara orang yang sedang berbahasa Inggris. Mendadak aku terkejut, mendengar kawan tadi berkata: "Ha... he... ha... Jepang sudah menyerah!"[1]

Walaupun siaran pernyataan menyerahnya Jepang oleh Kaisar tidak diterima sampai petang hari berikutnya (15 Agustus), sebelumnya pemuda di Jakarta telah berhasil menangkap siaran pemancar San Fransisco mengenai penyerahan Jepang tanpa syarat.[2] Di seluruh Keresidenan Pekalongan kelompok-kelompok lain mendengar siaran serupa pada malam itu.

Bagi kelompok-kelompok nasionalis di Keresidenan Pekalongan dan gerakan bawah tanah yang basisnya di Pemalang, berita ini menimbulkan luapan kegembiraan, walau mereka sebenarnya sudah tahu bahwa menyerahnya Jepang hanyalah soal waktu belaka. Dalam rangka persiapan gerakan perjuangan di seluruh keresidenan dengan cepat situasi baru ditanggapi. Persiapan Proklamasi Kemerdekaan bukanlah semata-mata karena mengikuti siaran radio gelap, tetapi juga karena ibukota dapat dicapai dalam waktu 8 jam, sedang kota-kota kabupaten ada di sepanjang jalan kereta api Jakarta- Semarang. Gerbong-gerbong kereta api dari Jakarta banyak bertuliskan semboyan-semboyan seperti "Merdeka atau Mati." Belum lagi berita kawat melalui jaringan komunikasi khusus kereta api. Wajar bila aktivitas kereta api paling dulu mengetahui berita-berita dari Jakarta.

Secara relatif sangat mudah bagi barisan Pelopor, atau bagi Negen Broeders ataupun bagi kelompok bawah tanah komunis untuk berhubungan dengan Jakarta melalui kurir atau telepon langsung guna memastikan berita-berita yang mereka dengar melalui radio-radio gelap. Tanggapan pertama mereka terhadap berita menyerahnya Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan ialah ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan di Jakarta.

Negen Broeders mengirim dua orang anggotanya ke Jakarta pada tanggal 19 Agustus. Di sana mereka mendengarkan ceramah

---

[1] Marsum Hr, Ceritaku, hlm. 46.
[2] Anderson, *Java*, hlm. 66.

Supeno semalam suntuk tentang makna proklamasi ketika menginap di rumahnya di Jalan Lawu.[3] Barisan Pelopor mengirim pula kurirnya ke Jakarta, namun tidak berhasil menemui seorang pun dari asrama Menteng 31 karena mereka berada di Rengasdengklok.[4] Tetapi, pada tanggal 20 Agustus kurir yang lain kembali ke Tegal membawa ratusan teks Proklamasi dan semboyan-semboyan yang tercetak di atas kertas merang rapuh berwarna kekuning-kuningan, satu-satunya jenis kertas yang tersedia waktu itu. Tokoh-tokoh nasionalis senior perjuangan, menjadi kokoh dengan kepastian kebenaran dari Jakarta atas desas-desus penyerahan Jepang. Mereka cepat mengambil prakarsa menyuruh pemuda menaikkan bendera Merah-Putih, lalu menjalankan kampanye propaganda kemerdekaan dan membentuk Komite Nasional daerah (KNI) sesuai dengan instruksi Jakarta.

Sebaliknya, pangreh praja tidak mempunyai sumber informasi kecuali dari Jepang. Sikapnya menantikan "pengumuman resmi atasan" itu membuat kebingungan dan keragu-raguannya menghadapi Proklamasi. Sedangkan pihak Jepang di Keresidenan itu yang tetap bungkam tentang penyerahan itu sampai kira-kira seminggu setelah Proklamasi, menolak untuk menjawab di depan umum, dan sering kali secara pribadi menyangkalnya.[5]

Perjanjian antara Sekutu di Postdam dekat Berlin yang dicapai pada tanggal 16 Juli 1945 antara lain menyebutkan akan mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Ini mendorong pemerintah militer Jepang berjanji akan cepat memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dengan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis Sukarno-Hatta.

Postdam juga berarti jatuhnya bom-bom atom dan kekalahan Jepang yang cepat sebelum adanya pemindahan kekuasaan secara resmi. Yang lebih penting lagi, Perjanjian Postdam berarti bukannya

---

[3]Negen Broeders, Wawancara 2.8.76. Diskusi dan perundingan mengenai kepemimpinan Republik muda ini di kalangan berbagai faksi dapat dijumpai dalam Anderson, *Java*, hlm. 70; Anthony Reid, *Indonesian National Revolution*, (Melbourn, Longmans, 1974) hlm. 142, 144.

[4]Menteng 31, sebuah kelompok nasional yang terkemuka di Jakarta.

[5]Informan-informan pangreh praja telah berakhir. Walaupun surat-surat kabar seperti *Asia Raja* memberitakan perang telah berakhir, namun pangreh praja masih saja menunggu pengumunan resmi, yang tentu saja tidak akan mereka dapat.

Amerika Serikat yang datang untuk membebaskan Indonesia dari Jepang, tetapi datangnya Inggris di bawah pimpinan Mountbatten untuk membersihkan Jepang di Asia Tenggara. Ada usaha dari delegasi Perancis dan Belanda di Postdam agar mereka dapat masuk dan menjajah kembali negara-negara di Asia Tenggara tanpa campur tangan negara lain. Keputusan-keputusan yang diambil di Postdam berpengaruh banyak pada keterlambatan kemerdekaan.[6] Lebih-lebih lagi dengan pernyataan dari Komandan Jepang tanggal 18 Agustus kepada Sukarno-Hatta, yaitu bahwa Jepang menyetujui keputusan Postdam, sehingga kerena itu bantuan untuk kemerdekaan Indonesia tidak mungkin ada lagi. Dikatakan lebih lanjut bahwa keamanan dan ketertiban akan berada di bawah komando tentara Jepang sampai tiba waktunya pemindahan kekuasaan kepada Sekutu sudah resmi.[7]

Dengan tidak adanya dukungan rakyat dan ketergantungan mereka pada atasan yang semakin pudar, maka kekuasaan para pangreh praja sekarang lebih tergantung lagi kepada atasannya. Apakah yang akan terjadi bila atasan itu runtuh atau diganti? Pada umumnya para pangreh praja berharap, sesuai dengan perjanjian Postdam yang digarisbawahi oleh Komandan Militer Jepang, Sekutu akan datang dan mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda. Beberapa di antara mereka yang berpikiran maju pun seperti Sarimin, Bupati Brebes, selain terpengaruh oleh perjanjian Postdam juga mengingat betul janji Ratu Wilhelmina tahun 1942 yang mengatakan bahwa Indonesia akan diberi kekuasaan otonom di dalam negara sekemakmuran Belanda. Sutarjo, seorang pemimpin terkenal dari kalangan pangreh praja, pada bulan Juni-Juli keliling Jawa berpidato yang ditujukan kepada para pangreh praja agar mereka bersiap-siap untuk merdeka.[8] Dalam tulisannya tahun 1965, Bupati Brebes Sarimin mengatakan sebagai akibat dari janji Ratu Wilhelmina dan pidato-pidato Sutarjo,

---

[6]Mengenai persetujuan Postdam dan kemerdekaan Indonesia, lihat Anderson, *Java*, hlm 61-85. Teks dan prosedur perjanjian itu dapat dijumpai di Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat (State Department), *Diplomatic Papers*, Konferensi Berlin 1945, jilid I dan II. Percetakan USA Washington, 1960).

[7]Anderson, *Java*, hlm. 85.

[8]Dalam suatu pertemuan di pendopo Kabupaten Tegal, Sutarjo mengatakan bahwa Jepang "akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia tahap demi tahap."

"kami mengira bahwa kemerdekaan itu hal yang masuk akal, tetapi Proklamasi adalah hal yang tak pernah muncul dalam benak kami. Kita tidak tahu bahwa suatu negara dapat dengan mudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya."[9]

Kebingungan pangreh praja, menurut Sarimin, karena tidak adanya pengumuman resmi tentang penyerahan Jepang, baik melalui radio pemerintah maupun Shuchokan (Residen) Pekalongan. Keraguan itu diperkuat lagi oleh sikap para pejabat Jepang setempat, seperti yang dijumpai Sarimin:

> Djepang di daerah membungkam seribu bahasa. Bahkan mereka mempertahankan kekuasaannya, tidak djarang dengan kekuatan sendjata. Pada saat tersiarnja kabar itu saja turne di pedalaman dan bertemu seorang kenpeitai Djepang jang pasti mengetahuinja. Tetapi ia menjangkal keras kebenaran. Mereka terdjepit, mengikuti gelombang pergolakan di bawah tekanan dan antjaman kekuasaan jang masih njata.[10]

Hal penting yang menjelaskan sikap "tunggu dan lihat"—nya pangreh praja adalah harapan bahwa Sekutu akan segera tiba, tetapi bukan enam minggu kemudian. Penundaan yang tidak diduga inilah yang menciptakan keadaan di mana perebutan kekuasaan oleh kelompok-kelompok tertentu muncul di mana-mana.

1. Tanggapan Kalangan Perjuangan

Ciri-ciri dari perjuangan kemerdekaan di waktu-waktu sesudah Proklamasi yaitu berkembangnya apa yang disebut badan perjuangan. Pada umumnya badan-badan ini sulit untuk disebut "organisasi," karena struktur organisasi kaum muda sangat longgar, dan bisanya mereka hanya mengelompok pada seorang tokoh tua yang kharismatik. Akan kita bahas sepintas organisasi dan kepemimpinan kelompok-kelompok ini sebelum mengungkap kegiatan-kegiatannya.

Kepemimpinan badan-badan perjuangan, aktivis-aktivis revolusioner atau pejuang, terdiri dari 3 kelompok. Pertama, "angkatan tahun '26," bekas anggota-anggota Sarekat Islam, VSTP (Sarekat Bu-

[9]Sarimin, Wawancara, 23.1.73
[10]Sarimin, Kenang-kenangan, hlm. 101.

ruh Kereta Api), PKI atau Sarekat Rakyat. Termasuk mereka yang sesudah pemberontakan 1926 dipenjarakan di Jawa atau dibuang ke Digul dan tokoh Islam komunis seperti Haji Muklas dan Kiai Misbach dari Slawi.[11]

Ketatnya pengawasan PID dan janjinya kepada Penguasa Belanda sebagai syarat pembebasannya menyebabkan mereka tidak lagi aktif di bidang politik. Kelompok ini mencakup pula Sukarnois yang senior, seperti Kartohargo dan Kromo Lawi, yang sering diganggu dan kadang-kadang ditahan karena kegiatan politiknya pada akhir tahun 1920 dan awal 1930-an.

Kelompok kedua yang disebut "Angkatan tahun '30," termasuk para pemuda sebelum perang, dari Indonesia Muda, Kepanduan Bangsa Indonesia atau Perpri (Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia), yaitu Ormas pemudanya Partindo yang berbasis di Solo, dan SPI (Sulih Pemuda Indonesia), Ormas pemudanya PNI-Baru. Dalam kelompok ini termasuk Sugeng Hargono (Brebes), anggota-anggota Negen Broeders di Tegal dan Sarli, seorang tokoh barisan Pelopor di Kota Pekalongan. Angkatan ini mencakup pula bekas anggota-anggota partai politik pada periode 1930-an seperti PNI-Baru, Gerindo, Partindo, dan PSII.

Kelompok ketiga, generasi muda "angkatan 45," yang memperoleh pengalaman politik dari organisasi-organisasi pemuda bikinan Jepang yang pandangannya dibentuk oleh pengalaman-pengalaman mereka semasa pendudukan. Termasuk kelompok ini, tokoh-tokoh API (Angkatan Pemuda Indonesia) Pemalang, Urip dan Karso, serta para pemimpin Pesindo Ketanggungan Barat. Pendidikan Belanda kelompok ini kurang dibanding dengan kelompok-kelompok pejuang senior di Keresidenan Pekalongan, kebanyakan mereka adalah anak-anak pegawai negeri rendahan atau buruh pabrik gula. Mereka biasanya tidak menjadi pemimpin di badan perjuangan, tetapi aktif dalam organisasi itu. Masa umumnya disebut pemuda rakyat, pemuda non-

[11]Mereka termasuk K. Mijaya, Muhammad Nuh, Suwigno, Sulaiman, Sukirman, dan Wakhtum dari Tegak, Kartohargo, dan Slamet dari Brebes, dan Amir dari Pemalang. Haji Muklas ditangkap pada bulan Mei 1926 karena pemberontakan Karangcegak dan dibuang ke Digul. Ia belum kembali ke Jatinegara sampai Peristiwa Tiga Daerah berakhir.

elite yang miskin dari kampung-kampung pinggiran kota yang sebagian tersebar menjadi anggota Barisan Pelopor Tegal dan API Pemalang. Sebaliknya, para aktivis Barisan Pelopor Pekalongan disebut oleh pimpinannya sebagai pemuda sekolah yang sedikit berpendidikan Barat.

Pola kepemimpinan kelompok-kelompok luar kota-kota kabupaten adalah sama, yaitu para aktivis tua yang lebih berperan, sedangkan kekuatan santri di dalam kelompok-kelompok berbeda. Di Randudongkal misalnya, karena adanya beberapa pesantren di bawah kepemimpinan Haji Zaini (tokoh Islam nasionalis setempat), hampir semua anggota AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia) adalah santri. Sedangkan di Slawi dan Tanjung karena tidak terdapat pesantren, para santri bukanlah hasil pendidikan madrasah melainkan pendidikan sekolah-sekolah menengah negeri.

Organisasi kelompok-kelompok ini sangat banyak ragamnya, dari barisan kelompok Tegal yang tersusun baik sampai ke kelompok-kelompok yang umumnya longgar ikatannya seperti pemuda Tanjung yang bahkan tidak punya nama. Kelompok-kelompok dengan nama sama sering kali tidak mempunyai pertautan keorganisasian, baik dengan yang di tingkat kabupaten maupun dengan dengan yang di tingkat propinsi dan nasional. Misalnya, kelompok API Tegal dan API Pemalang tidak mempunyai hubungan satu sama lain, meski keduanya menyatakan bagian dari kelompok Jakarta. Begitu juga kelompok-kelompok AMRI di Keresidenan Pekalongan tidak mempunyai hubungan satu sama lain maupun dengan yang tingkat propinsi dan nasional. Kelompok-kelompok lokal ini, selain mengubah namanya, mencerminkan perkembangan tingkat nasional, dengan berdirinya Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) pada awal November dan kemudian Parsi (Partai Sosialis Indonesia). "Keanggotaan" badan-badan perjuangan tidak ketat dan bisa merangkap, seperti halnya banyak tokoh-tokoh KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) di Tegal adalah anggota Barisan Pelopor maupun anggota kelompok lain. Tetapi Barisan Pelopor mempunyai buku keanggotaan, seperti di kelompok AMRI, meskipun hal ini tidak lazim. Nama-nama sering diambil dari kelompok-kelompok "terkenal" di Jakarta, Semarang, dan Surabaya tanpa adanya suatu ikatan organisasi. Banyaknya badan perjuangan dan perbedaan-perbedaan dampak pendudukan Jepang, me-

nimbulkan perbedaan-perbedaan dalam gerakan perjuangan setelah Proklamasi baik di Tegal, Brebes, maupun di Pemalang.

Tanggapan pangreh praja terhadap Proklamasi sangat menentukan nasib mereka sendiri, juga mempengaruhi strategi pemimpin perjuangan. Penalaran dari tindakan para pangreh praja itu sendiri memerlukan pengamatan yang lebih dekat.

Reaksi Elite Birokrat

Tanggapan mula-mula kaum elite tradisional terhadap pengibaran pertama Sang Merah-Putih di keresidenan itu adalah serupa. "Turunkan itu!" katanya kepada kaum pejuang, "karena kita tidak mendapat perintah resmi dari Dai Nippon." Sikap demikian di masa Kemerdekaan jelas menandai keraguan akan makna Proklamasi. Suara pangreh praja di luar ibukota keresidenan sendiri mengatakan penyerahan Jepang tidak dipastikan baik oleh residen Jepang maupun radio resmi Jakarta. Mereka juga takut akan reaksi Jepang apabila gerakan revolusioner melanjutkan kampanyenya menurunkan bendera Jepang dan mengantikannya dengan Merah-Putih. Akhirnya setelah penyerahan itu menjadi suatu kepastian, mereka mengira sekutu akan segera datang dan menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Sikap semacam ini tentu saja tidak terbatas pada kalangan pangreh praja, melainkan juga merupakan sikap sebagian terbesar kaum tua-tua Indonesia yang tidak ikut serta dalam gerakan revolusioner. Beberapa pejabat pangreh praja dapat dengan cepat mengubah sikap dan pandangannya. Namun bagi mereka yang sikap keraguannya mencolok, kewibawaannya jelas cepat musnah di hari-hari selanjutnya.

Sarimin yang pada bulan Agustus 1945 menjadi bupati Brebes untuk masa tiga bulan saja, telah meraih keberhasilan yang langka terjadi di bawah kekuasaan Belanda. Ia anak lelaki sebuah keluarga petani tembakau di dekat Dieng. Ayahnya berambisi besar agar anaknya menjadi priayi dengan kedudukan tinggi dalam dinas pemerintahan. Ia duduk di kelas tertinggi OSVIA (sekolah pendidikan bagi pegawai-pegawai pribumi) pada tahun 1924 dan menjadi camat pada usia 28 tahun. Ia juga seorang dari 13 orang lulusan terbaik akademi pemerintahan sebelum perang. Akademi ini memberi prioritas kepada anak-anak bupati yang ingin studi, sedangkan di desanya sendiri Sa-

rimin dikenal sebagai "seorang yang telah dimanjakan oleh dewa-dewa." Kemampuan dan statusnya sebagai priayi "modern" menjadikan kariernya maju dengan amat cepat di zaman pendudukan Jepang, hanya dalam waktu 3 tahun dia dipromosikan dari wedana menjadi patih, dan dari patih menjadi bupati. Kemudian terjadilah sesuatu di luar kemampuannya. Hanya selama enam bulan menjadi bupati Brebes datanglah apa yang ia sebut sebagai suatu "kemalangan" (*kualat*) yang menimpa kariernya sebagai seorang administratur.

Faktor lain yang menyebabkan hubungannya dengan kaum perjuangan di keresidenan itu memburuk adalah kecurigaan akan adanya gerakan subversif yang menyambut baik kembalinya penguasa Belanda, di kalangan pangreh praja. Menurut para pemimpin perjuangan, hal ini ada kaitannya dengan Gerakan Untuk Kemenangan, VVV (Vak Voor Victorie), yang dulu dipimpin oleh Asisten Residen Belanda A.R. Coert, pada awal tahun 1940 sesudah Jerman menduduki Belanda.[12] Katanya banyak anggota *vrijmetselarij, (Freemasonry)* menjadi anggota gerakan tersebut. Residen besar dan Bupati Sarimin pernah dinyatakan menjadi anggota Freemasons, tetapi hal itu disangkalnya. Namun namanya sudah terkaitkan dengan VVV, yang sama sekali tidak menguntungkannya.[13] Di kalangan Negen Broeders reputasi Sarimin lebih jauh lagi dinodai oleh keterlibatannya dengan kasus Wedana Pangkah, yang juga dituduh sebagai anggota VVV, dan menerima sejumlah dana untuk melakukan subversi terhadap Republik.[14]

Di Pekalongan tersiar desas-desus tentang dibentuknya komite rahasia pejabat-pejabat tinggi pangreh praja untuk menyambut kedatangan kembali Belanda *(Comite van Ontvangst),* dan konon, menurut salah satu kelompok perjuangan, Bupati R.A.A. Suryo (yang menja-

[12]Negen Broeders, Wawancara, 27.2.73.

[13]Pertanyaan No. 15. "Keterangan, Jawaban tertulis atas pertanyaan jaksa Pekalongan S. Karisatmojo 31.1.46, Proc. Gen.

[14]Negen Broeders, Wawancara, 27.2.73, dan Muhammad Nuh, Jawaban tertulis atas pertanyaan Sejarah Militer Kodam VII (Semdam), Semarang, Februari 1959, Semdam, hlm. 5. Selanjutnya "Jawaban tertulis, Semdam". Wedana Pangkah didesas-desuskan terlibat dalam penculikan dan pembunuhan sesaat setelah kemerdekaan, kegiatan agen-provokator yang dikatakan bertujuan mendiskreditkan Republik yang baru lahir itu.

bat sejak tahun 1924) juga terlibat. Termasuk juga sekelompok "orang-orang terpelajar" yang setia kepada Belanda, antara lain, anak perempuan Wedana Pekalongan dan teman-temannya. Mereka bergabung dalam Pemuda Permi, golongan pemuda kaum Priayi yang tinggal di jalan Permi di Pekalongan.

Menurut Sarli, tokoh nasionalis tua Pekalongan, Kromo Lawi, paling dibenci kelompok itu. Kenyataannya, hubungan antara beberapa pejabat Pekalongan dengan Kromo Lawi diberi kedudukan tinggi oleh Jepang dengan menjadi ketua pertama Putera, lalu menjadi kepala seksi Perdagangan Hakokai dan pemimpin Barisan Pelopor. Pangreh praja tidak menyenanginya, karena ia rajin mengunjungi wilayah-wilayah kecamatannya dan pidato-pidatonya mengenai kemerdekaan dalam kursus-kursus Putera yang kemudian menjadi Hokokai. Mereka juga benci pada cara Kromo Lawi mengambil alih rumah kediaman wedana Pekalongan untuk dijadikan kantor Putera. Mereka mencurigai pula laporan-laporan tertentu yang disampaikan kepada Jepang yang merugikan pangreh praja dan mengakibatkan mereka ditegur atau dipecat. Tetapi ternyata kalangan priayi tidak berhasil menggeser kedudukannya.[15] Kromo Lawi kemudian melindungi dirinya dengan jalan mendekati kenpeitai. Akibatnya ketika meletus bentrokan kenpeitai di Pekalongan awal Oktober, Pemuda menangkap Kromo Lawi dengan tuduhan agen subversi kenpeitai.

Dengan adanya ketegangan antara Kromo Lawi dan pangreh praja Pekalongan yang pro-Belanda itu, tidak mengherankan bila berita yang dibawanya dari Jakarta mendapat reaksi dari mereka. Kromo Lawi berada di Jakarta, di rumah kediaman Laksamana Meida, ketika malam itu juga Proklamasi sedang diperdebatkan.[16] Pagi harinya buru-buru ia kembali ke Pekalongan untuk memberi tahu bahwa Proklamasi akan diumumkan, meski berita tersebut telah sampai di pangreh praja, termasuk semua bupati, berkumpul di Pekalongan untuk menghadiri sidang Hokokai dan Shu Sangi Kai (Dewan Penasihat

[15]Sarli, Wawancara, 27.7.76.

[16]Laksamana Maeda adalah simpatisan gerakan nasionalis. Teks Proklamasi Kemerdekaan disusun di rumah kediamannya pada tanggal 16 Agustus 1945 dan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi. Lihat Anderson, Java, hlm. 75-82.

Keresidenan). Kromo Lawi menuturkan kenangannya tentang sidang yang terjadi 30 tahun yang lalu itu:

> Saya ditertawai Sarimin itu di rumah yang sebelah sini CPM, kita kumpul di sana dengan beberapa bupati, kemudian saya ceritakan tentang proklamasi itu. Nah, ditertawai, karena ya, yang bisa memerdekakan kita itu adalah negara yang menang—anggapan dari sarimin cs itu, sehingga dia tidak percaya kalau umpamanya saya... kita ini bisa merdeka, harus yang memerdekakan adalah, ya, yang menang pada waktu itu adalah Amerika. Sebab Jepang sudah jatuh, dan tidak bisa memberi kita hak kemerdekaan. Tidak mengerti bahwa proklamasi ini adalah dari sanubari rakyat Indonesia sendiri.[17]

Sarimin, dalam keterangannya mengenai sidang itu lima bulan kemudian menulis antara lain:

> ...Pada saat itoe seorangpoen ta' ada jang taoe benar tentang seloek-beloeknja Proklamatie; Toean Kromo Lawi jang habis dari Djakarta menerangkan, bahwa Proklamatie itu beloem berisi, masih berwoed-joed ideologie, beloem mempoejai woejoed jang njata.[18]

Pada waktu itu (akhir Agustus 1945), Sarimin percaya Proklamasi tidak memiliki makna apa pun sampai Jepang secara resmi sudah menyerahkanterimakan kekuasaannya kepada Indonesia. Menunggu sampai ini terjadi, Sarimin berpendapat "tidak akan terjadi perubahan apa pun." Lebih lanjut dikatakannya bahwa dia bukan tipe pangreh praja yang tinggal diam. Ketika menjadi camat, ia pernah mengajukan pendapatnya tanpa diminta kepada Residen Belanda, yang mengakibatkan pemindahan dirinya ke kecamatan yang berpenduduk miskin. Bupati Sarimin memang memiliki kepercayaan diri yang tangguh.

Pendapat maupun tindakan Bupati tersebut menimbulkan konflik dengan pejuang revolusioner di Brebes, terutama Kartohargo. Sebagai anggota pergerakan nasional yang senior di Brebes, ketua KNI Kabupaten maupun Barisan Pelopor, dia tidak menyetujui pendapat Bupati Sarimin (sekembalinya dari rapat para bupati di Pekalongan tadi), bahwa Jepang masih bertanggung jawab untuk keamanan sam-

[17]Kromo Lawi, Transkripsi III/6, 7.6.73.
[18]Pertanyaan No. 2, Keterangan, 31.1.46.

pai Belanda menduduki Indonesia kembali, menurut Perjanjian Postdam. Sarimin dengan tegas mengemukakan pendapat seperti ini dalam sebuah sidang penting di pendopo Kabupaten Brebes:

> Tanggal 23-10-1945 Bupati mengatakan rapat di pendopo Kabupaten Brebes, dikoendjoengi oleh para pangreh pradja lengkap moelai dari loerah sampai wedananja, pegawai kantor, bangsa Tionghoa dan Arab, sementara wakil-wakil Badan dan Gerakan. Rapat dipimpin sendiri oleh Boepati. Menoeroet keterangan Boepati jang beliaoe baroe sadja berkonperensi dengan Residen Mr. Besar dan mendapat penerangan tentang adanja Penjerahan Djepang kepada Sekoetoe. Selandjoetnja Boepati mengoepas soal peperangan dan djoega soal Proklamasi. Dalam koepasannja jang mengenai proklamasi boepati dengan terang-terangan tidak soeka membenarkan adanja Proklamasi itoe dan beloem soeka mengoemoemkan Proklamsi, selakoe Kepala Daerah. Perkataannja jang mengatakan beloem soeka mengakoei Proklamasi ialah demikian, "Apakah artinya Proklamasi jang hanja ditandatangani oleh 2 orang sadja (Sukarno-Hatta)?"[19]

Seorang tokoh Masyumi kemudian menanyakan kepada Bupati, apakah sebagai Kepala Daerah ia tidak memiliki keyakinan diri untuk mengumumkan Proklamasi itu. Jawabnya adalah tidak. Dikatakan oleh tokoh Barisan Pelopor bahwa gerakan gerakan revolusioner Brebes akan mendukung Bupati apabila Bupati mengumumkan Proklamasi secara resmi. Hal ini menimbulkan prasangka rasialis yang tajam di Brebes. Beberapa pedagang Cina percaya bahwa kemerdekaan itu tidak akan terjadi; sedangkan orang-orang Arab tampak puas dengan sikap Bupati dan secara terang-terangan mengatakan bahwa orang Jawa tidak mampu untuk memerintah dirinya sendiri, akibatnya justru hanyalah kekacauan dan perampokan.[20]

Bupati tetap menjelaskan pendapatnya itu dalam perjalanan dinasnya keliling kabupaten. Sewaktu ia tiba di Kawedanan Banjarharjo (di sebelah barat Brebes) beberapa minggu setelah Proklamasi, pemuka setempat telah berkumpul untuk mendengarkan keterang-

[19]Kartohargo, Pertanyaan No. 14, Berita Acara, 23.10.46. Proc. Gen. Lihat juga lampiran biografi.

[20]Wawancara, pemimpin Islam, 6.12.75.

an Bupati tentang situasi nasional waktu itu. Seorang tokoh perjuangan Islam, ingat kata-kata Bupati, antara lain:

> Bagaimana sikap Sekutu nanti, kita tidak menang, yang menang Sekutu, tunggu saja nanti sikap dari Sekutu, memang kalau Sekutu menginginkan merdeka, kita merdeka. Merdeka atau tidak merdeka yang perlu sekarang aman dan tentram.[21]

Sebelum Sarimin mengakhiri pidatonya, banyak hadirin yang meninggalkan tempat duduknya dan berkata, "Pidato macam apa ini?" "kaki tangan kolonial." Seorang tokoh pemuda dari Ketanggungan Barat akhirnya memotong, "Maafkan Tuan, demi ketertiban umum lebih baik berhenti sekarang."[22] Kemudian rapat dibubarkan. Pemuda-pemuda santri marah pada pidato Bupati yang tajam dan melukai itu.[23] Sewaktu meninggalkan kewedanan ia dicoba diculik tetapi gagal.

Kemudian Sarimin mengakui secara jujur bahwa pandangan dan sikapnya memang menyinggung perasaan kebangsaan beberapa orang. Lebih lanjut dikatakannya:

> Sikap dan pendapat demikian jika ditimbang sekarang (Januari 1946) memang salah benar, tetapi seharusnya ditimbang dengan pengertian pada saat itu juga.[24]

Akhirnya pada tanggal 27 September setelah Jepang menyerahkan kekuasaannya dan berkat instruksi Mr. Besar, Sarimin menyetujui pengibaran bendera Merah-Putih. Setelah itu baru masalah untuk mematuhi dua perintah yang berbeda bagi para bupati terpecahkan.[25]

Rasa pengabdian Sarimin kepada dua pemerintah menjelaskan perbedaan besar antar langkah-langkah nasional dengan kenyataan lokal di masa periode awal revolusi. Di tingkat nasional, masalah ini

---

[21]Wawancara, pemimpin Islam, 6.12.75.

[22]*Ibid.* Kelompok revolusioner Kota Brebes yang paling radikal, yang kemudian menamakan dirinya Pesindo berasal dari pemukiman pabrik gula Ketanggungan Barat, yang dahulu merupakan bagian dari Particuliere Landerijen atau Tanah Partikelir milik Bupati Brebes (lihat bab satu).

[23]Pertanyaan No. 1, 2, Sarimin, Keterangan, 1946, Proc. Gen.

[24]Pertanyaan No. 15, ibid.

[25]Pertanyaan No. 15, *ibid.*

tampaknya telah dipecahkan. Pada tanggal 30 Agustus di Jakarta berlangsung konferensi pangreh praja se-Jawa dan Madura, yang mencerminkan salah satu kenyataan, mereka harus mendemonstrasikan dukungan rakyat dan kewibawaan penguasa terhadap rakyat. Demi tujuan ini Sukarno-Hatta berusaha menghindari sistem pemerintahan dan pertanggungjawaban ganda, Jepang dan Republik berdampingan satu sama lain. Seperti dikatakan Hatta, "Perintah-perintah telah dikeluarkan kapada semua pejabat pemerintah untuk menyatakan dirinya sebagai pejabat Republik Indonesia dan siap sedia hanya menerima perintah-perintah yang diberikan kepadanya dari atasan yang berkebangsaan Indonesia."[26] Sukarno meyakinkan pangreh praja bahwa mereka memperoleh "kedudukan yang sepadan di Republik muda ini dengan apa yang diterimanya." Jadi ada kesepakatan di pihak para pangreh praja untuk berdiri di belakang Republik asal kedudukan dan statusnya terjamin.[27]

Di tingkat lokal terjadilah kesenjangan besar antara aspirasi ini dan pelaksanaan yang sebenarnya. Masalahnya terletak pada bagaimana pejabat-pejabat seperti Sarimin dan Jepang menanggapi kenyataan itu. Ada yang menunggu perintah Jepang yang akan memberi kemerdekaan, ada yang percaya bahwa Sekutu akan mengembalikan kekuasaan kepada Belanda. Sehingga peranan residen sangat menentukan. Seperti misalnya di Keresidenan Banyumas, Proklamasi memperoleh sambutan lebih cepat berkat kepemimpinan residen pergerakan, Mr. Iskaq Cokroadisuryo, yang pada tanggal 5 September mengumumkan "Kemerdekaan Indonesia." Empat hari kemudian, Jepang secara resmi menyerahterimakan kekeuasaan kepadanya sebagai residen Republik. Sejak itu dilema mengabdi dua pemerintah terselesaikan dalam pikiran pejabat seperti Sarimin.

Keterlambatan pengangkatan Mr. Besar sebagai residen pun mengakibatkan tertundanya serah terima kekuasaan secara resmi dan pengumuman Proklamasi oleh residen sebagai wilayah kekuasaan Republik tadi. Tidak jelas mengapa semua wakil residen masa pendudu-

[26]Anderson mengutip Hatta dalam "The Pemuda Revolution: Indonesia Politics 1945-1946," hlm. 116.

[27]Anderson mengutip Sukarno, *ibid.*, hlm. 167.

kan Jepang (*fuku shuchokan*) diangkat menjadi residen pada tanggal 5 September, kecuali jabatan Residen Pekalongan, Residen Banten, dan Walikota Jakarta yang dibiarkan kosong.[28] Boleh jadi Jakarta menghendaki para residen baru seyogyanya terdiri dari para pejabat atau administratur berpengalaman dari zaman Belanda (sekira 90 persen dari mereka yang diangkat) atau aktivis pergerakan semacam Mr. Iskaq. Ternyata kepercayaan terhadap Mr. Besar sebagai calon residenlah yang tepat didukung oleh mosi KNI Daerah Pekalongan tanggal 12 September.[29] Sembilan hari kemudian Jakarta mengesahkan pengangkatan Mr. Besar.[30] Bagaimanapun juga keterlambatan ini menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan kaum pejuang. Mereka menduga Jakarta meragukan keberpihakan Mr. Besar pada Republik. Kecurigaan itu timbul karena keinginannya untuk berkompromi dengan Residen Jepang mengenai masalah bendera. Dalam suasana kecurigaan, desas-desus dan sentimen anti-Belanda, gaya hidup Mr. Besar yang dianggap agak kebarat-baratan dan sikap yang menyendiri juga disalahtafsirkan. Namun kalangan pejuang Tegal umumnya beranggapan bahwa tidak diangkatnya Mr. Besar lebih awal karena Pemerintah Pusat "meragukan kemampuannya memimpin gerakan kemerdekaan di keresidenan ini."[31]

Kata sepakat antara kaum nasionalis dan pangreh praja di Jakarta hanya mungkin dicapai berkat kedudukan kaum nasionalis moderat tua yang telah berkolaborasi dengan Jepang dan kini mayoritas duduk dalam kabinet pertama Republik. Di Tiga Daerah, kaum nasionalis tua itu justru radikalis yang tidak pernah ikut memegang kekuasaan. Bila sebagian dari mereka pernah memasuki organisasi Jepang, mereka tidak melibatkan diri dalam pelaksanaan politik ekonomi Jepang masa perang. Karena itu penyerahan kekuasaan di akhir

[28]Koesnodiprodjo, (penyunting). Himpunan Undang2, peraturan2, penetapan2 pemerintah Republik Indonesia, 1945 (Jakarta 1951), hlm.88.

[29]"Mosi Komite Nasional Daerah Pekalongan". Saya berterima kasih kepada Mr. Besar untuk dokumen-dokumen lain dari KNI Pekalongan (selanjutny disebut Dokumen Mr. Besar).

[30]Surat dari Sekretaris Negara, A.G. Pringgodigdo kepada Dr. Sumbaji, ketua KNI Pekalongan, tertanggal 21 September 1945, Dokumen Mr. Besar.

[31]Negen Broeders, Wawancara 8.11.75.

September 1945 tidak mampu mencegah polarisasi yang semakin jauh antara gerakan revolusioner dan pangreh praja. Polarisasi ini mencerminkan tiga kenyataan setempat. Pertama, kaum nasionalis tua tidak berada dalam kekuasaan seperti rekan-rekannya di Jakarta. Kedua, pengelakan Jepang atas kekalahannya dengan Sekutu, dan ketiga, keragu-raguan di kalangan beberapa pihak terhadap Proklamasi. Semakin terisolirnya keresidenan itu dari Jakarta dirasakan oleh semua kelompok. Pangreh praja yang tidak tahu apa yang harus diperbuat karena ketiadaan instruksi-instruksi dari atasan, bertingkah laku sangat hati-hati dan selalu birokratis serta menanti perintah-perintah atasan yang tak kunjung tiba.

Awal Mula Revolusi Kemerdekaan

a. Pekalongan

Di Kota Pekalongan pengibaran bendera Merah-Putih ditentang keras. Tokoh barisan Pelopor Sarli mendengar berita Proklamasi dari radio Jakarta tanggal 18 Agustus pagi, katanya:

> Saya mengajak dua orang pimpinan barisan Pelopor ke Balai Kota. Pukul 6.30 pagi, tak seorang pun ada di sana. Saya menaikkan bendera Merah-Putih sebagai ganti bendera Jepang. Lalu kami pulang dan memberi tahu Kromo Lawi dan Bung Bagio. Kegaduhan pun mulai, sekitar pukul 7.00 pagi ketika saya tiba di Kantor Kotapraja mendadak dipanggil Sumpeno [Walikota Pekalongan]. Bersamanya hadir Harso, Sekretaris Kotapraja dan seorang lagi. Mereka sangat takut dan pucat sekali. Karena saya yang telah menaikkan bendera Merah-Putih, maka sayalah yang harus menurunkannya, katanya kepada saya. Apa jadinya bila Jepang mendengar soal ini? Saya mengatakan bahwa saya telah menaikkannya dan tidak dapat menurunkannya lagi, karena kekuasaaan Jepang telah berakhir dengan Proklamasi. "Sebagai bangsa Indonesia kita mengaku bendera itu. Kita mengakui Bung Karno sebagai pemimpin. Kita taat," kata saya kepada mereka. Lalu keadaan menjadi menegangkan. Saya tetap tidak mau pergi dan menurunkan bendera. "Siapa memerintahkan kamu menaikkan bendera itu?" tanya mereka lagi."Saya tidak mendapat perintah," jawab saya, "Proklamasi itu sendiri yang memerintahkan kita bertindak..."

Sumpeno mengatakan telah mendengar tentang Proklamasi, tetapi tidak ada perintah mengibarkan bendera.[32]

Barisan pelopor Pekalongan tidak mampu mengerahkan rakyat seperti di Tegal. Pemimpinnya orang baru, organisasi tidak luas, dan kaum santri yang lebih menonjol, sedangkan di Tegal pemimpinnya adalah tokoh eks-Digul yang sudah lama dikenal, dan organisasi menjangkau seluruh kota.

Pada tahap pertama revolusi di Pekalongan, para aktivis Jawatan Kereta Api yang menonjol dengan memeriksa penumpang-penumpang apakah sudah memakai lencana Merah-Putih, dan mendirikan sebuah menara besar di depan stasiun untuk mengibarkan Sang Dwiwarna. AMRI walaupun kurang senang dijuluki sebagai gerakan "piknik dan bal-balan" oleh para pemuda (lantaran berasal dari golongan menengah kota atau pengusaha), bekerja sama dengan Barisan Pelopor untuk mengambil alih sebuah pabrik penggilingan beras serta menjual hasilnya kepada KNI untuk didistribusikan. Tokoh-tokoh AMRI aktif pula dalam gerakan pengibaran bendera di luar gedung-gedung pemerintah. Tokoh AMRI A. Junaid mengibarkan bendera di depan kantor Pengadilan Negeri, tetapi segera diturunkan kembali atas perintah Jaksa Suprapto, tokoh terkemuka kalangan priayi Pekalongan.[33]

Tetapi patuh pada status sosial merupakan masa lalu. Pemuda Permi (priayi muda) ikut aktif menyebarluaskan poster bertuliskan "Merdeka atau mati", dengan cepat menurunkan bendera Jepang dan menaikkan bendera Merah-Putih. Kegiatan itu baru terbentur ketika mereka menurunkan bendera Jepang di halaman keresidenan dan menaikkan bendera Merah-Putih di depan mata sejumlah pejabat Je-

[32]Sarli, Wawancara 28.8.76. "Bagio" adalah Subagio Mangunraharjo, kepala kantor Badan Pembantu Prajurit Pekerja (BP3) Pekalongan.

[33]Pemimpin AMRI, Wawancara 3.9.72, 31.5.73; juga pemimpin Pemuda Permi, wawancara 30.7.75. Beberapa aktivis muda priayi mempunyai hubungan dengan kelompok mahasiswa Fakultas Kedokteran di Jalan Prapatan 10 Jakarta yang memberikan bahan-bahan kepadanya. Hakim pada peradilan tokoh-tokoh Tiga Daerah adalah sama orangnya dengan hakim yang memerintahkan penurunan bendera Merah-Putih yang berkibar di depan kantor Pengadilan Negeri; ia menolak pertanyaan pembela mengenai insiden ini sebagai "di luar tata tertib" dalam persidangan enam terdakwa pemimpin Tiga Daerah pada awal tahun 1947 itu.

pang. Residen Jepang marah dan meminta penjelasan dari Mr. Besar selaku Fuku Shuchokan (wakil residen). Mr. Besar memanggil sidang kilat KNI dan menyampaikan rasa amarah residen Jepang atas insiden itu. Bayangkan andai kata para pejabat Indonesia mendukung aksi Pemuda Permi itu, padahal berdasarkan kenyataan Jepang masih memegang senjata. Sungguh merupakan penghinaan besar bagi orang-orang Jepang menyaksikan benderanya diturunkan, dalam kondisi mental goncang akibat kekalahannya.

Situasi menjadi semakin menegang di depan Keresidenan. Para pejabat Indonesia dan tokoh-tokoh KNI berdatangan atas panggilan Mr. Besar. Pimpinan KNI meminta tokoh-tokoh Pemuda Permi menurunkan bendera Merah-Putih dan menaikkan kembali bendera Jepang. Mereka menolak, sehingga semakin membingungkan pimpinan KNI. Akhirnya beberapa pegawai Kantor Keresidenan dibujuk untuk menurunkannya, guna mencegah bentrokan yang lebih parah.[34]

Menyusul insiden ini, berlangsunglah pertemuan antara Mr. Besar, KNI dan Shuchokan (residen) Jepang. Dalam pertemuan itu disepakati tiada bendera Jepang maupun Indonesia akan dikibarkan di luar Kantor Keresidenan. Beberapa minggu kemudian barulah Jepang menyetujui pengibaran bendera Merah-Putih di depan semua Kantor Keresidenan di Pekalongan.

b. Tegal

Pada tanggal 20 Agustus kurir Barisan Pelopor Tegal kembali dari Jakarta membawa pesan agar berhati-hati berurusan dengan Jepang karena mereka masih bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban buat sementara waktu. Namun semangat menyalanyala mengatasi segalanya. Pamflet dan poster yang bertuliskan "Indonesia Merdeka" dan "Jagalah Kemerdekaanmu!" terpasang dan terpancang di seluruh kota. Tidak diketahui dari mana datangnya perintah yang segera menghilangkan semboyan-semboyan itu dan tinggal bekasnya saja. Barisan Pelopor segera menjadi pusat kegiatan revolusioner kota dan memindahkan kantornya ke markas yang lebih besar.

[34]Sujono, Transkripsi V/1-2, 30.7.73.

Kemudian, rupanya untuk penguasaan keamanan kota, dan dengan seizin KNI, Barisan Pelopor mengambil alih pabrik pembikinan ubin di tepi alun-alun kota sebagai markas besarnya.

Situasi yang membingungkan dan meluapnya emosi mudah menyulut kebencian rasial, sehingga lahirlah tindak kekerasan terhadap orang-orang Cina di Tegal yang dituduh tidak bersedia mengibarkan bendera Merah-Putih. Kelangkaan tiang bendera mengakibatkan orang menggunakan galah panjang pemetik mangga sebagai gantinya. Salah seorang penduduk Cina menggunakan ujung galah untuk memetik mangga tetapi lupa bahwa di ujung lainnya tetap terpasang bendera Merah-Putih sehingga menjadi kotor dan terseret-seret. Akibatnya ia ditindak oleh Barisan Pelopor. Seorang lainnya dicambuk sampai pingsan karena tidak menjawab salam "Merdeka" ketika melewati pos penjagaan.[35]

Munculnya bendera Hinomaru (bendera Jepang) yang berkibar di atas beberapa gedung dan kantor pemerintahan pada tanggal 23 Agustus merupakan isyarat yang tidak menyenangkan bagi barisan Pelopor dan menjadi pendorong baru bagi mobilisasi berbagai revolusioner di Kota Tegal:

> Pada tanggal 24 dan 25 Agustus dengan tenaga-tenaga pasukan yang masih ada, Barisan Pelopor bersama-sama dengan tukang becak, pemuda-pemuda dari kereta api (AMKA), pabrik Java Textiel, Zosenjo [galangan kapal], Dinas Kesehatan Rakyat, Bank Rakyat dan lain-lainnya yang kesemuanya mengaku dirinya Angkatan Muda (bukan AMRI, AMRI belum ada) mengadakan gerakan serentak massa aksi pemasangan dan penempelan bendera sang Merah Putih dan slogan-slogan baru di tiap-tiap rumah, tembok-tembok pasar-pasar, bangunan-bangunan dan di segala tempat yang dikerumuni orang-orang banyak, kendaraan-kendaraan, dokar, becak, bis, gerobak yang berjalan menuju arah selatan-barat dan timur. Dan tidak dengan diperintah lagi penduduk membantu gerakan itu.[36]

Situasi Kota Tegal terpolarisasi seperti di Kota Pekalongan, namun dengan dimensi yang mengandung bahaya lebih besar karena

[35]Marsum Hr, Ceritaku, 1974, hlm. 55.
[36]Marsum Hr, Ceritaku, 1974, hlm. 55.

tidak sederhananya pertentangan antara Walikota Pekalongan dengan tokoh-tokoh perjuangan. Di Tegal, Barisan Pelopor, Negen Broeders dan KNI bersatu menghadapi Walikota dan Kepala Polisi yang kebingungan karena tiadanya instruksi dari atasan.

Walikota (*Sincho*), telah didekati oleh beberapa anggota Negen Broeders setelah Proklamasi. Berbagai persoalan mengenai bendera, senjata dan Proklamasi dijawab semuanya dengan kalimat sama, "masalah-masalah pemerintahan adalah tanggung jawab pangreh praja" dan "kamu tidak perlu mencampurinya."[37]

Pimpinan barisan Pelopor menemui Walikota setelah teks Proklamasi dan plakat-plakat semboyan mulai banyak yang robek. Mereka minta Walikota agar menggunakan uang dari Fonds (Dana) Kemerdekaan[38] guna mencetak lebih banyak lagi salinan teks Proklamasi dan bendera. Walikota, yang juga ketua Hokokai Kabupaten Tegal, menolaknya dengan dalih "tidak ada perintah atasan untuk bertindak demikian."[39] Barisan Pelopor lalu menyarankan agar Walikota menggunakan wewenangnya mendistribusikan teks Proklamasi dan memerintahkan sepuluh kepala kampung di kota itu untuk mengibarkan bendera. Suatu perdebatan terjadi yang dipotong oleh pembicaraan seorang pejabat polisi bekas anggota PID zaman Belanda yang hadir. Katanya kepada para pemimpin Barisan Pelopor:

> Saudara-2 'kan pedjuang ideologi kemerdekaan, mengapa mesti meminta persetudjuan dan bantuan dari pangreh pradja, tentunja tak akan menjtapai persesuaian. Kita pangreh pradja tentunja tidak berbuat lain daripada pangreh pradja jang masih diikat dengan perintah-perintah-2 *Gunseikanbu* [Pemerintah Bala Tentara Nippon]. Sedang kita sadja [...sambil menundjukkan djarinya ke arah Kantor Polisi] masih diharuskan mengibarkan bendera Hinomaru.[40]

Para pendukung Republik di Keresidenan Pekalongan harus berhadapan dengan pemerintahan yang masih terikat ketat pada ke-

---

[37]Negen Broeders, Wawancara 8.11.75.

[38]Fonds Kemerdekaan merupakan dana lokal yang dibentuk di setiap kabupaten oleh KNI Daerah. Di Tiga Daerah, kebanyakan orang-orang Cina dan Arab memberikan sumbangannya untuk memperlihatkan "dukungannya" kepada kemerdekaan.

[39]Muhammad Nuh, Jawaban tertulis Semdam, 1959, hlm. 5.

[40]*Ibid*. Hinoru adalah nama bendera Jepang.

biasaan serba menunggu perintah atasan. Keputusan presiden tertanggal 25 September 1945 yang mengangkat semua pangreh praja sebagai pejabat Republik[41] tidak mengubah sikap kaum elite birokrat setempat.

Insiden-insiden pengibaran bendera di Tegal berlanjut. Walikota hanya mengizinkan pengibaran bendera Merah-Putih "menurut ketentuan-ketentuan yang masih berlaku" yakni di samping sebelah kiri bendera Jepang. Terjadilah konflik-konflik di kantor-kantor pemerintah antara atasan-atasan Jepang, pangreh praja, dan kaum nasionalis yang bekerja di situ. Akibatnya, kadang-kadang berdampingan Merah-Putih dan Hinomaru, kadang-kadang tak satu pun yang berkibar[42]. Pada tanggal 11 September pihak pejuang memutuskan untuk menyelenggarakan rapat untuk meminta penjelasan mengenai kebijaksanaan pemerintah dari Walikota dan pejabat-pejabat lain.

Gedung Gereja Katolik di Keraton Lor, tempat sidang akan berlangsung, sejak pukul 8.00 sore telah penuh sesak. Semua pejabat duduk berderet di depan, menyusul para pengusaha Kota Tegal, dan di belakang, duduk anggota-anggota perjuangan. Akhirnya Tuan Sincho Sungeb tiba, terlambat sekitar 40 menit, mengenakan pakaian resmi tradisional priayi gaya Solo, sarung batik berwiron dan berjepit, sebuah blangkon, serta memakai selop. Dia bermaksud mengingatkan wibawa kuasa tradisionalnya dan kepatuhan masyarakat tradisional kepada pewaris keraton, lambang kerajaan. Guna menambah pengaruh kemurnian kehidupan pribadinya, maka ia disertai oleh istri keduanya yang muda dan cantik.

Kedatangannya yang mengagungkan nilai-nilai tradisional itu ternyata tidak dipedulikan kaum perjuangan. Berbeda dengan kebijaksanaan umum Jepang di daerah-daerah lain di Jawa yang lebih menyukai pengangkatan walikota dari kalangan terpelajar atau anggota pergerakan, di Keresidenan Pekalongan, Jepang justru lebih menambahkan pengaruh priayi lokal. Dalam rapat itu, Walikota mengatakan bahwa sebagai seorang pejabat di bawah Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon, ia tidak menerima "instruksi resmi" apa pun dari atasannya

[41] *Penghela Rakjat*, 1 Maret 1946.
[42] Muhammad Nuh, Jawaban tertulis, Semdam 1959, hlm. 6.

mengenai kemerdekaan. Begitu juga dalam *Kan Po* (Lembaran Resmi Pemerintah) yang terbaru, Proklamasi tidak disebut-sebut. Dikatakannya pula bahwa mempercayai semua berita dari luar itu berbahaya. Sebelum ia mengakhiri pidatonya kaum pejuang telah berdiri. Kadarisman, anggota KNI, menginterupsi pidato Walikota dengan suara jelas bernada jengkel:

> Sikap tuan selaku Penguasa daerah setempat nyata bertentangan dengan kenyataan, oleh karena itu pemuda-pemuda tidak menaruh lagi kepercayaan kepada Tuan yang akibatnya akan Tuan rasakan sendiri. Jelas sudah, bala tentara Dai Nippon menyerah, kalah perang terhadap sekutu. Tuan masih saja menunggu perintah resmi. Apakah suatu kekalahan dalam perang besar Jepang lawan sekutu perlu memerintahkan Tuan secara resmi? Kemerdekaan bukannya atas perintah resmi dari Gunseikan. Kemerdekaan bukan seperti orangtua memberikan kembang gula kepada si anak yang sedang merengek-rengek...[43]

Suara Kadarisman terhenti sebentar disebabkan sambutan tepuk tangan para pemuda menggema disertai kata-kata "benar itu," "betul begitu," "jangan seperti budak," dan lain lagi. Ia melanjutkan kata-katanya:

> ...kemerdekaan datangnya dari bangsa sendiri bukan dari *Gunseikan*, apakah Tuan bukan bangsa Indonesia? Bagaimana sekarang sikap dan pendirian Tuan, apakah sebagai putra Indonesia ataukah sebagai abdi Jepang yang setia?[44]

Tepuk tangan yang memekakkan telinga menyebabkan Kadarisman tidak dapat lagi melanjutkan pidatonya. Lalu ia minta maaf karena akan meninggalkan tempat sebelum rapat berakhir. Tuan Sincho Sungeb tampak bagai tersambar petir di siang bolong. Ia berusaha mengucapkan sesuatu, namun tidak jelas apa yang dimaksudnya. Saat itulah, salah seorang anggota Negen Broeders, maju dengan usul kompromi. Bila Walikota mau menarik kembali pernyataannya yang diucapkan tentang menunggu pemerintah dari *Gunseikan*, pihak perjuangan hendaklah bersedia bekerja sama dengan Walikota dalam pelaksanaan Proklamasi.

---

[43]Marsum Hr. Ceritaku, 1974 hlm. 75.
[44]*Ibid.*

Betapapun demikian akhirnya suaranya itu tenggelam dalam hiruk-pikuknya teriakan-teriakan dari barisan belakang ruang sidang, "kita telah cukup," buang-buang waktu saja," " sekali budak tetap budak," yang terdengar jelas lalu akhirnya,

> Walikota berdiri dari tempat duduknya. Tangannya gemetar mengacung ke atas, memegang palu doyong ke depan, mukanya sebentar pucat—sebentar merah—keringat mengalir di mukanya. Rupanya ia akan mengucapkan sesuatu, namun mulutnya belum sempat terbuka, disambung lagi oleh suara dari belakang, "mau apa lagi?" "Cukuplah sudah dan jelas, marilah kita pulang!" Bergeraklah pemuda-pemuda itu, satu dua... tiga dan akhirnya ramai-ramai meninggalkan ruangan sidang pertemuan yang belum selesai. Tinggalah hadirin yang duduk di rentetan depan, ...pertemuan bubar.[45]

Sejak itu Walikota Sungeb mendapatkan julukan dari kalangan perjuangan, "Tan Sung Eb." Penghinaan terakhir yang dapat ditimpakan kepadanya adalah memberikan julukan nama dalam bahasa Cina, yang mengungkapkan hubungan dagangnya dengan keluarga Tan, keluarga Cina terkemuka dari sebuah perusahaan dagang milik satu keluarga di Tegal.

c. Brebes

Tanjung, sebuah kota kewedanan yang berpenduduk sekitar 5.000 orang terletak di dataran pantai sebelah barat Kota Brebes. Sekelompok kecil gerakan kemerdekaan berkekuatan 50 aktivis mengatur pembagian wajib jaga di antara para anggotanya, termasuk di antaranya seorang lenggaong kesohor dari Desa Kemurang. Satu kelompok merintangi jalan, menghentikan setiap orang Jepang yang lewat. Kelompok lainnya mengatur penjagaan keamanan desa, memeriksa semua kendaraan yang menuju dan meninggalkan daerah itu, serta mengamati semua orang "yang dicurigainya." Kelompok lain bertanggung jawab atas keamanan stasiun kereta api. Setiap malam 10 orang pemuda berjaga di markas dan sejauh dua kilometer jalan raya di depannya yang melintasi tengah kota. Alat transpornya berupa 20 buah sepeda "sumbangan" masyarakat Cina setempat atas "permintaan" pemimpin-pemimpin perjuangan.

---

[45] *Ibid.*

Seperti di lain-lain tempat, sikap pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini Wedana Tanjung, segera menjadi bahan perbincangan luas. Dua minggu setelah Proklamasi berlangsunglah sebuah rapat di pusat kewedanan. Pemimpin perjuangan setempat masih ingat:

> Intisarinya oleh Wedana kita tidak diperbolehkan proklamasi Indonesia merdeka, karena siaran Domei [Kantor berita Jepang] belum ada kententuan mengenai ini. Wedana berbicara sekitar setengah jam di hadapan seratus orang di Kawedanan. Kita diam saja mendengarnya, lalu pulang ke rumah. Sepuluh menit kemudian, datang teman saya dengan satu truk penuh pemuda. Saya diajak, "Sekarang kita mengibarkan bendera," kata mereka. Teman dari Brebes ini memberi tahu, "Wedana Tanjung ini perlu disingkirkan." Saya menjawab, "Jika perlu silahkan."[46]

Meskipun para pejabat menentangnya, strategi pengambilalihan pabrik gula Banjaratma dapat dilaksanakan.

> Pada pukul 9.00 pagi hari, lima pemuda bersenjatakan bambu runcing mengepung kantor pimpinan pabrik, menguasai tiga telepon pabrik. Saya berhasil menghubungi kaum buruh. Saya katakan kepada mereka, bahwa hari ini kita bermaksud menyerahkan pabrik kepada Republik Indonesia. Saudara-saudara buruh supaya berdemonstrasi mendukungnya di depan kantor. Kemudian saya mengumpulkan pimpinan pabrik. Mereka menyerahkan kepada saya 15 pucuk pistol Browning. Lalu saya mengambil radio dari rumah administratur buat menangkap siaran radio Bung Tomo. Saya memperoleh juga sepasang kemeja dengan celana panjangnya. Polisi juga mengambil pakaian dari gudang pabrik. Ada lima orang Jepang di pabrik ini. Pada petang hari itu juga saya mendengar tiga orang Indo-Belanda dibunuh dan wanitanya ditahan di Pekalongan. Seorang putra Batak, Sihombing, diangkat jadi administratur dan seorang Batak lainnya jadi tenaga teknis.[47]

Sekitar enam minggu setelah Proklamasi, terjadilah pemandangan di senja hari di Tanjung:

> Markas saya di pelelangan sebuah rumah gadai, tanpa dinding, tanpa atap, seperti kandang kerbau. Dengan sebuah radio Philips bekas,

[46]Pemimpin Perjuangan Tanjung, Wawancara, 29.7.76.
[47]*Ibid.*

> milik administratur pabrik gula Banjaratma, saya pasang mulai pukul 5.00 sore. Sekitar 500 orang berkumpul ingin mendengarkan pidato Bung Tomo. Terdapat sekitar 100-an pemuda, dan wanita-wanita muda, kebanyakan sudah menikah. Saya bermarkas di situ, tidur di atas kursi siang malam, dan tidak pernah pulang. Antara pukul 5.00-7.00 sore, semua orang berkumpul di jalan di depan rumah gadai itu, mendengarkan radio.[48]

Seperti di Tegal, di sini pun kebencian rasialis merupakan masalah peka yang menimpali ekses meluapnya sentimen nasionalis dan kemerdekaan. Para pemimpin setempat dihadapkan dengan pertentangan terhadap orang-orang Cina oleh golongan Islam, sudah lama terlihat dalam kasus pembunuhan babi dan penyerangan terhadap pemiliknya. Masalah lama yang sudah ada, di Tanjung sejak tahun 1920-an.[49] Pemuda Islam membunuh seekor babi dan memukuli pemiliknya yang sedang membawa babi itu ke pembantaian, dan dimulailah pemburuan umum terhadap babi. Sebagian lari, sebagian terbunuh.

Sistem gundik yang memungkinkan tidak sedikit lelaki Cina yang tidak mampu mengambil istri dari masyarakatnya sendiri, lalu mengambil wanita-wanita Jawa sebagai piaraan atau istri tidak resmi, juga merupakan sumber ketegangan. Golongan Islam menghendaki penghapusan sistem itu. Adanya orang-orang Cina yang tidak mau mengibarkan bendera Merah-Putih menambah ketidakpercayaan gerakan nasionalis terhadap mereka, ditambah pula dengan sentimen keagamaan.

d. Pemalang

Berbeda dengan pemuda Brebes di Tanjung, orang-orang Cina di Pemalang adalah bagian yang tak terpisahkan dari kaum perjuangan di kota itu, bahkan mereka mempunyai organisasi perjuangan sendiri. Integrasi pemuda Cina dengan pergerakan nasional di Pemalang memang khas, dan patut mendapat pengamatan tersendiri.

Seperti semua masyarakat Cina perantauan lainnya yang berkembang pada abad ke-19 sebagai akibat permintaan tenaga kasar

---

[48] *Ibid.*

[49] *Neratja*, 29 September 1920.

(kuli) dalam jumlah besar, maka masyarakat Cina Pemalang memiliki organisasi sendiri, sekolah rahasia, perkumpulan kematian, dan serikat suku bangsa sendiri. Di wilayah Jawa terdapat pers dalam bahasa Cina dan melayu Cina. Tetapi di Pemalang ada faktor tertentu yang membuat mereka secara sosial lebih membaur dengan penduduk Jawa. Berbeda dengan daerah-daerah lain (seperti di Tegal), di Pemalang tidak terdapat perbedaan mencolok antara pedagang Cina yang kaya dengan penduduk Jawa yang miskin. Di Pemalang, orang-orang Cina pada umumnya miskin atau sedikit lebih baik keadaan ekonominya, bahkan mereka itu bekerja sama dengan penduduk Jawa dalam usaha-usaha pertanian, pengurusan serta pemutaran uang dan hasil-hasil pertanian di kalangan penduduk setempat, meski tidak diperdagangkan ke luar daerah. Misalnya, tanah sawah yang disewa pabrik gula dikembalikan kepada pemiliknya pada bulan Agustus-September, yaitu musim kemarau yang tidak memungkinkan bertanam padi sampai bulan Desember. Selama tiga bulan itu orang-orang Cina dan haji-haji menyediakan benih kacang kedelai untuk ditanam dan hasilnya dipasarkan. Ini pula merupakan kesempatan kerja bagi penduduk petani itu.

Orang-orang Cina pemilik penggilingan padi sering memberi sumbangan pada pesta dan upacara tradisional seperti perkawinan dan kematian guna memelihara hubungan baik setempat demi keberhasilan usahanya. Penduduk setempat membalas kedermawanannya ini dengan menganggap pengusaha penggilingan padi itu sebagai pelindungnya.

Implikasi politik ini tampak jelas dalam perjuangan nasional, yaitu orang-orang Cina pun bahu-membahu dengan penduduk pribumi dalam perjuangan melawan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Jepang di Hindia Belanda. Sedangkan di daerah lain umumnya mereka bahu-membahu dengan kaum priayi, yang memiliki hak-hak istimewa yang diperkuat oleh hukum dan tatanan yang berlaku, sehingga sama-sama terasing dari mayoritas penduduk. Di Indonesia, Cina peranakan dan totok yang dipengaruhi oleh nasionalisme Cina menentang politik pembagian diskriminatif pecah-belah dari Undang-undang Kekaulaan Negara Belanda (*Wet op het Neder-*

landsche Onderdaanschap). Hal ini membuat mereka lebih cenderung pada nasionalisme Indonesia.[50]

Sekolah Cina Pemalang, Tiong Hua Hwee Kwan (THHK), yang didirikan pada tahun 1921, merupakan tempat persemaian rasa nasionalis aktivis Cina terkemuka di Pemalang. Organisasi radikal sebelum perang yang disebut Koempoelan Orang Perdjoengan (Kopor), bertujuan mencapai kemerdekaan. Anggotanya banyak berdiskusi tentang tindakan apa yang harus diambil kelak bila Jepang meninggalkan Jawa. Sebelum perang banyak orang Cina menjadi anggota cabang Sarekat Islam Pemalang bertempat di sebuah toko besar Cina. Ini dikisahkan oleh Cu Liep Goan, yang menjelaskan bahwa ketika pemilik toko itu meninggal, seluruh kekayaannya dihibahkan kepada Sarekat Islam.

Cu Liep Goan sendiri adalah anggota kelompok ini. Lahir pada waktu didirikan THHK, menjadi murid THHK. Anak petani kecil ini akhirnya menjadi aktivis buruh dengan aspirasi nasionalis. Ia bekerja di Perusahaan Bis Moga, menggunakan uang dari perusahaan ini untuk menyokong perjuangan, melanjutkan apa yang pernah dilakukan ketika bekerja di sebuah penggilingan padi di Pemalang. Ia anggota Kopor dan juga Keibodan, dan selalu berdiskusi setiap minggu atau sepuluh hari sekali di dapur keluarga dr. Muryawan. Mereka juga menyebarluaskan ajaran tentang akan datangnya Ratu Adil di kalangan penduduk desa, dan mempersiapkan mereka dalam menghadapi runtuhnya kekuasaan Belanda dan Jepang. Menurut dia, semua anggota Kopor berasal dari Pemalang.[51]

Tokoh pemuda Cina yang sangat menonjol ialah Tan Jiem Kwan. Lahir di Pemalang tahun 1918. Ayahnya pemilik penggilingan padi, dan sebuah gedung bioskop. Waktu revolusi sosial, gedung bioskop ini digunakan tanpa sewa oleh para pemuda untuk pertunjukan pengumpulan dana. Keadaan ekonomi sosialnya lebih tinggi dari Cu Liep Goan, meskipun sama-sama keluaran THHK, tapi ia

[50]Mengenai kebijaksanaan Belanda yang lebih terinci lihat Donald E. Willmott, *The National Status Of The Chinese in Indonesia*, 1900-1958 (Ithaca, N.Y.1961).

[51]Cu Liep Goan, Wawancara, 6.10.76.

keluaran dari Tegal. Ia anggota Kopor dan anggota PKI bawah tanah pada masa pendudukan Jepang. Selain itu juga ia jadi ketua organisasi orang-orang Cina perantauan Chung Hua Hui (yang pada waktu Jepang menjadi Kakyo Sokai). Menurut Cu Liep Goan, salah satu sasaran kegiatan gerakan bawah tanah ialah membangkitkan perasaan anti-Jepang di kalangan penduduk Jawa dengan kampanye bisikan, yaitu dengan jalan memfitnah beberapa orang sebagai kambing hitam untuk memancing Jepang agar bertindak keras terhadap orang-orang Jawa.[52]

THHK Pemalang berperan bagus dalam menyemaikan tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1930-an, Sukarno mengunjungi kota itu. Dalam pidatonya di depan masyarakat Cina, mereka diingatkan keras tentang bahaya politik pemerintahan kolonial terhadap mereka melalui agen PID. Peristiwa ini meninggalkan kesan yang mendalam di kalangan penduduk Cina sebelum pembentukan Kopor. Dua belas orang Cina bekas murid Taman Siswa Pemalang, juga merupakan benih-benih nasionalisme Indonesia di awal tahun 1930-an. Cina-Cina pemilik penggilingan padi tetap memberi sumbangan walau Taman Siswa dicap oleh penguasa sebagai "sekolah komunis."

Pada awal revolusi Laskar Pemuda Tionghoa (LPT) yang beranggotakan 60 orang berdiri di Pemalang. Tan Jiem Kwan memberikan ceramah-ceramah pada pertemuan LPT tentang perjuangan membebaskan rakyat dari kekuasaan Belanda dan Jepang, bersiap sedia menghadapi kejatuhan mereka, dan berani mengibarkan bendera Merah-Putih dengan segala konsekuensinya begitu terdengar berita Jepang menyerah. Dan memang tak seorang pun dari masyarakat Cina yang tak mematuhi instruksi-instruksinya. LPT mengambil peran penting dalam ikut serta mengambil alih kekuasaan dari Jepang, sehingga mendapatkan rampasan 2 karaben, 2 pistol, dan granat-granat tangan.

Seperti Barisan Pelopor Tegal, Api Pemalang menghimpun mayoritas pemuda kota. Organisasinya terbagi ke dalam empat markas.

[52]Cu Liep Goan, Wawancara, 7.10.76.

Markas I (pertama) fungsi pokoknya politik. Semula menempati rumah Supangat, seorang yang sejak berakhirnya masa pendudukan tampil sebagai tokoh nasionalis terkemuka di kota itu, dengan dukungan dari veteran 1926 (eks-Digulis), santri rakyat, gerakan bawah tanah, dan Laskar Pemuda Tionghoa. Markas I terdiri dari tiga kelompok, veteran dari tahun 1920-an (seperti Amir), para aktivis tahun 1930-an, dan angkatan muda zaman Jepang. Semasa periode revolusi sosial Oktober 1945, markas itu dipindahkan ke kantor bekas asisten residen Belanda di sebelah timur alun-alun kota. Di situlah, di bawah bimbingan Amir, para pemuda diasramakan, diberikan latihan militer dan pendidikan politik. Markas II yang bertempat di dekat pasar, bertanggung jawab atas keamanan umumnya, dan pasar khususnya. Markas III mengurus keuangan API. Seperti kelompok-kelompok perjuangan Pemalang lainnya, API bersandar sepenuhnya pada sumbangan masyarakat pedagang kota yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Arab, Cina, dan kaum santri, yang memiliki kelompok-kelompok perjuangan sendiri yang sudah tentu sumber keuangannya lebih lancar. Markas III berusaha mengumpulkan dana dari pertunjukan-pertunjukan sandiwara.[53] Markas IV berperan sebagai jenis badan kesejahteraan sosial. Kata seorang bekas anggota Markas IV:

> Para pemuda membawa orang-orang yang tidak mampu dari kampungnya. Mereka harus menerimanya sendiri, tidak boleh lewat pemuda. Nama mereka ditanyai, juga pekerjaan dan kampungnya. Diberi tahu pula bahwa jatah kain itu untuk dipakai sendiri dan tidak boleh dijual. Saya harus menjaga pembagian kain itu, jangan sampai ada yang bertindak tidak jujur, jika dua meter bagi tiap orang, yah, harus dua meter, tidak lebih tidak kurang.[54]

Selain distribusi kain yang dibeli dari pabrik tekstil Tegal dengan dana keuangan Kabupaten, Markas IV berusaha menguasai semua kegiatan ekonomi di dalam kabupaten. Katanya lebih lanjut:

> Setiap barang yang masuk ke ibukota Kabupaten ditahan. Markas IV diberi tahu dan melaporkannya ke Markas I. Markas I lalu memutuskan barang-barang mana yang dibutuhkan bagi perjuangan dan

[53]Sandiwara Kemerdekaan ini akan dibahas dalam Bab 7.
[54]Pemimpin API Pemalang, Wawancara, 10.2.75.

mana yang tidak. Yang diburuhkan lalu dibeli dengan dua pertiga nilai harganya; tidak ada suatu pemerasan.[55]

Sama halnya, barang-barang dagangan itu pun tidak dapat diangkut keluar kabupaten tanpa seizin pimpinan Markas IV. Salah satu tugas penting API ialah mengatur keamanan kota dan sebagai imbalan tugas jaga kota, para pemuda miskin itu mendapatkan jatah nasi ponggol (nasi bungkus dengan daun pisang). Kualitas nasi ponggol itu berbeda-beda, di Pemalang dan Slawi tidak lebih baik atau buruk dari makanan sehari-hari, tetapi di Tanjung sangat istimewa. Tidak semua badan perjuangan menyediakan nasi ponggol. Bila AMRI Slawi menghabiskan pembagian nasi sumbangan rakyat, maka AMRI Tegal merupakan kelompok elite yang tidak memerlukan nasi ponggol.

Di Pemalang tidak terjadi insiden bendera atau bentrokan terbuka antara pangreh praja dan badan perjuangan seperti di lain-lain ibukota kabupaten. Setelah Proklamasi, sebuah kelompok pejabat dan nasionalis moderat yang menyatakan diri sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Daerah Pemalang, menganjurkan pengibaran sang Dwiwarna. Dalam kelompok ini terdapat bekas tokoh Koperasi Indonesia (Kopi), Abdul Mutholib (lihat Bab 2), dan tokoh Barisan Pelopor Pemalang yang punya hubungan dekat dengan pangreh praja, sehingga tidak ada pertentangan. Tentu saja karena jumlah orang-orang Jepang yang berada di Pemalang hanya sedikit, maka bendera Jepang di depan Kantor Kabupaten dapat diturunkan untuk selama-lamanya pada tanggal 10 September.[56] Pemalang memang lain, pangreh praja membentuk sendiri badan perjuangannya, Angkatan Muda Kantor. Seorang pangreh praja dan polisi dijadikan pemimpinnya oleh kaum elite birokrat setempat[57] dan keanggotan Angkatan Muda Kantor terbatas pada pegawai negeri setempat saja. Ketika pangreh praja Pemalang melangkah lebih jauh dengan mendirikan Gabungan Angkatan Muda Indonesia guna menguasai golongan perjuangan kota itu, API mencemoohnya karena dalam organisasi itu ia tidak pernah berfungsi.

---

[55] *Ibid.*

[56] Sugriwo Pujoutomo, "Ikhtisar Perjuangan Politik dari tahun 1940 sampai akhir 1949 di Daerah Pemalang Selatan," Catatan sendiri, 1 Mei 1974.

[57] Bupati Pemalang Raharjo, Pertanyaan No. 2, "Djawaban atas pertanjaan Paduka Toen (selanjutnya dikutip sebagai "Jawaban"), Proc. Gen.

Meningkatnya pertentangan antara kelompok pangreh praja, dengan golongan perjuangan di Pemalang, tercermin dalam kasus penculikan Supangat. Ketika itu memang tidak dapat dipastikan siapa yang merencanakan, namun jelas beberapa bekas anggota Peta terlibat dalam pelaksanaannya.[58] Ultimatum golongan perjuangan terhadap pangreh praja, polisi dan pembantunya, memaksa Supangat dikembalikan ke Pemalang tanpa cedera.

Peristiwanya sendiri kecil, namun membuat polarisasi lebih jauh antara golongan perjuangan dan pangreh praja. Supangat memang tokoh populer, punya reputasi berkat kejujuran dan ketulusan yang ditunjukkannya ketika mengelola koperasi Pekope untuk meringankan beban rakyat dari ekonomi masa perang. Sebagai anggota Partindo sebelum perang, ia disukai banyak orang, karena kebijaksanaannya yang luwes. Selagi umurnya 40 tahun (seperti tokoh-tokoh nasionalis tua Kartohargo dan Muhammad Nuh), ia pun sangat akrab dengan pemuda lapisan bawah dalam perjuangan revolusioner.

Tidak mengherankan, menurut bekas tokoh API, bahwa ketika Supangat dibawa ke bekas markas kompi Peta, dekat pabrik gula golongan perjuangan yang menyebutnya sebagai "Bapaknya rakyat," bahwa bila tidak segera dikembalikan, maka para penculiknya akan dihancurkan semuanya.[59]

Perasaan tidak senang terhadap pangreh praja semakin menebal sejak kasus itu, mungkin lebih kuat dibanding dengan di Brebes dan Tegal, di mana para santri tua tidaklah merupakan bagian dari kaum perjuangan seperti di Pemalang. Walau di depan umum pertentangan antara pangreh praja dan golongan perjuangan tidak mencolok seperti di Tegal dan Brebes, kasus Supangat telah melahirkan titik balik hubungan antara kedua kelompok itu. Hal inilah yang mengakibatkan tokoh-tokoh perjuangan Pemalang tidak mau berunding, meyakinkan masyarakat untuk tidak bekerja sama dengan pangreh praja.

---

[58]Termasuk Suntoro, komandan peleton kompi ketiga batalyon Peta Pekalongan yang memasuki batalyon TKI yang berkedudukan di Comal. Ironisnya, ia pula yang kemudian memimpin Kompi Pengawal Tiga Daerah ke Pekalongan.

[59]Bupati Pemalang, Pertanyaan No. 9, "Jawaban", 1946, Proc. Gen.

KNI: Komite Nasional Indonesia

Pada tanggal 22 Agustus 1945, Sukarno mengumumkan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kini menamakan dirinya Komite Nasional Indonesia (KNI). Dia pun mendirikan partai negara, PNI (Partai Nasional Indonesia), Badan Keamanan rakyat (BKR), dan KNI-KNI lokal. Dengan penangguhan pembentukan partai-partai pada akhir Agustus, KNI di setiap daerah menjadi "satu-satunya badan penghubung antara Pemerintah Republik dengan kekuatan-kekuatan rakyat di setiap tingkatan" pemerintahan.[60] Anthony Reid berpendapat, KNI-KNI itu merupakan kelanjutan dari cabang-cabang Hokokai pada masa perang dan sebegitu jauh merupakan organ elite nasionalis tua.

Bagaimanapun juga, peranan KNI di Keresidenan Pekalongan mencerminkan kenyataan-kenyataan di wilayah itu daripada di tingkat nasional atau propinsi. Sikap pasif pangreh praja terhadap Proklamasi berakibat timbulnya kekosongan kekuasaan. Para tokoh tua perjuangan memandang KNI sebagai pengganti aparat pemerintahan kolonial yang lemah dan tidak mampu bertindak secara bijaksana, dan dianggap berbahaya bagi kelangsungan berdirinya Republik. KNI-KNI adalah basis kekuasaan baru sebagai sarana bagi para pemimpin tua untuk dapat berunding dengan Jepang demi mendapatkan senjata, dan mengatur kegiatan pemuda. KNI juga menangani masalah ekonomi di banyak kawasan.

Keberhasilan KNI-KNI itu sebagian besar tergantung pada apakah mereka itu merupakan KNI angkatan yang ditunjuk oleh pangreh praja, atau KNI pilihan karena terpilih oleh dan di antara anggota-anggota perjuangan. Dari enam KNI tingkat kabupaten dan keresidenan, empat dipilih dan dua diangkat. KNI tingkat kabupaten dan keresidenan, empat dipilih dan dua diangkat. KNI Kotapraja Tegallah yang memainkan peranan penting, karena berhasil merundingkan penarikan kenpeitai dari Tegal. Ini terutama disebabkan karena dalam bulan menjelang meletusnya revolusi sosial (7 Oktober 1945), ketua KNI, Ki Citrasatmaka, guru sekolah Taman Siswa, mendapat dukungan dari tokoh-tokoh radikal senior dalam barisan pelopor, Negen Broe-

[60]Reid. *National Revolution*, hlm. 34.

ders, dan golongan Islam. Menurut pandangan salah seorang anggota Negen Broeders yang menjadi anggota KNI Kotapraja Tegal: "KNI-lah yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia di Kotapraja Tegal, karena pejabat-pejabat pangreh praja dan polisi tidak tegas, bersikap ragu-ragu. KNI-lah yang harus menghadapi tentara Jepang pada waktu perebutan/penyerahan senjata."[61] Anggota Barisan pelopor berpendapat bahwa KNI itu sebuah tempat yang menghimpun anggota-anggota perjuangan setempat bila ingin bertemu. KNI adalah sebuah badan tempat suara rakyat dapat didengar dan diarahkan. Ketua KNI sendiri berpendapat, selama tugas utama KNI Kotapraja adalah keamanan, maka KNI gabungan kabupaten dan kotapraja di bulan Oktober telah mengisi kekosongan kekuasaan sebagai akibat revolusi sosial.

Apakah KNI-KNI itu kemudian merupakan hal yang unik dalam sejarah politik revolusi? Lain dengan Pemalang, Tegal tidak mempunyai tokoh seperti Supangat yang mempunyai kewibawaan karismatis sehingga mampu mempersatukan semua kelompok perjuangan. Yang ada hanyalah KNI (kemudian Badan Pekerjanya) yang memainkan perannya di Tegal dan menempa terjadinya kerja sama semua kelompok. Salah seorang anggota Negen Broeders menuturkan kenangan:

> Pada mulanya setelah Proklamasi seolah-olah orang-orang pergerakan melepaskan kepercayaan ideologisnya dengan partai maupun organisasinya masing-masing dan dapat menerima panuh KNI sebagai pusat pimpinan revolusi daerah. KNI dianggap sebagai dapur yang memasak segala masalah, baik masyarakat maupun pemerintahan, seolah-olah kesibukan kantor-kantor pemerintah beralih ke kantor KNI. Orang lebih suka dan merasa bangga memasuki kantor KNI daripada kantor-kantor pemerintahan, sehingga kantor KNI terbuka siang dan malam.[62]

Jenis KNI yang kedua adalah KNI angkatan. Contoh yang menonjol adalah KNI Pemalang. Di Pemalang, KNI terdiri dari pejabat-

[61]Negen Broeders, Wawancara 8.11.75. Kadarisman, "Riwayat Perjuangan," tertanggal 11 Januari 1978 (catatan sendiri).

[62]Bupati Pemalang "Jawaban," 1946, Proc, Gen, hlm. 6.

pejabat tinggi, nasionalis-nasionalis tua moderat dan tokoh-tokoh Muslim konservatif yang ditunjuk oleh sidang kabupaten. Sidang itu dihadiri anggota KNI Pekalongan sebagai wakil Kantor Residen, tapi anggota perjuangan Pemalang tidak hadir. Supangat, yang tidak hadir, juga ditunjuk "memimpin bagian penerangan," tetapi ia menolak.[63]

Ketidaksenangan kaum perjuangan di Pemalang terhadap KNI timbul karena KNI daerah selalu didominasi oleh pangreh praja. Ini tercermin dalam sikap Bupati Pemalang, R.T.A Raharjo Sosro Adikusumo, yang menganggap tugas KNI daerah adalah "bekerja sama dengan pemerintah setempat dan memenuhi keinginan rakyat, yaitu hidup di alam kemerdekaan." Tugas utamanya yaitu "menjaga keselamatan dan ketertiban rakyat" dan membantu pangreh praja setempat dalam pekerjaannya "memperbaiki kesejahteraan rakyat." Karena itulah sudah selayaknya kalau yang dipilih sebagai ketua KNI Pemalang seyogyanya dari pangreh praja, kata Bupati. Tuntutan ini "agar tindakan-tindakan KNI segaris dengan pemerintahan." Bupati Pemalang berpendirian bahwa fungsi utama KNI adalah "menenangkan rakyat."[64]

Supangat kaum nasionalis Pemalang, dan kebanyakan warga kabupaten berpendirian sebaliknya. Mereka berpendapat KNI seharusnya berada di barisan terdepan perjuangan, membangunkan rakyat guna memenuhi panggilan Proklamasi dan Kemerdekaan. Tetapi KNI dalam kenyataannya tidak dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat, karena pangreh praja tidak bersedia mengibarkan Sang Dwiwarna lambang kemerdekaan.

Memang jumlah anggota KNI pilihan lebih banyak di Tegal daripada di Brebes atau Pemalang. Sebuah contoh pemilihan yang menarik yaitu di Pangkah, di mana pemilihan ketua KNI berlangsung dalam suatu sidang di kantor Kewedanan. Setiap lurah dari 53 desa dalam kewedanan itu harus hadir mengajak "lima orang tokoh masyarakat." Rapat dipimpin bekas camat. Setiap calon yang jumlahnya semuanya tujuh orang ditandai dengan nomor. Para pemilih me-

[63]Bupati Pemalang menceritakan mengenai pertemuan pemilihan KNI dalam Pertanyaan No. 6, *ibid.*

[64]*Ibid.*

nulis nomor calonnya di atas secarik kertas dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Sugiono, seorang guru pembantu dan yang termuda di antara tujuh calon berhasil terpilih sehingga dapat mengalahkan atasannya, yaitu kepala sekolah dasar setempat, dan tiga calon lainnya, yaitu pegawai pabrik gula yang juga anggota-anggota API. Menyadari dirinya muda (27 tahun) Sugiono berhati-hati dalam mengucapkan pidatonya, sehingga terdengarnya tidak revolusioner:

> Saya suruh mengucapkan terima kasih, kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya. Padahal saya yang paling muda. Maka oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin, para pemilih, khususnya kepada Bapak Wedana [yang lama] yang terhormat, kepada Bapak Asisten [Wedana] yang terhormat, terhormat, terhormat, terhormat.[65]

Pemilihan ketua KNI Pangkah melambangkan kemerosotan kekuasaan Wedana yang diperkirakan menjadi anggota gerakan VVV dan menerima uang untuk mensubversi Republik. Sugiono, ketua KNI, mulai dipanggil "Pak" Wedana oleh rakyat setempat. Keraguraguan Sugiono atas kesetiaan Wedana semakin kuat sewaktu ada jamuan makan siang seusai pemilihan bersama-sama dengan camat-camat Pangkah, Kedungbanteng, dan Jatinegara.[66] Dalam kesempatan santapan itu, Wedana mengatakan bahwa benarlah kemerdekaan itu, namun ia sedang menanti "majikannya yang lama" untuk kembali. Sugiono lalu melanjutkan ucapannya bahwa "majikannya yang baru" datang itu ialah KNI, lalu Wedana kelihatan tidak menyukainya.

Kegiatan KNI Pangkah mencerminkan peran ekonomi yang dimainkan beberapa KNI pada masa itu. setelah terpilihnya Bupati Tegal yang baru, Sugiono mengunjungi pabrik tekstil Tegal dan membeli kain dari dana KNI dengan "harga pantas" untuk dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada rakyatnya. Selain itu Sugiono juga mengangkat Kiai Umar "yang sangat berpengaruh" untuk menangani Seksi Penerangan KNI bersama seorang anggota BKR (yang juga anggota API) dan juga mengoordinasi para pemuda. Sebagai petugas penghu-

[65]Sugiono, Transkripsi II/25, 27.11.75.

[66]Tiga kecamatan ini termasuk Kewedanan Pangkah, dan memperlihatkan betapa mendalamnya kegiatan revolusi sosial di kawasan ini.

bung diangkat seorang bekas Inspektur Perumahan Program Pemberantasan Penyakit Pes yang berpengalaman dan pernah menjelajahi wilayah itu. Keberhasilan Sugiono lainnya yang menarik ialah pengawasannya terhadap pemilihan lurah di desa-desa dalam kewedanannya semasa revolusi sosial akan dibahas dalam bab berikut.

Kedayagunaan KNI-KNI setempat pada 2 bulan pertama tergantung atas beberapa faktor. Pertama, siapa ketuanya dan bagaimana caranya ia diangkat; kedua, sejauh mana KNI-KNI itu mempunyai fungsi ekonomi dalam mengambil prakarsa untuk meringankan beban penderitaan ekonomi rakyat yan masih berlanjut itu; ketiga, sikap pangreh praja.

Bagi KNI-KNI pilihan, tugas yang paling berat adalah masalah ekonomi, pembagian bahan sandang pangan yang tersedia dari Jepang.

Untuk rakyat fungsi ekonomi ini sangatlah penting dan memberi legitimasi rakyat kepada KNI. Boleh dikatakan KNI adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat pada waktu itu dan menjadi wadah kepemimpinan baru dari perjuangan revolusi kemerdekaan. Dengan sendirinya berdirinya KNI pilihan di kewedanan dan kecamatan menandai merosotnya kekuasaan pangreh praja, yang pada umumnya seperti Wedana Pangkah menanti "majikannya yang lama" (Belanda) untuk kembali.

Nasib Orang-orang Jepang

Di bulan September dan awal Oktober, nasib orang-orang Jepang di Keresidenan Pekalongan tergantung pada KNI-KNI kota. Hal yang masih menahan kekuasaan pangreh praja di Keresidenan Pekalongan hanyalah kehadiran Jepang, baik yang sipil di pabrik-pabrik gula maupun yang militer seperti satuan-satuan kenpeitai di Tegal dan Pekalongan serta garnisun *(keibeitai)* Kota Pekalongan. Beberapa insiden yang terjadi di daerah ini akan menjelaskan masalah itu.

Konfrontasi pertama Tegal terjadi di stasiun, ketika para aktivis kereta api dengan berani menurunkan bendera Jepang dan menaikkan bendera Merah-Putih di depan seorang perwira kenpeitai. Dengan gelora kemenangan menantang kenpeitai, kelompok pemuda itu menaiki dua truk dan berkeliling di kota, menurunkan bendera

Jepang di mana-mana dan akhirnya sampai di Balai Kota, yang gedungnya hampir berhadapan dengan asrama kenpeitai. Di tengah jalan kedua truk itu dihentikan oleh seorang petugas kenpeitai yang menyuruh agar para pemuda itu turun dan menuju ke asrama di dekatnya, Para pemuda itu menolak dengan tegas, sehingga terjadilah perdebatan sengit. Setelah diancam akhirnya pemuda-pemuda itu mengatakan bahwa mereka akan memenuhi permintaan itu apabila diizinkan oleh ketua KNI. Rupanya petugas kenpeitai itu setuju dan para pemuda diizinkan meninggalkan tempat.[67]

Sebelum para pemuda itu sempat menjelaskan kepada ketua KNI mereka sangat terperanjat dengan kedatangan 10 orang kenpeitai yang bersenjata lengkap itu. Kemudian ketua KNI, Ki Citrasatmaka, berunding dengan kenpeitai dalam suasana yang tegang. Kenpeitai marah-marah karena "telah mengadakan kampanye serta mengatakan bahwa kenpeitai tidak bersuara lagi".[68] Berita insiden ini cepat menyebar. Akibatnya dalam waktu 10 menit lebih dari 100 orang demonstran berkumpul di luar kantor KNI. Pesan yang disampaikan dari dalam gedung, yaitu aksi gegabah yang akan mengakibatkan pertumpahan darah, karena kenpeitai bersenjata lengkap. Selama perundingan berlangsung, situasi menjadi tenang, dan meskipun perselisihan telah terjadi, ketika rombongan kenpeitai itu meninggalkan KNI beberapa di antaranya membalas salam "Merdeka" para pemuda yang menunggu di luar gedung.[69]

Perasaan anti-Jepang di kota berkobar dengan hebatnya, lebih-lebih dengan tersiarnya berita ditangkapnya orang-orang Jepang, dibariskan dan kemudian dibunuh dipinggiran kota.[70] Sangat membahayakan bagi orang Jepang untuk bepergian ke luar kota, bahkan ke

---

[67]Penjelasan ini dikutip dari bagian IV Sejarah Kabupaten Tegal (tidak diterbitkan) yang berjudul "Tegal Pada Zaman Kemerdekaan" disusun pada tahun 1969 oleh Ki Citrasatmaka dan lain-lain (selanjutnya dikutip sebagai Sejarah Tegal). Juga Ki Citrasatmaka, Wawancara, 8.12.72.

[68]Ki Citrasatmaka, Bahan Penelitian," tulisan atas pertanyaan Sejarah Militer Kodam VII (Sendam) Semarang, hlm. 5, 18.11.61.

[69]*Ibid.*, "Sejarah Tegal."

[70]Menurut laporan yang diterima Barisan Pelopor, salah seorang Jepang itu adalah pejabat sipil dari galangan kapal, sedangkan yang lainnya adalah Asisten Residen Tegal, Marsum Hr. Ceriteraku, hlm.75.

luar rumah pun dapat dicegat dan dijebloskan ke dalam penjara oleh kelompok-kelompok pemuda setempat. Pabrik-pabrik gula menjadi sasaran utama aksi-aksi pemuda, karena pabrik tidak dijaga ketat, mudah memperoleh senjata-senjata yang disimpan di sana. Tapi keberhasilan pemuda dalam aksi-aksi pengambilan senjata dari pabrik gula tidak menjamin keberhasilan mereka menghadapi kenpeitai di kota.

Masalah diperuncing lagi dengan adanya berita pasukan Sekutu mendarat di Jakarta pada tanggal 30 September, dan ikut serta juga NICA, pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dibentuk tanggal 24 Agustus.[71] Desas-desus bahwa serdadu Belanda dan Ambon telah meneror rakyat di ibukota mendorong para pemuda mempertanyakan perannya:

> Karena [berita kegiatan NICA] itu "permainan" pemuda menaiktunkan bendera, pemasangan poster tiba-tiba menjadi tidak ada gunanya lagi. Musuh di depan ujung hidung kita [Jepang] harus dilucuti segera, kenapa kita harus berpangku tangan? Kedatangan NICA! Ini terdengar di mana-mana di kalangan para pemuda.[72]

Konfrontasi di Tegal mengakibatkan asrama kenpeitai dikepung selama satu minggu, akhirnya Residen Banyumas Iskaq datang membawa komandan kenpeitai Banyumas yang lebih tinggi pangkatnya untuk membujuk komandan kenpeitai Tegal agar menyerah. Akhirnya persetujuan secara damai tercapai dan kenpeitai meningalkan Kota Tegal.

Di Pekalongan penyelesaiannya berbeda. Penyerahterimaan senjata dari Jepang kepada pemuda telah menyebabkan beberapa senjata berada di tangan orang-orang sipil. Di Tegal, kenpeitai menolak untuk menyerahterimakan senjata tanpa perintah khusus dari markasnya di Purwokerto.

Menjelang bulan Oktober semua tentara Jepang, kecuali kenpeitai telah menyetujui serah terima senjata yang disimpan di Societeit, bekas gedung pertemuan Belanda. Ternyata beberapa senjata yang

---

[71]Kahin, *Nasionalism*, hlm. 143. NICA adalah singkatan "Netherland Indies Civil Administration."

[72]Ceriteraku, Marsum Hr, 1974 hlm.86.

diperoleh para pemuda secara ilegal dari penyerbuannya terhadap rumah-rumah orang Jepang itu tidak membantu lancarnya perundingan. Para aktivis kereta api menuntut kenpeitai menyerahkan senjata beratnya, yakni senapan mesin. Sedang pameran kekuatan keliling kota oleh kenpeitai yang masih terus berlanjut juga menjadi sumber ketegangan.

Pada tanggal 4 Oktober siang, rakyat berkumpul di depan markas kenpeitai. sesudah dua jam menunggu hasil perundingan antara Residen Besar dan kenpeitai, mereka itu tidak sabar lagi. Mr. Besar terpaksa keluar untuk menjelaskan kompromi yang telah tercapai; kenpeitai akan menghentikan aksi-aksi keliling kota, dan menyerahkan sejumlah senjata kepada polisi kota, supaya jumlah senjata polisi sama dengan yang dimiliki kenpeitai. Senjata itu harus disimpan di Societeit, sedang kuncinya yang satu dipegang oleh Residen Besar dan lainnya dipegang oleh komandan kenpeitai. Ini berarti pemuda tidak dapat mengeluarkan senjata tanpa seizin kedua penguasa itu. Kelompok pemuda kereta api menolak persenjataan ini. Mereka menghendaki penguasaan penuh atas senjata-senjata kenpeitai itu.

Pada saat Residen Besar akan memasuki kembali Kantor Keresidenan untuk melanjutkan perundingan, sekelompok orang bergerak, langsung menaiki pagar tembok pemisah asrama kenpeitai dengan Kantor Keresidenan tersebut.

Apa yang terjadi kemudian tidaklah jelas. Kenpeitai rupanya takut rakyat akan berhasil mendobrak memasuki markasnya. Pada saat itu seorang pemuda kereta api memanjat ke atas gedung kenpeitai dan menurunkan bendera Jepang.

> Tiba-tiba terdengarlah bunyi berondongan tembakan senapan mesin tertuju ke arah kerumunan orang... Sepucuk bambu rucing yang tajam tak ada gunanya menghadapi senapan mesin. Saya lemparkan bambu runcingku dan mulai merangkak memasuki Keresidenan. Terjadilah keributan di antara orang-orang Jepang. Saya melihat tiga orang Jepang telah ditikam dan dibunuh dengan bambu runcing... Sambil berlindung di bawah sebuah jendela Kantor Keresidenan, saya melihat Mr. Besar meloncati tembok... peluru berhamburan ke mana-mana, dengan mudah dapat membunuhnya... saya melihat seorang berada di atas atap gedung kenpeitai membawa minyak tanah dan

> berusaha membakarnya; darah telah mengalir dari luka di kepalanya... orang-orang Jepang itu sedang menembak tanpa tujuan ke siapa pun, kita harus bisa keluar secepat mungkin. Saya merangkak sekitar belakang Keresidenan, mendapatkan perahu dan menyeberangi sungai. Saya langsung menuju ke Kantor Pekerjaan Umum, dan menelepon Semarang dan Purwokerto meminta bantuan.[73]

Beberapa waktu kemudian bala bantuan pemuda datang dari Semarang membawa dinamit. Pengepungan dilakukan terhadap gedung kenpeitai oleh bekas Peta/BKR setelah Mr. Besar berhasil meloloskan diri.

Tidak seorang pun berani bergerak secara terbuka di depan sasaran senapan mesin Jepang yang masih dilatih untuk melukai dan membunuh musuh. Empat orang putri kemenakan Residen Besar dan dua putri Wedana Pekalongan diizinkan memasuki halaman beserta dr. Tupamahu dari Ambon (anggota KNI Pekalongan), untuk memberi pertolongan kepada yang terluka. Pada tahun 1973 dua dari mereka itu mengenangkan kembali betapa mengerikannya adegan ini:

> Kami berangkat dari depan Kantor Kewedanan. Dr. Tupamahu membawa bendera Palang Merah ukuran kecil yang biasanya untuk kendaraan. Enam orang dari kami berjalan lambat-lambat menuju kenpeitai sambil berharap peneropong mereka melihat bendera kami. Ketika sampai di depan barikade, Dokter Tupamahu menjelaskan bahwa kami dari Palang Merah dan ingin mengambil siapa pun dari pemuda itu yang mempunyai senjata kecuali bambu runcing. Mereka itu masih hidup [setelah pertempuran] walau perutnya kena tusuk, kadang-kadang dua orang direnteng dalam satu tusukan bambu, seperti sate, sungguh mengerikan! Mereka semua ditembak dadanya dengan senapan mesin. Tiba-tiba salah satu mayat itu berkata, "Tolonglah saya," Kakinya telah ditembak dan telah terkapar sepanjang siang hari di bawah terik matahari. Ia berkata,"Saya sudah mati seandainya hujan tidak turun semalam." Kami segera membawanya ke rumah sakit dan diperbolehkan untuk mengambil semua mayat guna identifikasi. Salah seorang putri saya jatuh pingsan begitu tiba di rumah sakit.[74]

[73]Sujono, Transkripsi VI/9, 29.7.73.
[74]Nyonya Meri Hugeng (istri bekas Kapolri), Wawancara, 1.8.73.

Pada sore hari berikutnya, Pekalongan memakamkan 32 orang korban pertempuran, termasuk beberapa orang Jepang.[75] Pada sore hari itu datanglah Residen Banyumas Iskaq Cokrohadisuryo disertai seorang penerjemah, Saburo Tamuro, dan Kapten Nonaka dari garnisun Banyumas untuk mengadakan perundingan dengan BKR yang dipimpin Iskandar Idris.[76] BKR menuntut gencatan senjata segera dimulai. Semua orang Jepang di wilayah Pekalongan harus menyerahkan senjatanya kepada BKR, dan setelah itu harus secepatnya meninggalkan wilayah keresidenan ini. Dua orang Jepang yang menyertai Residen Iskaq itu menyetujui persyaratan ini dan mengatakan akan berusaha melakukan kontak dengan opsir-opsir kenpeitai yang terkepung itu. Ini dilakukan sekitar pukul 9.00 malam. Setelah dua jam yang mendebarkan, seorang wakil Jepang bekas staf Shuchokan (Residen) datang ke Kantor Kewedanan dan memberi tahu bahwa kenpeitai menerima persyaratan itu. Perundingan langsung antara kenpeitai, Iskandar Idris, komandan garnisun Pekalongan, Kapten T. Oka, dan beberapa orang lagi berakhir dengan sukses pada tengah malam tanggal 6 Oktober.[77] Pada keesokan harinya personil militer Jepang yang masih tinggal di Pekalongan diangkut ke Banyumas dengan truk yang disediakan BKR. Di dalam persetujuan itu disebutkan bahwa orang-orang sipil Jepang berada di bawah kekuasaan Residen RI sampai didapatkan transportasi untuk mengangkut mereka ke Banyumas.

Keberangkatan orang-orang Jepang ini dengan baik telah diungkapkan kembali oleh seorang pejabat pemerintah:

> Setelah ini semua orang Jepang telah diangkut ke luar, meninggalkan hanya senjata-senjata tuanya yang tak dapat digunakan lagi. Tempat

[75] *Warta Berita*, 8 Oktober 1945.

[76] Penerjemah dalam perjalanan ini, Saburo Tamuro, kemudian menuliskan kesaksiannya mengenai tugasnya di Indonesia. Saya berterima kasih kepada Mr. Iskaq Cokroadisuryo yang telah memberikan kepada saya salinan dari kesaksian itu, tertanggal 26 September 1971. Yang berikut didasarkan atas versi Tamuro tersebut.

[77] Peranan Oka, pelatih (*shidokan*) senior Peta, mendorong mempercepat keberhasilan perundingan. Selama pertempuran dan pengepungan yang berlangsung selama dua hari sebelumnya, Oka menempatkan Garnisun Kota di baraknya, dan juga menasihatkan bekas-bekas Peta-nya mengenai taktik-taktik selama pengepungan.

kami adalah yang pertama di Jawa untuk membuang orang-orang Jepang itu. Saya merasa heran, kami sudah terbiasa mempunyai majikan-majikan kolonial, tetapi kini mereka sudah tidak ada lagi.[78]

Dengan demikian Pekalongan adalah daerah pertama di Jawa, bahkan di seluruh Indonesia yang bebas dari kekuasaan Jepang pada tanggal 7 Oktober 1945.[]

[78]Sujono, Transkripsi, VI/12, 30.7.73.

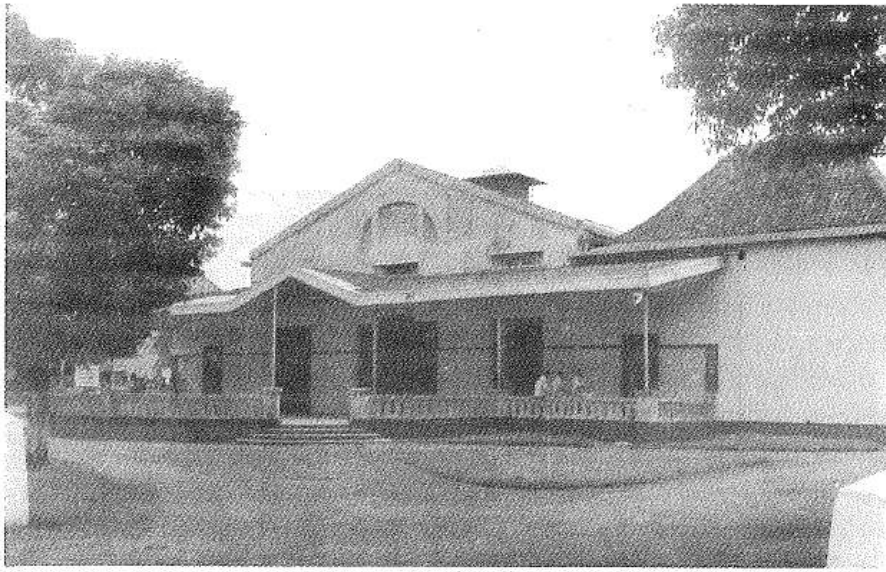

Gedung Societet, Tempat Penyimpanan senjata Jepang di Pekalongan

Kediaman Residen Pekalongan (1945)

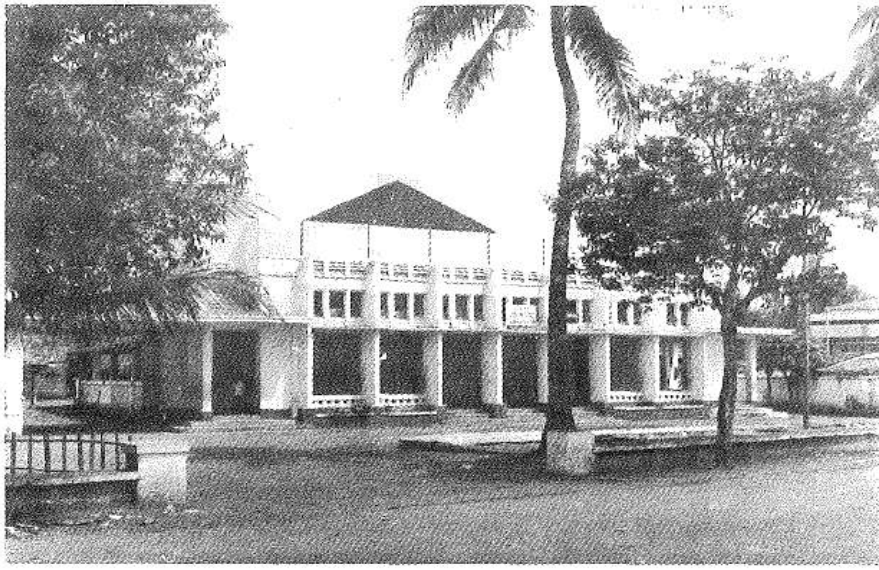

Bekas "Hotel Merdeka", Markas Tiga Daerah di Pekalongan (Desember 1945)

Balai Kota Tegal (1945)

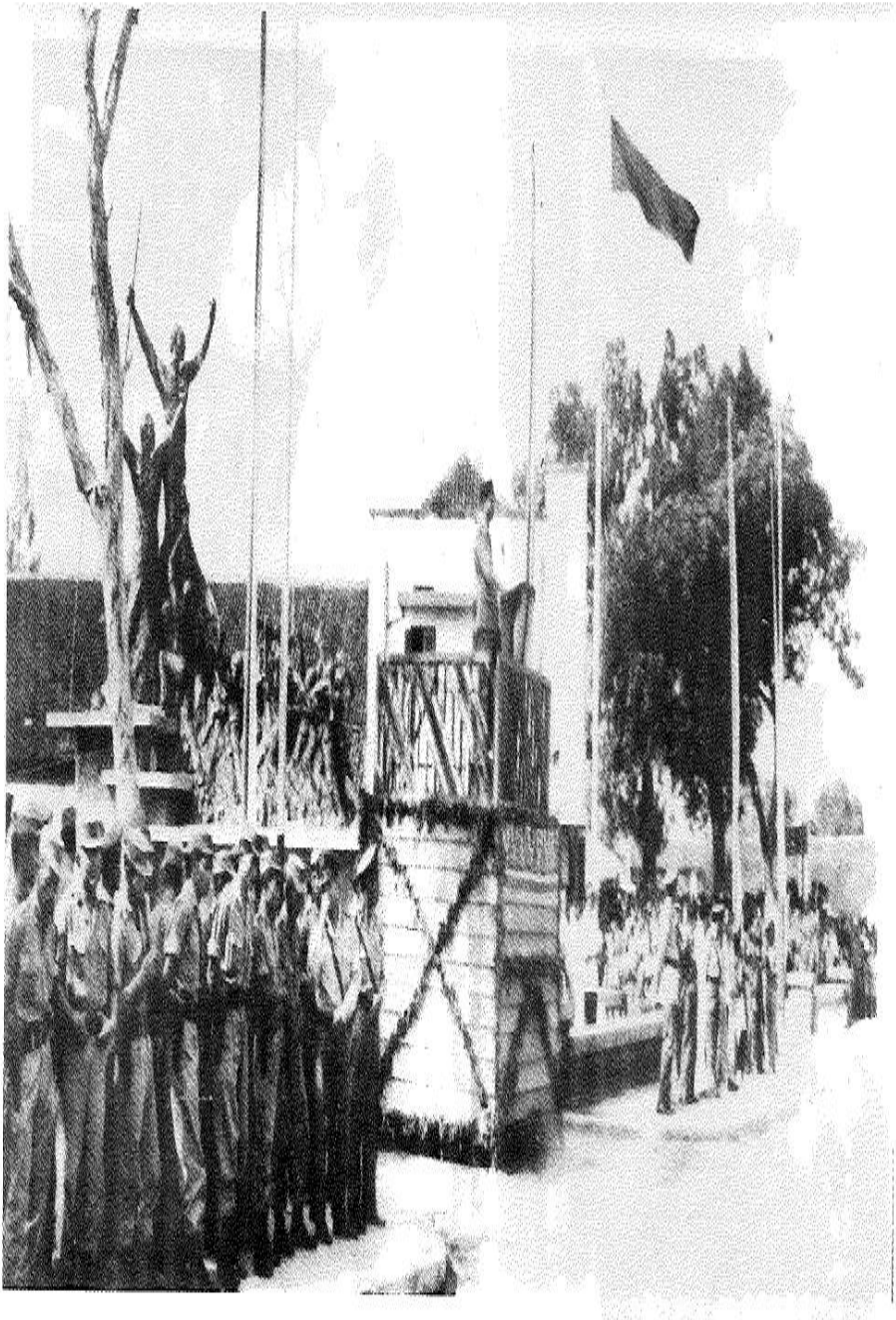

Peresmian Monumen Tugu Pahlawan 3 Oktober 1945 di Pekalongan, pada hari Kebangkitan Nasional 20 mei 1964

Markas Kutil di Bank Rakyat, Talang, Tegal, waktu Tiga Daerah

Markas Tentara Jepang di Tegal, bekas Kantor Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS)

Rumah Walikota Tegal

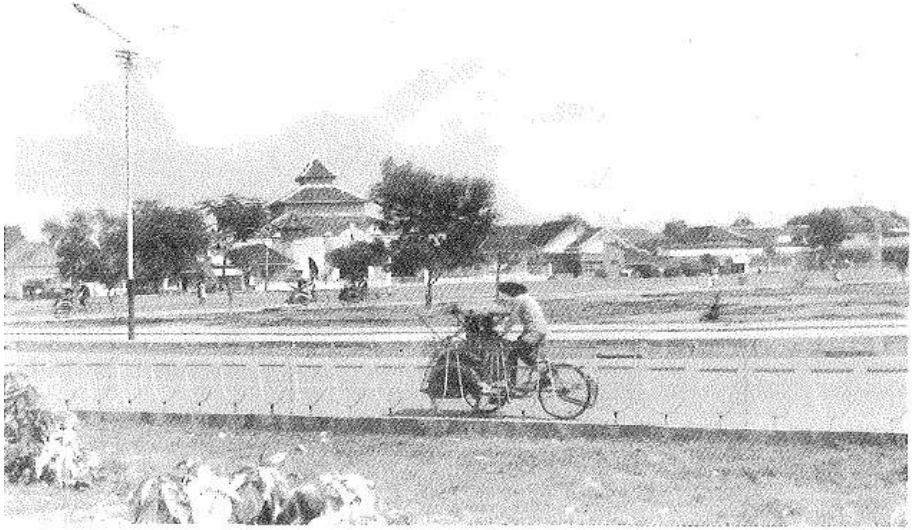

Alun-Alun Tegal

Masjid Randudongkal Pemalang Selatan

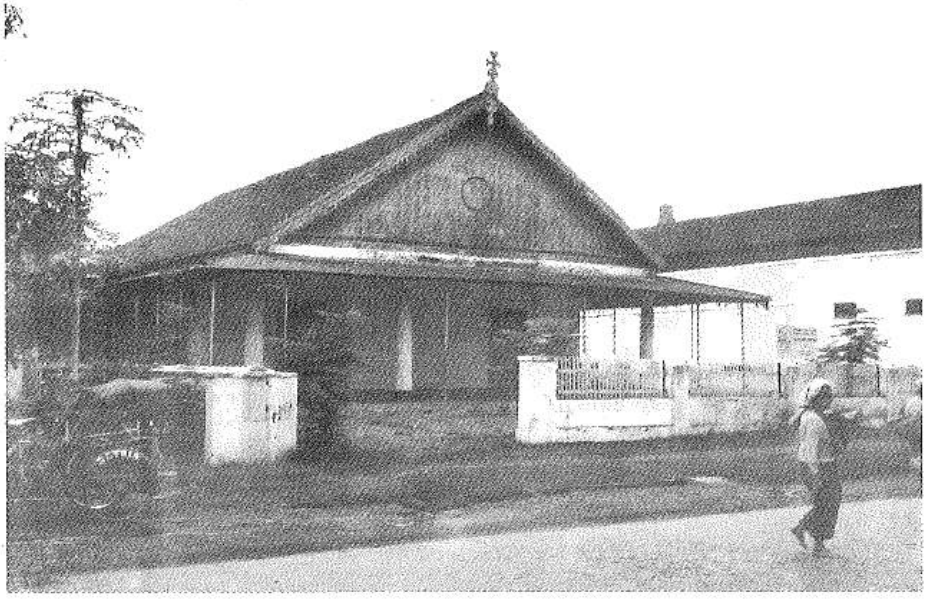

Gedung Chung Hwa, Chung Hwee di Pemalang

Ki Citrosatmoko, patih Tegal 1945

Kabupaten Pemalang (1975)

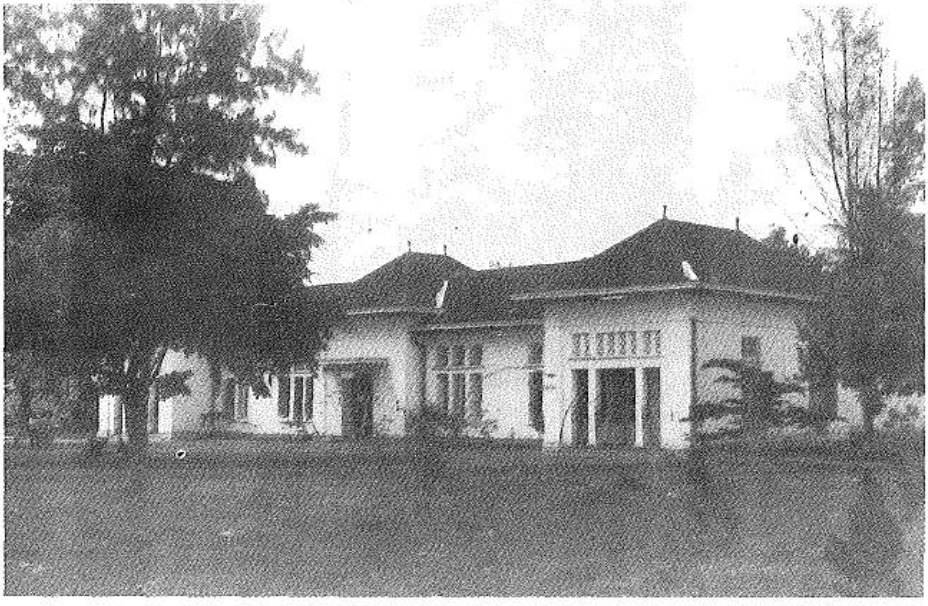

Pengadilan Pekalongan (1975)

Makam maling Aguna di Pemalang Selatan

Sarimin Reksodiharjo, Bupati Brebes (1945)

TOKOH-TOKOH REVOLUSIONER TIGA DAERAH DI PENJARA WIROGUNAN, YOGYAKARTA, SEKITAR DESEMBER 1946. Deretan belakang: Maksum, Soswijoyo, Muroso, Moh. Saleh, Suwito, Tan Jiem Kwan. Deretan depan: Sukirman, Suwignyo, Sukardi, Rustamaji, Khamidun, Sunyoto.

TOKOH-TOKOH REVOLUSIONER TIGA DAERAH DI PENJARA WIROGUNAN, YOGYAKARTA, SEKITAR DESEMBER 1946, Deretan Belakang: Khambali, Sakhyani (Kutil), Dr. Muryawan, Kromo Lawi, Mohamad Nuh, Supangat. Deretan Depan: Miad, Saleh Yusuf, Sapili, Moh. Salim, M - S. Widarta.

BAB LIMA

REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA

APA yang terjadi di tingkat lokal di Karesidenan Pekalongan dari awal Oktober 1945 sampai pertengahan Desember 1945 adalah meletusnya gerakan rakyat, yang umumnya dikenal sebagai revolusi sosial. Terjadi perlawanan rakyat yang bertujuan menghapuskan tatanan lama misalnya kepala-kepala desa, pamong desa, camat, dan wedana, serta pemerintahan kabupaten.[1]

Dalam memahami dinamikanya revolusi sosial di Tiga Daerah, harus diketahui bagaimana permulaannya, siapa pemimpinnya, apa yang terjadi dengan para pejabat tatanan lama yang dianggap ternoda oleh rakyat karena menjalankan kebijaksanaan pemerintah penjajah Jepang yang menindas itu, siapa yang menindas itu, siapa penggantinya, dan bagaimana cara kerja pemerintahan baru. Juga penting untuk diteliti khusus adalah peranan golongan setengah bandit yang dikenal sebagai lenggaong dalam menumbangkan pemerintah desa setempat.

Setelah terjadinya Proklamasi, kelaparan dan kekurangan yang dialami rakyat selama masa penjajahan Jepang tidaklah menjadi lebih ringan. Berton-ton padi yang disetorkan sehabis panen (Mei-Juni 1945) di Tiga Daerah, menumpuk di gudang-gudang tak digunakan.

[1]Untuk jalannya revolusi di tingkat nasional, lihatlah Anderson, *Java*, hlm. 332-69. Reid membahas bagaimana mobilisasi untuk memaksa banyak lurah melepaskan jabatannya di Jawa dalam *National Revolution*, hlm. 59-68, khususnya hlm. 61-63. dalam studinya *The Blood of the People* (Kuala Lumpur, 1979), hlm. 218-45, Reid menganalisis secara terperinci "revolusi sosial" di Sumatera Utara, pada awal 1946.

Tuntutan rakyat desa agar padi itu dibagikan, sama sekali tidak ditanggapi oleh pamong desa maupun camat.

Ketegangan serupa itu dapat dengan jelas dilihat pada apa yang terjadi di Kecamatan Moga, Pemalang Selatan. Dalam suatu rapat pada awal bulan Oktober rakyat meminta agar padi dibagikan. Ketika itu camat sedang pergi, sehingga para pejabat yang lain tidak berani berbuat apa-apa, kecuali dengan penuh ketakutan memberi tahu rapat agar menunggu kembalinya camat. Wakil camat (Fuku Soncho), adik Bupati Pemalang, berusaha menenangkan suasana dengan ucapan, "Sedulur-sedulur, emut!" (Saudara-saudara, ingatlah). Rakyat yang berkumpul di situ menjadi marah dan melempari gedung dan tempat-tempat simpanan padi dengan batu. Akhirnya orang-orang itu bubar. Camat Moga kemudian berusaha memberi penerangan kepada rakyat, "Tenanglah! Pemerintahan akan mengatur semuanya. Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri."[2]

Di Tiga Daerah ketegangan-ketegangan serupa terjadi di mana-mana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan setempat sudah tidak punya waktu lagi untuk bertindak, karena pada akhir minggu kedua bulan Oktober, sudah terlambat untuk membagi-bagi padi. Revolusi sosial pun telah dimulai.

Revolusi sosial di Tiga Daerah mulai di Desa Cerih, daerah miskin penghasil singkong di wilayah perbukitan Tegal Selatan yang terkenal dengan pusat gerakan radikalnya sebelum perang.[3] Pada tanggal 7 Oktober malam hari, sehari setelah korban-korban akibat perlawanan dengan kenpeitai dimakamkan di Pekalongan, rumah "Den Mas" Harjowiyono, lurah Desa Cerih, dikepung oleh rakyat.[4] Rakyat mengancam akan membakar rumah itu, bila lurah tidak mau keluar. Pada pagi harinya, Raden Mas Harjowiyono akhirnya dengan pakaian resmi keluar menghadapi rakyat yang mengancam akan membunuhnya, dan menanyakan mereka apa kesalahannya. Ia dilucuti dan diberi pakaian goni, sedangkan istrinya diberi kalung padi. Kemudian suami

---

[2]Sekretaris Badan Pembantu Prajurit (BP2) Moga, Wawancara. 4.11.75.

[3]Desa Cerih merupakan tempat kediaman beberapa tokoh Sarekat Islam sebelum tahun 1926, termasuk Haji Muklas ayah kandung M.H. Lukman.

[4]Di Tiga Daerah hanya beberapa lurah yang memakai gelar Raden Mas, gelar kebangsawanan Jawa.

istri ini diarak, diiringi bunyi gamelan milik lurah, yang melambangkan kedudukan dan kekayaannya. Sesudah diarak, mereka dihina dan diperlakukan seperti ayam, dipaksa minum air mentah dalam tempurung kelapa dan makan dedak (kulit padi). Kemudian Lurah dan keluarganya ditahan di Kecamatan, agar para pemimpin perjuangan setempat, termasuk camat baru (karena camat lama sudah kabur), dapat mengawasinya.[5]

Aksi rakyat Desa Cerih yang mengarak lurahnya itu memberikan suatu contoh tentang pola aksi yang kemudian terjadi di mana-mana di Kabupaten Tegal dan Pemalang. Aksi-aksi semacam ini oleh rakyat setempat disebut "dombreng," kata yang berasal dari kata "tong" dan "breng," dua bunyi kata Jawa yang menggambarkan pukulan pada kayu atau kaleng kosong, kentongan kosong kayu (atau apa saja) yang dipukul oleh para pengaraknya. Bunyi kentongan tergantung pada jumlah dan irama pukulannya. Di desa Jawa, di tempat lurah biasanya ada tabuhan yang disebut kentongan yang dibuat dari potongan kayu besar dan dilubangi, sehingga apabila dipukul keluar bunyi "thong." Dari kata "thong" ini lalu timbul nama "kenthongan." Bunyi kenthongan biasanya yang dipakai sebagai tanda-tanda waktu rapat desa, kebakaran, pencurian, atau tanda bahaya lainnya. Memang arak-arakan "dombreng" yang diiringi bunyi kentongan tanda pencuri itu dimaksudkan untuk menyiarkan berita bahwa mereka telah menangkap pencuri dèsa, maksudnya pamong desa yang korupsi itu.[6]

Peranan Lenggaong dalam Revolusi Sosial

Pengaruh lenggaong dalam revolusi sosial Tiga Daerah memang jelas. Merekalah yang memimpin aksi *dombreng* dan menyerang lurah-lurah semasa revolusi sosial di bulan Oktober. Dalam kekosongan kekuasaan selama revolusi sosial, mereka cepat bertindak terhadap pejabat korup, khususnya lurah-lurah. Peranan lenggaong di Pekalongan tadi bukanlah hal yang luar biasa, karena istilah lain di daerah yang terkenal untuk lenggaong ialah jago. Seperti halnya di daerah Jawa

[5]Putra Sulung Lurah Cerih, Wawancara, 13.2.75.
[6]Makna *dombreng* dibahas lebih lanjut dalam bab 7.

Barat, rasa kebencian rakyat terhadap pangreh praja dan lurah-lurah "jago-jago Republik" yang ingin membalas dendam atas perlakuan para pejabat semasa penjajahan Jepang dan berusaha merebut kekuasaan sewaktu ada kekosongan. Meskipun akhirnya seperti yang terjadi di Tiga Daerah kemudian, mereka ditindak oleh Tentara Republik (TKR).

Kaum lenggaong di Tiga Daerah merupakan penggerak revolusi kemerdekaan di pedesaan pada bulan Oktober 1945, juga mempelopori perlawanan terhadap elite birokrat yang dianggap korup dan mengambil alih pabrik gula yang dikuasai oleh Jepang.

Contoh yang menarik dari kelompok lenggaong di Tiga Daerah adalah Barisan Cengkrong (*arit*) di Daerah Comal. Tokohnya, yang terkenal bertahun-tahun, bernama Idris, sedangkan wakilnya Tarbu, adalah seorang buruh tani. Kelompok ini sering makan di warung-warung pinggir jalan tanpa bayar. Kelompok ini mengangkat Ilham, seorang guru desa dan bekas anggota Sarekat Rakyat, sebagai penasihat politik. Hal ini mencerminkan ciri penting hubungan kaum lenggaong dengan kaum pergerakan radikal tua yang terdiri dari para guru sekolah, dan bekas anggota Sarekat Rakyat dan Sarekat Islam. Hubungan baik ini sudah dirintis sejak tahun 1920. Barisan Cengkrong menahan lurah Desa Temureng, memecat lurah Petarukan yang korup, dan membagi-bagi tekstil yang kedapatan dalam kasur-kasurnya. Dengan algojo Haji Dimyati, Barisan Cengkrong mengambil alih pabrik gula Petarukan, tetapi bekas camatnya sempat bersembunyi dan berhasil lolos ke Pemalang.[7]

Pemimpin revolusioner dari generasi tua seperti Bupati Pemalang Supangat mengerti fungsi lenggaong dalam masyarakat pedesaan. Mereka juga memperlihatkan pengaruhnya dalam situasi yang penuh anarki pada waktu revolusi sosial bergolak, untuk menegakkan kembali wibawa pemerintahan. Sebagai contoh, seorang lenggaong yang menjadi lurah pada waktu revolusi sosial:

> Sahid adalah seseorang yang berani dan mempunyai kesaktian khusus, ia dapat menghilang dan senjata tidak mempan menembus kulit-

[7]Sekretaris Pesindo Kendalsari, Wawancara, 31.10.75; TranskripsiI/2, Maret 1975 (Saya menyampaikan terima kasih kepada Panji Suwarso untuk catatan ini dan sejumlah wawancara lainnya pada awal 1973.

nya. Ia seorang petani, dan mempunyai dua istri. Anda dapat mengatakan ia abanganlah. Ia tidak pernah membunuh seorang pun, tetapi pernah masuk penjara selama masa pendudukan Jepang. Ia termasuk ahli yang mahir seni bela diri silat, dan termasuk aliran Cimande. Ia ditunjuk menjadi lurah atas kehendak rakyat, dan laporan dibuat kepada bupati. Supangat, Bupati Pemalang berkata, "Karena orang ini adalah pilihan saudara sendiri, patuhilah segala perintahnya." Setelah Sahid menjadi lurah, keamanan desa terjamin.[8]

Kaum lenggaonglah yang mempelopori pembalasan dendam terhadap Cina. Bentrokan dengan kaum Cina di kawasan pedesaan, seperti pernah terjadi ketika ada kekosongan kekuasaan sebelum Jepang tiba, bulan Oktober 1945 terulang lagi. Awal Oktober di Kewedanan Randudongkal (Pemalang Selatan) seorang lenggaong dengan kelompoknya tiba untuk menuntut agar semua narapidana dibebaskan dan toko-toko milik Cina ditutup. Wedana meminta bantuan, dan dua truk penuh anggota kepolisian kabupaten datang dari Pemalang bersenjatakan bren (senapan mesin ringan). Situasi menjadi tegang. Seorang pimpinan perjuangan menengahi, dan mengatakan kepada komandan lenggaong itu bahwa:

> Ini bukan yang diinginkan Bung Karno. Ia menginginkan mempunyai hubungan baik dengan siapa pun. Karena itu lebih baik meminta kepada orang-orang Cina mengibarkan bendera Merah-Putih dengan bendera ukuran besar dan banyak lagi dari mereka. Saya bilang kepadanya agar jangan merusak toko-toko, tetapi meminta orang-orang Cina itu agar tidak menaikkan harga-harga.[9]

Dalam situasi demikian, orang-orang Cina yang telah mengenakan pakaian putih-putih karena mengira akan dibunuh lalu dipanggil berkumpul. Mereka menyetujui semua tuntutan kaum lenggaong.

Kutil

Daerah Talang-lah yang menjadi contoh yang terkenal selama revolusi sosial di Tiga Daerah. Pada zaman kolonial Belanda, Kecamatan Talang dikelilingi 4 pabrik gula, Pagongan, Pangkah, Kemanglen, dan

[8]Kurir Lasem, Wawancara, 18.10.76.
[9]Suleman, Wawancara, 15.11.75.

Ujungrusi, yang praktis memborong lahan rakyat yang ada untuk disewa. Rakyat yang tidak lagi memiliki lahan untuk bercocok tanam, mencari mata pencaharian lain. Kawasan ini terkenal dengan tukang emas, pengrajin kuningan, dan lain-lain kerajinan logam, seperti pembikinan pisau, gunting, dan suku cadang sepeda.

Sewaktu dalam perjalanan ke selatan untuk menjelaskan pernyataan pangreh praja yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan, dua orang pemimpin perjuangan Tegal, termasuk wakil ketua KNI Tegal dibunuh di Talang pada tanggal 4 November. Ada pula yang ditangkap dan dibunuh pada minggu yang sama. Siapa saja yang melewati Talang mendapat risiko kehilangan nyawa, demikianlah orang-orang percaya. Presiden Sukarno dalam pidatonya di Tegal dalam perjalanan kembali ke Jakarta pada pertengahan Desember 1945 menyebut Gerakan Tiga Daerah sebagai "Negara Talang."

Pada zaman revolusi sosial Kecamatan Talang terkenal terutama karena Kutil, jagoan rakyat Talang, yang kehidupan dan kematiannya telah dimitoskan oleh sejarah. Anggapan umum di luar daerah Talang, Kutil adalah algojo yang telah membunuh banyak orang, kejam, buas, anarkis, alat PKI, tapi ada juga yang beranggapan bahwa dia adalah agen NICA. Dalam sidang pengadilan Pekalongan, Kutil mengaku telah melakukan banyak pembunuhan, dan menurut pendukungnya hal itu dilakukan demi melindungi teman-temannya di Talang. Ia adalah orang pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman mati melalui proses pengadilan formal di Pekalongan. Peristiwa Tiga Daerah sering disebut sebagai "Gerakan Kutil."

Kenyataannya memang lain. Di Talang itu Kutil dikagumi, dihormati dan sekaligus ditakuti banyak orang. Setelah jatuhnya pemerintahan kolonial, seorang camat baru yang berasal dari kalangan Islam terpilih, maka rakyat pun dibagi bahan pakaian dan daerah itu pun bebas dari faksionalisme dan keresahan seperti yang masih berlanjut di lain-lain tempat.

Kutil, nama aslinya adalah Sakhyani. Kutil dalam bahasa Jawa berarti "bintil kecil" (menempel di kulit—*Peny.*) atau bisa juga diartikan "pencopet." Namanya disesuaikan dengan raut mukanya berbintil-bintil berwarna hitam. Sewaktu dia kecil memang mukanya berbintil-bintil, namun sesudah dewasa bintil-bintil itu hilang, tetapi

nama itu tetap melekat padanya. Kutil adalah anak kedua seorang pedagang emas dari Taman dekat Pemalang, dan menurut anggapan umum dia berasal dari Madura. Secara kelakar ia dijuluki "orang seberang," lantaran tidak tinggal di Talang, melainkan di Dukuh Pesayangan di seberang Sungai Gung. Begitulah agaknya asal mula timbul kekaburan mengenai julukan yang dikaitkan dengan asal dari Madura itu, sebab di Jawa orang Madura dan orang yang berasal dari luar Pulau Jawa disebut orang seberang. Selain itu orang-orang Madura di Jawa dianggap memiliki sifat yang keras, sehingga sesuai dengan perwatakan Kutil.

Sebagai anak yang nakal *bangor* (dalam logat Tegal), Kutil jarang menuruti kehendak orangtuanya. Menurut cerita, dia hanya memperoleh pendidikan sampai kelas dua sekolah rakyat, sehingga hanya bisa membaca dan menulis sedikit, sedangkan tulisan tangannya hampir tidak terbaca. Sesudah dewasa Kutil tiba di Talang dan menempati sebuah rumah di Dukuh Pesayangan yang telah dibeli ayahnya untuk cucu-cucunya. Lalu dia membuka tempat pangkas rambut di Desa Kajen yang terletak di pinggir jalan raya selatan Tegal, sambil meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai tukang emas kecil-kecilan di belakang tempat pangkasnya itu. Sebilah pedang panjang (*gobang*) tergantung di dinding di sebelah kaca,[10] dan tentu saja daripada berkelahi dengan Kutil, tukang-tukang cukur lainnya di desa itu lebih baik angkat kaki cepat-cepat.

Usaha Kutil lainnya ialah membeli barang-barang bekas di rumah-rumah untuk dijual kembali. Pada tahun 1937 Kutil mencalonkan diri dalam pemilihan lurah Desa Kajen, tetapi kalah "hanya satu suara saja."[11] Anak Kutil ingat bahwa ayahnya sebagai guru agama yang biasa bepergian jauh dengan sepeda untuk memimpin pengajian al-Qur'an, sering pulang ke rumah lewat tengah malam tanpa diganggu penyamun yang berkeliaran di kawasan itu. Dengan demikian tentulah ada hubungan antara Kutil dengan lenggaong setempat. Ia selalu mengucap "Assalamualaikum" bila memasuki rumah, kenda-

[10]Menurut keterangan Lurah Kajen. Wawancara, 9.2.73. Menurut anaknya, merupakan sebilah keris.

[11]Lurah Kajen, Wawancara, 9.2.73.

tipun tidak selalu menjalankan ibadah sembahyang salat lima kali sehari.[12] Penduduk setempat menyebutnya santri, menggunakan istilah itu dalam arti lama, yang berarti orang suci. Selama masa pendudukan Jepang, Kutil terkenal kebolehannya karena mudah memperoleh barang-barang yang sulit didapat, misalnya batu korek api.

Dalam bulan Oktober 1945, Kutil membentuk organisasi yang bernama AMRI, dan menggunakan Bank Rakyat Talang sebagai markas besarnya. Para pengikut juga masuk menjadi anggota AMRI. Di antaranya pedagang-pedagang, penjual makanan, penjahit, petani miskin, tukang besi, penjual jamu. Seperti badan-badan perjuangan lainnya waktu itu, tugasnya ditetapkan sendiri oleh Kutil, yaitu mencari sisa-sisa orang Jepang dan melucutinya. Kemudian melakukan pengejaran terhadap agen-agen NICA. Ternyata perasaan anti-NICA (dibahas secara lengkap dalam bab 6) sangat kuat di Talang.

Di Talang revolusi sosial mulai lebih awal daripada di tempat-tempat lain. Seorang anggota polisi setempat telah dibunuh sekelompok orang yang marah sepekan sebelum pembunuhan Camat Adiwerna. Menurut keterangan, peristiwa itu terjadi karena polisi tersebut secara tidak adil menangkapi pedagang-pedagang dan menyita barangnya. Menurut ketua KNI Talang, selama masa pendudukan Jepang, polisi itu (yang terbunuh) di samping tugas-tugasnya yang lain, agaknya menjadi mata-mata untuk kenpeitai. Kenpeitei biasa sering datang dan menculik orang yang dituduh secara gelap memperjualbelikan kuningan yang dilebur. Talang mempunyai sebuah industri kuningan (karena petani terusir dari tanahnya oleh pabrik-pabrik gula). Menjual kuningan yang dilebur adalah terlarang. Di Jakarta, harganya sangat mahal dan orang-orang Jepang membelinya. Beberapa kiai di Talang yang berdagang kuningan yang sudah dilebur sering ditangkap, termasuk seorang sahabat Kutil.[13]

Tujuan AMRI bentukan Kutil di masa revolusi sosial adalah pembagian kekayaan. Tujuan lain adalah menumpas setiap orang yang dicurigai menjadi agen NICA, yang dianggap sebagai pengkhianat

[12]Atau dalam kata-kata lurah setempat "setengah santri, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak."

[13]Ketua KNI Talang, Wawancara, 7.12.75.

Republik. Rumah-rumah bekas pegawai Belanda dan Indonesia dari pabrik gula Pagongan dirusak, karena dianggap salah satu lambang penindasan kolonial yang mereka benci. Selain itu rumah pedagang kaya (yang selama itu banyak tinggal di Jakarta) diambil dan dijadikan markas pemuda. Pedagang itu disuruh pindah tetapi diperbolehkan membawa harta miliknya.

Tanah bengkok Lurah Kajen seluas 4 hektar diambil Kutil, baru setelah TKR berhasil memadamkan revolusi sosial itu tanah itu dikembalikan kepada lurah. Hubungan Kutil dengan lurah itu cukup menarik, karena Lurah bisa menyebabkan Kutil marah gara-gara ia menenteng penggerebekan rumah pegawai yang memimpin Bank Rakyat selama pendudukan Jepang. Kemudian Lurah lari bersembunyi, ditemukan Kutil, lalu didombreng keliling daerah Pecinan Kajen. Kata Kutil kepada rakyat, "Biarlah ini menjadi contoh bagi kamu semua. Orang ini dulu sekutu saya, tetapi kini terbukti menjadi musuhku, ia tidak membantuku malahan bersembunyi!" Tetapi akhirnya lurah lolos dari tahanan di markas AMRI dan lari dari Kewedanan. Karena Lurah memang tidak terlibat korupsi seperti banyak lurah lainnya, kemudian ia dijemput oleh salah seorang pengikut Kutil, dan sejak itu ia sering menyertai Kutil kalau mengunjungi daerah-daerah di kabupaten itu.

Distribusi kain di Talang dan di daerah-daerah lain menunjukkan adanya keselarasan antara kemauan rakyat dan tindakannya, walaupun tujuan jangka panjang kelompok Kutil tidak jelas. Distribusi kain merupakan masalah paling mendesak waktu itu, karena kekurangan selama masa pendudukan Jepang menyebabkan rakyat terpaksa memakai baju yang terbuat dari goni dan serat pohon. Camat Talang mendapat 14 gulung tekstil, yang oleh KNI kemudian dibagikan.[14] Ketua KNI bermaksud hanya membagikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kutil tidak setuju, karena dengan demikian dapat timbul penyalahgunaan, dan menyangsikan kemampuan KNI untuk mengategorikan besarnya kebutuhan itu. Ia menuntut agar pembagian itu didasarkan atas asas "sama rata sama-rasa," yang dianggapnya jujur. Ini berarti di Talang

[14]Satu gulung waktu itu kira-kira sama dengan 41 meter.

setiap orang hanya akan menerima kain sepanjang 10 cm. Ketua KNI mencemooh pembagian semacam ini, namun Kutil dengan teguh mempertahankan pendiriannya.

Ketika penguasa baru memegang pemerintahan di kabupaten, panitia yang diketuai Kutil dibentuk untuk membagi-bagikan tekstil timbunan Jepang di pabrik gula di luar kota. Kain belacu dibagikan di kewedanan-kewedanan dalam kabupaten itu. Tak ada yang membayar untuk pembagian kain itu, tetapi juga tidak ada catatan tentang jumlah pembagian itu. Hanya dikatakan bahwa persediaan di pabrik harus dihabiskan, agar rakyat puas. Kutil memang bukan keturunan kaluarga berharta. Dia menggunakan kesempatan ini untuk hidup mewah di masa revolusi sosial. Hal ini terlihat dengan pengambilan tanah bengkok lurah Kajen, dan ke mana-mana dia selalu naik mobil Ford Mercury kuning delapan silinder bekas milik kenpeitai yang kemudian menjadi milik wakil ketua KNI, Marjono, yang terbunuh dekat Talang tanggal 4 November. Sopirnya seorang Cina berkata, "Saya tidak pernah menerima gaji karena Kutil terlalu miskin. Kalau kami makan di luar, selalu saya yang membayarnya. Kutil selalu pergi sendiri; ia duduk di samping saya di bak depan, dan membawa sepucuk pistol colt."[15]

Kutil merupakan perantara kelompok agama dan kelompok-kelompok lenggaong. Dia juga punya hubungan yang baik dengan kaum nasionalis yang berpendidikan Belanda. Seperti lenggaong pada umumnya, Kutil mendapat kekuatan magisnya dari seorang kiai terkenal. Kepada kiai inilah kelompoknya meminta nasihat dan mendapat azimat dan mantra. Kiai Makdum yang memiliki kekuatan istimewa dan dapat menyembuhkan orang sakit adalah teman Kutil. Para pemuda AMRI sering ke rumah Kiai Makdum untuk meminta minuman yang dimantrai dan bambu runcing yang diberkati. Banyak pemuda AMRI memakai selempang janur kuning sebagai lambang perlawanan dan pemberi kekebalan serta penangkal roh jahat. Karena langkanya senjata api (hanya dua orang tokoh AMRI lainnya di samping Kutil yang memilikinya), maka perlindungan semacam itu dirasa lebih penting artinya, baik bagi kaum lenggaong maupun bagi kaum

[15]Sopirnya Kutil, Wawancara, 21.2.73.

revolusioner.

Kutil juga berhubungan erat dengan para pemimpin AMRI Slawi dan sering mengunjungi markasnya. AMRI Talang punya kekuatan sampai ke luar wilayah Talang. Kutil dan kelompoknya menjemput Kiai Haji Abu Suja'i, Bupati Tegal yang diangkat pada tanggal 6 November, di rumah kediamannya di Desa Pacul, lalu mengawalnya ke ibukota kabupaten untuk dijadikan bupati. Kutil memperoleh kedudukan tertinggi ketika Badan Pekerja Tegal memerintahkan Kabupaten Tegal mengangkat Kutil sebagai kepala polisi kabupaten.

Hilangnya Pemerintah Pro-Kolonial

Tidak mengherankan apabila sikap "menunggu perintah" yang sudah menjadi pola elite birokrat di Keresidenan Pekalongan yang nampak masih kuat pada bulan September dan Oktober 1945. Hal ini mencerminkan sifat ragu-ragu, tidak berinisiatif dan sikap kepatuhan seorang abdi yang terpupuk oleh latar belakang pendidikan kolonial Belanda yang diperolehnya. Beberapa pemimpin perjuangan setempat berpendapat bahwa salah satu sebab timbulnya revolusi sosial disebabkan karena pangreh praja tidak mendapat informasi yang jelas dari pemerintah pusat dan propinsi mengenai kebijaksanaan politik Jakarta dan janji kerja sama serta saling menghormati antara pangreh praja dengan Republik yang diucapkan Sukarno dalam konferensi pangreh praja dari seluruh Jawa pada awal bulan September 1945. Tanpa perintah dan informasi yang menyangkut keinginan Pemerintah Pusat tentang pembagian beras, satu-satunya jalan yang mereka tempuh ialah menunggu perintah dari atasan.

Runtuhnya pangreh praja dimulai dengan beberapa peristiwa di Tiga Daerah. Telah kita lihat bahwa revolusi sosial atau istilah populernya "rakyat bergerak" dimulai dengan tuntutan agar padi dibagikan, disusul dengan aksi *dombreng* di Desa Cerih, Tegal Selatan, yang kemudian meluas ke daerah lain termasuk Moga (Pemalang Selatan). Di sana Kiai Said memimpin *dombreng* "pencuri" dengan membawa keris sakti Mandirejo, lambang semangat Jawa yang tak sudi dijajah,[16] dengan dipayungi umbul-umbul sambil memasuki ha-

[16]Candi Mandirejo merupakan sebuah makam keramat di Kecamatan Moga.

laman Kantor Kecamatan. Kiai Said telah menggunakan muslihat yang cerdik dengan *mendombreng* seorang "pencuri" untuk menipu camat agar keluar menemui rakyat. Camat yang mendengar bahwa ada orang dituduh mencuri jagung, sambil menegur rakyat berkata, "Seharusnya kalian menyerahkannya kepada Lurah." Rakyat serentak maju dan salah seorang di antaranya memukul muka Camat dengan kapak. Camat kemudian lari dengan berlumuran darah; ia terkena lemparan batu dan jatuh tersungkur di lumpur, tapi akhirnya dapat lolos. Tiga puluh tahun kemudian, ia menuturkan kejadian ini:

> Seseorang menyembunyikan saya di belakang lesung, setelah berbaring di sana beberapa jam lamanya seorang tetangga menyelundupkan saya ke dalam sebuah lumbung padi yang berdekatan. Saya tertidur sebentar dan tentunya lalu tak sadar sama sekali sampai kira-kira pukul enam pagi hari berikutnya. Kemudian saya merangkak ke luar dan berjalan sepanjang jalan menuju Pemalang, tetapi setelah beberapa waktu saya jatuh pingsan lagi. Untunglah seseorang membawa saya ke poliklinik setempat dan kemudian ke Pemalang.[17]

Pada hari itu juga di Moga tampak sebelas rumah diserang. Rumah-rumah yang diserbu tadi adalah milik orang-orang yang bertanggung jawab atas penggilingan beras untuk koperasi. Rumah-rumah yang diserbu itu adalah rumah kepala sekolah yang beragama Katolik, mantri pasar, Cina dan pemimpin Kakyo Sokai setempat,[18] sedangkan rumah-rumah yang lain adalah milik orang-orang yang bertanggung jawab dalam program penanaman pohon jarak, pengawas pembagian minyak tanah (yang ditukar dengan biji jarak), mantri kesehatan, Lurah dan azacho (kepala lingkungan RK) dan rumah seorang kiai yang duduk dalam panitia Jepang yang mengurus pembagian barang. Tidak ketinggalan Kantor Kecamatan juga kena serbuan.

Orang yang mempunyai darah Mandireja tidak pernah bekerja untuk Belanda. Terdapat kepercayaan bila seorang pejabat siapa pun melihat keris yang bernama Kiai Pokal, maka ia akan kehilangan jabatannya. Ketua BP2 Moga, Wawancara, 4.11.75.

[17]Wawancara, 2.11.71.

[18]Di Moga, Kakyo Sokai (Chung Hua Chung Hui dalam bahasa Jepang), Perhimpunan Cina Perantauan, digunakan untuk membantu pembagian kebutuhan pokok sehari-hari.

Dari Moga, rantai aksi rakyat terhadap elite birokrat itu meluas dan umumnya menuntut agar padi segera dibagikan. Wedana Belik, di sebelah selatan Moga, meminta kepada mereka yang menuntut pembagian padi yang telah mereka jual dengan terpaksa itu, agar mereka sendirilah yang menyelesaikan urusan itu. Dia tak mau campur tangan tanpa perintah dari atasan.

Di beberapa daerah, revolusi sosial timbul karena didorong faktor dari luar. Orang-orang yang ditindas atau dirugikan oleh pangreh praja semasa pendudukan Jepang pergi ke daerah yang masih tenang dan mengejar pangreh praja serta *mendombrengnya*, bila mereka tidak lagi bertindak sesuai dengan kemauan rakyat. Ada pangreh praja yang bisa lolos, ada yang tidak, di antaranya Camat Lebaksiu (Tegal Selatan), yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan surplus padi yang dikumpulkan dengan paksa oleh Jepang itu. Camat Suhodo menghadap Wedana Slawi, untuk membicarakan masalah itu. Jandanya menuturkan apa yang terjadi:

> Pada waktu dia mau datang ke Slawi, merunding... supaya rakyat tidak begitu muluk [resah], padi mau dibagikan. Pukul 9.00 pagi habis sarapan pagi kita berangkat (saya mau ketemu dokter) [karena hamil tua]. Di daerah Kajen [Lebaksiu] kita dicegat oleh rakyat. Saya bawa tiga anak, empat, tiga, dan dua tahun. Suami saya dibunuh dengan bambu runcing. Ada yang menolong saya ke rumah Haji Nahwari di Lebaksiu. Barang-barang di rumah dirampas rakyat, saya tidak pulang lagi ke Kecamatan. Baru kemudian kita ketemu makamnya suami saya. Sore pukul 4.00 (kami) dijemput ketua BKR dibawa ke Tegal ke kemenakan.[19]

Orang-orang yang menyergap Camat dan keluarganya itu dipimpin oleh dua lenggaong Bugel dan Suhar, yang kemudian pergi ke tempat Haji Toha yang sedang membagi-bagikan beras kepada kepala-kepala kampung atas nama KNI Lebaksiu:

> Kemudian datanglah Suhar dan gerombolannya... dengan mengamang-amangkan pedang berseru: "Siap terus gempur!" Pembagian beras belum selesai, lalu kita masukkan [padi] di gudang. Suasana

[19]Nyonya Suhodo Gondosasmita, Wawancara, 29.1.73. Menurut H. Toha, Camat Suhodo dipersenjatai dengan sebilah pedang samurai Jepang.

> sudah panik, karena si Suhar pegang pedang terhunus, mau menuju ke rumah Camat...[20]

Haji Toha bertindak cepat dan menggunakan kekuasaannya sebagai kepala keamanan BKR untuk mencegah perampokan rumah Camat. Dia berhasil membujuk lenggaong. Semua milik pribadi Camat supaya disimpan di ruang sekolah rakyat sampai situasi mereda, dan barang-barang itu dibagi-bagikan, kemungkinan keesokan harinya. Setelah mendapat jaminan tokoh KNI itu, para lenggaong pergi. "Di rumah Camat itu terdapat empat kilogram peralatan makan dari perak dan setengah kilogram emas," kata Haji Toha, yang dipilih oleh KNI sebagai camat baru, dan mulai membagikan empat ton kedelai dan hampir 400 kilogram beras dari lumbung camat lama yang diperolehnya secara tidak jujur semasa pendudukan Jepang.

Contoh tindak kekerasan yang tidak terbendung itu terdapat di Kewedanan Adiwerna. Pada tanggal 10 Oktober Camat R.M. Suparto Sastrosuworo, yang muda dan belum berpengalaman, berbicara di depan umum di Lemahduwur, di depan makam kuno Tegalarum.[21] Ia mengatakan bahwa Presiden Sukarno telah ditahan oleh NICA yang baru saja mendarat bersama-sama pasukan Inggris di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Tampak berita-berita semacam itu memang telah didesas-desuskan di Jakarta. Setelah selesai pidato, Suparto tidak segera meninggalkan rapat dan ia dibunuh setelah rapat berakhir. Seorang guru setempat yang menyaksikan kejadian tersebut melukiskan:

> Mayatnya tergeletak di jalanan di depan rumah Lurah Lemahduwur. Ketika saya tiba di sana, tempat itu telah penuh orang banyak yang datang mengerumuni mayat itu, yang tergeletak di tanah bermandikan darah. Hampir semua orang membawa bambu runcing, ada juga yang membawa pedang dan senjata-senjata lain. Orang-orang menun-

---

[20]Haji Toha, Wawancara, 10.4.73. Haji Toha lahir di Tegal 1910, belajar bahasa Jepang dari K.H. Maufid Sidik tahun 1936. Tahun 1938 dia pergi ke Mekah, dan kembali ke Jawa tahun 1940. Selama pendudukan Jepang ia bekerja sebagai kontraktor. Dalam bulan Oktober 1945 ia dipilih sebagai Camat Lebaksiu dan pada tahun 1948 jadi Camat Kramat.

[21]Tegalarum adalah tempat pemakaman Sultan Amangkurat II, begitu juga seluruh keluarga Reksonegoro, Bupati Tegal turun-menurun.

jukkan betapa marahnya mereka dengan menendang dan meludahi mayat tersebut yang kotor oleh debu... mukanya tidak dapat dikenali lagi.[22]

Pembunuhan camat ini menandakan perubahan pemerintahan kolonial di Kawedanan Adiwerna. Wedana sangat ketakutan mengetahui bawahannya dibunuh, sehingga dengan tergesa-gesa ia pergi ke kota kabupaten yang dianggapnya lebih aman beserta harta miliknya. Dalam perjalanan melewati Markas API di Kejambon, cikar gerobaknya dihentikan dan barang-barangnya berupa bahan pakaian, dirampas. Begitu juga perabotan rumah tangga dan barang-barang lainnya. Sisa pemerintahan kewedanan segera mengikuti contoh wedana. Pejabat pemerintah, pangreh praja, guru, polisi, dan lurah-lurah semuanya lari cerai-berai, dan tak ada yang tahu ke mana harus melarikan diri.[23]

Slamet (23 tahun) anak sulung Wedana Adiwerna mendapat surat dari pimpinan API yang mengatakan bahwa harta milik keluarganya dapat diambil di Markas API Kejambon. Dengan sebuah truk pinjaman dari Kantor Kabupaten, Slamet berangkat ke Markas API dan ia tak pernah kembali.[24] Keadaan sepanjang jalan utama ke Adiwerna waktu itu sepi sekali. Tidak ada kendaraan lewat, karena di setiap 25 meter ada rintangan jalan dari kayu atau bambu; di pinggir-pinggir jalan banyak orang dan anak-anak yang membawa bambu runcing. Semua orang yang lewat harus memberi salam "Merdeka" kepada mereka. Di setiap pos jaga terkumpul meja kursi dan barang-barang rampasan dari orang-orang Cina yang melewati pos-pos itu.[25]

Brebes

Perkembangan revolusi sosial dan perubahan pemerintah di Kabupaten Brebes, berlangsung lebih lunak dibanding dengan daerah

[22]Raden Sungkono Wiryosusanto, "Riwayat Hidup," Catatan sendiri, buku I hlm. 76-77. (selanjutnya dikutip "Riwayat").

[23]Sungkono, "Riwayat," Buku I, hlm. 84.

[24]Nasib anak wedana ini tidak diketahui sampai 3 bulan. Ia dikuburkan di antara dua korban revolusi sosial, Sidik, adik laki-laki [pemimpin API Mansur, dan Khamzah, anak laki-laki R.M. Abu Bakar, seorang pokrol bambu. Wedana Adiwerna, Wawancara, 13.2.73.

[25]Sungkono, "Riwayat," Buku I, hlm.84.

Tegal dan Pemalang. Tidak seorang camat pun terbunuh di kabupaten ini. Bila pejabat baru ternyata pernah terlibat dalam penindasan ekonomi Jepang dan dukungan rakyat tidak kuat, ia segera diganti. Sebagai contoh, Camat Banjarharjo. Ia mengangkat dirinya sebagai wedana setelah memaksa wedana lama menyingkir ke luar daerah. Tetapi wedana baru ini tidak diterima oleh para pemimpin Islam setempat, karena hubungan dekatnya dengan kenpeitai, sehingga dia didaulat untuk keluar daerah setelah dua minggu memangku jabatan wedana.[26]

Di Ketanggungan Barat, yaitu di sebelah utara Banjarharjo, terdapat bekas tanah partikelir (*particuliere landerijen*). Ketika Jepang datang, wedana diganti dan tanah itu digunakan untuk penanaman tebu oleh Jepang.[27]

Pemuda Pesindo yang radikal mengambil pabrik gula sebagai markasnya, dan memasang tanda "Milik Negara."[28]

Wedana Bumiayu juga diganti tanpa kekerasan, ketika datang keputusan dari Brebes yang memberitahu bahwa wedana dan para camatnya akan dibebastugaskan.[29] Wakil wedana ditahan dan dipaksa mandi di sungai. Sebelum masa pergolakan ini, ia selalu bersembahyang di atas permadani dan duduk di deretan depan bersama para kiai. Sekarang dia diantar dari penjara ke mesjid dan dijuluki "priayi di atas tabuh."[30] Sedang di daerah Losari, bagian barat laut perbatasan Brebes, para santri menempatkan orang-orang Islam yang tidak sembahyang lima waktu ke dalam usungan jenazah.

Pergantian Pangreh Praja di Tingkat Kewedanan dan Kecamatan

Pada minggu ketiga bulan Oktober 1945 seluruh elite birokrat di luar ibukota kabupaten telah *didombreng* di setiap daerah atau me-

---

[26]Pemimpin Islam. Wawancara, 6.12.75; Wedana Banjarharjo, Wawancara, 31.7.73.

[27]Anderson mencatat bahwa di tanah-tanah partikelir semasa pendudukan "beban kerja paksa sedikit diperingan, tetapi hakikatnya hubungan kerjanya tidak berubah; para petani di kawasan ini tetap tergantung segalanya pada belas kasihan para tuan tanah pada penguasa Jepang." "Pemuda Revolution," hlm. 274, catatan kaki 140.

[28]Pemimpin Pesindo Ketanggungan Barat, Transkripsi, 1/7, 13.4.73.

[29]Janda Wedana Bumiayu, Wawancara, 27.1.73.

[30]Wakil Camat (yang bekerja di kantor kewedanan), Wawancara, Nov. 1974.

Tabel 6
KOMPOSISI ELITE PENGUASA BARU DI TINGKAT KECAMATAN DAN KEWEDANAN DI TIGA DAERAH SETELAH "REVOLUSI SOSIAL"

Kabupaten	Jumlah kewedanan dan kecamatan	Jumlah yang mengalami perubahan	Pejabat baru				
			Elite lama	Elite baru			
			Pamong desa dan pejabat lainnya	Nasionalis agama	Guru desa	KNI/pemimpin perjuangan lainnya	lainnya
Pemalang	17	16	3		3	1 1	3 wedana 1 camat tetap 1 wedana kembali 4 tidak pasti
Tegal	25	25	4	11	7	2	1 tidak pasti
Brebes	21	20(?)	10	3	4	1	2 tidak pasti
Jumlah	63	61/97%	17/27%[1]	14/22%[2]	14/22%[3]	4/6%	12/20%

Sumber: data dari wawancara

1. Empat pejabat juga pemimpin KNI.
2. Kalau guru dan pemimpin KNI yang santri terhitung dalam kelompok ini, akan menjadi 28.
3. Tujuh guru juga pemimpin KNI.

larikan diri. Para pemimpin perjuangan setempat kini dihadapkan pada masalah bagaimana dan oleh siapa pangreh praja lama harus diganti. Tidak ada instruksi dari tingkat atas tentang cara memilih camat baru. Mereka harus memecahkan sendiri masalah-masalah itu. Apa yang terjadi di Tiga Daerah ialah bahwa pilihan pejabat baru langsung disahkan oleh Residen, Mr. Besar. Perubahan di kalangan elite birokrat tingkat kecamatan dan kewedanan seperti terlihat pada *tabel 6*. Jumlah terbesar para pemangku jabatan baru adalah dari golongan agama, guru sekolah, atau pemimpin perjuangan, sedang sebagian adalah pejabat lama. Tetapi di Brebes hampir separuh pejabat baru adalah dari kalangan elite birokrat lama. Boleh dikatakan bahwa Pemalang paling abangan, pejabat tidak ada dari nasionalis agama.

Kenyataannya revolusi sosial itu tidak hanya semata-mata menentang golongan aparat kolonial, tetapi juga bersifat antikorupsi seperti yang terjadi di Taman, kecamatan yang terletak antara Petarukan dan Pemalang. Camat Taman Gunodo Suryo, adalah satu-satunya camat yang dapat bertahan dengan selamat dari revolusi sosial di Tiga Daerah. Sebagai putra R.A.A. Suryo, Bupati Pekalongan, dia dan abangnya, Suryono Suryo, Camat Margasari (Tegal Selatan) termasuk camat bangsawan. Ia berhasil selamat karena dua hal. Pertama, karena ia tidak korupsi. Ia berusaha meringankan penderitaan rakyat Taman selama masa pendudukan Jepang dengan membentuk sebuah panitia. Dengan jujur panitia itu mengatur pembagian, dan dengan menggunakan jatah kain kecamatan dibuatlah celana pendek dan sarung guna dibagi-bagikan kepada rakyat yang terlalu miskin yang tidak mungkin mendapatkannya karena tidak mampu menyetor padi. Kedua, ia memiliki ketajaman politik yang cukup untuk menyadari bahwa pembagian beras adalah jalan terbaik untuk menenangkan gelombang pasang revolusioner. Ia mempunyai hubungan baik dengan dua keluarga tuan tanah Taman yang memiliki lebih dari 100 bau sawah dan mempunyai simpanan 200 ton beras peninggalan dari masa pendudukan Jepang. Atas desakannya sebagai camat, kedua keluarga itu sepakat membagikan beras bagi rakyat dan pemuda, dengan harapan bahwa camat akan melindungi milik mereka.[31]

[31]Santri Taman, Wawancara, 16.2.75.

Kalangan pemimpin yang menduduki kekuasaan itu mempunyai latar belakang sosial yang bermacam-macam. Misalnya camat baru Losari Brebes, Haji Tobari, sawahnya lebih dari 100 bau, tuan tanah terkaya di wilayah itu. Ia pernah belajar di Pesantren Termas (dekat Pacitan, Jatim) dan bergabung dengan PSII. Setelah kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Larangan, ia pun kemudian bergabung dengan NU. Ia ditunjuk dan diangkat oleh camat lama sebagai penggantinya setelah terjadi pembunuhan lurah. Camat lama menahan beberapa orang yang dianggap sebagai pembuat kerusuhan, tetapi pergolakan sosial itu tidak berhenti. Persoalan lain yang dihadapi sebelum melepaskan jabatannya, adalah pertentangan mengenai pembagian air; rakyat mengancam akan menghancurkan saluran irigasi. Menghadapi persoalan-persoalan semacam ini, camat lama merasa tidak mampu lagi menegakkan wibawa kekuasaannya terhadap penduduk yang "berbuat bebas."[32]

Di Tegal, pola kehidupan nasionalis Islam adalah para Kiai radikal yang tak punya tanah. Di antaranya ada yang pernah menjadi anggota Sarekat Rakyat dan pengaruhnya kuat sampai tahun 1926. Camat Tarub yang baru, Haji Zainuddin, berasal dari Dukuh Karangcegak, daerah Sarekat Rakyat dan PKI, tempat di mana pernah terjadi pemberontakan pada bulan Mei 1926. Banyak camat baru dari kelompok kiai radikal ini juga memimpin pesantrennya sendiri. Dari 22 persen pejabat baru di tingkat kewedanan/kecamatan dari berbagai kelompok nasionalis sebelum agama (dua wedana dan 12 camat) di Tiga Daerah, sembilan (yang riwayatnya diketahui) dipilih waktu revolusi sosial, dan pengalaman dalam pergerakan nasional sebelum perang serta ketidaksenangan terhadap pangreh praja mendekatkan mereka kepada cita-cita revolusi sosial umumnya. Kesembilan tokoh lokal ini lahir di Tiga Daerah, sebelum perang semua sudah belajar di pesantren di luar Keresidenan Pekalongan (lima di Tebuireng, Jombang, di bawah K. Hasyim Asy'ari). Di antaranya dua sudah naik haji ke Mekah. Sebelum perang semua telah menjadi guru, baik di pondok yang mereka dirikan sendiri maupun di sekolah Islam terkenal setempat. Pada waktu Zaman Jepang, sembilan tokoh Islam beker-

[32]Haji Tohari, Wawancara, 16.12.75.

ja pada Jepang di Kantor Agama, di Shu Sangi Kai (Dewan Penasihat Keresidenan) atau pemimpin koperasi, Hizbullah (pasukan Masyumi) atau Barisan pelopor.

Perubahan Kepemimpinan Desa

Peranan penting lenggaong terlihat kuat dalam perebutan pemerintahan di tingkat pedesaan. *Tabel 7* memperlihatkan hasil revolusi sosial tingkat desa di Tiga Daerah. Para lurah didaulat di sana dan kelompok-kelompok bersaing dalam memperebutkan kekuasaan, sehingga sering timbul dualisme dalam pemerintahan baru.

Tabel 7
KOMPOSISI ELITE PENGUASA BARU DI PEDESAAN DI TIGA DAERAH SETELAH REVOLUSI SOSIAL

Kabupaten	Jumlah desa	Jumlah lurah yang diganti	Lurah baru						
			Elite lama			Elite baru			
			Gol. Islam	Keluarga lurah lama	Pamong desa lama	Lenggaong	Guru/ pemimpin KNI*	Tani	Lain-lain
Pemalang	53	45	12	8	7	6	6		6
Tegal	25	20	6	4	2	3	1		4
Brebes	37	29	8		2	2	1	8	8
Jumlah	115	94 82%	26 28%	12 13%	11 12%	11 14%	8 9%	8 9%	18 16%

Sumber: Data dari wawancara di 7 dari 49 kecamatan.
* umumnya veteran pergerakan tahun 1926-an.

Di bulan Oktober 1945, 200 orang tanpa senjata mendatangi kantor lurah Bumirejo (Kecamatan Ulujami, Pemalang) dan menuntut agar lurah dan pamong desanya berhenti karena mereka telah membantu Jepang. Lurah dan pamong desa baru ditunjuk. Lurah baru adalah bekas guru sekolah dasar yang juga anggota Sarekat Rakyat. Ternyata mereka tidak bertahan lama; karena tidak ada kekuatan lenggaong di dalamnya. Dua hari kemudian, susunan pamong desa berubah dengan masuknya Siwad, anak lenggaong, sebagai sekretaris desa (carik).[33]

Beberapa faktor telah mendorong mangapa revolusi sosial di Bumirejo berlangsung tertib. Pertama, selama masa pendudukan tampaknya tidak ada penggeledahan padi; kedua, adanya kepemimpin-

[33]Siwad sendiri pada zaman kolonial pernah dijadikan carik (sekretaris desa), dengan pengharapan agar ia menghentikan aktivitas lenggaongnya.

an pergerakan yang kuat, yang mampu menanggapi tuntutan rakyat dengan cepat.

Berbeda halnya dengan apa yang terjadi di Desa Ambowetan.[34] Pertama, santri merupakan sepertiga penduduk desa. Kedua, tidak ada orang pergerakan, dan ketiga, desa ini sangat menderita semasa Jepang. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan rumah lurah dijarah, pakaian-pakaiannya diambil dan dibakar, dan tiang rumahnya dipotong. Sejumlah 200 kuintal padi dibagi-bagikan, dan hanya 20 kuintal berupa peninggalan dari noji, sedangkan sisanya adalah milik lurah pribadi. Setiap keluarga mendapat pembagian antara 40 sampai 70 kg padi. Orang-orang ini dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam, Bunyamin dan Darum, beserta Kastam, seorang lenggaong. Polisi desa, yang menjadi *azacho* (ketua RK) pada zaman Jepang, diusir dan lari ke Dataran Tinggi Dieng. Kepala dukuhnya[35] dengan luka di kepala dan air mata bercucuran *didombreng* keliling desa. Cariknya kehilangan seperangkat kursi, 5 kuintal padi, dan dinding rumahnya berlubang-lubang karena tusukan bambu runcing. Noji yang juga bekas lurah Ambowetan "konon memiliki kesaktian dan sebilah keris bertuah" menangkis serangan Bunyamin yang menggunakan alu penumbuk padi. Tetapi itu pun tidak mampu mencegah perampasan 25 kuintal padinya, yang diakuinya sebagai hasil penggelapan semasa Jepang. Ia kehilangan 40 kambing, yang akhirnya dikembalikan karena terbukti bukan hasil korupsi.[36] Sesudah huru-hara di desa itu lenggaong Kastam menjadi lurah, dan pamong desanya diisi kelompok lenggaong dan 2 santri pengikut Bunyamin.[37] Di Ambowetan

[34]Pemerintah Desa Ambowetan (seperti desa-desa lainnya di daerah Comal) terdiri atas kepala desa, carik, kepala dukuh (bau), dua orang polisi desa, dua kebayan, dan dua lebe (pejabat agama Islam). Desa-desa lain kadang mempunyai ulu-ulu (pejabat irigasi). Polisi desa itu tetap dalam jabatannya dalam pemerintah baru, begitu juga kakaknya menjadi kepala dukuh baru. Lebe yang baru adalah adik laki-laki pejabat terdahulu itu. Keseluruhan pamong desa yang baru itu diganti lagi oleh Belanda setelah Agresi Militer Pertama 1947.

[35]Dikenal sebagai bau desa di Keresidenan Pekalongan atau kamitua di Jawa Tengah bagian selatan

[36]Noji Ambowetan, Transkripsi 1/2, 3 Desember 1974/Maret 1975 (wawancara ini direkam oleh pemimpin perjuangan Comal).

[37]*Ibid.*

KNI kecamatan tidak mengawasi pemilihan dan pengangkatan pamong desa baru itu.

Krasak, Kecamatan Brebes, lain lagi. Amran, lurah lama, yang terkenal sebagai penindas di masa pendudukan Jepang, hanya memeras secara kecil-kecilan saja, tetapi ia mengambil 400 kuintal padi dari lumbung desa. Ia mencabuti tanaman singkong milik penduduk guna mempercepat penanaman padi berikutnya, dan mengirim 50 romusha yang tidak pernah kembali lagi. Pohon kapuk dan albasiah di sepanjang jalan dipotong untuk kepentingan Jepang; kunci dan pegangan pintu tembaga milik petani, pintu air dari besi pada saluran irigasi juga diambil dan diserahkan kepada Jepang. Selain itu, jatah kain untuk desa dijual Amran di pasar Lebaksiu. Kedudukan lurah kuat karena Krasak dengan mudah dapat mencapai Tegal, tempat markas kenpeitai.

Menjelang September 1945, rakyat sudah terlalu muak. Dua pertiga penduduk desa, yaitu sekitar 3.000 orang, datang menghadiri rapat desa dalam pemilihan ketua KNI. Ketua KNI desa yang baru terpilih berusaha mencegah agar lurah jangan dibunuh, tetapi ia sendiri akhirnya diturunkan dari jabatannya serta beberapa pengikutnya. Pemilihan lurah baru, berlangsung dengan cara berikut:

> Ada tiga calon, masing-masing mempunyai bumbung bambu sendiri dengan tanda-tanda di atasnya. Tanda saya daun turi, Satam (yang lurah selama 17 bulan pada zaman Belanda, tapi dipecat karena melakukan korupsi) menggunakan janur, calon lain menggunakan daun kluwih. Rakyat menggunakan batang lidi pendek (*biting*) sebagai surat suara yang dimasukkan ke dalam bumbung. Setiap orang desa itu berhak dan dapat memilih.[38]

Yang memang adalah Karto, seorang setengah lenggaong yang sebagai pengawas romusha di pantai semasa pendudukan Jepang, yang banyak membantu rakyat. Dengan mencuri jatah dari Jepang, ia memberi makan orang-orang lapar yang dikirim ke proyek.

Gejala-gejala terpecahnya desa di Tiga Derah, terjadi terutama karena kaum revolusioner sering kali tidak sanggup menghimpun penduduk desa yang terpecah-pecah secara kultural dan ekonomis.

[38]Ketua KNI Krasak, Wawancara, 5.12.75.

Selain itu karena kelurahan sebagai satuan desa ciptaan Belanda tidak berjalan lancar. Di Kecamatan Warurejo (Tegal) dan Moga, Taman dan Petarukan (Pemalang) terdapat beberapa faktor lain penyebab terpecahnya desa-desa itu. Ada yang disebabkan karena tidak puas dengan pamong desa yang baru. Apabila tidak terdapat orang KNI setempat yang aktif, atau anggota pergerakan sebelum perang, yang kecil pengaruhnya, dan unsur lenggaong lebih kuat, maka desa itu akhirnya pecah jadi dua. Kadang-kadang lurah baru tidak mampu menguasai seluruh desa itu di dalam tangannya, khususnya kelompok santri dan pamong desa yang lama. Biasanya tanah bengkok dibagi antara kedua desa baru itu.[39]

Di Waturejo, kecamatan kecil di perbatasan pantai antara Pemalang dan Tegal, sebagian besar desa-desanya terpecah, di antaranya ada yang pecah karena ada pertentangan antara lenggaong dengan santri kaya. Dalam kasus lain perpecahan disebabkan karena lurah baru adalah bekas pejabat lama atau anggota keluarganya. Karena rakyat mendesak dengan kuat diakuinya desa-desa baru itu, maka delegasi yang terdiri dari tokoh-tokoh keagamaan dikirim untuk menghadap Residen Besar. Mr. Besar meskipun menyetujui penambahan jumlah carik di setiap desa, ia tidak menyetujui pemecahan desa itu. Keputusan ini dijelaskan dalam rapat-rapat desa, sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali menyatukan kembali desa-desa yang terpecah atas keinginan rakyat yang bersangkutan.[40]

Tabel 6 memperlihatkan penggantian aparat lama. Di desa-desa pedalaman seperti di Bumiayu dan Balapulang, hal ini tidak banyak terjadi karena kepadatan penduduk yang rendah dan politik ekonomi Jepang semasa perang tidak terlalu menekan. Hal yang serupa terjadi di Kecamatan Belik, Watukumpul, dan Pulosari. Walaupun wilayah itu sangat miskin sejak zaman Belanda (organisasi sosial Mardi Utomo yang disponsori Belanda aktif di Pulosari), di sana tidak terdapat unsur-unsur santri dan lenggaong yang bersifat melawan.

Di Kecamatan Bumiayu hanya ada sedikit pergolakan pada tahun 1945. Kota ini, sebagai satu kota perdagangan kaum santri kaya,

[39]Lurah Kedungjati (Kecamatan Warurejo, Tegal), Wawancara, 10.2.75.
[40]Lurah Pesucen (Kecamatan Petarukan, Pemalang), Wawancara, 3.9.75.

terkenal dengan hasil tapioka dan cengkeh. Sekalipun memiliki beberapa sekolah Islam, ada kecenderungan kuat dari para pelajar dan pedagangnya untuk belajar dan bekerja di luar daerahnya sendiri.[41]

Pada zaman Belanda, Muhammadiyah mempunyai sekolah dasar berbahasa Belanda (HIS Muhammadiyah).

Selama pendudukan Jepang tak ada busung lapar di Bumiayu, tidak seperti di beberapa kecamatan pantai selatan Pemalang. Sebagian berkat kegiatan PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) dari Muhammadiyah yang membagi-bagikan bubur wajlam.[42] Pembagian barang-barang kebutuhan pokok tidak ditangani lurah tetapi oleh sebuah panitia khusus. Sistem pengumpulan padi berbeda dengan sistem di daerah-daerah lain di pantai. Petani tidak dipaksa menyetorkan padinya ke pusat pengumpulan, tetapi dapat menumbuk padinya dan menyetorkannya dalam bentuk beras ke kelurahan. Noji dianggap tidak banyak mengganggu, ia hanya "mengingatkan" orang-orang untuk menyetorkan jatahnya. Rakyat tahu tentang penggeledahan padi, tetapi di sini penggeledahan jarang terjadi. Setiap dua kuintal padi diberi tiga meter belacu. Pembagian ini lebih tinggi dibanding dengan daerah lain, sedang kain kelebihan oleh camat dijadikan celana dalam dan dibagi-bagikan kepada petani tak bertanah.[43]

Di Kecamatan Ulujami golongan priayi desa hampir seluruhnya tumbang. Dari 18 lurah hanya satu, yakni Haji Syukur, yang tetap menduduki jabatannya, karena dapat melawan perebutan kekuasaan yang dipimpin lenggaong Deman. Baik di Comal maupun di Moga, perubahan yang terjadi lebih meluas dibanding dengan di Bumijawa atau Balapulang.

Dalam keruwetan perjuangan memperebutkan kekuasaan setempat dan persaingan golongan revolusioner, desa-desa terpecah antara santri yang bersaingan dan antara lenggaong yang bersaing, maupun menurut pembagian lenggaong-santri. Pertikaian antara golong-

[41]Dalam penelitian akhir-akhir ini mengenai asal daerah pelajar Pesantren Tebuireng (Jombang) ternyata kelompok terbesar datang dari Bumiayu (jangan dikacaukan dengan Bumijawa, di Tegal Selatan). Komunikasi pribadi dengan Zamakkhsyari Dhofier. Banyak juga yang belajar di Pesantren Termas, dekat Pacitan.

[42]Wajlam dibuat dari pepaya, gula jawa, dan tepung singkong.

[43]Keterangan di atas berasal dari wawancara di Bumijawa pada tanggal 13 dan 14 Desember 1975.

an lenggaong dengan kaum santri disebabkan oleh adanya unsur santri di dalam lenggaong sendiri, yaitu mereka pernah dididik di pesantren atau pernah naik haji, dan menggunakan simbol magis-religius untuk menarik rakyat sama seperti yang dilakukan oleh para kiai desa ortodoks. Pengaruhnya terhadap rakyat sering sama kuatnya dengan pengaruh para kiai. Dalam kepemimpinan lenggaong terlihat adanya ciri menentang lapisan masyarakat tertentu, yaitu orang-orang yang kedudukan ekonominya kuat, baik dari elite keagamaan maupun dari priayi desa.

Tabel 7 mengikhtisarkarkan perubahan-perubahan di tujuh kecamatan yang diteliti. Tergambar 53 persen lurah baru berasal dari lapisan elite lama, sedangkan 32 persen dari kelompok-kelompok baru yang tidak memegang kekuasaan sebelum revolusi. Tetapi ada satu perkecualian, yakni ada satu kelompok santri rakyat, atau santri miskin yang menjadi lurah, dan tentu saja mereka ini lebih dekat kepada kelompok baru daripada kepada elite keagamaan yang menguasai tanah.

Ciri-ciri pertentangan kelas muncul pada saat kaum lenggaong yang mewakili proletariat merebut kekuasaan dapat juga dilihat dari gejala-gejala adanya perpecahan desa. Tanah bengkok yang merupakan ciri paling nyata dari kekayaan lurah, telah menjadi masalah sejak zaman kolonial. Selama revolusi sosial tanah bengkok dibagi kalau sebuah desa terpecah menjadi dua. Masalah bengkok teramat penting, karena merupakan tanah yang mencolok dan mudah diambil dan dibagi. Di Desa Sukowati (Pemalang Selatan), tuntutan rakyat yang utama ialah padi di lumbung desa (yang dikumpulkan secara paksa oleh Jepang) harus dibagi-bagikan kembali. Namun tuntutan segera berkembang menjadi tuntutan terhadap kekayaan pribadi Lurah yang luar biasa. Selain bengkoknya, Lurah memiliki 3 ekor kuda, satu dokar, dan banyak lahan persawahan. Bengkoknya diambil rakyat untuk dibagi, dan Lurah dipecat. Menurut salah seorang anggota bawah tanah:

> Pada waktu terjadi peributan sawah-sawah dari Lurah [Sukowati] Jangan sampai ada peributan daripada kekayaan dari lurah-lurah. Bengkok dikuasai oleh rakyat, Lurah didaulat... bengkok mau diraih, kita mengatasi: "Jangan sampai ada pembagian yang tidak adil." Supangat [Bupati Pemalang] kita datangkan, padi [dari bengkok] dipo-

tong ditempatkan di lumbung desa. Rakyat diajak musyawarah. "Pembagian bagaimana?" Pembagian menurut umur, semua orang 10 tahun ke atas akan sama dengan orang tua (25 kilogram per orang). Umur 10 tahun ke bawah menerima 50 persen dari jatah orang tua, yang dihargai jiwanya. Dia yang kaya diminta keikhlasannya supaya menyerahkan pembagiannya kepada yang miskin. Umumnya yang kaya tidak membantah, "Ya, ya, boleh," karena dia takut sawah akan dirayah oleh rakyat. Hasilnya, bukan tanah yang dibagi. Tanah itu punya negara. [Padahal] Lurah Sukowati kekayaan luar biasa, kuda tiga, sawah, dan dokar satu.[44]

Di Sukowati semua kuda milik Lurah dilepaskan, dokar dan padi hasil dari sawahnya sendiri dibakar, tetapi padi hasil bengkoknya dibagi-bagikan. Di bawah pimpinan lenggaong Sahid, rakyat menuntut agar tanah bengkok dibagikan. Tetapi Supangat, bupati baru Pemalang yang revolusioner, yang diminta datang untuk menyetujui pembagian tersebut berkata, "Tanah itu milik negara." Pernyataannya ini tidak memuaskan rakyat, dan lenggaong Sahid ditunjuk menjadi lurah.

Revolusi sosial ternyata lebih sukar mendapatkan tanah milik santri tuan tanah daripada bengkok lurah. Atas permintaan Camat Taman, dua keluarga tuan tanah santri membagi-bagikan sebagian dari ratusan ton padinya, sehingga memadamkan gerakan anti dua keluarga itu. Di Kecamatan Peterukan, santri tuan tanah di Desa Kendalsari dengan cepat melindungi kekayaannya dengan membentuk ranting Pesindo. Pemimpinnya adalah anak bekas lurah zaman Jepang, yang beristri tiga, dan sawahnya katanya 152 bau. Para pemuda Kendalsari yang berpendidikan Belanda menggabungkan diri ke dalam Pesindo dan melakukan langkah seperti apa yang dikatakan tokoh perjuangan setempat, "demi semata-mata melindungi kepentingan keluarganya agar tidak terganggu akibat perubahan sosial yang cepat."[45]

[44]Kurir Lasem, Wawancara, 18.10.76.
[45]Sekretaris Pesindo Kendalsari, Wawancara, 31.10.75.

Pola-pola Pergolakan

Setelah mengamati dengan seksama data dari berbagai desa, terlihat ada berbagai macam pergolakan yang timbul. Di satu pihak karena santri yang lemah terpaksa harus berhubungan dengan kelompok lenggaong. Kaum priayi desa dan elite keagamaan tidak mampu bekerja sama untuk memperkuat diri. Dengan tidak adanya tokoh-tokoh pergerakan sebelum perang, tidak ada KNI setempat yang kuat yang mampu mengawasi pemilihan lurah dan pamong desa baru.

Pola lain ialah di desa-desa tempat elite keagamaan menguasai desa, kaum lenggaong bukanlah tantangan, dan hanya sedikit terjadi perubahan. Di Pemalang Selatan, unsur pergerakan sebelum perang yang diwakili KNI-KNI setempat juga lemah dan sarekat Rakyat tidak mempunyai pengikut di pedalaman ini.

Di antara kedua pola ini, terdapat variasi-variasi yang sering kali merupakan kembinasi dari para priayi desa, elite keagamaan, tokoh pergerakan sebelum perang, dan kaum lenggaong dan elite keagamaan. Kedua, peranan moderat para pemimpin pergerakan sebelum perang yang radikal seperti Bumireja. Ketiga, pengaruh kesengsaraan masa perang dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah lama yang melawan penindasan seperti di Krasak.

Hampir dalam semua kasus yang menyebabkan tergulingnya lurah-lurah, terjadi pembagian kekayaan pribadi para pemangku jabatan lama; padi dibagikan dan kadang kala harta milik dijual. Sering tanah dan rumah diambil oleh lurah baru. Sedangkan pemimpin perjuangan setempat tidak pernah mendorong pembagian tanah bengkok untuk para petani tak bertanah, walaupun lurah sudah terguling dan tak berkuasa, seperti di Sukowati. Di Desa Sukowati, Supangat, Bupati Pemalang "pilihan rakyat" dengan keras menentang pembagian tanah.

Sesudah pengembalian kekuasaan yang semula dipimpin TKR, harta milik pribadi yang diambil alih sering kali dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun pemangku jabatan baru biasanya tetap menduduki jabatannya. Hal ini sering berlangsung sampai pergolakan 1965. Kenyataan bahwa banyak bekas lurah bisa bersembunyi di desa atau di sekitarnya mencerminkan kuatnya hubungan kawula gusti, yaitu

masih terdapatnya rakyat yang bersedia melindungi lurahnya. Pada tingkat kecamatan dan kawedanan dari tabel perbandingan "elite baru" yang menduduki kekuasaan setelah revolusi sosial hanyalah 27 persen, sedangkan di tingkat desa jauh lebih tinggi, yaitu 53 persen (lihat tabel 7). Perbedaannya ialah bahwa santri-santri merupakan "elite baru" di tingkat kecamatan dan kewedanan, sedangkan merupakan "elite lama" di tingkat pedesaan. Para pangreh praja selalu memonopoli jabatan tingkat kecamatan dan kewedanan. Pada zaman kolonial maupun pendudukan Jepang, kedudukan yang lebih tinggi ini adalah hak prerogatif pangreh praja yang dijaga ketat oleh mereka.[]

BAB ENAM

MASA-MASA KACAU

KEKERASAN dan penggulingan para pangreh praja selama revolusi sosial di Tiga Daerah tidak terjadi di Kabupaten Pekalongan. Di situ aksi "dombreng" tidak ada dan pangreh praja tetap berkuasa. Pangreh praja di Tiga Daerah yang dapat melarikan diri ditampung rekan-rekannya pangreh praja di ibukota keresidenan. Peristiwa-peristiwa yang mereka alami membuat para rekan di Kota Pekalongan tercengang, karena memang di kabupaten tersebut tidak terjadi pergolakan sosial dengan kekerasan dan juga tidak ada NICA-phobi di Kabupaten Pekalongan.

Untuk menanggapi apa yang ada di Tiga Daerah, Residen Besar mengeluarkan tiga maklumat pada bulan Oktober. Maklumat pertama, ditujukan langsung pada pergolakan di Pemalang, dengan seruan kepada segenap rakyat di keresidenan itu untuk tetap tenang dan tertib, dan berdiri di belakang Pemerintah Republik Indonesia. Rakyat dilarang keras bertindak sebagai hakim sendiri, karena hal ini akan cepat menimbulkan kekacauan. Keamanan dan kekayaan pribadi harus dijamin. Tindakan tegas diambil terhadap siapa pun yang melakukan provokasi atau melakukan perampokan, kekerasan, pembunuhan, pengrusakan gedung-gedung, pabrik dan gudang, jembatan dan lain-lainnya.[1]

Maklumat kedua yang dikeluarkan dari Markas Kepolisian Keresidenan yang ditandatangani Residen Besar, ditujukan kepada siapa saja yang memiliki senjata api atau peluru untuk segera menyerahkannya ke Kantor Polisi setempat setiap saat, antara pukul 9 pagi sampai

[1] *Maklumat* No. 1, Pekalongan, ditandatangani 17 Oktober 45, Residen Pekalongan Mr. Besar (Dokumen Mr. Besar).

pukul 1 siang. Senjata ini akan digunakan TKR yang memikul tanggung jawab berat bagi keamanan Republik Indonesia.[2]

Maklumat ketiga, tertanggal Pekalongan 22 Oktober, adalah sebuah pernyataan keadaan darurat. Kondisi keamanan Pekalongan selama enam hari terakhir dianggap semakin gawat. Karenanya nada maklumat itu pun lebih keras, karena Residen tidak lagi mengharap rakyat agar tertib, tetapi memberi kuasa penuh kepada TKR untuk mengambil setiap tindakan yang perlu guna mempertahankan kepatuhan terhadap Republik Indonesia, agar pemerintah dapat tetap berfungsi dengan sebaik-baiknya demi keamanan rakyat sehari-hari.[3] TKR khususnya diberi kuasa di daerah sepanjang pantai mulai dari Petarukan ke barat sampai Kecamatan Wanasari di Brebes, demikian pula Kecamatan Jatibarang, Adiwerna, dan Talang yang terletak di wilayah pedalaman.

Di Tiga Daerah, tiga Maklumat Residenan tersebut diabaikan, bahkan dicurigai. Tidak diumumkannya kepada rakyat bahwa Mr. Besar secara sah telah diangkat sebagai Residen oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 September, mengakibatkan para pemimpin perjuangan di Tiga Daerah tetap menganggap Pekalongan tidak mempunyai residen yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.[4]

Badan-badan perjuangan tetap menjaga senjatanya dengan sangat hati-hati, sehingga saran untuk menyerahkan senjata itu tidak dapat mereka terima,[5] lebih-lebih kepada polisi yang sama sekali tidak mereka sukai seperti halnya di Tiga Daerah. Berita bahwa Residen Besar berusaha melindungi golongan Indo dan berhubungan dengan NICA, dan TKR hanyalah Tentara Keamanan Residen sudah tersebar luas.

Pangreh praja yang masih tinggal di kota-kota kabupaten ber-

---

[2] *Maklumat* No. 2, Kantor Pusat Kepolisian Keresidenan Pekalongan, 16 Oktober 1945, Residen Pekalongan Mr. Besar. (Maklumat No. 2 ini sebenarnya tertanggal sehari sebelum Maklumat No. 1, Dokumen Mr. Besar).

[3] *Maklumat* No.3, Pemerintah Republik Indonesia Daerah Keresidenan Pekalongan, 22 Oktober 1945 (Dokumen Mr. Besar).

[4] Muhammad Nuh, Jawaban tertulis, Semdam, 1959, hlm. 8.

[5] Marsum Hr. menulis mengenai maklumat yang menyerukan kepada rakyat agar menyerahkan senjatanya... kata "rakyat" mempunyai arti luas, bila dikenakan juga kepada senjata-senjata yang dimiliki Barisan Pelopor Tegal, saya tentu tidak menerimanya.' Jawaban atas pertanyaan tertulis 3, 6.7.74.

usaha menghadapi berlanjutnya pergolakan yang menimbulkan masalah sosial setempat. Di Tegal, setelah maklumat pertama Residen, Bupati mengundang utusan Barisan Pelopor untuk menghadiri sebuah rapat di kabupaten. Rapat itu juga dihadiri oleh pejabat tinggi keresidenan yang mewakili residen Pekalongan. Tiga belas tahun kemudian Muhammad Nuh, seorang tokoh Barisan Pelopor yang juga hadir dalam rapat itu, menuturkan:

> Kepada doea oerang oetusan dari Barisan Pelopor, Kentyo [Bupati] mengatakan bahwa di sebelah selatan Tegal terdjadi kekatjauan dan perlunja lekas dibrantas. Ditanjakan kepada dua orang dari Barisan Pelopor sedia tidaknja Barisan Pelopor turut memberantasnja. Dari Barisan Pelopor mengemukakan pendapatnja bahwa Barisan Pelopor tidak melihat adanja kekatjauan di luar kota, jang ada ialah arus revolusi jang sedang merombak segala sesuatu jang berbau kolonial/fasis, sedang penjelesaiannja harus ditempuh dengan djalan merombak kedjadian-2 jang kwantitatip tadi ke kwalitatip. Usaha-2 ini oleh Barisan Pelopor sudah terus-menerus diusahakan dengan menghubungi organisasi-2 jang ada, jaitu dengan ketua-2 KNI Kelurahan-2 jang baru sadja dibentuknja. Karena adanya dua matjam tjara memandang dan tjara menjelesaikannja ditambah pula sikap jang kaku dan *ambtelijk* (gaya pejabat) dalam pertemuan selama pembitjaraan berlangsung dari fihak amtenaar, maka seorang jang kaku dari Pekalongan tadi meninggalkan tempat duduknja menudju ke dalam pendopo Kabupaten, sedang Kentyo jang tidak bersedia menambah/membuat keterangan atau pertanjaan lagi mempersilahkan kita meminta diri.[6]

Nasib Polisi

Dalam suasana pertentangan yang memuncak ini, polisi dan Indo menjadi sasaran rakyat. Di awal pendudukan Jepang, perwira-perwira polisi yang umumnya adalah orang Belanda dan Indo dimasukkan penjara. Kekosongan jabatan itu kemudian diganti atau diisi oleh pengreh praja yang umumnya berpendidikan seperti Mosvia misalnya, yaitu sekolah menengah calon pegawai untuk pribumi. Kadarisman, kepala polisi Kota Tegal, adalah seorang lulusan Mosvia tahun

[6]Muhammad Nuh, jawaban tertulis, 1959, Semdam, hlm. 8.

1932 dan rekannya Kuswandi, kepala polisi Kabupaten Tegal dan bekas Camat Tonjong, Brebes, adalah lulusan Mosvia tahun 1933. Walaupun anak seorang lurah, "dia bertingkah laku seperti priayi."[7] Di Kota Tegal bulan September 1945, sebelum Jepang diangkut, Kepala Polisi dan Walikota diculik dan "dididik kembali" oleh API (Angkatan Pemuda Indonesia). Tindakan ini banyak didorong oleh tindakan penculikan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok menjelang Proklamasi.

Selama tiga hari tiga malam dua pejabat itu diindoktrinasi oleh Pimpinan API dan BKR agar mereka sadar bahwa Indonesia telah merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri dengan kekuasaan penuh di tangannya.[8] Selama tiga hari itu ternyata kedua tahanan itu dapat keyakinan akan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, bahkan Kepala Polisi berjanji akan berusaha mengambil kembali senjata-senjata yang telah diserahkannya kepada kenpeitai.

Di Tegal masalah kepolisian tetap berlanjut. Seorang polisi Kecamatan Talang terbunuh pada bulan Oktober. Pada tanggal 19 Oktober Kepala Polisi Kabupaten mengirim sepasukan polisi ke Desa Lemahduwur tempat pembunuhan Camat Adiwerna 10 hari sebelumnya. Polisi-polisi itu membawa perintah untuk menahan beberapa orang dan membereskan kekacauan sampai tuntas.[9] Salah seorang dari mereka yang ditahan termasuk pimpinan Hizbullah, pimpinan setempat yang terkenal. Penduduk desa marah dan meminta bantuan KNI Ujungrusi untuk menyerang asrama polisi kebupaten agar para pemimpinnya dapat dibebaskan. KNI Ujungrusi mengeluarkan pengumuman untuk seluruh wilayah Adiwerna agar mengerahkan sukarelawan. Pada tanggal 20 Oktober, empat hari sesudah keluarnya Maklumat Resident untuk menyerahkan senjata kepada polisi, asrama polisi Kabupaten Tegal diserbu. Sejumlah senjata dan peluru dirampas dan dibawa kembali ke Adiwerna.[10]

---

[7]Menurut Wadyono, yang menggantikan Kuswandi sebagai Camat Tonjong sesaat sebelum perang.

[8]Laporan Adiwerna (Adiwerna Verslag), 23, 2.46, hlm. 4, Proc, Gen.

[9]*Ibid.*, hlm. 5.

[10]Ini mencakup 3 karaben M. 95, dua pistol, dua sangkur, juga sepeda.

Aksi melawan polisi ini menjalar ke Kabupaten Brebes. Polisi Brebes sangat provokatif tindakan-tindakannya terhadap para pemimpin perjuangan setempat. Di bulan September bendera Jepang masih berkibar di asrama polisi Brebes, padahal telah lama diturunkan di kantor-kantor pemerintahan lainnya. Sejumlah besar demonstran berkumpul di luar asrama, menuntut agar bendera Jepang itu segera diganti. Tetapi karena para demonstran tidak bersenjata, maka mereka itu tidak menghasilkan apa-apa. Malah pemimpin demonstran ditangkap.[11]

Tetapi polisi Brebes tetap melakukan penangkapan-penangkapan, terdapat kurang lebih 80 orang tahanan yang belum diperiksa meringkuk di tangsi polisi Brebes. Hal ini mencemaskan batalyon TKR setempat, sehingga mereka meminta agar senjata detasemen polisi Brebes (yang beranggotakan kurang lebih 100 orang), diserahkan kepada TKR. Detasemen polisi kemudian membubarkan diri, anggotanya disuruh pulang ke kampung atau bergabung dengan polisi di ibukota Keresidenan Pekalongan, sedangkan komandan dan wakilnya ditempatkan di Kantor Kawedanaan Brebes "untuk terima saja laporan perkara kriminil."[12]

Berita tentang penahanan massal polisi Brebes tadi (termasuk ketua KNI Jatibarang) mendorong aksi protes dari Ujungrusi-Talang, termasuk Kutil untuk datang ke Kota Brebes. Tuntutan mereka agar semua tahanan dibebaskan, langsung disetujui oleh pimpinan TKR setempat. Para tahanan dan demonstran tadi pulang dengan lori (kereta api kecil) pabrik gula Jatibarang yang dikirim ke Brebes sebelumnya, tanpa terjadi kekerasan sama sekali.[13]

Menurut maklumat Residen Pekalongan, TKR yang diharapkan menggantikan pangreh praja dalam pemeliharaan hukum dan keamanan itu, ternyata sama tidak berdayanya seperti halnya polisi ataupun pemimpin-pemimpin badan perjuangan setempat dalam menegakkan kekuasaan di luar kota kabupaten. Kepala polisi Kotapraja Tegal mengatakan tidak mampu lagi memimpin kepolisian, karena

[11]Tokoh AMRI/PKN Brebes, Wawancara, 2.12.75.

[12]Mukasim Ilyas (Komandan kompi batalyon TKR Brebes), Wawancara, 11-12-86.

[13]*Ibid.*, Adiwerna, Verslag, 1946, hlm. 5. Proc. Gen.

para anggotannya menanggalkan baju seragamnya dan menyerahkan senjatanya. Hal ini berarti bahwa mereka telah mengundurkan diri dari dinasnya, karena takut dianggap berperan sebagai polisi.[14] Panitia baru yang terdiri dari tujuh pemimpin perjuangan setempat dibentuk untuk secepat mungkin membangun kembali keamanan kabupaten. Sementara itu Barisan Pelopor bertanggung jawab atas keamanan dalam kota, dan bila perlu boleh menggunakan Fonds Kemerdekaan.[15]

Kemudian diumumkan agar para bekas anggota kepolisian menggabungkan diri dengan angkatan baru, selain itu juga dibuka kesempatan penerimaan anggota-anggota baru. Sebagian anggota kepolisian lama bergabung lagi tetapi mereka tidak mau disebut polisi. Bekas kepala polisi kemudian menjadi penasihat, walaupun ternyata setelah itu ia lalu menghilang. Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dapat menangani masalah ini dengan mengirim seorang perwira kepolisian propinsi itu untuk membantu kepala polisi baru Wahyudi dan wakilnya Suryono Darusman dalam melaksanakan tugas barunya. Dalam usaha menarik kembali para bekas perwira polisi, diputuskan bahwa organisasi baru itu dinamakan PNKRI (Penjaga Keamanan Negara Republik Indonesia) atau PKN saja, sedangkan anggota-anggotanya hanya disebut sebagai penjaga keamanan.[16]

PKN Tegal hanya merupakan badan tambahan bagi Barisan Pelopor yang dengan keberhasilannya telah dapat mengatur keamanan kebupaten sejak Proklamasi Kemerdekaan. Dengan demikian PKN Tegal tidak pernah berkembang dan berperan atas namanya sendiri. Hal ini berlainan dengan Brebes. Pada awal November badan perjuangan setempat memutuskan untuk memindahkan markas Barisan Pelopor ke bekas asrama polisi yang diubah namanya menjadi PKN. Lambang PKN Brebes sebagai lencana bagi para anggotanya berbentuk seekor banteng hitam dengan dasar putih, dilukis dan dibuat oleh para pemuda setempat. Unsur PKN di kecamatan-kecamatan mengirimkan 10 sampai 15 pemuda ke asrama-asrama PKN di kota Kabupaten Brebes. Penginapan dan makan lebih dari 200 pemuda itu dija-

[14]Muhammad Nuh, jawaban tertulis, Sendam, hlm. 10.
[15]*Ibid.*
[16]*Ibid*, hlm. 16.

min oleh penduduk setempat dengan menyediakan nasi pongol. Dan mereka itu bersama rakyat bertindak atas dasar semangat, dan melakukan tugas tanpa perintah. Pemuda PKN itu lebih mirip dengan Barisan Pelopor Tegal atau API/PRI Pemalang, tetapi tanpa fungsi-fungsi ekonomi dan tidak mempunyai kesatuan kepemimpinan.[17]

Golongan Indo Eropa

Pada masa awal Republik Indonesia, di antara penduduk di Hindia Belanda, golongan Indo-lah yang menderita korban anarki paling hebat.[18] Faktor terpenting yang melatarbelakangi golongan Indo di Keresidenan Pekalongan, terutama di wilayah pedesaan, ialah mereka itu dipandang sebagai orang-orang asing yang kedudukan ekonominya diistimewakan.

Pada tahun 1930, 12 persen dari seluruh penduduk Eropa di Jawa Tengah yang berjumlah 4.200 tinggal di Keresidenan Pekalongan.[19] Sebagian dari mereka adalah Indo, suatu istilah yang digunakan bagi orang-orang Eropa yang dilahirkan di Hindia Belanda.[20] Separuh dari penduduk Eropa di keresidenan itu tinggal di Kebupaten Tegal, terutama di ibukota kabupaten itu sendiri, sedangkan sepertiga lainnya (atau kira-kira 600 orang pada tahun 1930) tinggal di pabrik-pabrik gula di kabupaten itu. Penduduk Eropa Pemalang terpusat di ibukota kabupaten dan di Comal. Golongan Indo yang tinggal di Brebes merupakan kelompok terkecil di Tiga Daerah. Mereka kebanyakan tinggal di dataran rendah pantai, hanya sejumlah kecil sekitar 20 orang tinggal di Bumiayu daerah pegunungan di selatan. Ekonomi orang-orang Indo itu tergantung pada pabrik-pabrik gula yang melambangkan penindasan ekonomi kolonial yang terburuk di mata

[17]Kepemimpinan PKN Brebes, seperti seluruh perjuangan di Brebes, terpecah belah dalam beberapa kelompok. Lihat Bab 8.

[18]W.F. Wertheim, "The Indo-European Problem in Indonesia," Pacific Affairs, XX (1947), hlm. 297.

[19]*Volkstelling*, 1930, Jilid I, hlm. 103, 120.

[20]J.M. van der Kroef, *Indonesia in the Modern World* (Bandung, 1954), hlm. 276. Berdasarkan hukum belanda, anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan ayahnya sehingga ini mengecualikan semua orang Indo-Eropa "yang tidak berayahkan orang Eropa." Seluruh penduduk Indo-Eropa Hindia Belanda diperkirakan sebanyak sembilan juta pada tahun 1940.

rakyat. Pabrik-pabrik tersebut telah memanfaatkan golongan Indo yang mengetahui kebudayaan serta penguasaan bahasa Jawa untuk mendapatkan tenaga kerja. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pengawas perkebunan, mandor buruh, kontraktor, analis kimia, atau ahli mesin di pabriknya sendiri. Upah mereka lebih tinggi dibandingkan dengan upah orang-orang Jawa teman sekerjanya.

Sikap golongan Indo terhadap orang-orang Jawa mencerminkan kontradiksi di antara dua dunia yang bukan miliknya. Banyak di antara mereka yang menganggap orang-orang Jawa bodoh, malas, dan kotor. Mereka atau golongan ini merasa lebih tinggi dalam hal kesehatan, pendidikan, dan efisiensi kerja. Ketidaksenangan orang-orang Jawa yang berpendidikan tinggi terhadap golongan ini terutama disebabkan karena mereka diharuskan menggunakan bahasa Jawa halus (*kromo inggil*) apabila berbicara dengan golongan Indo, sekalipun orang-orang Jawa ini fasih berbahasa Belanda.[21] Dengan demikian prasangka rasial lebih meracuni suasana kerja di pabrik-pabrik gula tempat hubungan kerja sudah begitu buruknya. Hubungan kerja seperti itu adalah ciri-ciri semua usaha ekonomi Barat di Jawa.

Di tahun 1930-an banyak pabrik gila ditutup, sehingga para Indo itu beralih ke usaha tani, membuka rumah-rumah penginapan di tempat peristirahatan di Tuwel dekat Bumiayu, dan ada juga yang mengurus perkebunan teh serta karet di sekitar Bumiayu, yang punya pabrik-pabrik susu dan es yang diurus oleh orang Jerman. Tampak bahwa kebanyakan keluarga Indo di Tiga Daerah berkecukupan dan tidak ada kesan mereka itu miskin, sebagaimana gambaran hidup orang peminta-minta di kampung-kampung di pinggiran kota-kota di Jawa.[22] Pada akhir 1930 sewaktu pabrik-pabrik gula dibuka lagi, kebanyakan mereka kembali ke pekerjaan lama.

Kedatangan Jepang di Indonesia menjungkirbalikkan dunia Indo-Eropa. Pada awal 1942, pemerintah militer Jepang menerapkan sistem klasifikasi ras berdasarkan keturunan ayah dan setiap orang Indo harus mempunyai bukti asal keturunannya.[23] Di Pekalongan

[21]Lihatlah E. Breton de Nijs, Bayangan Memudar (Jakarta, 1975).
[22]Wertheim, "The Indo-European Problem", *op. cit.*, hlm. 292.
[23]Van der Kroef, *op. cit.* hlm. 286.

orang-orang Jepang tidak memberlakukan sistem ini. Menurut Toshio Ota, wakil residen Jepang, semua orang Belanda, termasuk mereka yang "berdarah Belanda" 50 persen, terutama yang bekerja di pabrik-pabrik gula yang masih beroperasi ketika Jepang datang, diperintahkan untuk segera pindah ke Jakarta, sehingga hanya orang-orang Indo dengan 25 persen "darah Belanda," orang-orang Menado, dan Ambon sajalah yang masih boleh tinggal di pabrik-pabrik.[24] Jepang tidak mempercayai kelompok ini karena curiga mereka setia kepada Eropa, sehingga pada masa akhir perang mereka diharuskan melaporkan diri kepada pejabat Jepang sebulan sekali, dan masih banyak di antaranya yang ditahan atau dipenjarakan. Orang-orang inilah yang dikendalikan dan digunakan sebagai informan oleh Jepang. Walaupun propaganda Jepang berdampak pembunuhan terhadap orang-orang Indo di Keresidenan Pekalongan, tetap timbul kekhawatiran akan terjadinya penjajahan kembali Belanda atas Indonesia. Kekhawatiran semacam ini semakin nyata setelah Inggris dan NICA mendarat di Jakarta.

Sukar sekali untuk dilukiskan betapa takutnya rakyat terhadap NICA (Netherlands Indies Civil Administration) pada bulan Oktober 1945. Tahun-tahun yang sukar pada masa sebelum perang dan kesengsaraan rakyat yang mendekati kondisi kelaparan pada akhir masa pendudukan Jepang, telah menimbulkan ketegangan-ketegangan luar biasa di kalangan penduduk. Gejala ini, yaitu kecurigaan dan rasa permusuhan yang mendalam, lebih terasa di daerah-daerah yang miskin dan berpenduduk padat, terutama di daerah Talang-Adiwerna-Slawi di Tegal. Orang Jepanglah yang mula-mula menjadi sasaran ledakan rasa permusuhan itu. Sasaran kemudian beralih pangreh praja.

Setelah tentara Inggris mendarat pada tanggal 20 Oktober dan adanya laporan serta desas-desus kekejaman NICA terhadap penduduk ibukota, rasa permusuhan pun berubah menjadi anti-asing, dan menjelma jadi satu gerakan tersendiri dalam gerakan revolusi. Sampai sekarang gerakan itu dikenal sebagai gerakan anti-NICA. Bahkan beberapa minggu setelah pembunuhan terhadap orang-orang Indo itu

[24]Toshio Ota, bekas asisten residen Pekalongan zaman Jepang. Jawaban atas pertanyaan tertulis.

mereda, gerakan itu masih berlanjut melakukan pencegatan di jalan atau menggeledah orang-orang yang naik kereta api untuk mendapatkan tanda-tanda merah-putih-biru (warna bendera Belanda). Apabila ditemukan pada orang yang bersangkutan berarti orang itu akan direnggut keluar kereta api dan diperiksa. Segala sesuatu yang dianggap asing atau tidak dikenal langsung dicap "agen NICA."

Gerakan anti-NICA di Tiga Daerah disulut oleh adanya kejadian-kejadian setelah kedatangan KNIL di Jakarta[25] yang membonceng Angkatan Perang Inggris (India) pada tanggal 29 September dan dikenal sebagai Tentara NICA. Pada waktu pendaratan itu timbul desas-desus di Jakarta tentang adanya orang-orang Belanda dan Indo bekas interniran yang dipersenjatai Jepang untuk menindas gerakan kemerdekaan Indonesia dan membunuh para pemimpin Indonesia. Banyak orang Indo yang bersenjata telah ditahan tentara Inggris. Penduduk semakin resah karena menganggap bahwa Republik sedang terancam oleh kegiatan-kegiatan bekas interniran dan tentara NICA.[26]

Pagi hari tanggal 11 Oktober, permusuhan secara terang-terangan terhadap Indo-Eropa di Slawi terjadi, ketika mereka itu digiring ke pabrik gula Dukuhwaringin.[27] Sekitar pukul 2 siang orang-orang kampung di sekitar pabrik dengan bersenjata bambu runcing datang untuk menghadiri sebuah rapat umum penting dan berkumpul di halaman pabrik. Para pemimpin API dan AMRI juga hadir saat itu. Setelah pidato-pidato selesai orang-orang menuntut agar para tawanan diadili oleh pengadilan rakyat terbuka, sebagaimana musuh-musuh

[25]KNIL adalah Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, Tentara Kerajaan Hindia Belanda.

[26]Sukarno, surat kepada Mountbatten, 30 September 1946. S.L. Van der Wal, *Officieele Bescheiden Betreffende de Nederlands Indonesische Betrekkingen 1945-1950*, jilid I. ('s-Gravenhage, 1971), hlm. 125, 380.

[27]Pencetus aksi ini adalah Mulyadi, yang riwayat hidupnya hanya sedikit diketahui. Ia seorang penduduk Jatibarang, bekas anggota Heiho, yang kemudian terlibat dalam pengusiran camat setempat. Orang-orang Indo dibawa ke pabrik gula tua, termasuk keluarga Frederiks dan Van Dongen, yang memiliki pemerahan susu, keluarga Dychten dan Van Oeyens yang bekerja di pabrik gula tersebut; perawat wanita asal Ambon Rizakotta; dan 3 orang Batak: K.M. Sinambela istrinya Tiurlan, dan saudara sepupunya Mahiddin Pane.

rakyat diadili dalam Revolusi Oktober di Rusia.[28] Orang-orang Indo lalu dibawa keluar halaman tempat orang-orang berkumpul. Kesalah-an-kesalahannya satu demi satu dibaca. Mereka dianggap telah meng-khianati revolusi nasional. Para hadirin kemudian ditanyai mengenai hukuman bagi setiap orang sebanyak tiga kali, dan tiga kali itu pula mereka menjawab dengan mengacungkan tangan ke atas sambil ber-teriak "bunuh." Nyonya Tiurlan, istri salah seorang dari orang-orang Batak yang terbunuh itu sempat lolos dari maut dan menuturkan kejadian itu 28 tahun kemudian:

> Suami saya (K.M. Sinambela) mendapat nomor delapan sedangkan kemenakannya (Mahiddin Pane) satu nomor sebelumnya. Ketika masing-masing orang dinaikkan ke panggung orang banyak berteri-ak "bunuh! Bunuh!" Zuster Rizakotta (juru rawat asal Ambon) masih mengenakan seragam putihnya. Kemudian mereka dibawa pergi, ditutup matanya dan dibunuh dengan bambu runcing. Saya berada di urutan terakhir bersama seorang wanita Indo bernama Meri, yang menjadi istri Lurah Kalisapu. Saya telah dinaikkan ke panggung, ketika seseorang berteriak bahwa saya bukan seorang Indo, melain-kan seorang Jawa. Yang berteriak itu seorang teman kakak saya, yang ada di TKR. Ia membimbing saya turun, dan bersama Meri saya dibawa ke rumah Lurah.[29]

Sekalipun kepastian tentang jumlah orang-orang yang terbu-nuh itu tidak pernah diketahui, menurut Nyonya Tiurlan 39 orang meninggal dan 3 orang selamat.[30] Di Slawi, pada masa anti-NICA mencapai puncaknya, sebutan 'Belanda' bisa dikenakan pada siapa saja yang selalu berbahasa Belanda atau hidupnya seperti orang Eropa. Kita ingat bahwa tiga hari sebelum kejadian di Slawi itu, di Adiwerna, camatnya dibunuh setelah dalam rapat berbicara di depan rakyat bah-wa Presiden Sukarno telah ditahan dan dibunuh oleh NICA. Ger-bong-gerbong kereta api yang melintas melalui Slawi di kedua sisinya

[28]Wakil Ketua KNI Kabupaten Tegal, Jawaban tertulis, 1972.

[29]Wawancara, 22.4.73.

[30]*ibid.*, perkiraan mengenai jumlah yang terbunuh berbeda antara 28 (dari keluarga Kiai Misbakh, penasihat AMRI Slawi), 32 (dari sekretaris KNI Ujungrusi), sedangkan penduduk Slawi lainnya menyebutkan 40. Ini termasuk banyak wanita dan anak-anak, kakek-kakek, dan paling tidak seorang Batak lainnya, Hasibuan.

dengan besar-besar ditulisi "Patenana Kabeh Wong NICA" ("Bunuh semua orang NICA").[31]

Pada hari yang sama itu (11 Oktober), di Pangkah, enam kilometer sebelah timur Slawi juga terjadi pembunuhan. Di Pangkah memang tidak banyak orang berkumpul, tidak ada pengadilan terbuka dan tidak ada teriakan-teriakan "bunuh." Tetapi putri Henry Gill menuturkan kembali dengan ngeri kenangan tentang ayahnya Henry Gill, yaitu seorang Katolik Roma kelahiran Kediri, Jawa Timur, yang kawin dengan seorang gadis Pangkah tahun 1914. Ia bekerja sebagai ahli mesin pabrik gula. Dua orang putranya, Harry dan Bernard, yang telah diinterner di Kamp Cimahi, Jawa Barat, pada akhir September kembali ke Pangkah untuk membujuk ayahnya agar mau pindah ke Bandung. Tetapi Henry Gill menolaknya. Gill adalah sahabat pemimpin Serikat Islam setempat yang terkenal, Kiai Badrun. Kedua putranya Mansur dan sidik menjadi tokoh API. Gill punya alasan kuat dalam pemikirannya bahwa pemuda-pemuda API pasti bakal melindunginya. Di bulan September, Gill dibawa ke suatu rapat umum di pabrik dan didorong ke atas mimbar untuk berbicara. Tampaknya sikap Gill terhadap Proklamasi tidak tegas dan hal ini membangkitkan kemarahan pemuda API setempat.[32] Ellen anaknya yang tertua, yang kini tinggal di Tegal, pada tahun 1973 menuturkan kejadian itu.

> Papa telah tahu sebelumnya bahwa ia akan dibunuh. Malam itu ia tidak tidur, tetapi berdoa sepanjang malam dengan Kitab Sucinya. Kemudian sekitar pukul 9 pagi ia bangkit, dan berbeda dengan kebiasaannya mandi dengan air hangat, kali ini ia mandi dengan air dingin. Adik saya Jamie keluar sebentar mencari nasi, karena mau makan. Papa memberi tahu Ibu bahwa nanti akan ada tamu. Kemudian Jamie datang kembali terengah-engah, "Mama, mama, mereka datang untuk membunuh Papa," demikian teriaknya. Sidik dan para pemuda datang, menembak ayah di kepala, di depan Ibu dan Jamie. Ayah terhuyung-huyung ke arah Ibu tapi jatuh. Mereka mulai menangis, dan Sidik mengancamnya, "Kalau kalian menangis, kalian akan dibunuh

[31] Istri Camat Margasari, Wawancara, 23.2.73.

[32] Putrinya menceritakan bahwa ayahnya "seruju tapi anti," artinya terpaksa menerima proklamasi, tetapi tidak menyetujui dalam prinsipnya.

juga." Kami disuruh masuk ke dalam rumah, tapi dari jendela kami dapat melihat Ayah. Mereka tidak menembak Ayah sampai mati, jadi Ayah bergulingan dan akhirnya meninggal karena dibayonet. Ayah dikubur para tetangga di pemakaman umum setempat. Karena seseorang mengatakan bahwa Ayah seorang Kristen, maka dibuatkanlah salib di atas makamnya. Sidik datang kembali dan berkata bahwa Ayah bukan manusia, tetapi anjing, dan tidak patut dikubur seperti lazimnya.[33]

Pembunuh kejam terkenal di Balapulang (Tegal) adalah kasus pembunuhan terhadap anak-anak keluarga Wijk. F.M. Wijk adalah pengawas perkebunan tebu pabrik gula setempat sebelum pabrik itu ditutup akibat Depresi. Kemudian ia membuka perusahaan tahu dan peternakan kuda. Sekalipun ia dan istri Cinanya hidup seperti orang Hindia Belanda, orang selalu ingat akan tindakan keras dan semena-menanya terhadap kuli-kuli perkebunan. Rupa-rupanya karena hubungan dagangnya dengan Jepang, ia baru dipenjarakan setelah Jepang menduduki Indonesia. Dua anak laki-lakinya, sebagai anggota militer Belanda dipenjarakan di Bandung, tetapi 11 orang anak lainnya tetap tinggal di Balapulang. Mereka inilah yang di bawa ke sumur di tengah kota untuk dipukuli dan tujuh di antaranya dibunuh dengan bambu runcing, termasuk gadis kecil si Anne, tiga tahun, dan yang paling kecil si Ale, umur dua tahun, dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur itu. Empat orang di antaranya berhasil meloloskan diri dan bergabung dengan ibunya yang telah dipenjarakan. Setelah Belanda menduduki kembali wilayah ini pada akhir tahun 1947, F.M. Wijk datang ke Balapulang beserta dua orang temannya membalas dendam dengan menembak mati sebelas orang dan empat orang di luar kota, lalu memindahkan jenazah ketujuh orang anaknya untuk dimakamkan di sawah yang berdekatan.[34]

Dengan adanya siaran radio tentang kekejaman NICA, Barisan Pelopor Tegal berunding dengan sisa-sisa polisi dan memutuskan untuk menempatkan orang-orang Indo-Eropa di Markas Barisan

[33]Wawancara, 22.4.73. Sidik akhirnya dibunuh orang-orang yang tidak menyukainya pada awal November sesudah kejadian itu.

[34]Keterangan kesaksian Balapulang itu dari wawancara dengan kemenakan istri Wijk pada 21.2.73; Wawancara di Balapulang tanggal 24-25.11.75

Pelopor untuk lebih menjamin keselamatannya. Maklumat Mr. Besar memperkuatkan tindakan ini, terutama dengan adanya berita lewat telepon yang diterima Barisan Pelopor tanggal 11 Oktober (pada hari yang sama dengan terbunuhnya Gill dan pembunuhan massal di Slawi), yang mengatakan agar semua orang Indo-Eropa, Ambon, dan Manado dipenjarakan karena adanya teror anti-NICA di Jakarta.[35] Berita yang diterima oleh pemuda menyatakan bahwa semua Indo harus dibunuh. Berita ini diterima melalui telegram kereta api yang berbunyi, "karena kekejaman-kekejaman NICA di Jakarta yang dibantu oleh orang-orang Indo, Ambon, dan Manado, termasuk pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak, maka semua orang Indo, Ambon, dan Manado di seluruh wilayah harus dibasmi."[36] Gerakan Anti-NICA ini menyebabkan lebih dari 100 orang Indo, Ambon, dan Manado dan orang-orang yang dianggap pro-Belanda telah terbunuh di Tiga Daerah.[37] Kejadian ini berlangsung hanya dalam waktu empat hari. Hanya di wilayah pemukiman pabrik gula dan ibukota Kabupaten Tegal dan Brebes peristiwa ini terjadi, sedangkan di Pemalang maupun Pekalongan gerakan anti-NICA tidak tampak.

Di Pemalang ternyata tidak ada peristiwa pembunuhan Indo-Eropa. Para pemimpin perjuangan di Pemalang lebih mengarahkan semangat rakyat anti-Belanda kepada pejabat priayinya. Pada tanggal 20 Oktober para priayi tersebut ditangkap dan dimasukkan ke penjara setempat. Bila tindak kekerasan terhadap golongan Indo dan pemecatan lurah-lurah terjadi di mana-mana, maka ternyata W.O. Mckenzie seorang Indo-Eropa yang ternama dan terkemuka di keresidenan itu masih dapat menghentikan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap pro-NICA di Comal. Mereka, yang mencoba melakukan tindak kekerasan itu yang sebagian besar adalah anggota Peta dan Heiho, "diamankan" McKenzie di rumahnya meskipun sebagian besar dari mereka dapat lolos secara diam-diam. Di mata rakyat, McKen-

[35]Catatan harian Andi Penyamin, pemimpin pemuda KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) di Tegal.

[36]Siregar, Wawancara, 5.3.73.

[37]Angka-angka yang telah terbunuh adalah sebagai berikut: di kota Tegal 12; Pangkah 4; Slawi 30; Balapulang 20; Bumiayu 7; Jatibarang 18; Brebes 14. Tidak diketahui berapa yang dibunuh di pabrik gula Banjaratma dan Ketanggungan Barat.

zie berbeda dengan Indo-indo lainnya di Tegal dan Brebes. Hal ini disebabkan karena selain dia dianggap mampu menyembuhkan orang sakit, juga sekaligus seorang pengusaha perkebunan yang kaya raya. Ia setiap hari membuka sebuah klinik mata secara cuma-cuma untuk rakyat Comal, juga memegang peranan penting dalam pembangunan instalasi penjernihan air, pasar, dan toko-toko setempat. Sesungguhnya, ia dianggap sebagai pendiri kota itu. Ketika daerah-daerah sekitar Comal berada dalam suasana anti-Cina bulan Maret 1942, yaitu sebelum Jepang datang di Comal, tidak terjadi perampokan dan penjarahan toko-toko, meskipun di Comal ada perkampungan Cina. Jelas bahwa kedudukannya di mata rakyat mempunyai pengaruh terhadap pengendalian suasana waktu itu.[38]

Di dalam revolusi sosial pernah terjadi seorang pembunuh jagoan menjadi pemimpin revolusioner yang penting. Hal ini adalah salah satu gejala memuncaknya semangat revolusioner atau semangat anti-NICA. Orang pemberani dalam melakukan tindak kekerasan dapat menjadi pemimpin, kecuali timbul orang yang menentangnya, seperti misalnya seorang kiai dalam waktu singkat dapat menumbangkan kekuasaan seorang lenggaong dan menggantikannya. Seberapa jauh lenggaong dapat mempertahankan kekuasaannya tergantung pada kekuatan sosial lain di masyarakat, yaitu golongan priayi dan agama.

Pembunuhan Indo-indo merupakan bagian dari gejala revolusi sosial di Tiga Daerah. Kejadian yang dimulai pada 11 Oktober 1945 dan berlangsung hanya beberapa hari saja itu hampir bersamaan dengan mulainya tindak kekerasan terhadap pangreh praja dan orang-orang Cina. Pada umumnya kelompok revolusioner tidak berdaya melindungi para pangreh praja dan Indo-indo Eropa dari tindak kekerasan, bahkan ada di antara mereka itu sendiri yang terlibat dalam kasus pembunuhan orang Indo. Pemimpin tentara pun ternyata tidak bisa menjamin keamanan. TKR sebagai kelompok keamanan hanya berpangkalan di kota dan tidak mempunyai kekuasaan di luar kota kabupaten. Karena gencarnya anti-NICA, maka TKR dan polisi menolak untuk bergerak memasuki daerah pedesaan, karena keselamatan mereka tidak terjamin.[]

[38]W.O. McKenzie, seorang teosofis, tinggal di Comal sampai wafatnya pada awal tahun tujuh puluhan.

BAB TUJUH

KESADARAN REVOLUSIONER: BAYANGAN BAGI KENYATAAN

"Rituals reveals values at their deepest level... men express in ritual what moves them most."[1]

BAB ini menelusuri lebih dalam nilai-nilai di balik revolusi sosial dan kejadian sesudahnya, yaitu nilai sosial elite birokrat Jawa yang menekankan adanya tingkatan serta kontrol sosial dan nilai protes sosial di Jawa dalam abad kedua puluh di Keresidenan Pekalongan. Bulan-bulan pertama revolusi memberi peluang pada setiap aksi massa untuk bergerak di daerah. Satu aspek penting dari pertentangan antara pangreh praja dan perjuangan adalah bagaimana pemahaman mereka akan perjuangan kemerdekaan, bukan sebagai pertentangan antara generasi, melainkan pertentangan antara nilai-nilai. Sebagai orang Jawa, kedua kelompok itu, kaum priayi dan kaum perjuangan berpendapat bahwa kekuasaan itu pada hakikatnya bersifat spiritual.[2]

Tradisi Pangreh Praja

Di dalam tradisi priayi Jawa, yaitu elite birokrat di Keresidenan Pekalongan, nilai-nilai dalam hierarki, pengendalian dan ketenangan batin, hak-hak istimewa dan kewajiban serta keengganan mengecam penguasa adalah penting. Tingkah laku tradisional yang harus dijunjung tinggi kaum priayi ialah rukun, rasa halus, ikhlas, sabar,

[1] "Ritual mengungkapkan nilai-nilai yang sangat penting. Dalam ritual orang menyatakan apa yang paling menyentuh hatinya", Victor Turner, *The Ritual Process*, (Chicago, 1969), hlm. 6.

[2] Lihat Benedict R.O'G. Anderson, "The Idea of Power in Javanese Culture" dalam Holt, *Culture*, hlm. 8-19.

dan *nrimo*. Rukun menekankan persesuaian, menghindarkan pandangan yang bertentangan, dan menekankan kebulatan dalam mengambil keputusan. Rasa halus berarti kepekaan jiwa yang halus, kemantapan dan keseimbangan emosional. Untuk mencapai rukun dan rasa halus, seorang priayi harus ikhlas, mengambil jarak dari dunia nyata sedemikian rupa, sehingga tidak pernah akan merasa kecewa; sadar dan *nrimo* serta siap sedia menerima nasibnya sendiri. Dalam nilai ini, adat kebiasaan hormat—yang memperlihatkan adanya pengendalian diri dan kehalusan jiwa seseorang—memiliki arti yang sangat penting. Demikian pula sikap badan, gerak-gerik, serta bahasa dan nada yang diungkapkan.[3] Pangreh praja terikat pada peraturan dalam memimpin dan menentukan keberhasilannya sebagai administratur. Pangreh praja adalah ideal menurut beberapa orang, apabila ia bertindak sebagai *pandita ratu*, yang dapat menggabungkan kebijaksanaan dengan agama menjadi kekuasaan dan keagungan yang mencerminkan adanya satu kata dengan perbuatannya.[4] Ia harus berbudi luhur dan dapat membaurkan dirinya dengan semua kelompok besar masyarakat (*ajur-ajer*) tanpa mengorbankan kewibawaannya. Ia dilarang keras *ngrusak pager ayu*, meniduri wanita yang tidak menjadi haknya. Pelanggaran terhadap larangan ini bisa menimbulkan malapetaka, bencana alam, penyakit, kegagalan panen, dan sebagainya.[5]

Tekanan Belanda kepada pangreh praja membuat mereka lebih tergantung kepada sistem hierarkis otoriter elite birokrat, bahkan memperkokoh sistem itu. Di desa, camat mendapat sebutan *nDoro Seten* (asisten wedana), dan orang akan turun dari kendaraannya dan berjalan kaki sewaktu melewati rumah priayi itu serta akan duduk di tepi jalan dan menyembahnya bila mereka dilewati.[6] Selain itu mereka pun terkena wajib kerja untuk *nDoro Seten*.

Di masa pendudukan Jepang hierarki ketat di antara tingkat pangreh praja dan rakyat dipelihara. Camat Tonjong mengenangkan

---

[3]Lihat Sartono Kartodirdjo, *Modern Indonesia: Tradition and Transformation* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1984), hlm. 187-188.

[4]Benedict R.O'G. Anderson, *Mythology and Tolerance of the Javanese* (Cornell University Modern Indonesia Project, 1965), hlm. 74 (selanjutnya dikutip sebagai *Mythology*).

[5]Sarimin. Kenang-kenangan, 1965, hlm. 66.

[6]Sutherland, *The Making*, hlm. 25.

kembali masa itu:

> Pada zaman pendudukan Jepang saya masih dipanggil *nDoro Senten*- ... Waktu itu tidak ada Bapak Bupati, yang ada masih *nDoro Kanjeng*. Saya tidak pernah memanggil atasan saya Pak Dono (wedana), melainkan selalu nDoro Dono dan saya sangat akrab dengan beliau.[7]

Seperti setiap orang lainnya di Jawa, pangreh praja pun suka memilih tokoh dalam wayang kulit sesuai dengan citra idamannya. Sebuah sajak yang ditulis di samping lukisan Kresna membandingkan pangreh praja tersebut dengan seorang satria yang tenang dan teguh di medan pertempuran; meskipun dunia selalu bergolak, pejabat yang baik tidak bergeser dari cita-cita dan tujuannya, selalu kokoh dan tegar di tengah-tengah kegoncangannya.[8]

Tradisi Protes

Di dalam masyarakat Jawa protes sosial sudah menjadi tradisi. Di Keresidenan Pekalongan, lenggaong yang merupakan bagian penting dari tradisi ini mempunyai banyak tokoh "bandit" terkenal. Seperti halnya priayi, lenggaong pun berusaha mendapatkan kekuatan spiritual. Para lenggaong itu, mempercayakan dirinya kepada seorang guru yang sering kali menjadi ketua persaudaraan perguruan silat.[9] Perguruan-perguruan dengan kode-kode rahasianya lebih merupakan perkumpulan rahasia yang memuja pimpinannya tidak seperti kelompok-kelompok kebatinan yang bersifat rahasia; tak seorang lenggaong pun akan mau memberi tahu nama gurunya, yang dianggap sebagai sumber "ilmu" *kanuragannya* (*ngelmu* "rahasia"). Biasanya seorang lenggaong menerima sebuah azimat dari gurunya, karena percaya akan adanya kekuatan gaib pada azimat itu.

Setelah pelajarannya selesai, lenggaong itu "dilantik" di sebuah makam yang dirahasiakan untuk menjadi anggota persaudaraan per-

---

[7] Camat Tonjong, Wawancara, 19.10.76.

[8] Sutherland, *The Making*, hlm. 163.

[9] Sebagai para pemimpin yang kuat di luar struktur pemerintahan apa pun, maka mulai dari haji, kiai dan dukun, sampai guru berdiri tanpa tunjangan dana, baik dari anggaran belanja negara maupun desa, namun sering kali mendapatkannya dari para pengikutnya yang setia secara pribadi. Lihat Sartono Kartodirdjo, "Agrarian Radicalism in Java: Its Setting an Development" dalam Holt, *Culture*, hlm. 78.

guruan silat yang diketuai gurunya. "Makam-makam ini,"tulis Sartono,"mempunyai arti simbolis dan magis khusus bagi pendudukan di sekitarnya, yang sering kali cenderung menganggap orang-orang suci yang telah meninggal itu sebagai pepunden mereka."[10] Di Tiga Daerah terdapat banyak makam semacam ini. Setiap makam dijaga oleh juru kunci yang tangguh, yang tidak hanya memelihara makam, tetapi juga mengetahui berbagai mantra magis-religius yang berkaitan dengan makam bersangkutan.

Makam-makam suci ini sangat berarti bagi para lenggaong dan sering terletak berdekatan dengan desa tempat para lenggaong itu tinggal, agar dapat membina kesetiakawanan dan saling membantu. Makam di Pemalang Selatan Candi Mandireja sangat terkenal. Di awal revolusi sosial pusaka keramat dari makam ini dipayungi dan dibawa ke Moga untuk pengabsahan penggulingan camat. Payung adalah simbol perlindungan, biasanya dipakai oleh keluarga kerajaan, tetapi sering juga untuk barang-barang yang dianggap memiliki kekuatan atau "kesakten."

Para lenggaong menjaga kekuatan spiritualnya dengan sering mengunjungi pusaka-pusaka dan makam-makam, dan mengucapkan mantra-mantra yang diperoleh dari penjaga makam. Makam sering juga mempunyai arti politik. Di Kabupaten Pemalang dan Tegal yang dipuja bukanlah wali atau orang suci, melainkan makam tokoh-tokoh pemberontak yang melawan Belanda. Menurut kepercayaan, Baurekso pernah mengadakan pemberontakan terhadap kerajaan Mataram. Desa-desa di Comal, daerah pantai Pemalang, mempunyai Candi Baurekso sendiri-sendiri. Dekat Comal terdapat candi Sigeseng, yang dianggap keramat karena merupakan makam bekas Bupati Pemalang yang berjuang melawan Belanda. Makam di dekatnya dikenal sebagai makam pengikut Pangeran Diponegoro. Kata-kata mantra dari juru kunci makam-makam itu mengandung kata-kata perlawanan terhadap penguasa desa dan pangreh praja. Ada kepercayaan bahwa bila seorang pangreh praja melihat pusaka Mandireja Kiai Pokal yang keramat itu, itulah pertanda bahwa ia akan segera dipecat dari jabatannya. Begitu pula bagi seseorang yang bekerja untuk Belanda, termasuk

[10] *Ibid.*, hlm. 80.

pamong desa, tidak berani berziarah ke Candi Sigeseng, karena takut dirinya terbakar oleh mereka yang dikubur di situ.[11] Di sini pulalah pemimpin Islam Haji Dulgani disembunyikan, setelah ia menganjurkan rakyat agar tidak menyetorkan padinya kepada lurah untuk kepentingan Jepang.[12]

Pada awal tahun 1920-an, ketika sentimen anti-Belanda timbul, makam-makam kaum lenggaong itu dipergunakan oleh Sarekat Rakyat untuk menanamkan perasaan anti-Belanda. Beberapa guru silat lenggaong menjadi anggota Sarekat Rakyat yang terkemuka. Bukannya memakai kopiah hitam, lambang kepribadian nasional, melainkan mereka memakai kopiah merah yang dimiringkan seperti anggota-anggota Sarekat Rakyat, sebagai lambang perlawanan. Desa-desa yang terkenal dengan lenggaongnya, sering juga merupakan tempat tinggal para pemimpin Sarekat Rakyat setempat. Seorang lenggaong dalam merayakan hajat perkawinan atau khitanan mengadakan pertunjukan wayang golek atau tayuban. Sangatlah menarik bahwa lakon wayang ini bukan berasal dari kisah panji yang secara tradisional berkaitan dengan bentuk wayang ini. Kalau bukan lakon Baurekso, dipertunjukkanlah lakon Semaun, nama tokoh PKI tahun 1920-an. Lakon ini yang mengisahkan seorang penjaja es yang mengembara sambil merusak jalan kereta api melambangkan pemberontakan tahun 1926. Lakon ini sangat populer dan pamong desa tidak berani melaporkan kepada pemerintah bila lakon itu dipergelarkan, sekalipun lakon itu terlarang dan orang takut akan akibatnya.[13]

Para pemimpin Sarekat Rakyat maupun Sarekat Islam memanfaatkan upacara-upacara adat keagamaan untuk mengadakan diskusi-diskusi politik. Memahami kesukaan berjudi para lenggaong, maka dipopulerkan permainan kartu cina (gonggong) yang hanya dimainkan oleh tiga orang. Selama permainan para tokoh Sarekat Rakyat itu mengisi sela-sela waktu dengan kisah-kisah anti-Belanda kepada lenggaong yang menjadi lawan mainnya.[14]

---

[11] Geseng berasal dari kata gosong, artinya hangus.
[12] Lihat Bab Dua.
[13] Pemimpin perjuangan Comal, Jawaban tertulis, September 1975.
[14] *Ibid.*

Berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912 didasari oleh tergesernya pedagang Jawa oleh para pedagang Cina yang memonopoli perdagangan dan juga sikap kaum priayi yang menuntut penghormatan secara berlebih-lebihan. Sikap antipriayi, rupanya bertemu dengan tuntutan akan terjaminnya kebutuhan hidup dengan menjujung tinggi keyakinan Islamnya. Meskipun kegiatan-kegiatan tadi berbau magis dengan lambang-lambang rahasia dan sumpah setia, pemujaan orang-orang suci, dan kesetiaan kepada guru, tetapi tujuan utamanya adalah membenahi dan mengganti kesalahan-kesalahan yang nyata. Ini dapat dicapai dengan "pemurnian" pemerintahan, mengakhiri penghisapan ekonomi dan ketidakadilan sosial serta menegakkan harkat martabat manusia. Di dalam Islam, ada tujuan-tujuan politik kenegaraan dengan diamalkannya ibadah dan syariat Islam. Zaman gila (edan) yang dirasakan banyak orang waktu itu dapat dibersihkan, dan diganti dengan sebuah masyarakat yang adil. Serikat Islam menganggap para abdi penguasa korup harus digulingkan dan tindakan dilakukan sampai ke tingkat kepala desa. Para penguasa itu diancam dan ditakuti dengan tindak kekerasan, dan bila mereka keluar maka calon dari Sarekat Islam telah siap menggantikannya. Aksi Sarekat Islam dan aksi-aksi lainnya terjadi selain karena aksi semacam itu ada di dalam tradisi protes di Jawa, juga karena aksi-aksi itu merupakan perintis pembersihan para penguasa kolonial seperti yang terjadi di Tiga Daerah tahun 1945. Sarekat Islam mempunyai hasrat solidaritas yang tercurah dalam suatu sumpah rahasia untuk saling melindungi. Sumpah itu menyangkut soal kesetiaan dan persaudaraan antaranggota, kesediaan membantu dengan nasihat dan perbuatan, serta kesetiaan kepada lambang-lambang rahasia Sarekat Islam. Sumpah dan lambang itu menambah wibawa dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan terhadap kelompok,"...mengikat para anggota dalam suatu tekad untuk tidak saling mengkhianati dan memperkuat solidaritas terhadap pihak-pihak luar," khususnya terhadap pemerintah kolonial dan para priayi.[15]

[15]Mengenai sumpah lihat Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java* (Singapore, 1973), hlm.183, catatan kaki 75.

Selama tahun 1930-an, hampir semua kegiatan politik dilarang oleh Belanda, sehingga kaum pergerakan mengadakan kegiatan yang tersembunyi dalam melanjutkan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda, di antaranya dengan jalan pembacaan macapat (syair Jawa) waktu ada peralatan, lagu Dandanggula, yang diambil dari Serat Kalatida gubahan pujangga terkenal Ronggowarsita, berisi ramalan zaman edan, dan bagaimana sikap hidup untuk menghadapinya. Struktur kesenian macapat yang longgar, seperti halnya wayang golek, dapat menjadi salah satu sarana bagi para pemimpin radikal untuk menyampaikan keadaan sosial dan politik waktu itu.[16] Tembang-tembang Jawa kuno digunakan sebagai sarana untuk menguraikan dan menghubungkan masa depan kemerdekaan dengan kejahatan penguasa Belanda itu.

Upacara tradisional pasang molo, yakni pemasangan atap rumah baru, juga digunakan untuk maksud yang sama oleh para pemimpin nasionalis. Di antara barang-barang yang ditaruh di bawah atap yang merupakan lambang keamanan rumah baru dan keselamatan penghuninya, terdapat rempah-rempah yang dibungkus kain merah putih yang dipayungi dan diletakkan di bawah atap. Pembawa lagu menyelingi pembacaan macapat dengan uraian tentang kejahatan kolonialisme dan bagaimana makanan anjing-anjing Belanda itu jauh lebih baik daripada makanan penduduk desa.[17] Para pembawa lagu itu mendapat upah dari kaum nasionalis. Betapapun juga kaum pergerakan itu cukup waspada. Manakala hadir salah seorang pamong desa saja, acara komentar itu ditiadakan.[18]

Tradisi protes sosial telah berakar di alam pedesaan Indonesia seperti halnya kepercayaan akan datangnya Ratu Adil yang akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan merata. Gejala-gejala ini mungkin sudah ada sejak awal, namun tidak tercatat, dan kemudian disebut setelah gerakan itu merupakan bagian dari reaksi terhadap kolonialis-

[16]Margaret Kartomi mencatat bahwa tembang macapat berperan sebagai suatu bentuk pelarian psikologis dari pengaruh demoralisasi kekuasaan politik dan ekonomi kolonial. Lihatlah *Macapat Songs in Central Java* (Canberra, 1973), hlm. 28.

[17]Ungkapan *asune londo* (anjingnya orang Belanda) sering dibilang *asu londo* (Belanda anjing), dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

[18]Pemimpin Nasionalis Comal, Transkripsi, II/14, 30.11.74.

me Barat. Rakyat yang kehilangan tanah secara berangsur-angsur, campur tangan birokrasi kolonial Belanda ke dalam pertukaran pribumi di pedesaan, pajak yang memberatkan dan dampak ekonomi perkebunan Barat akan sistem produksi dan pertukaran tradisional sangat mengacaukan psikologi dan ekonomi rakyat. Perubahan nilai-nilai sosial ini tidak tertahankan lagi dan hanya bisa diatasi dengan adanya gerakan yang dapat memulihkan kekacauan, dan memulai kembali pembangunan melalui penguasa baru. Ini dapat terjadi di bawah kepemimpinan Ratu Adil. Walaupun gagasan Ratu Adil itu bernada anti-kolonial, tetapi pendorong utamanya ialah moral pembaruan dan kemurnian. Sebagian dari gerakan ini bersandar pada hal-hal yang magis, mistis, dan ritual, sebagian pula berdasar pada perbaikan kondisi sosial ekonomis yang tidak adil dan perbaikan sarana politik.[19]

Sejak akhir abad kesembilan belas gerakan-gerakan ini menjurus ke sinkretisme, yaitu perpaduan antara sifat budaya Jawa dengan mesianisme Islam, seperti adanya kepercayaan sementara di kalangan Islam kepada Mahdi, yakni seorang tokoh keturunan Nabi Muhammad SAW, yang ditugaskan untuk membersihkan dunia. Sumpah setia para anggota Sarekat Islam juga merupakan lambang dan ritual kesetiaan petani kepada gerakan dan pemimpinnya.

Di Keresidenan Pekalongan, hal ini terjadi dalam tahun-tahun terakhir kekuasaan pemerintah kolonial. Pendudukan Jepang telah menciptakan tekanan dan rasa semakin tidak aman pada rakyat pedesaan yang terancam bahaya kelaparan. Menurut kepustakaan Jawa mereka menganggap zaman itu sebagai zaman edan. Ramalan-ramalan ini telah lama tersebar sebelum terjadi pendudukan Jepang di Tiga Daerah.[20] Lagu mesianisme yang diajarkan oleh pemimpin pergerakan sangat populer di Tiga Daerah semasa pendudukkan Jepang. Gubah-

[19]Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java*, (Kuala Lumpur, 1973); "Messianisme dan Millenaranisme dalam Sejarah Indonesia," Lembaga Sejarah, 7 Juni 1971, hlm. 15-16, "Agrarian Radicalism in Java" dalam Holt, *Culture*, hlm. 92-125.

[20]Lihat Penders, *Documents*, hlm. 183-88; Brugmans, *Nederlandsch Indie onder Japanese Bezetting 1942-1945* (Freneker, 1960), hlm. 143; dan Sidik Kertapati, Sekitar, hlm. 15, tentang bagaimana orang-orang Jepang menggunakan ramalan Joyoboyo.

an Ronggowarsita bahkan diajarkan oleh seorang pemimpin Senden In (Jawatan Penerangan), yang bunyinya sebagai berikut:

Mengalami zaman edan,
Semua tindakan serba salah,
Mengikuti kegilaan hati tak tahan,
Namun bila tak mengikuti,
Tak akan memperoleh bagian,
Akhirnya akan kelaparan pula,
Namun betapapun mujurnya mereka yang alpa,
Masih beruntung mereka yang ingat waspada.[21]

Sajak ini sudah populer di Jawa sejak masa kemerosotan ekonomi, karena kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin lebar dan penghisapan merajalela. Pemimpin Senden In mengatakan pada orang-orang desa bahwa pangreh prajalah yang menjadi gila, tetapi rakyat jangan sampai ikut-ikutan.

Di Keresidenan Pekalongan, lama periode pendudukan Jepang umumnya dikenal sebagai masa seumur jagung (*samuring jagung*). Salah satu tafsirannya berbunyi sebagai berikut: seorang raja besar (raja jagung) atau raja kuning akan datang dan memerintah Jawa selama umur tanaman jagung, kemudian ia akan dikalahkan atau diusir Ratu Adil. Ketika Jepang datang, banyak yang percaya bahwa Jepang akan memerintah selama tiga setengah bulan saja, yaitu seumur jagung. Ketika ramalan itu meleset, ditafsirkan bahwa raja agung itu memerintah selama waktu sebutir bibit jagung yang diawetkan dan disimpan, berarti tiga setengah tahun lamanya. Identitas raja agung tidak dijelaskan dalam ramalan itu, sekalipun sebagian orang mengatakan sebagai Kaisar Jepang.

Masa-masa revolusi sosial di Tiga Daerah menandai timbulnya protes sosial yang mencolok. Bagaimanapun juga penggulingan hierarki sosial yang kuat yang dibawahi oleh pangreh praja bukanlah hal yang mudah. Hal ini mengakibatkan penolakan rakyat pada para majikan, yang dihina bahkan dibunuh dengan aksi-aksi dombreng. Sandiwara-sandiwara yang dipertunjukkan selama revolusi sosial me-

[21] Mengenai versi lain dari nyanyian ini lihatlah C. Geertz, *Religion in Java* (New York, 1960), hlm. 281.

nunjukkan aksi *dombreng* dan kampanye demokrasi dalam berbicara, sama dengan yang dianut oleh kalangan Islam, sehingga pemuda menolak dengan tegas hierarki sosial, suatu kebalikan dari nilai-nilai lama. Pangreh praja, yang memegang teguh nilai-nilai lama itu mengatakan bahwa rakyat pada waktu revolusi sosial adalah semrawut (kacau-balau), morat-marit (berantakan), serakah dan *pating jlenting* (tidak bertindak sewajarnya).

Sandiwara Perjuangan dalam Revolusi

Seperti di daerah-daerah lain,[22] sandiwara-sandiwara perjuangan selama masa revolusi sosial menolak sistem hierarki lama yang dianggap normal itu. Di Pemalang, sandiwara-sandiwara ini diselenggarakan oleh Angkatan Pemuda Indonesia (API). Penyanyinya biasa membawakan lagu revolusi yang mengingatkan para pejuang pada tanggungjawabnya. Sandiwara yang dipertunjukkan memberi dorongan kesadaran revolusioner dan mengungkapkan adanya protes-protes sosial yang tercetus dalam pemberontakan masa lalu dan masa revolusi. "Untung Suropati" yang mengisahkan perjuangan pahlawan pemberontak dari Bali pada abad ketujuh belas, dan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang merupakan tonggak sejarah gerakan nasionalis meneguhkan semangat solidaritas. "Di Ujung Bambu Runcing" mengisahkan persatuan antara rakyat biasa dengan pemuda yang hanya mempunyai bambu runcing. Sebuah lakon yang digubah di bulan November 1945 "Di Depan Kawat Berduri" mengisahkan cerita pahlawan heroik rakyat Surabaya menentang serbuan Inggris di Surabaya pada tanggal 10 November 1945.

Sebuah lakon yang dipertunjukkan di Brebes menggambarkan arti revolusi di mata rakyat, penggulingan "majikan lama," baik itu lurah, pangreh praja, maupun Belanda. "Bedinde Berani dengan Majikan" (*bedinde*, kata Belanda artinya abdi, pelayan) mengisahkan seorang yang bekerja sebagai pelayan seorang Belanda, manajer perkebunan karet. Si majikan selalu berlaku kasar terhadap pelayannya dan suatu ketika kekejamannya benar-benar melampaui batas, ketika

[22]Di Solo. Sandiwara pada awal revolusi sangat populer. Lihat John Thompson, *Hubbub in Java* (Sidney, 1946), hlm. 78-79 (selanjutnya dikutip sebagai *Hubbub*).

menghina dengan pernyataan bahwa semua orang Jawa itu bodoh dan ditakdirkan untuk selalu dijajah Belanda. Beberapa waktu kemudian si pelayan lari dari perkebunan karet dan membentuk suatu Barisan Pendem (barisan bawah tanah), yang pada suatu ketika berhasil menghadang dan membunuh majikan Belanda itu di perkebunannya sendiri. Istri pengusaha Belanda itu meminta bantuan polisi yang segera datang mengepung dan memenjarakan semua anggota Barisan Pendem. Ketika mereka meringkuk dalam penjara, kemerdekaan diproklamasikan dan penguasa lama dikalahkan. Namun sebelum itu terjadi pahlawan dalam kisah ini, yakni si pelayan, telah tewas dalam perjuangan.[23]

Di daerah Keresidenan Pekalongan sampai akhir masa pendudukan Jepang kepala desa mendapat sebutan majikan lurah atau majikan. Majikan berarti kepala, tuan, atau penguasa dalam sistem kolonial. Jadi istilah itu diterapkan dalam pergerakan Jawa dalam wujud kawulo-gusti di tingkat pedesaan. Wedana Pangkah, misalnya, selalu berkata bahwa ia menantikan majikan lama, yang dimaksud yaitu Belanda. Kata bedinde dan majikan mempunyai konotasi jelek di mata rakyat karena berbau kolonial.

Demokrasi dalam Bahasa

Bahasa yang dipakai dapat memperkuat sistem kekuasaan hierarki elite birokrat. Sekalipun Anderson mengatakan bahwa bahasa Jawa Kromo (halus) pada hakikatnya adalah bahasa penghormatan yang digunakan untuk hierarki sosial yang lebih tinggi, misalnya oleh bawahan kepada atasan.[24] Kaum pangreh praja dengan cerdiknya menggunakan bahasa kromo apabila berbicara dengan penduduk desa sebagai salah satu cara agar terjadi suasana resmi dan tertib di dalam sistem pemerintahan kolonial. Gerakan Samin, yaitu suatu gerakan petani radikal di daerah Blora di pantai utara Jawa, mempunyai anggota yang menolak menggunakan bahasa Jawa kromo, yang pada da-

[23]Pemimpin PKN Brebes, Wawancara, 2.12.75.

[24]Anderson menulis bahwa Bahasa Jawa tinggi (kromo) adalah bahasa terhormat kaum priayi, yang memperkuat hierarki masyarakat Jawa akibat tekanan dan kemudian kekuasaan Belanda. B.R.O'G. Anderson , 'The Language of Indonesian Politics,' *Indonesia* 1 (April, 1966), hlm. 96.

sarnya merupakan bagian dari penolakannya terhadap kekuasaan penguasa kolonial. Dalam rapat-rapat Sarekat Islam di Pekalongan tahun 1919, pembicara lebih dulu mengumumkan bahwa ia akan menggunakan bahasa Jawa Dipo. Jawa Dipo adalah sebuah pergerakan yang menganjurkan agar orang-orang Jawa hanya menggunakan bahasa persamaan, yakni bahasa Jawa ngoko.[25] Gerakan ini tidak disukai oleh kalangan pemerintah sipil Eropa maupun pangreh praja. Gerakan ini dianggapnya sebagai "menggerogoti kekuasaan" dan berbahaya karena sifatnya yang demokratis.[26] Cipto Mangunkusumo, seorang tokoh radikal pendidikan Barat, sejalan dengan pendirian Jawa Dipo, bahkan menganjurkan agar bahasa Jawa itu ditinggalkan sama sekali karena "merupakan bahasa budak yang menghambat kemajuan."[27]

Penumbangan majikan selama revolusi sosial berarti juga penolakan bahasanya. Di Tiga Daerah selama revolusi sosial, rakyat didorong untuk tidak memakai gelar atau sebutan kebangsawanan. Residen Sarjio yang masa jabatannya hanya empat hari saja di bulan Desember, mengeluarkan seruan tentang bagaimana mendirikan suatu pemerintahan berdasarkan "kerakyatan dan kekeluargaan." Sebagai langkah pertama ke arah ini, maka komunikasi antara pemerintah dan rakyat, baik secara tertulis maupun lisan, sebutan 'Bapak' akan digunakan bagi semua pejabat dari residen sampai ke bawah, kalau tidak maka istilah 'Bung' atau 'Saudara' harus digunakan. Sebutan berbau feodal, seperti 'paduka' dan 'abdi' dan 'nDoro' dilarang buat selamalamanya di Keresidenan Pekalongan.[28]

Demokratisasi bahasa bagi kaum revolusioner pada awal Desember 1945 dapat dilihat dari kunjungan Maksum, seorang pemimpin revolusioner Brebes dan bekas jaksa yang mewakili Residen Sarjio

---

[25]Nagazumi Akira, *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo 1908-1918* (Tokyo Institute of Developing Economics, 1972), hlm. 193, catatan kaki 26.

[26]Sutherland, *The Making*, hlm. 91.

[27]Anthony Reid, 'Indonesia: Revolution Without Socialism' dalam Robin Jeffrey (ed), *Asia: The Winning of Independence* (London, McMillan, 1981), hlm. 126.

[28]*Pengumuman Pemerintah Republik Daerah Keresidenan Pekalongan* No. 1/B ditandatangani Bapak Residen Sarjio, Pekalongan, 11 Desember 1945, Proc. Gen.

ke penjara Pekalongan:

> Maksum datang ke penjara waktu gerakan Tiga Daerah. Maksum sebagai wakil Sarjio pidato sama orang hukuman." Orang hukuman itu menjawab, "Inggih ndoro," (ya, Tuan). Maksum bilang, "Sudah omong ngoko, saiki wis ora ono ndoro, omong-2 ngoko wae. Iki bapak siji, iki Bapak loro, iki Bapak telu" (ini Bapak kesatu, Bapak kedua, Bapak ketiga). Orang hukuman itu tidak mau, mereka bilang "Inggih ndoro" lagi. (Kepala penjara ketawa-ketawa). "Wah susah ini mengubah sikap rakyat dengan cara ini tidak bisa." Maksum didikan feodal. Pembantu di rumah panggil istrinya ndoro dan munduk-2 (membungkuk-bungkuk).[29]

Bekas kepala penjara berpendapat tidak dapat mengubah sikap rakyat dengan cara ini. Selain itu Maksum sendiri mempunyai latar belakang feodal. Para pembantu di rumahnya menyebut istri Maksum dengan kata ndoro seraya membungkukkan badan.

"Inggih ndoro" merupakan jawaban tradisional terhadap perintah pangreh praja yang diberikan oleh petani yang sudah turun temurun sarat dengan beban pajak dan *corvee* semasa kekuasaan kolonial. Sikap hormat kepada ndoro dengan sendirinya ditunjukkan kepada Maksum, seorang priayi pemerintah, walaupun ia telah membaurkan diri dengan kaum revolusioner. Mungkin kalau penghuni penjara itu memegang senjata dan berada di luar penjara, jawabnya menjadi lain.

Revolusi bahasa di Jawa dianggap berbahaya, sebab pangreh praja menggunakan bahasa kromo tidak hanya untuk memelihara hierarki sosial, tetapi juga untuk memulihkan ketertiban dalam situasi yang tidak aman. Jadi pangreh praja telah dilatih untuk menggunakan bahasa kromo, kalau harus pergi ke desa tempat terjadi kerusuhan. Dengan cara pendekatan ini mereka akan berhasil karena bahasa tinggi yang dipakai. Dalam keadaan semacam itu, penguasa berusaha mencegah orang-orang lain mendahului mereka memakai bahasa ngoko, sebab dengan bahasa ngoko mereka akan mudah menuntut dan marah, sedangkan dengan bahasa kromo mereka sukar melakukannya.

[29]Kepala penjara Pekalongan, Wawancara, 5.10.76.

Dengan menggunakan kromo terlebih dahulu, pangreh praja dapat meredakan kerusuhan, dan memaksa para perusuh berbicara dengan perasaan halus. "Kutil pun dengan mudah dikalahkan dengan cara ini."[30]

Tuntutan revolusioner akan bentuk sebutan yang lebih demokratis dapat dikaitkan dengan kepribadian tokoh wayang Bima. Pemimpin AMRI Slawi, Suwignyo, ketika diminta memilih lambang revolusi sosial di Tiga Daerah, memilih gambar Bima, seorang tokoh satria dalam wayang yang memiliki kekuatan seperti angin dan penghancur gunung. Bima tidak pernah berjalan dengan langkah pelan (suatu ciri priayi), melainkan melewati gunung, lautan, padang pasir dan hutan dengan langkah-langkah panjang. "Tanpa mengenal ampun terhadap musuh-musuhnya, bertubuh tegap, tinggi besar, teguh pendiriannya, dan berotot kuat, badannya berbulu dengan mata melotot dan suaranya mengguntur..."[31] Perilakunya sungguh berlawanan dengan kehalusan seorang priayi seperti Yudistira kakak Bima. Bahkan ia selalu berbicara dalam bahasa ngoko meski dengan para dewa sekalipun. Bila rapat-rapat Sarekat Islam di Pekalongan biasanya diawali dengan bahasa Indonesia, dan dilanjutkan dalam bahasa Jawa Dipo, maka pendengar menyambutnya dengan teriakan "mufakat cara Seno!"[32] Seno adalah nama lain dari Bima.

Gejala *Dombreng*

Suatu ciri ritual *dombreng* pada revolusi sosial di Tiga Daerah selama bulan Oktober-November 1945 adalah pengusiran majikan oleh pelayannya. Suatu aksi khas *dombreng* mengikuti suatu pola sebagai berikut. Sekelompok orang mendatangi rumah tersangka dan menerobos masuk. Kalau yang dicari kedapatan, ia pun diseret keluar dan dipertontonkan di depan umum. Sering kali ia dikalungi beras atau padi, dan diiringi bunyi "breng dong breng" yang berasal dari kaleng kosong yang dipukul-pukul. Hal ini selalu terjadi di siang hari, supaya sebanyak mungkin orang dapat menyaksikan "koruptor" itu, yang mengalami penghinaan.

---

[30]Komandan TKR Resimen XVII, Wawancara, 27.8.71.
[31]Hardjowirogo, *Sejarah Wayang Purwa* (Jakarta, 1965) hlm. 133.
[32]*Neratja*, 29 Agustus 1918.

Pengertian *dombreng* lebih merupakan tindakan membuat malu para pejabat yang korup di depan umum daripada suatu tindakan kekerasan. Dalam pengertian lain *dombreng* diartikan sebagai ritual tentang majikan yang diusir (disepak keluar) oleh abdinya.

Sama Rata Sama Rasa

Nilai-nilai persamaan, ideologi "sama rata sama rasa," sebagai bagian dari kesadaran revolusioner, juga merupakan pandangan dasar Islam. Pada tahun 1919 di Pekalongan, Sarekat Islam telah menuntut hak sama rata, berupa penghapusan diskriminasi antara priayi dan penduduk kampung. "Kalau mereka mendapat air yang baik, demikian pula hendaklah kami, kalau jalan kami gelap, di sana juga harus gelap. Hak sama rata berlaku bagi setiap orang," demikianlah tuntutan Sarekat Islam Pekalongan. Sama rata tidak diperlukan oleh priayi. "Kaum priayi tidak membutuhkan persamaan hak, tetapi kami rakyat kecil (si Kromo) memerlukannya."[33]

Sama rata sama rasa memiliki makna besar bagi kaum nasionalis Indonesia. Rasa, sebuah kata Jawa yang kaya dengan konotasi, antara lain, bermakna kejiwaan. Sama rasa adalah penemuan batin yang bisa dicapai karena adanya persamaan penderitaan, atau pengorbanan. Meskipun ide itu bagus tetapi penerapannya keliru di dalam kenyataan. Misalnya, di Talang ketika kaum revolusioner setempat mengambil alih kekuasaan, mereka mendistribusikan cadangan beras dan bahan pakaian yang semula dikuasai oleh pangreh praja kepada penduduk desa. Untuk membagi bahan pakaian menurut kebutuhan setiap orang pada waktu itu tidaklah mungkin. Kejadian di Talang, sebuah kecamatan yang sangat miskin, berupa pembagian sama rata diartikan bahwa setiap orang menerima jatah yang sama yaitu sepotong kain selebar 10 sentimeter, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan apa pun.[34]

Semboyan sama rata sama rasa itu dijadikan semboyan nasional oleh kelompok sayap kiri, sekalipun oleh rakyat dapat diartikan secara

---

[33] *Neratja*, 29 Agustus 1918.

[34] Pemimpin KNI Talang, Wawancara, 7.12.75. Setiap orang rupanya mendapatkan jatah sekitar 13 sentimeter, yang oleh Ketua KNI itu dianggap sebagai "suatu keputusan yang gila."

lain. Tujuan Partai Sosialis Rakyat yang dibentuk di Cirebon pada awal bulan Desember 1945 di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir ialah "berjuang ke arah suatu masyarakat sama rata sama rasa." Semboyan yang berarti kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama, dan kebebasan bersama,[35] mengandung makna yang lebih luas dibanding dengan keadilan seperti yang terjadi dalam pembagian bahan pakaian di Talang.

Janur Kuning

Penggunaan janur kuning (daun kelapa muda) sudah berakar di dalam kebudayaan Jawa. Pohon kelapa yang serba guna manfaatnya itu dianggap sebagai salah satu sumber kekuatan spiritual. Di daerah Banyumas, janur kuning digunakan sebagai bendera (umbul-umbul) yang dikibarkan di atas patung Dewi Sri yang dibuat dari padi, dan bersama dengan sajian lainnya diletakkan di pinggir sawah. Di Pekalongan, janur kuning secara tradisional dipakai untuk menghias pintu masuk ke tempat upacara perkawinan, baik di kalangan orang-orang Islam maupun bukan. Orang Islam menafsirkan kata janur berasal dari kata Arab *ja'a nur* yang berarti cahaya telah datang yang kemudian dikaitkan dengan kekuatan spiritual, yakni *wahyu*.

Dalam mitologi wayang, ketika Rama menugaskan Hanoman untuk membakar ibukota kerajaan Alengka, semua rumah dihiasi janur kuning sebagai perlindungan terhadap api. Sampai kini pun, pemasangan silang janur kuning di atas kaca dimaksudkan untuk menolak penyakit atau roh-roh jahat (tolak bala) yang datang dari luar rumah itu.

Selama revolusi di Tiga Daerah, janur kuning digunakan terutama dalam pertempuran, karena orang percaya akan adanya kekebalannya dan kekuatan spiritualnya yang akan melindungi pemakainya dalam pertempuran.[36] AMRI Talang di bawah Kutil menggunakan janur

[35] *Revolusioner* 4, 6 Januari 1946, hlm. 6-7, memberikan suatu makna ungkapan itu bagi Pesindo.

[36] Pada awal mula konflik kekerasan antara kaum aristokrat dan golongan Islam di Aceh pada awal tahun 1946, seorang kapten Jepang yang tinggal di daerah itu setelah pasukan Jepang ditarik, mencatat bahwa barisan demonstrasi yang berjalan maju itu mengalungkan janur kuning di leher yang juga merupakan lambang per-

kuning sebagai ikat kepala atau ikat lengan, pada saat penyerbuan Kota Tegal pada 4 November, dan pengambilalihan ibukota pada bulan Desember.

Segi-segi Lain dari Revolusi

Kesadaran untuk menjadi anggota perjuangan itu tercermin lewat pengucapan salam atau panggilan dalam bahasa Indonesia. Salam atau panggilan itu digunakan untuk mempersatukan para pemuda dengan para pemimpin yang lebih tua. Bahasa Indonesia mulai dipakai sebagai bahasa pemersatu pada tahun 1920-an, namun baru di bawah pendudukan Jepang bahasa itu mulai digunakan sebagai bahasa nasional. Kata-kata seperti Merdeka, darah, bebas, dan bung dipakai sebagai salam yang menandakan keberanian baru yang penuh pengharapan dan kesetiakawanan. Semangat inilah yang mendasari segala tindakan di masa revolusi.

Sekalipun para pemuda masih harus belajar mengucapkan kata proklamasi, namun kata Merdeka yang berasal dari kata Melayu kuno Mahardiker, yang berarti orang bebas (bukan budak), tidaklah asing bagi mereka. Seorang koresponden perang ABC (Australian Broadcasting Corporation), yang menyertai rombongan Presiden Sukarno berkeliling ke Jawa Timur di awal Desember 1945; mengatakan bahwa sepanjang perjalanan Presiden selalu disambut dengan pekikan "Merdeka!"[37] Rakyat merasakan ada keistimewaan mengucapkan pekik "Merdeka!"

Apa sebenarnya makna Merdeka itu? Merdeka dapat diartikan bahwa Belanda harus lenyap, dapat pula berarti dengan hati besar tidak takut mati. Pengertian Merdeka dan berita Proklamasi tidak dapat dipisahkan. Mendengar berita Proklamasi menyebabkan darah rakyat mendidih untuk mempertahankan kemerdekaan.

Sejak pertempuran Surabaya, semboyan "lebih baik mandi darah daripada dijajah" menjadi populer. Di Pemalang, salam "darah!" yang diteriakkan dengan dua tinju terkepal tidak kurang pentingnya

---

lawanan. Lihat Ushiyama Mitsuo, *Hokubu Sumatera Susen Noki* (konflik sesudah penyerahan Jepang di Aceh), diterjemahkan oleh Akira Oki dan Anthony Reid, akan terbit).

[37]Thompson, *Hubbub in Java*, hlm. 73, 76.

daripada salam Merdeka, karena satu perjuangan satu hati (*one soul one struggle*) berarti bersatu berjuang melawan Belanda. Bagi yang lain, berarti darah kaum kolonialis tumpah bila berani kembali. Salam itu melambangkan keberanian para pahlawan muda dalam mempertahankan tanah airnya; dapat pula diartikan sebagai lambang pembalasan dendam atas penindasan di masa kependudukan Jepang.[38]

Dua kata revolusioner yang memikat yaitu semangat dan bebas. Waktu itu kalau seseorang dianggap tidak mempunyai semangat, maka dia bukanlah pemuda sebenarnya. Di Comal, Pemalang, jawaban atas salam merdeka ialah bebas! Selama revolusi ada beberapa ciri sifat perjuangan yang dianggap penting. Di antaranya, yaitu, tugas jaga yang merupakan kewajiban tanpa perintah dianggap sebagai bagian dari kesadaran revolusioner. Orang yang tidak aktif jaga akan cepat dicurigai sebagai musuh. Tetapi bebas dapat juga diartikan bahwa setiap orang secara pribadi bebas untuk datang dan pergi, tidak terlalu diatur, dan mencari kebebasan dalam pengalaman-pengalaman baru.

Sekalipun kebebasan pribadi yang baru ditemukan, ini merupakan bagian dari ciri revolusioner, mereka juga dituntut untuk mempunyai rasa disiplin dalam kelompoknya. Para pemuda yang bertugas di penjagaan rintangan jalan, menyuruh para pengemudi yang tidak membawa surat keterangan jalan agar kembali. Tidak ada perlakuan tidak semena-mena dan tidak ada perampasan.

Tentu saja tidak semua pemuda mempunyai kesadaran revolusioner. Beberapa di antaranya menggunakan kebebasan itu untuk kepentingan pribadi. Mereka ini datang untuk menggilir jaga agar dapat jatah nasi pongol, sehingga ada pemuda-pemuda yang dijuluki pemuda pongol karena ogah-ogahan bertugas jaga apabila nasi pongol belum datang.[39]

Untuk dianggap sebagai pemuda kriterianya bukanlah umur, pendidikan, atau status perkawinan yang menentukan, meskipun arti pemuda sebenarnya adalah seseorang yang belum kawin (hanya orang-orang muda yang belum kawin yang bisa menjadi anggota In-

[38]Nyanyian, sajak-sajak dan cerpen yang menggunakan tema atau judul daerah, dapat dijumpai dalam majalah *Revolusioner* sepanjang tahun 1946.

[39]Nasi pongol adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang, yang dimasak di dapur umum. Kadang-kadang disebut nasi nuk.

donesia Muda sebelum perang). Pemuda sekolah, yaitu pemuda yang mempunyai pendidikan Belanda, merasa lebih mampu menahan diri daripada pemuda rakyat yang NICA-phobia, yang terlibat dalam pembunuhan di Slawi.[40]

Para pemuda rakyat yang memiliki kesadaran revolusioner itu sebenarnya menginginkan kebebasan pribadi, namun tidak memahami arti kemerdekaan. Mereka lebih mengutamakan latihan baris-berbaris kemiliteran dan memperluas rasa ketidaksenangan terhadap Belanda. Pembicaraan mereka hanya satu hal yaitu membela negara.[41] Mereka harus sanggup melupakan rumah, keluarga, bajak, maupun kerbaunya. Mereka tidak boleh memikirkan apa pun kecuali perjuangan. Lain halnya dengan Pemuda Permi Pekalongan, yang anggotanya adalah pelajar sekolah menengah utama (MULO), yang terdiri dari anak-anak priayi Pekalongan yang tinggal di Jalan Permi. Pemuda Permi pada waktu Proklamasi membagi-bagikan poster yang berbunyi Merdeka atau Mati. Merekalah yang menurunkan bendera Jepang di depan Kantor Kewedanaan Pekalongan, meskipun kemudian lupa menggantikan bendera Jepang dengan Sang Merah-Putih. Mereka banyak berbuat nekat dengan mencopoti lampu-lampu mobil, tabung radio, dan menulis semboyan Merdeka atau Mati pada mobil residen Jepang.[42] Meskipun demikian mereka masih direndahkan dan dianggap sebagai sekelompok petualang, dan tindakannya dihina oleh para pemuda revolusioner, mereka itu hanyalah pemuda "etok-etokan" atau gadungan saja.

Kelompok pemuda konservatif lain adalah Angkatan Muda yang dibentuk oleh pangreh praja Pemalang yang keanggotaannya berasal dari kalangan birokrat pemerintahan. Pangreh praja berusaha menggunakan Angkatan Muda Kantor untuk menguasai kaum perjuangan di Pemalang dan bahkan membentuk Gabungan Angkatan Muda Indonesia yang dicemoohkan oleh kaum revolusioner.

Semangat perjuangan dialami baik oleh angkatan tua maupun angkatan muda. Kebanyakan pemimpin pemuda di Tiga Daerah telah kawin, berbeda dengan rekan-rekannya di Jakarta, dan kebanyakan

[40]Wakil Ketua KNI Kabupaten Tegal, Wawancara, 16.2.75.
[41]Pemimpin Hizbullah Pemalang, Wawancara, 16.2.75.
[42]Pemuda Permi, Wawancara, 30.7.75.

mereka berumur lebih dari 30 tahun.[43] Kebanyakan pemimpin badan perjuangan di Tiga Daerah berasal dari keanggotaan pergerakan sebelum tahun 1926, dan tahun 1930-an. Sebagian dari mereka pernah dibuang ke Digul setelah tahun 1926. Mereka dapat memberi kepemimpinan yang sangat dibutuhkan oleh para pemuda lapisan bawah yang muda dan belum berpengalaman. Mereka bukannya secara diam-diam memimpin dari belakang, melainkan sering berada di depan dalam kegiatan pemuda yang sesungguhnya. Penculikan Bupati Pemalang, misalnya dilakukan pemuda yang dipimpin oleh Sumargo dan Rustamaji.[44] Untuk menghentikan kegiatannya yang radikal pada awal tahun 1920-an Sumargo (anggota Sarekat Islam) dipecat dari jabatannya sebagai guru sekolah rakyat lalu diangkat menjadi carik desa oleh asisten residen Belanda. Pada waktu ia menjadi pemimpin revolusioner di pabrik gula Banjardawa, dan pemimpin kepolisian di Pemalang, ia sudah berumur 51 tahun.

Orang-orang yang bersemangat, walaupun usianya sudah lanjut masih berjiwa revolusioner. Seorang setengah baya berdiri tegak dan berteriak "Merdeka!" ketika Wedana Tiga Daerah yang mengadakan perjalanan dinas keliling ke desa-desa melewati sebuah pos penjagaan di desa.

> Saya lewat Desa Bogares Kidul, saya dengan kusir dokar dengan juru tulis R. Munawir, juru tulis Kewedanan Pangkah. Ada gardu, pos pemuda. Saya lewat ada orang berdiri. "Merdeka!" Saya turun. Saya tanya, "Siapa ini?" "Saya pemuda Marta. "Saya ketawa lama. Sudah 50 tahun, dia menyatakan pemuda, lucu, tapi nyata. Dia punya perasaan pemuda. Saya bilang, "Kamu, rambut sudah putih keluar telinga kok, bagaimana?" Dijawab, "Ya merdeka." Saya memahami kegembiraannya kebahagiaan meluap-luap. Merdeka artinya tidak dijajah lagi. Merdeka artinya kebahagiaan, dulu melarat nanti tidak melarat lagi.[45]

Hubungan antara para pemuda dengan pemimpin-pemimpin

---

[43]Tokoh pemuda Jakarta seperti Sidik, Sukarni, Adam Malik, dan Khaerul Saleh, kesemuanya berumur menjelang tiga puluhan tahun.

[44]Rustamaji, saudara sepupu kedua Supangat, lihat Bab Lima untuk gambaran lengkap insiden ini.

[45]Ketua KNI Pangkah, Wawancara, 27.11.75.

tua dipererat dengan penggunaan *wadanan* (julukan), dan diberikan menurut ciri-ciri fisik atau tingkah lakunya, yang kemudian dipakai sebagai kode sandi antara para anggota pergerakan bawah tanah sebelum perang. Di penjara kode sandi itu dipakai sebagai perlindungan menghadapi mata-mata Belanda. Biasanya *wadanan* itu akan menimbulkan rasa malu apabila dipakai di depan umum. Wadanan Pemalang sangat populer, dan menunjukkan betapa kuatnya kelompok radikal sehingga orang harus berani diwadani. Tokoh komunis K. Mijaya, sebelum perang dikenal sebagai Jono Cempluk (nama aslinya Sarjono), karena orangnya pendek seperti lampu kecil (*ceplik*), dengan perut bulat menonjol (*nyempluk*). Tokoh API Sukarso dinamai Karso Gebog, karena orangnya pendek dan agak gemuk seperti gebog, tempat penyimpanan padi para petani kecil. Amir Codot, pemimpin PKI sebelum perang dan anggota PKI bawah tanah, karena ia sangat senang makan pisang seperti kelelawar (codot). *Wadanan* di Pemalang mencerminkan pengaruh kaum radikalis tua di Tiga Daerah, dan merupakan kebalikan dari kesopanan ciri-ciri priayi. Menurut Wakil Ketua KNI Kabupaten Tegal, para pamimpin tualah yang mula-mula mengaktifkan para pemuda, jadi bukan prakarsa yang bisa timbul dari kalangan pemuda saja.[46]

Pandangan Elite Birokrat

Baik kaum revolusioner maupun priayi pada umumnya percaya bahwa kekuasaan itu bersifat spiritual. Pangreh praja Pekalongan melihat pertentangan antara golongan pangreh praja dengan kaum revolusioner dalam dua segi. Pertama, pertempuran antara dua wahyu yang merupakan perwujudan kakuatan spiritual. Kedua, pertempuran antara dua pihak yang bertentangan seperti di dalam wayang. Kekalahan kaum revolusioner, oleh kalangan pangreh praja dianggap sebagai akibat karena Kutil dan Sarjio menerima wahyu tinangkal atau "wahyu hitam," sedangkan pimpinan TKR dapat mengalahkan Sarjio karena menerima wahyu sejati, Wahyu Cakraningrat.[47]

---

[46]Wawancara, 8.10.76.

[47]Tinangkal berarti mengesampingkan, mencerminkan persepsi pangreh praja tentang bagaimana residen baru mencapai kedudukannya itu. Cakraningrat itu wahyu sejati, wahyu kekuasaan.

Pada tahun 1974 bekas komandan TKR Wadyono mengatakan bahwa pada masa sebelum gerakan kontra Tiga Daerah dilancarkan, ia merasa memperoleh isyarat gaib melalui mimpi tentang adanya dua macam wahyu itu. Isyarat gaib inilah yang mengubah pandangannya, meski semula ia menganggap bijaksana untuk mengakui Residen Sarjio. Dalam mimpinya, ia memandang sebuah lembah yang indah dengan kampung dan desanya yang berlatar belakang Sang Merah Putih yang berkibar di kejauhan. Namun bendera itu lalu berubah menjadi hitam dengan tepi keemasan, semakin membesar menutupi langit.[48] Di tengah bendera muncul sebuah tulisan dalam aksara Jawa terbaca: "saka jaba Jawa" (dari luar Jawa), dan akhirnya bendera itu lenyap. Keesokan harinya mimpi ini dibahas dalam rapat staf pimpinan TKR. Timbul interprestasi tunggal, kata saka jaba Jawa bermaksud tidak asli, suatu impor, maka tidak lain harus bertindak tegas terhadapnya.

Menurut pimpinan TKR itu wahyu tentaralah yang bertuah dan ini terbukti ketika tentara dapat menahan Residen dan pendukungnya, sehingga mereka tidak ada kekuatan untuk melawan.[49] Bagi pangreh praja, ini merupakan pertanda pasti, bahwa Sarjio telah menggunakan kekuatan spiritual dengan menempuh jalan yang keliru. Menurut Wedana Pekalongan wahyu itu berwarna putih, tetapi bila disalahgunakan ia berubah menjadi wahyu *tinangkal* (hitam).

Kata-kata "saka jaba Jawa" dipakai oleh pangreh praja sebagai dasar kolonial dan dimanfaatkan sebagai senjata untuk menghadapi kelompok-kelompok politik yang baru. Sarekat Islam ditolak oleh pangreh praja karena dianggap sebagai organisasi asing dengan dianutnya pengaruh pembaharuan, kebudayaan, dan politik Islam. Sejak pemberontakan tahun 1926, pangreh praja pada umumnya berpendapat bahwa komunisme itu juga dari luar maka harus dilawan dengan keras.

---

[48]Wawancara, 21.11.74. Bendera hitam keraton Yogyakarta dibawa ke luar pada malam hari dan diarak keliling kota apabila kerajaan menghadapi wabah penyakit atau bahaya lain dari luar.

[49]Kehilangan kekuatan sering disebut "kelangan bayu." Bayu artinya angin, kata kias dari kekuatan spiritual.

Seperti dalam pemberontakan 1926, dan juga peristiwa Madiun 1948, ada beberapa pangreh praja seperti Jaksa, Sekretaris Kabupaten dan Wakil Wedana di Brebes, yang tertarik pada tuntutan golongan radikal di Tiga Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ada persesuaian antara pandangan hidup tradisional Jawa dengan sosialisme. Pangreh praja menganggap orang-orang tersebut berkhianat pada pangreh praja dan bertindak khilaf. Padahal pejuang-pejuang sendiri menganggap pangreh praja sebagai "dari luar Jawa" karena dasar sosial dan politik pangreh praja adalah kekuasaan kolonial. Cara hidup yang berbau barat dengan penggunaan bahasa Belanda dan sikap masa bodohnya terhadap Islam di wilayahnya membuat mereka tampak "asing," seperti halnya Islam dan PKI di mata pangreh praja. Gerakan oposisi yang dipimpin oleh orang-orang Islam terhadap kaum priayi merupakan bagian dari gerakan kebangkitan kembali Islam di Jawa. Antipriayi dari aliran Budiah di Pekalongan pada tahun 1860-an merupakan perlawanan terhadap kepercayaan mereka yang telah diubah menjadi kepercayaan Jawa dan mereka telah bekerja sama dengan pemerintah kolonial.

Pertentangan antara dua kelompok, Pandawa di sebelah kanan dalang dan Kurawa di sebelah kirinya, merupakan dasar cerita di dalam wayang kulit. Dengan demikian wajarlah bahwa konflik yang muncul di Pekalongan pada bulan Desember 1945 antara kalangan revolusioner dengan TKR oleh elite birokrat dipandang dari sudut wayang. Dengan demikian Wedana Pekalongan percaya bahwa TKR akan menang, karena dalam wayang "yang di sebelah kanan selalu menang." Siapa yang bakal menang itu yang dianggap benar oleh pangreh praja.[50][]

[50]Sebagai perbandingan lihat G.J. Resink, "From the Old Mahabrata to the New Ramayana Order," makalah untuk konferensi ke-6 IAHA (International Association of Historian of Asia), Yogyakarta, 26-30 Agustus 1974.

BAB DELAPAN

REVOLUSI DI KOTA-KOTA KABUPATEN

PARA pangreh praja yang telah didaulat dari jabatannya dan telah mengundurkan diri, menyelamatkan diri dengan menyingkir ke ibukota kabupaten. Tetapi ternyata langkah ini tidak memberikan perlindungan yang sesungguhnya, karena kota-kota kabupaten segera terkena oleh meluasnya revolusi sosial yang berkembang.

Hubungan antara daerah dengan ibukota kabupaten sejak Proklamasi tidak lancar karena beberapa hal. Kendaraan bermotor sangat sedikit; penggunan sepeda terhalang oleh langkanya ban karet, padahal sepeda adalah alat perhubungan utama. Keadaan ini menyebabkan para pemimpin perjuangan di kota hubungannya sedikit sekali dengan pengikutnya di desa-desa. Persaingan antara para pemimpin pun menjadi sebab hubungannya menjadi lemah lantaran desa-desa yang tidak diperhatikannya.

Selama pergolakan sosial bulan Oktober, hubungan antara ibukota kabupaten dengan desa-desa di daerah pedalaman mejadi semakin sulit. Banyak orang takut bepergian ke luar kota, karena khawatir akan diculik dan kehilangan nyawa. Ada beberapa pangreh praja yang berhasil meloloskan diri, ada pula yang tidak diketahui bagaimana nasibnya. Banyak pula yang melarikan diri ke ibukota-ibukota kabupaten atau Keresidenan Pekalongan, tetapi pergolakan sosial tampaknya mengejar pangreh praja sampai ke ibukota keresidenan.

Pemalang

Mari kita amati jalannya revolusi di kota Pemalang. Dalam minggu kedua bulan Oktober 1945, terdapat beberapa laporan dan desas-desus mengenai orang-orang pedesaan yang bersiap untuk bergerak dari selatan menyerang kota Pemalang. Karena inilah, maka para pemimpin revolusioner Pemalang memutuskan bahwa Bupati untuk sementara waktu harus dimasukkan ke dalam penjara kota demi keselamatannya sendiri.

Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober, pukul 3.30 siang, ketika Bupati R.T. Raharjo Sosro Adikusumo sedang berbincang-bincang dengan Patih Raden Sumarto di pendopo, sebuah bus dari pabrik gula Comal tiba. Sekitar lima belas orang pemuda yang dipimpin dua aktivis terkenal, Sumargo dan Rustamaji,[1] berlompatan keluar dan mengepung pendopo itu. Bupati merasa heran, secara naluriah sesuai sopan santun yang dihormati sejak lama terhadap setiap orang yang memasuki pendopo, ia mempersilahkan "tamunya" duduk. Tetapi Rustamaji sambil mengamangkan pistolnya berkata bahwa ia punya sedikit waktu untuk melaksanakan tugasnya. Tugasnya ialah menempatkan Bupati dan patihnya di tempat perlindungan yang aman, dalam penjara kota, karena rakyat sedang mempersiapkan diri untuk menyerang Kantor Kabupaten dan kantor-kantor pemerintah lainnya. Bupati menjawab bahwa ia tidak merasa melakukan kesalahan apa pun. Begitu pula ia tidak merasa akan diserang rakyatnya. Ia akan membicarakan perlunya perlindungan itu dengan patihnya dulu. Tapi alasan itu ditolaknya dengan kasar, demikian pula penolakan kasar terhadap permintaan untuk pamitan dengan istrinya. Karena Rustamaji kini memegang pistolnya "seakan-akan hendak digunakannya,"[2] Bupati dan Patih tidak punya pilihan lain kecuali berangkat dengan kelompok tersebut. Bupati masih sempat meninggalkan pesan kepada seorang pelayannya agar istrinya berhati-hati menjaga pusaka Pema-

[1]Rustamaji, lulusan Sekolah Teknik Menengah "Prinses Juliana School" di Yogyakarta dan saudara sepupu Supangat, berasal dari Randudongkal. Sedangkan Sumargo, aktivis Sarekat Rakjat dan 1926, pemimpin pabrik gula di Banjaratma.

[2]Bupati Raharjo, Jawaban atas pertanyaan tertulis dari Jaksa Pekalongan, tg. 20.6.40, Proc. Gen.

lang yang bertuah dan termasyhur, yaitu sebilah keris yang bernama mBah Tapa.

Pergolakan rakyat mencapai puncaknya di Pemalang beberapa jam sesudah peristiwa di atas. Rumah seorang lurah dan camat dibakar dan rumah-rumah lainnya dirampok. Korbannya adalah Juwito, bekas pegawai Jawatan Pertanian, yang selama masa pendudukan ikut terlibat dalam pembagian kain. Ia sedang makan di pasar tanpa diketahui bahwa ada beberapa orang telah menunggunya di luar. Ketika ia meninggalkan pasar dengan menaiki sepeda, ia dihentikan dan dibunuh dengan pukulan martil di kepalanya.[3]

Malam itu orang-orang secara berkelompok memenuhi jalan-jalan kota Pemalang mencari koruptor. Mereka bercelana pendek dan tubuhnya dihitamkan dengan jelaga, berkalung ban bekas yang kemudian dilepas dan dipotong untuk membuat obor, guna menerangi jalan. Sekitar pukul 10 malam, orang-orang tiba di Kantor Kabupaten, tetapi tidak menemukan seorang pun di rumah kediamannya. Mereka lalu ke rumah Sekretaris Kabupaten, memasukinya secara paksa dan mengobrak-abriknya.[4]

Rumah-rumah kediaman para priyayi yang dianggap korup diserang seperti rumah Kepala Jawatan Perikanan dan Wedana Pemalang, Wijoga Puspoyudo. Perabotan rumahnya dikumpulkan lalu dibakar. Ada yang masih ingat akan Wandri, kepala Jawatan Perikanan itu:

> Bajingan tengik itu! Ia mengawini ipar Bupati, seorang janda, supaya ia dapat berkata, "Saya kawin dengan keluarga Bupati." Saya naik sepeda dengan ban mati, sedangkan dia menimbun ban pompa; dia punya timbunan sekamar penuh.[5]

Seorang camat dari kawasan pedesaan yang sebelumnya menjadi sasaran aksi yang sama di daerahnya sendiri, berada di Pemalang pada malam itu. Ia masih ingat, bahwa:

> Rumah tinggal kosong di Bodeh, dengan semua barang... (kami) tiba di Pamalang dan tinggal di rumah (seorang guru bernama) Umar.

---

[3]Dari keterangan dalam wawancara di Pemalang bulan Februari dan November 1975.

[4]Pemimpin API, Wawancara, 9.2.75.

[5]Wawancara, 3.5.75.

> Pukul 7 sore kami baru saja makan malam ketika ribuan rakyat melalui jalan di depan rumah. Anak-anak kecil membawa lampu petromax, dan bendera Merah Putih kecil-kecilan, kaleng dipukul "tong, tong," jalan penuh sekali. Orang dengan "black list" (daftar hitam) berada di depan. Lalu saya ingat bahwa Umar dulu kumicho! (bertanggung jawab atas sistem distribusi bahan pokok sebagai kepala rukun tetangga). Saya dan istri membawa kopor ke rumah tetangga, Kiayi Abdullah. Rakyat mengepung rumah Pak Umar sambil teriak "Bakar! Bakar!" "Jangan! Bukan rumah tapi orangnya yang kita cari!" Lalu rumah Umar dirampoki. Semua barang kami diambil, sepeda dan barang-barang yang kami bawa dari Bodeh termasuk. Rupanya Pak Umar sudah tahu sebelumnya karena mesin jahit dan barang lain sudah diungsikan, sebagian barang sudah disingkirkan.[6]

Natsir, kepala Polisi Pemalang, termasuk di antara orang-orang yang diculik pada malam hari itu demi keselamatannya sendiri. Istrinya menuturkan kembali kajadian itu, betapa ia bergegas mencarinya ke asrama polisi, namun tidak dijumpainya. Lalu ia pergi ke markas pemuda, dan diberi tahu bahwa suaminya berada di penjara. Ia diizinkan buat menemui suaminya. Pada keesokan harinya sekitar sepuluh pemuda datang ke rumah dan mengambil semua buku berbahasa Belanda dari rak, membawanya keluar lalu membakarnya bagaikan api unggun, sambil mengatakan bahwa buku-buku itu membuktikan bahwa kepala polisi itu "agen NICA."[7] Nyonya Natsir dan para istri serta keluarga pejabat-pejabat tertinggi di kota itu dibawa ke bekas rumah penasihat militer Jepang (shidokan) di sebelah utara alun-alun kota. Seorang pemimpin badan perjuangan kini menuturkan bahwa sebenarnya hanya keluarga yang bersedia saja dipindahkan ke tempat aman di rumah shidokan itu. Istri bupati termasuk di antara mereka yang merasa dirinya diinternir. Ia menggunakan keris pusaka mBah Tabah untuk melindungi mereka yang merasa ketakutan menghadapi para penjaga.

Semua pejabat yang dituduh melakukan tindak korupsi ditahan, kedua tangannya diikat di atas kepala, dan dibawa ke lapangan tenis di alun-alun kota. Sekitar 18 orang pangreh praja dimasukkan

[6]Camat Bodeh, Wawancara, 23.9.71.
[7]Wawancara dengan istri Natsir, 23.9.72.

ke dalam penjara, tempat yang dianggap paling aman bagi mereka. Beberapa ditangkap oleh aksi rakyat di Pemalang, sedangkan Bupati dan Kepala Polisi diculik oleh pemimpin perjuangan dan oleh para pemuda untuk dilindungi.[8]

Para pemuda santri di Pemalang, baik yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Arab Indonesia (GPAI) maupun dalam Hizbullah, memainkan peranan penting pada awal revolusi sosial. Seperti kata wakil pimpinan Hizbullah kemudian, bahwa ideologi tidaklah penting, tak seorang pun berpikir tentang ideologi, juga kelompok Islam tidak. Karena tidak ada perintah, maka semangat dan spontanitas itu sangat penting. Semboyan mereka yaitu "kami bersama-sama, kami bersatu." Pemimpin barisan pemuda pada umumnya santri. Mereka dipersatukan oleh satu tujuan yaitu menghancurkan koruptor.[9]

Persatuan antara golongan Islam dan kaum nasionalis berpendidikan Barat merupakan ciri pola sosial politik di Kabupaten Pemalang. Pimpinan Islam H. Zaini dan Nasron bersama dengan pemimpin sosialis berpendidikan Barat membina kerja sama yang erat dan merupakan contoh persatuan tersebut. Suleman seorang camat revolusioner menuturkan perjuangan di Randudongkol, Pemalang Selatan.

> Tidak ada perbedaan dulu antara agama dan bukan agama. H. Zaini dan Nasron tidur di tempat saya dan omong-omong sampai pukul dua belas malam atau pukul tiga pagi. Apakah ada perbedaan konsepsi mengenai revolusi? Tidak ada. Waktu itu masih zaman "Merdeka." Apa artinya Merdeka? Merdeka berarti lepas dari penjajahan. Kami mau menjadi satu negara merdeka. Bentuknya akan ditentukan kemudian. Kami sudah tahu bahwa Kromo Lawi, PKI serta kaum sosialis Tegal (kelompok KNI) adalah berbeda. Di tingkat daerah kami mengikuti siapa pun yang progresif.[10]

Dua hari setelah pergolakan sosial di Pemalang, barulah pemerintahan revolusioner mulai memegang kekuasaan. Supangat, mantri

---

[8]Wawancara, 4.2.75. Di penjara termasuk Bupati, Patih, Kepala Polisi, Wedana Pemalang, Kepala Jawatan Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perikanan, dan Raden Suwignyo, sekretaris kebupaten.

[9]Wawancara, 16.2.75.

[10]Wawancara, 1.12.76.

kesehatan kota (*mantri verpleger*), berkata kepada rakyat bahwa tidak boleh lagi ada pembakaran rumah dan pembunuhan. Seruan Supangat yang dipatuhi rakyat menunjukkan adanya perbedaan penting antara gerakan revolusioner di Pemalang dengan yang di Brebes dan Tegal yang terpecah belah. Supangat berhasil mempersatukan angkatan 1926, angkatan 1930-an, angkatan muda dan para pemimpin nasionalis Islam. Hal demikian berlangsung sampai akhir Peristiwa Tiga Daerah. Tidak adanya tindak kekerasan yang berarti di Pemalang juga berkat Supangat yang dapat mengendalikan para pencoleng dan pembikin onar, sehingga tidak ada pencuri, pencopet atau perusuh beroperasi di kota. Keberhasilan Supangat ini didasari kejujuran dan keadilannya sewaktu menangani penjatahan. Selain itu ia pun seorang yang ramah, luwes dan akrab dengan pemuda.

Revolusi sosial di Pemalang berjalan tertib karena adanya pendekatan pragmatis dari para pemimpinnya. Prioritas pertama dari pemerintahan baru adalah membangun kembali ekonomi sesudah masa pendudukan Jepang. Patih baru, dr. Muryawan, membentuk sebuah kelompok penasihat untuk membuka kembali perusahaan-perusahaan daerah. Seorang guru yang berpendidikan sekolah pertanian ditunjuk untuk mengelola perkebunan kapuk dan kelapa di Randudongkal. Pengangkatan ini mencerminkan adanya persesuaian pandangan di antara dr. Muryawan dengan Supangat, yaitu demi kelancaran pemerintahan, masih dianggap perlu menggunakan pangreh praja lama. Dua camat angkatan Jepang dipekerjakan kembali dan menjadi sekretaris Kabupaten. Kelompok Sarekat Rakyat-eks-Digulis menghendaki agar tidak ada seorang kaki tangan Jepang dalam pemerintahan baru ini tetapi Supangat dan dr. Muryawan berpendapat bahwa mereka yang jujur masih dapat dimaafkan. Karena umumnya penguasa baru itu tidak memiliki keterampilan administratif, maka mereka banyak dibantu oleh dua orang bekas camat itu. Bersama-sama Supangat dan dr. Muryawan, kedua bekas camat itu secara resmi dilantik oleh Residen Mr. Besar pada tanggal 29 Oktober 1945.[11]

[11] Surat pengangkatan Supangat dari Residen Besar adalah nomor 46/P.P.D. (Surat Jaksa Agung Tirtawinata, tertanggal 25 Maret 1974), Proc. Gen.

Tegal

Di Tegal, perjuangan untuk membentuk kekuasaan dan kepemimpinan baru menjadi masalah yang berkepanjangan. Berbeda dengan Pemalang, kepemimpinan gerakan revolusioner di Tegal terbagi atas tiga kelompok: kelompok KNI, (yang dibentuk oleh Negen Broeders yang sosialis, dipimpin oleh angkatan tahun 1930-an), kelompok AMRI Slawi dipimpin oleh veteran tahun 1926, dan kelompok muda yang memimpin API-BKR-TKR.

Kelompok KNI merasa tidak mampu memecahkan masalah pokok badan perjuangan untuk menegakkan hukum dan ketertiban di luar kota. Hal ini karena KNI di Tegal tidak mempunyai badan penegak hukum, angkatan kepolisian sendiri, yang sama seperti TKR, tidak bersedia beroperasi di luar kota. Ketua KNI Tegal diperingatkan oleh Residen Besar karena banyaknya pangreh praja Brebes yang diculik oleh orang-orang KNI sendiri.

Ketika Tegal menghadapi masalah itu, perutusan KNI Pekalongan yang terdiri dari Residen, Ketua KNI dan dari kelompok Islam datang mengunjungi badan-badan perjuangan Tegal. Pemimpin KNI Tegal dipanggil ke Kabupaten. KNI kabupaten menjelaskan bahwa dua camat yang dibunuh (Lebaksiu dan Adiwerna) tindakannya sewenang-wenang dan korup. Rakyat menginginkan agar semua pangreh praja dari bupati sampai camat diganti oleh orang-orang yang sesuai dengan keadaan revolusi nasional dewasa itu.[12]

Untuk memperkuat kedudukannya, KNI Kabupaten dan Tegal Kotapraja mempersatukan diri menjadi satu komite. Meskipun begitu KNI Persatuan ini tidak efektif dengan alasan yang sama. Komite baru ini tidak memiliki pasukan keamanan, dan para veteran 1926 dari Barisan Pelopor tidak mempunyai wakil di dalamnya. Akhirnya pada bulan Oktober kelompok KNI melakukan pendekatan ke Slawi untuk mendapat keterangan tentang stretegi perjuangan AMRI. Pada garis besarnya kelompok AMRI Slawi menginginkan perombakan struktur pemerintahan setempat secara total, bahkan sampai ke struktur BKR. Semua kepala daerah diganti. BKR (TKR) harus terdiri

[12]Wakil ketua KNI kabupaten, Jawaban No. 7; Wawancara, 8.10.76.

dari rakyat biasa, dan tidak memasukkan mereka yang membantu pemerintah fasis, seperti bekas Heiho dan Peta.[13]

Konflik di antara kelompok-kelompok perjuangan Tegal terpusat pada kelompok API/BKR. Sudah sejak sebelum pembunuhan terhadap orang-orang Indo yang melibatkan seorang pemimpin API/BKR, AMRI Slawi mengeluh kepada Barisan Pelopor Tegal tentang penangkapan pemimpin KNI yang dimasukkan ke dalam penjara Tegal. AMRI Slawi ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan ini, dan menekankan bahwa kepemimpinan revolusioner kota akan terpukul, apabila ini berlangsung terus. Menurut laporan Barisan Pelopor, beberapa truk penuh termasuk di antaranya pimpinan KNI dengan dikawal oleh API, diangkut ke kota dan dipenjara. Setelah berunding dengan jaksa, mereka dibebaskan pada bulan November. Selain itu KNI juga menerima laporan tentang gangguan dan pembunuhan lurah-lurah di Pangkah. Setelah serangan terhadap asrama polisi Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Oktober oleh rakyat, pemimpin API menegaskan pentingnya pokok perjuangan revolusioner melawan kolonialisme dan bukan melawan teman sendiri, yaitu polisi. Mereka menyalahkan rakyat yang telah mengadakan serangan terhadap asrama-asrama polisi, dan dianggap telah bereaksi berlebihan. Mereka memperingatkan agar tidak main hakim sendiri dan tidak bertindak sewenang-wenang. Sejak itu peranan API di Tegal dalam gerakan revolusioner merosot bahkan sampai nama API dijuluki Anti Pemerintah Indonesia.

Merosotnya nama API dan meningkatnya pengaruh AMRI Slawi menunjukkan adanya pergeseran ke kiri yang lebih radikal di Kabupaten Tegal. Para pemimpin AMRI Slawi dapat membina hubungan dengan kaum lenggaong, melalui kelompok Kutil di Talang, santri rakyat di Ujungrusi, dan Blamoa yang dekat pusat pemberontakan tahun 1926. Rencana untuk mengambil alih Kotapraja Tegal dan menggantikan pangreh praja dimulai dari Slawi. Tanggal 3 November beberapa kelompok revolusioner menghadiri rapat di markas AMRI Slawi. Rapat dipimpin oleh Sakirman, pemimpin AMRI Slawi yang memberi penjelasan tentang pemerintahan yang seharusnya berada

[13]Moh. Nuh, Jawaban tertulis, Semdam, 1959, hlm. 9.

di tangan kaum marhaen.[14] Pangreh praja harus diperiksa dan diserahkan kepada rakyat. Delapan pemimpin API harus disingkirkan.[15] TKR harus dilucuti karena peranannya hanya melindungi Residen Besar dan pangreh praja.

AMRI Slawi menjelaskan rencana untuk pengambilalihan pemerintahan kabupaten. Tindakan pertama ialah mendirikan rintangan-rintangan jalan untuk mencegah pangreh praja yang akan melarikan diri. Semua kendaraan dan dokar dihentikan, pengemudi dan penumpang ditahan. Kemudian TKR di Adiwerna, Slawi, dan Balapulang dilucuti. Para anggotanya ditahan dan senjatanya dipergunakan dalam serangan umum ke Kota Tegal. Rakyat harus berkumpul di pinggir kota dengan senjata yang diperoleh dari TKR dan siap menunggu perintah dimulainya serangan umum. Setelah Kota Tegal diduduki, senjata harus diserahterimakan di markas Barisan Pelopor. Rakyat yang dikerahkan untuk penyerangan umum ini berasal dari Kecamatan Slawi, Adiwerna, Talang, Dukuhturi, Sumurpanggang, dan Kemantran.[16] Bagian terakhir dari rencana itu ialah menyerang pabrik gula Pangkah untuk menyingkirkan kepemimpinan di Tegal, rakyat akan disambut oleh para anggota Barisan Pelopor yang mengenakan pita di lengannya bertanda BP dan merekalah yang akan memimpin rakyat mencari sasaran yang harus disingkirkan.

Perintah melucuti TKR menimbulkan masalah bagi utusan Adiwerna, karena ternyata beberapa temannya menjadi pemimpin TKR di Adiwerna. Operasi disamarkan dengan Pemuda Istimewa Unjungrusi berpura-pura latihan. Sejumlah 50 orang yang membawa pistol, mengepung rumah seorang pimpinan TKR. Dijelaskan kepada pimpinan TKR bahwa tindakan ini diambil guna mencegah pertumpahan darah. Dijelaskan bahwa rakyat sudah melakukan serang-

[14]Sukarno menemukan istilah Marhaen pada akhir tahun 1920-an, yang berarti rakyat kecil, yang berasal dari Pak Marhaen, seorang petani kecil, yang tanah miliknya tidak mencukupi buat menutup kebutuhan keluarganya, sekalipun ia memiliki alat produksi, yakni sebidang tanah kecil dan peralatan kerja. Ia bukan proletar karena tidak menjual tenaga kerjanya.

[15]Adiwerna Verslag, 1946, hlm. 4-5, Proc. Gen. Mereka ini termasuk Mansur, pemimpin Pangkah, saudara laki-lakinya Sidik, Yunus, Pitoyo dan Otong Samsudin, kesemuanya tokoh API/TKR Tegal.

[16]*Ibid.*, hlm. 7. Kemantran adalah nama lama Kecamatan Tarub.

an, dan desa-desa yang tidak memiliki senjata akan menyerang TKR untuk merebut senjata, dan karena itu anggota TKR diminta untuk mengganti pakaian seragamnya agar tidak mengalami serangan di jalanan umum.[17]

Seorang pemimpin Barisan Pelopor menggambarkan suasana Kota Tegal pada waktu itu:

> Tanggal 4 November 1945, sejak pagi hari Kota Tegal diliputi oleh mendung yang tidak begitu tebal—sebentar-sebentar mendung dan kadang-kadang mendung lenyap dan kadang-kadang kembali lagi yang disertai gerimis kecil hanya beberapa menit saja lamanya, bagaikan sekedar menyirami jalan jangan sampai berdebu. Keadaan udara dan cuaca panas tidak dingin pun tidak, segar nian rasanya pada badan. Keadaan kota sepi, tidak seramai hari-hari biasa, hanya ada lewat perempuan-perempuan berbelanja—menggendong barang dagangannya ke pasar dan pulang kembali dari pasar. Kendaraan dokar, becak kelihatan hanya satu-dua yang lewat. Tidak terasa adanya silir angin, dedaunan diam, terutama daun beringin yang tumbuh berdiri tegak di tengah alun-alun Tegal, nampak jelas tidak ada yang bergerak sama sekali, selembar daun pun tidak ada yang berkutik, seakan-akan pohon beringin itu bagaikan orang yang sedang bersusah hati—menundukkan mukanya memandang bumi pertiwi, atau bagaikan seorang yang bersamadi, mengheningkan cipta.[18]

Sebuah pesawat terbang yang tidak ada identitasnya memperkuat dugaan bahwa Kota Tegal menjadi sarang NICA dan harus segera dibersihkan, dan diduga pesawat terbang itu tengah berusaha melakukan kontak dengan kelompok-kelompok pro-NICA di dalam kota, yaitu sisa-sisa pangreh praja, API, atau bahkan TKR.

KNI Persatuan Tegal menyadari apa yang sedang terjadi dan berusaha untuk menghindari serangan dengan jalan perundingan. Untuk ini semua pangreh praja yang tinggal di kota dipanggil berkumpul di kantor KNI untuk menandatangani pernyataan bahwa pangreh praja mendukung Proklamasi, dan akan berjuang bersama-sama rakyat mempertahankan kemerdekaan. Marjono, wakil ketua

---

[17] *Ibid.*

[18] Marsum Hr., Ceritaku, 1974, hlm. 96.

KNI Persatuan, disertai H. Iksan, seorang tokoh santri terkemuka,[19] membawa pernyataan ini ke selatan untuk mencegah pergolakan lebih lanjut. Barisan Pelopor menyangsikan keselamatan mereka dalam usaha mereka untuk menemui AMRI Slawi. AMRI Slawi masih menuntut Marjono dan H. Iksan yang pernah mengendarai mobil bekas milik kenpeitai dan yang kemudian digunakan oleh pemimpin KNI setelah Jepang dilucuti. Kemudian kantor KNI menerima telepon dari Marjono yang telah ditahan oleh rakyat di pabrik gula Pagongan, dan minta agar KNI berupaya menghindari terjadinya pertumpahan darah. Inilah pesan terakhirnya. Ternyata mereka digiring ke jurusan markas AMRI Talang, kedua-duanya dibunuh, sedang mobilnya diambil alih Kutil.[20] Dua kiai lain yang berangkat ke selatan untuk mencegah tindak kekerasan lebih lanjut juga tidak kembali, dan Kutillah yang bertanggung jawab terhadap peristiwa masuknya mereka ke penjara Slawi.[21]

Beberapa orang dari AMRI Talang, yang tiba di markas Barisan Pelopor, memberitahukan bahwa barisan rakyat telah berada di pinggiran kota, dan kota telah terkepung. Satu kelompok menuju ke markas TKR. Kelompok kedua bergabung dengan kelompok pertama ketika bertemu di asrama TKR. Kelompok lain mencari para pemimpin API dan memasuki halaman Kabupaten dari belakang (lihat peta Kotapraja Tegal hlm xxxiii).

Para pemimpin badan perjuangan Tegal memanggil rapat kilat para pemimpin TKR, Kepolisian, Barisan Pelopor, dan KNI dalam menghadapi situasi gawat itu. Sebelum ada keputusan, barisan utama pun tiba dari Slawi. Di depan barisan ada sebuah becak, yang membawa Sakirman, ketua AMRI Slawi. Di sampingnya berkibar bendera Merah-Putih besar, diiringi ratusan rakyat yang bersenjata. Kelompok terdepan mengenakan selempang janur kuning, yang di belakang mengenakan ikat kepala janur kuning, dan yang lain menggunakan ikat

[19]Haji Iksan adalah bekas Wakil Konsul di Jeddah dan baru saja diangkat Wedana Koordinator Adiwerna oleh Residen Besar.

[20]Marsum Hr., Ceritaku, 1974, hlm. 97; Kadarisman:"Catatan mengenai isi tulisan Sdr. Marsum Hr. berjudul:"Ceritaku sendiri, 5 Desember 1975 (selanjutnya dikutip sebagai "Catatan").

[21]K. Mokhidin, Wawancara, 31.1.73; K.H. Mohammad Mokhtar, Wawancara, 2.2.72.

pinggang. Semua mengucapkan "Lâ ilâ ha illâ 'llâh" terus menerus. Sebagian lagi mengayunkan goloknya yang terhunus. "Sangat mengerikan, bagaikan harimau lapar hendak menerkam mangsanya," kata seorang anggota badan perjuangan menuturkan kemudian.[22]

Kemudian markas TKR yang telah dilindungi dengan karung-karung dikepung. Beberapa polisi dan keluarganya, juga camat dan istrinya mencari perlindungan ke dalam asrama TKR itu.

> Dari arah Barat gerombolan orang banyak mendesak maju ketika barisan Lâ ilâ ha illâ 'llâh mendekat. Apa pun yang terjadi kami akan mempertahankan diri. Lalu kami terpaksa memberi peringatan dengan tembakan senapan mesin di atas kepala. Tetapi mereka menyambut "ora tembus, ora opo-opo" (tidak tembus, tidak apa-apa), "ora pasah peluru" (kebal peluru).[23]

Pertumpahan darah tidak akan terelakkan lagi dengan terus majunya orang banyak itu, kalau TKR menunjukkan tembakannya ke bawah. Beberapa orang dari pimpinannya jatuh dan diseret ke belakang TKR. Setelah lebih banyak tembakan dimuntahkan ke udara, maka gerombolan itu bubar. Akhirnya ditemukan bahwa ada yang luka. Kemudian TKR memindahkan batalyonnya ke markas resimen di Pekalongan.

Sementara itu kelompok yang menuju Kabupaten, karena tidak mendapati Bupati Sunarjo, lalu mengobrak-abrik isi rumah. Pakaian-pakaian upacara kebesaran Bupati dilemparkan, tetapi tidak ada yang dirampok atau dirusak. Istri Bupati beserta ibunya, R.A. Kardinah (kakak kandung R.A. Kartini), dan cucu perempuannya beserta pembantu mereka diberi pakaian goni dan diarak keliling kota, dan berhenti di rumah sakit yang didirikan oleh R.A. Kardinah di Tegal. Mereka lalu dibawa dengan sebuah truk ke Talang, dan ditahan di rumah Wedana Adiwerna, selama seminggu.[24]

R.M. Abu Bakar, seorang petugas yang biasa mengumpulkan romusha, dituduh menyelewengkan separuh dari tunjangan romusha

---

[22]Marsum Hr., Ceritaku, 1974, hlm. 100.

[23]Komandan Batalyon TKR Tegal, Transkripsi, 17.4.75.

[24]Kadarisman, catatan; pemimpin API, Wawancara, 10.12.75. Nyonya Sunaryo Reksonegoro, Wawancacara, 25.9.71.

untuk kepentingan pribadi. Bersama-sama dengan M. Singgih (pembantu jaksa), Abu Bakar (pokrol bambu), dan anaknya, yakni Khamzah seorang pemimpin Barisan Pelopor Kota Tagal), dibawa ke Talang oleh rakyat dan dibunuh. Sewaktu rumah kediaman Walikota diserang, Walikota Sungeb telah berlindung di penjara setempat, bersama-sama dengan yang lainnya. Karena penjara merupakan satu-satunya tempat bagi KNI untuk dapat menjamin keselamatan para elite birokrat yang terkepung itu.

Berbagai kelompok mulai berkumpul di alun-alun kota. Mereka menuntut ditemukannya para pemimpin API, karena diduga beberapa bersembunyi di asrama TKR. Mereka juga menuntut diadilinya pangreh praja, termasuk Bupati Tegal dan Residen Pekalongan Mr. Besar.

Di dalam perundingan antara pemimpin KNI Tegal dengan rakyat disepakati, bahwa KNI akan meminta kepada komandan TKR untuk mengeluarkan pernyataan bahwa TKR bukan Tentara Keamanan Residen dan TKR bersedia membantu rakyat untuk mencari agen-agen NICA yang masih berada di kota. Pernyataan Komandan TKR lalu dibacakan di depan rakyat, yang sedang menerima pembagian makanan dan minuman. Pembagian ini ditangani oleh Barisan Pelopor dengan dapur umumnya. Pemimpin Barisan Pelopor mengatakan kepada rakyat bahwa sekarang pemerintah daerah Kabupaten Tegal berada di tangan rakyat.

Peranan Sayuti Melik di arena politik Keresidenan Pekalongan dimulai bulan Oktober 1945. Ia datang dari Semarang sebagai utusan pemerintah setelah kejadian *clash* dengan kenpeitai, bersama dengan Subandrio dan Hugeng. Kedua kalinya ia datang sebagai wakil Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan wakil Presiden Sukarno.[25] Pada waktu itulah, ia melakukan kontak dengan para pemimpin badan perjuangan di Pekalongan. Dalam ceramahnya mengenai arti kemerdekaan, disinggung masalah korupsi di Balaikota Pekalongan, dan perlunya memilih walikota yang baru. Tentu saja ini menimbulkan dugaan elite birokrat, bahwa tugasnya di Pekalongan adalah hanya untuk mengesahkan pengangkatan kalangan perjuangan. Sekretaris

[25]Sayuti Melik, Wawancara, 30.10.71.

Residen Sujono, menanyakan apakah Sayuti Melik dikirim oleh Wongsonegoro atau Bung Karno, karena rakyat mengira bahwa ia dikirim oleh pemerintah pusat. Sayuti Melik mengatakan bahwa ia memegang kekuasaan untuk mengangkat pejabat setempat, meskipun ia tidak membawa surat perintah itu. Kemungkinan sebagai seorang tokoh nasional namanya telah cukup dikenal, dan ia juga adalah sekretaris pribadi Presiden Sukarno.

Sayuti Melik sewaktu berada di Pekalongan mendorong Residen Besar agar berkeliling setiap hari ke daerah-daerah dengan membawa bendera Merah-Putih besar di atas mobilnya. Sayuti Melik sendiri berusaha mendapatkan dukungan untuk menjadi residen menggantikan Mr. Besar, tetapi karena ia bukan pangreh praja maka rencananya itu tidak mendapat tanggapan. KNI Pekalongan tua juga menolak gagasan itu karena dianggap tidak memiliki wibawa yang cukup di Pekalongan.[26]

Tujuan utama Sayuti Melik mambantu menegakkan Pemerintah Daerah Republik yang sejati menggantikan pangreh praja di Tiga Daerah lebih berhasil. Dalam kunjungannya ke Tegal, kepada KNI ia menanyakan tentang pergolakan sosial yang sedang terjadi. Sayuti Melik menerima tuntutan rakyat untuk mengganti semua atau sebagian besar pangreh praja Kabupaten dan Kotapraja Tegal. Sayuti Melik mengusulkan agar diadakan sebuah rapat dan ia akan hadir sebagai wakil Gubernur guna meresmikan tuntutan rakyat, dalam bentuk revolusi, yang kemudian akan diajukan kepada pangreh praja. Sayuti akan berada di Pekalongan sambil menunggu jawaban dari badan perjuangan di Tegal.

Susmono kemudian menemui K. Mijaya dan para pemimpin AMRI Slawi, Sakirman, dan Suwignyo, di markas Barisan Pelopor Tegal, guna mendiskusikan usul Sayuti Melik.

> Sdr. K. Mijaya mengatakan dengan nada agak marah, bahwa ia tidak suka campur tangan sdr. Sayuti Melik dalam masalah ini, karena ia adalah golongan Tan Malaka. Sdr. K. Mijaya mengatakan selanjutnya, kalau sdr. Sayuti Melik orang komunis sejati, kejadian-kejadian di Tiga daerah ini cukup menarik simpatinya dan berusaha menemui

[26]Sujono, Transkripsi VII/5, 30.7.73.

kawan-kawan seperjuangannya di Slawi. Tapi bukan demikian halnya, ia lebih suka datang sebagai seorang pembesar (wakil Gubernur) untuk meredakan revolusi yang sedang bergolak di sini. Memang ia telah mengkhianati perjuangan komunis di Jawa Tengah pada zaman penjajahan Belanda. Oleh karena itu ia bukan kawan tetapi ia lawan kita dan mulai hari ini ia tidak boleh lagi melewati batas Kabupaten Pekalongan dan Pemalang. Sdr. K. Mijaya akan segera memerintahkan penjagaan di perbatasan tsb. dengan ketat.[27]

Jawaban ini mengejutkan Sayuti Melik. Ia merasa bahwa seharusnya kaum revolusioner merasa beruntung, karena ia sebagai orang Pemerintah bersedia membantu mereka mendapatkan apa yang mereka perjuangkan tanpa menggunakan kekerasan. Sesudah itu ia meninggalkan wilayah Pekalongan buat sementara waktu. Ia kembali ke Tegal pada tanggal 3 November untuk menyertai perjalanan keliling Presiden Sukarno dengan kereta api, sesuai dengan hasil pertemuan perundingan Sekutu-Republik di Magelang. Sejak itulah Sayuti Melik terlibat dalam serangkaian peristiwa yang penting dan menentukan, baik bagi kelanjutan revolusi sosial di Tiga Daerah maupun bagi kemantapan hubungan antara unsur-unsur politik baru yang ingin merebut kekuasaan dari Jepang.

Di Tegal Sayuti menemui Kolonel K.H. Iskandar Idris, komandan Resimen 17 TKR, yang ada di Tegal untuk menghadiri konperensi Muhammadiyah. Untuk mengunjungi daerah itu Iskandar Idris berangkat menuju Talang ditemani Sayuti Melik dan Kiai Bisri seorang tokoh Islam dari Tegal. Dalam perjalan ke selatan, mobil dihentikan, ketiga penumpangnya diseret keluar, ditutup matanya, dan dilucuti. Kemudian mereka digiring, bukan untuk dihadapkan ke Kutil, tetapi dibawa ke bekas kantor BKR Ujungrusi, karena mereka disangka pangreh praja yang tertangkap karena berusaha melarikan diri dari Tegal. Para pemuda itu bertindak sesuai perintah AMRI Slawi, yaitu menghentikan seluruh kendaraan yang pagi itu datang dari jurusan Tegal dan menahan penumpangnya. Para pemimpin Ujungrusi itu kemudian mengirim mereka ke AMRI Slawi. Di sanalah Sayuti Melik

[27]Wakil ketua KNI Kabupaten Tegal, Jawaban tertulis, ke-9.

segera dikenal oleh Suwignyo, sahabat lamanya di pembuangan Digul.[28] Penahanan K.H. Iskandar Idris mempunyai arti simbolis penting. Kalau K.H. Abu Suja'i melambangkan persekutuan antara Islam dan kaum nasionalis radikal di Tegal, maka K.H. Iskandar Idris melambangkan persekutuan Islam dan TKR di Kota Keresidenan Pekalongan (lihat Bab Sepuluh).

Haji Mawardi, wedana Adiwerna juga ditahan di Slawi. Ia ditangkap dalam perjalanan pulang dari konferensi Muhammadiyah di Pagongan. Kemudian mereka disatukan dengan Kiai Mokhtar dan Kiai Mokhidin, keduanya pemimpin Islam di Tegal yang diberitakan hilang setelah meninggalkan kota kabupaten pada tanggal 4 November. Ketika kedua Kiai itu sampai di Talang, Kutil meminta surat kuasa dan mereka tidak memilikinya. Karena itu cerita dari Kiai tentang adanya kesediaan pangreh praja Tegal untuk meletakkan jabatan apabila serangan atas Kota Tegal dibatalkan, tidak menimbulkan kesan apa pun pada Kutil. Mereka meminta diperbolehkan kembali ke Tegal, tetapi mereka malahan dikurung di kamar kecil (WC) selama semalam. Keesokan harinya mereka diseret keluar dan diperintahkan naik ke sebuah truk yang segera berangkat ke selatan menuju Jembatan Merah di Singkil. Di tempat inilah R.M. Abu Bakar dan M. Singgih dibunuh (lihat peta Kota Tegal). Begitu truk berjalan melambat mendekati jembatan terdengar pembantahan antara pengawalnya. Separuh berteriak "terus," sebagian berteriak "turun." Dan pengemudinya mengikuti perintah pertama.[29]

Kekacauan itulah yang memaksa Sayuti Melik dilibatkan dalam pembahasan situasi revolusioner di Tegal, terutama mengenai masa depan di Tiga Daerah dan Pekalongan. Sayuti Melik berpendapat bahwa Residen Besar tidak dapat dipertahankan lagi, sejak tuduhan pro-NICA menjadi lebih keras. Dua alasan memperkuat tuduhan ini karena pertama, dia memberi instruksi untuk menginternir semua orang

[28]Sayuti Melik mengatakan bahwa ia dibawa ke Slawi setelah para pemimpin setempat di Adiwerna "mengenali" namanya. Wawancara, 30.10.71. Sedang versi Suwignyo menyatakan bahwa setelah ditangkap, ia lalu mengirim sekelompok pemuda AMRI ke Ujungrusi guna membebaskannya serta membawanya ke Slawi. Lihat juga sebuah wawancara dengan Suwignyo "Penyelamat Jiwa Sayuti Melik." *Berita Buana*, 23.4.77.

[29]Kiai Mokhidin, Wawancara, 31.1.73.

Indo dan melindungi harta miliknya. Kedua, ia dikabarkan menyambut dengan baik Inggris dan seorang perwira Belanda pada tanggal 27 Oktober tiba di Pekalongan di bawah kawalan 15 serdadu Gurkha (India) untuk meninjau kondisi tawanan perang Belanda dan Indo. Rombongan itu telah menemui Residen Pekalongan, komandan TKR Iskandar Idris dan para pejabat keresidenan, kemudian rombongan kembali ke Semarang.[30]

Mengenai masalah TKR, AMRI Slawi dan Sayuti Melik sependapat bahwa rasa permusuhan terhadap TKR sudah begitu kuat, sehingga TKR sebaiknya segera ditarik mundur dari Tiga Daerah. Sayuti Melik menyarankan lewat interlokal agar Markas Besar TKR di Yogyakarta menarik mundur TKR dan memindahkan Residen Besar dari Pekalongan. Jadi tanggal 5 November berakhirlah jabatan Mr. Besar sebagai residen Republik selama dua setengah bulan. Mr. Besar masih ingat bahwa TKR mendapat perintah untuk menahan dia, tetapi perintah itu tidak dilaksanakan.[31] Sikapnya ini didasari oleh norma-norma sosial dan budaya Jawa. Status sosial para perwira TKR menyebabkan mereka merasa harus patuh kepada pangreh praja. Lebih-lebih Mr. Besar adalah sarjana hukum lulusan Leiden 1922. Sedangkan Sudarmo yang dapat tugas menahan Residen Besar pada waktu itu baru berumur 22 tahun. Tentu saja ia akan merasa salah langkah apabila harus menahan seorang residen yang sudah berumur 50 tahun yang pantas menjadi ayahnya. Norma budaya untuk menghormati seseorang yang berusia lebih tua yang mempunyai kedudukan serta wibawa telah mengakibatkan Sudarmo tertumbuk pada dua pilihan yang sama beratnya, yaitu antara kepatuhan kepada perintah militer dan perasaan bersalah.[32]

---

[30] *Kedaoelatan Rakjat*, 1 November 1945. Komandan TKR Wadyono, Wawancara, 20.11.74.

[31] Mr. Besar, Transkripsi I/2, 24.7.73. Di Semarang Mr. Besar diberi tahu Gubernur Jawa Tengah bahwa dia tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan perintah dari Markas Basar Yogyakarta. Mr. Besar dibawa ke Yogyakarta dan berada dalam status tahanan rumah selama beberapa bulan.

[32] Mayjen Sudharmo Jayadiwangsa, kepala staf Resimen XVII, putra pegawai Bank Rakyat Pare, Jawa Timur, lahir tanggal 29.3.1923. Sesudah Mulo Kediri dan Middelbaar Handel School di Surabaya, dia bergabung dengan TKR di Pekalongan. Jabatan terakhir adalah ketua Pembangunan Masyarakat Desa Depdagri. Kemudian Dubes RI di Srilangka tahun 1980. Dia meninggal pada tahun 1985.

Pada tanggal 6 November, R.M. Suprapto, pegawai tinggi di Kantor Gubernuran Semarang, tiba di Pekalongan dengan membawa surat pengangkatannya sebagai pejabat residen di suatu tempat yang para pangreh prajanya telah menghilang, atau bersembunyi, atau "diamankan" dalam penjara oleh badan perjuangan setempat. Tiga batalyon TKR di Tiga Daerah ditarik mundur ke Pekalongan atas perintah Markas Besar TKR di Yogyakarta. Sementara itu Komandan Resimen dan Sayuti Melik diketahui dari Tegal sedang menuju ke selatan pada pagi hari sebelum penyerangan kota dimulai.

Setelah menerima laporan yang bertentangan mengenai kejadian-kejadian di Tiga Daerah, Suprapto, setibanya di Pekalongan, segera pergi ke Tegal untuk melihat situasi sebenarnya. Ia mendapati kenyataan bahwa Kepolisian telah tidak ada di Tegal dan Brebes, dan atas bantuan dua orang dari Semarang mereka membangun kembali Kepolisian. Di Pemalang, Bupati Supangat baru membentuk kepolisiannya sendiri. Sedang pasukan keamanan yang ada waktu itu berada di bawah perintah para pemimpin perjuangan dan bukan pemerintahan Pekalongan.[33]

Bupati Tegal baru, K.H. Abu Suja'i, terpilih pada tanggal 6 November. Dalam pemilihan itu yang hadir adalah yang berasal dari cabang-cabang pemimpin AMRI selatan kota, pemimpin KNI kecamatan, Kutil, dan para pemimpin dari Ujung Baru (Ujungrusi berganti nama Ujung Baru). Sayuti Melik muncul dari Slawi, dan menjelaskan bahwa kehadirannya adalah sebagai wakil Gubernur untuk mengisi jabatan-jabatan kosong seperti bupati, walikota, dan lain-lainnya.[34] Adapun calon-calon untuk bupati, yaitu Sakirman, pemimpin AMRI Slawi, sedangkan beberapa nama dari KNI, juga AMRI Talang disebut. Kelompok Kutil-lah yang mengajukan nama K.H. Abu Suja'i, tokoh Islam nasionalis dari Desa Pacul.

Pada tahun 1930, ia mendirikan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) di Pacul dan membuka sebuah sekolah partikelir (swasta) Islam, sebuah sekolah pertama yang berdiri di daerah itu. Di Pacul ber-

[33]Suprapto, Jawaban 1 dan 2 atas pertanyaan-pertanyaan dari S. Karioatmojo, Kepala Bagian Kehakiman Pekalongan, tertanggal 15 Juli 1946, Proc. Gen.

[34]Marsum Hr, Ceriteraku, 1974, hlm. 113.

hasil PSII aktif. Dibanding dengan desa-desa lainnya Desa Pacul berhasil dalam melakukan aksi penentangan terhadap pabrik gula di Pagongan dalam masalah tanah jangka panjang untuk usaha asing (*erfpacht*) dan keadilan pembagian air antara pabrik gula dan sawah pedesaan. Pacul juga terkenal kegigihannya menolak sewa rendah dari pabrik. Abu Suja'i dan PSII banyak terlibat dalam propaganda untuk mengurangi rodi desa (kerja paksa desa) yang memberatkan itu. Akibatnya, Pacul terkenal sebagai desa oposisi dengan lenggaongnya yang dianggap sebagai tempat pembuat keonaran.

Abu Suja'i berasal dari keluarga maupun desa yang melawan Belanda. Dia cukup dikenal oleh para santri pemimpin AMRI dari Ujungrusi, Talang, Adiwerna, dan Pangkah. Di daerah itulah timbul sebelum perang penentangan kalangan Islam terhadap praktik pengambilan darah dari jenazah oleh dinas pemberantasan penyakit pes. Pertentangan ini kemudian dipergunakan oleh PSII untuk mendukung aksi-aksi protes. Abu Suja'i adalah tokoh PSII yang pernah dipenjarakan pada tahun 1937 karena menolak untuk memberi izin kepada petugas kesehatan untuk mengambil contoh darah. Selain itu, Abu Suja'i juga pernah dipenjarakan karena melanggar peraturan monopoli garam pada tahun 1932 dan karena pidatonya yang secara terbuka menentang pemerintah Belanda (*spreekdelict*) pada tahun 1939. Pada tahun 1943 ia dipenjarakan oleh Jepang karena dalam suatu rapat umum membenarkan pemberontakan melawan Jepang di Singaparna (Jawa Barat). Ia dibebaskan pada awal Oktober 1945 dalam kondisi sakit-sakitan dan hampir tidak bisa berjalan karena kekurangan gizi; tiga puluh hari kemudian ia diangkat menjadi bupati.[35]

Abu Suja'i didukung oleh perutusan AMRI sebagai bupati baru, sedangkan Barisan Pelopor Tegal mengajukan ketua KNI Ki Citrasatmaka sebagai calon patih, dan seorang staf kabupaten dipilih sebagai sekretaris untuk memperkuat tugas administrasi bagi para pemimpin yang belum berpengalaman itu. Residen Suprapto segera meresmikan pengangkatan baru tersebut. Ia juga menerima tuntutan AMRI Slawi untuk menghapuskan status Kotapraja Tegal, buatan pemerintah Belanda, semata-mata karena dahulu banyak orang Eropa tinggal di Tegal.

[35]H. Abu Suja'i, Wawancara, 20.11.75.

Pada tanggal 8 November, Suprapto kembali ke Tegal untuk melantik para pejabat baru secara resmi, sedangkan K.H. Abu Suja'i, yang tidak hadir dalam pemilihan itu, dijemput oleh anggota-anggota AMRI Talang dan dari desanya ia diantar ke Kantor Kabupaten. Kemudian Abu Suja'i dibawa ke alun-alun kota. Di sana sejumlah besar masa rakyat telah berkumpul untuk melihat bupati barunya. Ketika Abu Suja'i tampil ke mimbar untuk pidato, suasana menjadi tenang sekali. Orang terpukau menyaksikan seorang yang tampan tinggi hanya mengenakan celana panjang, kemeja putih, dan berpeci hitam. Ia berbicara dengan tenang, jelas, dan lancar, kadang-kadang menyelipkan kata Belanda dengan ucapan yang tepat dan kutipan-kutipan ayat Al-Quran. Sekalipun rakyat Tegal telah mengenal namanya, namun baru kali itulah mereka melihatnya. Kalangan Islam di kota itu tampak puas dan para pemimpin KNI terperanjat bahwa kiai dari desa yang tampil sebagai bupati sangat mengesankan.

Brebes

Pada hari berikutnya Pejabat Residen mengunjungi Brebes guna mengawasi pemilihan bupati baru oleh rakyat dalam suasana masih kalut karena hebatnya pertentangan dan persaingan antarkelompok. Keragu-raguan pangreh praja terhadap Proklamasi, penolakan pengibaran bendera Merah-Putih di depan Kantor Kabupaten berlangsung sampai akhir September. Pengumuman bahwa Sekutu akan menduduki Jawa dalam waktu singkat telah melibatkan Bupati ke medan pertikaian terbuka dengan kaum revolusioner di Brebes. Walaupun pada akhirnya Bupati menerima Kemerdekaan Indonesia, keragu-raguan terhadap pangreh praja, yang oleh pemuda Brebes Sugeng Hargono dinamakan kelompok Mosvia, itu tetap berlanjut.

Penentangan pangreh praja terhadap gerakan revolusioner timbul dalam berbagai cara. Di samping BKR/TKR resmi yang dibentuk pada bulan September di Brebes, maka wedana Brebes, R. Sudirman, membentuk "BKR gelap" yang rupa-rupanya digunakan buat melindungi pangreh praja.[36] Ketua KNI Brebes, Kartohargo, dalam sidang

[36]Dalam buku harian nya Sudirman menulis bahwa selama pemeriksaan atas dirinya sebagai wedana oleh para pemimpin badan perjuangan, ia ditanyai mengapa membentuk "Barisan Gobed" (Brigade Pisau), atau BKR gelap.

pengadilan mengatakan bahwa BKR gelap ini terdiri dari bajingan-bajingan yang tidak disukai rakyat; karena merasa dekat dengan pangreh praja mereka sering berlaku sewenang-wenang.[37]

Selain AMRI Brebes pimpinan Kartohargo, beberapa pemuda bersama beberapa lenggaong membentuk AMRI-I (Angkatan Muda Republik Indonesia-Islam). Mereka itulah yang terlibat dalam pertentangan dengan BKR/TKR dan AMRI Brebes. Mereka mengatakan bahwa AMRI itu merupakan cabang AMRI Slawi, dan menguasai sebuah penggilingan padi. BKR/FKR resmi diakui oleh AMRI-I sebagai kelompok pemuda nakal yang Islamnya tidak sungguh-sungguh.

Dua ujung kehidupan politik kota kabupaten sebenarnya merupakan pencerminan keadaan geografi Brebes yang membentang sepanjang jalan utama pantai utara dan jalan kereta api Tegal-Cirebon. Yang menarik adalah terpisahnya perkampungan Islam dengan Kampung Pasarbatang di sebelah utara jalan kereta api yang menjadi tempat para lenggaong, para pencopet, dan perusuh pembuat onar lainnya. Pergolakkan sosial di Brebes dimulai di Pasarbatang dengan peristiwa rasialis anti-Cina dan lewat aksi pembakaran kandang dan babinya. Penduduk Cina yang berjumlah besar memelihara babi di pinggiran kota. Pada suatu ketika semua kandang berikut babi-babinya dibakar habis dengan alasan bahwa babi-babi itu sering kali lepas dari kandangnya dan merusak tanaman serta pekarangan rakyat yang berdekatan. Selain itu toko-toko Cina dirampok.[38] Para pemimpin AMRI-I yang dikobarkan oleh pidato Bung Tomo yang anti-NICA, pergi ke pabrik gula Jatibarang, dan membunuh baik orang Indo di pabrik itu maupun orang Indo di pabrik gula Banjaratma. Mereka berhasil memperoleh kunci sel penjara tempat orang-orang Indo diamankan, lalu mereka dibawa dan dibunuh di Pasarbatang.

Sebagai tanggapan atas situasi sosial yang semakin memburuk, Patih Brebes datang ke kantor KNI membawa surat dari Bupati, yang menyatakan bahwa semua pangreh praja Brebes bersedia meletakkan jabatan kalau rakyat tidak menghendaki mereka.[39] Bupati meminta KNI membuat pernyataan dan diumumkan di depan para pemimpin

[37]Kartohargo, Pertanyaan 14, Proses Verbal, 23.10.46, Proc. Gen.
[38]Pemimpin santri Pasarbatang (K.H.Akhmad) Wawancara, 3.12.75.
[39]Kartohargo, Pertanyaan 15, Proses Verbal, 23.10.46, Proc. Gen.

rakyat yang diselenggarakan oleh Kartohargo selaku juru penerang KNI. Rapat KNI Brebes ini dikacau oleh Mukhsan, pemimpin AMRI-I. Kartohargo menegaskan bahwa sekalipun mereka dalam revolusi, tetapi jangan main hakim sendiri jika ingin mengganti pejabat, teruskanlah keinginan itu melalui KNI. Mukhsan menjawab bahwa dialah yang berkuasa di Brebes dan bukan Kartohargo. Ia lalu meninggalkan sidang dan tidak lama kembali lagi. Wedana Brebes berusaha melindungi Mukhsan yang mempunyai wibawa besar di Pasarbatang. Tokoh AMRI-I ini diharapkan dukungannya kepada Wedana yang semakin tersisih dari kalangan perjuangan.

Wedana Sudirman berusaha membela Mukhsan karena ia menyadari bahwa penahanan ini akan mengancam keamanan kotanya. Ia memberi Kartohargo, bahwa anak Mukhsan yang menjadi anggota BKR bersama teman-temannya akan mengamuk apabila ayahnya tidak dibebaskan. Wedana meminta pemimpin KNI Kartohargo untuk membebaskannya. Ia juga menyarankan pada Patih dan Kepala Kepolisian Kabupaten, tetapi polisi justru menahan orang-orang AMRI-I lainnya, karena pembunuhan orang-orang Indo di Jatibarang. Mukhsan melarikan diri, kemudian ditangkap kembali oleh PKN (Penjaga Keamanan Negara) yang terbentuk pada minggu kedua bulan November untuk menggantikan kepolisian lama. Kemudian ia *didombreng* dan dibawa ke asrama PKN, dan kemudian dikirim ke penjara Tegal.[40]

Tawaran Bupati kepada pangreh praja Brebes untuk meletakkan jabatan ternyata sudah terlambat. Maksum, bekas jaksa yang menggabungkan diri dengan kaum revolusioner, menghubungi KNI Tegal dan menyarankan untuk menyingkirkan semua pangreh praja dari kota. Penculikan ini dilakukan pada tanggal 18 Oktober malam. Wedana Brebes, Patih beserta adiknya, Wedana Tanjung, dimasukkan dalam penjara. Wedana Brebes, dari buku hariannya menuliskan sebagai berikut:

> Waktu dua orang pemuda yang turun dari mobil dan menemui diri saya di pendopo dan meminta pada saya, "Tuan Wedono diminta datang di Tegal untuk mengunjungi rapat dari seluruh wakil rakyat

[40]Pemimpin AMRI/PKN, Wawancara, 2.12.75.

dari Tegal dan Brebes." Dengan perkataan manis dan sopan, "Kalau rapat sudah selesai nanti, Tuan Wedono saya antar kembali." Pada waktu itu saya sudah merasa tentu akan terjadi tidak baik terhadap diri saya, akan tetapi, pikir-memikir, saya mengambil keputusan akan turut memenuhi permintaan dua orang pemuda tadi. Kemudian saya berpakaian lengkap, dengan jas dan dasi, anak saya perempuan yang tertua itu waktu baru berumur 17 tahun, menahan saya jangan pergi. Waktu itu istri saya baru pergi di rumah tetangga saya ajudan Landbouw Corsulent (penasihat pertanian). Kemudian saya beritahukan dengan telapon bahwa saya akan pergi ke Tegal berapat, saya berpikir, saya dapat menolak permintaan itu, dan melarikan diri di tempat markas penjagaan TKR (Tentara Keamanan Rakyat), akan tetapi hal itu tentu akan menimbulkan kecekcokan antara pemuda dan TKR, atau penganiayaan terhadap keluarga saya yang sangat saya cintai. Menjadi setelah saya berpakaian lengkap sebagai seorang pejabat pamong praja, naik mobil bersama-sama dua orang pemuda tersebut untuk mengunjungi rapat dari wakil-wakil rakyat.[41]

Karena percaya pada perlindungan TKR Brebes, Wedana terperanjat ketika mengetahui bahwa dirinya dibawa ke markas TKR Tegal. Di sana ia diserahkan kepada Parwoto, pemimpin API Tegal, dan pemimpin pemuda Brebes, Sugeng Hargono. Kemudian ia dibawa ke markas API di peternakan pemerahan susu Trubles, dimasukkan dalam sebuah kamar dan diberi tahu untuk menunggu rapat. Ketika pintu dikunci dari luar, Wedana itu baru menyadari bahwa dirinya telah ditahan.

Tanggal 21 Oktober ia dibawa ke markas API di Tegal dan dua hari kemudian dibawa ke sebuah perkebunan milik orang Indo yang telah dibunuh beberapa hari sebelumnya. Di sanalah wedana itu menjumpai pangreh praja Brebes lainnya yang telah ditahan dalam sebuah kamar sempit dengan selembar tikar untuk tidur dan sebuah kaleng untuk kencing. Pada tanggal 29 Oktober, sebuah kelompok dari para pemimpin Barisan Pelopor Tegal melakukan pemeriksaan terhadap para tahanan. Mereka dikeluarkan satu demi satu dari kamar dengan

[41] Wedana Brebes (Sudirman), "Peristiwa Tiga Daerah Di Daerah Keresidenan Pekalongan, Jawa Tengah, Tahun 1946," catatan sendiri tertanggal 18 Oktober 1972, hlm. 2.

mata tertutup dan dihadapkan pada semacam pengadilan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti "Apakah kamu masih mau bekerja?" "Apakah kamu bersedia menghilangkan sikap feodalmu?" "Bagaimanakah sikapmu yang sebenarnya terhadap kemerdekaan?" "Bersediakah kamu bekerja sama?"[42]

Sepuluh hari kemudian, pada tanggal 10 November 1945, para pangreh praja yang ditahan itu diambil, dan dibawa kembali ke penjara Tegal. Patih, Wedana Tegal, Sekretaris Kabupaten serta dua orang pejabat lainnya atas nasihat KNI berlindung di penjara, yang merupakan satu-satunya tempat yang aman bagi mereka. Kemudian ternyata pemerintahan Keresidenan Pekalongan dan tentara menuduh kaum revolusioner telah memenjarakan para pejabat. Hal ini disebabkan karena mereka berada di penjara bersama dengan pangreh praja Brebes yang diculik. Tetapi Barisan Pelopor kemudian menjelaskan bahwa para pejabat itu tinggal di penjara karena merasa tidak aman tinggal di tempat lain. Pada waktu itu memang penjara benar-benar merupakan satu-satunya tempat yang aman.[43]

Ternyata penjara bukan tempat yang mengerikan seperti yang dibayangkan. Di situlah Bupati Sarimin dan Wedana Sudirman menggubah kembali syair lagu Bengawan Solo yang menjadi populer di waktu pendudukan Jepang. Versi baru itu mengungkapkan betapa perasaan mereka untuk pertama kalinya berada di penjara, jauh dari keluarga dan teman-temannya. Lagu Bengawan Solo versi Sarimin-Sudirman:

I. Di dalam boei rasanja begini,
Selama hidup baroe sekali merasai,
Zaman Pantjaroba, bagaimanapun djoega,
Poetra Negara, sama merasakannja.

Refrein:
Menoeroet ramalan Djojobojo,
Kami haroes menderita,

[42]Pemimpin KRIS Tegal (Andi Penyamin), Wawancara, 28.8.71; Wedana Brebes, Peristiwa, 1972, hlm. 2.

[43]Marsum Hr, Ceriteraku, 1974, hlm. 5.

Berkatoelloh Jang Maha Esa,
Hindari dari bentjana.

Kami djalani dengan ichlas hati,
Karena lakoe ini, panggilan Iboe Pertiwi.

II. Di dalam hati selaloe engati,
Nasib anak bini serta keloearga sedjati,
Semata-mata kami semoeanja,
Ditinggal para teman sanak dan saoedara.

Refrein:
Tapi kami selaloe pertjaja,
Bahwa jang Maha Koeasa,
Tidak loepa akan hambanja,
Jang sedang menderita.

Jakin kami, Toehan melindoengi,
Anak bini serta keloearga, jang amat ditjintai.

Tak seorang pun dari yang dipenjara mengharapkan dapat bekerja dengan kedudukan enak lagi. Patih Brebes akan menerima istrinya membuka warung di pinggir jalan. Ternyata bayangan mereka tidak menjadi kenyataan. Patih Brebes kemudian menjadi Bupati Grobogan, sedangkan kakaknya, Wedana Tanjung, menjadi Bupati Brebes. Bupati Sarimin menjadi Gubernur Sunda Kecil, dan jabatan Wedana Sudirman terakhir ialah pejabat Walikota Magelang. Pengangkatan-pengangkatan mereka itu memperlihatkan apa yang terjadi di atas pangreh praja Keresidenan Pekalongan yang terlempar dari kedudukannya semasa revolusi sosial itu dan bagaimana nasibnya kemudian. Mereka memperoleh kedudukan-kedudukan yang cukup penting, baik dalam dinas sipil, polisi, maupun ABRI di seluruh Indonesia.

Revolusi sosial yang dimulai dari selatan dan melanda tiga ibukota kabupaten itu, membuat Tiga Daerah (secara keseluruhan) pemerintahannya kehilangan aparat dan memotong daerah itu dari ibukota keresidenan dan daerah lainnya di Jawa. Setelah 19 Oktober

1945 hubungan antara Tiga Daerah dengan ibukota keresidenan terputus sama sekali. Tidak ada hubungan surat-menyurat dari luar Tiga Daerah, sekalipun kantor pos tetap terbuka. Lalu lintas di jalan-jalan mati karena orang takut akan kerusuhan di daerah pedalaman. Sejak itu tidak ada lagi perintah maupun penerangan dari Pemerintah Pusat, sehingga Tiga Daerah secara geografis dan ideologis tersisih dari perjuangan nasional, dan ternyata tidak ada tentara Belanda atau Sekutu yang mendarat dan tidak ada pertempuran antara Republik dengan Belanda di Tiga Daerah. Surat kabar nasional sudah didapat, walaupun koran daerah *Pelita Rakjat* di Tegal dan *Pantjaran Nasional* di Pekalongan memuat berita nasional. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah pusat, sampai bulan November ketika partai-partai politik mulai dibentuk. Hanya kelompok KNI yang mempunyai hubungan dengan Supeno, sekadar hubungan dengan kawan-kawannya di Tegal setelah kunjungan mereka ke Jakarta pada saat Proklamasi.

Satu-satunya cara untuk berhubungan dengan Pusat ialah harus pergi ke Jakarta. Menjelang akhir Oktober KNI tidak merupakan badan yang efektif lagi dalam menanggulangi kerusuhan sosial. Dua pemimpin Brebes, Kartohargo dan Maksum, mengunjungi Kementerian Sosial, meminta bantuan tentang bagaimana caranya menghentikan kekacauan di Brebes. Di sana mereka diberi saran agar menghadap Kementerian Dalam Negeri. Mereka mendapat penerangan bahwa situasi Brebes hanya dapat dipecahkan oleh KNI setempat; karena Pusat belum mampu mengurusi situasi daerah. Mereka diberi sepucuk surat agar menemui Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Di Kantor Gubernur, Semarang, Kartohargo diberi tahu agar menunggu instruksi dari atas. Segera setelah situasi di Ambarawa—di sana pasukan Republik bertempur melawan pasukan Inggris—teratasi, Brebes akan mendapat giliran, demikian dijelaskan. Ini berarti Tiga Daerah tidak berada di bawah ancaman bahaya kekuasaan penjajah dan Sekutu. Kartohargo kembali ke Brebes dan berusaha mempertahankan peranan KNI sambil menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat.[44]

Satu jawaban untuk pemimpin Brebes itu adalah pengumuman politik dari pemerintah Jakarta. Pengumuman yang dikeluarkan pada

[44]Kartohargo, Pertanyaan 15, Proses Verbal, 14.1.47, Proc. Gen.

tanggal 27 Oktober dan ditandatangani oleh Sukarno-Hatta, berisi peringatan untuk rakyat agar tidak bertindak sendiri-sendiri, karena dapat mengakibatkan anarki dan tumbangnya Republik. Pejabat dan penguasa yang bersalah akan diturunkan dari jabatannya. Tuntutan-tuntutan harus diajukan "melalui pemerintah atau perantaraan Komite Nasional sebagai wakil rakyat sementara."[45]

Pengumuman ini bertentangan dengan kenyataan bahwa di Tiga Daerah aparat pemerintah daerah telah tercemar dan KNI-nya tidak mempunyai kekuasaan untuk memainkan peranan seperti yang diharapkan oleh Pusat. Adapun alasan-alasan di Tiga Daerah berbeda-beda. Di Pemalang, KNI-nya terdiri dari pangreh praja yang sudah tercemar namanya. Walaupun di tempat lain (seperti di Tegal) KNI dipilih oleh rakyat, atau terdiri para pemimpin perjuangan, (seperti di Brebes) tetapi pasukan keamanan yang efektif di luar daerah perkotaan tidak mereka miliki. Hal yang dapat dilakukan KNI Tegal sebelum 4 November ialah membawa pangreh praja ke penjara karena di situlah satu-satunya tempat yang aman menjamin keselamatan mereka.

Selain itu terdapat alasan-alasan lain mengapa Pemerintah Pusat tidak mampu menanamkan kekuasaannya secara lebih nyata di Tiga Daerah. Bagi pemimpin Tegal dan Pemalang yang radikal, Jakarta patut dicurigai karena mendukung KNI Pekalongan yang umumnya terdiri dari elite birokrat. Jakarta juga mengusulkan pengangkatan Mr. Besar untuk menjadi residen. Hubungan dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tidak membaik sesudah Sayuti Melik datang sebagai wakil Gubernur. Tugasnya terhalang karena K. Mijaya yang harus diajak berunding tidak mempercayainya karena alasan-alasan politik.

Dengan terputusnya sama sekali hubungan antara Tiga Daerah dengan perjuangan revolusioner di daerah Jawa lainnya, maka kedatangan Widarta dan K. Mijaya sebagai utusan pribadi Menteri Penerangan sangat penting. Rupanya para pemimpin perjuangan seperti Kartohargo, yang sadar atau tidak sadar akan identitas politiknya, sedang berjuang menghadapi kelompok-kelompok lain yang merupa-

[45]Koesnodiprodjo (ed), Himpunan, Undang-2, peraturan-peraturan, penetapan-2, pemerintah Republik Indonesia 1945 (Jakarta, 1951), hlm. 68.

kan saingan yang keras kepala. Mereka membawa kuasa Pemerintah Pusat, yang berarti sama dengan memberikan instruksi dari atas yang sudah ditunggu-tunggu itu. Instruktur tersebut ialah perintah untuk mewujudkan Badan Pekerja menggantikan KNI lama yang tidak berfungsi lagi. Badan Pekerja itu merupakan hasil ide K. Mijaya, tetapi pengaruh Widarta dapat dilihat di dalam front persatuan yang dinamakan GBP3D (Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah). Strategi golongan radikal dan nampaknya atas perjuangan di Tiga Daerah dibahas dalam bab berikut.[]

BAB SEMBILAN

FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH

BULAN Agustus 1945, tertangkap oleh radio ilegal berita bahwa bom atom telah jatuh di Hiroshima. Gerakan bawah tanah di Pemalang pun mengadakan rapat di pos kehutanan Sukowati, lalu kebijakan pun diambil. Mereka tidak akan menampakkan diri secara legal, tetapi bekerja melalui badan-badan yang legal. Mereka memutuskan untuk menerbitkan selebaran Sukowati yang akan berisi seruan kepada rakyat untuk melawan Jepang dengan segala cara. Penyebarannya melalui jaringan stasiun kereta api. Nama PKI tidak muncul, sehingga kegiatan itu seolah-olah merupakan tindakan perorangan yang mewakili gerakan nasionalisme yang hendak mengambil alih kekuasaan Jepang.

Ada tiga alasan mengapa mereka tetap memilih tindakan ilegal. Pertama, PKI tidak punya calon Presiden lain kecuali Mr. Amir Syarifuddin, tokoh yang menggabungkan diri dengan PKI ilegal pada tahun 1939. Ia tokoh terkemuka, tetapi masih muda, berasal dari Sumatera, dan masih berada di penjara Lowokwaru Malang, walaupun kelompok bawah tanah berusaha membebaskannya. Tan Malaka dengan sikap dan peranan yang telah menimbulkan pertentangan fraksional dan ideologis dalam tubuh PKI sesudah pemberontakan 1926, sukar diterima. Sedangkan pemimpin lainnya sebagian masih di Negeri Belanda, dan sebagian di Australia. Kedua, jika para anggota PKI bawah tanah muncul sebagai pemimpin Tiga Daerah, pangreh praja yang pro-Belanda akan lebih mencurigai Republik, karena kebanyakan pemimpin PKI adalah bekas buangan Digul. Ketiga, tidak tersedia informasi cukup mengenai situasi internasional pada bulan Agustus 1945. Front Anti-Fasisme mengikutsertakan Belanda sebagai salah

satu sekutu. Menurut gerakan bawah tanah, semua negara Sekutu, kecuali Uni Sovyet, adalah negara kapitalis. Mereka tidak akan menaruh simpati kepada Indonesia yang merdeka dengan partai komunis yang kuat. Oleh sebab itu para pemimpin bawah tanah akan melanjutkan front persatuan dengan "nasionalis borjuis," yang sasarannya bukan lagi fasisme, tetapi "feodalisme dan kapitalisme."[1]

Tokoh PKI Muso, sekembalinya di Indonesia dalam tahun 1948, menganggap keputusan meneruskan perjuangan ilegal pada tahun 1945 itu sebagai kesalahan taktik dan tidak prinsipil. Dengan kalahnya fasisme, dasar pemikiran gerakan bawah tanah seharusnya hilang. "Bila PKI merupakan partai milik rakyat biasa, bagaimana partai ini dapat mewakili kepentingan rakyatnya kalau PKI sendiri secara legal tidak ada. Sasaran dan tulisannya dapat didengar, tetapi anggotanya (partainya) tidak ada." Bukan saja masalah legal atau ilegal, tetapi juga adanya kesalahan penilaian. Apabila mati hidupnya partai itu tergantung kepada massa, bagaimana massa berani kalau partainya sendiri takut. Mereka berani angkat senjata melawan Belanda, tetapi ragu-ragu menghadapi kolonial Belanda yang masih ada. Hal ini kemudian dianggap suatu kekeliruan.[2]

Alasan lain yang mendorong sikap berhati-hati ialah bahwa kehidupan legal partai politik belum dinyatakan secara resmi, sedang Jepang masih berkuasa. Selain itu, pemerintah Republik sendiri menyatakan hanya ada satu partai negara. Penghancuran PKI oleh Belanda setelah 1926 juga masih menghantui.

PKI semasa pendudukan Jepang tidak bisa berbuat banyak. Partainya lemah dan anggotanya sedikit. Di Keresidenan Pekalongan hanya ada delapan orang anggota gerakan bawah tanah. Seorang di Pekalongan, tiga di Pemalang, dua orang di Tegal, dan dua lagi di Brebes. Seorang tokoh, S. Mustapha, tertangkap di Pemalang pada awal pendudukan, berhasil melarikan diri ke Surabaya dan ikut serta memimpin gerakan bawah tanah di sana. Ia baru kembali ke Pemalang bersama dengan Widarta setelah Proklamasi. Dari tujuh anggota lainnya, K. Mijaya (di Tegal) dan Amir (di Pemalang) yang paling aktif.

[1]Anggota bawah-tanah, Wawancara, 7.7.78.
[2]*Ibid.* Juga Siauw Giok Tjhan, Wawancara, 20.5.78.

Sidang di Sukowati bulan Agustus 1945 memutuskan untuk membentuk front persatuan dengan unsur progresif lainnya. Yang dimaksud ialah unsur-unsur yang pro kemerdekaan. Dasar dari keputusan ini, walaupun PKI yang tidak mempunyai tokoh nasional masih mempunyai tokoh di tingkat lokal. Para kader inilah yang harus berusaha melaksanakan strategi front persatuan melalui badan-badan yang ada sebagai sarana kerjanya. Apabila tidak, harus dibentuk kelompok baru yang diprakarsai dan dipimpin oleh para kader PKI bawah tanah. Ketika KNI Pemalang dan tegal ternyata tidak aktif lagi, maka K. Mijaya melaksanakan strategi ini di Keresidenan Pekalongan.

Masalah lain yang dihadapi PKI bawah tanah di Tiga Daerah, yaitu bahwa para tokohnya Widarta, Bung Kecil dan K. Mijaya (juga residen Baru Sarjio dan sekretarisnya Muroso), berasal dari luar daerah dan bukan orang setempat. Setelah Proklamasi tugas mereka ialah menyebarkan berita kemerdekaan ke daerah-daerah lain. Widarta menugaskan Amir dan istrinya, Ibu Pri, untuk pergi ke Jawa Timur membebaskan Amir Syarifuddin dari penjara Lowokwaru, Malang. Usaha mereka gagal, karena tidak dipercayai oleh kader-kader PKI setempat. Amir Syarifuddin sendiri akhirnya dibebaskan pada tanggal 1 Oktober 1945, dan langsung pergi ke Jakarta.[3]

Pada pertengahan Oktober, Amir, tokoh Pemalang di Jakarta, menerima telegram dari Tan Jiem Kwan – pemimpin di Pemalang— agar kembali ke Pemalang untuk mengoordinasi gerakan kemerdekaan. Penculikan pimpinan perjuangan Supangat oleh unsur-unsur pangreh praja dan TKR mendorong timbulnya kekacauan dalam masyarakat Pemalang. Amir dan Widarta kembali ke Pemalang pada tanggal 15 Oktober. Widarta mendapatkan rumah kediamannya diobrak-abrik, dan keluarganya sudah pindah ke Sukowati yang lebih aman.[4] Kedatangan Widarta di Sukowati mengundang kecurigaan masyarakat yang merasa Widarta adalah pejabat pemerintah yang melarikan diri, sehingga mereka mengancam akan membakar rumah pegawai kehutanan tersebut. Widarta meminta Amir bersama sepuluh

[3] *Soeara Asia*, 5 Oktober 1945.

[4] Pertanyaan ke-3, "Surat Pemeriksaan S. Widarta", Pekalongan, 16 Februari 1946. Proc. Gen

pemuda datang dari Pemalang bersenjatakan empat karaben, dipimpin Amir, Jiem Kwan, dan Supangat.[5] Supangat mendesak pada penduduk desa agar memelihara ketertiban. Kemudian beberapa lenggaong dibawa ke Pemalang untuk mengikuti kursus ideologi di markas API/PRI.

Pada tanggal 20 Oktober, sebagai bupati baru, Supangat berbicara pada rapat umum di alun-alun bersama dengan Widarta dan S. Mustapa mengingatkan pentingnya memperkuat dan mengkonsolidasi kekuatan pemuda dan rakyat menghadapi Belanda. Widarta yang memperkenalkan diri sebagai utusan Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin, berseru kepada rakyat agar jangan melibatkan diri dalam perampokan, pembunuhan, dan pembakaran. Ia menjelaskan tentang "kedaulatan rakyat" yang bila dilaksanakan dengan tepat akan mewujudkan kebahagiaan rakyat. Di sana ia mengubah nama API menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) cabang Pemalang. Pada malam harinya, Widarta dan S. Mustapha menghadiri rapat API/PRI di penjara Pemalang, dan membahas masalah pangreh praja. Widarta menasehati Supangat agar memperlakukan para pejabat yang ditahan dengan baik. Supangat menjawab, bahwa mereka itu ditempatkan di penjara atas permintaan rakyat dan akan segera dibebaskan manakala situasi telah mereda kembali.[6]

Keesokan harinya, Widarta menyertai Bupati Supangat dalam perjalanan dinasnya ke desa-desa di sekitar pos kehutanan meninjau pemilihan kepala desa, kemudian baru berangkat ke Surabaya. Pada tanggal 7 November, ketika Widarta kembali ke Pemalang, masalah pangreh praja belum juga terpecahkan. Pekalongan telah meminta para pejabat yang ditahan itu agar dipindahkan ke ibukota keresidenan, tetapi Bupati khawatir akan keselamatan mereka menghadapi ancaman rakyat. Bupati Supangat lalu meminta Widarta memecahkan masalah rumit itu dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Ia meminta surat dari Widarta dalam kewenangannya sebagai utusan Menteri Penerangan.[7] Setelah menengok keluarganya di Sukowati selama dua hari,

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*, Pertanyaan ke-4.
[7] *Ibid.*, Pertanyaan ke-5.

Widarta kembali ke Pemalang dan mendapati jaksa agung, Mr. Kasman Singodimejo, yang datang dari Jakarta untuk mengetahui mengapa Bupati dan pangreh praja ditempatkan di penjara dan apa yang telah diperlakukan orang terhadapnya. Supangat membantah bahwa mereka itu berstatus sebagai tahanan, mereka hanya diamankan sementara karena tekanan dari rakyat.[8]

K. Mijaya selama masa pendudukan Jepang termasuk orang yang dicari dan diburu oleh Jepang.[9] Sebagai pemimpin bawah tanah wilayah pantai utara, ia menjalin hubungan dengan para tokoh serikat buruh dan eks-Digulis perang.

Tindakan pertama K. Mijaya di Brebes dan Tegal, sesudah revolusi sosial berhasil mencopot wewenang pangreh praja dan Orde Lama adalah menciptakan hubungan mata rantai antara kaum radikal di Pemalang dan AMRI Slawi yang mempengaruhinya semakin besar. AMRI Slawi dipimpin oleh Suwignyo (veteran PKI 1926) dan Raden Sakirman, priyayi Yogya yang termasuk radikal. K. Mijaya menggunakan persahabatan antara Suwignyo dengan Amir (Pemalang) untuk memperkenalkan tokoh-tokoh lainnya dari Pemalang, Tan Jiem Kwan, Bung Kecil, dan Widarta, sebagai pembantu Menteri Penerangan Mr. Syarifuddin, yang membawa mandat yang ditandatangani Mr. Syarifuddin yang memberikan wewenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memulihkan ketertiban dan menegakkan pemerintah Republik Indonesia yang sejati di wilayah ini. K. Mijaya menyarankan pada AMRI Slawi agar mengakui kepemimpinan perjuangan revolusioner Pemalang di Tiga Daerah yang disambut baik oleh Suwignyo. Setelah itu K. Mijaya sering mengunjungi Slawi, mengambil bagian dalam kursus politik yang diselenggarakan AMRI.[10]

K. Mijaya juga mengunjungi pabrik gula Jatibarang yang berdekatan itu, sesekali disertai Sulaiman Darmoprawiro, bekas pemimpin PKI Bandung.[11] Dalam kunjungan ini K.Mijaya mengatakan bahwa

---

[8] *Ibid.*, Pertanyaan ke-7.

[9] K. Mijaya, "Sejarah Keluarga" (Catatan harian).

[10] Suwignyo, Wawancara, 25.8.76; Transkripsi, I/4, 26.3.73.

[11] Sulaiman Darmoprawiro pernah menjadi Ketua Sarekat Islam Petarukan (Pemalang). Kemudian menjadi pemimpin Sarekat rakyat dan PKI cabang Bandung dan Priangan. Sekembalinya dari Digul sekitar tahun 1932, menjadi wartawan harian

gelar-gelar seperti Raden Mas atau Kanjeng Gusti tidak lagi digunakan karena semua orang berkedudukan sama derajat. Katanya jika menyebut Presiden cukup mengatakan Bung Karno saja. Bahasa Jawa kromo tidak lagi diperlukan, rakyat dapat menggunakan bahasa Jawa ngoko atau bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan[12] (lihat bab tujuh).

Badan Pekerja di Tegal dan Brebes

Tanggal 16 Oktober, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) memperoleh kekuasaan legislatif dengan pengharapan agar sistem demokrasinya itu diakui oleh dunia luar, sehubungan dengan tuduhan Sekutu bahwa Republik Indonesia hanyalah boneka Jepang. Badan Pekerja KNIP, yang dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari KNIP dan berfungsi sebagai badan legislatif. Di Jakarta, Badan Pekerja KNIP merupakan poros langkah kaum sosialis anti-fasis yang berhasil mengambil alih kekuasaan dari mereka yang pro-Jepang. Di Tiga Daerah, Badan Pekerja (BP) merupakan alat penting dalam strategi pembangunan front persatuannya. Berbeda dengan di Jakarta, BP di Tegal dan Brebes tidak bertanggung jawab kepada sidang pleno KNI setempat. Di Brebes, di mana BP juga dibentuk di tingkat kewedanaan dan kecamatan, peranan KNI setempat diganti. BP di Tegal dan Brebes menggabungkan kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam satu presidium yang terdiri dari 9 orang di tingkat kabupaten dan 5 orang di tingkat kewedanaan dan kecamatan.

Badan Pekerja Brebes dibentuk di rumah kediaman tokoh eks-Digulis Slamet di Ketanggungan. K. Mijaya mengatakan bahwa mereka harus menguasai sepenuhnya pemerintahan, karena Jepang sudah bertekuk lutut dan rapat memutuskan untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan dengan menyatukan dua pusat itu Brebes dan Ketang-

---

Tegal *Het Nordern*. Ditangkap Jepang pada awal pendudukan, kemudian menjadi anggota BP2 (Badan Pembantu Prajurit). Selama Peristiwa Tiga Daerah, mendirikan dan memimpin harian *Pelita Rakjat*. Kemudian ia memimpin Sobsi Tegal, dan pada tahun 1965 tidak ikut ditahan karena menderita kelumpuhan. Surat dari Suwignyo, 17 April 1973; "Daftar Nama-nama Perintis Kemerdekaan dalam Periode 1908-1945 dengan Sejarah Perjuangan Singkatnya."

[12]Pegawai pabrik gula Jatibarang, Wawancara, 29.7.76.

gungan ke dalam kepemimpinan tunggal.[13] Dalam rapat berikutnya, Kartohargo bertemu dengan K. Mijaya dan terkesan akan keterampilannya berorganisasi. K. Mijaya mengatakan bahwa ia telah menemui semua anggota KNI Brebes di Ketanggungan, dimana telah diputuskan untuk membubarkan semua KNI dan menggabungkannya dengan Badan Pekerja. Rapat pembentukan Badan Pekerja untuk seluruh keresidenan diselenggarakan hari itu juga. K.Mijaya meminta Kartohargo untuk membuka dan menutup rapat itu. Kartohargo heran atas banyaknya jumlah yang hadir.[14]

Kartohargo dipilih sebagai Ketua BP Brebes yang terdiri atas 9 orang yang diprakarsai K. Mijaya. Kesembilan orang itu adalah seorang pemimpin agama setempat, seorang tokoh pemuda, tiga orang tokoh radikal Ketanggungan, dua orang, orang elite birokrat yang pro-kemerdekaan, yaitu sekretaris Kabupaten Brebes Mohammad Saleh, dan Jaksa Penuntut Umum, Maksum. Karena semua golongan diwakili di dalam Badan Pekerja dan kreatif cara kerjanya, maka badan itu dianggap sebagai contoh yang baik untuk pemerintahan di Tiga Daerah[15] (*lihat* lampiran B).

Setelah BP Brebes terbentuk, K. Mijaya bersama dengan ketua Barisan Pelopor Tegal, Mohammad Nuh, Amir dari Pemalang, dan Widarta (sebagai utusan Menteri Penerangan di Jakarta) membicarakan masalah residen Pekalongan. Residen Besar telah diganti, sedangkan R.M. Suprapto adalah pengganti sementara. Dia bukan dari kalangan pergerakan. Budisucitro, anggota Partai Sosialis dalam KNIP diusulkan, tetapi K. Mijaya mencalonkan Sismadi, seorang wartawan dari Solo dan buangan Digul. Mohammad Saleh, sebagai sekretaris Badan Pekerja Brebes melaporkan keputusan ini ke Pemerintah Pusat.

Pada tanggal 8 November, Abu Suja'i dilantik sebagai bupati baru Tegal. BP Tegal dan Pejabat Residen Suprapto lalu mendesak Kartohargo agar segera mengganti pangreh praja Brebes, karena pe-

---

[13]Pemimpin perjuangan Tanjung, Wawancara, 29.7.76.

[14]Kartohargo, Wawancara, 16.2.72; Pertanyaan ke-3, Proces Verbal, 19.10.46. Proc.

[15]Surat Partai Buruh Indonesia Cabang Tegal kepada Jaksa Agung Mr. Kasman Singodimejo tentang situasi politik di Brebes, tertanggal 12 Desember 1945. Proc. Gen. (selanjutnya "Surat PBI").

merintahan tidak akan berjalan tanpa adanya para pemimpin daerah. Keterlambatan penggantian pegawai lama di Brebes ini menjadi pemikiran para pejabat Keresidenan Pekalongan dan kaum revolusioner di Tegal.[16]

Pada keesokan harinya, Kartohargo membahas masalah ini dengan BP Brebes, yang tetap pada pendiriannya bahwa hanya pemerintah yang mempunyai hak untuk mengangkat pangreh praja baru. Setelah didesak oleh Sayuti Melik sebagai wakil Gubernur akhirnya BP Brebes meminta kelompok perjuangan setempat mengajukan seorang calon bupati baru. Ternyata Kiai Haji Syatori, wakil ketua Masyumi dan naib setempat, terpilih. Kekosongan pangreh praja lainnya kemudian diisi oleh BP.[17]

Setelah penggantian pangreh praja, masalah yang dihadapi BP Brebes adalah masalah ekonomi. Masalah pemasaran bagi hasil bumi Brebes seperti bawang putih, cabai, kacang tanah, dan kedelai harus segera dipecahkan. BP mengirim hasil tadi atas nama bupati agar memperoleh harga yang pantas di ibukota. Ikan asin, telur asin, dan terasi juga dikirim ke Jakarta. Kantor BP selain menangani masalah-masalah ekonomi, juga mengawasi distribusi penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok di seluruh kabupaten. Karena kepala perikanan Kabupaten telah didaulat, maka tugasnya dilakukan oleh sebuah koperasi perikanan di Sawijaya, yang hingga kini masih berjalan.

BP Brebes juga aktif di bidang sosial, menyelenggarakan kursus-kursus untuk wanita sambil menjelaskan arti yang lebih luas dari perjuangan kemerdekaan dan tugas-tugas Badan Pekerja, sehingga para wanita akan mengenal dan memiliki watak pembela negara.[18] Ini adalah satu-satunya kelompok perjuangan di Tiga Daerah yang mengikutsertakan wanita dalam gerakan kemerdekaan. Selain itu fungsi ekonomi dan politiknya dirasakan di tingkat kewedanaan dan keca-

[16]Kartohargo, pertanyaan ke-15, Proces Verbal, 23.10.46. Proc. Gen.

[17]*Ibid.* Kartohargo tidak menyebut siapa (kelompok dan badan) yang mengajukan calon bupati, atau berapa calonnya. Kata *stembiljet* (kartu pemilihan) digunakan untuk pemunguan secara tertulis, tak ada keterangan tentang siapa yang berhak memilih. Pejabat Residen Suprapto menandatangani semua surat pengangkatan pegawai.

[18]Pemimpin Perjuangan Tanjung, wawancara, 29.7.76.

matan. Di Wanasari (Klampok), sebelah barat Kota Brebes, petani-petani mengambil alih penggilingan padi milik Cina. Hal ini disetujui oleh BP Wanasari karena petani-petani itu melakukannya dengan tertib.[19]

Badan Pekerja di tingkat kewedanaan bertindak sebagai pengganti wedana di Kota Brebes. Tugas yang penting ialah mengangkat camat baru. Pilihan jatuh pada bekas lurah semasa zaman Belanda dan seorang anggota BP kewedanaan.[20] Peranan Badan Pekerja sebagai pengganti wedana mencerminkan pandangan bahwa kedudukan wedana sebaiknya dihapus.[21] Apakah wedana baru harus diangkat atau tidak diangkat tergantung pada pandangan tokoh perjuangan setempat. Susunan Badan Pekerja umumnya merupakan pencerminan jalur-jalur gerakan nasionalis lokal. Badan Pekerja biasanya terdiri dari tokoh Islam ortodoks atau modern, tokoh pergerakan sebelum perang, pemimpin muda, guru sekolah, dan bekas pejabat.

Masalah lain yang timbul di Brebes yaitu perlu adanya partai-partai politik. Kartohargo, ketua BP Brebes, menganggap partai-partai politik akan memudahkan pembentukan kader, sedangkan yang lain berpendapat pengambilalihan kekuasaan dari pemerintahan lama adalah prioritas pertama. Partai-partai politik tidak diperlukan, asal BP dapat memenuhi fungsi parpol, seperti di bidang propaganda. Lebih-lebih BP mempunyai kekuasaan eksekutif untuk mengangkat pejabat setempat, kekuasaan yang tidak akan dimiliki oleh parpol. Walaupun pengumuman Wakil Presiden Hatta tertanggal 3 November merupakan lampu hijau bagi pembentukan parpol, satu-satunya parpol yang ada di Brebes sampai revolusi sosial selesai adalah Masyumi.

Di Tegal, K. Mijaya memainkan perenan yang lebih penting dalam penentuan keanggotaan Badan Pekerja. BP Tegal ditunjuk oleh K. Mijaya dan kelompoknya tanpa melalui rapat umum terbuka di

[19]Kecamatan Wanasari terletak di Klampok. BP Wanasari itu dipimpin oleh aktivis-aktivis PKI angkatan '26. Mereka yang bertugas di BP diberi gaji beras giling menurut keterangan seorang guru Islam. Wawancara, Desember 1975.

[20]Wawancara dengan Guru Sekolah Dasar 10.12.75. BP Kewedanaan Brebes terdiri dari pejabat sebelum perang dari Jatibarang, seorang guru, seorang pemuda dan bekas lurah yang menjadi camat baru Brebes.

[21]Surat PBI, Proc. Gen.

antara kelompok-kelompok perjuangan seperti Brebes. Para calon anggota oleh K. Mijaya telah dimintai kesediaannya lebih dahulu. K. Mijaya menganggap perubahan-perubahan radikal harus dilakukan dengan menyingkirkan pejabat-pejabat kolonial dan alat-alat fasis. Karena tidak cukup tersedia kader yang terlatih untuk melaksanakan tugas itu, ada yang meragukan kemampuan pejabat baru yang revolusioner itu dalam memimpin revolusi. Setiap orang ingin menjadi camat, wedana atau jabatan lainnya. Tetapi adakah kemampuan mereka dalam memimpin perjuangannya, adalah soal lain.[22]

Dengan demikian K. Mijaya dikenal sebagai otak perencana (*intelectual actor*) dalam pembentukan Badan-badan Pekerja. Hal itu mengesankan Kartohargo dan terbukti benar apa yang telah diucapkannya di depan kaum buruh pabrik gula Jatibarang. Rupa-rupanya tujuan utamanya ialah memberikan arah kepada gerakan kemerdekaan agar dapat bergerak secara cepat dan teratur. Dengan demikian maka kelompok-kelompok di Tegal dan Brebes yang belum yakin dapat dibawa ke dalam gerakan. Bupati-bupati dari kalangan Islam yang dipilih dapat diawasi dan dibatasi oleh pengaruh kiri, tanpa melibatkan kelompok radikal dalam segala kegiatan. Di Pemalang tidak ada Badan Pekerja, karena Supangat didukung K. Mijaya. Dia bukan dari kalangan Islam, sehingga dianggap tidak perlu adanya Badan Pekerja. Tetap terselubungnya peran K. Mijaya menimbulkan ketidaksenangan beberapa anggota KNI Tegal terhadap campur tangannya. Dalam sidang pertama BP Tegal yang beranggotakan sembilan orang (semua dipilih oleh K. Mijaya) itu ternyata hadir orang kesepuluh yang keberatan menyebutkan identitasnya dan mengatakan tidak perlunya BP Tegal mengetahui siapa dia dan apa statusnya. Sekretaris Badan Pekerja tidak melanjutkan sidang dan meninggalkannya, karena ia tidak ingin menjadi anggota suatu badan yang melanggar tata tertib dalam rapat pertamanya. Baru kemudian sekretaris itu mengetahui bahwa orang yang misterius itu adalah K. Mijaya.[23]

Keanggotaan Badan Pekerja Tegal selain tiga tokoh Digulis (termasuk pemimpin AMRI Slawi Suwignyo dan pemimpin Barisan Pe-

[22]Pemimpin KNI, Wawancara, 8.10.76.
[23]Sumarno, Wawancara, 18.12.73.

lopor Tegal Muh. Nuh) terdapat dua anggota KNI Tegal (dari kelompok Negen Broeders). Dengan demikian Badan Pekerja lebih representatif dari KNI sebelumnya (lihat lampiran B).

Kurangnya pengalaman administratif dalam urusan keuangan sangat dirasakan oleh kalangan pergerakan yang mengendalikan pemerintahan di Tiga Daerah sesudah terjadinya revolusi sosial. Di Pemalang pemimpin revolusioner menggunakan pejabat-pejabat lama, termasuk dua camat zaman Jepang, satu di antaranya menjadi sekretaris kabupaten. Di Brebes, sekretaris kabupaten lama Mohammad Saleh yang pro-kemerdekaan itu menjadi anggota Badan Pekerja, sedangkan seorang camat zaman Jepang ditempatkan di kabupaten. Di Tegal, pandangan kaum radikal tua untuk menyingkirkan kaki tangan Jepang, sangat berpengaruh.[24] Hanya satu anggota Badan Pekerja yang mempunyai pengalaman administratif. Tidak seorang pun mempunyai pengalaman urusan keuangan, termasuk Sulaiman, bendahara Badan Pekerja, yang menutup pembukuan semua kantor-kantor pemerintah untuk mempermudah keuangan kabupaten dengan adanya penggabungan administrasi kabupaten dengan kota praja. Dengan ditutupnya semua pembukuan timbul kesulitan yang serius, yaitu tidak ada lagi persediaan obat-obatan di rumah sakit yang merupakan kebutuhan mendesak.[25] Sewaktu melakukan inventarisasi cadangan beras dan gula di kabupaten, BP menemukan timbunan padi yang seharusnya didistribusikan pada zaman Jepang. Padi itu kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat di kota.[26]

Badan Pekerja Tegal juga mengatur pembagian tekstil. Di pabrik tekstil terbesar di Pulau Jawa, tertimbun bahan sandang yang belum didistribusikan. Kutil dimintai bantuannya dalam membagi-bagikan tekstil guna mengatasi kelangkaan bahan sandang di Tegal.

Kabupaten Pemalang mendapat bahan sandang dari pabrik Tegal pada awal Oktober 1945, tetapi KNI yang dikuasai pangreh praja tidak mampu membayarnya, sampai akhirnya Wedana Belik menyarankan penggunaan kas desa (uang milik desa). Tetapi ketika pemerin-

[24]Pemimpin Pesindo Tegal, Wawancara, 31.10.75.
[25]Ketua BP Tegal (Suwignyo), Transkripsi I/8, 26.3.73.
[26]*Ibid.*

tahan pangreh paraja di Pemalang ini jatuh, kaum revolusioner mendapati bahan sandang yang ternyata tidak dibagikan. Kemudian Bupati Supangat membagikan bahan sandang dengan bantuan Wedana Belik. Uang didapatkan dari pembagian bahan sandang ini digunakan oleh para pemuda yang bertugas jaga untuk membeli makanan.

Badan Pekerja Tegal, seperti di Brebes dan juga API/PRI Pemalang, mempunyai bagian kesejahteraan sosial. Kampanye mendidik para pelacur kota dengan bantuan pemuda dimulai. Bersama dengan para pejuang lainnya mereka diberi jatah beras dan dikirim untuk bekerja di suatu pabrik tekstil.[27] Jabatan-jabatan yang kosong sebagai akibat revolusi sosial bulan Oktober kemudian diisi oleh Badan Pekerja. Ketua BP kemudian mengangkat dua camat baru di Slawi dan Kedungbatang yang kemudian disahkan oleh Pejabat Residen. Karena buruh kereta api Tegal tidak mempunyai serikat buruh, maka tokoh dari Bandung didatangkan untuk mendirikan serikat buruh di Tegal.

BP Tegal mendukung Angkatan Laut untuk membangun Pangkalan IV di Tegal yang seharusnya sudah dilantik pada 7 November sesudah TKR Laut ditarik dan pendirian markasnya di bekas asrama kenpeitai. Pendiri pangkalan itu, Darwis Jamin, dengan surat perintah resmi dari Jakarta menemui Badan pekerja Tegal meminta bantuan untuk membeli senjata, makanan, dan perlengkapan lain dan merekrut tenaga juga. Pada bulan November sebuah usul diajukan ke Badan Pekerja agar cadangan gula di kabupaten dijual untuk membiayai pendirian pangkalan laut tersebut.[28]

Kelompok-kelompok lain yang bersifat mandiri di luar kota, termasuk Pemuda Istimewa Ujungrusi yang keras itu, mengakui kekuasaan BP, tetapi Kutil masih tetap berada di luarnya. Akhirnya Kutil merasa malu, karena BP telah terbentuk di Tegal, malahan ia diangkat sebagai kepala Polisi Kabupaten oleh Badan Pekerja agar mudah diawasi. Dengan cerdik Kutil menerima pengangkatan itu, namun ia menolak menetap di asrama polisi dengan anak buahnya. Kesulitan

[27]Ketua BP Tegal, Transkripsi, I/8, 26.3.73.

[28]Setelah berakhirnya peristiwa Tiga Daerah, Darwis Jamin tetap menguasai cadangan gula, dan hal ini kemudian menjadi salah satu sebab pertikaian antara Angkatan Laut dan BPRI pada tahun-tahun 1946. Ketua BP Tegal, Transkripsi I/8, 26.3.73.

Badan Pekerja semakin bertambah ketika Suwignyo (ketuanya) berbeda pendapat dengan pemimpin PKN (Penjaga Keamanan Negara), satu-satunya kekuatan yang mampu menangkap Kutil. Akhirnya Kutil menjadi kepala polisi, tetapi tetap di Talang.

Hubungan antara bupati-bupati dari kalangan Islam dengan Badan Pekerja sangat penting bagi keberhasilan kaum revolusioner di Tiga Daerah. K. Mijaya hanya membentuk Badan Pekerja di kabupaten dengan bupati dari kalangan Islam. Strategi ini hanya separuh berhasil. Tiga puluh tahun kemudian Bupati Tegal K.H. Abu Suja'i, merasa ia tak pernah diberi informasi yang cukup, sehingga ia tidak mengetahui masalah-masalah yang ada dan merasa sebagai boneka saja.[29] Tugas Bupati semata-mata hanya menandatangani keputusan-keputusan yang dibuat oleh Badan Pekerja,[30] dari situ terlihatlah bahwa Badan Pekerja menganggap bupati-bupati baru itu setidak-tidaknya kurang berpengalaman dalam bidang pemerintahan. Badan Pekerja Tegal yang dikuasai oleh golongan kiri menyadari perlunya kerja sama dengan golongan nasionalis Islam. Walaupun dalam kenyataannya kurang berhasil, ini merupakan kenyataan politik yang penting untuk dapat mewujudkan koalisi kerja antara dua kelompok itu apabila kaum radikal ingin bertahan dalam kakuasaan.

Sebagian kaum radikal berpendapat bahwa pengangkatan bupati-bupati dari kelompok Islam akan menghindari pertentangan antara kaum kiri dan Islam yang laten itu. Memang tidak ada satu santri pun dalam keanggotaan BP Tegal maupun Front Persatuan (GBP3D). Islam komunis di Tiga Daerah sedikit jumlahnya, walaupun dukungan massa kuat terhadap Sarekat Rakyat, pada awal tahun dua puluhan. Kyai Misbakh, tokoh Sarekat Rakyat, adalah penasihat AMRI Slawi. Tokoh-tokoh Islam lain yang sependapat dengan kaum radikal tidaklah sepaham. Ternyata kaum radikal terlalu mudah untuk menganggap bahwa dengan pengangkatan dua tokoh santri menjadi bupati dapat memecahkan masalah antara kaum Islam dan komunisme.

Penahanan dua tokoh Muhammadiyah, yakni Komandan TKR Iskandar Idris, Wedana Adiwerna, dan dua Kyai ortodoks dari Tegal

[29]K.H. Abu Suja'i, Wawancara, 20.11.75.
[30]Surat PBI, tertanggal 18. Desenber 1945, Proc. Gen.

tidak mempererat hubungan dengan golongan Islam. Persoalan pemimpin TKR kemudian diserahkan kepada AMRI Slawi yang memutuskan agar Iskandar Idris, "kudanya Mr. Besar,"[31] tetap tinggal di Slawi sampai situasi ketegangan sosial mereda. Hal ini menimbulkan kemarahan TKR yang menganggap bahwa Iskandar Idris telah ditahan, walaupun ia diizinkan tinggal di Slawi di luar markas AMRI dalam rumah tanpa dijaga dan boleh membawa keluarganya dari Pekalongan. Menurut Ketua Badan Pekerja Tegal, Iskandar Idris memilih tinggal di Slawi daripada kembali ke Pekalongan melalui Adiwerna dan Talang. Ia dibawa ke tempat-tempat latihan pemuda dan mengunjungi pabrik tekstil. Walaupun tetap diperlakukan dengan baik,[32] akibatnya para pemuda santri di sekitar Slawi mulai meragukan tujuan AMRI.[33]

AMRI Slawi juga menimbulkan ketidaksenangan kelompok-kelompok Islam lain karena beberapa hal. Pemuda Adiwerna merasa tidak senang mengikuti latihan baris-berbaris, karena seolah-olah mereka itu tidak pernah melakukan sebelumnya, dengan demikian pada awal Desember AMRI Slawi tidak lagi berkuasa di Adiwerna. Pada tanggal 13 Desember 1945, Badan Pekerja Adiwerna mengubah namanya menjadi Masyumi dan AMRI Adiwerna menjadi GPII (Gerakan Pemuda Islam Idonesia).[34] Di selatan Tegal beberapa ulama berkumpul untuk berpuasa siang hari dan berdoa malam hari untuk melawan AMRI. Kaum ulama menganggap AMRI Slawi membahayakan agama. Tujuan utama perjuangan kemerdekaan menurut kelompok Islam, yaitu bersatu dalam menghadapi kembalinya Belanda si penguasa kolonial. Balas dendam telah menggantikan tujuan perjuangan, kata kaum ulama, karena siapa saja yang sebelumnya dianggap membantu Belanda dibunuh.[35]

---

[31]Menurut seorang pemimpin pemuda Adiwerna, sebutan inilah yang digunakan Sakirman, Adiwerna Verslag, 1946, Proc. Gen.

[32]Iskandar Idris, "Sedikit Catatan Sekedar yang Saya Alami dan Ketahui," catatan wawancara Team Museum ABRI, 26 Juli 1972. ini merupakan satu dari beberapa wawancara mengiringi penjelasan adegan-adegan bersejarah diorama berbagai kejadian semasa revolusi pada museum ABRI (Saya berterima kasih kepada Mayjen Sudharmo yang telah memberikan salinan wawancara ini kepada saya).

[33]K.H. Fakhruri, Wawancara, 15.12.72.

[34]Adiwerna Verslag, 1946, Proc. Gen.

[35]K.H. Toha, Wawancara, 10.4.73; K.H. Fakhruri, Wawancara, 15.12.72.

Singkatnya, kaum radikalis merasa tidak memerlukan tindakan khusus lagi untuk mendapat dukungan dari kelompok Islam. Mungkin saja keberhasilan yang menonjol di pihak Sarekat Rakyat di Tegal sebelum tahun 1926, menimbulkan pendapat bahwa untuk meraih kekuasaan, hal itu tidak diperlukan. Tetapi perbedaan nilai-nilai sosial antara Islam dan nasionalis radikal selalu mengancam. K. Mijaya tidak dapat mencapai persatuan seperti yang diinginkan, hanya dengan memperkenalkan dirinya kepada Bupati Tegal yang santri itu, dengan nama Abdul Hamid, "seolah-olah ia berasal dari suatu pesantren."[36] Konflik nilai-nilai antara para penganut Islam dan komunis pernah sekali meletus dengan adanya perpecahan yang getir di dalam Sarekat Islam tahun 1919. Untuk mencapai tujuan politiknya saat itu diperlukan dukungan dari semua kelompok, terutama Islam.

Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah-GBP3D

GBP3D didirikan oleh K. Mijaya di markas Barisan Pelopor Tegal pada tanggal 16 November 1945. Ini merupakan salah satu langkah dalam membentuk front persatuan di Tiga Daerah, dengan memilih dan membawa ibukota keresidenan dan Kabupaten Pekalongan agar supaya segaris dengan daerah Tiga Daerah lainnya. Risalah sidang GBP3D tanggal 25 November di Brebes merupakan petunjuk yang jelas apa tujuan dan prioritas front persatuan pada waktu itu.[37] Enam anggotanya berasal dari kelompok radikal, dua PNI-baru dan satu garis Sukarnois. Sedang K. Mijaya (ketuanya) menganggap tujuan GBP3D sama dengan partai Amir Syarifuddin (Parsi), yaitu memperkuat kaum buruh tani, tentara, dan pemuda untuk menuju masyarakat sosiolis.[38] GBP3S menaruh simpati kepada Parsi juga karena pandangan politiknya condong ke Moskow menurut K. Mijaya.[39]

Tugas utama GBP3D adalah mengangkat residen perjuangan guna menggantikan Suprapto, residen tunjukan Pemerintah. Sedang Sismadi, calon yang diajukan pada mulanya menarik diri karena me-

[36]K.H. Abu Suja'i, Wawancara, 20.11.78.

[37]Lihat lampiran C. Diskusi tentang politik dan tujuan GBP3D berasal dari dokumen ini.

[38]Anderson, *Pemuda Revolution*, hlm. 237.

[39]K. Mijaya, Pertanyaan ke-3, 25 April 1946, Proc. Gen.

rasa dirinya akan sukar diterima oleh penduduk keresidenan yang umumnya Islam sedang dirinya Kristen. K. Mijaya kemudian mengajukan Sarjio dari Purworejo. Sarjio, semula adalah anggota PNI-Baru yang selama masa pendudukan Jepang menjadi anggota Shu Sangi Kai Kedu dan kemudian menjadi wakil keresidenan dalam Dewan Penasihat se-Jawa (Chuo Sang-in). Ia ditangkap karena dituduh menjadi anggota PKI bawah tanah dan dihukum 13 tahun penjara tahun 1944. Ia ditempatkan di penjara Ambarawa bersama Sayuti Melik, dan baru bebas pada bulan September 1945.[40]

Rapat kedua GBP3D yang diselenggarakan di Brebes pada tanggal 25 November (lihat lampiran C) dihadiri oleh Widarta dan wakil masyarakat Cina Tegal. Dari catatan rapat tersebut, K. Mijaya dan Widarta terlihat walaupun tidak punya pengalaman dalam bidang ini, mereka percaya akan kemampuan GBP3D untuk mengurus ekonomi daerahnya sendiri. Wakil dari Brebes yang mempunyai pengalaman banyak dalam masalah ekonomi menguasai pembicaraan tentang urusan ekonomi. Dialah yang membantu berdirinya koperasi sebelum perang bersama tokoh-tokoh PNI-Baru lainnya dari Cirebon, dan menggunakannya sebagai wadah gerakan bawah tanah untuk melawan Jepang.

Sistem demokrasi sentralisme GBP3D adalah dalam masalah ekonomi lemah. Hal ini terlihat dalam laporan Badan Ekonomi. Adapun titik pandangannya adalah ekonomi berdasar pada koperasi dan harus berada di bawah penguasaan badan induk; harga harus diawasi, cadangan pangan harus diatur agar tidak terjadi pertentangan akan pembagian tanah, pabrik-pabrik gula beserta hasilnya harus diatur. Tidak ada tindakan apa pun mengenai masalah pembagian tanah bengkok. Padahal itu merupakan peluang terbaik untuk melakukannya, setidak-tidaknya mengurangi ketidakadilan pemilikan tanah dengan cara pembagian kembali yang melibatkan pula para lurah yang dianggap memiliki tanah berlebihan harus dikurangi. Masalah ini mungkin merupakan pikiran tokoh-tokoh PKI, walaupun mereka tidak membicarakannya pada waktu itu.

[40]Ipar Sarjio, Jawaban atas pertanyaan tertulis, 20.6.73.

Masalahnya kabur, apakah pengusaha swasta masih diizinkan beroperasi seperti di Yenan (basis kekuasaan komunis Cina semasa revolusi), apakah Tiga Daerah hanya memungut pajak perdagangan, dan bagaimana dengan perdagangan yang harus ada di tangan rakyat. Hanya disebut bahwa "alat-alat produksi disewa oleh pemerintah" (Lihat lampiran C).

Peranan tentara di Tiga Daerah merupakan masalah penting. Kartohargo, pemimpin Brebes, berpendapat bahwa TKR Pekalongan harus kembali aktif. Perutusan TKR Yogyakarta bersedia membentuk TKR baru di Tegal. Pekalongan akan memberikan separuh dari persenjataannya dan sebagian dari anggotanya, dan Tegal akan diberi hak memilih anggotanya. Ada anggapan bahwa TKR pada dasarnya adalah kekuatan konservatif yang berasal dari lapisan masyarakat tertentu. Maka perlu adanya angkatan bersenjata baru ataupun barisan algojo dengan alasan bahwa kekuatan untuk melawan kolonial adalah kekuatan gerilya dengan basis kekuatan kaum miskin, karena merekalah yang mempunyai kepentingan banyak terhadap perbaikan nasibnya. Kelompok radikal berpendapat bahwa di mana-mana tentara mendukung *status quo* dan biasanya dipengaruhi kekuatan-kekuatan luar yang sukar dipercayai.

Catatan rapat GBP3D itu menunjukkan bahwa pemerintah revolusioner Mao Tze-tung di Yenan diikuti oleh PKI bawah tanah, karena Widarta menyarankan agar pemerintah Tiga Daerah meniru model Cina Yenan dengan biro di bawah presidium partai yang dibagi ke dalam empat kelompok eksekutif yaitu kehakiman, sekretaris jendral, komite, dan kongres yang mengurusi dewan-dewan di kabupaten, badan pertahanan, ekonomi, dan penerangan.[41] Pemerintahan semacam ini merupakan forum ideologis dan teoretis. Persepsi organisasi masa revolusi terungkap dalam sikap mereka yang menghalangi sistem ekonomi liberal, artinya rakyat harus menekankan ekonomi komunal individu: juga penekanan akan sikap keras terhadap para penghalang. Dengan demikian Badan Pertahanan harus membentuk pasukan pe-

[41] Pembicaraan Widarta juga menyangkut peran rakyat dalam revolusi di luar keresidenan, politik nasional dan lokal di Jawa dan pelajaran yang harus diambil dari Surabaya, di mana pertempuran sengit sedang berkobar terus. Lihat lampiran C.

laksanan di setiap daerah guna menghadapi NICA dan agen-agennya.

Meskipun terbatas, GBP3D berusaha menangani masalah ekonomi dengan cepat. Distribusi pangan, penimbunan pangan, pembatasan harga, pengawasan kegiatan swasta, pengawasan penukaran barang dengan daerah lain merupakan pembahasan sidang. Dalam sidang itu Widarta menyatakan bahwa dasar dari tidakan itu sesuai dengan situasi yang ada. Teori internasional tidak dianggap selalu baik bagi kondisi setempat. Jadi *landreform* pada saat itu bukan prioritas.

Di balik keprihatinan yang realistis dan penyelesaian yang pragmatis, terbentang kepentingan untuk mempertahankan revolusi terhadap lawan-lawannya, yaitu NICA dan agen-agennya. Kelompok luar Tiga Daerah yang dianggap sejalan, yaitu kelompok Tan Malaka, Sayuti Melik, dan PKI Jusuf di Cirebon (yang tidak punya hubungan sama sekali dengan PKI di Tiga Daerah).

Kesan dan catatan rapat tanggal 25 November ialah bahwa GBP3D merasa tekepung dan harus siap untuk bertempur. Mereka berjaga-jaga dengan menaruh logistik penting di tempat tertentu, seperti bensin disimpan di Pemalang dan akan dihancurkan apabila mereka terancam. Penerangan ditangani pemuda, Barisan Algojo dibentuk, para prajurit dididik sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan pemerintah Tiga Daerah. Tegal menjadi pusat kekuatan pasukan-pasukan sedangkan Slawi sebagai pusat kekuasaan Tiga Daerah.

TKR dianggap tidak mendukung revolusi Tiga Daerah. GBP3D berpendapat bahwa TKR adalah alat untuk memperkuat feodalisme Jakarta. Kecurigaan mereka terhadap TKR, dengan latar belakang sosial dan kesetiaannya berakibat penolakan GBP3D terhadap tawaran TKR Yogyakarta untuk membentuk TKR baru Tegal.

Walupun PKI tetap bekerja secara terselubung melalui badan-badan legal dan penggerak front persatuan, Widarta atau K. Mijaya tidak menyembunyikan lagi keberadaan PKI di dalam GBP3D. Dengan terus terang Widarta berbicara mengenai "Parsi" yang seratus persen pro-Moskow. Ia beranggapan, anggota-anggota non-komunis dalam Front Persatuan itu adalah simpatisan. Tetapi ideologi mereka tidak bisa disamakan dengan golongan kiri lain. Widarta cs, sama sekali tidak berhubungan dengan PKI yang didirikan di Cirebon oleh Mohamad Yusuf pada tanggal 21 Oktober 1945. Pertentangan yang

tidak terdamaikan antara K. Mijaya dan Sayuti Melik timbul karena Sayuti Melik tidak menyetujui propaganda anti-fasis oleh PKI pada waktu Jepang mendarat, akibatnya Sayuti Melik dituduh sebagai informan Jepang. Rupanya front persatuan PKI di Tiga Daerah termasuk siapa saja kecuali teman komunisnya sendiri.

Prioritas utama GBP3D ialah dengan secepatnya menanamkan kekuasaan di Pekalongan. Pada tanggal 28 November sekretariat umum GBP3D mengeluarkan surat untuk semua organisasi/badan perjuangan di daerah Tegal agar mendukung perubahan di Pekalongan. Menyusul keputusan tanggal 5 Desember untuk seluruh wilayah keresidenan yang berisi tuntutan Tiga Daerah, Sarjio harus diangkat jadi residen, sisa-sisa pangreh praja yang masih berkuasa harus diganti, dan semua pendukung NICA harus dibersihkan. Apabila Pekalongan dalam waktu 3 hari tidak melaksanakan tuntutan ini, maka GBP3D akan terpaksa menentukan sikap yang tegas, dan bertanggung jawab atas akibatnya (Lihat lampiranD).

Di kemudian hari K. Mijaya membenarkan tindakan ini, karena GBP3D telah menerima laporan tentang kekacauan di Sragi (perbatasan Kabupaten Pemalang-Pekalongan) dan di Batang (sebelah timur ibukota keresidenan), yang merupakan petunjuk bahwa revolusi sosial bulan Oktober telah timbul di sana.[42] GBP3D berpendapat bahwa untuk lebih menekan Pekalongan agar mengganti pemerintahan keresidenan ialah dengan cara mengganti residen, sehingga pergolakan sosial seperti di lain daerah Tiga Daerah dapat dicegah. Menurut K. Mijaya sikap pasif Pekalongan membahayakan keamanan dalam menghadapi kapal perang yang diberitakan telah kelihatan di pantai, yang mungkin akan segera mendarat karena batalyon ke-4 TKR sebelum ditarik sempat menangkap seorang mata-mata yang sedang membagi-bagikan uang Belanda.[43] Laporan-laporan kepada Pemerintah Pusat, baik melalui Mr. Amir Syarifuddin maupun melalui Syahrir secara pribadi, tidak ada gunanya karena Pemerinah Pusat sedang memusatkan perhatiannya pada pertempuran di Surabaya dan

[42]Ketua BP Batang, Suwito, Pertanyaan ke-12, Proces Verbaal, 27.11.46. Proc. Gen.

[43]K.Mijaya, Pertanyaan ke-13, Proces Verbaal, 25.4.46. Proc. Gen.

Ambarawa untuk melawan pasukan Sekutu. Pekerjaan Pemerintah Pusat ialah bertempur melawan musuh asing, dan bukan menyelesaikan pertikaian di daerah-daerah. Oleh karena itu mereka menantikan reaksi Pekalongan atas tuntutan Tiga Daerah sampai 5 Desember sebelum melapor ke Pusat.[44]

Konferensi Pemalang

Surat untuk badan-badan perjuangan Kabupaten Pekalongan diterima Pejabat Residen Pekalongan R.M. Suprapto pada tanggal 6 Desember, dan keesokan harinya diadakan sidang Badan Perjuangan Pekalongan.[45] Saran Sayuti Melik, agar Badan Perjuangan Pekalongan segera menemui GBP3D, dapat diterima. Diusulkan supaya Sayuti Melik dan Suprapto diundang menghadiri pertemuan yang hendak diadakan, tetapi Sayuti Melik telah meninggalkan Pekalongan lagi. Suprapto karena berpendapat bahwa pejabat pemerintah seperti dirinya lebih baik tidak ikut serta, menjadikan pertemuan itu lebih merupakan perundingan antara rakyat dengan rakyat.[46]

Pertemuan diadakan hari Minggu tanggal 9 Desember di Pemalang. Para utusan telah berkumpul di Hotel Merdeka Pekalongan. Di antaranya hadir K.H. Syirat (tokoh Badan Pemberontakan Alim Ulama), K.H. Syafi'i (tokoh Muhammadiyah mewakili BPRI), Kepala Polisi Keresidenan, seorang tokoh KNI, dan wakil dari Barisan Buruh Indonesia. Di perbatasan Pekalongan-Pemalang, mereka dihentikan dan diperiksa oleh rakyat yang bersenjatakan bambu runcing. Ini berkali-kali terjadi sepanjang perjalanan ke Pemalang. Perutusan Brebes juga mengalami hal yang sama.

Tokoh nasionalis Brebes, Kartohargo, dalam tulisannya 13 bulan kemudian mengenai konferensi itu mengatakan bahwa:

---

[44] *Ibid.*, Pertanyaan ke-19.

[45] Menurut S. Karioatmojo, Jaksa Penuntut Umum dalam "laporan tentang keadaan dewasa ini di dalam Keresidenan Pekalongan" tertanggal 19 Desember 1945, Proc. Gen. (selanjutnya dikutip sebagai "Laporan"), Badan Perjuangan Pekalongan dalam kenyataannya dibentuk untuk menjawab surat edaran GPB3D 5 Desember. Sepuluh kelompok yang terwakili dalam badan itu adalah Pesindo dari Batang, cabang Pekalongan dan cabang Sragi, Polisi Pekalongan, Barisan Banteng, BPRI, dan Badan Pemberontakan Alim Ulama, semuanya dari Pekalongan.

[46] Pejabat Residen Suprapto, Pertanyaan ke-6, 15.7.46. Proc. Gen.

Rapat diboeka oleh K. Midjaja dengan ramah-tamah dan perkataan2 jang soedah terpilih lemah-lemboet. Sebeloem memboeka rapat K. Midjaja menegor Pekalongan mengapa tidak toeroet datang padahal soedah diminta datang. Selandjoetnja K. Midjaja menerangkan perdjoeangan 3 Daerah dan kemoedian sampai pada toentoenan 3 Daerah kepada Pekalongan. Di sitoe K. Midjaja djoega menerangkan bahwa seberoelnya toentoetan itoe membawa soeara jang terbanjak dari pendoedoek seloeroeh Keresidenan Pekalongan, oleh karena itoe maka selajaknya Pekalongan menerima toentoetan itoe. Sesoedah itoe laloe Wakil2 dari Pekalongan dipersilahkan menjamboet satoe persatoe. Semoeanja setoejoe hanja wakil Pesindo jang agak koerang poeas kelihatanja. Pendek kata achirnya toentoetan diterima dan nanti dalam istirahat akan dibikin "soerat perdjandjian." Laloe istirahat dimana wakil2 Pekalongan jang bersolat pergi ke Masjid.[47]

Pada waktu itu perutusan Badan Perjuangan Pekalongan menyetujui usul-usul Tiga Daerah, untuk memulai perubahan-perubahan "demi perbaikan dan kemajuan bangsa," yang berarti akan membantu Pekalongan dalam pertempuran di front Semarang. Bagaimanapun juga hadirnya para pemuda bersenjata dan beberapa peninjau menimbulkan perasaan terancam. Perutusan Pekalongan merasa diancam apabila tidak menyetujui tuntutan GBP3D tidak diperbolehkan kembali ke Pekalongan.

Pejabat Residen Suprapto sesudah menerima interlokal dari delegasi Pekalongan segera berangkat ke Pemalang tetapi perjalanan sering kali terhenti karena adanya rintangan dan tiba di Pemalang terlambat. K. Mijaya ketika membuka kembali rapat setelah maghrib, menegur dengan sopan mengapa Pejabat Residen tidak datang bersama-sama dengan perutusan Pekalongan, dan melaporkan hasil konferensi secara ringkas. Suara perjanjian yang dibagikan oleh GBP3D ditandatangani oleh semua wakil kedua pihak, baik GBP3D maupun Badan Perjuangan Pekalongan dan disaksikan oleh Suprapto. Adapun isi perjanjian itu ialah bahwa pemerintah Keresidenan Pekalongan akan diserahkan kepada rakyat dan Sarjio diangkat sebagai residennya, sedangkan para pejabat yang tidak sejalan dengan revolusi

[47] Kartohargo, Pertanyaan ke-9, Proces Verbaal, 14.6.47. Proc. Gen.

agar mengundurkan diri, dan tidak diperkenankan meninggalkan tempat kediamannya sampai keadaan mereda kembali. Timbang terima pengoperan pemerintah kepada GBP3D akan diselesaikan pada hari berikutnya, Senin 10 Desember. Sebelum timbang terima oleh Staf Pengoperan, yaitu staf pengambil alih pemerintahan, berjalan lancar. Pejabat Residen menjamin keselamatan mereka dan keamanan wilayahnya (lihat lampiran D).

Walaupun tidak tercantum dalam persetujuan, diputuskan bahwa Residen baru dan Staf Pengoperan akan dikawal oleh 50 orang pemuda yang bersenjata yang berperan selain sebagai pengawal juga sebagai alat propaganda agar rakyat ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. K. Mijaya meminta agar Suprapto tetap menjalankan tugasnya sampai pemindahan kekuasaan selesai.

Pemimpin Tiga Daerah merasa puas dengan hasil pertemuannya dengan wakil-wakil Badan Perjuangan dari Pekalongan karena K. Mijaya jelas mampu memimpin pertemuan yang sangat penting itu. Namun suasana itulah yang kemudian dianggap utusan Pekalongan sebagai alasan mengapa mereka tidak bebas mengemukakan pendapatnya. Situasi revolusi yang tegang di Pemalang bertambah karena banyaknya rintangan jalan yang menyulitkan kedua perutusan. Seperti kata Kartohargo, pihak Pekalongan-lah yang memilih Pemalang sebagai tempat pertemuan, sehingga apabila mereka terganggu oleh suasana revolusioner ini bukanlah kesalahan GBP3D.[48]

Pemerintah Baru

K. Mijaya dan GBP3D merasa bahwa keresidenan kini telah dipersatukan. Dengan kurang lebih 60 orang anggota kompi pengawal dari Tiga Daerah, Staf Pengoperan meninggalkan Pemalang menuju Pekalongan pada tanggal 10 Desember.[49] Pertama-tama mereka menuju Hotel Merdeka Pekalongan sebagai markasnya, kemudian

[48]Kartohargo, Pertanyaan ke-17, Proces Verbaal, 14.1.47, Proc. Gen.

[49]Pemimpin Kompi Pengawal ini adalah Suntoro, anggota Peta Daidan Pekalongan, dan kemudian masuk Batalyon II TKR yang berkedudukan di Comal. Satu versi menyebut waktu dia cuti di Pemalang dia bergabung dengan Kompi Pengawal Residen dari Tiga Daerah. Sebelumnya ia disebut-sebut dalam kasus penculikan Supangat.

ke Kantor Keresidenan tempat Suprapto telah menanti. Kemudian mereka menjaga Kantor Keresidenan dan jalan ke luar kota. Menurut Jaksa Pekalongan, pasukan itu mempunyai bendera sendiri, yaitu merah dengan bintang putih di tengahnya.[50]

Para pejabat pemerintahan kotapraja dan keresidenan berkumpul dan Suprapto menyerahkan kekuasaan kepada Sarjio. Kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak mengirimkan wakilnya. Para anggota Staf Pengoperan memeriksa semua jawatan pemerintahan dan menyegel semua uang tunai. Pada malam harinya semua pejabat keresidenan diundang ke Hotel Merdeka untuk bertemu dengan para pemimpin baru dan diberi penjelasan tentang tujuan GBP3D, yaitu membuat pemerintahan keresidenan lebih demokratis. Para pejabat yang terancam oleh pemindahan pemerintahan oleh Tiga Daerah, ditenangkan kembali oleh pertemuan ini; juga dirasakan adanya suasana yang baik dalam pertemuan itu.[51]

Selasa 11 Desember, pemindahan kekuasaan administratif keresidenan oleh Staf Pengoperan kepada pemerintah baru masih berlanjut. Pemeriksaan keuangan di beberapa bagian pemerintahan dan inventarisasi terhadap isi gudang-gudang pemerintah juga dilakukan. Bila ternyata ada penyelewengan akan segera ditutup.

Pemeriksaan administrasi di berbagai kantor keresidenan yang dilakukan oleh Staf Pengoperan memberi informasi kepada kelompok-kelompok revolusioner setempat mengapa GBP3D datang ke Pekalongan dan mengatur tugas jaga. Kompi Pengawal Tiga Daerah menguasai telepon, kantor pos, listrik dan air minum, administrasi penjara, dan polisi. Kendaraan yang keluar masuk Pekalongan diperiksa, sedangkan para narapidana dari pendudukan Jepang dibebaskan. Su-

[50]Ini mirip dengan bendera Pesindo, bedanya yang belakangan ini adalah merah dan putih (warna bendera nasional Indonesia) dengan bintang di tengah-tengahnya. S. Karioarmojo, Laporan, 1945, Proc. Gen.

[51]Suprapto, Pertanyaan ke-6, Proc. Gen.; TKR Divisi Istimewa Yogyakarta, Bagian Penerangan. "Peristiwa Pekalongan/Pemalang/Tegal/Brebes" tertanggal 18 Desember 1945. Laporan disusul untuk Markas TKR oleh dua orang pemimpin Barisan Pelopor dan wakil PBI dari Pekalongan. Laporan ini diparaf oleh Komandan Divisi TKR Mayor Jend. Sudarsono, Proc. Gen. (selanjutnya dikutip sebagai "Laporan TKR Yogyakarta").

prapto menyerahkan isi Kantor Keresidenan kepada Sarjio, termasuk arsip rahasia tanpa ada yang rusak.

Setelah kantor pemerintahan ditutup, Staf Pengoperan kembali ke Hotel Merdeka, dan menerima laporan tentang hasil pemerintahan baru selama dua hari itu dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya yang berdasarkan demokrasi itu. Dewan Pekerja dibentuk di tingkat-tingkat kedewanan, kecamatan, dan desa seperti halnya di Tiga Daerah, telah dimulai pula di Pekalongan.[52] K. Mijaya menyarankan kepada para pemimpin Batang, agar membentuk Badan Pekerja dan pelaksana-pelaksana apabila rakyat tidak menyukai camatnya lagi. Ada rencana untuk memecah kabupaten baru yang beribukota Batang.[53] Menyadari pentingnya pembentukan kader di daerah pedesaan, GBP3D dengan kader-kadernya yang terbatas itu, maka dibentuklah cabang Pesindo di kecamatan-kecamatan di pantai Pekalongan.

Pada tanggal 11 Desember itu juga, Sarjio mengeluarkan satu-satunya pengumuman bahwa pemerintah daerah Keresidenan Pekalongan telah menyerah dan jatuh ke tangan rakyat, dan semua sebutan dan gelar kepriayian harus diganti. Pemerintah baru berprinsip demokrasi dan kekeluargaan, dimana semua hubungan antara pejabat dan rakyat harus disadari oleh prinsip ini. Sebutan "paduka" atau "ndoro" diganti dengan "bapak," sedangkan panggilan "bung" atau "saudara" lazim dipergunakan (Lihat lampiran D).

Pada tanggal 12 Desember, K. Mijaya, Sarjio, dan Suprapto membahas pengesahan resmi residen baru. Sebuah telegram permintaan telah dikirim oleh K. Mijaya ke Pemerintah Pusat agar Sarjio diangkat secara resmi.[54] Suprapto, sebagai bekas Pejabat Residen, diminta mengirim telegram serupa dan tetap tinggal dalam pemerintahan baru, karena Sarjio akan sering bertugas ke luar Pekalongan. Suprapto

---

[52] *Kedaoelatan Rakjat*, 15 Desember 1946.

[53] Suwito (Pemimpin PSII Batang), Pertanyaan ke-12, Proces Verbaal, Proc. Gen.

[54] Telegram ini dikirim setelah pertemuan antara GBP3D dan Dewan Badan Perjuangan Pekalongan di Pemalang pada Minggu 9 Desember. K. Mijaya, Pertanyaan ke-22, Proces Verbaal 25.4.46; Kartohargo, Pertanyaan ke-19, Proces Verbaal, 15.1.47. Proc. Gen.

juga diminta membuat laporan tentang kejadian di Pekalongan kepada pemerintah propinsi yang berkedudukan di Purwodadi.[55]

Sebagian besar pendukung Sarjio dari Tiga Daerah yang berada di Pekalongan adalah petani dari Tegal dan Pemalang (37 orang) dan hanya lima orang dari Brebes. Selebihnya, yaitu 8 orang, dari kota pabrik gula Sragi di perbatasan Pekalongan-Pemalang, dan seorang dari Kesesi, di barat laut Pekalongan. Selain petani, mereka itu adalah pedagang kecil, pegawai Kantor Kabupaten, Jawatan Kereta Api, dan Kantor Pos di Tiga Daerah; pejabat-pejabat desa (termasuk Lurah Slawi); lima orang bekas anggota Heiho (juga dari Slawi); seorang kepala perkebunan, dua mantri kesehatan (dari Pemalang), lima polisi, buruh kota, penjahit, penenun, tukang pasir, sopir, pembikin sepatu, dan pandai besi. Mayoritas pendukung gerakan Tiga Daerah berumur di bawah 25 tahun, baik yang berasal dari Tegal maupun dari Pemalang.[56]

Pada sore hari 12 Desember itu, K. Mijaya selaku pemimpin GBP3D menyelenggarakan rapat umum di alun-alun Pekalongan, dan memperkenalkan Residen baru dengan politik barunya kepada rakyat Pekalongan yang ingin melihat Residen baru itu. Rapat berjalan dengan tenang sampai akhir tanpa ada insiden.[57] Pengumuman Residen tanggal 9 Desember dibagi-bagi. Rapat tampaknya sudah puas dengan Sarjio, tetapi K. Mijaya membuat kesalahan dengan golongan Islam. K. Mijaya mengatakan bahwa pemuda-pemuda Islam Pekalongan dan golongan Islam Pekalongan pada umumnya tidak revolusioner seperti rekan-rekannya di Surabaya, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pertanyaannya itu tidak dapat dibenarkan, karena pemuda Islam Pekalongan telah bertempur melawan Inggris di Front Semarang dan bahu-membahu dengan kelompok lain dan TKR. Ia menambah

[55]Pejabat Residen Suprapto, Pertanyaan ke-6, Proc. Gen. Suprapto juga meminta K. Mijaya memastikan pemerintahan Sarjio agar ia tetap tinggal di pemerintahan. K. Mijaya mula-mula setuju tetapi kemudian mengatakan sebaiknya Suprapto meninggalkan Pekalongan.

[56]Karioatmojo, "Daftar nama-namanya orang tahanan yang ditahan menurut perintahnya tuan pemimpin TKR di Pekalongan pada 14 Desember 1945." Jumlah seluruhnya 138 orang. Proc. Gen.

[57]Wakil ketua KNI Tegal. Jawaban ke-10 atas pertanyaan tertulis, November 1972.

kesalahannya dengan mengatakan bahwa dari sudut kepentingan perjuangan, maka "agama dapat dikesampingkan."[58]

Pertemuan rutin antara anggota-anggota Staf Pengoperan Tiga Daerah di Hotel Merdeka, pada sore harinya menerima laporan pengaduan dari pemuda, pejabat, dan lain-lain di Pekalongan. Mereka prihatin atas dibekukannya dana kantor, yang berarti menghentikan kegiatan kantor sehari-hari. Pegawai luar kota Kabupaten Pekalongan yang datang untuk mengambil gaji, tetapi kembali dengan tangan kosong, merasa gelisah karena secara hukum mereka harus bertanggung jawab bila para pegawainya tidak digaji. Begitu pula Kepala Jawatan Kesehatan sangat cemas karena penyediaan obat-obatan bagi rumah sakit dan klinik-klinik kesehatan tidak tersedia. Selain itu masalah lain yang mereka hadapi adalah tingkah laku para pemuda Tiga Daerah. Penduduk mengeluh bahwa kompi pengawal itu bertingkah laku seperti serdadu Jepang yang mabuk. Mereka lewat depan penjagaan harus memberi hormat, apabila tidak, akan kena tampar, sama yang dilakukan Jepang.

Keberhasilan strategi GBP3D tergantung pada sikap TKR dan golongan Islam. TKR tidak menyetujui pemeriksaan semua kendaraan yang keluar-masuk kota yang katanya untuk mencegah pejabat melarikan diri atau melarikan barang perlengkapan kantor, seperti mesin tulis dan mesin hitung. Kendaraan-kendaraan yang menuju Semarang juga diperiksa sehingga menghambat perjuangan melawan agresi asing. Akibatnya sering terjadi perdebatan di pos-pos penjagaan. Permintaan TKR kepada GBP3D untuk mendukung front Semarang melawan musuh diberi jawaban yang menyakitkan hati, yaitu bahwa ancaman asing bukanlah ada di Semarang melainkan di Surabaya.[59] Begitu pula reaksi kelompok-kelompok santri terhadap ucapan K. Mijaya tentang peranan pemuda Islam Pekalongan. Mereka menganggap K. Mijaya merendahkan Islam.[60] Dengan demikian gerakan

[58] Surat tak tertanda tangani dari Partai Buruh Indonesia cabang Tegal, tertanggal 20 Desember 1945. Proc. Gen.

[59] Wakil ketua KNI Tegal, Jawaban 12 atas pertanyaan tertulis, November 1972. Jaksa Karioatmojo, Laporan, 1945, Proc. Gen.

[60] Kepala Polisi Keresidenan Pekalongan, Suwarno, Wawancara, 22.9.71. Jaksa Karioatmojo, Laporan, 1945, Proc. Gen.

kontra mulai berkembang di antara kalangan yang menentang GBP3D.

Seorang tokoh Tegal menyadari perkembangan ini, dan berusaha meyakinkan rekan-rekannya tentang meningkatnya situasi yang dapat dilihat dari laporan yang masuk. Tetapi karena laporan itu bukan dari orang-orang Tiga Daerah, maka K. Mijaya meminta agar diselidiki lebih dulu. Tokoh yang mengerti akan reaksi negatif rakyat Pekalongan itu, secara pribadi berusaha menemui para pemimpin Hizbullah dan TKR sendiri:

> Saya menghampiri Sdr. Nuh dan Sdr. Suharjo untuk diajak membicarakan dan menilai kembali laporan saya itu dengan sungguh. Setelah kita adakan perdebatan seru, Sdr. Nuh saya minta dengan sangat supaya anggota laskar kita jangan bersikap seperti tentara pendudukan, mengingat bahwa kekuatan laskar kita itu dibandingkan dengan tentara dan barisan-barisan pemuda di Pekalongan tidak seberapa. Lebih kalau tentara mencap kita sebagai penghalang dan menghambat hubungan mereka dengan Front, psykologis tidak menguntungkan kita dan kita dapat dicurigai sebagai alat NICA atau setidak-tidaknya sebagai gerakan contra revolusi nasional.[61]

Muhammad Nuh menyetujui untuk menemui para pejabat yang resah karena penyegelan gudang-gudang dan pembekuan dana pemerintah. Situasi ini tidak menguntungkan bagi GBP3D dan beberapa anggotanya mempunyai alasan kuat mengapa mereka khawatir.

Kelompok-kelompok Islam di Pekalongan semula tidak memusuhi GBP3D, tidak seperti masyarakat Muhammadiyah produsen batik di Pekajangan, beberapa kilometer selatan kota. Keadaan ekonomis yang kuat dan pandangan agama yang konservatif menyebabkan mereka selalu menaruh curiga pada pengaruh dari luar yang dianggap sebagai ancaman. K.H. Iskandar Idris yang diangkat Jepang sebagai komandan Batalyon (daidancho) Peta Pekalongan berasal dari Pekajangan. Iskandar Idris menjadi Komandan Resimen

[61] Wakil ketua KNI Tegal, Jawaban tertulis ke-12. Sebelum perang Suharjo adalah Ketua Gerindo cabang Tegal dan mendirikan Sarekat Buruh Bengkel tahun 1940. Ia juga chutaicho Barisan Pelopor Kotapraja Tegal dan anggota BP Tegal, Wawancara, 12.12.72.

XVII TKR Pekalongan, dan ia ditahan ketika menghadiri konferensi Muhammadiyah dekat Tegal, maka kemudian ia "dipenjarakan" di Slawi. Kakaknya Hassan Ismail, yang menjadi pemimpin Muhammadiyah Pekajangan, tanggal 13 Desember menemui Kepala Polisi Pekalongan, mengadu bahwa Sarjio telah menghina Islam dan meminta izin untuk menyelenggarakan rapat akbar Islam, agar mereka dapat membuktikan bahwa umat Islam adalah sejajar dengan mereka. Kepala Polisi setuju, asal Hassan dapat menjamin keamanannya.[62]

Rapat akbar diadakan hari itu juga, dilanjutkan dengan demonstrasi di depan Hotel Merdeka, markas kaum revolusioner, dengan alasan untuk menghormati residen baru. Mereka meneriakkan "lâ ilâha illallah" dan "Allâhu Akbar."

Keesokan harinya, Jumat 14 Desember, Sarjio dengan beberapa stafnya melakukan perjalanan dinas mengunjungi beberapa kecamatan di daerah selatan termasuk Kedungwangi (lihat peta Kotapraja Pekalongan, hal xxxv). Sarjio, sekretaris Maksum, dan dua orang pemuda pengawal pribadi berada di mobil pertama. Mobil kedua membawa K. Mijaya, dr. Suyono, dokter hewan Pekalongan, dan tiga orang pengawal pribadi. Sedang mobil terakhir memuat polisi Pekalongan.[63] Tokoh-tokoh Islam Pekajangan yang mendengar berita akan lewatnya rombongan residen menyusun rencana penyergapan untuk menawan "Residen komunis" dan pelaksaannya dipimpin oleh Hassan Ismail dengan bantuan bekas-bekas Heiho dan Peta. Seorang bekas murid Hassan Ismail menuturkan kenangannya di tahun 1973 sebagai berikut:

> Malam pukul 9.00 kita dipanggil Pak Ismail (adiknya Iskandar Idris) diberi tahu bahwa esok harinya Residen Pekalongan akan datang. Sekolah dibubarkan, Pak Ismail seorang guru, bawa pistol, Uztad Ismail bawa pistol! Ada juga bekas Heiho, rambutnya masih gundul. Waktu itu jarang sekali ada mobil yang lewat, belum tentu 3 mobil dalam satu hari. Jalan ditutup dengan grobag (maksudnya) mau menggagalkan rapat (yang diselenggarakan untuk) menyusun pemerintahan baru di Kedungwungi (selatan Pekajangan). Juga Iskandar Idris ditahan di Slawi

[62]Kepala Polisi Keresidenan Pekalongan, Suwarno, Wawancara, 22.9.71.
[63]Dr. Suyono, Transkripsi, I/6, 27.8.71.

oleh kaki tangan NICA, katanya. Tidak ada koordinasi, Ismail berani tok. Dia tersembunyi di belakang pohon asem. Tidak ada pendidikan militer, tidak ada latihan tembak. Sebuah mobil Fiat tua datang, ditembak oleh Ismail Hassan cs. Sopir (katanya K. Mijaya) dengan ulung memutar balik kendaraan ke arah Pekalongan.[64]

Satu-satunya korban hanyalah K. Mijaya yang menderita luka pada lututnya. Sarjio, tergoncang, melompat dari kendaraannya dan berusaha menelepon ke Pekalongan untuk meminta jemputan.

Berita insiden penembakan sampai ke Pekalongan dan cepat tersebar luas. Pasukan resimen TKR, yang sedang rapat dengan komandannya Wadyono, yang baru saja kembali dari front Semarang dan Markas Divisi pada malam sebelumnya, berangkat ke Hotel Merdeka dan memerintahkan agar para pemimpin revolusioner itu menyerah.[65] Pemerintah revolusioner yang hanya berumur empat hari itu berakhir dengan mendadak.[]

[64]Murid Hassan Ismail, Wawancara, 24.6.73.

[65]Pemimpin KRIS (Kebaktian Republik Indonesia Sulawesi) Tegal, Andi Penyamin, Wawancara, 28.8.71. Ia seorang putra Bugis, dan menurut adat, menyerah itu sikap tidak dihormati, lebih baik memilih mati, tetapi ia berpikir "mati konyol mati percuma", katanya.

BAB SEPULUH

PERANAN MILITER DALAM REVOLUSI LOKAL

MENGAPA TKR memusuhi pemerintah Tiga Daerah? Pemimpin TKR di Pekalongan menegaskan, semua pangreh praja yang ditahan di Tiga Daerah itu dikenal dan dihormati oleh staf dan resimen XVII. Sarimin (Bupati Brebes), Natsir (Kepala Polisi Pemalang), Sudirman (Wedana Brebes), Wadyono Puspoyudo (Wedana Pemalang), dan lainnya dikenalnya secara pribadi dan penahanan atas diri mereka itu dinilainya sebagai tidak adil.[1] Kesetiaan pada golongan elite birokrat (seperti yang dibahas dalam Bab Delapan) adalah bukti yang penting. Setia pada golongan pangreh praja, ditambah dengan hak-hak istimewa pada waktu pendudukan Jepang menambah rasa kurang senang di kalangan penduduk terhadap TKR setelah perang selesai.

Latar Belakang TKR di Pekalongan

Untuk mengerti peranan para perwira TKR Pekalongan terhadap elite birokrat di Tiga Daerah harus dilihat latar belakang sosial pemimpin dua daidan (batalyon) Peta di Keresidenan Pekalongan itu. Pengangkatan komandan daidan oleh Jepang dengan mengutamakan tokoh-tokoh guru Islam yang menonjol juga berlaku di dua daidan Peta Keresidenan itu. Komandan Daidan Pekalongan, Iskandar Idris, adalah tokoh Muhammadiyah Pekajangan (lihat lampiran biografi). Komandan Daidan Tegal K.H. Duryaman asli Ajibarang (Brebes) pernah menjadi khotib di Talang. Dia diangkat Jepang setelah K.H. Abdul Gafi, tokoh Muhammadiyah Bumiayu, menolak untuk diangkat.[2]

[1] Wadyono, Wawancara, 26.8.71.
[2] Abdul Gafi, Wawancara, 13.12.71.

Untuk komandan kompi (chudancho) di Daidan Pekalongan, Jepang mengangkat orang-orang pangreh praja[3]. Di Tegal, tiga komandan kompinya yang diketahui riwayatnya adalah kalangan pangreh praja. Ketujuh komandan kompi itu baik Daidan Pekalongan maupun Tegal tidak ada yang memiliki hubungan erat dengan golongan Islam (meski salah satu di antaranya adalah bekas guru sekolah Muhammadiyah). Sedangkan untuk komandan peleton (shodancho) pun, Jepang cenderung merekrutnya dari kelas priayi juga.

Tingkat Kehidupan yang Berbeda di Peta

Kondisi ekonomi para perwira Peta tidak banyak berbeda dengan keadaan pejabat pemerintah kolonial Belanda.[4] Bagi prajurit biasa, keadaan ekonomi sebagai kompi Peta sangat lain dibandingkan dengan kehidupan sebagai rakyat biasa. Ini bukan semata-mata karena gaji yang tinggi. Dengan adanya ekonomi berdikari Jepang (*genchi jikatsu*), modal yang diberikan oleh Jepang melalui markas batalyon telah dimanfaatkan kompi-kompi Peta ke dalam aset ekonomi, yang dikelola oleh komandan kompi untuk keuntungan mereka. Maju mundurnya pengelolaan itu tergantung pada lokasi kompi dan kecakapan wiraswasta para perwiranya. Kompi-kompi Daidan Pekalongan misalnya mempunyai bebek, sapi perah susu, ikan mujahir, dan ketela pohon.

Di antara kompi-kompi dalam Daidan Tegal berkembang sistem barter. Kompi pertama, berlokasi di markas daidan di pabrik gula Kemantran, mempunyai setengah hektar kolam ikan. Produksinya mereka barterkan dengan kambing yang diternak Kompi Kedua yang berlokasi di pabrik gula Sumberharjo, Pemalang Selatan.

Kompi Kedua melaksanakan ekonomi berdikari sepenuhnya, sehingga dua seksinya dikerahkan penuh dan tinggal satu seksi saja yang melakukan latihan perang. Bagian pertaniannya terdiri dari 40

---

[3]Kecuali Ciptowidiro, putra seorang petani yang memiliki 0,7 hektar sawah dekat Pemalang. Ia berhasil tamat sekolah pendidikan guru di Salatiga berkat bantuan seorang guru. Wawancara, 19.2.75.

[4]Isnaeni (chudancho), Wawancara, 18.10.75. Gaji bulanan Peta menurut Isnaeni adalah sebagai berikut: Daidancho Rp.279; Chudancho Rp. 170; Shodancho Rp. 70; Budancho Rp. 27,50; sedangkan prajurit biasa Rp. 17. Wawancara, 18.10.75.

orang, yaitu mereka yang berpendidikan rendah dan diberi tugas untuk menggarap satu hektar sawah padi pengairan dan satu hektar untuk tanaman kacang, cabe, dan sayuran. Bagian ekonomi diberi tugas memelihara ternak milik kompi, yang berupa 100 ekor kambing dan 120 ekor bebek, sehingga anggota kompi dapat makan daging hampir tiap dua hari sekali. Desa-desa di Keresidenan Pekalongan banyak yang mengelola bebek secara intensif di sepanjang saluran irigasi pantai Pemalang. Tambak ikan yang diusahakan oleh kompi juga sangat produktif, sedang sistem barter antar kompi menjamin terpenuhinya kebutuhan bersama.

Jepang menyediakan secara cuma-cuma kebutuhan listrik, rokok putih, dan pakaian, begitu pula gula, beras, dan sayur-sayuran.[5] Fujinkai, organisasi wanita yang disponsori Jepang, kadang kala mengirim makanan dari BP2 (Badan Pembantu Prajurit) di Pemalang, dan memberi hiburan gratis. Menurut bekas komandan kompi Peta, "Selama pendudukan Jepang semua orang menderita, tetapi Peta tidak." Sedangkan hubungannya dengan rakyat terbatas karena Peta tinggal di asrama.[6]

Perbedaan kondisi ekonomi antara Peta yang tercukupi dan rakyat yang sengsara tidak nampak mencolok di Pekalongan, walaupun jurang ini melebar akibat wajib setor padi di keresidenan itu. Melihat keadaan seperti itu, Peta di Blitar membuka gudang-gudang pemerintah agar rakyat dapat mengembil bahan pangan dan sandang yang dibutuhkannya.[7] Dampak hubungan antara priayi dengan rakyat Pekalongan kepada pemimpin Peta ialah ia lebih terbiasa melihat pembagian kekayaan yang sangat berbeda antara priayi dan rakyat, dibandingkan dengan pemimpin Peta di Blitar.

Setelah adanya instruksi pembubaran Peta sesudah Proklamasi, komandan kompi di Pemalang Selatan bermaksud menyerahkan kekayaan milik kompi kepada Bupati Pemalang. Tetapi sewaktu kompi harus menyerahkan senjatanya kepada Jepang di Pantai Widuri, Pema-

[5]Juweni Wimbohandoko, Transkripsi II/5, 15, 17.4.75.
[6]Wadyono, Wawancara, 20.11.74, 15.10.76.
[7]Idris Andrianatakesuma, *Pemberontakan Peta di Blitar* (Yogyakarta, 1973), hlm. 9.

lang, asrama batalyon di Sumberejo, delapan kilometer selatan kota, diserbu.

> Jadi kita 'kan keisolir di luar kota. Rupa-rupanya orang itu katakan agak explosif, tahu begitu, tahu kita tidak ada senjata rupa-rupanya mau menyerbu kekayaan itu mau minta kambing, minta itik, masih banyak sawah saja yang belakang itu sudah mulai dicabuti tanamannya. Sawah 1 hektar, kebunnya ½ hektar, ha, sudah mulai dicabuti, sini sudah anak-anak (Peta) mulai gelisah, ha, anak-anak kebanyakan anak-anak di luar kota dari desa-desa sudah takut, ha, sudah sekarang lekas kita amankan saja. Ha, ya, beras yang seadanya itu siapa yang mau membawa sudah membawa bekal untuk pulang. Apalagi ada tepung untuk kanji tapioka, dah, bagi apa yang masih ada, itik dengan kambing terpaksa digiring ke Kantor Sosial kabupaten itu.[8]

Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Pada tanggal 20 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengumumkan akan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di bawah kekuasaan KNI setempat. Pada awal sebelum September, bekas anggota Peta yang telah kembali ke rumah masing-masing setelah daidannya dibubarkan, berkumpul kembali untuk membentuk satuan-satuan BKR.

Sebelumnya, Barisan Pelopor Tegal telah menemui Kiai Duryatman, komandan Daidan Tegal, dan menyarankan agar daidan tetap memegang senjatanya dan membentuk BKR. Tetapi mereka terlambat, karena kebanyakan anggota batalyon telah kembali ke desanya dan Jepang telah mengangkut senjata mereka ke Bandung.[9]

Kira-kira 80 persen dari bekas anggota dua batalyon Peta di Keresidenan Pekalongan itu menjadi anggota BKR di kabupaten-kabupaten dan kewedanan. Di tingkat kewedanaan BKR dipimpin oleh bekas komandan seksi Peta (shodancho). Seperti halnya badan perjuangan lainnya, ikatannya longgar, tak ada tingkatan jabatan, tak ada struktur resmi, tugas pokoknya adalah memelihara keamanan setempat. Di Balapulang, hampir semua anggota API adalah anggota BKR.

---

[8]Juweni Wimbohandoko, Transkripsi III/21.

[9]Muhammad Nuh, Jawaban tertulis, Semdam, 1959, hlm. 6; Marsum Hr, Ceriteraku, 1974, hlm. 70-73.

Bagaimanapun juga, seperti halnya Peta, BKR memiliki fasilitas khusus yang tidak dimiliki oleh kelompok lain, BKR memperoleh kantor, yang kini bernama BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang),[10] yang diterima oleh pangreh praja dari sumbangan Cina kaya dan pengusaha untuk keluarga Peta dan Heiho. Dana ini kemudian digunakan untuk pengadaan makanan dan pakaian seragam.

Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

Pengepungan kenpentai yang dimulai pada tanggal 4 Oktober di Pekalongan merupakan pertemuan kembali anggota BKR sejak pembubaran Peta. Presiden Sukarno membentuk TKR di Jakarta tanggal 5 Oktober. Beberapa hari kemudian sekembalinya BKR dari mengawal kenpentai dan orang-orang sipil Jepang dari Pekalongan ke Purwokerto, TKR di Pekalongan dibentuk. Resimen XVII TKR bersama-sama dengan resimen lainnya di kota-kota pantai utara (Kendal, Purwodadi, dan Pati) merupakan bagian dari Divisi ke-4 yang bermarkas di Salatiga dengan Kolonel Jatikusumo sebagai panglimanya. Resimen XVII terdiri dari 4 batalyon, masing-masing berlokasi di tiap kabupaten dalam keresidenan ini. Struktur organisasinya berbeda dengan Peta, yaitu markas resimen TKR berpusat di Pekalongan sedangkan markas daidan Peta terdiri sendiri-sendiri di Tegal dan Pekalongan.

Dari dua bekas komandan daidan dan delapan bekas komandan kompi (chudan) Peta di keresidenan ini, hanya dua orang yang tidak turut bergabung dalam Resimen XVII. Mereka itu adalah K.H. Duryatman dan Rasimin, keduanya dari daidan Peta Tegal. Setelah terjadi penangkapan atas diri Komandan Resimen, Iskandar Idris, dan penarikan batalyon-batalyon dari Tiga Daerah, maka struktur komando resimen berubah.[11] Akibat dari reorganisasi TKR Resimen XVII

[10]Badan Penolong Korban Perang dibentuk pada 20 Agustus, sebagai gantiubah dari BP2 (Anderson, *Java*, hlm. 103). Di Keresidenan Pekalongan ketua BPKKP adalah dr. Maas, wakil Pekalongan dalam Chuo Sangi-In, (Dewan Penasihat Pusat) dan anggota KNI Pekalongan.

[11]Wawancara, 26.8.71. Wadyono lalu mengangkat Waluyo Puspoyudo sebagai kepala seksi intelijen; Wadyono sendiri menjadi pejabat komandan dan

awal November 1945 terjadi hal-hal berikut. Pertama, dominasi bekas anggota Peta Daidan Pekalongan yang berarti bahwa staf resimen lebih setia pada suasana politik wilayah Pekalongan daripada di Tegal, dimana gerakan Tiga Daerah memperoleh banyak dukungan. Padahal Tegal tidak mempunyai suara di staf resimen.[12] Kedua, adanya pertalian antara perwira staf resimen TKR dengan pangreh praja di Tiga Daerah, yang disebut tadi. Mereka itu adalah Wiluyo Puspoyudo dan Sugito. Wiluyo, ayahnya adalah Wedana Pemalang yang dipenjarakan di Pemalang. Sugito, kepala seksi organisasi, ayahnya adalah Bupati Brebes yang tidak diketahui nasibnya sejak 18 Oktober.[13] Pertalian pangreh praja dengan TKR ini diperkuat oleh pengangkatan bekas Camat Brebes menjadi kepala Sekretariat Staf Resimen. Bekas Camat Brebes adalah sahabat Wadyono dari Mosvia, yang lari ke Pekalongan mencari keselamatan ketika revolusi sosial berkecamuk.

Meskipun alasan penarikan tiga batalyon TKR dari Tiga Daerah telah jelas, namun siapa saja yang memberi perintah penarikan itu tetap tidak jelas. Perintah itu dimuat dalam sebuah telegram, yang melarang ketiga batalyon di Tiga Daerah menembak rakyat. Menurut Wadyono perintah itu ditandatangani oleh Jenderal Urip Sumoharjo, komando tertinggi TKR. Wadyono percaya, bahwa Jenderal Jokosuyono, yang datang ke Pemalang bersama Sayuti Melik dan menginap di rumah Supangat, mempunyai pengaruh penting atas sikap Markas Besar TKR Yogyakarta pada waktu itu.[14] Sayuti Melik mengatakan bahwa sesudah selesai berdiskusi dengan para pemimpin AMRI Slawi mengenai situasi gawat di Tegal, yaitu setelah mereka ditangkap di Adiwerna, ia menelepon Markas Besar TKR Yogyakarta. Menurut Pejabat Komandan TKR, tujuan pemerintah penarikan dari Yogyakarta itu ialah mencegah terjadinya pertikaian bersenjata antara TKR

Sudharmo sebagai kepala staf, menggantikan Bustomi yang minggat ke Yogyakarta. Perwira staf Resimen XVII Pekalongan ini bertambah dari empat menjadi delapan orang dengan berbagai seksi baru. Lihat Lucas, *Bamboo Spear*, hlm. 442-448.

[12]Isnaeni, satu-satunya anggota Daidan Tegal yang menjadi anggota staf resimen, dipindahkan ke batalyon setelah reorganisasi.

[13]Wiluyo Puspoyudo shodhancho, Peta dalam Kompi Wadyono, menjadi wakil ketua MPRS dan anggota Kabinet Dwikora 1964, sebagai menteri koordinator.

[14]Jokosuyono kemudian menjadi Kepala Biro Perjuangan Kementerian Pertahanan di bawah Menteri Amir Syarifuddin.

dan rakyat.[15] Usaha Resimen XVII untuk mendapat bantuan satu batalyon tambahan dari Gatot Subroto, komandan Resimen Banyumas, ternyata tidak berhasil.[16]

Penarikan TKR Brebes berjalan tertib. Kartohargo gagal menahan batalyon agar tinggal di Brebes, sedangkan unsur lain pun tidak menghalangi penarikan itu. Bahkan ketika kereta api yang mengangkut Batalyon Brebes itu berhenti di Tegal dan Pemalang, tidak ada perhatian sama sekali dari pemimpin setempat.

Di Tegal pada tanggal 4 November para demonstran bergerak menyerbu markas batalyon TKR karena mereka mengira bahwa para pemimpin API disembunyikan di tempat itu. TKR berjaga-jaga dan melepaskan tembakan ke atas kepala para demonstran. Bala bantuan TKR dari Pekalongan yang berusaha membantu Batalyon 3 ini dicegat di Pemalang dan diharuskan kembali.[17]

Sementara itu Batalyon Tegal menerima telepon dari Markas Resimen agar menarik diri ke Pekalongan. Mereka menemukan kapal motor yang cukup untuk mengangkut satu kompi, walaupun tanpa persediaan bahan makanan dan air, dan tiba di Pekalongan keesokan harinya. Sisa batalyon menunggu para demonstran sampai esok harinya. Setelah demonstran bubar mereka diam-diam bergerak menuju stasiun kereta api dan pergi ke Pekalongan.[18]

---

[15]Sejarah Divisi Diponegoro Jawa Tengah berjudul *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Komando Daerah VII Diponegoro* (1963?) Semarang, tidak tertanggal (1963?) (selanjutnya dikutip sebagai *Sejarah Tentara Nasional*) yang tidak pernah disiarkan, tidak menyebut sama sekali penarikan batalyon TKR dalam pembahasannya tentang Peristiwa Tiga Daerah. Dalam revisi kemudian di atas sejarah ini, diterbitkan tahun 1968, menyebut alasan penarikan karena instruksi via radiogram dari Markas Besar Yogyakarta guna mencegah pertikaian bersenjata lebih jauh dengan rakyat. *Sirganing Yakso Katon Gapuring Ratu*, hlm. 60. Nasution mengatakan bahwa penarikan itu adalah akibat langsung dari *clash* antara TKR Batalyon III dengan rakyat di Tegal pada 4 November, dan tindakan itu diambil untuk mencegah pertikaian itu lebih lanjut. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan*, jilid 2, *Diplomasi atau bertempur* (Bandung, 1977), hlm. 548 (selanjutnya dikutip sebagai *Sekitar Perang*).

[16]Wadyono, Wawancara, 27.8.71.

[17]Mayjen Sudharmo, Transkripsi, I/2, 26.3.73.

[18]Juweni Wimbohandoko, Transkripsi, IV/32, 35, 17.4.75.

Unsur-unsur Militer yang Lain di Tiga Daerah

Ketika TKR dengan pejabat kereta api sedang merundingkan bantuan kereta api khusus untuk mengangkut batalyon ke Pekalongan, terjadilah pertemuan penting dan perdebatan tentang siapa yang pergi dan siapa yang tinggal. Satu batalyon baru, yakni Kompi Laut di bawah pimpinan Letnan Jusuf, memutuskan untuk tetap tinggal. Alasannya, karena kebanyakan anggota Kompi Laut berasal dari tegal dan mereka itu tidak berasal dari salah satu batalyon Peta dalam keresidenan itu, selain dari hubungan dengan para perwira bekas Peta yang kini memimpin Resimen XVII kurang erat. Mereka adalah bekas pelajar Sekolah Pelaut yang didirikan di Jepang, termasuk di antaranya di Tegal dan Pekalongan. Beberapa bekas komandan seksi Peta (shudancho) yang berasal dari luar keresidenan mengikuti jejak Kompi Laut.

TKR Laut (yang tidak boleh disamakan dengan kompi laut batalyon TKR di Tegal), berasal dari BKR Laut yang berdiri sesudah BKR terbentuk dalam bulan September, dan dipimpin oleh bekas pelajar Sekolah Pelayaran Tinggi di Semarang. Ketika pertempuran antara Jepang dengan Republik di Semarang berakhir 19 Oktober, Inggris menduduki Pelabuhan Semarang dan memaksa TKR Laut yang baru terbentuk itu untuk pindah ke Tegal di bawah pimpinan Darwis Jamin dari Sulawesi. Seperti badan perjuangan lainnya, tujuan TKR Laut yang berkekuatan 30 orang itu adalah mencari senjata.[19] Mereka memperoleh bantuan dari Demak melalui Solo, karena kapal yang diungsikan dari Pelabuhan Semarang menuju Jepara selama pertempuran dengan Jepang tidak kembali. Pada tanggal 26 Oktober, TKR Laut menerima bantuan sebesar Rp. 10.000 dari Gubernur Jawa Tengah, untuk mencukupi kebutuhan makanan dan perlengkapan. Setelah Tegal diserang oleh rakyat pada tanggal 4 November, TKR Laut merasa huruf TKR di depan namanya kurang menguntungkan. Mereka lalu menggantinya, dan pada 7 November, Jakarta menyetujui perubahan nama mereka menjadi Pangkalan IV. Keda-

[19]Sejarah terbentuknya BKR/TKR Laut digambarkan secara lengkap dalam mingguan *Djangkar*, diterbitkan oleh Seksi Penerangan Angkatan Laut di Tegal, No. 19 dan No. 20, 31 Oktober – 7 November 1946.

tangan para pelajar Sekolah Pelayaran Jakarta memperkuat kedudukan mereka dan menggunakan markas batalyon TKR yang telah kosong itu.[20]

Untuk membangun kembali tentara di Tiga Daerah, para pemimpin revolusioner bekerja sama dengan Kompi Laut dan Pangkalan IV. Pangkalan disusun kembali dan diperbesar dengan seksi-seksi pengapalan, perumahan, administrasi, perekrutan, transportasi, intelijen, dan personil. Latihan kemiliteran dilakukan di Tuwel, tempat peristirahatan Belanda di selatan kota. Kompi Laut digunakan oleh Badan Pekerja Tegal untuk melatih para pemuda membantu memelihara ketertiban dan hukum.[21]

Front TKR di Semarang

Sejak pengangkatannya menjadi komandan Resimen XVII awal November, Wadyono selalu berada di front Semarang, sesekali kembali pada setiap pergantian tugas batalyon. Setelah mengetahui surat GBP3D tertanggal 5 Desember tentang tuntutan Tiga Daerah, Wadyono mengirim telegram kepada AMRI di Tegal yang dengan tegas mengatakan bahwa tentara tidak akan melibatkan diri dalam urusan pemerintahan keresidenan.[22] Pada tanggal 13 Desember, Wadyono melapor ke Markas Divisi di Salatiga, membicarakan tentang residen baru yang diangkat oleh Bung Karno dan perkembangan politik terakhir di Pekalongan dengan Komandan Divisi Kolonel Jatikusumo. Wadyono berpendapat lebih baik tentara mengakui Sarjio sebagai residen baru. Tetapi menurut Wadyono, Komandan Divisi tidak menyetujui.[23]

Sewaktu kembali ke Pekalongan pada malam harinya ia bermimpi melihat kaum revolusioner Tiga Daerah dilambangkan sebagai sesuatu yang datang dari luar Jawa.[24] Para perwira staf merasa jengkel

---

[20]Penulis sejarah TKR Laut menyebutkan "pada waktu itu nama TKR tidak disukai di Kotapraja Tegal," *Ibid.*

[21]Pemimpin BKR Slawi, Wawancara, 27.4.73. Bahkan Kutil, sebagai kepala polisi Kabupaten, meminta kepada Kompi menangkap "para perampok."

[22]Laporan TKR Yogyakarta (18.12.45), Proc. Gen.

[23]Wadyono, Wawancara, 27.7.81, 10.10.71.

[24]Lihat Bab Tujuh.

kepada para pengawal Tiga Daerah yang ditempatkan di seluruh keresidenan, seolah-olah TKR tidak dipercaya dan dianggap sebagai musuh oleh Residen baru. Keberanian terhadap kaum revolusioner mulai berkembang. TKR tersinggung dengan disegelnya cadangan beras dalam gudang; dan harus ada izin bagi kendaraan yang meninggalkan kota, lebih-lebih ketika kereta api yang membawa perbekalan untuk front Semarang dihentikan. Permintaan TKR untuk mencoba senapan yang baru diperbaiki ditolak, selain itu tersiar berita bahwa pemerintah baru Pekalongan berniat melucuti TKR dan polisi Pekalongan pada tanggal 17 Desember.[25] Wadyono berpendapat:

> Saya tidak pernah bertemu muka dengan Sarjio. Bila saya bertemu saya pasti akan dikalahkan. Kita dapat menganggap sepi Sarjio, karena kita tidak tertarik pada politik. Tetapi Sudharmo, Sumantri, dan Suhadi itu buta politik dan berdarah panas. Kita baru bertindak karena Sarjio menghentikan kereta api yang akan menuju front Semarang yang memuat bahan-bahan kebutuhan Resimen di sana. Kita dihentikan dan digeledah di Pekalongan. Karena yang kami warisi itu dari Jepang, kami berpikir kami ini mempunyai kedudukan tinggi dan tidak dapat dipermainkan oleh siapa pun. Kita dalam keadaan perang dengan Inggris di Semarang dan dengan begitu penghentian suplai kita menjadi suatu yang lebih serius. Inilah faktor yang sebenarnya, bukan masalah politik, yang mencemaskan kita. Kita tidak terganggu oleh pandangan politik Sarjio. Saya segan kepadanya... semua tokoh-tokoh penting Tiga Daerah seperti Muhammad Nuh, Sarjio dan K. Mijaya adalah jauh lebih tua dari kita. Kita tidak akan berani bertindak, jika Sarjio tidak menghentikan kereta api.[26]

Faktor lain yang mendorong TKR untuk bertindak ialah karena telah diberi tahu munculnya gerakan perlawanan dari kalangan Islam yang dipimpin oleh Hassan Ismail, tokoh Pekajangan. Hassan Ismail mengatur penyergapan rombongan Residen di Pekajangan dan meminta kepada TKR untuk mempersenjatai mereka karena dialah yang

---

[25]Catatan tulisan tangan Pejabat Residen Suprapto, tertangkap tanggal 25.12.45, Proc. Gen., memberikan alasan ini bagi penahanan yang dilakukan tentara "dengan bantuan dari Hizbullah dan Sabilillah."

[26]Wadyono, Wawancara, 10.3.73. Sumanti dan Suhardi adalah anggota staf Resimen XVIII TKR.

telah memulai perlawanan di Pekajangan. Komandan TKR menjawab bahwa tentara tidak tergantung pada Pekajangan lebih-lebih ia tidak diberi informasi tentang rencana penyergapan itu sebelumnya.[27]

Priayi Pekalongan dan perwira TKR terkejut mendengar cara pemimpin revolusioner Adiwerna mengarak adik R.A. Kartini, R.A. Kardinah (istri Sunarjio, Bupati Tegal) dan putrinya keliling kota dengan mengenakan pakaian dari goni pada tanggal 4 November. Tindakan ini menggoncangkan orang-orang TKR, karena dianggap "tidak sesuai dengan norma-norma budaya Jawa."[28]

Dalam rapat staf Komando tanggal 13 Desember, Wadyono didesak anggota staf yang lebih muda agar cepat mengambil tindakan terhadap residen baru dan GBP3D. terutama Sumantoro, ajudan Kepala Staf Sudharmo, dan Wiluyo Puspoyudo kepala Seksi Intel, dianggap sebagai penggerak utama dari operasi kontra ini. Berita terakhir tentang penembakan K. Mijaya dekat Pekalongan mendorong Staf Resimen bertindak. Wiluyo Puspoyudo diserahi memimpin pasukan untuk menangkap Sarjio dan staf Tiga Daerah di Hotel Merdeka.

Campur Tangan Militer

Tindakan melucuti 50 pengawal Tiga Daerah dan menangkap Residen beserta stafnya di Hotel Merdeka mengikat TKR akan tindakannya lebih jauh. Ternyata bahwa campur tangan militer menimbulkan persoalan yang lebih luas daripada yang disangka semula ketika ternyata yang ditangkap jumlahnya menjadi lebih banyak. Sejumlah 178 orang Tiga Daerah yang berada di Pekalongan ditangkap dan dimasukkan ke penjara pada tanggal 14 Desember, di antaranya termasuk anggota Staf Pengoperan dan GBP3D di Pekalongan.

Pesindo Pekalongan mengeluarkan pengumuman setelah tindakan TKR 14 Desember, dengan menyerukan agar rakyat tetap tenang karena pengawal Tiga Daerah telah ditangkap oleh TKR. Tidak disebutkan bahwa Residen juga telah ditangkap. Kemudian disusul

[27]Wadyono, Wawancara, 10.10.71.
[28]Wadyono, Wawancara, 28.7.71, 20.11.74. Lihat juga Bab Tujuh.

pengumuman kedua yang lebih resmi, yang mengatakan bahwa Pemerintah Tiga Daerah telah dibubarkan oleh TKR dan Dewan Perwakilan Rakyat akan segera dibentuk. Dengan persetujuan TKR pada tanggal 15 Desember akan dibentuk panitia pengarah untuk mewujudkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat.[29] Tetapi tindakan TKR selanjutnya mengakibatkan gagalnya usaha tersebut.

GBP3D menyelenggarakan rapat darurat di Pemalang yang dihadiri oleh pemimpin AMRI Slawi Suwignyo, Sakirman, dan Kartohargo dan beberapa pemimpin dari Brebes, dan Supangat. Suwignyo melaporkan bahwa ia telah mengusahakan pembebasan Sarjio dan stafnya lewat telepon, tetapi Wadyono menolak permintaan itu. GBP3D kemudian mengirim sebuah laskar dari Tegal dan Pemalang untuk berdemonstrasi menuntut pembebasan para tahanan di Pekalongan.[30]

Karena beberapa alasan TKR bersikap semakin keras. Tersebar desas-desus bahwa akan ada serangan Tiga Daerah untuk membebaskan Residen dan para tahanan. Sedang rombongan yang terdiri dari Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, Perdana Menteri Syahrir akan tiba di Pekalongan dalam acara akhir perjalanan keliling Jawa pada tanggal 22-23 Desember 1945. Kalau terjadi serangan Tiga Daerah terhadap Pekalongan dapat menjerumuskan keresidenan itu ke dalam kekacauan politik bersamaan waktu dengan kedatangan rombongan dari Jakarta.

Pada mulanya Wadyono tetap tidak berkeinginan untuk melibatkan TKR dalam tindakan lebih lanjut.[31] Tiga hari setelah penangkapan Residen, reaksi kontra terhadap Tiga Daerah semakin nyata dengan tersiarnya desas-desus tentang akan adanya serangan dari pihak Tiga Daerah. TKR dan kalangan Islam di Pekalongan menyusun rencana operasi kontra dengan pedoman lebih baik menyerang daripada diserang. Kekuatan gabungan TKR-Hizbullah-Sabilillah dibentuk. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok dan memasuki Tiga Daerah dari dua jurusan, di bawah pimpinan perwira TKR bekas Peta,

[29]Pernyataan tercetak Pesindo dapat dijumpai di Proc. Gen.
[30]Kartohargo, Pertanyaan No. 18, Proces Verbal, 14.1.47.
[31]Santri Pekajangan, Wawancara, 19.12.72.

Sugiyono dan Mukhlis. Sugiyono adalah bekas shodancho dari Daidan Tegal,[32] sedangkan Mukhlis yang dianggap eksentrik oleh rekan-rekannya, juga bekas shodancho Daidan Pekalongan.

Tindakan melawan Tiga Daerah dengan satu komando yang terkoordinasi ternyata sulit karena banyaknya kelompok yang ikut. Janji-janji pertemuan di antara para pasukan tidak pernah dilaksanakan, sehingga mereka akhirnya terpecah. Satuan Hizbullah di sebelah barat Pekalongan dan pasukan lainnya di sebelah timur yang kemudian menjadi kelompok Pekajangan. Akibat perpecahan ini dua pemuda Hizbullah terbunuh. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa yang ada waktu itu ialah semangat yang meluap dan diungkapkan dengan kata siap.

Pasukan yang dipimpin TKR mendapat perlawanan di Sragi, kota pabrik gula di perbatasan Pemalang-Pekalongan di mana pecah pertempuran yang mengakibatkan tujuh orang terluka.[33] Lima belas pucuk senjata yang ditemukan di gudang pabrik gula Sragi tanpa peluru, diambil Hizbullah.

Hassan Ismail dengan pasukan TKR menuju Slawi tempat Ikandar Idris ditawan. Kelompok ini berusaha membangkitkan semangat Islam Jawa. Seorang haji terkenal dari Pekajangan, mengenakan jubah putih, berdiri di bak belakang sebuah truk sambil mengacungkan pedang seraya berseru sebagaimana citra seorang Islam militan atau Pangeran Diponegoro/Sang Ratu Adil.

Perlawanan terhadap TKR terjadi di Comal; seluruh kelompok dengan mengenakan janur kuning, lambang perlawanan dan kekebalan, menyerukan "Allahu Akbar" serta membawa pedang dan granat bikinan sendiri. Sebagian mereka bersenjatakan keris, lambang kekuatan spiritual Jawa. Karena mereka menganggap keris itu mempunyai

---

[32] *Sejarah Tentara Nasional*, hlm. 33. Sebagai Komandan Distrik Militer (Kodim) Pekalongan, Mukhlis mendukung Dewan Revolusi 1 Oktober 1965, dan ditahan di Nusa Kambangan.

[33] Ini dikatakan sebagai oposisi pertama terhadap TKR. Gambaran ini dimuat dalam sebuah surat tak tertanda tangan tetapi berkepala cetak Partai Buruh Indonesia (PBI) Cabang Tegal, memberikan keterangan tentang kejadian akhir-akhir ini di Keresidenan Pekalongan, tertanggal Purwokerto, 20 Desember 1945. Proc. Gen; Pemimpin Santri Pekajangan, Wawancara, 19.12.72.

kekuatan, maka ketika keris mereka diambil TKR, mereka kehilangan semangat melawan.[34]

TKR menemukan perlawanan hanya di Sragi dan Comal. TKR memusatkan operasinya pada penangkapan dan penjeblosan para pemimpin Tiga Daerah ke penjara, dan memeriksa pendukungnya sebelum mereka diizinkan pulang ke rumah masing-masing.

Seperti penguasa sebelumnya, TKR juga meminta pemimpin lenggaong untuk menjadi tukang pukulnya. Seorang lenggaong, Talib namanya, yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Jepang, dan masih berada di penjara oleh TKR dibebaskan setelah bersumpah akan melawan kaum revolusioner. Talib diserahi tugas menjaga para tahanan di Slawi. Algojo ini kemudian berperan sebagai Kutil-nya TKR.

Karena organisasi satuan-satuan Hizbullah sejak awalnya sudah kacau, maka dilakukanlah reorganisasi di Pemalang. Mereka terbagi dalam satuan-satuan yang terdiri dari 15 orang, yang masing-masing bersenjatakan karaben, di bawah komando TKR. Wiloyo Puspoyudo membebaskan ayahnya dan pangreh praja lainnya dari penjara Kota Pemalang. Para pemimpin Tiga Daerah digiring dan dibawa ke alun-alun kota. Mereka diperlakukan secara kasar baik sewaktu ditangkap maupun selama dalam penjara. Di beberapa tempat pemimpin Tiga Daerah dihajar sampai setengah mati, dalam suasana balas dendam.[35]

Dengan alasan apa pun rakyat kini melihat hal itu sebagai pertikaian antara dua daerah dalam keresidenan, yaitu antara Pekalongan dengan Tiga Daerah. Situasi ini mirip dengan *warlordisme* (perang-berperang antara pemimpin daerah).

Pada tanggal 22 Desember, di penjara Tegal, pangreh praja dibebaskan oleh Sugito, anak Sarimin, dan dibawa ke Pekalongan.[36] Ketika TKR tiba di Tegal, Bupati, Patih, dan Sekretaris Kabupaten sedang dalam perjalanan ke Purwokerto lewat Cirebon menemui re-

[34]Pemimpin Santri Pekajangan, Wawancara, 19.12.72; Wadyono, Wawancara, 27.8.71. Perwira Intelijen TKR (wawancara, 5.10.71) mengatakan bahwa TKR memperoleh banyak senjata keris.

[35]Wawancara, 17.2.75. Pejabat Penjara Pemalang, wawancara, 17.2.75; untuk lebih detailnya lihat Lucas, *Bamboo Spear*, hlm. 372-374.

[36]Wedana Brebes, Catatan Harian.

siden Banyumas, Mr. Iskaq.[37] TKR memerintahkan penghentian kereta api itu dan mengirim mereka kembali ke Tegal. Di alun-alun rapat umum sedang diadakan. Dalam rapat itu H. Mohammad Ilyas dengan seragam militernya mengumumkan bahwa dia telah diangkat untuk menggantikan Bupati Tegal.[38] Bupati Abu Suja'i yang masih menjabat itu menuju rapat dan mengatakan bahwa Bupati dan Patih tidak melarikan diri.

Pencarian terhadap para pemimpin Tiga Daerah berlanjut di Brebes. Kartohargo diperlakukan dengan tidak semena-mena oleh TKR. Sebagai pemimpin perjuangan senior di Tiga Daerah Kartohargo yang mengabdi kepada gerakan nasional selama 20 tahun mengalami nasib jelek.

> Kemudian datang dua orang anggota polisi untuk jemput saya ke Kantor Polisi Cirebon—sampai malam saya tertidur di bangku. Kemudian datang TKR dari Brebes —namanya Ciptono—dan bawa mobil. Setelah mengikat dan menendang saya. Saya diselomoti tegesan (puntung) rokok kemudian dibawa ke muka rumah mertuanya Ciptono di Tanjung Ukir Sumosubroto (penilik sekolah) bilang bahwa Kartohargo eks NEFIS (Netherlands Eastern Forces Intelligence Service). Kemudian diserahkan kepada pemuda Hisbullah, supaya menjaga saya. Saya haus tapi tak diberi minum kemudian dibawa ke Brebes. Semua pakaian digeledah. Saya minta minum, ditunjukkan di WC, saya minum di keran WC, kemudian dimasukkan di sel. Jam 10.00 pagi saya dibawa keluar diikat dengan tali, kanan kiri ada senjata mitraliur, tiap persimpangan jalan dijaga dengan mitraliur. Saya diarak dan dipecuti, jadi kuda-kudaan supaya lari, sampai bercucuran darah. Istri dan anak saya disuruh melihat, putar-putar kota. Di muka pengiring serukan "Ayo ini pemimpinmu," "kalau berani, tolong ini." Mulai saat itu saya rusak mata kanan. Kemudian dimasukkan ke sel lagi—tiga jam— kemudian jam empat sore datang TKR dari Pekalongan yang akan menggantikan (pemerintah) di Brebes.[39]

---

[37]Residen Banyumas Iskaq Cokroadisuryo dalam perjalanan menuju Tegal guna membantu Bupati mengadakan persiapan menyambut kunjungan kepresidenan, dihentikan oleh para aktivis di Balapulang dan diharuskan kembali ke Banyumas. Para pemimpin Tegal dalam perjalanan menuju ke Purwokerto guna meminta maaf atas insiden yang memalukan itu. Ki Citrasatmaka, Wawancara, 30.1.73.

[38]K.H Muhammad Ilyas, anggota Pekalongan Shu Sangikai.

[39]Kartohargo, Wawancara, 16.12.72.

Ia dipindahkan ke beberapa penjara selama 19 bulan sebelum dibebaskan pada bulan Juli 1947.

Pemimpin lainnya di Brebes mengalami nasib serupa. Ramlas, sekretaris Badan Pekerja Brebes dan pemimpin PKN diambil dan ditahan di Gedung Societeit Tegal.

> Ada TKR datang pakaian hijau namanya Mudasir, panggilnya, "Ramlas di mana?" Saya keluar dari pintu, diberi pukulan dari bedil. Kurang lebih satu regu yang memukul saya pakai sepatu dan pegangan bedil. Setelah mereka pergi, saya dibawa ke kamar dan dipukuli lagi, sehingga saya pingsan di kamar mandi. Pertanyaan – "Mengaku, tidak?" – intel dari Pekalongan. Saya tidak kenal namanya. Saya tidak menjawab "ya" atau "tidak", dipukul lagi, pingsan lagi. Jadi pingsan dua kali. Barang kotoran keluar. "Bunuh saya, saya siap dibunuh." "Tidak" dia jawab lantas orangnya pergi. Saya ke kamar mandi lagi masuk sel. Mas Sugeng (Hargono) lihat saya, "Kasihan mas Ramlas." Kromo Lawi bilang, "seperti tentara penjajahan."[40]

Penahanan Kromo Lawi di Tegal oleh TKR melambangkan simpang siurnya politik lokal selama Peristiwa Tiga Daerah. Kromo Lawi sebagai seorang pengikut Sukarno yang paling terkemuka di keresidenan itu menjadi pemimpin Putera dan Jawa Hokakai semasa pendudukan. Ia dituduh sebagai agen Jepang sewaktu terjadi *clash* dengan kenpeitai Pekalongan pada awal Oktober, dan pernah ditahan oleh pemuda pendukung Residen Besar, walaupun ia seorang anggota KNI Pekalongan. Ketika Mr. Besar diganti, Kromo Lawi dibebaskan oleh Pejabat Residen Suprapto atas anjuran Sayuti Melik. Ketika sedang mengunjungi Pemalang, ia ditangkap dan dibawa ke Slawi, di mana para pemimpin AMRI Slawi berusaha menariknya ke pihak Tiga Daerah sebagai tokoh PNI. Kromo Lawi kemudian berpendapat bahwa pimpinan Tiga Daerah yang ingin membentuk pemerintahan baru pada tahun 1945 tidaklah segaris dengan ideologi nasional. Lebih jauh ia katakan bahwa bukannya ia tidak menaruh simpati kepada tujuan Tiga Daerah, tetapi orang Tiga Daerah tidak melihat bahwa politik revolusi nasional itu lebih penting daripada revolusi sosial.[41]

---

[40]Ramlas, Wawancara, 16.12.74.

[41]Analisa Kromo Lawi ini agaknya merupakan analisa *expost facto* yang men-

Ketika TKR membebaskan Iskandar Idris, Kromo Lawi tetap di penjara, karena TKR percaya bahwa ia telah bergabung dengan Tiga Daerah dan penahanannya hanya merupakan pengelabuhan saja. Namun akibatnya, ia meringkuk di penjara Pekalongan dan Yogyakarta selama 13 bulan, tanpa pengadilan atau pemeriksaan atas tuduhan itu.

K.H. Iskandar Idris diangkat Jepang menjadi komandan Daidan Pekalongan karena pengaruhnya sebagai guru Muhammadiyah. Karena umur dan kekurangan pengetahuan tentang masalah-masalah militer membuat ia lebih tidak serasi lagi dengan pemimpin priayi muda TKR didikan Belanda anggota staf umum Resimen XVII. K.H. Iskandar Idris diangkat sebagai komandan resimen karena dianggap sebagai bapak dan kepatuhan mereka pada komandan batalyon Peta saja. Mereka kurang senang terhadap sikap Idris yang membiarkan Jepang melucuti batalyon Peta dan keragu-raguannya dalam melawan kenpeitai. Mereka juga tidak setuju pada keinginannya agar hari Jumat menjadi hari libur dan hari Minggu menjadi hari kerja. Pendeknya Iskandar Idris bukan seorang tentara tulen, ia menjadi komandan daidan Peta karena ia adalah seorang yang terkenal dari Muhammadiyah. Ia tidak paham organisasi militer dan sering mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi.[42] Setelah Peristiwa Tiga Daerah selesai, Iskandar Idris diganti jabatannya dari komandan Resimen XVII TKR menjadi komandan Brigade VII di Pekalongan, suatu jabatan kehormatan. Wadyono-lah yang secara resmi dilantik di Markas Besar Yogyakarta sebagai komandan resimen.

Strategi TKR terhadap kaum Islam di Tiga Daerah makin nyata. Bupati Tegal dan Brebes, yang berasal dari kalangan santri, tetap menduduki jabatan mereka. Bupati Pemalang, Supangat yang berhaluan kiri, melarikan diri ke Banyumas dan diganti oleh K.H. Maksum,

---

cerminkan kejadian-kejadian Revolusi sejak 1945. Ini mencerminkan argumentasi yang dibikin oleh nasionalis seperti Sukarno atau Sayuti Melik. Sukarno sendiri menciptakan banyak argumentasi bagi revolusi nasional dan bukannya revolusi sosial, setelah Peristiwa Madiun 1948, sekalipun dalam tahun 1945 ia berbicara memadukan kedua-duanya. Transkripsi VII/3-6, 7.7.73. Beberapa sumber mengatakan Kromo Lawi menginginkan jabatan residen Pekalongan pada tahun 1945.

[42]Wadyono, Wawancara, 27.8.71.

seorang Islam nasionalis Pemalang dalam rapat umum di alun-alun kota pada tanggal 30 Desember 1945.[43] Selama orang Islam mendukung TKR, maka ia tetap dibiarkan tetap berkuasa. Karena memang hanya sedikit orang-orang Islam-komunis dan tidak ada yang menjadi pejabat, maka semua camat santri dibiarkan tetap berkuasa. Tetapi ada beberapa santri nasionalis dari Randudongkal (Pemalang Selatan) di antara 1.600 tahanan di penjara Pekalongan pada akhir minggu ketiga bulan Desember 1945.[44]

Faktor kebudayaan, kesetiaan pada elite birokrat Tiga Daerah dan garis politik waktu itu tidak akan membuat TKR mengambil tindakan terhadap Sarjio seandainya residen itu tidak mengganggu tugas pokok ke front Semarang. Wadyono beranggapan bahwa kaum revolusioner itu cerdik dan pandai berbicara sehingga dalam setiap diskusi TKR tentu akan dikalahkan, terutama para perwira mudanya. Sehingga Wadyono memerintahkan agar para prajurit mudanya tidak berdiskusi dengan pemimpin pergerakan yang tua. Keadaan ini mirip dengan keadaan sewaktu para perwira muda menolak untuk menahan Residen Besar. Di samping perbedaan ideologis, para pemuda terikat kepada kebudayaan yang harus menghormati orang yang lebih tua. Menurut Wadyono, ketika TKR bersama-sama kekuatan Islam memasuki Tiga Daerah mereka disambut dengan bahasa Jawa halus. Wadyono merenungkan bahwa gerakan kontra yang dipimpinnya itu sebagai sebuah lakon dalam wayang. Ia menganggap dirinya sebagai dalang, apabila pertunjukan berakhir, ia harus memasukkan semua wayang ke dalam kotak, dan peranannya berakhir.[45][]

---

[43]Catatan Harian Salim Bassiyul, seorang pedagang Arab di Pemalang.
[44]*Lasjkar*, 2-3 Januari 1947.
[45]Wadyono, Wawancara, 10.3.73; 26 dan 27.8.71.

BAB SEBELAS

PENGADILAN PERISTIWA TIGA DAERAH

SALAH satu alasan mengapa misi Presiden sewaktu datang ke Pekalongan tidak mengambil tindakan apa-apa setelah adanya campur tangan TKR, tidak lain karena sikap politik Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Sukarno. Kelompok PKI-nya Widarta yang merasa dikhianati oleh kawan-kawannya sendiri, terpaksa mencari dukungan ke tempat lain. Perlawanan melalui medan hukum pertama terjadi di Pengadilan Pekalongan kemudian di Yogyakarta. Selain itu perdebatan pro dan kontra Peristiwa Tiga Daerah mendapatkan sorotan yang luas.

Sikap Pemerintah Pusat

Selama berlangsungnya berbagai kejadian baik yang pro maupun yang kontra dalam Peristiwa Tiga Daerah, perhatian Pemerintah Pusat ternyata terpusat pada pertentangan antara Republik dan Sekutu. Selama empat hari kekuasaan Residen Sarjio dan GBP3D (10-14 Desember 1945) di Pekalongan, perhatian media massa nasional dan para pemimpin Republik hanya ditumpahkan pada pertempuran sengit di Ambarawa, yang berakhir dengan kemenangan Republik, dan pembakaran Kota Bekasi oleh Sekutu, di sebelah timur Jakarta. Di antara surat-surat kabar Republik, hanya harian *Kedaoelatan Rakjat* di Yogyakarta-lah yang memberitakan pengangkatan Sarjio dengan pemerintah barunya di Pekalongan. Berita itu dimuat pada tanggal 15 Desember, sehari setelah TKR menahan residen baru dan stafnya. Karena sulitnya komunikasi antara pusat dan daerah ditambah pula dengan kenyataan bahwa surat-surat kabar di kota-kota besar hanya

mengirim wartawan ke pertempuran-pertempuran melawan pasukan Sekutu, Peristiwa Tiga Daerah menjadi disisihkan dalam berita nasional. Surabaya menjadi fokus nasional dalam mempertahankan hidup Republik muda ini. Komunikasi antara Tiga Daerah dan ibukota keresidenan, hampir-hampir tak ada.

Pada 18 Desember dibentuklah Partai Sosialis di Kota Cirebon, penggabungan antara Partai Rakyat Sosialis (Paras), partainya Syahrir, dengan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) yang dipimpin Amir Syarifuddin, yang dihadiri Perdana Menteri Syahrir dan beberapa anggota kabinetnya.[1] Para menteri inilah yang dengan jeli dapat melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di Keresidenan Pekalongan dengan datangnya utusan Brebes yang duduk dalam Komite Urusan Ekonomi GBP3D secara tiba-tiba. Pemimpin Brebes itu pergi ke Cirebon untuk menemui sahabatnya Sugra, seorang tokoh PNI-baru, setelah mendengar bahwa Residen Sarjio ditangkap TKR.

Setibanya di Stasiun Cirebon pemimpin Brebes tersebut ditahan, tetapi masih sempat mengirim pesan untuk dr. Sudarsono, Menteri Sosial RI dari Partai Sosialis, yang dikenalnya dengan baik dalam Koperasi Rakyat Indonesia.[2] Dialah yang kemudian membebaskannya. Pemerintah Syahrir akhirnya mengirimkan utusan untuk menjadi penengah antara Tiga Daerah dengan penantangnya. Utusan Jakarta itu terdiri dari dr. Sudarsono dan Subadio Sastrosatomo yang datang mengunjungi Pekalongan. Kedatangan utusan itu memberi kesan pada para pemimpin Pekalongan dan pangreh praja, bahwa Tiga Daerah merupakan suatu gerakan rakyat yang didukung oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan utusan lainnya, yaitu Johan Syahruzah, kemenakan Syahrir, yang mempunyai kontak dengan gerakan bawah tanah PKI semasa pendudukan Jepang di Surabaya,[3] dan Murad, Menteri Muda Keamanan yang ditugaskan untuk mengunjungi Pemalang. Mereka inilah yang menjelaskan sikap Pemerintah Pusat kepada para pemimpin Tiga Daerah, bahwa Syahrir bukan pendukung

---

[1]Mengenai keterangan lengkap susunan Partai Sosialis, periksa Anderson, *Pemuda Revolution*, hlm. 303-306.

[2]Dr. Sudarsono pernah aktif dalam Koperasi Rakyat Indonesia di Cirebon, Kahin, *Nationalism*, hlm. 112.

[3]Kahin, *Nationalism*, hlm. 113.

feodalisme, tetapi tidak pula dapat menerima revolusi sosial yang tidak mematuhi hukum.[4]

Perutusan ini gagal karena kedatangannya di Pemalang dan Pekalongan sudah sangat terlambat. TKR telah melancarkan operasi kontra, sehingga Bupati Pemalang Supangat telah diganti. Seandainya mereka tiba di Pekalongan satu minggu lebih awal, pengangkatan Residen Sarjio akan mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dan akan sulit digoyahkan. Perasaan saling curiga menyelimuti Pekalongan, sehingga Menteri Sosial dr. Sudarsono pun diculik karena sewaktu di sana tidak dapat menunjukkan identitas dirinya kepada para pemimpin Pesindo. Akibatnya dia disangka agen NICA. Baru setelah ada telepon dari Kantor Kabupaten, dr. Sudarsono dibebaskan. Dia sangat marah dan mengatakan perjuangan revolusioner macam apa di Pekalongan itu.[5]

Pada tanggal 23 November, Presiden, Wakil Presiden, dan Perdana Menteri, tiba di Pekalongan dalam rangkaian kunjungan ke kota-kota besar di Jawa.[6] Dalam rombongan ini termasuk bekas Bupati Pemalang Supangat, memimpin PKI bawah tanah Widarta, dan bekas sekretaris Residen Sarjio, Muroso, yang juga menjadi anggota PKI bawah tanah. Ketiga orang ini berhasil menghindari penangkapan TKR, dan pergi ke Madiun meminta bantuan Pesindo untuk membebaskan Residen Sarjio. Mereka ikut di dalam kereta api rombongan pusat pada tanggal 21 Desember dalam perjalanan kembali dari Malang.[7]

Di Pekalongan, Syahrir memanggil Pejabat Komandan TKR, Wadyono, dan meminta pertanggungjawaban tindakan TKR di Tiga Daerah.[8] Di depan rapat umum Syahrir mengatakan, bahwa walaupun dia banyak mengalami kesulitan menghadapi dunia Internasional, ia menganggap masih lebih sulit menghadapi masalah di Pekalong-

---

[4]Subadio Sastrosatomo, Wawancara, 7.8.72. Subadio adalah anggota Badan Pekerja KNIP, dan salah satu pendiri Partai Sosialis dengan Sutan Syahrir.

[5]S. Junaid, pemimpin Pesindo, Wawancara, 31.5.73.

[6]Lihat laporan wartawan perang ABC, Thompson, yang ikut rombongan Presiden waktu itu dalam *Hubbub in Java*, hlm. 71-91.

[7]Anggota PKI bawah tanah, Wawancara, 4.7.78.

[8]Subadio Sastrosatomo, Wawancara, 7.8.72.

an.[9] Perjuangan kemerdekaan di Pekalongan oleh Syahrir diibaratkan sebagai dua macam bangunan, ada yang berhasil lulus dan ada yang tidak dalam uji kualitas. Presiden Sukarno dalam rapat umum itu mencoba mengendorkan ketegangan dengan selorohnya dan menjuluki Syahrir sebagai 'kecil-kecil cabe rawit.' Di dalam pidatonya, Syahrir banyak berkias, sehingga sukar dimengerti dan nada suaranya membikin orang ngantuk. Sangat berbeda dengan pidato Sukarno yang lebih mudah dimengerti dan bersemangat.[10]

Selama rapat umum itu Supangat bekas Bupati Pemalang duduk di antara para hadirin, yang segera dikenali oleh perwira TKR dan anggota Pesindo Pekalongan. Bersama-sama dengan Widarta dan Muroso, Supangat diseret di depan rombongan Presiden ke luar ruangan, sehingga menimbulkan kegaduhan. Mereka segera dipenjarakan bersama-sama dengan para tokoh Tiga Daerah lainnya yang ditangkap TKR dalam operasi pengambilalihan kekuasaan. Kenyataan ini merupakan tantangan bagi kepemimpinan Pusat yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pemimpin Pesindo yang terlibat kemudian dipanggil oleh Sukarno dan dimarahi.[11] Walaupun demikian ternyata baik Presiden maupun Perdana Menteri tidak berusaha membebaskan para pemimpin Tiga Daerah yang berada di penjara Pekalongan. Kegagalan Pemimpin Republik dalam mencampuri masalah ini, mencerminkan sikap kepemimpinan tingkat nasional pada waktu itu, seperti juga Amir Syarifuddin, yang berhasil menghindari kunjungannya ke Pekalongan dan langsung pulang ke Jakarta.

Ketidaktegasan Syahrir dikarenakan oleh dua hal. Hal pertama adalah pandangan internasionalnya yang moderat yang tidak searah dengan keadaan dalam negeri yang reformis. Sikap GBP3D terhadap pangreh praja itu sebetulnya sesuai dengan ide-ide yang dikemukakan oleh Syahrir sebulan sebelumnya dalam risalah *Perdjoeangan Kita*. Di dalam risalah ini dijelaskan, bahwa Syahrir ikut mendorong berkem-

[9]Wadyono, Wawancara, 10.10.72.

[10]Sujono, Transkripsi, VIII/10, 30.7.73. Kesukaran memahami pidato Syahrir digambarkan Thompson dalam *Hubbub in Java*, hlm. 91. Mereka yang berpendidikan Belanda (seperti Sujono, sekretaris Residen Pekalongan) saja sulit memahaminya apalagi rakyat awam.

[11]H. Junaid, Wawancara, 31.5.73.

bangnya revolusi demokratis di Indonesia yang dipimpin oleh kaum demokrat revolusioner, tetapi bukan kepada kelompok nasionalis yang telah merendahkan diri kepada kaum penindas, baik itu kolonial Belanda maupun militeris fasis Jepang.[12] Tetapi kenyataannya kaum demokrat revolusioner yang memimpin revolusi di Tiga Daerah meringkuk di penjara Pekalongan. Mereka itu telah dimasukkan penjara oleh kelompok yang, menurut analisa Syahrir, paling dipengaruhi oleh fasisme golongan tentara.[13] Di dalam *Perjuangan Kita*, Syahrir menyerang aparat kolonial yang masih tersisa, pangreh praja dan polisi. Ditulisnya bahwa pangreh praja itu sebenarnya merupakan sebuah alat yang dibentuk oleh kolonialisme Belanda dari kaum feodal dalam masyarakat.[14] Pandangannya ini sesuai benar dengan pandangan K. Mijaya dan Sarjio. Bagi Syahrir perubahan sosial dalam negeri selalu menyala dalam ingatannya. Walaupun selalu tertumbuk oleh kebutuhan untuk menarik simpati negara-negara Barat pada perjuangan Indonesia, Syahrir ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia dapat menegakkan hukum di Indonesia. Walaupun untuk ini diperlukan tangan yang kuat untuk menyelesaikan kekacauan di dalam negeri.[15]

Konflik sikap politiknya ini hanya sebagian dari alasan-alasan mengapa Syahrir lari dari tanggung jawab tatanan politik di Pekalongan. Hal kedua adalah kelemahan yang tampak, yaitu dalam cara menangani masalah dengan kekuatan asing dan masalah di dalam negeri, rupanya hal ini disebabkan oleh belum banyaknya pengalaman dalam kepemimpinan politiknya.[16] Tidaklah berlebih-lebihan apabila dikatakan ia memang kekurangan otot politik.

Tampaknya Sukarno sendiri tidak mau memberi komentar atas kerusuhan politik yang terjadi dua minggu sebelumnya dalam pidatonya di Keresidenan Pekalongan. Sewaktu ia singgah di Tegal, disebutnya dalam pidato bahwa Tiga Daerah adalah "Negeri Talang." Barang-

---

[12]Sutan Syahrir, *our Struggle*, diterjemahkan dengan pendahuluan oleh B.R.O'G. Anderson, (Cornell University Project Translation Series, 1968), hlm. 28.

[13]*Ibid*, 37.

[14]*Ibid*, hlm. 26.

[15]Subadio Sastrosatomo, Wawancara, 7.8.72.

[16]Syahrir ahli strategi di belakang layar, sejak dalam Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan kemudian dalam PNI-baru. Pada masa Proklamasi ia pun

kali Sukarno dan pemimpin lainnya menganggap Gerakan Tiga Daerah sebagai gerakan memisahkan diri dari pemerintah pusat.

Bagaimanapun juga peranan Amir Syarifuddin dianggap berbeda dengan Syahrir dan Sukarno. Dia dianggap sebagai tokoh penting Pemerintah Pusat dalam Peristiwa Tiga Daerah. Sebagai Menteri Pertahanan yang merangkap Menteri Penerangan di Pusat, ia telah gagal membantu kawan-kawannya kelompok PKI bawah tanah di Pekalongan.

Persaingan di dalam PKI waktu itu juga dipengaruhi oleh beberapa bekas anggota Perhimpunan Indonesia, yakni sekelompok kecil orang-orang komunis yang ada di bawah pimpinan Abdul Majid Joyodiningrat, dipulangkan dari Negeri Belanda atas biaya pemerintah Belanda. Dapatlah dimaklumi karena kepatuhannya kepada Partai Komunis Belanda (CPN) atas garis politik Moskow tentang front demokrasi anti fasisme, maka mereka menganggap bahwa Republik Indonesia itu bikinan Jepang. Kaum kiri yang baru kembali dari pengasingannya yang lama di Negeri Belanda ini mengharapkan kesinambungan perjuangan ideologi bersama dan hubungan egalitarian yang hangat seperti yang mereka jalin dengan kawan-kawan mereka di Negeri Belanda dalam perang melawan Nazi.[17] Widarta menolak garis Internasional yang mereka bawa dari Negeri Belanda itu. Walaupun kedua kelompok melakukan perjuangan bersama yang penting dalam melawan fasisme, tetapi di lain hal tidak ada kesamaan antara keduanya. Widarta berpendapat tentang front persatuan antifasisme haruslah dilanjutkan dengan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme setelah berhasil menumbangkan fasisme Jepang. Dia tidak mau berkompromi karena dianggapnya melawan kembalinya kaum kolonialis.[18]

Antara Amir, Syahrir, dan Widarta muncul juga perbedaan pandangan mengenai masalah kekerasan di dalam politik itu sendiri. Amir dan Syahrir berpendapat bahwa seharusnya masalah-masalah harus dipecahkan secara damai. Bukan saja kekerasan dapat menimbulkan reaksi internasional yang kurang menguntungkan kekacauan dalam

---

tidak memainkan peranan aktif terbuka.

[17]Anderson, *Pemuda Revolution*, hlm. 309.

[18]Wawancara, 5.6.78.

negeri. Sebagai kaum elite terpelajar didikan Belanda mereka tidak menyukai kekerasan massa seperti yang terjadi di Tiga Daerah. Sekalipun dalam *Perdjoeangan Kita*, Syahrir terlihat tegas dan berani, namun ia mengecam kekerasan di luar hukum. Dalam menghadapi tindakan TKR Pekalongan, ketegasan maupun keberanian politik tidak tampak.

Karena merasa dikhianati oleh kawan-kawan sendiri, kelompok Widarta kemudian meminta bantuan Pesindo. Dalam kongresnya 10 November di Yogyakarta, Widarta masuk sebagai anggota Dewan Pekerja Perjuangan Pesindo. Ketuanya adalah Sumarsono, pemimpin PRI Surabaya teman Widarta. Dewan ini bertugas mengorganisasi kesatuan laskar rakyat di luar ketentaraan, termasuk di dalamnya tugas mobilisasi, pembekalan dan latihan.[19] Sedangkan Widarta ditugaskan untuk mengepalai bagian penerangan. S. Mustapha yang berasal dari Pemalang bertugas sebagai penghubung Dewan Pekerja tadi. Dewan ini menjadi sebuah kekuatan di luar ketentaraan dan dalam tempo yang pendek mampu menggerakkan pasukan bersenjata lengkap untuk menghadapi TKR Pekalongan guna membebaskan para pemimpin Tiga Daerah.

Setelah Widarta ditangkap pada tanggal 23 Desember dan dipenjarakan bersama Sarjio dan pemimpin-pemimpin Tiga Daerah lainnya, S. Mustapha mendesak Sumarsono agar menyerang TKR Pekalongan.[20] Sumarsono meminta bantuan Komando Pertahanan Surabaya yang membawahi resimen dari empat batalyon pemuda bersenjata di bawah komandan Sidik Arslan. Kereta yang mengangkut bantuan dari Surabaya dihentikan di sebelah timur Semarang atas perintah Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Amir memanggil Sumarsono ke Yogyakarta dan meminta agar masalah Tiga Daerah tidak dipecahkan dengan kekerasan. Masalah Widarta akan diambil alih Kejaksaan Agung,[21] dan Amir menjamin bahwa pemerintah akan memindahkan semua tahanan dari Pekalongan ke Yogyakarta, dan membawa masalahnya sesuai dengan undang-undang untuk menjadi tanggung jawab pemerintah Republik di Yogyakarta.

---

[19]Anderson, *Java*, hlm. 257.
[20]Sumarsono, Wawancara, 5.6.78.
[21]*Ibid.*

Usaha pembebasan kedua dilakukan karena sudah enam bulan Widarta dan kawan-kawannya masih belum dipindahkan ke Yogyakarta. Sejumlah 400 pemuda Pesindo Surabaya dalam perjalanan ke Pekalongan dihentikan di Solo oleh Mayor Jenderal Jokosuyono dan Ngadiman Harjosubroto. Pemimpin pasukan Pesindo dibawa ke Madiun dan diberi tahu bahwa masalah tahanan di Pekalongan tidak dapat diselesaikan secara kekerasan. Untuk meyakinkan mereka, pemerintah membentuk sebuah Panitia Pemberesan Penahanan Politik atau P4.[22] Anggotanya diperbolehkan mengunjungi para tahanan di Pekalongan dan menjadi saksi dalam pendahuluan proses hukum. Panitia ini diketuai oleh Tan Ling Jie (Sekjen Partai Sosialis) dengan wakil ketua, Sudoyo dan Supeno, yang teman-temannya berada dalam penjara. Supeno berperanan penting sebagai juru bicara dalam perdebatan politik dan masalah-masalah hukum yang berlangsung. Akhirnya sidang pengadilan Peristiwa Tiga Daerah dimulai di Pekalongan.

Perjuangan Hukum dan Politik

Pada 16 April 1946, residen Pekalongan yang keempat dalam waktu empat bulan diangkat oleh pemerintah Republik dan Wali al-Fatah memulai tugas jabatannya. Sebelumnya Sumitro Kolopaking, bekas Bupati Banjarnegara, yang berasal dari keluarga priayi terkemuka telah memangku jabatan itu selama tiga bulan saja.[23] Sumitro Kolopaking berusaha menggantikan para bupati santri dengan mengangkat orang-orang pangreh praja lama lulusan Mosvia. Baik Kolopaking maupun Wali al-Fatah adalah tokoh-tokoh nasional yang mencerminkan bahwa pemerintah menganggap penting jabatan residen Peka-

[22] *Boeroeh*, 2 Oktober 1946, dan *Penghela Rakjat*, 11 Oktober 1946 menyebut P4. Muhammad Nuh dalam "Peristiwa Tiga Daerah", *Penelitian Sedjarah*, Maret 1962 (No. 1 Th. Ke-III) hlm. 29, menyebutkan adanya sebuah Panitia pembelaan Perkara Politik Pekalongan. P4 barangkali ingin ditunjukkan menyelidiki penahanan politik Peristiwa 3 Juli 1946 juga.

[23] Sebelumnya R.M. Suprapto, bekas jabatan residen, telah diminta kembali menjabat di Pekalongan oleh Pesindo sayap kanan di sana, dan memulai tugasnya kembali pada 17 Desember. (Pertanyaan 6, Proces Verbaal, Proc. Gen.). Pada 23 Januari 1946 diselenggarakan sebuah rapat umum di Pekalongan menyambut Sumitro Kolopaking, maupun para pejabat dari Kementrian Dalam Negeri dan Kantor Gubernur. Residen Banyumas Mr. Iskaq juga hadir. *Antara*, 25 Januari 1946.

longan.[24] Perlu dicatat bahwa atas permintaan Pesindo Pekalongan, R.M. Suprapto kembali bertugas lagi sebagai pejabat residen pada tanggal 17 Desember 1945. Kejaksaan Pekalongan mulai membebaskan para tahanan pada bulan Januari 1946 dan pada tanggal 30 April 1946 Jaksa membantah desas-desus bahwa para pemimpin Tiga Daerah adalah agen NICA. Ia mengumumkan bahwa tuduhan atas mereka adalah karena melakukan tindak pidana dengan merebut kekuasaan secara kekerasan, menyita uang milik negara, membakar gudang dan rumah kediaman serta berbuat "asal membunuh."[25]

Di dalam Kejaksaan sendiri timbul perbedaan pendapat tentang bagaimana para tahanan itu seharusnya diperlakukan, siapa yang harus dibebaskan dan siapa yang harus diajukan ke depan pengadilan. Jaksa Karioatmojo memutuskan bahwa setiap tahanan harus memberi pengakuan tertulis tentang apa yang diketahuinya mengenai Gerakan Tiga Daerah, dan mereka harus diperiksa secara silang oleh Tim Pemeriksa. Cara ini memakan waktu lama, sedangkan pemeriksa kebanyakan bekas pangreh praja yang telah digulingkan oleh Gerakan Tiga Daerah. Rupanya praktik kolonial, yang meluaskan pangreh praja berfungsi sebagai pembantu jaksa tetap berjalan, sehingga wajarlah jika para tahanan meragukan adanya pengadilan yang jujur.[26]

Bagaimana cara-cara pemeriksaan itu harus dilakukan, membuat Jaksa Muda Murtolo berselisih dengan atasannya, Jaksa Kepala Karioatmojo. Pada tahun 1973 Murtolo mengatakan bahwa:

> Itu [Kartoatmojo] golongan lama, jadi tidak bisa mengerti, arah pemeriksaan juga tidak mengerti. Justru waktu saya mengajukan konsepsi "sebaiknya orang ini, pengikut ini, lepas saja, dibebaskan, orang yang bertanggung jawab ini, ini, ini, ini", saya sodorkan. Beliau menganggap saya membela. Suatu waktu sampai saya ini diasingkan, dikeluarkan... Kepala Kejaksaan Pekalongan maunya suruh nahan,

---

[24]Wali al-Fatah adalah pemimpin Islam Nasional radikal paling menonjol, sebagai Wakil Ketua Masyumi dan pemimpin terkemuka Persatuan Perjuangan, Anderson, *Java*, hlm. 445.

[25]*Penghela Rakjat*, 9 Mei 1946.

[26]Wakil Ketua KNI Tegal, Wawancara, 8.10.76 dan 30.11.75. Para pemeriksa termasuk bekas Camat Moga dan Jatinegara. Bekas Camat Jatinegara ini menyimpan dendam lama kepada anggota KNI Tegal yang ikut GBP3D, dan penahanannya diperpanjang. Juga ada penyiksaan terhadap seorang santri Talang pengikut Kutil.

> jadi menurut hukum saja, tidak mau bersikap bijaksana, harus dilihat dari sudut pengertian terhadap pergerakan nasional... ini kurang mengerti oleh karena dia orang lama, orang lama pikirannya itu biasa dulu diperintah. Dulu, jaksa dulu itu, zaman Belanda maupun zaman Jepang itu hanya bawahan daripada penuntut umum.[27]

Jaksa Karioatmojo menilai pandangan Murtolo ini sebagai pembelaan terhadap para tahanan, sehingga Murtolo tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan. Perselisihan ini kemudian dilaporkan ke Jaksa Agung. Karioatmojo hanya bertindak menurut hukum yang berlaku dan tidak dapat melihat masalah ini dari segi gerakan nasional. Pandangannya merupakan warisan sistem kolonial Belanda yang menempatkan para jaksa menjadi bawahan asisten residen.

Pada akhir bulan September 1946, Kejaksaan Agung mengambil alih tanggung jawab dengan membiarkan 32 orang saja yang masih ditahan. Hal ini berlawanan dengan kehendak Kejaksaan Pekalongan. Para tahanan dipindahkan ke Penjara Wirogunan, Yogyakarta, dan kemudian pemeriksaan dimulai lagi.[28] Hasilnya, pemimpin AMRI Slawi, Sakirman, dan bekas Bupati Pemalang, Supangat, menjadi tertuduh dan dikirim kembali ke Pekalongan pada tanggal 23 Oktober 1946 untuk diadili. Pada tanggal 11 November, Sakirman dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Ia segera naik banding, dan persidangan terhenti lagi.[29] Karena berbagai desakan baru, pemerintah mempercepat proses pemeriksaan di Yogyakarta, dan 21 dari 32 orang tahanan dibebaskan pada tanggal 30 Desember,[30] sedangkan sisa tahanan 11 orang dipindahkan ke Penjara Benteng di pusat Kota Yogyakarta. Setelah 3 bulan berlalu, Kejaksaan Agung memutuskan bahwa tidak ada lagi pemeriksaan yang harus ditanganinya, kecuali mengirim kembali 6 orang pemimpin Tiga Daerah ke Pekalongan sebagai tertuduh.[31]

---

[27]Murtolo, Transkripsi, I/6. 23.3.73.

[28]Mengenai daftar lengkap tahanan yang dipindahkan ke Yogyakarta, lihat Surat dari Kejaksaan Agung (Mr. Tirtawinata) kepada Jaksa/Penuntut Umum Pekalongan. 17 Desember 1945, No. 218KA. Proc. Gen.

[29]Surat Penetapan Jaksa Agung. 26 Maret 1947.

[30]Mengenai mereka yang dibebaskan lihat *Penghela Rakjat*, 31 Desember 1946; *Laskar*, 3 Januari 1947.

[31]Mereka yang diajukan ke depan pengadilan Pekalongan adalah K. Mijaya, Suwignyo, Kartohargo, Amir, Tan Jiem Kwan dan Muhammad Nuh. *Boeroeh*, 16

Sarjio dibebaskan tanggal 26 Maret 1947.[32] Pada tanggal 4 April susunan tim pembela kasus gerakan revolusioner diumumkan. Mereka terdiri dari tiga ahli hukum anggota Partai Sosialis, Mr. Tandiono Manu, Mr. Usman Sastroamijoyo, dan Supeno.[33] Supeno dan Manu tiba di Pekalongan pada 11 April.

Sidang pengadilan dibuka pada tanggal 24 April 1946. Peristiwa persidangan ini menarik perhatian masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional. R. Suprapto, ketua Pengadilan Negeri yang bertindak sebagai hakim, adalah bekas anggota KNI Pekalongan, seorang ahli hukum yang berpengalaman, yang menjadi Jaksa Agung RI selama sepuluh tahun sejak tahun 1950.[34] Ia memimpin persidangan atas Kutil, Sukirman, dan Rustamadji, dan menjatuhkan hukuman mati pada Kutil, sehingga dianggap oleh kalangan militer berada di pihaknya.[35] Tetapi ahli hukum Mr. Adicondro yang mempersiapkan perkara bagi tim pembela, menganggap Suprapto sebagai orang yang tidak

---

April 1947. Mereka terkena tuduhan melanggar pasal 197 KUHP "berusaha menggantikan susunan pemerintahan dengan kekerasan (makar)." Ancaman hukuman maksimum seumur hidup. Yap Sin Fong, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 1945, hlm. 50.

[32] *Boeroeh*, 27 Maret 1947. Supangat dan Widarta masih ditempatkan dalam penahanan sementara. Surat Jaksa Agung kepada Presiden 31 Maret 1947, Proc. Gen.

[33] *Penghela Rakjat*, 17 April 1947. Tandiono Manu dilahirkan di Jember 2 Juli 1913, putra seorang pejabat pengairan. Setamatnya dari Mulo dan AMS, ia memasuki Fakultas Hukum Jakarta tahun 1936. Aktif dalam Jong Java dan Indonesia Muda sebelum perang. Semasa revolusi anggota KNI Yogyakarta dan pernah menjadi ketuanya selama setahun. Ia juga pernah menjadi Pimpinan Pusat Barisan Tani Indonesia (BTI) sampai tahun 1947 ketika ia diangkat menjadi residen Bojonegoro. Pada tahun 1950 menjadi Menteri Pertanian dalam Kabinet Natsir. Tahun 1952 menjadi anggota Pimpinan Pusat Partai Sosialis Indonesia (PSI). Mr. Usman Sastroamijoyo lahir dekat Magelang 11 Mei 1910, sarjana hukum lulusan Leiden, Perwakilan Indonesia yang pertama di Australia dari 1946 sampai 1950. Kemudian Duta Besar RI untuk Kanada dan Brazilia.

[34] R. Suprapto (jangan disamakan dengan R.M. Suprapto, bekas Pejabat Residen Pekalongan) lahir di Trenggalek Jatim 27 Maret 1897. Setamatnya dari Fakultas Hukum Jakarta 1917 lalu bekerja di pengadilan-pengadilan di Jatim, dan juga di Raad van Justitie di Semarang. Sebelum perang, pernah menjadi Kepala Pengadilan Pati, Banyuwangi, Singaraja, Denpasar, Negara dan Mataram, dan Kepala Luar Biasa Pengadilan di Cirebon, Kuningan, Salatiga, dan Boyolali. Semasa revolusi, menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Militer di Cirebon dan Yogyakarta dan Jaksa Kepala Pengadilan Tinggi sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung RI pada 1950.

[35] Wadyono, Wawancara, 10.10.71.

tertarik pada ideologi,memegang teguh peraturan, patuh kepada atasan, dan 100 persen pegawai yang baik.[36] Dia melihat Tiga Daerah sebagai suatu pemberontakan melawan pemerintah yang sah.

Pada sidang pertama, tim pembela memberi alasan bahwa kasus ini merupakan pengadilan politik, bukan mencari bukti tindak kriminal. Hakim dan jaksa tidak mampu menjawab permasalahan ini, akibatnya pada hari kedua, Supeno berhasil mengajukan pertanyaan kepada tertuduh K. Mijaya tentang apa yang dilakukan semasa pendudukan Belanda dan Jepang. Pengalaman perjuangan K. Mijaya membangkitkan simpati para hadirin "bahwa dia seorang pejuang yang gigih sepanjang masa."[37]

Di luar Gedung Pengadilan kelompok Muslim militan menunjukkan sikap tidak senang, sehingga Residen Wali al-Fatah meminta Hakim dan Jaksa agar menunda persidangan. Hakim mempercepat proses persidangan, dan pada tanggal 25 dan 26 April melakukan pemeriksaan silang terhadap lima tertuduh, termasuk Kartohargo. Persidangan ditunda 2 hari karena adanya bukti-bukti baru dalam persidangan dengan bertambahnya 13 orang saksi.[38]

Saksi pertama pada persidangan 28 April adalah Pejabat.Komandan TKR Wadyono. Ia menjelaskan bahwa penangkapan atas diri Residen dan para pemimpin Tiga Daerah adalah atas prakarsanya sendiri. Karena itu tim pembela mengajukan tuntutan agar semua tertuduh dibebaskan. Setelah mempertimbangkannya, hakim menolak permintaan itu tanpa memberi alasan.[39]

Pada tanggal 5 Mei, setelah keterangan saksi-saksi diberikan, persidangan ditunda selama beberapa minggu. Hakim Suprapto mula-mula menyetujui agar semua tertuduh ditahan di luar penjara, kecuali K. Mijaya dan Tan Jiem Kwan. Pada tanggal 17 Mei pembela Tandiono Manu diberi tahu bahwa seluruh kasus itu kini berada di luar wewenang Kantor Kehakiman Pekalongan, keputusannya akan diberikan pada tanggal 6 Juni. Karena diragukan kapan pengadilan

---

[36]Sarli, Wawancara, 28.8.76.

[37]Wakil ketua KNI kota Tegal, Jawaban tertulis No.15.

[38]*Boeroeh*, 5 Mei 1947, memberitakan secara lengkap proses peradilan Tiga Daerah.

[39]*Antara*, 5 Mei 1947.

ini akan selesai, pembela Supeno menghadap Presiden Sukarno, tetapi "Presiden tidak dapat memberikan suatu keputusan."[40] Pada tanggal 15 Juli 1947 pemeriksaan pendahuluan berakhir, Supeno menyampaikan pembelaannya pada tanggal 18 Juli. Pada tanggal 21 Juli, lima dari enam orang tertuduh dibebaskan,[41] yang disusul dengan amnesti dari Presiden Sukarno.[42] Dengan adanya serangan militer Belanda terhadap Republik (Aksi Militer Belanda Pertama, 21 Juli 1947), maka vonis terhadap terdakwa K. Mijaya yang seharusnya dijatuhkan pada tanggal 1 September 1947 tidak pernah terjadi.

Masalah-masalah Politik

Masalah penahanan Residen Pekalongan dan para pemimpin perjuangan Tiga Daerah oleh TKR menimbulkan perdebatan tentang legalitas tindakan revolusioner itu. Hal ini penting bagi keseluruhan revolusi Indonesia. Beberapa pemimpin Pemerintah Pusat terlibat langsung di dalamnya, tidak seperti revolusi sosial yang lain. Jalan pikiran para pelaku utama yang mendukung dan menentang Gerakan Tiga Daerah mengandung alasan-alasan yang terlihat jelas.

Jaksa Pekalongan, Karioatmojo, mempunyai pandangan hukum yang konservatif seperti halnya pangreh praja pada umumnya, seperti juga tulisan wartawan Rosihan Anwar dalam harian *Merdeka* pada akhir Desember 1945. Katanya, TKR telah membersihkan kekacauan-kekacauan di daerah Pekalongan.[43] Dalam sebuah tulisannya pada bulan Januari 1946, ia mengutuk tindakan-tindakan brutal dan kejam ala fasisme para pemimpin yang mengangkat dirinya sendiri di Tiga Daerah Brebes-Tegal-Pemalang.[44]

Pada mulanya penentang Gerakan Tiga Daerah menuduh bahwa Sarjio dan pemimpin lainnya merupakan bagian dari komplotan

---

[40] *Penghela Rakjat*, 20 Juni 1947.

[41] *Penghela Rakjat*, 23 Juli 1947.

[42] Iwa Kusumasumantri, *Sedjarah Revolusi Indonesia* (Jakarta, 1965), hlm. 68; Riwayat hidup Amir (pemimpin Pemalang) dalam "Daftar Nama-nama Perintis Kemerdekaan."

[43] *Merdeka*, 29 Desember 1945.

[44] Merdeka, 9 Januari 1946. Banyak halaman dalam laporan ini tentang peristiwa Tiga Daerah tidak benar.

Vander Plas (NICA) untuk melakukan subversi terhadap Republik.[45] Akan tetapi, kemudian Jaksa dengan penafsiran hukum yang dangkal, memberi tuduhan bahwa para pemimpin itu telah melanggar Bab sembilan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu penyitaan dana pemerintah, pembunuhan, dan pembakaran yang sengaja dilakukan.[46]

Para pemimpin di tingkat nasional cenderung ke penafsiran hukum yang dangkal itu. Syahrir bersikap diam ketika mengunjungi Pekalongan. Sedangkan Hatta menganggap rakyat Pekalongan terlalu banyak mempunyai kedaulatan dan pangreh praja hanya dapat diganti oleh Pemerintah.[47] Hal inilah yang merupakan dasar landasan bagi tindakan Jaksa dalam perkara Tiga Daerah.

Jaksa Agung RI semasa Peristiwa Tiga Daerah, Mr. Kasman Singodimejo, memberi laporan Pemerintah tentang hukum dan ketertiban di awal revolusi. Di dalam laporan itu ditulis bahwa pada bulan Oktober dan November 1945, pada umumnya pejabat di daerah bersikap pasif, lemah, dan bingung. Pemerintah tidak menjelaskan makna kedaulatan rakyat kepada rakyat. Akibatnya para pejabat tidak mempunyai wibawa dan pemerintah sendiri tidak mampu menghentikan kesewenang-wenangan yang muncul, pembagian harta milik pribadi secara tidak sah, dan penculikan. Semangat murni pemuda dan rakyat yang merupakan motor revolusi, seharusnyalah dibedakan dengan para pembuat keonaran yang egoistis dan antek-antek musuh yang menggunakan kesempatan yang gaduh ini.[48]

Pandangan Amir Syarifuddin mengenai revolusi sosial terlihat paling menonjol artinya bagi Peristiwa Tiga Daerah karena hubungan yang ia jalin dengan gerakan bawah tanah PKI. Walaupun ia tidak pernah memberikan komentar di depan umum tentang Peristiwa Tiga Daerah, tetapi dia adalah tokoh terpenting. Bulan April 1946, di

---

[45]Tuduhan ini nampaknya telah bermula pada sebuah laporan panjang *Antara* 5 Januari 1946, terkutip secara harfiah dalam buku Nasution. *Sekitar Perang*, hlm. 549-92. Laporan *Antara* ini yang terjadi dasar tulisan panjang lebar di *Merdeka*, tanggal 7 dan 10 Januari 1946.

[46]*Penghela Rakjat*, 9 Mei 1945 dan *Antara*, 10 Oktober 1945, memuat daftar tuduhan.

[47]Dikutip oleh Rosihan Anwar dalam *Merdeka*, 29 Desember 1946.

[48]*Antara*, 6 Januari 1947.

Medan, Amir mengatakan bahwa masyarakat egalitarian dengan distribusi yang adil yang ia harapkan. Amir berpendapat bahwa revolusi sosial di Sumatera Utara adalah suatu kesalahan. Radikalisme kiri merupakan tindakan yang kekanak-kanakan, sedang persatuan, disiplin, dan kekuasaan negara menjadi hal penting.[49] Peristiwa Tiga Daerah rupanya telah mempengaruhi pandangan politik Amir Syarifuddin tentang revolusi sosial.

Rupanya pandangan politik pemerintah juga telah dipengaruhi pula oleh Peristiwa 3 Juli, yaitu percobaan kudeta oleh unsur-unsur radikal dan tentara yang tidak puas dengan politik kabinet sosialnya Syahrir yang berkompromi dengan Belanda dan mengalami kegagalan. Kegagalan Kabinet Syahrir ini antara lain disebabkan karena Sukarno tidak mau dukung dan menyingkirkan pemimpin oposisi seperti Tan Malaka, Muhammad Yamin, Sayuti Melik, dan para tahanan politik Peristiwa 3 Juli serta tahanan Peristiwa Tiga Daerah yang bersama-sama dipenjarakan di Wirogunan, Yogyakarta. Walaupun Jaksa Agung menganggap bahwa kedua peristiwa itu secara politik berbeda, namun dari sudut hukum adalah sama. Kedua kelompok revolusioner itu dituduh telah melakukan perubahan susunan kekuasaan dengan kekerasan dengan cara penculikan, intimidasi, dan merampas kemerdekaan orang lain.[50]

Kalangan yang pro Peristiwa Tiga Daerah dalam *Penghela Rakjat*, harian Pesindo Magelang, mengulas tujuan kaum revolusioner Tiga Daerah dengan semangat tinggi. *Penghela Rakjat* juga menyangkal pemberitaan *Antara* tanggal 5 Januari, yang menuduh Sarjio kaki tangan NICA, dengan memuat secara lengkap bukti-bukti perjuangan Sarjio dan K. Mijaya pada zaman pergerakan kemerdekaan sebelum perang.[51] Hasilnya *Antara* meminta maaf dan memuat secara lengkap tulisan *Penghela Rakyat* tersebut.[52] *Penghela Rakjat* terus memuat artikel-artikel tentang penahanan para pemimpin revolusioner yang dianggap tidak adil dengan alasan-alasan atas dasar politik perjuangan

[49]Pidato Amir Syarifuddin dan ulasannya dikutip oleh Reid dalam *National Revolution*, hlm. 75.

[50]Pemimpin KNI Tegal, Jawaban, hlm. 14.

[51]*Penghela Rakjat*, 8 Februari 1946.

[52]*Antara*, 12 Februari 1946.

tahun 1946. Sekretaris P4 ikut memberi pendapat, bahwa tuduhan sebagai agen NICA yang terbukti keliru itu dengan seenaknya diubah sehingga kaum revolusioner itu kini dituduh sebagai penjahat dan perampok. Bagaimanapun juga penurunan pejabat pemerintahan yang korup yang merupakan masalah pokok di Tiga Daerah adalah masalah politik, bukan masalah kriminal. P4 mendesak, apabila pemerintah tidak berpendapat demikian, setidak-tidaknya pemeriksaan dilakukan tidak atas dasar balas dendam dan anggota-anggota badan perjuangan diperbolehkan menghadiri pemeriksaan para tahanan politik.[53]

Dengan adanya pengumuman pemerintah bahwa 32 orang tahanan akan dipindahkan dari Yogyakarta ke Pekalongan, P4 mengupas permasalahan Peristiwa Tiga Daerah lagi dengan penjelasan, yaitu bahwa revolusi sosial yang meminta banyak korban berada dipuncaknya pada bulan Oktober 1945, ketika GBP3D belum lahir. Dan Sarjio baru tiba di Karesidenan Pekalongan pada awal Desember. Bagaimana mungkin ia dan para pemimpin GBP3D dituduh menghasut rakyat melakukan tindakan-tindakan kriminal? Seharusnya pemerintah melihat sebab-sebab ekonomis, sosial, dan psikologis di balik tindakan kekerasan itu. Para pemimpin yang bukan pangreh praja dan meringkuk dalam penjara itulah yang pada waktu kemelut itu tetap menjaga hubungan dengan rakyat.[54]

Supeno sebagai anggota P4 ikut mendorong pemerintah agar segera membebaskan para tahanan atau mengadili mereka. Pada sidang Badan Pekerja KNIP Purworejo 4 Januari, Supeno dengan keras menolak laporan bekas Jaksa Agung Kasman Singodimejo karena anggapannya tidak sesuai dengan kenyataan dan hanya merupakan suatu "propaganda wartawan saja."[55] Para pangreh praja bersikap pasif terhadap Proklamasi dan justru menentangnya dengan tidak dikeluar-

---

[53]Cilik, "Mempertegas Republik Indonesia," serangkaian dari 6 tulisan di *Penghela Rakjat*, 23-28 Desember 1946.

[54]Sekretaris P4 menyebutkan juga terjadinya penyiksaan di dua rumah di Pekelongan tempat para tahanan ditempatkan, dan mengadu bahwa para Jaksa/Penuntut Umum Pekalongan telah membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari para pejabat yang dicopot jabatannya ketika terjadi Peristiwa Tiga Daerah hampir setahun sebelumnya. *Ibid*, 24 September 1946.

[55]*Antara*, 7 Januari 1947.

kannya izin pengibaran bendera Merah-Putih. Menteri Kehakiman tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan siapakah yang memerintahkan penangkapan Sarjio.[56] Apakah sebab-sebab adanya aksi rakyat terhadap pangreh praja telah diselidiki, dan benarkah itu sebagai akibat penindasan pendudukan jepang. Mereka menandaskan bahwa bagi rakyat menyingkirkan Jepang berarti juga harus menyingkirkan antek-anteknya, yaitu pangreh praja. Jelaslah bahwa aksi pendaulatan yang merupakan ciri-ciri awal revolusi itu adalah bagian dari revolusi nasional. Menteri Kehakiman menanggapi dan menyatakan bahwa aksi-aksi rakyat tadi dianggap murni dan dapat dimaafkan. Oleh karena itu pembedaan yang kabur dari pemerintahan antara tindakan revolusioner dan kriminal merupakan dasar yang lemah dalam melaksanakan hukum yang sah.

Masalah yang lebih serius adalah perpecahan yang semakin nyata antara Widarta dan Amir Syarifuddin yang dimulai sejak akhir 1945. Hal ini tidak membantu tujuan kaum revolusioner Tiga Daerah. Sejak bulan Mei 1946 kepemimpinan PKI dipegang oleh Sarjono, seorang komunis eks-Digul yang dibuang ke Australia, dan kembali pada bulan Maret 1946. Pandangan Internasional yang eks-Digulis searah dengan pandangan orang-orang Marxis negeri Belanda. PKI, yang mencurahkan perhatiannya pada politik internasional, mendukung perundingan Republik dengan Belanda, dan membiarkan Widarta dan para pemimpin PKI bawah tanah lainnya tetap berada dalam penjara, agar mereka tidak menentang politik berunding pemerintah tersebut. Tidak hanya pemimpin PKI saja, tetapi kaum kiri lain juga berpengaruh di dalam pemerintah.

Selama Widarta berada di penjara dalam tahun 1945, lahirlah PKI semi ilegal. Kelompok yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, ini merupakan sebuah koalisi antara kelompok Marxis muda yang pecah dengan Widarta, dan kelompok yang meninggalkan PKI bawah tanahnya Widarta selama ia dipenjara. Dalam kelompok semi ilegal

[56] *Ibid.* Pemerintah tidak pernah menyangkal bahwa pengangkatan Sarjio disahkan melalui sebuah telegram dari pemerintah pusat. Siapa yang menandatangani telegram itu, ada berbagai pendapat. Pejabat Komandan TKR percaya telegram itu dari Presiden Sukarno, lain-lain mengatakan Hatta. Sedangkan kelompok Tiga Daerah mengatakan dari Amir Syarifuddin.

ini termasuk Sekjen Partai Sosialis, dan orang-orang bekas CPN (Partai Komunis Belanda) yang tergabung dalam Partai Buruh. Kelompok baru ini tentu saja tidak bersimpati kepada kelompok PKI bawah tanah dari Tiga Daerah, lebih-lebih setelah Widarta dalam pernyataannya menentang Perjanjian Linggarjati pada akhir tahun 1946.

Widarta tidak menyetujui adanya beberapa partai kiri lainnya, (seperti Partai Buruh Indonesia (PBI) dan Partai Sosialis) selain PKI. Dia menganggap tersebarnya orang-orang PKI di beberapa organisasi adalah pemborosan kader, seharusnya mereka hanya berada di satu partai yang sudah dikenal, yaitu PKI. Setelah keluar dari penjara, para bekas pendukung Widarta mendesak agar diselenggarakan suatu pertemuan antarkelompok di dalam PKI, agar garis politik partai lebih jelas. Widarta terperangkap dalam pertemuan itu. Widarta bersama beberapa rekannya yang lain ditangkap dan diadili dengan tuduhan membuat fraksi di dalam partai menghadapi Linggarjati dan memecah front persatuan di Tiga Daerah yang mengakibatkan adanya konflik dengan pihak tentara. Mahkamah partai menjatuhkan hukuman mati kepada Widarta dan dilaksanakan di Pantai Parangtritis Yogyakarta pada akhir 1947.[57]

Apabila PKI mencuci tangan dari tanggungjawabnya terhadap mereka yang telah memimpin perlawanan terhadap fasisme Jepang, maka beberapa anggota Partai Sosialis termasuk di antaranya tim pembela tahanan Tiga Daerah tidaklah demikian. Supeno punya hubungan erat dengan kelompok KNI Tegal, kota kelahirannya. Namun, ia berhati-hati dan menjaga agar tidak ada tuduhan bahwa ia sedang melakukan pembelaan demi alasan politik dan ideologi partai. Ia pernah mengatakan kepada seorang pemimpin Barisan Pelopor Tegal di Kota Pekalongan pada bulan April 1947:

> Saudara, sebenarnya rombongan kami tidak berdiri sebagai pembela perkara-perkara. Lepas daripada soal ideologi— entah mereka (enam orang terdakwa) itu Komunis entah mereka itu Sosialis bukan soal... itu urusan mereka sendiri. Soalnya yang penting bagi kami, saya ingin

[57]Konflik ini dibahas lebih lanjut dalam Anton Lucas (penyunting), *Local Opposition and Underground Resistence to the Japanese in Java*, Monash Papers on South East Asia, No. 13, Centre of Southeast Asia Studies Monash University, Melbourne Australia.

melihat dan ingin menonjolkan ke dunia luar, apakah benar-benar negara kita ini negara hukum, dan apakah penegak hukum yang ada di Daerah Pekalongan benar-benar telah melaksanakan tugas hukum yang berlaku dengan sebaik-baiknya.[58]

Ketika Partai Sosialis pecah pada tahun 1948, Supeno dan dua orang anggota Partai Sosialis lainnya dari tim pembela ternyata memihak Syahrir, bukan Amir Syarifuddin. Bagi kaum radikal di Tiga Daerah dengan kegagalan total rekan-rekan komunisnya untuk mendukungnya dirasakan sebagai suatu tekanan yang dalam.

Kutil

Berakhirnya riwayat Kutil merupakan cermin dari sudut nasional yaitu kurang pentingnya Peristiwa Tiga Daerah, sedang Pemerintah Republik merasa malu dengan peristiwa itu. Juga merupakan pembalasan dendam dari mereka yang menentangnya.

Perdebatan politik dan hukum tentang Peristiwa Tiga Daerah yang berjalan lebih dari setahun lamanya, namun tidak seorang pun menghiraukan Kutil yang dijatuhi hukuman mati pada bulan September 1946. Pers pun demikian juga. Kutil mengalami penyiksaan berat dibandingkan dengan tertuduh lainnya. Di Pengadilan, anaknya yang baru berumur lima belas tahun dan dihukum lima belas tahun penjara oleh Hakim Suprapto, bersumpah bahwa ayahnya tidak pernah melukai siapa saja, apalagi membunuh orang-orang itu di waktu revolusi sosial bulan Oktober 1945 di Tegal. Sebaliknya Kutil sendiri mengakui dirinya terlibat dalam setiap pembunuhan. Walaupun demikian ada anggapan itu dilakukannya demi kawan-kawannya agar mendapat keringanan.[59]

Hukuman mati atas Kutil oleh Hakim Suprapto, yang dijatuhkan dalam sidang pengadilan Pekalongan pada tanggal 21 Oktober 1946[60] belum dapat dilaksanakan karena adanya Aksi Belanda Pertama (Juli 1947). Para narapidana bersama pemerintah keresidenan diungsikan ke pegunungan di selatan Pekalongan. Walaupun Hakim

[58]Marsum Hr, Ceriteraku, hlm. 39; *Merdeka*, 17 April 1947.
[59]Pemimpin KNI Tegal, Jawaban, hlm. 15.
[60]Declarator Pengadilan Negeri Pekalongan No. 1/1950.

Suprapto tidak sempat membawa barang-barang milik pribadinya, tetapi sempat membawa dua kopor berisi transkripsi interogasi pemeriksaan pendahuluan dan proses pengadilannya.[61] Kutil yang banyak akal, melarikan diri ke Jakarta, dan bekerja sebagai tukang cukur, profesi lamanya, di Kebun Kacang Gang II. Pada tahun 1949, ia dikenali orang Slawi, dan kemudian ditahan oleh polisi Belanda (Jakarta di bawah kekuasaan Belanda).[62] Pada penyerahan kedaulatan dalam bulan Januari 1950, Kutil ikut diserahterimakan kepada polisi Republik, dikirim kembali ke Semarang dan kemudian ke Pekalongan, dan tiba tanggal 13 Februari 1950. Suprapto, yang menjabat Jaksa Agung RI, diminta kedatangannya di Pekalongan dan menjadi satu-satunya saksi yang dapat memastikan hukuman yang dulu dijatuhkan atas diri Kutil. Pada tanggal 8 April penegasan kembali hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Pekalongan pada 21 Oktober 1946 dikeluarkan.[63] Pada tanggal 1 Agustus 1950, Kutil mengajukan langsung permohonan pengampunan kepada Presiden Sukarno. Permohonannya ditolak pada tanggal 21 April 1951.[64] Dua minggu kemudian Kutil dibawa ke pantai dekat Pekalongan, tempat yang dipilih untuk eksekusi oleh Komandan Militer Kota, Sudharmo, yang menjadi kepala Staf Resimen XVII TKR di Pekalongan semasa Peristiwa Tiga Daerah dan yang ikut memainkan peranan penting dalam operasi penghancurannya. Dialah yang menjadi komandan regu tembaknya. Ketika ditanya apa permintaan terakhirnya, Kutil menjawab "tidak ada."[65] Ia menolak matanya ditutup, dan dengan berjongkok ia menghadapi butir-butir peluru yang mengakhiri hidupnya pada tanggal 5 Mei 1951.

Ternyata revolusi nasional Indonesia tidak sanggup mengambil keputusan tentang makna Peristiwa Tiga Daerah. Satu-satunya yang disetujuinya ialah mengambil seorang lenggaong sebagai kambing hitam, seorang wakil dari tradisi protes sosial petani di Jawa.[]

---

[61] Wawancara dengan janda Jaksa Agung Suprapto di Jakarta pada 28.7.73.

[62] Laporan Polisi Belanda, Sejarah Militer Kodam VII Semarang.

[63] Declarator Pengadilan Negeri Pekalongan. Semua dokumen berkaitan dengan Kutil diperoleh dari bekas karyawan Semdam VII.

[64] Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 336/G, 1951, Semdam.

[65] Mayor Jenderal Sudharmo, Wawancara, 23.10.71.

KESIMPULAN:
MAKNA SEBUAH REVOLUSI

REVOLUSI kemerdekaan di wilayah Keresidenan Pekalongan pada tahun 1945, yang sering disebut sebagai Peristiwa Tiga Daerah, dapat dianalisa dari beberapa segi, dan akan memberi makna yang lebih mendalam pada revolusi Indonesia sebagai keseluruhan.

Patokan pertama yang bisa kita pakai untuk memahami kejadian revolusi pada tahun 1945 ini ialah perubahan sebelumnya, yaitu dalam bidang ekonomi dan politik sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini harus dikaitkan juga dengan perubahan ekonomi akibat masuknya modal asing (Eropa) di abad sembilan belas dan Sistem Tanam Paksa yang berpengaruh besar pada kehidupan petani. Di tempat yang ada pabrik gula, golongan elite birokrat (pangreh praja) maupun kepala desa sering bertindak sebagai pejabat kapitalis Eropa, seperti dalam soal sewa tanah, penarikan pajak dan *corvee* (kerja paksa), yang lambat laun mengakibatkan rakyat kecil terpojok.

Pergerakan di daerah Keresidenan Pekalongan dimulai dengan adanya perjuangan politik Sarekat Islam yang kemudian diteruskan oleh Sarekat Rakyat dan PKI sampai pemberontakan tahun 1926. Jelaslah bahwa veteran '26 eks-Digulis bersama dengan kaum nasionalis tua yang lain memainkan peranan yang besar, baik di kota maupun di pedesaan, dalam memimpin kelompok-kelompok perjuangan. Pada awal revolusi, tepatnya di bulan Agustus 1945, merekalah yang memutuskan dan berbuat dalam mengumumkan berita Proklamasi, mengibarkan bendera Merah-Putih, dan mengirim kurir ke Jakarta.

Patokan kedua ialah dampak pendudukan Jepang yang membebani rakyat dengan wajib setor padi, romusha, tanam paksa, dan penjatahan bahan pokok. Walaupun dampak sistem penjatahan bahan pokok dan romusha berbeda menurut tempat, yaitu tergantung pada sikap pejabat-pejabat lokal dan para pemimpin perjuangan setempat, namun pelaksanaan peraturan setoran padi merupakan beban yang berat bagi semua penduduk. Kepala desa berperan sebagai tuan-tuan tanah dan pemungut pajak dari petani. Korupsi terjadi di semua aparat dalam bidang ekonomi di masa penjajahan Jepang. Menjelang tahun 1944, rakyat terancam kelaparan, mereka di kota maupun di desa sangat menderita. Para petani dan rakyat melarat di kota menyalahkan golongan elite birokrat, terutama karena kesewenang-wenangan mereka dalam mengatur setoran padi. Dengan demikian pendudukan Jepang membuat semakin rapuhnya hubungan 'patron-klien' antara pangreh praja, lurah, dan rakyat.

Patokan ketiga ialah terlihatnya ciri-ciri revolusi sosial di masa revolusi di Pekalongan antara lain yaitu pembagian kekayaan, pengusiran/penggeseran elite lama—kepala desa, camat, wedana, bupati, dan pemimpin tradisional lain yang dianggap terlalu keras terhadap rakyat dan setia kepada Belanda dan Jepang. Dalam hal ini revolusi di wilayah Pekalongan punya ciri khas tersendiri dengan adanya kekerasan terhadap golongan Cina, Indo-Belanda, pangreh praja, dan lurah. Yang dimaksudkan dengan kekerasan di sini yaitu adanya tindakan-tindakan merusak, merampok, membakar, mendombreng dan membunuh. Anthony Reid berpendapat bahwa masih terlalu awal untuk menganalisa langsung fenomena kekerasan di dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, karena tenggang waktu kejadiannya dengan saat ini masih terlalu dekat sehingga analisa fenomena kekerasan oleh sejarawan belum dapat diungkapkan seluruhnya.[1]

Metodologi yang tepat untuk menganalisa sifat revolusi di Pekalongan haruslah mampu mendekati kelompok-kelompok yang bergerak pada waktu itu, di antaranya yaitu golongan kiri, golongan agama dan militer.

---

[1]Antony Reid, "The Revolition in Regional Perspective", dalam J. van Goor (penyunting), *The Indonesian Revolution*, Conference Papers Utrecht, 17-20 June 1986, Utrechtse Cahiers, jaargang 7 (1986) nr.2/3, hlm. 190.

Tidaklah terlalu sulit untuk mengikuti jejak pemimpin revolusi aliran kiri di Tiga Daerah mengapa mereka mempunyai pengaruh yang sangat penting di awal revolusi. Kelompok pertama yang termasuk di dalam aliran kiri di Tiga Daerah, yaitu veteran pemberontakan komunis tahun '26 eks-Digulis, termasuk di dalamnya pemimpin Barisan Pelopor dan Badan Pekerja di Tegal dan Brebes, AMRI Slawi, dan Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D) itu. Mereka anti-fasis dan tidak berkompromi dengan Belanda dan pengikutnya yaitu kalangan feodal pangreh praja. Pada tahun 1945 mereka menggunakan kesempatan untuk merombak struktur pemerintahan yang lama ke arah yang lebih demokratis. Tetapi oleh karena pada tahun 30-an sewaktu mereka kembali dari Digul atau penjara lain, mereka selalu dalam pengawasan Belanda dan tidak dapat, atau berjanji tidak akan, melakukan kegiatan politik, sewaktu mereka muncul kembali di tahun 1945 mereka tidak mempunyai pengikut atau massa, baik di kota maupun di desa.

Kelompok kedua, yaitu kelompok sosialis yang berpengaruh di Tegal dan Brebes ikut mengaktifkan KNI sebagai wakil pemerintahan sesudah proklamasi dan berusaha mempengaruhi sikap pangreh praja ke arah yang lebih mendukung republik yang baru. Di antara mereka ada yang duduk dalam GBP3D yang diketuai oleh K. Mijaya itu. Kelompok sosialis juga mempunyai saluran ke tingkat nasional lewat dua tokoh yang berasal dari Tegal. Yang pertama, Supeno, anggota Partai Sosialis dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang kemudian menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda dalam Kabinet Hatta yang pertama (1948-1949), membela perkara Tiga Daerah di Pengadilan Pekalongan pada awal 1947. Tokoh kedua ialah Subagio Mangunraharjo pemimpin PNI-baru dan sahabat Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Kelompok ketiga di dalam aliran kiri yang menguasai GBP3D ialah PKI bawah tanah. Dimulai akhir tahun 30-an di Surabaya Widarta dan K. Mijaya cs, telah memupuk kader-kader yang progresif melawan fasisme. Tindakan-tindakan mereka di masa pendudukan Jepang, antara lain di Lasem, Blitar, dan Pemalang, meskipun dengan jaringan lokal yang terbatas, ikut menentukan cita-cita Gerakan Tiga

Daerah itu.[2] Walau dalam tingkat nasional, Widarta dan K. Mijaya memperoleh salurannya melalui Amir Syarifuddin, namun tidak pula menolong terpukulnya GBP3D, di Tiga Daerah itu. Selain perbedaan pandangan dalam aliran kiri tentang bagaimana revolusi itu harus dijalankan juga terdapat perbedaan tentang penentuan prioritasnya. Amir Syarifuddin menganggap revolusi sosial merupakan tahap kedua setelah revolusi nasional, dan menganggap "radikalisme kiri sebagai penyakit kekanak-kanakan." Syahrir penganjur revolusi sosial demokratis ternyata lemah mempertahankannya setelah benar-benar terjadi, barangkali karena dirasakan akan mengurangi kepercayaan dunia terhadap wibawa kabinetnya dalam menguasai hukum dan ketertiban Republik muda ini. Sukarno bercenderung menganggap Tiga Daerah terpengaruh oleh "separatisme," dan Hatta melihatnya sebagai ekses karena terlalu banyaknya kedaulatan rakyat. Bagi sejarah PKI sendiri, Peristiwa Tiga Daerah dan dijatuhkannya hukuman mati oleh PKI atas Widarta pada tahun 1947 menunjukkan betapa celakanya kelompok yang kalah dalam persaingan kelompok di dalam PKI sendiri. Pada tahun 1963 partai berusaha menyelesaikan masalah ini dengan mengganti nama Sekolah Partai Central menjadi Institut Widarta (di dalam Akademi Ilmu-Ilmu Sosial Ali Archam), dan menyiapkan buku *20 Tahun di Bawah Tanah*.[3]

Selain kaum kiri elemen lain yang juga sangat penting, adalah kelompok Islam. Mengapa kaum agama ikut arus revolusi dan apa cita-cita Islam pada waktu itu? Golongan agama di Pekalongan terpecah antara Islam nasionalis dan Islam Muhammadiyah. Islam nasionalis sejak zaman Sarekat Islam, melakukan kegiatan melawan kolonial Belanda maupun Jepang yang tokohnya antara lain K.H. Abu Suja'i (pemimpin Partai Sarekat Islam Indonesia di Tegal) yang menjadi Bupati Tegal pada waktu Peristiwa Tiga Daerah itu. Di Tegal, 22 persen camat baru yang terpilih terdiri dari golongan Islam nasionalis. Di

[2]Anton Lucas (penyunting), *Local Opposition and Underground Resistence to the Japanese in Java, 1942-1945*, Monash University Centre for Southeast Asian Studies, 1986, hlm. 27-50.

[3]Naskah buku ini (yang tidak diterbitkan karena G.30.S) disusun oleh sebuah panitia Lembaga Sejarah CC PKI, yang terdiri dari 6 orang, antara lain Jasmadi (K. Mijaya), Sidik Kertapadi, Jokosujono dan sekretaris Lembaga Sejarah Partai sendiri.

Pemalang kelompok ini disebut sebagai santri rakyat, dengan maksud untuk membedakan mereka dari golongan Muhammadiyah yang anggotanya adalah golongan priayi, sedang di Pekalongan anggota Muhammadiyah adalah para pedagang. Tokoh Islam Muhammadiyah K.H. Iskandar Idris, komandan TKR Pekajangan, merupakan persenyawaan dua elemen yaitu TKR dan Muhammadiyah yang berhasil menghentikan pemerintah revolusioner baru, baik di Pekalongan maupun di Tiga Daerah.

Bagaimanakah golongan Islam nasionalis dan golongan kiri saling bereaksi pada waktu itu? Pada mulanya Islam nasionalis bersedia bekerja sama dengan kaum kiri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kaum komunis menganggap kekuatan Islam biasa diajak bekerja sama. Dalam kenyataannya penderitaan rakyat telah mempersatukan semua golongan di pedesaan. Di desa, kelompok NU mendapat tekanan ekonomi yang berlebih dari Tiga Daerah, sedangkan santri rakyat atau santri melarat di kota-kota kabupaten tidak bersekolah Belanda dan tidak bermodal. Golongan Islam nasionalis di Tiga Daerah yang dipimpin K.H. Abu Suja'i dan kiai-kiai desa bersenyawa dibandingkan dengan badan-badan pekerja atau GBP3D-nya golongan kiri. Sedangkan Muhammadiyah melekat ke lapisan atas, ke kalangan priayi atau pangreh praja. Golongan Muhammadiyah tidak terganggu dengan adanya modal asing di Keresidenan Pekalongan sebelum perang dan mereka masih dapat mempertahankan status ekonominya di masa pendudukan Jepang. Golongan Muhammadiyah pada waktu itu kurang dapat memahami bahwa masalah kemiskinan santri-santri di Tiga Daerah itu erat hubungannya dengan masalah yang dimiliki oleh kaum revolusioner di Tiga Daerah.

Militer di Pekalongan merupakan patokan keempat dalam melihat revolusi lokal pada waktu itu. Oleh karena Sekutu tidak mendarat di Pekalongan, maka TKR mengutamakan perlawanan terhadap Sekutu di front Semarang. TKR menganggap transportasi tenaga dan logistik dari Pekalongan ke front Semarang dihalangi oleh penguasa baru, sehingga tindakan ini oleh TKR dikategorikan sebagai penghalang fokus perjuangan nasional pada waktu itu. Di pihak lain kaum revolusioner (penguasa baru) menganggap TKR sebagai alat pangreh praja dan kekuatan feodal lama, dengan alasan bahwa perwira TKR

terdiri dari kalangan priayi, yaitu anak-anak dari pengreh praja setempat. Dari sudut inilah dapat dilihat latar belakang mengapa TKR memenjarakan residen Pekalongan yang baru, beserta seluruh staf dan pengikutnya, dan para pemimpin revolusioner di Tiga Daerah.

Selain dari faktor ekonomi dan politik, revolusi di Pekalongan dapat dilihat dari faktor kebudayaan. Patokan kelima, yaitu persepsi, kesadaran atau perasaan gejolak revolusi ini telah mempersatukan veteran '26, santri rakyat dan pemuda di kota dengan para lenggaong dan pemimpin Islam nasionalis. Revolusi tidak hanya melibatkan golongan kecil pemuda yang mengenyam pendidikan di kota saja, tetapi kesadaran revolusi itu ada kaitannya dengan bentuk tradisi 'protes' di Jawa pada masa jauh sebelumnya, di mana di daerah pedesaan banyak ditentukan oleh lenggaong. Berbeda dengan pandangan kaum priayi, yang menganggap bahwa kepemimpinan revolusi sosial itu adalah sesuatu yang berasal dari luar atau asing, menurut golongan kiri revolusioner, tujuan utama mereka adalah penghapusan hierarki sosial dalam penggunaan bahasa. Mereka menghendaki hapusnya sebutan-sebutan untuk kaum priayi dan menggunakan bahasa Jawa rendah (*ngoko*) dalam berkomunikasi, dan hal ini merupakan suatu gerakan radikal yang mendasar di dalam konteks kebudayaan Jawa.

Semboyan 'sama rasa sama rata' mengungkapkan adanya persamaan dan perasaan batin, solidaritas sosial revolusi, hal mana mirip dengan gerakan protes lain yang terjadi di Asia Tenggara. Di Vietnam misalnya di dalam filsafah Partai Komunis Indo-China, konsep *dong tam* menunjukkan adanya kebersamaan, satu tujuan batin yang tidak terbatas pada partai politik tertentu. Dalam tradisi nasionalisme di Muangthai, konsep yang serupa adalah *samakhi*, artinya kesatuan, persaudaraan, atau keselarasan. Di Filipina pada awal abad ini persatuan rahasia Katipunan juga memberi solidaritas spiritual kepada anggotanya yang melawan pemerintah kolonial pada waktu ini.[4]

Untuk mempertajam analisa revolusi di Pekalongan, diperlukan studi bandingan dengan daerah-daerah lain, misalnya Aceh dan Banten adalah dua daerah yang menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan

[4]Reynaldo C. Ileto, *Pasyon and Revolution: Popular Movements in the Philippines, 1840-1910*, Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 1979.

Tiga Daerah di awal revolusi.[5] Rupa-rupanya di tiga tempat ini Pemerintah Pusat kekurangan wibawa dan tenaga untuk menciptakan aparat pemerintah baru setelah tercetusnya Proklamasi. Tidak ada pilihan selain dari mengangkat kembali aparat lama. Dengan tidak diangkatnya dengan segera residen baru di Pekalongan dan Banten timbullah kecurigaan, dan ketakutan akan disambutnya kedatangan Belanda kembali oleh Republik di kalangan rakyat. Aparat lama yang diangkat kembali tidak berdaya karena oleh rakyat mereka dianggap penyebab penderitaan sewaktu zaman Jepang. Kekuatan militer setempat (TKR) tidak mampu melindungi mereka. Di Banten maupun di Tiga Daerah kelompok revolusioner (pemimpin agama, veteran komunis, dan jawara/lenggaong) memulai kegiatannya sudah semenjak tahun 20-an (walaupun di Tiga Daerah kedudukan dan peranan ulama tidak sekuat di Aceh). Revolusi sosial yang terjadi di Aceh, Banten, dan Tiga Daerah telah berhasil mengganti aparat pemerintah lama baik di tingkat desa, kecamatan, kewedanaan, maupun di tingkat kabupaten dan keresidenan. Sedangkan para ulama yang diangkat sebagai aparat baru tetap berjalan dan tidak tergantung pada apakah pemerintah radikal di keresidenan bertahan atau tidak. Gagalnya kelompok-kelompok radikal untuk mencapai tujuannya disebabkan karena adanya pertentangan di dalam masyarakat setempat, bukan karena adanya pengaruh dari luar.

Apa pentingnya Peristiwa Tiga Daerah pada tahun 1945 bagi wilayah itu sendiri di masa kini? Di antara perubahan administrasi yang semula menjadi tujuan strategi demokrasi para pemimpin Tiga Daerah, semenjak waktu itu ada yang terlaksana. Misalnya saja Batang (sebelah timur Pekalongan) sampai sekarang tetap berdiri sendiri sebagai kabupaten. Kedudukan wedana yang dihapuskan di beberapa tempat di Brebes pada tahun 1945, kini dengan resmi sudah hapus.

Tetapi lebih dari segalanya, proklamasi sebagai peristiwa sejarah nasional, di tingkat lokal telah membangkitkan semangat revolusi dan

---

[5]Michael C. Williams, "Banten: Rice Debts Will be Repaid With Rice, Blood Debts with Blood," hlm. 55-81, Eric Morris, "Aceh: Social Revolution and the Islamic Vision", hlm. 83-110, dan Audrey Kahin "Overview", hlm. 269-276, dalam Audrey R. Kahin, (penyunting) *Regional Dynamics of the Indonesian Revolution*, Honolulu University of Hawaii Press, 1985.

menyatukan semua golongan masyarakat, tidak terbatas pada golongan kecil saja. Proklamasi membuka pintu untuk kekuatan sosial dan politik, cita-cita dan nilai-nilai di kalangan masyarakat, yang sebelumnya tertindas atau tidak dapat ditampilkan. Hasil ini tidak akan disia-siakan.[]

POSTSCRIPT

STUDI sejarah Peristiwa Tiga Daerah yang pertama diterbitkan pada tahun 1989. Kemudian timbul pertanyaan, apa relevansinya menerbitkan ulang studi sejarah sebuah peristiwa di tingkat lokal di Indonesia yang terjadi hampir 60 tahun yang silam?

Ada tiga hal yang membuat sejarah lokal penting untuk dipelajari oleh generasi muda ilmuwan sosial maupun aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. sekarang.

Pertama yaitu persamaan antara gerakan revolusi tahun '45 dengan gerakan reformasi tahun 1998, demikian juga ada persamaannya dengan awal kampanye pemilu 2004. Pada tahun 1998 gerakan reformasi di mana walikota Tegal diusir karena adanya tindakan KKN yang mana kejadian ini mirip dengan gerakan pemuda kota 'mendaulat'-walikota Tegal dan pejabat pemerintah yang lain pada November 1945, dengan alasan yang sama (KKN).[1] Sedangkan pada awal kampanye pemilu 2004, ada Gerakan Nasional Jangan Pilih Politisi Busuk (GNJPPB) yang tujuannya juga tidak jauh beda. Kartun di harian *Kompas* "Oom Pasikom" mengungkapkan masalah yang ada dengan jelas: 'Ada politisi busuk, pejabat busuk, aparat busuk, wakil rakyat

[1] Lihat Anton Lucas, 'The Mayor Who Fell Down the Well', *Inside Indonesia*, No. 59, July-September 1999, pp. 11-12; juga Anton Lucas, 'Local reformasi in Central Java: Notes on Tegal', RENAI (*Jurnal Politik Lokal dan Sosial—Humaniora*), tahun II, No. 1, November 2001-Maret 2002, hal. 19-36; artikel tersebut diterjemahkan sebagai 'Reformasi Lokal di Jawa Pesisir: Kasus Jatuhnya Seorang Walikota di Tegal' dalam Jim Schiller (ed.), 2003, *Jalan Terjal Reformasi Lokal: Dinamika Politik di Indonesia*, Yogyakarta, Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah dan Yogya, pp.161-198.

busuk' dan seterusnya.[2] Terlihat adanya isu politik yang sama dari satu masa ke masa yang lain. Lantas pertanyaannya adalah sama dari zaman ke zaman, bagaimana memberantas korupsi? Apa solusinya?

Pemberantas korupsi akan berangsur-angsur bisa berjalan dengan diciptakan demokrasi di tingkat bawah (*grass roots*). Syarat untuk demokrasi di *grass roots* adalah transparansi, dan *'public accountability'* (tanggung jawab wakil rakyat dalam dewan perwakilan dan masyarakat yang memilihnya). Transparansi dan *'public accountability'* dalam kehidupan politik bisa tercapai dengan DPRD yang mewakili kepentingan rakyat bukan partai, dengan media massa lokal yang bebas, dengan gerakan sosial dan demonstrasi. Sangat penting juga mendirikan forum-forum warga ditingkat lokal yang bisa menampung aspirasi rakyat dan menggerakkan reformasi dari tingkat bawah(*grass roots*) tadi.[3]

Media massa yang bebas adalah salah satu syarat untuk mengekpos korupsi. Pada tahun 1998 koran lokal seperti *Tegal Tegal* mempunyai peranan penting dalam proses penggulingan walikota Tegal yang melakukan KKN secara besar-besaran. Pemecatan pegawai lokal karena KKN waktu era reformasi membawa kritik tajam di media, sikap kritis koran lokal juga berangsur-angsur mengubah nilai-nilai masyarakat, dan mungkin, mengubah tingkah laku penjabat (lama maupun yang baru) di masa yang akan datang.[4]

Kedua, pada 1945, ideologi PKI ilegal yang 'berorientasi ke Moskow'(dengan garis partai dari Komunis Internasional atau Ko-

---

[2]*Kompas*, 15 Januari 2004.

[3]Sebagai contoh, Forum Antarpelaku di Kabupaten Jepara, sebuah kelompok yang terdiri dari NGOs, pegawai negeri dan pejabat yang bertemu di balai pertemuan Jepara dan 'mendengar keluhan' yang terus terang dan kritis. Tentang korupsi dan cara mengatasinya lihat Transparency International, *Global Corruption Report 2003*, London, Profile Books, hal. 140-152 (mengenai Asia Tenggara), dan *Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development*, World Bank, East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit, October 2003, terutama bagian 'Overview' hal. i-xviii. Lihat juga cerita mengenai korupsi langsung dari yang mengalaminya dalam Ratih Hardjono dan Stefanie Teggemann (penyunting), 2003, *Kaum Miskin Bersuara: 17 Cerita Tentang Korupsi*, Jakarta, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

[4]Koran koran lokal di Tegal yang hidup subur pada awal era reformasi sudah mati sekarang. Yang tinggal sekarang hanyalah *Radar Tegal*, dimiliki oleh konglomerat pers *Jawa Pos*.

mintern) mempengaruhi mereka untuk mendirikan front persatuan yang luas (meskipun ternyata rapuh) dengan memasukkan PKI ilegal di dalamnya. Dari sudut ideologi, tindakan tersebut adalah langkah yang bagus tetapi tidak berhasil, karena pimpinan PKI ilegal dalam front persatuan (GBP3D) tidak mampu memperhitungkan kekuatan lawan politik di Pekalongan. Mereka terlalu terburu-buru ingin menguasai kota karesidenan, tanpa memikirkan saudagar Islam yang kaya, tentara yang merasa dihalangi tugasnya dan pangreh praja yang rekannya di penjara di Pemalang yang hilang jabatannya. Kesalahan strategis front persatuan ini memerlukan analisa yang mendalam, mengapa PKI ilegal bertindak terlalu cepat. Meskipun mereka dengan tajam telah menganalisa situasi politik (seperti pikiran Widarta dalam notulen rapat GBP3D), ideologi Marxis mereka yang 'berorientasi ke Moskow' sepertinya menghalangi mereka untuk mengetahui keadaan di Pekalongan. Mereka gagal beraliansi dengan golongan Islam, pangreh praja, dan militer. Mereka pandai menyusun kekuatan (*machtvorming*), tetapi lemah dalam pelaksanaan. Dalam peribahasa Jawa *kegedean empyak kurang cagak,* artinya beratap besar kurang tiang penyangganya.

Pelajaran untuk para aktivis zaman sekarang adalah bagaimana membangun gerakan reformasi politik dimana harus beraliansi dengan golongan lain. Ini memerlukan paling tidak dua syarat. Pertama, pengetahuan yang mendalam mengenai situasi politik lokal di tingkat bawah (*grass roots*). Kedua, pengetahuan mengenai lembaga politik lokal. Pada era reformasi di sekitar 7.000 desa di seluruh Indonesia, sesuai dengan (UU Otonomi Daerah itu), semestinya dibangun Badan Perwakilan Desa. Lembaga baru yang sangat penting untuk gerakan demokratisasi 'grass roots' ini tidak pernah mendapat sorotan atau pemberitaan di media massa. Padahal nasib gerakan demokratisasi di desa sangat tergantung keabsahan lembaga ini.[5]

Pelajaran dari Revolusi Tiga Daerah adalah membangun gerakan politik untuk revolusi kemerdekaan sekaligus revolusi sosial tidak

[5] Dikalangan peneliti pedesaan ada berbagai pendapat mengenai BPD. Lihat RENAI (*Jurnal Politik Lokal dan Sosial—Humanoria*) tahun 1, No. 2 April-Mei 2001 dengan tema 'Perubahan di dalam Dinamika Politik Lokal Pedesaan.'

gampang. Tetapi ada satu keuntungan masa kini buat kaum aktivis yang ingin mengadakan perubahan. Pada tahun 1945 Lembaga Swadaya Masyarakat belum ada. Yang menyuarakan cita-cita atau kemauan rakyat adalah badan perjuangan (di kota), dan kyai radikal dan *lenggaong* di desa. Awal gerakan (revolusi) sosial rakyat di Tiga Daerah penuh kekejaman, penuh 'kebrutalan' seperti pembunuhan orang Indo, pengrusakan milik Cina dan aksi 'mendombreng' lurah yang melakukan korupsi. Sekarang dengan keterlibatan LSM dalam pembelaan rakyat, demonstrasi bisa lebih terarah.[6] Sedangkan di Indonesia sekarang, di mana-mana membangun gerakan sosial, KKN akan terbongkar, dan LSM bisa menyuarakan kepentingan rakyat, dewan bisa lebih bertanggung jawab (*accountable*) dan pemerintahan akan lebih transparan.

Ketiga, studi sejarah lokal ini menghasilkan beberapa petunjuk mengenai metode sejarah lisan yang bermanfaat sebagai penelitian di Indonesia saat ini. Pada waktu studi sejarah lokal ini diteliti (1971-1973) beda waktu dengan kejadiannya (1945) hampir 30 tahun, sedangkan jarak waktu sekarang (2004) dengan Peristiwa '65 hampir 40 tahun. Ini berarti ingatan pelaku sejarah 65-66 seharusnya digarap secepatnya. Ada satu hal yang sangat menguntungkan untuk melakukan penelitian sejarah dengan metode sejarah lisan yaitu dimana suasana politik sekarang ini berbeda dengan suasana politik tahun 1971-1974. Pada waktu itu, banyak tokoh Tiga Daerah menjadi Tapol, dan tidak bisa diwawancarai. Sedangkan yang telah dibebaskan dari tahanan merasa kurang bebas untuk beberbicara tentang kejadian politiknya lebih lebih yang bersangkutan dengan pelaku-pelaku komunis.

Pada tahun 2004 dengan dengan adanya era reformasi, sudah ada perubahan politik yang besar. Orang-orang kiri yang dulu segan menceritakan pengalamannya karena tertekan, lebih merasa bebas un-

[6]Menurut Arief Djati, 'Dengan kehadiran mereka (LSM), perjuangan brutal rakyat untuk mempertahankan hak mereka menjadi reda'. Faktor yang lain mengapa gerakan LSM tidak bisa menjadi gerakan sosial adalah ketergantungan mereka kepada *funding* (pendanaan), sering dari luar. Lihat Arief W. Djati 'LSM, Rakyat dan Gerakan Sosial', dalam Arief W. Djati (editor) *Gerakan Sosial dan Demokrasi*, Surabaya, Panitia 25 Tahun FISIP Universitas Airlangga, tanpa tanggal, hal. 127-128.

tuk mengemukakan pendapatnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya usaha untuk mengumpulkan kesaksian mereka tentang peristiwa tahun '65-'66.[7]

Untuk menghasilkan sebuah tulisan (transkripsi) wawancara dengan memakai metode sejarah lisan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Walaupun dalam wawancara 'terbuka' (atau *open ended*) itu tidak mempergunakan kuesioner yang sama yang harus diisi oleh setiap informan, kita masih membutuhkan sebuah daftar pertanyaan di dalam mewancarai setiap informan untuk menghindari adanya hal-hal yang terlewatkan. Makin luas acuan (referensi) yang dapat dibaca sebelum mengadakan wawancara, semakin terperinci daftar pertanyaan yang bisa disusun, dan semakin menyeluruh hasil penelitian akan sejarah lisan tadi.

Ada beberapa tipe penelitian yang menggunakan metode sejarah lisan, seperti misalnya dalam hal penelitian akan suatu peristiwa, penelitian kebudayaan atas sebuah suku, wawancara khusus dengan pelaku sejarah dengan tujuan untuk menyelamatkan kesaksian sejarahnya. Yang terakhir ini lebih merupakan suatu studi biografi. Untuk studi biografi pun, pewawancara (*interviewer*) harus mendalami lantar belakang keluarga, serta zaman kehidupan si pelaku sejarah (zaman revolusi, Orde Lama, Peristiwa '65, Orde Baru dan masa reformasi). Semakin banyak pengetahuan latar belakang satu orang atau suatu peristiwa, akan semakin baik hasil wawancara tersebut.

Hal-hal lain yang menyangkut soal teknis seperti misalnya apakah interviewnya dapat direkam atau tidak, peraturan/petunjuk transkripsi wawancara (ejaan nama, bagaimana sebaiknya bahasa 'lisan' harus ditranskripsi (dengan mengedit atau tidak), hal-hal seperti ini perlu disepakati sebelumnya dengan lembaga yang menyelenggarakan penelitian sejarah lisan tersebut.

---

[7] Bacaan sejarah sebelum melakukan wawancara dengan informan Peristiwa '65 untuk sejarawan muda maupun aktivis LSM seharusnya termasuk Robert Cribb, *Pembantaian PKI di Jawa 1965*, Pustaka promethea, Surabaya; Hersri Setiawan 'Penjara dan Tahanan Politik' dalam I.G. Krisnadi, 2000, Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979), Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, pp. xiii-xlvii; dan Anton Lucas (penterjemah) 'I Am a Leaf in the Storm' (*Indonesia* No. 4, April 1989), pp. 49-60 (ini cerita mengenai perjalanan hidup seorang wanita yang dapat menghindari penangkapan setelah peristiwa '65).

Semoga hasil penelitian Peristiwa Tiga Daerah yang dicetak ulang oleh Resist Book ini akan berguna dan bisa menggiatkan para sejarawan dan aktivis LSM muda dalam menggali sejarah yang tidak boleh terlupakan di Indonesia di masa mendatang.[]

Yogyakarta, Januari 2004

LAMPIRAN A

Keanggotaan Shu Sangi Kai
(Dewan Penasihat Keresidenan Pekalongan)

Anggota yang diangkat	*Kedaulatan/Afiliasi*
H.M.Z. Effendi	Muhammadiyah (?), Pekalongan.
dr. Maas*	Kepala RSU Pekalongan, dokter keresidenan, wakil Pekalongan di Dewan Penasihat Se-Jawa (Chuo Sangi In), Kemudian PNI.
R.A.A. Sosrowerdoyo	Bekas bupati Indramayu yang dipaksa Pensiun tinggal di Pekalongan.
M. Sumantri Reksoadijoyo	Bekas patih Pemalang, kepala kantor *Romu Kyokai* (tenaga kerja) keresidenan. Juga kepala BP3 (badan Pembantu Prajurit Pekerja).
R.A.A. Soetirto Pringgohaditirto	Bupati Brebes 1932-44.
M. Citrosuwarno*	Kepala Kantor Urusan Agama Keresidenan Pekalongan.
Anggota yang dipilih	
R.M. Abu Bakar	Muhammadiyah, dari Tegal.
K.H. Mohamad Ilyas*	NU Pekalongan (kemudian Menteri Agama Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-56).
Harjosudarmo	Dari Pemalang.
Ki Partihadisucipto	Kepala Perguruan Taman Siswa Wilayah Tegalarum, Pekalongan, dari Slawi.
Imam Sahadat	Muhammadiyah, dari Brebes.
Kromo Lawi*	Pemimpin pergerakan nasional, Pekalongan.

* *kemudian menjadi anggota KNI Pekalongan.*

Sumber: Wawancara: *Djawa Baroe, I, 21,* hlm. 5; *Almanak Soera,* 2604 (1944), hlm. 191.

LAMPIRAN B

Susunan Badan-badan Pekerja di Tengah Daerah
(semasa November 1945 sampai 14 Desember 1945)

1. Badan Pekerja Brebes

Jabatan	Nama	Afiliasi
1. Ketua	Kartohargo (Brebes) x + *	Guru nasionalis pengikut Sukarno.
2. Wakil Ketua & Ketua Bagian Penerangan	Slamet, (Ketanggungan) +	PKI 1926, eks-Digul.
3. Sekretaris-/	Mohammad Saleh, (Brebes) o	Suluh Pemuda Indonesia, Sekretaris Kabupaten, kemudian Sekretaris Keresidenan Bojonegoro, dan Bupati Kediri.
4. Bendahara	Kusnadi (Ketanggungan) o	Komunis (?)
5. Urusan Ekonomi	Pemimpin pemuda (Tanjung) +	PNI-baru, pemimpin perjuangan Tanjung.
6. Pendidikan	Santosa, (Ketanggungan) o	Guru Taman Siswa.
7. Urusan umum	Maksum, (Brebes) o	Pangreh praja, bekas jaksa Brebes. Diberhentikan oleh Belanda karena masalah keuangan.
8. Urusan Agama	Abbas Abdullah (Brebes) o	Mengundurkan diri karena aktif dalam GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia).

* : Lihat lampiran biografi.
-/ : Setelah Ramlas, pemimpin AMRI/PKN, yang hanya tahan 3 hari sebagai sekretaris, karena ia tidak menyukai pekerjaan di belakang meja.
\+ : Anggota Badan Penghubung untuk mengkoordinasi semua urusan dengan Tegal dan Pemalang.
O : Anggota Sekretariat Badan Pekerja.
X : Bekas anggota KNI Brebes.

1. Badan Pekerja Tegal

Jabatan	Nama/Umur	Afiliasi sebelumnya
1. Ketua	Suwignyo* Slawi, 39.	VSTP, PKI 1926 Digul, pemimpin AMRI Slawi.
2. Sekretaris	Pemimpin KNI, Tegal, 30.	Negen Broeders/Indonesia Muda.
3. Bendahara	Sulaiman, 41	PKI 1926, Digul, Barisan Pelopor
4. Urusan Administrasi.	Pemimpin KNI, Tegal, 32.	Negeri Broedoers, PNI Baru.
5.	Sakirman* Slawi, 39.	Pemimpin AMRI
6.	Suharjo, Tegal, 39	Gerindo
7.	Muhamad Nuh,* Tegal, sekitar 40.	Pemimpin Barisan Pelopor
8.	Marsum*, Tegal, 31.	Partindo/Gerindo
9. Bagian	Ismono, Tegal, 33. (Umur rata-rata 36)	Barisan Pelopor Gerindo, Barisan Pelopor

* *Lihat lampiran biografi.*

3. *Susunan GBP3D (Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah) Brebes, Tegal, Pemalang, 16 November-14 Desember '45)*

Sekretariat Umum:

Ketua: K. Mijaya*- Pemimpin komunis bawah tanah, veteran Gerakan buruh sebelum perang.

Sekretaris: Suwignyo*- VSTP-PKI 1926, Digul, Ketua Badan Pekerja Tegal.

Gabungan Badan Ekonomi:

Brebes : Pemimpin Tanjung (PNI-Baru)
Tegal : Abdulrakhman.
Pemalang : Tan Jiem Kwan*

Gabungan Badan Penerangan:

Brebes	: Slamet (PKI 1926, Digul, anggota Badan Pekerja Brebes)
Tegal	: Sakirman* (pemimpin AMRI Slawi, anggota Badan Pekerja Tegal)
Pemalang	: Amir* (PKI sejak 1924)

Gabungan Badan Penerangan

Brebes	: Kartohargo* (Nasionalis-KNI, Ketua Badan Pekerja Brebes)
Tegal	: Anggota kelompok KNI (PNI-Baru) Tegal.
Pemalang	: Amir.*

---

* *Lihat Lampiran biografi.*

GBP3D mengadakan enam kali sidang selama sebulan berkuasa. Empat orang anggota GBP3D yang non-PKI adalah pemimpin Tanjung dan Kartohargo dari Brebes dan Abdulrakhman dan pemimpin KNI Tegal dari Tegal.

LAMPIRAN C

RISALAH RAPAT GBP3D PADA TANGGAL 25 NOVEMBER 1945

BERIKUT ini adalah catatan sidang ketiga (dari enam) GBP3D yang diselenggarakan di Brebes pada 25 November 1945. Risalah ini didapati di inventaris No. 201 Procurator General di Arsip Negara Belanda (Algemeen Rijksarchief). Risalah ini menunjukkan prioritas dan masalah yang segera dihadapi pemimpin perjuangan dalam revolusi sosial tiga bulan setelah kemerdekaan. Sebuah salinan dari catatan risalah ini rupanya dimiliki Suwignyo, bekas Ketua Badan Pekerja Tegal. Catatan aslinya sangat disingkat, sering kali hanya sebuah catatan antara garis pemisah untuk mengingatkan penulis tentang pokok persoalan berikutnya. Terjemahan ini mengikuti susunan tersebut, sebuah tanda"–" antara pokok persoalan menunujukkan suatu pembahasan terpisah. Yang artinya tidak jelas diuraikan dalam ruang antara tanda kurung [ ] atau dalam sebuah catatan kaki. Ejaan sesuai dengan aslinya. Nama-nama orang dan organisasi dijelaskan sebisa mungkin.

B. [Badan] Perdjoeangan (GBP3D) di Brebes tgl. 25/11-05.-

Jg. Hadlir.

Tegal
1. Mohd. Noeh
2. Soeleman
3. Soekirman
4. Oey Wan Yoe
5. Abdoerachman
6. Soewignjo

Tidak hadlir Sdr. S.

Pml. [Pemalang]
1. Amir
2. Tan Djim Kwan
3. Widarta (Wakil)[1]

[1]Dari menteri Mr. Syarifuddin.

Tidak Hadir Sdr. Roestamadji

Bbs. [Brebes] 1. Kartohargo
2. Slamet

Tidak hadlir Sd. S.

Pemimpin rapat Sdr. K. Midjaja
Rapat dimoelai dj. 10.30 pagi
Sdr. Widarta wakil Menteri Penerangan
Oey Wan Yoe wakil T.H. [Tionghoa] Tegal.

Maksoed : Kelangsoengan peroendingan tgl.-
Mempersatoekan Tgl. Bbs. Peml. [Tegal Brebes Pemalang]
Hal Ekonomi, Penerangan, Pertahanan.

Perhoeboengan dgn. Poesat [Pemerintah] Dkt [Jakarta] dan Pkl. [Pekalongan]-terpaksa masing-masing daerah zelifstanding [berdiri sendiri]-satoe idiologie.

Tgl. [Tegal] Brebes mengerdjakan B.P. Kab Civiel Bestuur (Badan Pekerja Kabupaten Civiel Bestuur (pemerintahan sipil)].

Tenaga banyak dimasoekkan disitoe, sehingga B. Perdjoeangan [GBP3D] kekoeatan tenaga koerang.

Kekwatiran kalo B.P. Kab. [Badan Pekerja Kabupaten Tegal dan Brebes] dipegang oleh orang2 jang tidak sefaham.

B. Perdjoeangan [GBP3D] badan politiek perdjoeangan. Andjoeran Sjahrir – badan perwakilan – golongan2 aliran menjiapkan diri – baoe parlementarisme.[2]

Sikap kita Amri [AMRI Slawi] sebagai b. pew. [Badan perwakilan] Rakjat.

Amri sebagai organisasi jg. Melipoeti segala badan2 organisasi di Tegal.

Dictatorisch? Kedoedoekan B.P. Kab. [Badan Pekerdja Kabupaten] dengan Perdjoeangan. [GBP3D].

---

[2]Dengan pembentukan Badan Pekerja KNIP pada tanggal 16 Oktober 1945, disusul dengan Manifesto Politik tanggal 1 November (yang mendorong aliran politik membentuk partai) dan peraturan tentang pembentukan Badan Pekerja di tingkat keresidenan ke bawah, Kabinet Syahrir telah merombak struktur pemerintah ke sistem demokrasi parlementer, di mana menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen (KNIP) bukan kepada presiden. KNI-KNI daerah juga harus berubah menjadi badan perwakilan. K. Mijaya dan Widarta menolak perubahan politik di Pusat yang "bau parlementaris" itu.

Jg. Diroendingkan sekarang B. Perdjoengan [GBP3D] jg. Mengoewasai B.P. Kb. [Kabupaten] kearah kepentingan 3 daerah. –

Membatja notulen [catatan rapat] tgl. 16/11-1945 di tgl. [Tegal]

K.M. [K. Midjaja]: "Lengkap?" Hadir "Tjoekoep".

K.M. [K.Midjaja]: Ini waktoe jg. diperoendingkan B. Perd. [GBP3D] boekan B.P. Kab. Tegal – Pertahanan, Penerangan dan Ekonomie perjoeangan.

Atjara:

Hal Badan Pertahanan.

Oesoel sdr.M. Noeh [Muhamad Nuh, ketua Barisan Pelopor Tegal] – 21/11/1945 Markas dari Djogja. Sdr. Markas dan Oentoeng bg. [bagian] tentara – T.K.R. perloe dibentoek apa tidak – Apa sebab T.K.R. diserboe Rakjat. dianggap sebagai pemberontakan melawan militair – [untuk membangun kembali TKR di Tegal].

Pkl. [Pekalongan] memberi tenaga dan sendjata 50 % - Hak Tegal. [Tegal] selectie-Asrama-waroeng dll. gedoeng Asrama, roemah2 opsir di Tgl. Pml.

dibatjakan notulen pembentoekan Comite [Pemerintahan] Civil [?]

I. Tentang benzin haroes diboeat karena sama Tjepo perhoeboengan poetoes.
II. Auto [kendaraan] disatoe tempat.
III. Persendjataan. Adakan pendaftaran di masing-masing daerah – siapa jg. haroes pake – kelebihannja kepada TKR.

K.M. [K. Midjaja]: mempersilahkan B. Pertahanan beroending.

Amir: Tjorak dan haloean bagaimana? Sikap kita, berapa tenaga, persendjataan, economie.

K.M. [K. Midjaja]: diminta hadlirin meroending.

W. [Widarta]: pokok keadaan jg. njata. Walaoepun theorie [komunis] bagi doenia [internasionel] baik, praktijk beloem tentoe baik [dalam situasi kita].

Dasar2 poetjoek pimpinan [nasional] dari soedoet militair betoel, tapi tidak sesoeai dgn. kenjataan – kita semoea koerang. Pertahanan kita dgn. perang guirilla – tersoesoen dari Rakjat djelata – bisa terpikat dengan kebaikan nasib Rakjat.

Tjonto di Soerabaja – T.K.R. dan Rakjat – Perhimpoenan alat sen-

djata – djonto di Semarang -

Di Soerabaja Inggris maoe meloetjoeti tapi sendjata teroes dibagikan kepada Rakjat. –

Tentara di Roesia – Jenan – T.K.R. hanja camflage [penyamaran] bagi doenia Internasional.[4]

Sdr. Soekiman – [dan] Slamet: Moefakat volksfront.

Sr. Sw. [Soewignjo]: Moefakat Volksfront + T.K.R.

Amir: staande leger [tentara tetap] + Volksfront.

W [Widarta]: 3 golongan 1. soenggoeh2 pembela rakjat.

2. Nica. 3. Djepang, jang awas terhadap D. [Jepang] karena sangat licin.

A. [Amir]: pemimpin dari D. [Jepang] kita tolak. Sendjata kita trima + nasehat2.

Kartohargo: T.K.R. Pkl. datang boleh mendirikan lagi? Didjawab Rakjat akan mendirikan sendiri.

A. [Amir]: barisan pemberontakan[5] - olih mevr. S.[6] serahkan kepada Soetomo – tangan2nja di Pkl [Pekalongan] Soewarno Danoesapoetra – sudah djandji kepada Waleri + Kendal akan memberi sendjata dan minta dari Tgl. Pml. Bbs., T.K.R. Pekl., T.K.R. Djogdja – kemasoekan pengchianat2 oetoesan2 dari Tgl. dan Pml ditangkap, – Sw. [Soewignjo]: Siapa pengchianat?

W [Widarta]: Nica dan Djepang akan mereboet kabinet Sjahrir – Djepang mempergoenakan T.M. (Hoesin-Hassan) berkedoedoekan di Dk.

---

[3]Mungkin ini berarti bahwa dalam pertempuran melawan Inggris, Surabaya merupakan sukses, tetapi Semarang suatu kegagalan, dan apa yang dilakukan mengenai mempersenjatai rakyat.

[4]Ini mungkin berarti bahwa di dalam tentara pembebasan (TKR), partai bekerja secara diam-diam lepas dari pandangan Sekutu (Inggris dan Belanda). TKR dilukiskan juga oleh para anggota kabinet Republik pada waktu itu sebagai semacam polisi, yang tidak membahayakan tugas Sekutu. Sebutan ini juga bisa berarti bahwa tentara di mana pun hanya condong bertindak demi kepentingan kekuatan-kekuatan asing.

[5]Maksudnya Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) yang berpangkalan di Surabaya.

[6]"S" berarti Sosrok atau Susuk sebutan untuk S.K. Trimurti, istri Sayuti Melik Sosrok berarti menyingkirkan barang-barang yang dianggap kotor, nyusruk berarti merugikan. Misi S.K. Trimurti adalah melawan Tiga daerah pada waktu itu.

[Jakarta] di Sb. [Surabaya] palsoe[7] – Mevr, Sosrok. – jg. berpengchianat – T.M. 6 boelan sebeloem Djepang djatoeh. Sajoeti Melik Mr. Gatot[8] Soebard. [Mr. Subardjo] Djodjo pr.[9] Boedi Soetjitro[10] – korban Smg. [Semarang] dari Sajoeti Melik – G.R.I.[11] P.R.I. [12] Asia [?]. partai rakjat rev. (P.S.R) – Ch. Kartomoeheri cs Soebagio Pekl.[13]

Adam Malik, Karni – Nica – fonds v.d. Plas Wedono keatas.

Boepati ± 25000.[14]–dibantoe Proc. Gen. [Procurator General] Abikusno [Tjokrosujoso] cs – P.K.I. Joesoef Dkt. [Jakarta] Djepang – Strijdprogram tidak ada. Staatsprogram nasional – Siaran pam-

---

[7]Hoesin (Husen) adalah nama samaran Tan Malaka sebelum Agustus 1945 di daerah tambang batubara di Bayah (Banten Selatan) dan dalam tugasnya ke Jakarta, Sukraini dan Khaerul Saleh mengetahui dengan nama itu kemudian (mereka tidak tahun identitas sebenarnya). Hassan Murba adalah nama seseorang penulis pamflet anti-Syahrir menjelang akhir 1945. Banyak yang mengira ini Tan Malaka, tapi dia selalu menyangkalnya. Pada waktu itu Syahrir berusaha mencari informasi apakah betul Tan Malaka ditangkap oleh Jepang di Surabaya. Ternyata Tan Malaka palsu.

[8]Mr. Gatot Tarunamiharja, Jaksa Agung pertama Republik Indonesia dekat hubungannya dengan Subarjo.

[9]Joyopranoto adalah anggota kelompok pemuda Kaigun, seorang pelaku dalam kasus penculikan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok, anggota KNIP pertama, anggota tim Nishijima – Evatt Lankay – Yusuf Hassan yang pergi ke Surabaya membantu Bung Tomo mendirikan BPRI.

[10]Budi Sucitro adalah anggota Partai Sosialis dalam KNIP pada awal 1946. Ia adalah utusan KNIP Agustus 1945 untuk membentuk KNI di Bojonegoro, dan juga utusan Hatta dalam pertengahan Oktober yang dikirim ke Bojonegoro untuk meyakinkan bahwa KNI dan residen (Hendromartono) melaksanakan instruksi khusus Hatta tentang hukum dan ketertiban. Namanya disarankan sebagai seorang calon Residen Pekalongan pada awal November 1945. Tahun 1960-an, Prof. Mr. Budi Sucitro adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dan Universitas Airlangga, Surabaya.

[11]Ini mungkin Gerakan Rakyat Indonesia yang biasanya dalam sejarah PKI disebut Gerindom-nya Aidit semasa perang. Atau mungkin juga maksudnya Gerakan Pemuda Republik Indonesia (Gerpri)-nya S.W. Lagiono di Yogyakarta.

[12]Pada waktu itu terdapat banyak PRI (Pemuda Republik Indonesia) di Indonesia kebanyakan tak ada hubungannya satu sama lain.

[13]Kartamuhari adalah tipe pemuda Jakarta, mungkin dari asrama Menteng 31, salah seorang anggota kelompok Syahrir yang pergi ke Serang menemui Tan Malaka pada bulan September 1945. Ia dan Suparman mendirikan Partai Rakyat Revolusioner di Cirebon pada 10 November 1945. Barangkali Subagio Maguntaharjo menginginkan membentuk cabang partai itu di Pekalongan.

[14]Uang tersebut diberikan kepada Amir Syarifuddin untuk mendirikan gerakan di bawah tanah oleh Charles van der Plas, gubernur Jawa Timur, lewat P.J.A. Indenburg, dirjen Departemen Pendidikan zaman Belanda.

flet/P.K.I Moesa [Musso] 1936 – plan Djepang 10 th.[15] – Tjaranja membendoeng volksfront.[16] – T.K.R. boeat mempertegoeh Keningratan di Dk. (Yogyakarta?)

K.M. [K. Midjaja]:Staande leger, kendaraan, persendjataan Organisasi Rakjat, benzine haroes diroending M. Pert [Markas Pertahanan]. Sekarang soal Economie –

Widarta: oesoel schema pemerintahan tjonto di Jenan.

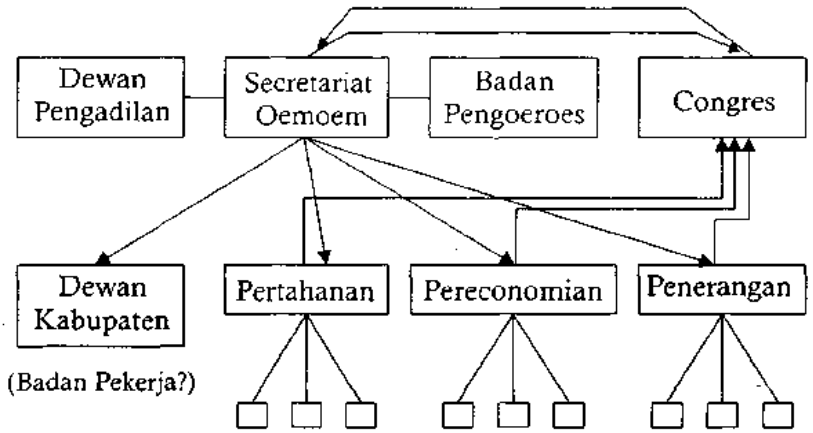

(Tiga Daerah)

Soal economie perang

K.M. [K. Midjaja]: pemboekaan kelangsoengan peroendingan tgl. 16/11.1945. Minta oesoel2 dari masing2 daerah. dimoelai sdr. [dari] Brebes.

Bbr. . . pendapat 1. economie Djepang dirobah.
Menoeroet faham kita Economie di reboet Rakjat. setjara cooperatif. Bahan makanan djoega [jangan?] sampai ketangan Nica. 2. membatas export.

Tegal. Pertama haroes tahoe soember2.
Economie. – 1. setjara Cooperatif – ?
Economie oentoek Rakjat – Pedagang2 di biarkan sadja apa tidak?

[15]Mungkin ini mengacu kepada sebuah rencana Jepang untuk kembali ke Indonesia.

[16]Barangkali mengacu kepada Persatuan Perjuangan Tan Malaka.

Peroesahaan2 boekan melik Negri. – bagaimana?

3. Sebeloem Mr. Besar djatoeh ada tjabang P.T.E.[17] tjap apa? Keoeangan di Tegal beloem sehat karena poetoes berth. [berhubungan] dgn. Pkl. Pembagian makanan antara kota dan desa, apa bisa? Stock [persediaan] jg. njata 5.000 ton beras oentoek 700.000 – pendoedoek tjoekoep ± 2 boelan.

Pml. Idem Tegal.

W. [Widarta]: [Di Pemalang] semoea tenaga di P.R.I. [API] sekarang ada Dew. Pem. [Dewan Pemerintah] persatoean segala tenaga hanja bangsa Arab. – perekonomian djoega ditangan P.R.I. – dibantoe [oleh?] Negara. Di Sb [Surabaya] jg. bertempoer tidak sempat hal econom. Strategi perjoeangan kita mempertahankan Indonesia djangan selekas-lekas bertindak seterang-terangnja[18] – S.R.[19] dan Jenan pedagang part. [partikulir] masih ada. Sikap kita adaken blok terhadap particulirisme[20]. Peroesahaan2 kalo boleh disewa – Kita sikap keras terhadap jg. menghalang-halangi sikap terhadap P.T.S. [P.T.E.?] – Keadaan di Sb. [Surabaya] Disini perloe di desa2 haroes ada Cooperasi.

Tgl. [Tegal]: Organisator oentoek mengoempoelkan bahan makanan. – dan di waktoe perjeklik.

Bbs. [Brebes]: P.T.E. dan sifat Djepang tidak ada. di Bbs tangan pmrt. Satoe panitya rentjana pembagian kepada Rakjat. Cooperasi di pimpin Pmrt [Pemerintah] – oentoek berdagangan di tangan Rakjat. Soal perjeklik – Badan keamanan laloelintas – sebagai dasar masing2 daerah.

K.M. [K. Midjaja]: diringkas 1. Pmrt 3 daerah – menentoekan harga. 2. Menghalangi export 3. Cooperasi2 di kota dan di desa.

S. [Pemimpin dari Brebes]: Program economie jg. effending.[?]

---

[17]PTE (Persatoean Tenaga Economic) ini ada di Pemalang, tetapi sejauh saya ketahui tidak ada di Tegal atau Brebes. Ada sebuah cabang besar di Bandung dan satu di Solo di bawah pimpinan Subkhan.

[18]Garis pada waktu itu adalah menciptakan front persatuan yang luas dengan PKI sebagai anggota di dalamnya.

[19]Mungkin SR berarti Sovyet Rusia, sebab diperbandingkan dengan Yenan (Cina).

[20]Ini berarti menentang orang yang mengejar kepentingan sendiri di luar kepentingan perjuangan dalam arti luas.

Tgl.: Apakah C. [koperasi] bisa lekas dibentoek sebeloem perjeklik?

Soeleman: Hal keoeangan. Penimboenan wang di bank sebab perhoeboengan poetoes. Stock 21/2 milioen – perloe disingkirkan.–

Soal penerangan

K.M. [K. Midjaja]: bagaimana tjaranja – terserah. –

Pml. [Pemalang]: Alat2 oentoek badan penerangan. radio senders – auto – dll.

Pml. Soeleman: bensin tinggal 5000 litre. –

djangan kawatir pabrik Tjomal sanggoep bikin benzin boeat dll. kapal oedara.[21]

K.M. [K. Midjaja]: Badan2 di persilahkan beroending sendiri.

Ngaso dj. 2.30 sore.

Dimoelai lagi dj. 4 sore.

Menerima verslag dari peroendingan2 badan2.

B. [Badan] Pertahanan

Benzin. 1. Mendesak pabrik Tjomal bikin benzin sebanjaknja.
2. Mengadakan reserve dengan segala alat2 oentoek menjimpan benzin di taroeh di daerah Pml. –
3. Pml. [Pemalang] tempat reserve segala2nja.
4. Djalan ke Pwk [Purwokerto] di toetoep dgn menggali lobang jg. selebar2nja di desa Kepetek [Belik].–

Kendaraan. Mengadakan pemoesatan kendaraan. Spoor pabrik dipergoenakan. Moelai Btg. [Batang] – Tjirebon – Brobag dan dokar2. –

Tentara 1. Tentara jg. pasti haroes di adakan di Tegal. Adw. [Adiwerna] Slw. [Slawi] Blp. [Balapulang] Mgs. [Margasari]. – Poesat M. Kw. Di Slawi dari 3 daerah.[22]
2. Markas 3 daerah di Slawi.
3. Membentoek barisan algodjo.[23]

---

[21]Jepang telah mengubah pabrik gula Comal Baru menjadi pabrik menghasil butanol, sejenis alkohol untuk bahan bakar pesawat terbang.

[22]Mungkin "M. Kw." berarti "markas kekuasaan", kata-kata yang lazim digunakan pada waktu itu.

[23]K. Mijaya belakangan mengatakan bahwa maksud Barisan Algojo adalah

4. Reserve benzin bila terantjam haroes divernietigd biaja di pikoel 3 daerah.

Badan Economie. –

1. Mengadakan centeralisator oentoek 3 daerah.
   Tempat menoeroet Sec2 gaboengan daerah [Sekretariat2 GBP3D]
2. Pembagian dan pembelian bahan makan dll. diatoer olih badan Centraal.
3. Peroesahaan2 jg ada poesatnja di decentraliseer.
4. Perekonomian di Cooperasikan kepada koem belah [rakyat kecil] dan tekniknja dari sdr. Pranjoto Pkl. [Pekalongan] pengangkoetan darat laoet oedara.
5. Kounso[24] soepaja djatuh di tangan Pmrt. [Pemerintah]
6. Fonds kemerdekaan soepaja di perloeas sampai ke Natura dan fonds perjoeangan soepaja terdiri dari bahan makanan. pengandjoeran memperbanjak hasil boemi. –
7. Menjesoeaikan prodoeksi2 pabrik2 dgn keboetoehan sekarang.
8. Nama kantor perekonomian pake nama kantor Perek. Rakjat (K.P.R.).
9. Tiap2 pengiriman bahan makanan haroes dan taroeh loear 3 daerah ada idzin kantor K.P.R. daerah.
10. Mengandjoerkan memperhebat huis-industri, memperbanyak tanaman kapas di pekarangan.
11. Soepaja di masing2 desa di bentoek B.P.K.P.L.[25]
12. Segala badan2 perekonomian di leboer djadi satoe organisasi Badan Coop. Rakjat Indonesia. –
13. Alat2 prodoeksi di sewa oleh Pmrt. [Pemerintah] –

Badan Penerangan

1. Pelatih Pemoeda oentoek memberi penerangan di seloeroeh daerah. –
2. Pokok penerangan menginsjafkan Rakjat tentang politik, Soc. [Sosial] dan economie.

untuk melawan NICA dan agen-agen NICA. Pertanyaan No. 36, Proces verbaal, 25.4.46. Proc. Gen.

[24]Kounso adalah perusahaan angkutan pemerintah Jepang.

[25]Tidak jelas kepanjangan BPKPL, mungkin sebuah koperasi.

3. Sikap dan kewajiban Rakjat sebagai bangsa jg merdeka.
4. Propaganda meroepakan pelopor dari tentara, oleh karenanja actie tentara haroes sesoeai dgn. actie propaganda, begitoepoen perboeatan Pmrt. [Pemerintah]
5. Adakan propaganda di daerah jg. didoedoeki moesoeh.
6. Peralatan persmobil perloe diadakan.

Oesoel sdr. Noeh: Menjediakan sopir2 perampas kendaraan Rapw. [RAPWI?][26]

Hadlirin: Moefakat – (Perth) – [?]

Oesoel sdr. W. [Widarta]: mengadakan penangkapan terhadap pengatjau masjarakat.

Hadlirin: Moefakat. (Pert.) [?]

K.M. [K. Midjaja]: Secretariaat perloe di bentoek?

Hadlirin: Moefakat.

Poetoesan: Poesat di Slawi.
Secr general: Sdr. K. Midjaja.
Hakim tangsi [?]: Sdr. Amir.
B.P. Oe [Badan Pengurus Oemoem]: Sdr. M. Noeh.

II. Sikap terhadap Pkl. [Pekalongan]
poetoesan: candidaat Resident.
Sdr. Sadjio.
tgl. 26/11/1945 K.M. [K. Midjaja] ke Poerw. [Poerwokerto].
Tentang hal2 berkenan dgn. Pkl. [Pekalongan] seperti keoeangan dan Adm. [Administrasi] perhoeboengan dipoetoes.

Hal interniran.[27]

pemindahan terserah keloear B.P. [Badan Pekerja] dan penerangan kepada pendoedoek Badan [Pekerja?] hal interneeran.

III. Sikap B. pemberontak [BPRI] poesat Sb – Tjabang di Pkl. [Pekalongan] ranting Tgl. [Tegal]

Poetoesan: di basmi dan orang2nja di rangkep. –

[26]RAPWI "Recovery of Allied Prisoners of War and Interneers" dibentuk sesudah penyerahan Jepang untuk memberi bantuan darurat (makanan, dll) kepada tahanan perang Jepang di Jawa dan Sumatera.

[27]Ini adalah para pangreh praja yang ditahan yang ditempatkan di Penjara Tegal dan Pemalang pada waktu itu.

Gaboeng Badan2 [GBP3D] di Tegal sebagai perh. [perhubungan] dgn Secr. [Sekretarian] [di Slawi]

IV. Amri [AMRI] dengan [sebagai] B. Perw. [Badan Perwakilan] Rakjat.

W [Widarta]: Memenoehi oendang2 Intern. [internasional] oentoek bahan dipl. [diplomasi] ke loear Negri. fihak T.M. [Tan Malaka] beroesaha soepaja B.W.[28] bisa merobohkan kabinet Sjahrir. Parsi 100% Moscow. Pesindo – federatif lichaam [badan] dipegang 100% olih kita. –

Amri tetap nama Amri dan lekas2 mendirikan Parsi[29]

Poetoesan: Pelopor [Barisan Pelopor Tegal] djadi Parsi. – Hal T.K.R. di tegal. –

B.P. [GBP3D] memberi mandat kepada Sdr. Noeh dan Soesmono oentoek beroending dgn. wkl. Dk. – [Yogya] terboekti kliroe – poetoesan:

Mendjawab penolakan dgn. tilgram a.n. 3 daerah.
Toetoep dj.6.30

[28]B.W. bisa berarti Bandi Widarta, nama lengkap Widarta. Andaikata terjadi bentrokan fisik antara TKR dengan Tiga daerah hal ini bisa mengganggu stabilitas polotik Pemerintah Syahrir. Ada anggapan bahwa Tan Malaka bergerak di Banten dengan tujuan ini juga (Kegiatan S.K. Trimurti di Pekalongan mungkin ada hubungannya dengan usaha Tan Malaka tersebut).

[29]Partai Sosialis Indonesia adalah partai yang didirikan Mr. Amir Syarifuddin pada tanggal 1 November 1945.

LAMPIRAN D

Toeroenan

TOENTOETAN RAKJAT 3 DAERAH BREBES, TEGAL, PEMALANG TERHADAP PEMBERESAN DAERAH PEKALONGAN

Mengingat perdjoeangan kita jang kian hari kian mendahsjat, maka tiap-tiap daerah haroes mendjadi daerah jang sehat, kokoh, koeat dan siap oentoek menghantjoer tiap-tiap oesaha jang akan mendjadjah tanah air kita, disamping kita menjoesoen pemerintah jang teratoer dan ber-dasarkan sosialisme.

Oleh karena itoe maka kami atas nama rakjat 3 daerah terseboet memadjoekan toentoetan terhadap pemerintah poesat daerah Pekalongan, T.K.R., Barisan Pelopor, Pesindo, Hisboellah, Sabilloelah, Barisan Pemberontak, Polisi, Lasjkar tani dan boeroeh dan rakjat seloeroehnja oentoek menjesoeaikan daerah kaboepaten dan Kota Pekalongan dengan 3 daerah terseboet soepaja daerah Pekalongan tetap mendjadi satoe keresidenan jang berfaham dan berideologie satoe dengan tjara seperti dibawah ini:

1. Selekas moengkin hendaklah diangkat mendjadi residen Pekalongan saudara SARDJIO dari Poerworedjo bekas anggota Tjuuo Sangi In.
2. Mengganti Kepala2 Pamong Praja dan Kepala2 djawatan lain berdasarkan kedoelatan rakjat.
3. Mengadakan pembersihan terhadap orang2 jang berbaoe Nica dan pro pendjadjahan.

   Oentoek menjelenggarakan soal di atas itoe kami telah menjediakan beberapa tenaga oentoek membantu. Djika dalam tempo 3 hari terhitoeng moelai tanggalnja soerat toentoetan ini kami beloem menerima kesanggoepan jang resmi (opsil) maka Badan Perdjoeangan 3 Daerah dan rakyat Pekalongan dan Batang jang sealiran dengan kami akan terpaksa menentoekan sikap jang pasti sedang pemerintah daerah nanti bertanggoeng djawab terhadap rakjat akan akibatnja.

Tegal, 5 Desember 1945.
Gaboengan Badan Perdjoeangan 3 Daerah d/a Markas
A.M.R.I. Tegal
Jang ambil toeroenan,
Markas Angkatan Laoet Djawa-Tengah,

Jang mengambil toeroenan kedoea,
(tak terbatja)

Toeroenan

Pemalang, 9 Desember 1945

Badan Perdjoeangan Tiga daerah
(Tegal-Brebes-Pemalang)

Kepada
Sdr. R.M. Soeprapto, wakil Residen
Pekalongan di Pekalongan

Merdeka!

Dengan poetoesan soeara boelat dari hasil peroendingan Badan Perdjoeangan tiga daerah (Tegal Brebes dan Pemalang) beserta Badan Perdjoeangan Pekalongan dan Batang dengan beberapa poetoesan-poetoesan dari Badan2 Pesindo, Hisboellah, Masjoemi dan lain2 badan2 dari Sragi, Batang, Pekalongan dan barisan Banteng bertempat di Kaboepaten Pemalang pada hari Minggoe tg. Terseboet diatas (9-12-1945) memoetoeskan:

1. Pemerintahan Poesat Pekalongan dengan segera haroes diserahkan pada rakjat.
2. Sdr. Sardjio diangkat djadi Residen Pekalongan.
3. Pangreh Praja dan lain2 kepala djawatan jang tidak mempoe mengikoeti soesoenan pemberontakan sekarang haroes meletakkan djabatannja.
4. Pemimpin pemerintah haroes disesoeaikan dengan soesoenan pemerintah tiga daerah (Tegal, Brebes dan Pemalang).
5. Segala pekerjaan jang bertalian dengan politik, sosial dan ekonomi soepaja diserahkan dengan beres pada staf tiga daerah (Tegal, Brebes dan Pemalang), besoek pagi hari Senen tanggal 10-12-1945.
6. Pangreh praja dan lain2 kepala djawatan jang telah meletakkan djaba-

tannja tidak diperkenankan meninggalkan tempat kediamannja sebeloem ada keberesan terdjamin.

7. Diminta wakil Residen (Sdr. Soeprapto) sebeloem segala sesoeatu berdjalan beres dari staf pengoperan badan perdjoeangan tiga daerah (Tegal, Brebes dan Pemalang) soepaja mendjamin keselamatannja staf terseboet, dan keamanan daerahnja.

Gaboengan perdjoeangan tiga daerah
(Brebes, Tegal dan Pemalang)
Secretariat

(Ketoea) (Penoelis)

Setoedjoe & moefakat dan menjangkoepi:
Wk. Residen Pekalongan.
Pesindo Batang
Pesindo Sragi
B.B.I. Pekalongan
Kepolisian Pekalongan
Hisboellah Pekalongan

Hisboellah Sragi
Pesindo Pekalongan

BadanPerdjoeangan Pekalongan dan Batang,

Penoelis Ketoea

Barisan Banteng Pekalongan
Badan Pemberontakan Pekalongan
Badan Pemberontakan Alim Oelama Pekalongan

PENGOEMOEMAN PEMERINTAH REPOEBLIK DAERAH KERESIDENAN PEKALONGAN NO. 1/B

MERDEKA!

Memenoehi toentoetan ra'jat 3 daerah Brebes, Tegal dan Pemalang terseboet dalam soerat toentoetannja tanggal 5 ini boelan, maka pada tanggal 9 boelan ini, pemerintah Daerah Pekalongan telah menjerah dan djatoeh ke tangan ra'jat.

Dengan demikian – tepat sekali dengan kehendak ra'jat - pemerintah daerah keresidenan Pekalongan haroes meroepakan pemerintahan jang berdasarkan kera'jatan dan kekeloeargaan.

Oleh karena itoe dalam pergaoelan sehari-hari, dalam pertjakapan ataupoen toelisan hendaklah selaloe mempergoenakan perkataan-perkataan jang dapat membangoenkan rasa ketjintaan dan persaudaraan mitsalnya: Bapak Residen, Bapak Boepati, Bapak Assisten, Saudara, Boeng dll (Perkataan "Padoeka" dan "Hamba" sama sekali tidak boleh dipakai).

Peroebahan-peroebahan seperti diatas itoe tidak berarti bahwa kita haroes menjimpang dari garis-garis kesopanan.

Pekalongan, 11 Desember 1945,

Bapak Residen,
SARDJIO

RIWAYAT HIDUP PELAKU SEJARAH

AMIR lahir di Songgom, Brebes, 12 Agustus 1907, putra Noto Atmojo, seorang mantri ukur tanah yang kemudian pindah ke Pemalang menjadi pengawas Monopoli Pemerintah Kolonial Candu dan Garam. Berpendidikan HIS Pemalang (bersama Suwignyo). Sekitar tahun 1923 ketika menjadi juru tulis pabrik gula Comal Baru, ia menjadi anggota PKI ranting Comal pimpinan Suwignyo. Ditangkap pada tanggal 12 November 1926, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, yang dijalani di penjara Pemalang, Glodok (Jakarta), Pemekasan (Madura), Tanggerang, dan Cipinang (Jakarta). Setelah bebas, ia menjadi anggota kelompok kecil kaum pergerakan radikal di Pemalang. Pada tahun 1930-an dengan nafkah hidup yang didapatkannya sebagai tukang emas. Pada akhir 1941, ia ditangkap dan dikenai penahanan sementara oleh Asisten Residen Belanda atas tuduhan "kegiatan ilegal," sampai dibebaskan oleh Jepang. Selama masa pendudukan ia memimpin sel PKI bawah tanah Pemalang. Pada tahun 1945 ia memberikan kursus politik kepada para pemuda API/PRI Pemalang, dan wakil Pemalang dalam Badan Pertahanan dan Penerangan GBP3D serta penasihat hukum sekretariat GBP3D. Ia menjadi anggota Staf Pengoperan Residen Sarjio awal Desember 1945, ditangkap oleh TKR, dan merupakan salah seorang dari enam orang yang diadili di Pekalongan dalam bulan Maret 1947, dan akhirnya dibebaskan ketika tuduhan itu digugurkan pada tanggal 18 Juli 1947. Ketika Aksi Militar Belanda pertama ia menjadi anggota TNI Masyarakat (yang didirikan oleh Amir Syarifuddin) dan ikut gerilya. Setelah revolusi fisik, Amir kembali ke Comal, memberikan kursus Marxisme dan membantu mendirikan PKI Komite-seksi Pemalang pada tahun 1951. Tahun 1951-1959 ia memimpin SMP Nasional di Comal, dan merupakan salah seorang calon PKI dalam Pemilu 1955 untuk konstituante. Selain itu juga menjadi anggota Dewan. Pemerintah Daerah Pemalang pada masa itu. Tahun 1959-1961, ia keluar negeri mengunjungi Albania dan Moskow. Sekembalinya dari luar

negeri, ia mengajar pada Akademi Aliarcham dan bekerja pada Yayasan Pembaharuan sebagai penasehat penerjemah. Dari Desember 1965 sampai wafat pada bulan Mei 1978 ia tinggal di Cirebon.

K.H. ABU SUJA'I lahir di Desa Pacul sekitar tahun 1904. Ia anak ke-13 dari 18 bersaudara (dari dua ibu). Tahun 1912 ia mengikuti ayahnya naik haji. Karena ayahnya tak memperbolehkan anak-anaknya belajar pada sekolah Belanda, Abu Suja'i memperoleh pendidikan dari berbagai pesantren di Cirebon, Solo, Jombang, dan Majalengka sampai tahun 1920, dan kemudian memasuki Sekolah Serikat Islam di Tegal. Tahun 1922 ia masuk pesantren terkenal di Panggul Tegal pimpinan K.H. Muklas, tapi meninggalkannya pada tahun 1925 dan mengembara di pesantren-pesantren Kaliwungu, Semarang, Solo, Jombong, dan Tebuireng. Di Majalengka ia masuk Sekolah Guru Partikelir untuk dua tahun lamanya, lalu masuk Perserikatan Ulama yang disponsori PSII, yang didirikan pada tahun 1927 di Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Pada tahun 1930-an ia kembali ke Desa Pacul dan mendirikan sebuah sekolah. Aktif dalam PSII dan pada tahun 1932, ia dipenjarakan tujuh bulan karena melanggar undang-undang monopoli negara atas pembikinan garam setelah kedapatan membikin garam sendiri. Pada tahun 1932 ia kembali dipenjara 40 hari lamanya karena melawan pengambilan contoh darah dari jenazah (dalam usaha pemberantasan penyakit pes), dan pada tahun 1939 sekali lagi dipenjara selama 3 bulan karena pidatonya dianggap melawan pemerintah (*spreekdelit*). Ia menolak bekerja sama dengan Jepang, yang menginginkan ia bekerja di Kantor Urusan Agama Tegal. Bulan November 1945, hanya 33 hari setelah pembebasannya dari penjara, ia diambil oleh AMRI Talang dan dilantik sebagai Bupati Tegal, yang dijabatnya sampai Aksi Militer Belanda Pertama, dengan mengungsikan pemerintahannya ke pedalaman. Karena dituduh menjadi pendukung Darul Islam, pada tahun 1950 ia dihentikan "secara tidak hormat" dari jabatannya, kehilangan hak pensiun, dan dipenjarakan di Nusa Kambangan dari 1950 sampai 1955.

BESAR MARTO KUSUMO S.H. dilahirkan di Brebes pada tanggal 8 Juli 1894. Ayahnya memberi nama 'Besar' karena ia lahir pada bulan (kalender Arab) Besar (bulan Haji). Sejak umur dua tahun ia di bawa dan diasuh oleh seorang wanita Belanda, Maria Hellvie. Ia disekolahkan ke ELS (sekolah dasar untuk orang Eropa) tujuh tahun dan melanjutkan ke HBS Semarang. Setelah tamat, ia memasuki Sekolah Tinggi Hukum yang dibuka pada ta-

hun 1913 di Jakarta (Batavia) sebagai angkatan pertama. Dari tahun 1919 sampai November 1923, ia belajar di Fakultas Hukum Universitas Leidin. Sesudah kembali ke Tegal pada tahun 1924 bekerja sebagai pengacara. Selama pendudukan Jepang, ia menjadi walikota, kemudian bupati di Tegal. Bulan Mei 1945 dia diangkat menjadi asisten residen (Fuku Shuchokan) di Pekalongan, lalu residen pada September 1945. Ia meninggalkan Pekalongan pada tanggal 5 November 1945, dan kemudian diangkat sebagai pejabat tinggi Departemen Dalam Negeri (kemudian di Purwokerto) sebagai sekretaris Mr. Sumarman (Sekjen Departemen Dalam Negeri) yang dijalaninya dalam masa selebihnya dari revolusi fisik. Setelah revolusi fisik, ia lama menjabat sebagai Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman.

K. HOLLE lahir pada tanggal 9 September 1914 di Desa Ameth, Pulau Nusalaut, Ambon. Ayahnya, Jonathan Holle, adalah seorang pendeta menginginkan anaknya mengikuti jejaknya. Setamat MULO Kristen di Ambon pada tahun 1932, ia dikirim ke Malang untuk memperdalam bahasa Belanda sebelum memasuki Pusat Pendidikan Zending Protestan di Oestgeest, Negeri Belanda. Tetapi karena bahasa Belandanya tidak dapat diperbaiki, maka ia terpaksa memasuki Sekolah Kehutanan di Bogor. Ia bekerja sebagai mantri hutan jati ketika Jepang datang. Semasa pendudukan itu ia masuk PKI bawah tanah. Pada 1958 PKI menginginkan Holle menjadi ketua Komite Daerah Besar PKI Ambon dan mewakili Ambon dalam CC-PKI, tetapi ia tidak pernah melupakan apa yang diperbuat partai terhadap Widarta. Seperti pemimpin-pemimpin PKI bawah tanah lainnya, ia memasuki Sarekat Buruh, membantu mendirikan Sarbuksi (Sarekat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia) dalam tahun 1951. Ia aktif mewakili pemimpin Sarbuksi dalam SOBSI tahun 1964, lalu ia mengundurkan diri.

K.H. ISKANDAR IDRIS lahir pada tanggal 17 Februari 1901 di Desa Kedunghalang, Semplak, Kabupaten Bogor. Ia memperoleh pendidikannya di sekolah Jamiyad Kair dan Al-Irsyad, dan datang di Pekalongan tahun 1921 untuk mengajar di sekolah Al-Irsyad setempat. Dalam tahun 1925, ia mendirikan usaha batik di Kedungwuni, dan pada tahun 1931-1936 mengajar di HIS Muhammadiyah di Tegal, dan kemudian mengajar bahasa Arab di Pekalongan. Sejak tahun 1936, ia bekerja sebagai agen setempat Asuransi Bumi Putra. Semasa itulah ia menerbitkan ulasan atau tafsir tentang Al-Quran dan lain-lain buku agama Islam, dalam bahasa Indonesia maupun Jawa. Dalam kepemimpinan Muhammadiyah cabang Pekalongan dari ta-

hun 1924, ia pernah menjadi ketua dari tahun 1923 sampai tahun 1931 dan sekali lagi tahun 1938. Dalam tahun 1931, ia menjadi ketua Muhammadiyah Pekajangan dan mendirikan suatu perkumpulan dagang serta mengajar para anggotanya pengetahuan dan praktik dagang. Ia dipilih Jepang menjadi daidancho batalyon Peta Pekalongan. Waktu itu kalangan priyayi Pekalongan menganggap pengangkatan seorang "rekening loper" ke suatu jabatan yang tidak memadainya. Ia menjadi komandan Resimen ke-17 TKR Pekalongan, jabatan dipegangnya sampai ia ditangkap di Talang pada tanggal 3 November 1945. Setelah operasi kontra TKR terhadap Tiga Daerah berakhir, ternyata ia tidak kembali dalam jabatan semula, namun selama gerilya ia memimpin pasukan Hizbullah di Wonosobo. Pada akhir hayatnya ia tinggal di Jakarta sebagai letnan kolonel purnawirawan.

KARTOHARGO, lahir pada tanggal 14 Juli 1904 di Bantarpolang (Pemalang). Ayahnya, Kartoharyono, adalah asisten wedana. Setelah menamatkan HIS di Pemalang tahun 1917, ia menyelesaikan pula pendidikannya di Sekolah Guru Partikelir di Gunung Sari, Jakarta, yang diasuh oleh Associatie van Oost en West (Perhimpunan Barat dan Timur). Semasa di Jakarta (1917-1923) ia menjadi anggota Jong Islamieten Bond, kemudian menjadi anggota pengurus Jong Java dan kenal pada Mr. Mohammad Yamin dan Mr. Sartono. Pada 1924 ia kembali ke Brebes, memasuki Budi Utomo, dan mengajar di sekolah Budi Utomo di sana. Dalam tahun 1926, atas permintaan Taman Siswa Pemalang, ia menjadi guru di sekolah Dasar Taman Siswa Pemalang, sebelum ia pindah ke Weleri (Kendal) untuk mengajar di sekolah Budi Utomo di sana. Di Weleri ia tak menyetujui sekolah ikut arak-arakan merayakan hari lahir Sri Baginda Ratu Wilhelmina, lalu kembali ke Brebes dan menjadi wartawan masa itu. Setelah mengajar di Arjuna School (sekolah milik Parindra) di Bantul (Yogya), lalu membuka satu cabangnya di Sidareja (Cilacap). Kembali ke Brebes ia mengajar di HIS Muhammadiyah, kemudian lalu mendirikan sebuah sekolah Taman Siswa, karena katanya, "Saya suka ajaran Ki Hajar Dewantara". Akhir tahun 1934 ia mendirikan cabang Taman Siswa di Ketanggungan dan Tanjung, dan mendirikan serta memimpin Partindo di Brebes. Ia meninggalkan dunia pendidikan buat sementara waktu dan memasuki dunia usaha sebagai kontraktor bangunan, lalu ia memulai usaha perkayuan yang membawa kebangkrutan. Tahun 1934 ia menurunkan gambar Sri Baginda Ratu Wilhelmina yang terpancang di Kelurahan tempat ia memberi kursus, dan merusakkannya. Ia dipanggil Wedana dan rumahnya digeledah. Para penguasa menemukan sebuah tulisan Kartohargo untuk ha-

rian *Pemandangan* mengenai kematian seorang mantri cacar di desa yang mencurigakan pada waktu itu dan ia juga menulis di harian *Lokomotiev* mengenai peningkatan pendidikan lurah. Wedana menahan Kartohargo selama tiga bulan. Pada tahun 1936 ia kembali mengajar pertama di HIS Radudongkal yang diselenggarakan Persatuan Guru Bantu (PGB) lalu kembali lagi ke HIS Muhammadiyah dan Schakelschool di Brebes, dan HIS di Adiwerna. Pada tahun 1939 ia bekerja sebagai mantri irigasi Durensawit (Balapulang) dan mendirikan sebuah cabang VIPIW (Vereeneging van Inlandse Personeel Irrigatie Werken). Selama masa pendudukan Jepang ia menjadi ketua Putra dan kepala Barisan Pelopor (Suisintai). Ia juga aktif di Hokokai, memimpin warung Kumiai setempat, dan memimpin serombongan romusha ke Banten Selatan. Pada tahun 1945 ia menjadi ketua KNI di Brebes dan merupakan salah seorang dari 6 orang yang diajukan ke depan sidang pengadilan Tiga Daerah di Pekalongan, dan dibebaskan pada tanggal 21 Juli 1947. Setelah revolusi fisik, ia kembali pada profesi guru dan wafat pada bulan Januari 1973.

K. MIJAYA (atau Kamijaya), yang nama sebenarnya adalah Sarjono, dilahirkan pada tanggal 7 Agustus 1909, putra Sadiman Kromorejo, petani kecil di Dukuh Baeng atau Kauman, Kecamatan Garak, Kartosuro, Solo. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat Lima Tahun di desanya tahun 1923, ia bekerja sebagai kondektur kereta api NIS di Semarang dari tahun 1926-1933 dan dipenjarakan 2 tahun lamanya sebagai akibat pemberontakan pada tahun 1926. Ia menjadi salah seorang pengurus Persatuan Buruh Kereta Api (PBKA) cabang Semarang di bawah pimpinan Jokosujono. Pada tahun 1933 ia dipecat dari NIS, karena terlibat dalam perlawanan pasif terhadap larangan bagi setiap pegawai NIS untuk memasuki PBKI. Menjelang 1935 ia menjadi pengurus PPBI (Persatuan Penganggur Bangsa Indonesia) yang berpusat di Solo. Selama tahun 1930-an ia sering mengunjungi Comal (Pemalang) dan menjalin dengan orang-orang pergerakan di sana, termasuk ibu Pri dan suaminya, Amir, pemimpin Persi (Persatuan Supir Indonesia) Pemalang. Dari tahun 1935 sampai tahun 1941 K. Mijaya menjadi redaktur harian *Mimbar Boeroeh* di Solo dan ketua COBI (Central Organisasi Buruh Indonesia). Dalam tahun 1939, ia menjadi anggota PKI bawah tanah dan menjadi Komisaris GASPI (Gabungan Sarekat Buruh Partikulir Indonesia) Solo yang berpusat di Semarang. Dari April 1942 sampai 1945 ia menjadi penanggung jawab kegiatan PKI bawah tanah di pantai utara Jawa dengan membentuk komite kota di Brebes, tegal, Pemalang, dan "beberapa kecamatan." Da-

lam tahun 1945, ia mengoordinasi badan-badan perjuangan di Keresidenan Pekalongan, dan menjadi pendiri dan ketua GBP3D dan umumnya dianggap sebagai "otak-perencana" gerakan Tiga Daerah. Diajukan ke depan sidang pengadilan peristiwa Tiga daerah di Pekalongan, dan dibebaskan pada bulan Oktober 1947 karena belanda menyerang kota itu. Selama tahun 1947-1948, ia menjadi staf Biro Penerangan SOBSI, diculik oleh faksi komunis yang menjadi saingannya dan dipenjarakan selama 3 bulan karena menjadi pengikut Widarta. Pada tahun 1948-1949, ia kembali ke Tiga Daerah lagi, aktif mengorganisasikan PKI bawah tanah melawan Belanda di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kelompok-kelompok ini berada di bawah otoritas CC-PKI dalam bulan Oktober 1950. Tahun 1950, ia menjadi anggota pengurus Sarekat Buruh Bea Tjukai (SBBT). Tahun 1953 ia melakukan kunjungan secara luas di Sumatera dan kemudian ke Makassar. Dalam bulan Maret 1954, ia membentuk Rukun Kerja Sama (RKS) pegawai negeri, menjadi sekretarisnya dan anggota utusan serta terlibat secara aktif dalam Departemen Keungan, mengoordinasikan Sarekat Buruh dan anggota Sarekat Sekerja. Pada tanggal 21 Januari 1958 ia menjadi anggota pimpinan Badan Kerja Sama (BKS) Buruh Pusat, ia ketua Bagian Ekonomi BKS cabang dan anggota pleno Dewan Pertambangan Buruh mewakili kantor pusat RKS. Pada tanggal 10 Februari 1959, ia diangkat menjadi anggota pleno Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNIB). Dalam bulan Mei 1959 ia menjadi anggota utusan RKS Pegawai Negeri ke Peking, Hangchow, Wuhan, Nangking, dan Canton dan lain-lain, dalam perjalan melalui Manila, Hongkong, Bangkok, dan Singapura. Pada awal tahun 1960-an ia menulis tentang Peristiwa Tiga Daerah untuk Akademi Ilmu Sosial Aliarcham, yakni akademi yang dibentuk CC-PKI untuk mendidik para pekerja teori. Dia anggota Komite Verivikasi CC-PKI, dan juga anggota Lembaga Sejarah CC-PKI yang menyusun naskah buku *20 Tahun di Bawah Tanah* yang kini ikut menyumbang direhabilitasinya Widarta oleh Politbiro PKI secara tidak resmi, dengan memberi nama Institut Widarta kepada yang semula dikenal sebagai sekolah Partai Central (SPC), yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan teori bagi para fungsionaris partai dan kader-kader, dan yang secara organisatoris bernaung di bawah manajemen Akademi Ilmu Sosial Aliarcham (AISA). Pada tanggal 24 Mei 1965 ia diakui sebagai Perintis Kemerdekaan oleh Departemen Sosial. Setelah ditahan enam bulan lamanya di kamp CPM Guntur, K. Mijaya meninggal pada tanggal 6 Maret 1966, pada hari yang sebenarnya ia akan dibebaskan oleh yang berwajib.

MUHAMMAD NUH lahir di Tegal dan masuk PKI pada tahun 1925. Pada tanggal 17 November 1926, ia dijatuhi hukuman penjara, yang dijalaninya di Pekalongan, Glodog, dan Pamekasan. Pada tahun 1931 ia dibuang ke Boven Digul dan kembali pada tahun 1935. Sampai tahun 1942, ia terlibat dalam apa yang ia lukiskan sebagai "kegiatan subversif". Pada tahun 1942 ia ditangkap Jepang di Semarang karena dituduh terlibat dalam kegiatan gerakan antifasis dan meringkuk di penjara Jurnatan. Setelah dibebaskan, ia menjadi chutaicho Barisan Pelopor Tegal dan sebagai akibat pergeseran kepemimpinan, setelah proklamasi ia menjadi ketua Dewan Barisan Pelapor, yang merupakan badan perjuangan terbesar di Kota Tegal. Ia memainkan peranan penting dalam pembentukan polisi kota itu, menjadi anggota Badan Pekerja kota tersebut, dan Bagian Urusan Umum Sekretariat GBP3D. Ia kemudian ditangkap TKR, dan termasuk salah seorang dari enam orang yang diajukan ke sidang pengadilan Pekalongan dan dibebaskan pada tanggal 18 Juli 1947. Sejak itu sampai tahun 1949, ia tinggal di Bandung dan pada tahun 1950 ia kembali ke Tegal, bekerja sebagai tukang kaca mata, dan membuka Taman Pendidikan Guru/Taman Dewasa yang dipimpinnya sampai tahun 1956. Ia bukan anggota aktif PKI. Dari 1958 sampai wafatnya, ia menjadi ketua Perintis Kemerdekaan Cabang Tegal. Dalam tahun 1962, ia menulis setangkaian artikal mengenai Peristiwa Tiga Daerah dalam majalah Penelitian Sedjarah di Jakarta yang diterbitkan oleh para cendekiawan Partai Murba. Ia ditembak mati pada tanggal 9 Januari 1966, dekat Tegal, oleh unsur Islam setelah kegagalan usaha kudetanya bulan Oktober 1965.

KROMO LAWI (Lawi Sumodiharjo) yang lahir di Batang pada tahun 1900 berpendidikan Sekolah Dasar Angka Dua (5 tahun) di Purworejo dan HIS Pekalongan. Setelah belajar setahun di Sekolah Kehutanan Sukabumi, ia lalu bekerja di kereta api SCS di Batang dan Comal. Pada tahun 1920 ia masuk Sekolah Pelayaran Pribumi di Makasar, dan setamat sekolahnya itu ia membentuk Indische Marine Bond (Ikatan Pelaut Pribumi), yang salah satu tujuannya ialah memperjuangkan kenaikan upah bagi pelaut pribumi. Pada bulan November 1926, bersama beberapa anggota Indische Marine Bond (IMB) lainnya, ia ditangkap atas tuduhan mendukung pemberontakan PKI di Surabaya, dan dipecat dari pekerjaannya. Pada tahun 1927 ia pertama-tama mendirikan PNI cabang Pekalongan, dan masuk pemuda Muhammadiyah sebagai pelindung kegiatannya. Pada bulan Agustus 1929, ia berusaha mendirikan cabang Sarekat Kaum Buruh, tetapi diganggu dan dihalangi oleh polisi. Pada tahun 1930 ia dikenai penahanan sementara, dan

setelah itu ia menjadi pemimpin kepanduan Hizbul Wathan (Muhammadiyah), juga untuk melindungi pergerakannya. Pada bulan April 1931, ia membubarkan cabang PNI dan memberikan dana keuangan partai itu kepada Taman Siswa, tetapi dalam bulan Juni tahun itu juga ia menjadi ketua cabang Partindo, partai yang dibentuk Mr. Sartono setelah PNI dibubarkan. Pada tahun 1934 ia dijebloskan lagi ke penjara. Sebelum pendudukan Jepang ia menjadi ketua cabang Gerindo, dan pada zaman pendudukan Jepang ia tampil menjadi ketua Putera dan bagian usaha dari Jawa Hokokai, dan anggota Dewan Penasihat Keresidenan. Setelah Proklamasi ia menjadi anggota KNI Pekalongan, namun setelah peristiwa pembunuhan massal kenpeitai ia ditangkap atas tuduhan menjadi anggota kipas hitam (organisasi ultra nasionalis pro-Jepang bentukan Jepang), dipenjarakan, dan kemudian dibebaskan atas desakan Sayuti Melik. Sayuti Melik mengirimkan Kromo Lawi guna menemui para pemimpin Tiga Daerah, ditahan di Pemalang dan dikirim ke markas AMRI Slawi, sampai TNI menjumpainya di sana, dan menuduhnya terlibat Peristiwa Tiga Daerah, sehingga ia dipenjarakan sampai bulan Januari 1974. Pada tahun 1947, ia menjadi anggota Biro Perjuangan dan selama Aksi Militer Belanda Pertama ia memimpin gerilya Barisan Banteng di dataran tinggi Dieng, bagian dari Resimen ke-17 TKR. Karena dituduh pro-PKI pada peristiwa Madiun, maka ia pun ikut ditahan di Yogyakarta. Setelah tahun 1950 ia kembali ke Pekalongan dan memimpin PNI sampai pemilihan umum tahun 1955.

MARSUM Hr (Harjoprayitno) lahir pada tanggal 14 April 1914 di Kebumen, putra lurah Desa Kedung Winangan. Setelah menyelesaikan Schakelschool di Jakarta, ia memasuki Sekolah Dagang, kemudian ia bekerja di sebuah laboratorium farmasi pembuat tablet vitamin dengan gaji Rp. 3,00 sebulannya. Keinginannya menjadi wartawan mendorong ia bekerja di sebuah kantor berita di Jakarta dan untuk harian *Pemandangan*. Setelah setahun ia melepaskan keinginannya itu, karena "terlalu banyak tulisan-tulisan aku ditolak". Di Jakarta ia ikut KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Pada tahun 1932 ia bekerja pada BPM dan ikut ekspedisi eksplorasi minyak Irian Barat selama dua tahun. Sekembalinya dari Irian, ia memperoleh pekerjaan sebagai pengatur obat-obatan, dengan pilihan tiga tempat, Serang, Garut, atau Tegal. Ia memilih Tegal karena gajinya lebih tinggi. Pada tahun 1934 ia menjadi sekretaris Partindo cabang Tegal dan kemudian Gerindo. Selama masa pendudukan ia menjadi chutaicho Barisan Pelopor di Kotapraja Tegal dan setelah pergeseran pimpinan dalam September 1945 ia menjadi anggota De-

wan Pimpinan. Ia menjadi anggota Badan Pekerja Tegal, tapi berhasil menghindari penangkapan TKR. Pada tahun 1950 ia duduk dalam pemerintahan Kotapraja Tegal dan kemudian menjadi kepala Bagian politik, dan pada tahun 1955 menjadi sekretaris Panitia Pemilihan Umum Indonesia Kotapraja Tegal. Pada tahun 1957 ia menjadi Camat Geringsing, lalu Wedana Wiradesa dan pensiun pada tahun 1970. Ia wafat pada tahun 1979.

IBU PRI nama yang dikenal dalam pergerakan Pemalang, atau Nyonya Amir, tak tahu kapan lahir. Ayahnya adalah seorang penjahit di pasar Comal tidak pernah mengenyam pendidikan barat. Tahun 1933, ketika berumur sekitar 15 tahun, Ibu Pri tertarik kepada pergerakan setempat setelah mendengar lagu Indonesia Raya. Ia lalu masuk Partindo, walaupun keanggotaan partai minimal harus 19 tahun. "Saya ingin belajar menyanyikan lagu itu, berarti saya harus menulis dulu," kenangnya. Tak lama setelah itu ia ditahan atas perintah Wedana Comal, dituduh melanggar peraturan larangan rapat umum, ketika ia sedang memimpin orang banyak bernyanyi lagu itu. Sejak itu ia selalu diganggu polisi dan dianjurkan agar memindahkan usaha penjahitnya ke lain tempat. Setelah tahun 1935, ia aktif dalam gerakan bawah tanah di Comal pimpinan K. Mijaya, membangunkan kesadaran revolusioner massa dengan memakai organisasi penyamaran sebuah perkumpulan kematian. Pada waktu itu ia menikah dengan seorang aktivis Persi Pemalang, dan sesudah bercerai dengannya kawin dengan Amir. Semasa pendudukan Jepang, ia ke Jakarta, dan oleh gerakan bawah tanah PKI ditugaskan untuk mengikuti kursus politik Putera bersama 4 wanita lainnya dan 37 pria. Ada beberapa lamanya ia bekerja di Putera tetapi lalu keluar karena tak tahan melihat penderitaan umum. Lalu ia ditugaskan oleh gerakan bawah tanah untuk bekerja di bagian wanita Jawa Hokokai bersama Rollah Syarifah, adik tokoh PKI M.H. Lukman. Bosan dengan kerja rutin kantor, ia lalu dilatih sebagai pemintal dan penenun. Pada tahun 1934 ia dikirim ke Indramayu, sesaat setelah terjadinya pemberontakan petani, menjadi anggota Jawa Hokokai di sana. Setelah enam bulan ia seharusnya dikirim ke Banten, tetapi kembali ke Comal atas permintaan Widarta. Sesudah proklamasi ia dikirim ke Jawa Timur untuk berusaha membebaskan Amir Syarifuddin, tetapi misi ini gagal karena seluruh harta milik yang dibawanya, termasuk mandat partai, tercuri. Tetapi Ibu Pri tetap di Jawa Timur, di Klakah, sampai revolusi Tiga Daerah meletus. Ia menghadiri Konferensi Pesindo Jawa Timur tanggal 6 November, dan Kongres Pesindo se-Indonesia di Yogyakarta tanggal 10 November. Kemudian ia kembali ke Comal dan semasa Peristiwa Tiga

Daerah aktif membentuk bagian pemudi Pesindo di kawasan itu. Setelah diinterogasi TKR, ia diizinkan tetap tinggal di Hotel Merdeka. Setelah 32 orang tahanan politik dipindahkan ke Yogyakarta pada bulan Desember 1946, ia aktif mengatur pengiriman bingkisan makanan kepada para tahanan tersebut. Ia aktif dalam bidang politik di Comal sampai 1965.

SAKIRMAN lahir di Prambanan Yogyakarta pada tahun 1906. Setamatnya HIS ia mendapatkan beasiswa (30 gulden sebulan) dari Sekolah Menengah Teknik PJS (Prinses Juliana School) Yogyakarta. Bersama lulusan sekolah ini ia bekerja di pabrik gula Kebonan dan menjadi inspektur kesehatan. "Semua kawan-kawannya adalah Belanda," kenang istrinya. Pada tahun 1932, ia pindah ke Pekalongan, bekerja di bawah dokter keresidenan, saudara laki-laki Mr. Besar. Pada tahun 1936 ia diangkat menjadi inspektur kesehatan di Moga, lalu pindah ke Slawi menjadi inspektur perumahan dalam rangka program pemberantasan penyakit pes. Saudara lelakinya, K.R.T. Prakosodiningrat berkedudukan sebagai bupati di kantor Kepatihan Yogyakarta. Sakirman memiliki koleksi keris dalam jumlah besar dan seorang penganut aliran kepercayaan yang setia. Dari bulan September sampai Desember 1945 ia menjadi pemimpin militan AMRI Slawi, dan memainkan peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pengambilalihan Kota Tegal pada tanggal 4 November, yang memaksa agar pangreh *prajayang* masih ada meletakkan jabatannya. Sakirman dan istrinya ditahan oleh TKR. Menurut kesaksian seseorang, istrinya mengalami gangguan mental dalam penjara. Kemudian, semasa revolusi fisik selebihnya ia bekerja di bagian logistik tentara Yogyakarta. Setelah revolusi, ia bekerja di Perusahaan Air Minum (PAM) Jawatan Pekerjaan Umum Kotapraja. Ia pensiun pada tahun 1962, dan menurut istrinya, ia wafat pada hari Pesta Rakyat tanggal 1 Mei 1965.

SARJIO (nama lengkapnya Raden Sarjiyo Kartodiharja) lahir di Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, 1 Juni 1909. Ia satu dari empat anak Raden Cokrodirodo, seorang bekel atau Kepala Desa Bedug, yang menurut silsilahnya merupakan generasi ketujuh keturunan Raden Adipati Danurejo, putra menantu Sultan Amangkurat II. Sarjio bersekolah di HIS Kutoarjo dan tamat MULO Purwokerto tahun 1927. Ia mempelajari beberapa bahasa asing (Inggris, Jerman, dan Prancis) selama dua tahun di Volks Universiteit (Universitas Rakyat) di Gang Kenari 15, Jakarta, yang diselenggarakan oleh orang-orang pergerakan. Waktu itu ia bekerja di Kantor Perjalanan Pemerintahan, lalu pindah bekerja di perusahaan tembakau milik

Inggris, Harrison and Crossfield. Ia tokoh penting pergerakan Purworejo sebelum perang dan anggota PNI-Baru setempat. Tahun 1933, ia dijatuhi hukuman seminggu lamanya karena mengadakan rapat partai "tanpa izin" dan kemudian dilarang mengajar pada sekolah swasta setempat. Tahun 1941 ia terpilih sebagai anggota Dewan Kabupaten (Regentschapsraad) Purworejo sebagai amggota dari non-partai. Setelah Jepang tiba, ia terpilih lagi sebagai wakil Keresidenan Kedu dalam Dewan Penasihat Pusat (Chuo Sangi In) di Jakarta. Pada zaman pendudukan ini ia memasuki gerakan bawah tanah PKI. Kombinasi antara kolaborasi dengan Jepang dan keanggotaan dalam front Persatuan Anti Fascis tidak menjadi masalah di kalangan anggota-anggota PKI yang setia waktu itu. Pada awal tahun 1945 kenpeitai menangkapnya dan menjatuhi hukuman 13 tahun penjara. Kakak kandungnya, Sukarto, yang sama-sama ditangkap, meninggal di penjara Magelang akibat siksaan kenpetai. Selepas dari penjara Ambarawa pada pertengahan September 1945, Sarjio aktif dalam politik di Purworejo, dan membentuk cabang Parsi (partainya Amir Syarifuddin) di sana pada bulan November. Awal Desember ia pergi ke Pekalongan atas permintaan GBP3D dan menjadi residen Pekalongan selama empat hari, dari tanggal 12-15 Desember, sebelum ditangkap bersama-sama pemimpin Tiga Daerah lainnya. Dibebaskan pada awal tahun 1947, ia lalu masuk Biro Perjuangan TNI dengan pangkat letnan kolonel, yang kemudian berubah menjadi TNI Masyarakat di bawah pimpinan Jenderal Mayor Jokosujono. Pada tanggal 21 Desember 1948 ia dituduh mendukung Peristiwa Madiun karena menjadi ketua Front Demokrasi Rakyat (FDR) setempat. Ia mati ditembak dekat Bagelen oleh pasukan Indonesia.

SARIMIN REKSODIHARJO lahir pada tanggal 17 Juli 1905 di Desa Kalidesel, dataran tinggi Dieng. Selepas HIS Wonosobo ia masuk OSVIA Magelang 1917, lulus dengan ijazah untuk bekerja pada pemerintahan dalam negeri di Jawa Tengah bagian selatan pada tahun 1924. Tahun 1930 ia pindah ke Kebupaten Kendal, dan merasa heran bahwa kebiasaan menghormati atasan dengan "bersembah seperti di keraton" masih bertahan di kawasan pantai utara ini. Padahal Residen Belanda di Banyumas telah menghapuskan kebiasaan ini. Tahun 1931, Sarimin memasuki Bestuursschool (Sekolah Tata Pemerintahan) dan diangkat menjadi camat Weleri pada usia 21. Tahun 1938 ia memasuki Bestuursacademie (Akademi Ilmu Tata Pemerintahan), sampai tamat pada tahun 1941. Semasa pendudukan Jepang, ia mengalami promosi kilat dari wedana sampai bupati hanya dalam waktu 18 bulan. Ia diculik sewaktu ada revolusi sosial. Dalam bulan Maret 1946 menjadi pegawai tinggi

di Departemen Dalam Negeri, lalu menjadi kepala Jawatan Agraria. Pernah menjadi gubernur Sunda Kecil (nama Nusa Tenggara dahulu) dari tahun 1952 sampai 1957.

SUNARTO, lahir di Ketanggungan Barat sekitar tahun 1913, putra seorang pemegang tata buku pabrik gula setempat. Setamat HIS Brebes dan MULO Cirebon, administratur pabrik gula Belanda menawarkan suatu kedudukan baik dalam pabriknya, tetapi ditolaknya karena jam kerjanya terlalu panjang. Di Jakarta ia pernah mempunyai bermacam-macam pekerjaan sebelum ikut pergerakan dan setelah dipecat dari Kantor Keresidenan Jakarta gara-gara membocorkan informasi yang terlarang kepada HIPA (Handel in Pers Artikelen), sebuah kantor berita yang diasuh oleh eks-Digulis. Buat sementara waktu ia menjual surat kabar, *Daulat Rakjat*, lalu mencatatkan diri di kursus-kursus Taman Kemajuan PNI-baru, kemudian hari ia mengajar di situ. Karena ancaman PID – intel politik Belanda – bahwa ayahnya akan kehilangan jabatan sekretaris di desa (carik) bila Sunarto tidak meninggalkan Jakarta, maka ia pindah ke Cirebon dan mengajar di sekolah pimpinan Sugra dari PNI-baru di Walet. Ia menjadi komisaris PNI-baru Cabang Cirebon, dan membantu Sugra dalam Koperasi Rakyat Indonesia (KRI). Semasa pendudukan Jepang, Sunarto seperti Sugra, menggunakan KRI sebagai front bagi kegiatan bawah tanahnya. Dalam tahun 1945, ia memimpin gerakan revolusioner di Tanjung. Setelah revolusi bekerja di Kantor Kotapraja di Jakarta.

SUSMONO lahir pada tanggal 3 Juli 1913 di Subuh (Batang), anak kelima dari delapan anak Mantri Lumbung Bank Rakyat setempat. Tahun 1929 ia tamat HIS Batang, tetapi karena kesulitan keuangan keluarga, ia tidak mampu melanjutkan studinya. Ia bekerja di bank di Brebes, lalu di Cirebon, dan tahun 1938 menjadi klerk di Kabupaten Tegal. Pada masa inilah, ia mula-mula tertarik kepada nasionalisme melalui Subagio Mangunraharjo (pemimpin PNI-baru), yang waktu itu tinggal di Tegal. Semasa pendudukan Jepang ia dapat menjelajahi seluruh wilayah kabupaten karena sebagai anggota BP2 dan BP3 namanya sudah terkenal. Awal tahun 1945 ia merupakan salah seorang dari Negen Broeders, dan wakil ketua KNI Kabupaten Tegal. Ia termasuk anggota Staf Pengoperannya Sarjio di Pekalongan, ditangkap TKR dan dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 1946. Tahun 1947 ia membentuk Gerakan Plebisit di Tegal dengan dr. R.V. Sujito. Tahun 1949 ia kembali ke Tegal dari Jakarta sebagai pejabat penghubung antara kaum

republiken di Kota Tegal dengan pihak tentara di selatan. Tahun 1950 ia pindah ke Kantor Gubernuran di Semarang atas permintaan Menteri Dalam Negeri, menghadapi masalah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Keresidenan Banyumas dan Pekalongan. Ia pensiun pada bulan Desember 1969.

SUPANGAT lahir di Banyumas tahun 1903. Bekerja di Semarang dan Ambarawa sebelum tiba di Pemalang tahun 1936 sebagai mantri *verpleger* (juru rawat). Keahliannya segera membikinnya terkenal di kota kecil itu. Semasa pendudukan Jepang ia dikenal sebagai seorang tokoh yang jujur dalam mengemudikan Pekope, yang mendistribusikan bahan kebutuhan pokok yang sudah langka, dan mengurus Rumah Makan Fuji yang terkenal murah. Ia seorang pembicara umum yang baik, dan setelah Proklamasi ia sangat terkenal di kalangan tokoh pemuda maupun tokoh tua radikal karena keberhasilannya memadukan sikap luwes dan semangat revolusioner. Ia memimpin API IPRI Pemalang, yang menjadi semacam pahlawan lokal setelah kasus penculikan atas dirinya oleh unsur-unsur pangreh praja/TKR. Sebagai Bupati Pemalang ia merupakan "tokoh penyatu" semua unsur revolusioner kabupaten itu. Juga kaum lenggaong mematuhinya sebagai pemimpin. Ia melarikan diri dari Pemalang ketika TKR menduduki kota itu. Kemudian tiba di Pekalongan bersama-sama rombongan Presiden, ditangkap TKR di depan pertemuan umum di pendopo Kabupaten, dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah dibebaskan pada awal tahun 1947, ia menjadi pejabat dalam Kementerian Pemuda dan Pembangunan di bawah Menteri Supeno dalam tahun 1948. Ia tak pernah menjadi anggota partai politik mana pun setelah revolusi, dan wafat di Ambarawa pada bulan Desember 1958 karena penyakit kuning (hepatitis).

SUWIGNYO lahir pada tanggal 19 Maret 1906 di Bobotsari, Purbolinggo. Putra M. Wiria Atmaja, yang kemudian pindah ke Comal menjadi kepala Sekolah Angka Dua (SD 5 th) di sana. Setamatnya HIS di Pemalang pada tahun 1920, ia menempuh ujian pegawai rendah, tetapi kemudian ia memutuskan untuk memasuki Schakelschool sebagai gantinya dan bekerja sebagai juru tulis Stasiun Comal. Ia menjadi anggota VSTP dan memimpin PKI Subseksi Comal dari Seksi (cabang) Kabupaten Pekalongan. Ia tidak mematuhi instruksi pemberontakan tanggal 13 November 1926 "karena pemimpin PKI Pekalongan sudah kemasukan infiltrasi Belanda". Ia menjalani hukuman empat setengah tahun di penjara Pamekasan dan Glodog, dibuang ke Boven Digul pada tahun 1929, dan diizinkan kembali ke Pekalongan

pada tahun 1932. Ia menganggur sampai tahun 1935, lalu mendapatkan pekerjaan di Bagian Keuangan Kantor Keresidenan, dan pada tahun 1938 diangkat menjadi inspektur pajak di Slawi. Ketika Jepang datang, ia meninggalkan Slawi dan hidup di Desa Pemalang Selatan, dan tidak bekerja pada Jepang. Pada tahun 1945, ia mendirikan AMRI Slawi dengan Sakirman dan pada bulan November menjadi ketua Badan Pekerja Tegal dan anggota GBP3D. Ia dijebloskan ke dalam penjara oleh TKR, dan merupakan salah seorang dari enam orang yang diadili pada bulan Maret 1947, tetapi dibebaskan pada tanggal 18 Juli 1947. Ia mengungsi bersama kaum republiken lainnya, menjadi mayor tituler TRI Markas Besar Yogyakarta yang pada tahun 1948 memindahkan markasnya ke Sleman. Setelah tahun 1950, ia tak lagi aktif di politik dan bekerja sebagai pegawai Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ia pensiun pada tahun 1970.

WADYONO putra seorang wedana, yang diharapkan akan mengikuti jejak orangtuanya. Ia masuk MOSVIA Magelang pada tahun 1934. Setelah lulus, ia bekerja pada pemerintahan dalam negeri Keresidenan Banyumas, dan merangkap sebagai mantri polisi di bawah pimpinan Susalit, satu-satunya putra R.A. Kartini, yang waktu itu menjadi kepala PID (intel politik Belanda) di Purwokerto. Menjelang kedatangan Jepang, Wadyono menjadi Camat Tanjung di Brebes. Karena merasakan semakin tidak populernya pangreh praja, ia meninggalkan Tanjung pada tahun 1943 dan diterima masuk Peta sebagai komandan kompi (chudancho) di Daidan Pekalongan di bawah Daidancho Iskandar Idris. Setelah Peta dibubarkan, ia untuk sementara waktu menjadi kepala polisi di Margasari, tetapi kemudian karena tidak menyukai karier ini ia masuk BKR di Brebes. Ia masuk TKR Resimen XVII di Pekalongan sebagai Kepala Staf Umum, dan menjadi Pejabat Komandan setelah Iskandar Idris ditangkap di Talang dan dibawa ke Slawi pada tanggal 3 November tahun 1945. Ia membantu perencanaan tindakan kontra terhadap Gerakan Tiga Daerah, dan segera setelah itu menjadi Komandan Resimen. Setelah Aksi Militer Belanda pertama, ia memindahkan resimennya ke Wonosobo. Di sini ia sekali lagi berhubungan erat dengan Susalit yang juga menjadi tentara. Pada akhir tahun 1948, ia menjadi Kepala Staf Divisi Diponegoro di Magelang, tetapi meninggalkan TNI setelah revolusi berakhir. Ia menjadi pengusaha di Semarang dan ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

WIDARTA, nama lengkapnya Subandi Widarta, dilahirkan di Kediri. Ia anggota Suluh Pemuda (SPI) Cabang Surabaya, yang dipimpin oleh Tasjiman (kakak Widarta) sejak berdirinya pada tahun 1933, dan juga aktif di Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Setelah kunjungan rahasia Muso ke Surabaya pada tahun 1935, ia terpilih untuk dikirim ke luar Jawa ke tempat yang dipilihnya untuk mencari pengalaman dalam gerakan buruh. Ia memilih Sumatera, dan menuju Palembang pada pertengahan tahun 1936. Di sana ia bekerja di pabrik minyak BPM Plaju di Lubuklingga, mendirikan sarekat buruh, dan mengorganisasikan pemogokan menuntut perbaikan syarat-syarat kerja. Ia lalu dikenai penahanan rumah selama 3 bulan, dan melarikan diri ke Pulau Sambu di pabrik penyulingan BPM. Belanda yang mengetahui hal itu dari hasil sensor atas surat-menyurat Widarta dengan kakaknya Tasjiman, yang kini memimpin Gerindo di Surabaya, memberikan waktu 12 jam kepada Widarta untuk meninggalkan Pulau Sumbu. Ia kembali ke Surabaya melalui Jakarta, dan dengan tidak secara langsung, di bawah bimbingan Pamuji, menangani kegiatan partai di Jawa Tengah. Ia menulis untuk majalah *Pesat* di Semarang, yang pada waktu itu dipimpin Sayuti Melik. Setelah Jepang menangkapi para pemimpin puncak PKI bawah tanah, termasuk Pamuji, pada pertengahan tahun 1942, Widarta mengambil alih kepemimpinan dan memimpin kegiatan bawah tanah sepanjang masa pendudukan. Ia membantu menyebarluaskan berita Proklamasi Kemerdekaan di daerah-daerah, dan semasa Tiga Daerah aktif di Pemalang selaku wakil Menteri Penerangan, Mr. Amir Syarifuddin. Ia ditangkap TKR pada tanggal 23 Desember 1945. Selagi dipenjara di Yogyakarta, bersama-sama dengan tokoh-tokoh radikal lainnya (a.l. pengikut Tan Malaka) ia menandatangani pernyataan menentang Perjanjian Linggarjati. Ia dibebaskan pada tahun 1947. Bersama-sama pemimpin Tiga Daerah lainnya, ia menuntut adanya Kongres PKI untuk menyelesaikan pertikaian internal. Akibatnya ia diculik bersama K. Mijaya dan lainnya. Ia dituduh menyebabkan perpecahan dalam partai karena oposisinya terhadap Perjanjian Linggarjati dan karena tidak tepat dalam menjalankan garis Front Persatuan di Tiga Daerah. Dan ini telah mendorong ke konflik dengan pihak tentara. Ia dan anggota PKI bawah tanah lainnya dari Tiga Daerah "diadili" oleh sebuah mahkamah partai yang dibentuk dengan otoritas pemimpin PKI gelap baru, yaitu Amir Syarifuddin. Hakim-hakimnya terdiri antara lain dari gerakan bawah tanah PKI yang telah meninggalkan kelompok Widarta. Semula Aidit juga terlibat, tetapi ia kemudian menarik diri setelah mendengar "pembelaan tokoh-tokoh Tiga Daerah." Mahkamah menjatuhkan hukuman mati terhadap Widarta dan tiga orang

lainnya, yang sempat lolos. Widarta dibawa ke Madiun oleh Cugito dan Faktur Hadi, dan kemudian ditembak mati di Parangtritis, selatan Yogyakarta. Karena banyak "hakim" dan "eksekuter" pengadilan Widarta kemudian menjadi tokoh penting PKI (antara lain Sukisman), dan karena Muso mengutuk eksekusi itu setibanya ia kembali di Indonesia, maka PKI bertahun-tahun lamanya tidak mengutik-utik soal gerakan bawah tanah dan peranan Widarta dalam Peristiwa Tiga Daerah. Orang-orang terkemuka tak percaya bahwa hal ini pernah terjadi.[]

KRONOLOGI KEJADIAN-KEJADIAN SELAMA LIMA BULAN DI TIGA DAERAH (AGUSTUS – DESEMBER 1945)

AGUSTUS

Jumat, 17 Proklamasi Kemerdekaan RI diumumkan di Jakarta.

Senin, 20 Bendera Jepang diturunkan, diganti Sang Merah-Putih dalam aksi serentak pemuda Brebes.

Selasa, 21 Pertemuan diadakan di rumah Residen Pekalongan Jepang, Tokonami Tokogi, dihadiri oleh semua bupati dalam Keresidenan Pekalongan, para walikota (Tegal dan Pekalongan), Hakim Suprapto, Jaksa/Penuntut Umum S. Karioatmojo, anggota-anggota Badan Penasihat Pekalongan, Kromo Lawi dan lainnya. Hadir juga Wedana Pekalongan.

Rabu, 22 Pertemuan diadakan di pendopo Kabupaten Brebes membicarakan Proklamasi Kemerdekaan.

Kamis, 23 Pertemuan diadakan di pendopo Kewedanaan Brebes, membicarakan Proklamasi Kemerdekaan.

Selasa, 28 KNI terbentuk di Pekalongan. Moh. Saleh hadir mewakili Bupati Brebes, Sarimin, yang baru saja kembali dari pertemuan Pekalongan yang membicarakan pembentukan KNI. Pembentukan KNI Banyumas.

Rabu, 29 KNI Bandung dan Banyumas terbentuk.

Kamis, 30 Pengumuman pembentukan BKR. Konperensi pangreh praja se-Jawa-Madura diselenggarakan di Jakarta.

SEPTEMBER

Minggu, 2 Kabinet Pertama RI dengan 10 menteri mengangkat sumpah. Lima kabupaten dalam Keresidenan Priangan serentak menga-

dakan rapat membentuk KNI kabupaten.

Senin, 3 Lord Mountbatten (panglima Sekutu) memberi perintah kepada Laksamana Terauchi (Panglima Jepang yang membawahi Indonesia juga) di Saigon agar membubarkan Republik Indonesia.

Selasa, 4 KNI Keresidenan Kedu terbentuk.

Rabu, 5 Semua wakil residen (*fuku shuchokan*) Indonesia angkatan Jepang dipromosi menjadi residen oleh Pemerintah Pusat RI, dengan perkecualian walikota Jakarta Raya dan Keresidenan Pekalongan. Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, residen Banyumas, mengumumkan bahwa daerahnya adalah bagian wilayah RI. Hokokai Brebes dibubarkan.

Selasa, 11 Pada pertemuan di ruangan Gereja Katolik Tegal, terjadi pertikaian pendapat antara Walikota dan para pemimpin perjuangan tentang keabsahan Proklamasi.

Rabu, 12 KNI Pekalongan mengajukan mosi kepada Presiden Sukarno agar mengangkat Mr. Besar (bekas *Fuku Shuchokan*) sebagai residen Pekalongan.

Rabu, 19 Rapat umum di Pekalongan Ikada Jakarta, di mana Presiden Sukarno tampil di hadapan lautan manusia yang bersemangat tinggi, dan meminta agar tenang dan pulang ke tempat masing-masing, karena Jepang tidak menyetujui rapat itu. Kekerasan pertama dalam insiden bendera terjadi di depan Hotel Yamato, Surabaya.

Jumat, 21 Sekretaris Negara, Mr. A.G. Pringgodogdo, dalam jawaban resminya atas mosi KNI 12 September menyebutkan bahwa "Mr. Besar kini resmi diangkat sebagai residen Pekalongan".

Minggu, 23 Mr. Besar mengumumkan "Kemerdekaan Indonesia" di Pekalongan. Rapat di pendopo Kabupaten Brebes, bupatinya menolak mengumumkan Kemerdekaan.

Selasa, 25 Semua pejabat/pegawai tunjukan Jepang secara resmi menyatakan sebagai pegawai sipil pemerintah baru Republik.

Kamis, 27 Jepang secara resmi menyerahkan kekuasaannya di Pekalongan.

Sabtu, 29 Pawai di Pekalongan menyambut pengumuman Mr. Besar bahwa Keresidenan Pekalongan secara resmi menjadi wilayah bagian Republik. Pawai dimulai pada pukul 7.30 pagi dan kira-kira 3 km panjangnya. Batalyon pertama tentara Inggris (Sekutu) mendarat di Jakarta.

OKTOBER

Selasa, 2 Sarekat Sekerja Kereta Api terbentuk di Pekalongan.

Rabu, 3 Pertempuran di Pekalongan setelah kenpeitai menembaki rakyat, sementara Mr. Besar sedang merundingkan serah terima senjata. 37 orang Indonesia dan sejumlah orang Jepang terbunuh.

Kamis, 4 Kenpeitai di Pekalongan dikepung.

Jumat, 5 TKR terbentuk dengan kekuatan 10 divisi. Resimen ke-17 berada di Keresidenan Pekalongan bersama-sama dengan Semarang, Pati, dan Salatiga dan panglimanya Kolonel Jatikusumo. Pengepungan kenpeitai masih berlanjut.

Sabtu, 6 Pukul 4 sore, 32 orang yang gugur dalam pertempuran melawan kenpeitai dimakamkan di Pekalongan. Kemudian dalam petang itu juga Jepang menyerah pada akhirnya, dan menyerahkan semua persenjataannya termasuk beberapa senapan mesin.

Minggu, 7 Pukul 11 malam. Rumah kediaman lurah Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara di Tegal Selatan dikepung masa rakyat. Tentara Jepang garnisun kota dan kenpeitai meninggalkan Pekalongan menuju Keresidenan Banyumas dengan kawalan BKR.

Senin, 8 Lurah Desa Cerih didombreng sepanjang 15 km ke Jatinegara. Camat kabur. Ini aksi pertama di Keresidenan Pekalongan, pemberi tanda dimulainya revolusi sosial.

Rabu, 10 Camat Adiwerna dibunuh setelah berpidato di depan rapat Desa Lemah Duwur. Wedana Adiwerna kabur. Toko Ui Cun Lam dan rumahnya di Desa Warungpring (Kabupaten Pemalang) dibakar sampai rata dengan tanah, bermulailah *revolusi sosial* di Kabupaten Pemalang.

Jepang mengambil alih kembali kekuasaan atas Kota Bandung setelah terjadi pertempuran sengit. AMRI terbentuk di Semarang.

Kamis, 11 Pukul 5 pagi. Pembunuhan di pabrik gula Jatibarang. Pukul 11 siang, Henry Gill, seorang Indo pegawai pabrik gula terbunuh di Panglah. Pukul 5 sore, pembunuhan massal terjadi di Slawi, dengan korban lebih dari 30 orang Indo, 2 orang Batak dan 1 orang Manado. Pukul 11.30 malam, Markas Barisan Pelopor Tegal mengumumkan bahwa "semua orang Indo, Ambon, dan Manado harus ditawan "karena kekejaman NICA di Jakarta.

Jumat, 12 Wedana Slawi kabur. Camat Moga (Pemalang) dikepung massa yang marah, terluka dan kabur demi keselamatannya. Camat

Lebaksiu (Tegal) digelandang dari dokar dan dibunuh ketika dalam perjalanan bersama istrinya untuk menemui atasannya, Wedana Slawi.

Pukul 3 siang, Camat Slawi kabur dengan menaiki sepeda menuju Tegal. Istri dan 4 anaknya mengikutinya menumpang dokar, meninggalkan semua pakaian dan harta miliknya. Dua orang pemimpin perjuangan Adiwerna pergi ke markas API di pemerahan susu Trubels di Pagongan dan melihat telegram yang berisi perintah membunuh semua orang Indo, Manado, dan Ambon. Di Brebes dilakukan persiapan untuk mewancarai para anggota TKR. Wongsonegoro menjadi gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Sabtu, 13 Pukul 1 malam, F.V. Buman diambil dari rumahnya di Jl. Kartini, Tegal, bersama dengan semua anggota keluarganya oleh anggota-anggota API. Kemudian F.V. Buman terbunuh bersama anaknya, Adolp, yang berumur 7 tahun.

Senin, 15 Di Brebes, dimulai untuk kedua kalinya wawancara untuk mencari anggota baru TKR; diadakan oleh KNI Brebes (bukan Bupati), dan diselenggarakan—atas permintaan KNI—oleh para perwira TKR Pekalongan. Di Semarang terjadi pertempuran berdarah lima hari yang diawali dengan pembunuhan ratusan orang oleh Jepang.

Selasa, 16 Pernyataan pertama Residen Pekalongan (Mr. Besar) yang meminta rakyat tinggal tenang dan tertib, serta mengancam akan mengadakan tindakan tegas guna mencegah tindakan "tidak mengenal hukum" lebih jauh lagi. Di Jakarta, KNIP mendapatkan kekuasaan legislatif dengan 15 orang anggota Badan Pekerja (BP) terpilih. Pernyataan Mr. Besar yang kedua, memerintahkan agar semua senjata dan amunisi diserahkan kepada polisi "antara pukul 9 pagi sampai siang." Seratus pemuda keturunan Arab anggota AMRI Pekalongan bertekad untuk "mempertahankan Indonesia sebagai putra Indonesia." Tentara Inggris (Sekutu) menduduki Bandung.

Kamis, 18 Bupati Brebes (Sarimin) dan Patih (Pranoto) pergi ke Banyumas untuk mendapatkan senjata bagi TKR Brebes. Pada malam itu juga kedua pejabat itu bersama Wedana Brebes dan kakaknya, Wedana Tanjung, diculik oleh kelompok KNI Tegal dan dibawa kembali ke Tegal.

Jumat, 19 Pukul 3.30 sore. Bupati Pemalang didaulat, dimasukkan ke pen-

jara bersama para pejabat priayi kota lainnya. Inilah malam pergolakan sosial di Pemalang.

Sabtu, 20 Rapat umum di alun-alun Pemalang. Supangat diterima sebagai bupati Pemalang yang baru. Berbicara dalam rapat dua orang tokoh PKI bawah tanah, Widarta dan S. Mustapha. Asrama Polisi Kabupaten Tegal di Kejambon diserbu oleh rakyat dari Ujungrusi dan Talang. Polisi Tegal membubarkan diri. Pasukan Inggris (Sekutu) mendarat di Semarang.

Senin, 22 Pernyataan Residen Pekalongan yang ketiga, memberi kekuasaan luas kepada TKR untuk mengambil "tindakan yang diperlukan" di bagian-bagian tertentu Tiga Daerah untuk mengatasi keresahan.

Rabu, 24 Perubahan dalam kepemimpinan KNI Tegal dalam KNI baru hasil penggabungan KNI kebupaten dan kotapraja. Surat pengangkatan (*besluit*) No. 35 P.P.D. dari Mr. Besar, secara resmi mengangkat R. Sudayu Wiroatmojo sebagai camat baru di Petarukan, Pemalang.

Kamis, 25 Pasukan Inggris (Sekutu) mendarat di Surabaya.

Jumat, 26 Pembentukan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) pimpinan Mr. Amir Syarifuddin di Yogyakarta.

Sabtu, 27 Mayor tentara Inggris bersama satuan tentara kecil datang ke Pekalongan dari Semarang untuk memeriksa tempat penahanan orang-orang asing, ditemui Mr. Besar dan Pejabat Komandan TKR Wadyono. Kembali ke Semarang hari itu juga.

Senin, 29 Bupati Brebes dan Wedana Bantarkawung di-"periksa" dengan mata tertutup di Ketanggungan. Surat No. 44/P.P.D. dari Mr. Besar secara resmi mengangkat Suyatno sebagai sekretaris Kabupaten Pemalang di bawah Supangat.

Surat No. 46/P.P.D. dari Mr. Besar secara resmi mengangkat Supangat sebagai bupati Pemalang.

Selasa, 30 Orang-orang Cina di Brebes diberitakan *Kedaoelatan Rakjat* menyumbang f 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Fonds Kemerdekaan. Surat Residen Mr. Besar No. 57/P.P.D. mengangkat Haji Toha menjadi Camat Lebaksiu.

Pertempuran dengan Inggris di Semarang meluas sampai Ambarawa.

Rabu, 31 Haji Mawardi menjadi wedana Adiwerna.

NOVEMBER

Kamis, 1 Sukarno dan Amir Syarifuddin terbang ke Semarang, lalu ke Magelang dan Yogyakarta untuk membahas situasi militer.

Jumat, 2 Gencatan senjata antara pasukan Sekutu dan Republik diatur, Sukarno kembali ke Jakarta dengan kereta api melalui jalur utara sepanjang pantai. Berhenti di Tegal dan berpidato sesaat di stasiun, disambut oleh para pemimpin Barisan Pelopor. Sayuti Melik yang ikut dengan rombongan Sukarno tinggal di Tegal.

Sabtu, 3 Konperensi Wilayah Muhammadiyah dibuka di Pagongan, Tegal Selatan. K.H. Iskandar Idris dan Sayuti Melik ditangkap dekat Talang.

Minggu, 4 Ketua KNI Gabungan Tegal Marjono dan Wedana Koordinator Adiwerna ditangkap ketika sedang menuju ke selatan dan dibunuh dekat Talam. Haji Mawardi, Wedana Adiwerna, tertangkap dekat Adiwerna ketika kembali dari Konferensi Muhammadiyah. Gerombolan besar massa bergerak menuju Tegal. Sekelompok menyerang asrama TKR, menduduki alun-alun kota dan membawa pergi bekas jaksa Singgih, pengumpul romusha R.M. Abubakar dan anaknya, Khamzah. Dua tokoh terkemuka Islam, K. Mokhidin dan K. Mokhtar, juga ditangkap ketika berusaha menemui para pemimpin Talang. Badan Pekerja Brebes terbentuk.

Senin, 5 Mr. Besar meninggalkan keresidenan. Pukul 5.30 sore Bupati Tegal, Sunarjio, meninggalkan Tegal dengan menyamar sebagai masinis kereta api, ditemani dua pemimpin API, Mansur dan lainnya.

Selasa, 6 R.M. Suprapto diangkat sebagai pejabat residen, tiba di Pekalongan dan mengunjungi Tegal. Surat No. 326/P.P.D. dari Pejabat Residen mengangkat Suleman sebagai Camat Comal.

Kamis, 8 Pemilihan wedana baru Bumikawa.
K.H. Suja'i secara resmi dilantik sebagai bupati baru Tegal oleh Pejabat Residen Suprapto dalam suatu upacara di Tegal. Badan Pekerja terbentuk di Tegal (?). KRIS terbentuk di Tegal.

Jumat, 9 "Surat Pengangkatan Sementara" Ki Citrasatmaka sebagai patih Tegal ditandatangani bupati baru Tegal.

Sabtu, 10 Setelah diperiksa, Wedana dan Bupati Brebes serta lain-lainnya dengan ditutup mata dibawa dari Durensawit dekat Balapulang ke Penjara Tegal, digabungkan dengan para pangreh praja Tegal

lainnya. Pecah pertempuran sengit antara pasukan Republik melawan Sekutu di Surabaya.

Minggu,11 Wedana Pangkah diculik.

Senin, 12 Wedana Pangkah dibawa ke pemalang dan ditempatkan di penjara kota.

Rabu,14 Kabinet parlementer pertama pimpinan Perdana Menteri Syahrir terbentuk.

Jumat, 16 Susunan Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D) diumumkan di Kantor Parsi (bekas markas Barisan Pelopor) di Tegal.

Sabtu, 17 Surat Penjabat Residen No. 462/P.P.D. secara resmi mengangkat Ki Citrasatmaka sebagai patih Tegal, sejak tanggal 12 November.

Minggu,30 H. Mawardi (wedana Adiwerna) Kiai Bisri dan Kiai Mohidin (yang ditangkap pada tanggal 4 November dekat Talang) yang meninggalkan markas AMRI Slawi dan kembali ke rumahnya masing-masing dengan kawalan Kutil.

DESEMBER

Minggu, 2 Rapat ketiga GBP3D di Tegal (di Kantor Parsi) menyusun rencana strategi pengambilalihan kekuasaan di Pekalongan. Memutuskan mengirim surat berisi tuntutan Tiga Daerah kepada Pekalongan.

Rabu, 5 Surat GBP3D diumumkan. Ambarawa direbut kembali oleh pasukan Republik.

Kamis, 6 Sarjio mengunjungi Tegal atas undangan GBP3D.

Jumat, 7 Wedana Brebes dipindahkan dari Penjara Tegal ke Kantor PARSI (Barisan Pelopor).

Minggu, 9 Konperensi antara para pemimpin GBP3D dan wakil badan-badan perjuangan dari Pekalongan di pendopo Kabupaten Pemalang, dihadiri oleh Pejabat Residen Suprapto. Surat Persetujuan ditandatangani oleh semua kelompok, mengangkat Sarjio sebagai residen.

Senin, 10 Pukul 2 siang, Sarjio disertai Staf Pengoperan dan kompi pengawal tiba di Pekalongan. Disambut dalam suatu upacara di Kantor Keresidenan. Pejabat Residen Suprapto secara resmi menyerahterimakan tugas jabatannya kepada Sarjio.

Selasa, 13 Para pemimpin Islam mengorganisasi sebuah demonstrasi besar massa melewati depan Hotel Merdeka, tempat Sarjio dan stafnya bermarkas. Penjabat Komandan TKR kembali dari front Semarang melalui Markas Divisi di Salatiga.
Pecah pertempuran di Bekasi, Inggris membakar kota itu.

Jumat, 14 Sarjio mengunjungi kawasan selatan. Kendaraannya disergap di Pekajangan dalam perjalanan kembali ke kota. K. Mijaya terluka ringan pada lututnya. Kemudian TKR mengepung Hotel Merdeka, Residen dan staf ditangkap serta dipenjarakan;

Sabtu, 15 Ambarawa jatuh kembali ke tangan pasukan Republik setelah pertempuran sengit selama 10 hari.

Senin, 17 Partai Sosialis hasil fusi Parsi dan Paras terbentuk dalam kongres fusi di Cirebon. TKR Pekalongan dan kelompok Muslim melancarkan aksi "pembersih" terhadap Tiga Daerah.

Kamis, 20 Pukul 11 siang, pasukan Pekalongan memasuki Pemalang. Bekas bupati dan pangreh praja lainnya dibebaskan dari penjara. Penangkapan terhadap para pemimpin revolusioner.

Jumat, 21 TKR dari Pekalongan tiba di Tegal.

Sabtu, 22 Wedana Brebes dan lainnya bebas dari Penjara Tegal.
Rombongan kepresidenan tiba di Pekalongan pada akhir rangkaian kunjungan dinas ke kota-kota penting Jawa.

Minggu,23 Rapat umum di alin-alun Kota Pekalongan. Sore harinya, Supangat dan tokoh-tokoh bawah tanah PKI Widarta dan Muroso ditangkap TKR di pendopo kabupaten dalam suatu pertemuan umum dengan rombongan kepresidenan, dan dipenjarakan.

Minggu,30 Dalam rapat umum di alun-alun Pemalang, Haji Makmur diangkat sebagai Bupati Pemalang.

GLOSARI

AMKA (Angkatan Muda Kereta Api)-terbentuk segera setelah proklamasi.

AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia) – salah satu badan perjuangan lokal di Keresidenan Pekalongan.

AMRI-I (Angkatan Muda Republik Indonesia-Islam) – terbentuk di Brebes, mencakup pula unsur lenggaong.

API (Angkatan Pemuda Indonesia) – berpusat di Menteng Raya 31 Jakarta.

Asacho (ketua RW (Rukun Warga) – dengan Kumicho (ketua RT (Rukun Tetangga) semasa Jepang. Sistem RT-RW adalah ciptaan Jepang untuk memobilisasi rakyat mendukung ekonomi perang.

Badan Pekerja – Penggabungan kekuasaan eksekutif dan legislatif di tiga daerah, Tegal, Pemalang, dan Brebes atas prakarsa GBP3D (Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah) setelah pangreh praja rumbang dan KNI macet.

Barisan Pelopor – Ormas pemuda pada masa akhir kekuasaan Jepang.

Bestuuracademie (Bestuurschool) – lembaga pendidikan Belanda untuk calon pangreh praja.

BKR (Badan Keamanan Rakyat) – dibentuk atas keputusan panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 22 Agustus 1945 sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP).

BP2 (Badan Pembantu Prajurit) – dibentuk oleh Jepang, untuk mendukung logistik dan hiburan bagi para Peta dan Heiho.

BP3 (Badan Pembantu Prajurit Pekerja) – sebuah badan untuk mendukung logistik dan hiburan bagi para "pekerja Sukarela" (baca: Paksa).

BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia) – badan perjuangan yang dipimpin oleh Bung Tomo.

Budi Utomo – Organisasi modern pertama di Indonesia, menghimpun kaum priayi Jawa yang dipelopori oleh dokter dan mahasiswa dari STOVIA (Sekolah Tinggi Kedokteran) Jakarta, Wahidin Sudiro Husodo dan Sutomo, lahir 20 Mei 1908. Bertujuan untuk mencapai "kemajuan selaras bagi tanah air dan bangsa". Yang dimaksud

dengan "bangsa", masih terbatas pada suku Jawa, Madura, Bali dan Lombok, yang berpola budaya Jawa.

Chuo Sangi-in – Dewan Penasihat Pusat bagi Pemerintah Bala Tentara Jepang.

Corvee - Beban wajib kerja, inti dari sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), yang dilanjutkan kemudian dalam berbagai bentuk, di antaranya wajib jaga dan ronda desa.

Dombreng – Aksi massa mengarak para pejabat setempat yang tidak disukai semasa "revolusi sosial" di Tiga Daerah, diiringi bunyi pukulan pada kaleng kosong atau kentongan serta teriakan hinaan.

Comite van Ontvangst – Panitia penyambutan kembali kedatangan Belanda, yang konon dibentuk oleh beberapa orang pangreh praja.

Elit Birokrasi – Pejabat setempat dari tingkat bupati, wedana, camat sampai kepala desa/lurah.

ELS (Europeesche Lagere School) – sekolah dasar berbahasa Belanda untuk golongan Eropa atau yang dipersamakan.

FDR (Front Demokrasi Rakyat), beranggotakan Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Pesindo.

Fujinkai Organisasi wanita Indonesia semasa pendudukan Jepang, anggota terbesar ialah istri pegawai negeri.

Genchi Jikatsu – Politik ekonomi Jepang berswasembada untuk mendukung kelangsungan perang.

Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) – berdiri tahun 1937 oleh mantan anggota Partindo.

Gunseikanbu – Pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon.

Heiho Tentara bantuan Jepang.

HIS (Hollands Inlandsche School) – sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak-anak Bumiputera.

Hokokai Perhimpunan Kebaktian Rakyat, dibentuk Maret 1943, menggantikan PUTERA.

Indische Marine Bond – Ikatan Pelaut Pribumi.

Jawa Dipo Gerakan pendemokrasian bahasa Jawa pada tahun 1916, dipelopori oleh tokoh-tokoh pergerakan di Jawa, yang menganjurkan pemakaian bahasa Jawa ngoko (rendah) di antara sesama.

Kakyo Sokai, atau sebelumnya bernama Chung Hua Hui – perhimpunan Tionghoa di Hindia Belanda, lahir pada tahun 1928.

KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia).

Kenpeitai – Polisi Militer Jepang.

Kinro Hoshi – "Kerja Bakti", pengerahan massa dalam kerja tidak dibayar untuk meningkatkan produksi.

KNI (Komite Nasional Indonesia).

KOPI (Koperasi Indonesia) – koperasi yang didirikan untuk meringankan beban politik ekonomi perang, penyalur distribusi bahan kebutuhan pokok, semasa pendudukan Jepang.

KOPOR (Koempoelan Orang Perdjoeangan) – organisasi radikal orang-orang Cina di Pemalang, menuju Indonesia Merdeka.

KRI (Koperasi Rakyat Indonesia) – sebelum perang di Cirebon.

KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) – badan perjuangan putra-putra Sulawesi semasa revolusi 45.

Kromo – bahasa Jawa halus.

Lenggaong – gerombolan bayaran setengan bandit.

Mardi Utomo – organisasi pejabat pribumi tingkat rendahan dari keturunan yang tidak terlalu tinggi pada tahun 20-an, aktif di bidang sosial, untuk kepentingan sendiri dan menyaingi Sarekat Islam.

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) – berdiri tahun 1943, perubahan dari Majelis Islam Indonesia yang dihidupkan kembali oleh Jepang pada medio 1942 untuk menghimpun dukungan dari umat Islam.

MOSVIA (Middelbaar Opleiding Scholen voor Inlandsch Ambtenaren) – Pendidikan Lanjutan Untuk Pejabat Pribumi, hasil penggabungan OSVIA atau Sekolah Pendidikan Pejabat Pribumi pada tahun 1927.

Muhammadiyah – didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Haji Akhmad Dahlan di Yogyakarta, bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan. Dikenal sebagai organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia.

MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) – Sekolah menengah pertama berbahasa Belanda.

Nahdatul Ulama (NU) – Didirikan pada tanggal 31 Januari di Surabaya, untuk memajukan dakwah menurut empat mazhab, Syafii, Maliki, Hanafi, dan Hambali, dipimpin oleh para ulamanya. Aktif mendirikan masjid dan pesantren.

Nefis (Netherlands Eastern Forces Intelligence Service) – Dinas Intelijen Tentara Belanda.

NICA (Netherlands Indies Civil Administration) – Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk memerintah kembali

setelah Jepang kalah.

Negen Broters – Sembilan Bersaudara, kelompok oposisi lokal di Kota Tegal, dari para mantan anggota PNI-Baru.

Ngoko Bahasa Jawa rendah atau kasar yang lebih mencerminkan asas persamaan.

Noji Padi pejabat pengumpul padi semasa Jepang berkuasa.

Panitia Pemberesan Penahanan Politik (P4) – Dibentuk pemerintah untuk ikut menyelesaikan kasus tahanan politik setelah peristiwa Tiga Daerah dan mungkin juga setelah peristiwa 3 Juli 1946.

Paras (Partai Rakyat Sosialis) – Dibentuk oleh Sutan Syahrir, untuk mewujudkan masyarakat sama rata sama rasa.

Parindra (Partai Indonesia Rakyat) – Fusi dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia pada tahun 1935.

Parsi (Partai Sosialis Indonesia) – Dibentuk oleh Mr. Amir Syarifuddin.

Partai Sosialis – Lahir Desember 1945, hasil fusi Paras dan Parsi.

Partai Murba – Ddibentuk oleh para pengikut Tan Malaka, awal 50-an.

Partindo (Partai Indonesia) – Berdiri pada tahun 1931 oleh mantan anggota PNI.

PBI (Partai Buruh Indonesia) – Salah satu partai kiri setelah proklamasi.

Pekope (Penolong Korban Perang) – Sebuah koperasi di Pemalang yang didirikan oleh unsur-unsur pergerakan di masa Jepang.

Persatuan Perjuangan – Front politik menentang persetujuan Linggarjati.

Persi (Persatuan Sopir Indonesia).

Perpri (Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia) – Ormas Partindo.

Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia)-Tadinya: Pemuda Republik Indonesia.

Peta (Pasukan Pembela Tanah Air) – pasukan yang dibentuk oleh Jepang pada Oktober 1943.

PID (Politieke Inlichtingen Dienst) – Semacam intel politiknya Jaksa Agung, dibentuk pada bulan Mei 1916, untuk mengawasi parpol dan orang.

Pirukunan – Organisasi kaum priayi Pekalongan untuk mengimbangi pengaruh Sarekat Islam.

PKI (Partai Komunis Indonesia) – Lahir pada tanggal 23 Mei 1920.

PNI (Partai Nasional Indonesia) – Didirikan oleh Sukarno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung.

PNI-Baru (atau Pendidikan Nasional Indonesia) – oleh mantan anggota PNI yang kecewa atas pembubaran diri partai itu pada tahun 1932. Mohammad Hatta dan Syahrir memimpin PNI-Baru ini.

PKN (Penjaga Keamanan Negara) – Kepolisian di Tiga Daerah semasa awal kemerdekaan.

PPBI (Persatuan Penganggur Bangsa Indonesia) – tahun 30-an di Solo.

PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) – Perubahan nama dari: Partai Sarekat Islam (dulu Sarekat Islam) pada tahun 1929.

PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) – didirikan pada bulan Maret 1942 oleh "Empat Serangkai" pemimpin Indonesia, Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kyai Haji Mas Mansur.

RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Interneers) – Dibentuk setelah Jepang menyerah, guna memberi bantuan yang diperlukan oleh para tawanan perang di Jawa dan Sumatra.

Romusha – Tenaga kerja paksa semasa Jepang.

Sarekat Islam – lahir tahun 1912, perluasan dari Sarekat Dagang Islam, pada tahun 1916 beranggotakan sekitar 800.000 orang.

Sarekat Rakyat – Organisasi massa PKI sebelum perang.

Shu Sangi-kai, Dewan Penasihat Keresidenan.

SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) – vaksentral kiri yang ikut dibubarkan setelah terjadinya G30S/PKI.

SPI (Seluruh Pemuda Indonesia) – ormas pemudanya PNI-Baru.

THHK (Tiong Hoa Hwee Kwan) – Perhimpunan Tionghoa pada tahun 1900-an mendirikan sekolah-sekolah berbahasa pengantar Cina.

TKR (Tentara Keamanan Rakyat) – dibentuk melalui Maklumat Presiden pada tanggal 5 Oktober 1945.

VIPTW (Vereeniging voor Inlandse Personel Werken) – Perhimpunan pegawai pribumi Jawatan Pengairan sebelum perang.

VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) – Maskapai Hindia Timur Belanda.

VSTP (Vereniging voor Spoor en Tramweg Personel) – Sarekat Buruh Tram dan Kereta Api, sebelum perang, bercorak radikal.

VVV (Vak Voor Victorie) – Gerakan Untuk Kemenangan dibentuk oleh para pejabat Belanda ketika Jerman menduduki Belanda tahun 1940, bertujuan menghimpun kekuatan di sini.

Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap – Undang-Undang Mengenai Kaula Hindia Belanda, yang terdiri dari tiga golongan, yakni golongan Eropa, golongan Timur asing, dan golongan pribumi.

KEPUSTAKAAN

I. SUMBER ARSIP

A. BELANDA

1. Inventaris 201 Archief Procureur Generaal bij het Hoogerrechtshof (Arsip Negara Kerajaan Belanda) yang berjudul 'Omwentelingzaak te Pekalongan' (Peristiwa Revolusi di Pekalongan adalah sebuah file berisi dokumen persidangan pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan Peristiwa Tiga Daerah, yang disita dari Republik di Yogyakarta pada tahun 1946;

Berita Acara (proces-verbaal) dari tokoh berikut:

- R.M Harsono-R.M. Surio Sediono.
- Kartohargo pada 19.10.46, 23.10.46, 14.1.47.
- K. Mijaya pada 25.4.46.
- Widarta pada 16.2.46.
- Surat-surat Jaksa Agung RI kepada Jaksa/Penuntut Umum Pekalongan (1946-47).

Jawaban tertulis atas pertanyaan Jaksa/Penuntut Umum Pekalongan, S. Karioatmojo, dari:

- Bekas bupati Brebes, Sarimin, 31.1.46.
- Bekas bupati Pemalang, Raharjo, 20.6.46.
- Patih revolusioner Pemalang, dr. Muryawan (tak bertanggal) [1946]
- Penjabat Residen Suprapto, 15.7.46.
- Laporan dan Surat-surat Jaksa/Penuntut Umum Pekalongan, S. Karioatmojo, 1946-47.
- Pengumuman-pengumuman GBP3D (Desember 1945).
- Laporan tentang gerakan revolusioner di Adiwerna, 23.2.46.
- Surat-surat dari Partai Buruh Indonesia Cabang Tegal (Desember 1945)

- Laporan Para Pemimpin Revolusioner Pekalongan untuk Markas Besar TKR di Yogyakarta, 18.12.45.
- Risalah Rapat GBP3D tanggal 25.11.45.
- Guntingan pokok-pokok berita dalam harian-harian *Republik* tentang Peristiwa Tiga Daerah yang dibikin Belanda, 1946-47.

2. Bekas Menteri Urusan Jajahan, kini di bawah penguasaan Kementerian Dalam Negeri, Den Haag.

Mailrapporten (Mailr.)

- 151x/26 "De Communistische Beweging in de Residentie Pekalongan voor dan na de beperking van het vergaderrecht", terlampir dalam Jasper (Residen Pekalongan) kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 26 Januari 1926.
- 261x/26 Telegram Jasper (Residen Pekalongan) kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 3 Maret 1926.
- 397x/26 Surat Jasper (Residen Pekalongan) kepada Gubernur Hindia Belanda, 23 Maret 1926.
- 22x/27 "Communist Onlusten te Tegal."
- 354x/27 Schilling (Residen Pekalongan) kepada gubernur Jenderal Hindia Belanda, 28 Februari 1927, berjudul "Overzight Betreffende den politiek toestand in Pekalongan voor zoover deze verband houdt met de in November 1926 plaats gehad hebbende coounistische onlusten."
- 410x/27 (tidak berjudul).
- 184x/27 "Besluit der G.G.v.N.I.", 4 Februari 1927.

Memorie van Overgave

- Residen Pekalongan, J.E. Jasper, 5 Juni 1926, Mailr. 1503/26.
- Residen Pekalongan, J.J.M.A. Popelier, 1932, Mailr. 399/32.
- Residen Tegal, J.C.Brinks, 1930.
  Gubernur Jawa Tengah, J.C.Vos, 1932-37, Mailr. 100/37.
- Gubernur Jawa Tengah, P.J.van Gulik, 1930.

B. AUSTRALIA

File Surat-menyurat dari Arsip Nasional Australia berisi intelijen dan informasi tentang Hindia Belanda dari Departemen Luar Negeri antara 1944-46. File ini bernomor CRS.A1067, Item PI/46/2/7/1. Berikut ini yang dipertimbangkan:

- Laporan tiga orang Belanda yang melarikan diri dari Hindia Belanda.

- Situasi di Hindia Belanda, sampai 4 Januari 1944 di Jawa, dan di bagian Timur (tertanda) Ch. O.van der Plas, Melbourne, 19 Februari 1944.
- Laporan Tambahan tentang situasi Hindia Belanda, khususnya di Jawa (tertanda) Ch.O.van der Plas, Melbourne, 16 Juni 1944.
- Fortnightly Inteligence Report No.18, Far Eastern Bureu, British Ministry of Information, New Delhi, 16-30 September 1944.
- Intelligence Summary No. 2, 23 Oktober 1945.

C. INDONESIA

Dokumen-dokumen berikut yang tersedia di Sejarah Militer Kodam (Semdam) Divisi Diponegoro Jawa Tengah juga dipelajari:

- Transkripsi wawancara dengan bekas Penjabat Komandan TKR Wadyono "Peta di Daerah Pekalongan" tertanggal 24.9.67.
- Jawaban tertulis atas pertanyaan Semdam dalam bulan Februari 1959 dari:
- Muhammad Nuh, Barisan Pelopor, Tegal.
- Urip, Pemalang, pemimpin API.
- Ciptowidura, Komandan Batalyon TKR Pemalang.
- Ki Citrasatmaka, Ketua KNI Tegal.
- Memoar tertulis Wadyono "Peristiwa Tiga Daerah" tertanggal 24 September 1967.
- "Pola Hidup Organisasi Badan-badan Perjuangan Kelaskaran yang ada pada Tahun 1945-1950 dalam Wilayah Resimen Infanteri 12/ SUB. TERR. XII, 1 April 1959".

II. KUMPULAN DOKUMEN DARI MILIK PRIBADI

(Copy ada pada A. Lucas)

- Salinan surat-menyurat KNI Pekalongan dan Proklamasi milik Mr. Besar.
- Dokumen yang berkaitan dengan Kutil merupakan koleksi pribadi dari seorang anggota Semdam, Divisi Diponegoro, Semarang.

Catatan Harian:

- Raden Sudirman, bekas Wedana Brebes.
- H. Mawardi, bekas Wedana Brebes.
- Salim Bassiyul, pedagang Arab di Pemalang.

- Riwayat Sarjono-Jaswadi-Kadiman (keluarga K. Mijaya).
- Daud Siagian.
- Andi Penyamin, bekas pemimpin KRIS Tegal.
- Citrosuwarno, anggota KNI Pekalongan.

Surat-surat Pengangkatan (Besluit) dalam bulan Oktober 1945:

- Sudayu Wiroatmojo, sebagai Camat Petarukan.
- H. Toha, sebagai Camat Lebaksiu.
- Suleman, sebagai Camat Comal.
- Ki Citrasatmaka sebagai Patih Tegal.
- Suyatno sebagai sekretaris Kabupaten Pemalang.

Memoar dan Kenang-kenangan (Catatan sendiri—naskah ketikan)

- H. Muhammad Mukhson, "Sekelumit tentang peristiwa Tiga Daerah yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal dan Pemalang" (10 April 1973).
- Marnomo, "Biografi Sdr. Supeno, ex-Menteri Pembangunan dan Pemuda Republik Indonesia" (1975?).
- Marsum Hr, "Ceritaku; Percikan Peristiwa Bersejarah di Sekitar Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Daerah Tegal dan Sekitarnya" (1974).
- Marsum Hr, "Penilaian Saya Mengenai Apa yang Dikatakan Orang Peristiwa Tiga Daerah", 6 Agustus 1974.
  "Riwayat Hidup Mohammad Yunus Diponegoro" (Pemimpin API Tegal).
- Sabura Tamura, pembantu Residen Banyumas Iskaq Cokroadisuryo.
- Sarkowi Wiryohadiprabowo, "Riwayat Hidup/Perjuangan" (1972).
- Sarimin Reksodiharjo, "Kenang-kenangan dari Masa yang Silam"(Januari 1965).
- Sarli Memoar.
- Slamet Soenarjio, "Catatan Singkat Slamet Soenarjio dalam perjuangan kemerdekaan pemuda Tegal dalam 6 bulan sebelum dan sesudah Proklamasi R.I."
- Raden Sudirman, "Peristiwa 3 Daerah Pemalang Tegal Brebes 1945" (16 Oktober 1972).
- Sujono, "Gerakan Tiga Daerah" (1974).
- Sugirwo Pujoutomo, "Ikhtisar Perjuangan Politik dari tahun 1940 sampai akhir tahun 1949 di Daerah Pemalang Selatan" (1 Mei 1974).

- Suyatno, "Kisah nyata perjuangan Kemerdekaan RI Periode 1945-1950", (Agustus 1975).
- Soenarjio, "Peristiwa Tiga Daerah' di Kecamatan Ulujami" (1975).
- Sungkono, "Riwayat Hidup I", Jilid I.
- Sutejo, "Pengalaman saya sekitar permulaan Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Pekalongan" (Maret 1973).

III. JAWABAN TERTULIS ATAS PERTANYAAN PENULIS

- Amir (tokoh revolusioner Pemalang), 1975.
- Ipar laki-laki bekas residen Pekalongan Sarjio, 20.6.73.
- Juweni Wimbohandoko (komandan batalyon Tegal), April 1975.
- Marsum Hr (Barisan Pelopor Tegal), Februari 1973.
- Panji Suwarso (pemimpin Comal), September 1975.
- Susmono (wakil ketua KNI Kabupaten Tegal), November 1971.
- Toshio Ota (Wakil Residen Pekalongan semasa pendudukan Jepang), 2 Maret 1977, 5 Februari 1978.

IV. SUMBER-SUMBER LAIN YANG TIDAK BOLEH DITERBITKAN

a. "Daftar Nama-nama Perintis Kemerdekaan dalam Periode 1908-1945 dengan Sejarah Perjuangan Singkatnya." Buku Daftar Keanggotaan ini ada pada Ketua Perintis Kemerdekaan Cabag Tegal.
b. Jan M. Pluvier, "Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia tahun 1930-40" (terjemahan dari Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische beweging in Indonesia in de jaren 1930 tot 1942, diterjemahkan oleh Suwignyo, Yogyakarta, 1974).
c. "Tegal pada Zaman kemerdekaan" (1969) Bab 4 Sejarah Kabupaten Tegal-tidak diterbitkan (salinan pada penulis).

V. TRANSKRIPSI REKAMAN WAWANCARA YANG DILAKUKAN ANTARA 1971-JUNI 1976 DENGAN:

Al Masih (TKR Tegal); Mr. Besar (Residen Pekalongan); Juber (Seinendan Ketanggungan); Juhawir (Pesindo Kendalsari); Juweni (komandan batalyon TKR Tegal); Dusman (pemimpin pemuda Ketanggungan Barat); Harjowinoto (wedana Belik); Holle (Mantri Kehutanan Pemalang); Ilyas (aktivis Randudongkal); Iskak (santri Pemalang); Kasman Singodimejo (bekas Jaksa Agung RI'45); Kromo Lawi (nasionalis Pekalongan); Kusnadi (pemimpin Ketanggungan); Maryono (aktivis Comal), Marwadi (TKR Pemalang); Mulyoraharjo (bekas Lurah Pemurih); Ibu Pri (nasionalis Comal);

Sadikun (Barisan Pelopor Tegal); Sarino Mangunpranoto (pemimpin Pergerakan Pemalang); Sudharmo (TKR Pekalongan); Sugiono (nasionalis Pangkah); Sujono (Sekretaris Residen Pekalongan); dr. Suyono (dokter hewan Pekalongan); Suleman (Camat Comal); Supadi (pimpinan PKN Tegal); Suparjo (Camat Comal); Sutejo (pimpinan pemuda KNI Pekalongan); Suweno (aktivis Wiradesa); Panji Suwarso (aktivis Comal); Suwito (aktivis Comal); Subekhi (kemenakan Mr. Besar); Suprapto (wedana Pekalongan); Surip (aktivis Ketanggungan); Suwignyo (AMRI Slawi); Samsuri (pemimpin Ujungrusi); Warbo (pegawai Desa Ambowetan).

VI. WAWANCARA PRIBADI DENGAN 324 PELAKU SEJARAH

VII.SURAT KABAR HARIAN DAN LAIN-LAIN MAJALAH BERKALA

(tanggal dicantumkan di belakang sumber yang digunakan)

Antara (buletin harian, Jakarta), Kantor Berita Nasional Indonesia 1945-47.

Bintang Merah (mingguan/tengah bulanan, Tegal) Bagian Penerangan ALRI, 1946-47.

Boeroeh (harian, Yogyakarta), 1947-48.

Djangkar (mingguan/tengah bulanan, Tegal) Bagian Penerangan ALRI, 1946-47.

Indische Verslag, s'-Gravenhage/Batavia, 1931-39.

Kedaoelatan Rakjat (harian Yogya, 1945-1947)

Lasjkar (harian Solo), 1946-47.

Mahasin (bulanan, Pemalang) majalah Kabupaten Pemalang, 1971.

Merdeka (harian, Jakarta), 1946-47.

Neratja (harian, Batavia), 1918-23.

Penghela Rakjat (harian, Magelang), 1946-47.

Revolusioner (mingguan, tengah bulanan, Yogyakarta), 1946-47.

Warta Indonesia (harian, Semarang), 1945.

VIII. TESIS-TESIS YANG BELUM DITERBITKAN

Anderson, Benedict, R.O'G., 'The Pemuda Revolution, Indonesian Politics, 1945-1946' (tesis Ph.D., Universitas Cornell, 1967'

Cheah, Boon Kheng, 'A Contest for Post-War Malaya: Social Conflict, Agustus 1945-Maret 1946' (tesis Ph. D, Universitas Nasional, Australia, 1979).

Franke, R.W. 'The Green Revolution in a Javanese Village', tesis Ph. D., Universitas Yale, 1973).

Frederick, Wiliam H., 'Indonesian Urban Society in Transition: Surabaya 1926-1946' (tesis Ph.D., Universitas Hawaii, 1978).

Kanahele, G., 'The Japanese Occupation of Indonesia; Prelude to Independence' (tesis Ph. D., Universitas Cornell, 1967).

Larsen, George D., PETA: The Early Origins of the Indonesian Army (tesis M.A., Universitas Hawaii, 1970).

Onghokham, 'The Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century' (tesis Ph.D., Universitas Yale, 1975).

Price, Suzannah, 'Religion, Social Organization and Textiel Production in a Javanese Village' (tesis M.A. Universitas Nasional Australia, 1978).

Sundhaussen, Ulf, 'The Political Orientation and Political Involvement of the Indonesian Officer Corps 1945-1966; the Siliwangi Division and Army Headquarters' (tesis Ph. D., Universitas Monash, 1971).

Sato, Shigeru, 'The Japanese Military Administration and its Impact on the Peasantry of Java 1942-1945' (tesis PH.D. Universitas Griffith, 1990)

IX. LAIN-LAIN PENERBITAN

Ahmad, Hisyam, 1977, *Masyarakat Keturunan Arab di kota Pekalongan* (Bandung, Lembaga Kebudayaan Universitas Pajajaran).

Anderson, Benedict, R.O'G., "The Cultural Faktors in Indonesian Revolution", *Asis* 20, 65.

_____, 1961, *Same Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation, 1944-1945*, Cornell Modern Indonesia Project, Interim Report series (Ithaca, N.Y. Universitas Cornell).

_____, 1965, *Mythologi and Tolerance of the Javanese*, Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series (Ithaca, N.Y. Universitas Cornell).

_____, 1966, "Japan: The Light of Asia", dalam Josef Silverstein,(ed.), *Southeast Asia in World War II: Four Essays*, South East Asia Studies, Monograph Series, No. 7 (New Haven, Conn, Yale University).

_____, April 1966, "The Language of Indonesian Politics", *Indonesia*, No. 1

_____, October 1966, "The Problem of Rice" *Indonesia*, No. 2.

_____, 1972, " The Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946 (Ithaca, Cornell University Press).

_____, 1972, "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca, N.Y. Cornell University Press).

Ardinatakesuma, Idris, 1973, *Pemberontakan PETA di Blitar* (Yogyakarta, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada).

Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975, *Penerbitan sumber-sumber sejarah* No. 7, Sarekat Islam Lokal (Jakarta).

Asaa (Sydney), 1978, *Abstracts Conference Program*, Asian Studies Association of Australia, Konperensi Nasional Kedua.

Benda, Harry J., "The Beginning of the Japanese Occupation of Java", *Far Eastern Querterly*, Jilid XV.

_____, 1965, dalam James K. Irikura dan Koichi Kishi (ed.), *Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents*, Southeast Asia Studies, Translation Series, no. 6 (New Haven, Conn., Yale University).

Benda, H.J., 1958, *The Crescent and the Rising Sun* (Den Haag dan Bandung: W. Van Hoeve.

Benda, H.J., dan Ruth Mc Vey, 1960, *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents*, Cornell Modern Indonesia Project, Translation series (Ithaca, N.Y., Universitas Cornell).

Bloch, Mark, 1953, *The Historians Craft*, (New York, Vintage).

Boeke, J.H., 1946, *The Evolution of the Netherlands Indies Indies Economy* (New York, Institute of Pasific Relations).

Brackman, Arnold, 1963, *Indonesian Communism*: A History (New York, Praeger).

Brugmans, I.J., (ED.), 1960, *Nedherlandsch-Indie onder Japanese bezetting; Gegevens en dokuments over de jaren 1942-1945* (Franeker; Wever).

Buku *Kenang-kenangan Pembangunan Monument Pahlawan Pekalongan*, Pekalongan, tak disebut penerbitnya, 1964.

Buuridge, Kenelm, 1971, *New Haven, New Earth: A Study of Millenarian Activities* (Oxford, Basil Blackwell).

Departement of Economic Affairs, Central Bureau Of Statistics, 1947, STATISTICS, 1947, *Statistical Pocket of Indonesia 1941* (Batavia, G. Kolf & Co.).

Dingley, S. [Iwa Kusumasumantri?] [1926], *The Peasents' Movement in Indonesia*, International Agrarian Institute (Berlin, R.L. Prager).

Djoko, S., 1974, "Some Notes on the Tiga Daerah Affair: a Local Event in the Early Indonesian Revolution", *Masyarakat Indonesia* (Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia) tahun ke-1, no. 2.

Elson, R.E., 1978, *The Cultivation System and "Agricultural Involution", Monash University Working Party No. 14 (Melbourne).*

Elson, R.E., 1979, "Cane Burning in the Pasuruan Area: an Expression of Discord" dalam van Anrooij, Francien, dll. (ed), *Between People and Statistics. Essays on Modern Indonesian History presented to. P. Creutzberg* (Martin Nijhoff dan Royal Tropical Institute).

_____, 1984, *Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940* (Singapore, Oxford University Press dan Asian Studies Association of Australia).

Fisher, Charles A., (1969), *South-east Asia: A Social, Economic and Polical Geography* (London, Methuen & Co).

Fong, Yap Sin, 1954, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta, Saksama).

Furnival, J.S., 1949. *Netherlands Indies. A Study of Plural Economy* (Cambridge, Cambridge University Press).

Gandasaputra, R.A.A.S.M., 1952, *Kenang-kenangan 1933-1950*, Bagian II (Purwokerto, Serayu).

Gatot Mangkupraja, Raden, April 1968: "The Peta and My Relation with the Japanese, Indonesia", No.5.

Geertz, Clifford, 1963, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*, (Berkeley: University of California Press).

_____, 1964, *The Religion of Java* (New York: The Free Press).

Gelderen, J.van, 1961, "The Economic of the Tropical Colony", *Indonesian Economies, The Concept of Dualism in Theory and Policy* (Den Haag, van Hoeve).

Geuns M. Van, November 1911, "*Het Rietbrandenvraagstuck in Pekalongan", cetak ulang dari Soerabajasch* Handelsblad, tanggal 5, 6, 7.

Goor, J. Van, 1986, (ed.). *The Indonesian Revolution*. Conference Papers, Utrecht, 17-20 June 1986. Ultrecht Historische Cahiers jaargang 7 (1986) nr.2/3.

Hatta, Mohammad, 1071, *The Putera Reports: Problems in Indonesian Japannese Wartime Coorperation* (terjemahan dengan kata pengantar Wiliam H. Frederick), Cornell Modern Indonesia Project, Translation Series (Ithaca, N.Y., Universitas Cornell).

Hobsbawn. E.J., 1969, *Bandits* (London, Weidenfeld & Nicolson).

_____, 1974, *Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries* (Manchester, Manchester University Press).

Hoengoedia, 1921, "Verslag omtrent de Oeloe-Oleoe regeling in het Pemali Tjomal", *Indisch Bouwkundig Tijdschriift.*

Holt, Clare (ed.) 1972, *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca, N.Y. Cornell University Press).

Ileto, Reynaldo Clemena, 1979, *Pasyon and Revolution: Popular Movements in the Philipines, 1840-1910.* (Manila, Ateneo de Manila University Press).

Indonesia, Kementerian Penerangan, *Kami Perkenalkan* (Djakarta, penerbit tak disebut, tanggal tak disebut).

_____, Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah (Djakarta, sama dengan di atas).

_____, (1954?). *Lukisan Revolusi.* 1945-1950 (Djakarta, Penerbit tak disebut).

Jacoby, Erich, H., (1961) *Agrarian Unrest in Southeast Asia* (Bombay: Asia Publisher House).

Jeffrey, Robin, 1981, Asia: *The Winning of Independence.* (London, Macmilan).

Kahin, Audrey, R. (ed.), 1985, *Regional Dynamics of the Indonesian Revolution. Unity From Diversity* (Honolulu, University of Hawaii Press)

Kahin, George McT., 1952, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, N.Y. Cornell University Press).

Kartodirdjo, Sartono, 1966, *The Peasants, Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Cours and Sequel* (Den Haag, De Netherlandsche Boeken Steendrukkerij).

_____, Juni 1971, "Messianisme dan Millenarianisme dalam sejarah Indonesia" *Lembaran sejarah, 7*

_____, 1973, *Protest Movements in Rural Java* (Singapore, Oup).

_____, 1984, *Modern Indonesia. Tradition and Transformation, a Socio-Historical Perspektifive.* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press).

Kementerian Penerangan, Dinas Provinsi Djawa Tengah, 1946 *Djawa Tengah di dalam Setahun Republik* (Surakarta, Kementerian Penerangan Dinas Djawa Tengah).

Kertapati, Sidik, 1964, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, edisi ke-3 (Jakarta, Pembaharuan).

Klaveren, J.J. van., 1953, *The Dutch Colonial System in the West Indies* (Den Haag, Martinus Nijhoff).

Koesnodiprodjo (ed)., 1951, *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan2 Pemerintah Republik Indonesia, 1945*, edisi, diperbaiki (Djakarta, Seno).

Krapels, C.G.P., 1936, "De Verzorging van het Landbouw crediet in het

Regenschap Pekalongan", *Volkscredietwezen*, 24.

Kroef, J.M. van der, 1954, *Indonesia in the Modern World* (Bandung, Masa Baru).

Kusumasumantri, Iwa (1965?), *Sejarah Revolusi Indonesia: Masa Revolusi Bersenjata*, jilid II (Jakarta, Grafika, tak ada tanggal).

Leclerc, Jacques, "La Condition du Parti: revolutionnaires Indonesiens a la recherche d'une identite (1928-1948)", *Cultures et Development*, vol. X-1

Lockward, Rupbert, 1975, *Black Armada* (Sydney, Australasian Book Society).

Lucas, Anton, Desember 1974, My Story' and Other Sources: an Oral Approach to the Indonesian Revolution", *Masyarakat Indonesia*, tahun ke-1, nomor2.

_____, 1977, "Social Revolution in Pemalang, Central Java 1945", *Indonesia*, 24.

_____, 1982, "Masalah Wawancara dengan Informasi Pelaku di Jawa" dalam Koentjaraningrat dan Emerson, Donald K., (ed), *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat* (Jakarta, Gramedia).

_____, 1986, *Local Opposition and Underground Resistance to the Japanese in Java, 1942-1945*, Monash University Centre for Southeast Asian Studies.

McKay, E., (ed)., 1976, *Studies in Indonesian History* (Melbourne).

McVey, Ruth Th., 1965, *The Rise of Indonesian Communism* (Ithaca, N.Y. Cornell University Press).

Meijer, Ranneft, J.W., dan W. Huender, 1926, *Onderzoek naar den Belastingdruk op de Indische Bevolking* (Weltevreden, Landsdrukkerij).

Nasution, A.H. 1977, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: jilid 2, Diplomasi atau Bertempur*, bagian Sejarah Militer Angkatan Darat (Bandung, Angkasa).

Netherlands Indies Centraal Kantoor Voor De Statistiek, 1926, *Landbouwen Atlas vann Java en Madoera*, No. 33.

Netherlads, Staten Generaal, Tweede Kamer, 1956 *Enquete-commissie regeringsbeleid 1940-1945, militair beleid, terugkeer naar Netherlandsch-Indie* (8A dan B) (Den Haag, Staattsdrukkerij en Uitgeverij bedrijf).

Nordink, "Over de Woeker in de Afdeeling Pekalongan", *Blaadje voor het Volkscredietwezen* 13, 1925.

Nuh, Muhammad, Maret 1962 dan Juni 1962, "Peristiwa Tiga Daerah", bagian I dan II, dalam: *Penelitian Sedjarah*, III,1 dalam III.6.

Nijs. E. Breton de, 1975, *Bayangan Memudar: Kehidupan Sebuah Keluarga*

Indo (Jakarta, Pustaka Jaya).

Onderzoek *Naar de Mindere Welvaart der Inlandshe Bevolking op Java en Madura*.

Ixa Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Ekonomie van Desa en daaruit gemaakte gevolgtrekkingen. Deel I: Eigenlinjk Overzight van de Samentrekkingen deer Afdeelingsverslagen (1904-1906).

Ixc Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Economie van Desa en daaruit gemaakte gevolgtrekkingen. Deel III: Bijlagen van 'T Eigenlink Overzicht (Ixa).

"Over den Woeker in de Regentschappen Tegal, Brebes en Pemalang", *Blaadje voor het Volkscredietwezen*, 8,15 Agustus 1925.

Palmier, L.H., 1960, *Social Status and Power in Java* (New York, Humanities Press).

Pelzer, Karl J., 1948, *Pionner Setlement in the Asiatic Tropics* (New York, American Geographical Society).

Penders, Chr. L.M. (ed)., 1977. *Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942*. (Brisbane, Inoiversity of Queensland Press).

Poelosari-Rapport. *Onderzoek naar de voeding en voedings toestand der bevolking in Zuid-Pemalang in 1939-41*. Mededeeling No. 6 (Batavia, Instituut voor Volksvoeding, November 1941).

Poerwadarminta, W.J.S. 1939, *Baoesastra Djawa* (Batavia, Groningen).

Pusat SPBI [Sarekat Buruh Percetakan Indonesia?], *Dokumentasi Pemuda: Sekitar Proklamasi Indonesia Merdeka* (Yogyakarta, Badan Penerangan Pusat SPBI 1948).

Quinn, George, Januari-Juni 1975, "The Javanese Science of Burglary", *RIMA-Review of Indonesian and Malayan Affairs*.

Reid, Anthony, 1979, *The Blood of the People* (Kuala Lumpur, Oxford University Press).

_____, 1974, *Indonesian Nationalism Revolution* (Melbourne, Longmas).

_____, and Akira, Oki (eds.), 1986, *The Japanese Expereience in Indonesia: Selected Memoirs of 1942-1945*,(Athens, Ohio University Center of International Studies Monograph no. 72).

Scoot, James C., 1977, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven, Yale University Press).

Sejarah TNI-AD Kodam VII/ Diponegoro, *Sirganing Jaksa katon Gapuraning Ratu* (Semarang, Yayasan Penerbit Diponegoro, Maret 1968).

Sejarah tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Periode Perang Kemerdekaan) 1945-1950 (penerbit tak disebutkan, Dinas sejarah TNI-AL, 1973).

Sejarah Tentara Nasional Indonesia Komando Daerah Militer VII Diponegoro (Djawa Tengah, Semarang, Semdam, tanggal tak ada, 1963?).

Shimer, Barbara Gifford, dan Hobbs, Guy, 1986, *The Kenpeitai in Java and Sumatra.* (Selection from *Nihon Kenpeti Seishi* (Ithaca, Cornell University Modern Indonesia Project Translation Series No. 65.)

Shizua, Miyamoto, 1973, *Jawa Shuzen Shoriki* (catatan tentang Penghentian Perumusan di Jawa) (Tokio, Jawa Shusen).

Sjahrir, Sutan, 1968, Our Struggle (terjemahan dengan kata pengantar Benedict R.O'G Anderson). Cornell Modern Indonesia Project, Translation Series (Ithaca, N.Y. Universitas Cornell).

Smail, John R., 1964, *Bandung in the Early Revolution 1945-1946*, Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series (Ithaca, N.Y. Universitas Cornell).

Soekasno, Mr., 1936, "Grondwoeker als Gevolg van Crediettransacties in het Pemalangsche", *Volkscredietwezen*, 24.

Suprapto, Agustus 1958, "Peristiwa Tiga Daerah", *Skets Masa*, 17.

Suputro, 1959, *Tegal dari Masa ke Masa* (Djakarta: Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, Djawatan Kebudayaan, bagian Bahasa).

Sutherland, Heather, 1973, "Notes on Java's Regent Families: Bagian I", *Indonesia*, 16.

_____, 1973, "Notes on Java's Regent Families: Bagian II", *Indonesia*, 17.

_____, 1979, *The Making of Bureaucratic Elite, The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*, ASAA Southeast Asia Publication Series No. 2 (Singapore, Heinemann).

Tan Malaka, tak ada tanggal, *Dari Pendjara ke Pendjara*, jilid I,III (Djakarta, Widjaja) jilid II (Yogyakarta, Pustaka Murba).

Tas, S., 1974, *Indonesian The Underdeveloped Freedom* (New York, Bobs Merill Company).

Thompson, John, 1946, *Hubbub in Java* (Sydney, Currawong Publication Co.).

Thrupp, Sylvia L. (ed)., 1962, *Millenial Dreams in action. Essays in Comparative Study*-Studi Perbandingan tentang Masyarakat dan Sejarah, Supplement II (Den Haag, Mouten & Co).

Toer, Pramoedya Ananta, 1959, *Perburuan* (Djakarta, Balai Pustaka).

Turner, Victor, 1969, *The Ritual Process* (Chicago, Aldine Press).

Ushiyama, Mitsuo, tak ada tanggal, "Hokubu Sumatera Shusen No Ki (Catatan tentang Akhir Perang di Sumatera Utara) akan diterbitkan terjemahannya oleh Akira Oki dan Anthony Reid, mimeograph.

Utrecht, Ernst, 1974, *De Onderbroken Revolutie in het Indonesische Dorp* (Afdeeling Zuid-en-Zuidoosst Azie Anthropoligisch-Sosiologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam).

"Verslag van de Commissie der Woeker Bestrijding 1936", *Tijdschrift van het Recht* 146,1937.

Veur, Paul W., van der, 1969, *Education and Social Change in Colonial Indonesia*, Ohio University Centre for International Studies, Southeast Asia Program (Athens, Ohio).

VOLKSTELLING 1930.II Inheemsche Bevolking van Midden-Java en de Vorstenlanden (Batavia, Departemen van Ekonomiesche Zaken, 1935).

Wal, S.L. van der (ed). 1971, *Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Beetrekkingen 1945-1950* jilid I ('s-Gravenhage, Martinus Nijhoff).

Wallace, Anthony F., 1961, *Culture and Personality* (N.Y. Random House).

Wallerstein, I., 1966, *Social Change: The Colonial Situation* (N.Y. John Wlley & Sons).

Wertheim, W.F., 1947. "The Indo-Europen Problem in Indonesia", *Pacific Affairs*, X.

Wilson, Edmund, 1953, To The Finland Station. *A Study in the Writing and Acting of History* (N.Y. Doubleday Anchor).

Wulfften Palthe, P.M. van, 1949, *Psychological Aspects of the Indonesian Problem* (Leiden, E.J.Brill).

INDEKS

A

Abdullah, Kyai 218
Abdullah, Abbas 326
Abdulrakhman 327, 328
Abikusno 333
ABRI 239, 256
Aceh 4, 206, 316, 317
Adam Malik 209, 333
Adicondro, Mr. 301
Adiwerna 10, 16, 19, 28, 29, 154, 160, 161, 176-179, 183, 185, 221, 223, 225, 226, 230, 233, 255, 256, 278, 283, 336, 348, 362-366, 373
Aidit, D.N. 333, 358
Ajibarang 273
Akademi Ilmu Sosial 349
Aksi Militer 303, 345, 351, 357; *lihat juga* Belanda
Ali Fatah, Wali 298, 302
Aliarcham, 345, 349
Alimin 37
Ambarawa 240, 258, 262, 291, 354, 356, 364, 366, 367
Ambon 4, 65, 81, 86, 130, 132, 183, 184, 185, 188, 346, 362, 363
Ambowetan 49, 50, 68, 71, 72, 167, 378
Amerika Serikat 96, 103
Amir 81, 98, 121, 211, 244, 245, 246, 247, 249, 300, 303, 328, 329, 331, 332, 338, 344, 348, 352, 377
AMKA 111, 368
Ampelgading 54, 67, 68, 74
AMRI 99, 109, 111, 154-56, 179, 184, 206, 230, 236, 281, 326, 328, 330, 339, 345, 353, 362, 363, 368,
- Slawi 122, 157, 185, 204, 221-223, 225, 228, 229, 231-233, 235, 247, 252, 255, 256, 278, 284, 288, 300, 313, 328, 330, 351, 353, 357, 366, 378
AMRI-I (Islam) 235, 236, 368
Angkatan '45 98
Angkatan Laut 30, 254, 280, 385
Angkatan Muda Kantor 122, 209
Anwar, Rosihan 303, 304
API 98, 99, 121-123, 127, 128, 161, 178, 181, 184, 186, 200, 211, 217, 221-227, 237, 246, 254, 276, 279, 335, 344, 356, 363, 365, 368, 375, 376
Arab 10, 11, 17, 35, 37, 62, 104, 112, 121, 206, 219, 290, 335, 345, 346, 363, 375, 379
Pemuda -219, 363
Gerakan Pemuda Arab Indonesia, 219
Asy'ari, K.H. Hasyim 165
Australia 11, 33, 54, 87, 93, 207, 243, 301, 307, 308, 374, 378-381

B

Badan Pekerja 87, 125, 157, 242, 248-256, 266, 281, 288, 293, 306, 313, 315, 326-330, 338, 350, 352, 357, 363, 365, 368
Badan Pemberontakan Alim Ulama 262
Badrun, Kyai 186
Bahasa, peranan 81, 93, 182, 192, 207, 213, 218, 230, 385, *lihat* Jawa Dipo
~ Jawa 3, 44, 152, 182, 201, 202, 204, 248, 290, 316, 321, 369-371
Balapulang 169, 170, 187, 188, 223, 276, 287, 336, 348, 365
Bambang Basirun, R.M. 73, 74
Bandit 7, 16, 34, 147, 193, 370, 381, *lihat juga* Lenggaong, Barisan

Cengkrong
Bandung 18, 33, 78, 86, 181, 186, 187, 247, 254, 276, 279, 335, 350, 360, 362, 363, 371, 379, 380, 383, 385
Banjaratma 43, 116, 117, 188, 216, 235
Banjarharjo 11, 55, 58, 104, 162
Banten 4, 15, 62, 64, 65, 68, 69, 107, 316, 317, 333,'339, 341, 348, 352, 382
Banyumas 3, 106, 130, 133, 206, 279, 287, 289, 298, 354, 356, 357, 360, 361, 362, 363, 376
Banyuwangi 78, 301
Barisan Algojo 259, 260, 336
Barisan Banteng 262, 341, 342, 351
Barisan Buruh Indonesia 262
Barisan Cengkrong 150
Barisan Pelopor 55, 87-89, 91, 93-95, 98, 99, 102-104, 108-112, 120, 122, 124, 125, 130, 166, 176, 177, 180, 181, 187, 188, 221-225, 227, 228, 233, 237, 238, 249, 252, 257, 265, 269, 276, 308, 331, 339, 340
Batak, suku 116, 184, 185, 362
Batang 9, 10, 25, 32, 261, 262, 266, 317, 235, 336, 340-342, 350, 355
Batavia, *lihat juga* Jakarta
Batik, pengusaha 3, 9, 113, 269, 346
corak - 9
Belanda 1, 2, 5, 11, 30, 100, 102-104, 106, 107, 112, 118, 128, 151, 155-158, 168, 182, 188, 197, 198, 200, 201, 208, 210, 213, 218, 231, 234, 243, 251, 274, 302, 307, 308, 314, 315, 317, 329, 332, 346, 353, 354,
sebelum perang 6, 12, 21-29, 33, 35, 36, 46, 65, 69, 119, 169, 170, 177, 194, 195, 229, 357,
terhadap Republik 3, 14, 22, 38-41, 75, 78-80, 86, 96, 98, 101, 211, 233, 244, 261, 295, 296, 305, 310, 355, 356, 358, ; *lihat juga* NICA
Indo ~ 23, 35, 38, 116, 181, 183-185, 312
Aksi Militer 130, 187, 240, 256, 303, 309, 344. 345, 349, 351, 357
Pendidikan, 11, 100, 156,172, 209, 289; *lihat juga* ELS, HIS, MOSVIA, MULO, OSVIA
Belik 24, 48, 58, 59, 154, 159, 169, 253, 254, 336, 377
Bennedict, Anderson 43, 45, 89, 91, 94-96, 102, 106, 147, 162, 191, 192, 201, 257, 277, 292, 295-297, 299, 378, 379, 385
Bestuuracademie 368
Bestuurschool 368
Bisri, K.H. 229, 366
Birokrasi, *lihat* Elit Birokrasi
BKR 124, 127, 132, 133, 159, 160, 178, 221, 222, 229, 234-236, 276, 277, 280, 281, 357, 360, 362, 368
"BKR gelap" 234, 235
Blitar 78, 275, 313, 380
Blora 15, 201
Bogor 29, 81, 346
Boven Digul, *lihat juga* Digul
BP2 76, 87, 148, 158, 248, 275, 277, 355, 368
BP3 62,76,87,355
BPKKP 277, 368
BPRI 254, 262, 332, 333, 338, 368
Brebes 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 32, 46, 47, 50, 55, 58, 62, 66, 68, 72, 73, 89-91, 96, 98, 100, 101, 103-105, 115-117, 123, 126, 161, 162, 164, 165, 168, 176, 178-181, 188, 200-202, 212, 220, 221, 232, 234-241, 244, 247-254, 257- 259, 262, 273, 278, 279, 284, 286-289, 292, 303, 313, 317, 326-330, 334, 335, 340-345, 347, 348, 355, 357, 360, 361, 363-368, 373, 375, 376, 384
Budi Utomo 31, 202, 347, 368, 371
Budisucitro, Prof. Mr. 249
Bugel 159
Bumiayu 12, 32, 162, 169, 170, 181, 182, 188, 273
Bumijawa 48, 170
Bumirejo 166
Bung Kecil 82, 245, 247
Bunyamin 167

C

Cerih 148, 149, 157, 362
Chung Hua Hui , *lihat* Kakyo Sokai
Chuo Sangi-In 48, 51, 277, 369
Cibuyur 47
Cilacap 87, 347
Cina 1, 17, 55, 93, 111, 112, 115, 117, 187, 251, 258, 259, 335, 370, 372
peranan ekonomi 10-12, 43, 46, 49, 62, 90, 118, 119, 151, 121, 196,
kekerasan anti - 1, 40, 41, 117, 189, 235, 312, 322
sikapnya terhadap
perjuangan 27, 104, 111, 115, 117, 118, 151, 156, 158, 161, 277, 364,
lasykar pemuda - 118, 120, 121
dan Syarekat Islam 119
Ciptono 287
Ciptosatmoko 233
Ciptosawarno, M., 325
Coert, A.R., 101
Cokroadisuryo, Iskaq, Mr., 106, 107, 133, 287, 361
Comal 10, 12, 20, 26, 34, 35, 60, 63, 64, 67, 73, 74, 84, 85, 123, 150, 167, 170, 181, 188, 189, 194, 195, 197, 208, 216, 264, 285, 286, 344, 348, 350, 352, 353, 356, 365, 376, 377, 378
Comal Baru 63, 67, 82, 336, 344
Comite van Ontvangst 101, 369
Corvee 2, 30, 203, 311, 369
CPN (Partai Komunis Belanda) 296, 308
Cu Liep Goan 119, 120

D

Dai Nippon 42, 100, 113, 114, 369
Darmoprawiro,Sulaiman 247
Darul Islam 345, 356
Darum 167
Darusman 180
Darwis Jamin 254, 280
Daulat Rakjat, harian 355
Demak 24, 280
Demokrasi, front 78, 199, 201, 248, 258, 266, 296, 317, 320, 322, 330, 354, 369
Den Haag 33, 374, 380, 381, 382, 383, 385
Dewantara, Ki Hajar 347, 372
Digul 12, 33, 88, 91, 98, 109, 121, 210, 220, 230, 243, 247, 248, 249, 252, 307, 311, 313, 327, 328, 355
Digulis 91, 121, 220, 247, 248, 252, 307, 311, 313, 355
Dimitrov, garis 78
Dimyati, Haji 150
Dombreng, aksi 149, 155, 157, 159, 162, 167, 175, 199, 204, 205, 312, 322, 362, 369
Domei, kantor berita 116
Dukuhturi 223
Dukuhwaringin 184
Dulgani, Haji 74, 75, 195
Duryatman, K.H. 276, 277

E

Effendi, H.M.Z. 325
Elit Birokrasi, reaksi terhadap proklamasi 369, *lihat juga* Pangreh Praja
ELS 345, 369
Eropa 10-12, 18, 19, 21, 25-27, 83, 185, 202, 233, 311, 345, 369, 372
Indo - 181, 182, 184, 187-89; *lihat* Indo
Etis, politik 13

F

Fascisme 89, 303;
front anti - 78, 90, 91, 313
FDR 354, 369
Feith, Herbert, 7
Filipina 316
Foulcher, Keith, 7
Fonds Kemerdekaan 112, 180, 337, 364
Freemasons 101
Front Demokrasi 78, 296, 354, 369
Front Rakyat, *lihat* GBP3D
Fujinkai 54, 275, 369

G

Gabungan Angkatan Muda Indonesia 122, 209
Gafi, K.H. Abdul 273
GBP3D 242, 255, 257-259, 26-269, 281, 283, 284, 291, 292, 294, 299, 306, 313-315, 321, 327-331, 337, 339, 344, 349, 350, 354, 357, 366, 368, 373, 374
  sikap terhadap TKR 260
Genchi Jikatsu 42, 274, 369, *lihat juga* Swasembada
Gentoloyo Noyo Genggong 35, *lihat juga* Lenggaong
Gerindo 31, 78, 79, 98, 269, 333, 351, 358, 369
Gill, Henry 186, 188, 362
GPII 256
Gula, pabtik 2, 10-13, 16-22, 24, 25, 29, 30, 40, 42, 43, 54, 60, 67, 70, 79, 98, 105, 114, 116-118, 123, 127-130, 150, 151, 154-156, 162, 170, 179, 181-184, 186, 187, 188, 197, 210, 216, 223, 225, 233, 235, 240, 247, 248, 252-254, 258, 267, 274, 275, 285, 305, 311, 336, 344, 353, 355, 362
Gunseikanbu 112, 369, *lihat juga* Dai Nippon; Jepang

H

Hargono, Sugeng 98, 234, 237, 288
Hardjosudarmo, 325
Harjoprayitno, Marsum 351
Harjosubroto, Ngadiman 298
Harjowiryono, R.M. 148
Hatta, Mohammad, Drs. 69, 70, 76, 87, 95, 96, 104, 106, 178, 241, 251, 284, 304, 307, 313, 314, 333, 371, 372, 381
Heiho 44, 76, 88, 184, 188, 222, 267, 270, 277, 368, 369
Hendromartono, Mr. 333
HIS 26, 32, 86, 170, 344, 346, 347, 348, 350, 353-356, 369
Hizbul Wathan 351
Hizbullah 166, 178, 209, 219, 269, 282, 284, 285, 286, 347
Hokokai 102, 112, 124, 348, 351, 352, 361, 369
Holle, K 65, 81, 82, 83, 85, 346,
Hugeng 132, 227
Hugeng, Meri 132

I

Ibu Pri 82, 84, 245, 348, 352, 377
Idris 150 *lihat juga* Barisan Cangkrong
Idris, K.H. Iskandar 133, 229, 230, 231, 255, 256, 269, 270, 273, 277, 289, 315, 346, 357, 365
Ijon, sistem 17
Iksan, Haji 224, 225
Ilham, 150
Ilyas, H.Mohammad 287, 377
Indische Marine Bond 350, 369
Indo 7, 11, 38, 116, 176, 177, 181-185, 188, 189, 222, 231, 235-237, 312, 316, 322, 362, 363, 384, 386; *lihat juga* Belanda; Eropa
Indonesia Muda 31, 33, 87, 98, 208, 301
Inggris 93, 94, 96, 160, 183, 184, 200, 231, 240, 267, 280, 282, 332, 353, 354, 361, 363, 364, 367
Islam 1, 2, 32, 35, 76, 104, 105, 117, 125, 152, 167, 170, 195, 198, 200, 205, 206, 212, 213, 219, 220, 221, 229, 230, 233, 235, 252, 255-258, 267-270, 274, 282, 284, 299, 317, 321, 345, 346, 350, 365-368,
  guru-guru - 273
  kepemimpinan - 7,71, 75, 153, 162, 165, 166, 234, 250 , 285, 297
  - kiri 12, 27, 290, 289
  - modernis 12, 31, 370
  - nasionalis 71, 99, 232, 251, 289, 290, 293, 314, 315, 316
  - ortodoks 10, 251
  studi club 87
  pendidikan, *lihat* Pesantren; HIS Muhammadiyah
Ismail, Haji Hassan 270, 271, 282, 285
Ismono 327

J

Jakarta 4, 6, 40, 71, 77, 78, 91, 94, 95, 99, 100, 102, 103, 106-110, 130, 152, 154, 155, 157, 160, 182, 382, 183, 184, 188, 204, 209, 240, 241, 245-250, 254, 260, 277, 280, 281, 284, 291, 292, 294, 301, 303, 310, 311, 320, 323, 330, 333, 344, 346, 347, 350-355, 358, 360-363, 365, 368, 378, 380-385
Janur Kuning 156, 206, 207, 225, 285
Jatibarang 176, 179, 184, 188, 235, 236, 247, 248, 251, 252, 362
Jatikusumo, kolonel 277, 281, 362
Jawa Dipo, gerakan 202, 204, 369
Jawara 317, *lihat juga* Lenggaong
Jayadiwangsa, Sudharmo, Mayjen 7, 231
Jember 78, 301
Jepang, pendudukan 1, 2, 6, 7, 25, 31, 39, 40, 43, 46-48, 53, 57, 59-61, 64, 65, 68, 69, 72-90, 93, 97-105, 112-114, 116, 118-122, 124, 131, 134, 147, 150, 151, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 164-172, 174, 177, 178, 182-184, 187, 189, 192, 193, 195, 198, 199, 201, 206-209, 218, 220, 225, 229, 233, 238, 243, 244, 247, 248, 253, 258, 261, 265, 268, 269, 273-277, 280, 282, 286, 288, 289, 292, 295, 296, 300, 302, 307, 308, 313-315, 317, 332, 333, 336-338, 344-348, 350-352, 354-358, 360, 363, 368, 369, 370-372, 377
  politik ekonomi – 42, 44, 45, 49-52, 54, 55, 63, 67, 70, 71,91, 312, 334
  tentara darat – 45
  akhir kekuasaan – 50, 95, 96, 106-111, 115, 128-133, 154, 179, 361, 362
  lihat juga Kenpetai
Jokosujono 314, 348, 354
Joko Suryo 7
Jombang 165, 170
Jong Islamieten Bond 347
Jong Java 301, 347
Joyodiningrat, Abdul Madjid,Mr 296
Junaid, A. 7, 109, 293, 295
Jusuf, Letnan 260, 280
Jusuh. Mohammad, Mr. 33, 260
  "PKI Jusuf" 260, 333

K

Kadarisman 7, 114, 125, 177, 225, 226
Kajen 153, 155, 156, 159
Kakyo Sokai 120, 158, 369, *lihat juga* Cina
Kamijaya, *lihat juga* Mijaya, K.
Karangcegak 2, 15, 28, 29, 98, 165
Kardinah, R.A. 24, 25, 226, 283
Karioatmojo, jaksa 232, 262, 267, 268, 299, 300, 303, 360, 373
Kartini, R.A. 25, 226, 283, 357, 363
Karto 168
Kartodirdjo, Sartono 192, 193, 194, 196, 198, 382
Kartohadikusmo, Sutarjo 96
Kartohargo 62, 98, 103, 104, 123, 234-236, 240, 241, 249-252, 259, 262-264, 266, 279, 284, 287, 300, 302, 328, 330, 332, 347, 348, 373
Kastam 167
KBI 351, 358, 369
Kedaulatan Rakyat, harian 246, 304, 314
Kedungbanteng 127
Kedungwangi 270
Kejambon 86, 88, 161, 364
Kemantran 223, 274
Kendal 277, 332, 347, 354
Kendalsari 150, 172, 377
Kenpeitai 65, 71, 72, 75, 80-84, 87, 93, 97, 102, 124, 128-133, 148, 154, 156, 168, 178, 225, 227, 254, 288, 289, 351, 354, 362, 369, 385
Kenzie 188, 189
Ketanggungan 32, 72, 98, 105, 162, 188, 248, 249, 347, 355, 364, 377, 378
Khamzah 161, 227, 365
Kinro Hoshi 44, 61, 62370
KNI, 32, 60, 66, 88, 95, 103, 109,

111, 114, 129, 132, 152, 156, 168, 169, 177, 179, 185, 205, 209, 210, 219, 228, 229, 232, 233, 238, 240, 253, 262, 267-269, 277, 299, 301, 302, 308, 309, 313, 325, 326, 330, 333, 364, 365, 368, 370, 375-378
Pusat 124, 245, 276, 313
Badan Pekerja Pusat 242, 248, 249, 306, 313, 328
Daerah 107, 110, 112, 114, 125, 126, 128, 154, 155, 224, 221, 350,
Kabupaten 107, 112, 124-126, 211, 221, 222, 224, 225, 227, 234-236, 241, 245, 248, 249, 252, 288, 328, 363,
Kecamatan/Desa 124, 127, 157, 160, 173, 178, 232
Kolopaking, Sumitro 298
Komunis, aliran 290, *lihat juga* **PKI**
Koperasi 32, 33, 46, 47, 50, 59, 70, 71, 89-91, 122, 123, 158, 166, 250, 258, 292, 336, 337, 355, 370, 371
KOPI 70, 71, 122, 370
KOPOR 119, 120, 370
Korupsi 25, 38, 39, 45, 48-50, 69, 72, 73, 75, 91, 149, 155, 164, 167, 168, 173, 218, 227, 312, 320, 322
cara-cara 45
Krasak 66, 168, 173
KRI 89, 90, 355, 370
KRIS 99, 188, 238, 271, 365, 370, 376
Kromo, bahasa Jawa 182, 201, 203, 248, 370, 377
Kromo Lawi 30, 31, 63, 64, 75, 76, 98, 102, 103, 108, 219, 288, 289, 350, 351, 360, 377
Kudus 29
Kumiai 46, 47, 50, 59, 65, 348
Kusnadi 377
Kuswandi 178
Kutil 151-157, 179, 204, 206, 211, 222, 225, 229, 230, 232, 253-255, 281, 286, 299, 301, 309, 310, 366, 375; *lihat juga* **Talang**

L

Lasem, kurir 64, 82, 84, 85, 151, 172, 313
Lasykar Pemuda Tionghoa, *lihat* **Cina**
Lebaksiu 159, 160, 168, 221, 363, 364, 376
Lemahduwur 160, 178
Lenggaong, 35, 37, 71, 172, 194, 195, 233, 286, 310, 316, 356, 370
sebelum perang **36, 71, 193**
dalam revolusi sosial 115, 147, 149-151, 159, 160, 166-189, 322
dengan kelompok agama 156, 169-171, 173, 235, 368, 370
dengan kelompok nasionalis 160, 222
dengan kelompok komunis, lihat **PKI**
lihat juga **Barisan Cengkrong; Kutil**
Linggarjati, persetujuan 308, 358, 371
Locomotiev, harian 348
Losari 10, 162, 165
Lowokwaru, penjara 243, 245
Lucas, Kadar 7
Lukman. M.H. 148, 352

M

Madiun 293, 298, 359,
peristiwa ~78, 213, 351, 354
Magelang 229, 239, 301, 305, 354, 357, 365, 378
Makdun, Kyai 156
Maksum 7, 202, 203, 236, 240, 249, 270, 289
Maksum, K.H. 156
Manado 188, 362, 363
Mangunharjo, Subagyo 76
Manu, Tandiono, Mr. 301, 302
Mao Tse Tung 259
Mardi Utomo 23, 169, 370
Margasari 54, 164, 186, 336,.357
Marjono 156, 224, 225, 365
Marxisme 29, 78, 344; *lihat juga*

PKI; Komunis
Masyumi 104, 166, 250, 251, 256, 299, 370
Mawardi, Haji 230, 364, 365, 366, 375
Meida, Laksamana 102
Melik, Sayuti 78-80, 227-232, 241, 250, 258, 260, 261, 262, 278, 288, 289, 305, 332, 351, 358, 365
Menara Merah, majalah PKI 78, 80, 85, 86
Merdeka, harian 303,
Merdeka, hotel 271
Mijaya, K 82, 98, 211, 228, 241, 242, 244, 245, 247-249, 251, 252, 255, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 266-271, 282, 283, 295, 300, 302, 303, 305, 313, 314, 327, 330, 336, 348, 349, 352, 358, 367, 373,
Militer 280, 295, 303, 312, 317, 321, 357, 365, 375,
pandangan tentang "Tiga Daerah" 273, 281, 282, 301, 315,
peranan mengakhiri "Tiga Daerah" 271, 287, 288, 289, 300
lihat juga Peta; Heiho; BKR; TKR
Mimbar Boeroeh, harian 348
Misbach, Haji 98
Miyamoto 42, 44, 53, 56, 58, 61, 64, 385
Moga 54, 148, 157-159, 169, 170, 194, 299, 353, 362
Mokhidin, Kyai 225, 230, 365
Mokhtar, Kyai 74, 225, 230, 365
Moskow 257, 260, 296, 320, 321, 344
Mosvia 177, 178, 234, 278, 298, 357, 370
Mountbatten, Lord 96, 184, 361
Muangthai 316
Mudasir 288
Muhammadiyah 31, 32, 70, 170, 229, 230, 255, 262, 269, 270, 273, 274, 289, 314, 315, 346, 347, 348, 350, 351, 365, 370
lihat juga HIS
PKO 170; lihat juga PKO
Mukhlis 285
Mukhsan 236
Muklas, Haji 98, 148, 345
MULO 32, 86, 209, 231, 301, 346, 353, 355, 370
Murad 292
Murba, Partai, *lihat* Partai Murba
Muroso 245, 293, 294, 367
Murtolo 299, 300
Muryawan, dokter 57, 76, 119, 220, 373
Musso 180, 244, 334, 358, ; *lihat juga* PKI
Musthapa, S. 244, 246, 297, 364

N

Nasi Pongol 62, 181, 208
Nasionalis, 31, 117,
faham 32, 118, 119, 257,
gerakan 117, 118, 200, 251, 351, 325
kalangan 33, 62, 71, 91, 94, 95, 102, 107, 108, 113, 121, 122, 126, 156, 165, 197, 219, 220, 244, 262, 295, 328,
dengan Islam 230, 232, 255, 290, 314, 315, 316
peranan melawan Jepang 75, 76
anti - 23
Nasron 219
Natsir, 218, 273, 301
Nefis 287, 370
Negen Broeders 86, 88, 91, 94, 95, 98, 101, 107, 112, 114, 124, 125, 221, 253, 355
Nganjuk 78
Ngoko, bahasa Jawa 44, 202-204, 248, 316, 371, 369
NICA 130, 152, 154, 160, 175, 176, 187, 218, 224, 227, 230, 235, 260, 261, 269, 293, 299, 304-306, 333, 334, 337, 340, 370
gerakan anti - 154, 183-186, 188, 189, 209, 235, 271, 332, 362,
Noji Padi 47, 48, 49, 50, 68, 72, 371; *lihat juga* Padi
Nonaka 133
NU (Nahdatul Ulama) 12, 32, 165, 315, 370
Nuh, Mohammad 88, 89, 98, 101,

112, 113, 123, 176, 177, 180, 222, 249, 253, 269, 276, 282, 298, 300, 331, 350, 375, 383

O

Oey Wan Yoe 329, 330
Oka, T., kapten 133
OSVIA 100, 354, 370
Ota, Toshio 43, 44, 67, 75, 183, 377

P

Pacul 35, 157, 232, 233, 345
Padi 10, 18, 21, 29, 36, 41, 87, 148, 149, 158, 166, 173, 211, 371
penggilingan - 11, 50, 119, 235
wajib setor - 44-49, 56, 62, 73, 74, 147, 164, 273, 312
penjatahan - 50-53, 58, 59, 65, 72, 148
distribusi masa revolusi sosial 206, 253
lihat juga Noji Padi
Pagongan 29, 151, 155, 225, 230, 233, 363, 365
Pajak, beban 2, 15-19, 22, 23, 26, 28, 30, 43, 44, 46, 48, 69, 198, 203, 259, 311, 312, 357
desa - 15
pendapatan tanah 15, 16
Palang Merah 87, 132, 357
Pamuji 78, 79, 80, 358
Pangkah 19, 20, 25, 40, 43, 54, 65, 66, 101, 126-128, 151, 186, 188, 201, 210, 222, 223, 233, 366, 378
Pangreh Praja 228, 229, 292, 294, 295, 298, 299, 304, 306, 311, 321, 353,
sebelum perang 20, 23, 36-38, 40, 43, 44, 73, 76, 91, 174, 192-194, 201, 203, 313, 315, 360,
semasa jepang 23, 51, 57, 61, 62, 69, 70, 75, 312, 357,
sikap terhadap proklamasi 95, 113, 152, 137, 234, 243,
dalam revolusi sosial 88, 100, 122-128, 150, 159, 161, 164, 165, 175-177, 179, 183, 189, 191, 199, 200, 202, 209, 211, 212, 213, 215, 221-224, 230, 232, 234, 235, 237-239, 241, 247, 249, 250, 253, 261, 365, 367
hubungan dengan militer 273, 274, 277, 278, 286, 356
lihat juga Elit Birokrasi; MOSVIA; OSVIA
Panitia Pemberesan Penahanan Politik (P4) 298, 371
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 95, 124, 276
Pantjaran Nasional, harian 240
Parangtritis 308, 359
Paras 292, 367, 371
Parindra 347, 371
Parsi 99, 257, 260, 292, 339, 354, 364, 366, 367, 371
Partai Murba 333, 350, 371, 385
Partai Sosialis 99, 205, 249, 292, 293, 298, 301, 308, 309, 313, 333, 339, 364, 367, 369, 371
Partindo 31, 33, 38, 98, 123, 347, 351, 352, 369, 371
Parwoto 237
Pasarbatang 235, 236
Pasuruan 78, 381
Pati 70, 277, 301, 362
PBI 249, 251, 255, 265, 285, 308, 348, 371
PBKA 348
Pejabat Setempat *lihat* Elit Birokrasi; Pangreh Praja
Pekajangan 11, 12, 269, 270, 273, 282, 283, 284, 285, 286, 315, 347, 367
Pekalongan 1-9, 10, 11, 13-22, 24, 25, 27, 29-32, 35, 36, 39-41, 43, 45, 46, 48, 49, 51-53, 56, 58, 61, 63-65, 68, 72, 74-76, 80-83, 85, 87, 94, 97-99, 101-103, 107-113, 116, 123, 124, 126, 128, 130, 132-134, 147-149, 152, 157, 164, 165, 167, 175-177, 179, 181-183, 188, 191, 193, 198, 199, 201-206, 209, 211-213, 215, 216, 221, 226-232, 237-241, 244-246, 249, 250, 256, 257, 259, 261-271, 273-304, 306, 308-317, 321, 325, 330-333,

337-351, 353-357, 360-368, 371, 373-381, 383
Pekope 71, 85, 123, 371
Pelita Rakjat, harian 240, 248
Pemalang 1, 4, 7, 9-11, 16, 17, 22-24, 27, 31, 33, 35, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 70-72, 80-85, 94, 98, 99, 100, 117-123, 125, 126, 148-151, 153, 157, 158, 162, 164, 166, 169-173, 175, 181, 188, 194, 200, 207-211, 216-221, 229, 232, 241, 243-247, 249, 252-254, 260-267, 273-275, 278, 279, 284-286, 288-290, 292-294, 297, 300, 303, 313, 315, 321, 326-330, 335, 336, 338, 341-344, 347, 348, 351, 352, 356-358, 362-364, 366-368, 370, 371, 373, 375-378, 383-385
Pemandangan, harian 348, 351
Pemuda Arab, *lihat* **Arab**
Pemuda Istimewa 223, 254
Pendidikan Nasional Indonesia, *lihat* **PNI Baru**
Penghela Rakyat, harian 305
Perancis 89, 96
Perpri 98, 371
Persatuan Perjuangan 299, 334, 371; *lihat juga* **Tan Malaka**
Persaudaraan Setia Hati 28
Persi 33, 348, 352, 371
Pesantren 10, 35, 99, 165, 170, 171, 257, 345, 370; *lihat juga* **Santri**
Pesat, majalah 80, 358
Pesindo 105, 150, 206, 253, 262, 263, 265, 284, 299, 305, 341, 352, 369, 371, 377
sejarah pembentukan - 99
peranannya di "Tiga Daerah" 162, 172, 266, 283, 293-298, 339, 340, 342, 353
"kanan" di Pekalongan 163, 298
Peta 7, 44, 76, 81, 88, 123, 132, 133, 188, 222, 264, 269, 270, 273-278, 280, 284, 289, 347, 357, 368, 371, 375, 379-381
Petani 2, 10-21, 23, 27, 28, 34, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 71-74, 90, 100, 118, 119, 151, 154, 162, 168, 170, 173, 198, 201, 203, 211, 223, 251, 267, 274, 310-312, 348, 352
Petarukan 60, 74, 150, 164, 169, 176, 247, 364, 376
PID 29, 30, 31, 87, 98, 112, 120, 355, 357, 371
Pirukunan 23, 371; *lihat juga* **Mardi Utomo**
PKI 327, 328, 359, 364, 367, 371, 372
sebelum perang 2, 15, 27, 30, 36, 37, 98, 165, 213, 346, 351,
kegiatan di bawah tanah zaman Jepang77, 79-81, 120, 211, 243, 244, 344, 348, 349, 352, 354, 358,
peranannya dalam "revolusi sosial" 245, 260, 292, 296, 304
menarik unsur lenggaong 36, 152, 195
terhadap Islam 311
terhadap Militer 293
masalah strategi perjuangan 195, 258, 259, 307, 313, 314, 321
persaingan dalam kepemimpinan 261, 291, 296, 307, 308, 320, 359
lihat juga **Menara Merah; Musso; Persatuan Perjuangan; Sarekat Islam; Sarekat Rakyat; Widarta**
PKN 179, 180, 181, 201, 236, 255, 288, 326, 372, 378
PKNRI 180
PNI 11, 30, 31, 76, 86, 89, 98, 124, 257, 258, 288, 292, 295, 313, 327, 328, 350, 351, 354, 355, 371, 372
PNI-Baru 30, 76, 86, 89, 98, 257, 258, 327, 328, 292, 295, 313, 354, 355, 371, 372
Pokrol Bambu, peranan 34, 37, 38, 161, 227
Polisi, peranan sebelum perang 23, 28, 30, 31, 112, 201, 239, 350, 352
peranan di zaman Jepang 71, 74, 81, 87, 90, 154, 161,

nasibnya di zaman "revolusi sosial "
41, 70, 154, 167, 175, 176, 180, 187, 218, 222, 236, 254, 262, 265, 267, 270, 295, 340, pasca revolusi sosial 271, 282, 287, 310
masa proklamasi 122, 123, 125, 131 ; *lihat juga* PKN
Postdam, persetujuan 95, 96, 104
PPBI 348, 372
PRI 181, 246, 254, 297, 333, 344; *lihat juga* **Pesindo**
Priayi 26, 34, 91, 100-102, 109, 113, 118, 162, 170, 171, 173, 178, 188, 189, 191-193, 196, 201, 203-205, 209, 211, 213, 266, 274, 275, 283, 289, 298, 315, 316, 364, 368, 371; *lihat juga* **Elit Birokrasi; Pangreh Praja**
Pringgodigdo, Abdul Gafar, Mr. 361
Pringgohaditirto, Sutirto, R.A.A. 325
Protes, tradisi sosial 2, 3, 19, 49, 74, 179, 191, 193, 196, 198-200, 233, 310, 316, 346, 382
PSII 31, 32, 36, 98, 165, 232, 233, 266, 345, 372; *lihat juga* **Sarekat Islam**
Pulosari 23, 24, 169
Purwodadi 267, 277
Purwokerto 78, 130, 132, 277, 285, 286, 287, 336, 346, 353, 357, 381
Purworejo 258, 306, 350, 353, 354
Puspoyudo, Wiluyo 278, 283
Puspuyodo, Wiyoga 273
PUTERA 63, 69, 70, 75, 102, 288, 351, 352, 369, 372, 381

R

Ramlas 288, 326
Randudongkal 60, 99, 151, 216, 220, 290, 377
RAPWI 338, 372
Rasimin 277
Ratu Adil, gerakan 119, 197, 198, 199, 285; *lihat juga* **Ronggowarsito; Zaman Gila (Edan)**
Reid, Anthony 42, 44, 45, 56, 61, 64, 95, 124, 147, 202, 206, 305, 312, 370, 384, 386
Reksodiharjo, Sumantri 7, 40, 354, 376
Reksonegoro, Sarimin 24, 25, 26, 160, 226
Reksoputro, Sugono 29
Reksonagoro, R.A.A. 24, 25,
Rengasdengklok 95, 178, 333
Revolusioner, kesadaran 72, 101, 103, 170, 189, 204, 208, 209, 316, 317
dampak tradisi pangreh praja 189, 202, 203, 204
dampak tradisi protes 189, 193-200, 210,
dalam sandiwara perjuangan 200, 201
dalam pendemokrasian bahasa 201-204, 207, 208, 209
dalam aksi dombreng 204,205
dalam asas pemerataan 205,206
Riba, tukang 11, 17, 33, 37
Rizakota, suster, 185
Rokok, industri 11, 42, 60
Romusha 43-45, 61-69, 75, 81-83, 85, 87, 168, 226, 312, 348, 365, 372; *lihat juga* **Jepang; politik ekonomi**
Ronggowarsito, pujangga 197, 198; *lihat juga* **Ratu Adil; Zaman Gila (Edan)**
Rusia, Revolusi Oktober 89, 184, 335; *lihat juga* **Uni Soviet**
Rustamaji 210, 216

S

Sabilillah 29, 282, 284
Sahadat, Iman 226
Sahid 150, 151, 172
Said, Kyai 157, 158
Sakirman 222, 225, 228, 232, 247, 256, 284, 300, 328, 353, 357
Salatiga 274, 277, 281, 301, 362, 367
Saleh, Mohammad 249, 253, 360
Salim, Haji Agus 20
Sama Rata Sama Rasa 205, 206, 371

Samhuri 7
Samin, gerakan 15, 201
Samsuri, Haji 378
Sandang, penjatahan zaman Jepang 43, 48, 57, 58, 59, 60, 69, 73, 91, 253, 254, 275
distribusi masa "revolusi sosial" 128, 253, 254, 295
Sandiwara Perjuangan 200; *lihat juga* Revolusioner
Santri, tuan tanah 172
rakyat 312, 315, 316
miskin 173
lihat juga Pesantren
Sarekat Buruh Kereta Api 27, 97; *lihat juga* VSTP
Sarekat Islam 2, 20, 23, 26, 27, 31, 32, 97, 119, 148, 150, 195, 196, 198, 202, 204, 205, 210, 212, 232, 247, 257, 311, 314, 370, 371, 372, 380; *lihat juga* PSII
Sarekat Rakyat 2, 15, 27, 28, 29, 37, 98, 150, 165, 166, 173, 195, 220, 247, 255, 257, 311, 372; *lihat juga* PKI
Sarijo, residen 202, 203, 212, 245, 250, 253, 258, 263, 265, 266, 270, 281, 284, 289-293, 307, 340, 343, 353
Sarjono 211, 307, 348, 376
Sarli 76, 78, 98, 102, 108, 109, 302, 376
Sastroamijoyo, Usman Mr. 301
Sastromulyono, Mr. 31
Sastrosatomo, Subadio 292, 293, 295
Sastrosuworo, Suparto, R.M. 160
Scott, James 14, 15
Seinendan 54, 59, 64, 68, 72, 74, 87, 377
Sekolah-sekolah Islam 165, 170; *lihat juga* HIS Muhammadiyah
Sekutu 86, 91, 95, 96, 97, 105, 106, 108, 130, 229, 234, 240, 244, 248, 262, 291, 292, 315, 332, 361, 363, 364, 365, 366
Semarang 7, 24, 27, 29, 30, 64, 68, 78, 80, 85, 94, 99, 100, 101, 114, 129, 132, 227, 231, 232, 240, 244, 268, 271, 279, 280, 290, 297, 301, 310, 315, 332, 333, 345, 348, 350, 356, 357, 358, 362, 363, 364, 365, 367, 375, 378, 384, 385
front – 263, 267, 271, 281, 282, 385,
Semaun 195
Shu Sangi-kai 372
Sidik 161, 186, 187, 209, 223, 382
Sidik Arslan 297
Sihombing 116
Sinambela, K.M. 184, 185
Singgih, M. 227, 230, 365
Singodimejo, Kasman, Mr. 247, 249, 304, 306, 377
Sismadi 249, 257
Slamet 68, 69, 98, 161, 248, 328, 330, 332
Slawi 19, 67, 98, 99, 122, 157, 159, 183, 184, 185, 186, 188, 204, 209, 221, 222, 223, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 247, 252, 254, 255, 256, 260, 267, 270, 278, 281, 284, 285, 286, 288, 300, 310, 313, 328, 330, 336, 338, 339, 351, 353, 357, 362, 363, 366, 378
SOBSI 248, 346, 349, 372
Solo 9, 71, 79, 82, 85, 98, 113, 200, 238, 249, 280, 298, 335, 345, 348, 372, 378
Sosialis, *aliran* 1, 99, 205, 213, 219, 221, 248, 249, 292, 313, 340
SPI 98, 358, 372
Sragi 261, 262, 267, 285, 286, 341, 342
Stober, Victor 83
Subandrio 227
Subroto, Gatot 279, 298
Sudarsono, dokter 265, 292, 293
Sudirman, RD. 234, 236, 237, 238, 239, 273, 375, 376
Sudoyo 298
Sugito 278, 286
Sugiyono 285
Sugra 89, 292, 355
Suhadi 282
Suhar 159, 160, 282
Suharjo 269
Suharso 108
Suhodo 159

Suja'i, K.H.Abu 32, 36, 157, 230, 232-234, 249, 255, 257, 287, 314, 315, 345
Sujono 376
Sukarno 31, 62, 63, 95, 96, 98, 104, 106, 120, 124, 152, 157, 160, 178, 184, 185, 207, 223, 227-229, 241, 257, 277, 284, 288, 289, 291, 294-296, 303, 305, 307, 310, 314, 333, 361, 365, 371, 372
pandangannya tentang "Tiga Daerah" 291, 294, 295, 310, 314
Sukarso 211
Sukowati 65, 80-83, 86, 171-173, 243, 245, 246
"Sidang Sukowati" 245; *lihat juga*, **Hole, K**
Suleman 151, 219, 365, 376, 378
Sumantoro 283
Sumargo 210, 216
Sumarsono 297
Sumarto 216
Sumberharjo 274
Sumoharjo, Urip, Letjen 278
Sumpeno 108, 109
Sumurpanggang 223
Sunarjio 283, 365
Sunarto 89, 90, 355
Sungeb 113, 114, 115, 227
Supangat 71, 121, 123, 125, 126, 150, 151, 171-173, 210, 216, 219, 220, 232, 246, 247, 252, 254, 264, 278, 284, 289, 293, 294, 300, 301, 356, 364, 367
Supeno 31, 87, 95, 240, 298, 301-303, 306, 308, 309, 313, 356, 376
Suprapto, Hakim 302, 309, 360
Suprapto, R.M. Pj. Residen 233, 249, 250, 262, 263, 267, 282, 288, 365, 366, 373
Surabaya 27, 77-80, 99, 200, 207, 231, 244, 246, 259, 261, 267, 268, 292, 297, 298, 313, 322, 332, 333, 335, 350, 358, 361, 364, 366, 370, 379
Suroto, Suri 7
Suryo, R.A.A. 41, 101, 164
Suryo, Gunodo 164
Suryo, Suryono 164
Susmono 7, 25, 228, 355, 377
Suwignyo 7, 204, 219, 228, 230, 247, 248, 252, 253, 255, 284, 300, 327, 329, 344, 356, 377, 378
Suyono, dokter hewan 270, 378
Swasembada 10, 39, 42, 43, 53, 55, 57, 369; *lihat juga* **Genchi Jihatsu**
Syafi'i,K.H. 262
Syahrir, Sutan 206, 261, 284, 291294, 296, 297, 304, 305, 309, 313, 314, 330, 333, 339, 366, 371
Perdana Menteri 292, 293, 295,
Pandangan tentang "Tiga Daerah" 292, 293, 294, 295, 296
Syahruzah, Johan 292
Syarifuddin. Amir, Mr. 79, 243, 245, 246, 247, 257, 261, 278, 291, 292, 294, 296, 297, 304, 305, 307, 309, 314, 329, 333, 339, 344, 352, 354, 358, 364, 365, 371
posisinya terhadap "Tiga Daerah" 296, 297, 304, 305, 307, 309, 314,
Syatori, Kyai 250
Syirat, K.H. 262
Syukur, Haji 170

T

Talang 151-157, 176, 178, 179, 183, 205, 206, 222, 223, 225-227, 229, 230, 232-234, 255, 256, 273, 299
"Negara Talang" 295; *lihat juga* **Kutil**
Talib 286
Taman 59, 60, 153, 164, 169, 172
Taman Siswa, perguruan nasional 11, 32, 33, 120, 124
Tamuro, Saburo 133
Tan Jiem Kwan 119, 120, 245, 247, 300, 302, 327
Tan Ling Jie 298
Tan Malaka 52, 64, 228, 243, 260, 305, 333, 334, 339; *lihat juga* **Persatuan Perjuangan**
Tanah, partikelir 13, 14, 155, 156,
- bengkok 155, 171, 172
pembagian - 171, 258
rakyat kehilangan - 198

sewa - 311; *lihat juga* **Pajak**
Tanam Paksa, *sistem* 2, 12, 13, 311, 312
Tanaman Niaga 10
Tanjung 10, 11, 68, 69, 99, 115, 116, 117, 122, 236, 239, 249, 250, 287, 327, 328
Tarbu 150
Tarub 28, 165, 223
Tebu, perkebunan 10, 13, 18-22, 29, 36, 162, 187
Tebuireng, pesantren 165, 170
Tegal 1-4, 7, 9-11, 13, 15-17, 19, 22, 24-32, 35, 36, 39, 48, 55, 57, 60, 64, 65, 67, 68, 72, 73, 76, 81, 85-88, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 107, 109, 110-113, 115, 117, 118, 120-130, 148, 149, 152, 153, 157, 159, 160, 162, 164, 165, 168-170, 176-181, 183, 185-188, 194, 207, 209, 211, 219-230, 232-238, 240, 241, 244, 245, 247-261, 265, 267-271, 273, 274, 276-281, 283-289, 295, 299, 302, 303, 305, 308, 309, 313, 314, 319, 320, 326-331, 334-336, 338, 339, 341, 342, 343
Tegalarum 160
Tekstil, pabrik 11, 32, 57, 58, 60, 121, 127, 150, 155, 156, 253, 254, 256
Tempo, majalah 1
Temuireng 150
Tenun, industri 11, 32, 40, 60
Terauchi, Laksamana 361
THHK 119, 120
TKR 150, 155, 173, 176, 179, 185, 189, 204, 211, 212, 213, 221, 223-227, 229, 232, 234, 235, 237, 245, 254, 264, 265, 267-271, 291-294, 297, 302, 303, 307, 310, 316, 317, 331, 332, 339, 344, 347, 350-353, 355-358, 362-365, 367,
latar belakang TKR
Pekalongan 230, 231, 255, 256, 260, 261, 273, 274, 277-290, 315
"strategi" terhadap Islam 289, 290 ; *lihat juga* **Militer; Peta Semarang**
TKR Laut 254, 280, 281
TNI 344, 351, 354, 357, 384, 385
Tobari, Haji 165
Tokogi, Tokonami, Residen 360
Tomo, bung 116, 117, 235, 333, 368
Tonjong 14, 16, 23, 38, 50, 178, 192, 193
Trimurti, S.K. 79, 332, 339
Tupamahu, dokter 132
Turlan 185
Tuwel 182, 281

U

Ujungbaru 232; *lihat juga* **Ujungrusi**
Ujungrusi 29, 30, 152, 178, 179, 185, 222, 229, 230, 233, 254, 364, 378
menjadi ujung baru 232
Ulama, 256, 262, 317, 370; *lihat juga* **Islam**
Ulujami 72, 166, 170, 377
Umar, Kyai 127, 217, 218
Uni Soviet 244; *lihat juga* **Rusia**

V

Vietnam 316
VIPIW 348, 372
VOC 12, 24, 372
Volksfront 332
VSTP 27, 97, 327, 372
VVV 101, 127, 372

W

Wadri 217
Wadyono 7, 23, 38, 178, 211, 231, 271, 273, 275, 277-279, 281-284, 286, 289, 290, 293, 294, 301, 302, 364, 375
Wahyudi 180
Wanasari 176, 251
Warurejo 169
Watukumpul 169
Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap 118, 372
Widarta, Subandi 82, 241, 242, 249, 258-260, 298, 301, 329, 364, 367,
latar belakang keluarga 80, 358
peran dalam pergerakan 245, 247, 297, 313, 358

dalam kepemimpinan bawah tanah PKI 245, 297, 307, 308, 358, 364,
peran dalam "Tiga Daerah" 244, 245, 246, 247, 249, 291, 293, 294, 330, 331, 332, 334, 335, 338, 339, 346, 349,
pandangannya tentang revolusi 259, 296, 308
akhir hidupnya 297, 298, 314, 346, 355, 358
lihat juga PKI
Wijk,F.M. 187
Wilhelmina, Ratu 96, 347
Wimbohandoko, Juweni 275, 276, 279, 377
Wiradesa 40, 378
Wiroatmojo, Sudayu,Rd 364, 376
Wirogunan, penjara 300, 305
Wondoamiseno 32, *lihat juga* PSII
Wongsonegoro, Mr. 180, 227, 228, 363
Wonosobo 347, 354, 357

Y

Yamin, Muhammad.Mr. 305, 347
Yenan 259, 335
Yogyakarta 9, 64, 77, 192, 212, 213, 216, 231, 232, 259, 260, 265, 275, 278, 279, 281, 289, 291, 297, 298, 300, 301, 305, 306, 308, 319, 324, 333, 334, 364, 365, 370, 373, 374, 377, 378, 380, 382, 384, 385

Z

Zaini, Haji 99, 219
Zainuddin, Haji 165
Zaman Gila (Edan) 196; *lihat juga* Ratu Adil; Ronggowarsito

Flinders
UNIVERSITY
ADELAIDE • AUSTRALIA

Anton E. Lucas

lahir di Australia, datang ke Indonesia pertama kali dalam rangka studi bahasa dan sejarah Indonesia pada tahun 1970. Atas usul sejarawan Sartono Kartodirdjo, ia melakukan riset mengenai Peristiwa Tiga Daerah yang akhirnya menghasilkan tesis Ph.D-nya untuk Australian National University (ANU) tahun 1981. Sejak itu sampai sekarang, ia mengajar di Department of Asian Studies and Languages, Flinders University, Adelaide, South Australia. Karya-karyanya antara lain *Local Opposition and Underground Resistance to the Japanese in Java* (1986) sebagai editor, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi* (1989), *One Soul One Struggle, Region and Revolution in Indonesia*, versi bahasa Inggris dari *Peristiwa Tiga Daerah* (1991); *The Dog is Dead Throw it in the River: Environmental Politics and River Pollution in Indonesia*, yang ditulis dengan Arief Djati dari Yayasan AREK di Surabaya (2000), dan *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan* (2001), yang ditulis bersama Dianto Bachriadi dari Konsorsium Pembaruan Agraria di Bandung.

"Sebagai episode dari Revolusi Fisik ... Peristiwa Tiga Daerah merupakan gejala yang cukup unik serta sangat bermakna dalam konteks jalannya Revolusi secara keseluruhan ... Anton Lucas memaparkan kejadian-kejadian secara mendetail serta kaya raya akan fakta-fakta ..."

Dr. Sartono Kartodirdjo

"Peristiwa Tiga Daerah mengisahkan bagaimana revolusi ...disambut oleh rakyat setempat dengan pengertian dan persepsinya tentang revolusi sosial sebagai lanjutan Proklamasi Kemerdekaan.
(Sebuah) hasil pelaksanaan studi yang luas dan mendalam dengan metode sejarah lisan, studi literatur dan arsip."

Dr. Abdurrachman Surjomihardjo
Prisma, Agustus 1981

diterbitkan oleh:

RESIST BOOK

BACA&LAWAN

Seri Revolusi

Seri Revoulsi menghimpun gagasan, konsep, teori bahkan *celetuk*-an bagaimana revolusi menjadi pilihan yang mungkin bagi perubahan sosial. Bagaimanapun revolusi bukanlah wacana yang tunggal, segaris, apalagi stagnan dan final. Sejumlah pengayaan ide, kajian strategis, *sharing* pengalaman, bahkan penafsiran ulang atasnya mesti terus dilakukan. Begitu juga, revolusi membutuhkan eksplorasi kritik demi kompleksitas konsepnya, agar tak kehilangan kaitan dengan arus perubahan zaman. Seri ini diperuntukkan bagi eksponen gerakan yang memberi tempat bagi revolusi sebagai alternatif pilihan gerakan sosial, sekaligus bagi Anda yang mencurigai dan membenci kata revolusi.

ISBN 979372307-6

9 799793 723074